BUMN UNTUK INDONESIA

Perhutani

2020

Laporan Tahunan

Annual Report

PERUM PERHUTANI

SERVING PEOPLE, TAKING CARE PLANET FOR SUSTAINABILITY

SERVING PEOPLE, TAKING CARE PLANET FOR SUSTAINABILITY

Serving People, Taking Care Planet For Sustainability, driven by current financial performance (Profit), our future activities will focus on improving quality of people empowerment (People) and environmental sustainability (Planet).

“Serving People” emphasizes the importance of building a competitive advantage for forest village community by improving on-site business processes by prioritizing Simple Accountable and Transparent principles based on digital socio-partnership platform technology.

All of these initiatives are done by identifying current social issues and needs, strengthening collaboration with forest village community collectively as well as counselling and mentoring to build a competitive multi-product supply chain. Therefore, a business model transformation from product orientation to platform-based marketing will be established.

"Taking Care Planet" emphasizes that initiatives to improve and maintain forest resources are expected to be effective through implementation of redesigned forest resource management (SDH), improvement of plant management, handling of forest security disturbances and implementation of the SDH digitalization system. The redesign of SDH management is aligned to manage the product portfolio, building the carrying capacity of the environment and accommodating social dynamics based on current needs.

Improvements in crop management are carried out in adaptive-accommodative and flexible manners to determine the type and pattern of planting, however, still in line with the product portfolio strategy. Control and handling of forest security disturbances is carried out based on causes of damage with a paradigm shifting towards a service and collaboration approach.

"For Sustainability" emphasizes that all activities of the Company shall have a sustainable goal. The goal has become crucial and obligation for us to preserve the forests as only the sustainable forests will serve the Profit, People & Planet functions optimally.

MELAYANI MASYARAKAT, MERAWAT BUMI UNTUK KEBERLANJUTAN

Serving People, Taking Care Planet For Sustainability, menopang dari kinerja keuangan *(Profit)* sampai saat ini, aktivitas kita ke depannya akan berfokus kepada peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat *(People)* dan kelestarian lingkungan *(Planet).*

"Serving People" menegaskan pentingnya membangun keunggulan kompetitif untuk masyarakat desa hutan melalui perbaikan proses bisnis pada tingkat tapak dengan mengedepankan prinsip *Simple Accountable and Transparent* berbasis teknologi *platform digital socio-partnership.* Semua ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sosial saat ini, memperkuat kolaborasi dengan masyarakat desa hutan secara kolektif serta penyuluhan dan pendampingan untuk membangun rantai suplai yang multi produk secara kompetitif. Sehingga akan terjadi perubahan model bisnis dari orientasi produk ke pemasaran berbasis platform.

"Taking Care Planet" menegaskan bahwa upaya memperbaiki dan menjaga sumber daya hutan diharapkan dapat berjalan secara efektif melalui implementasi redesain pengelolaan sumber daya hutan (SDH), perbaikan pengelolaan tanaman, penanganan gangguan keamanan hutan dan penerapan sistem digitalisasi SDH. Redesain pengelolaan SDH ditujukan dalam rangka menata Portofolio produk, meningkatkan daya dukung lingkungan dan mengakomodasi dinamika sosial sesuai kebutuhan saat ini.

Perbaikan pengelolaan tanaman dilaksanakan bersifat adaptif-akomodatif dan fleksibel dalam menetapkan jenis dan pola tanam, namun tetap sejalan dengan strategi Portofolio produk tersebut. Pengendalian dan penanganan gangguan keamanan hutan dilaksanakan berdasarkan penyebab terjadinya kerusakan dengan perubahan paradigma menuju pendekatan melayani dan kolaborasi.

"For Sustainability" menegaskan bahwa segala kegiatan perusahaan yang dilaksanakan harus memiliki tujuan untuk berkelanjutan. Telah menjadi keharusan dan kewajiban kita semua untuk menjaga kelestarian hutan sebab hanya dengan hutan yang lestari, hutan dapat menjalankan fungsi Profit, People & Planet secara optimal.

Daftar Isi

Table of Contents

1 Penjelasan Tema
About Our Theme

2 Daftar Isi
Table of Contents

4 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer

5 Kesinambungan Tema
Theme Sustainability

6 IKHTISAR 2020
2020 Overview

6 Ikhtisar Kinerja
Performance Highlight

8 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlight

12 Ikhtisar Kinerja Operasional
Operational Performance Overview

14 Informasi Harga Saham
Information on Stock Price

14 Informasi Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi
Information on Bonds, Sukuk or Convertible Bonds

16 LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

18 Laporan Dewan Pengawas
Report from the Supervisory Board

32 Profil Dewan Pengawas
Profile of the Supervisory Board

38 Laporan Direksi
Report from Board of Directors

48 Profil Direksi
Profile of the Board of Directors

54 Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Pengawas untuk Laporan Tahunan 2020
Supervisory Board Statements of Responsibility on Annual Report 2020

55 Pernyataan Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Tahunan 2020
Board of Directors Statements of Responsibility on Annual Report 2020

56 PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

58 Identitas Perusahaan
Corporate identity

59 Jejak Langkah Perusahaan
Company's Milestone

60 Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History

62 Bidang Usaha
Business fields

64 Visi dan Misi Perusahaan
Vision and mission of the Company

65 Tata Nilai Perusahaan
Company Value

66 Logo Perusahaan
Company Logo

67 Komposisi Pemilik Modal
Shareholders Composition

67 Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure

68 Struktur Organisasi Perusahaan
Organization Structure

70 Daftar Entitas Anak dan/ atau Entitas Asosiasi
List of Subsidiaries and/or Associated Entities

73 Nama & Alamat Entitas Anak dan/ atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Kantor Pusat
Name & Address of Subsidiary and/or Branch Office or Head Office Representative Office

74 Nama dan Alamat Lembaga dan/ atau Profesi Penunjang
Name and Address of Institution and/or Supporting Profession

75 Kronologis Pencatatan Saham
Shares Listing Chronology

75 Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology

76 Wilayah Kerja
Operational Area

78 Informasi Pada Website Perusahaan
Information on Official Website

80 Peristiwa Penting 2020
Important Event 2020

82 Penghargaan & Sertifikasi
Awards and Certification

86 SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

100 ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion & Analysis

102 TINJAUAN EKONOMI MAKRO
Macroeconomic Overview

107 TINJAUAN INDUSTRI
Industry Overview

117 TINJAUAN BISNIS DAN OPERASI
Business and Operations Overview

141 PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA
Business Development Prospect

143 ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspect

145 TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Review

146 Analisis Laporan Posisi Keuangan
Analysis on Financial Position Statement

159 Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Analysis of Consolidated Statements of Income and Other Comprehensive Income

164 Analisis Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Cash Flow Analysis

168 Analisis Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Consolidated Statement of Changes in Equity Analysis

168 Analisis Rasio Keuangan Konsolidasian
Analysis on Consolidated Financial Ratio

172 Tinjauan Keuangan Lainnya
Other Financial Reviews

174 Struktur Modal
Capital Structure

176 Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitment for Capital Expenditure

177 Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment

178 Perbandingan Antara Target Pada Awal Tahun Buku dengan Hasil yang Dicapai (Realisasi), dan Target atau Proyeksi yang ingin Dicapai untuk 1 Tahun Mendatang
Comparison Between Target at Beginning of Fiscal Year with Results (Realization) and Target or Projection for Next Year

183 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Subsequent Material Information and Facts After Accountant's Report Datete

183 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)
Share Ownership Program by Employees and/or Management Implemented by the Company (ESOP/MSOP)

184 Deviden
Dividend

184 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Use of Proceeds from Public Offering

185 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or Transaction with Affiliated Parties

189 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan
Changes in Laws and Regulations That Have a Significant Impact on the Company

191 Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir
Changes in Accounting Policies Implemented by the Company in the Last Financial Year

194 Informasi Kelangsungan Usaha
Information on Business Continuity

195 Kontribusi Kepada Negara
Contribution to the Country

196 TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

198 Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance

212 Dewan Pengawas
Supervisory Board

226 Dewan Pengawas Independen
Independent Supervisory Board

228 Hubungan Afiliasi
Affiliated Relationship

230 Direksi
Board of Directors

250 Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi
Performance Assessment of the Supervisory Board and the Board of Directors

256 Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Pengawas, Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi
Meeting Frequency and Level of Attendance of the Supervisory Board, Directors, and Joint Meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors

265 Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi
Remuneration Policy for Supervisory Board and Board of Directors

270 Kebijakan Keberagaman Anggota Dewan Pengawas dan Direksi
Supervisory Board And Board Of Directors Members Diversity Policy

272 Sekretaris Dewan Pengawas
Secretary to the Supervisory Board

276 Komite-Komite Dewan Pengawas
Committees Under The Supervisory Board

278 Komite Audit
Audit Committee

285 Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

291 Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

296 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

302 Internal Audit
Internal Audit

302 Satuan Pengawas Intern
Internal Control Unit

312 Satuan Pengendali Internal
Internal Control Unit

316 Akuntan Publik
Public Accountant

319 Manajemen Risiko
Risk Management

344 Akses Informasi Perusahaan
Company Information Access

348 Perkara Penting
Litigation

354 Pedoman Etika Perusahaan
Code of Ethics

362 *Whistleblowing System*

374 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

375 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

387 Tanggung Jawab Sosial Terhadap Hak Asasi Manusia
Social Responsibility related to Human Rights

389 Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil
Social Responsibility Regarding Fair Operation

391 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat
Corporate Social Responsibility to the Community

400 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility on Environment

421 Tanggung Jawab Sosial Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Social Responsibility on Occupational Health, Safety and Employment (OHS)

433 Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pelanggan
Social Responsibility on Customers

443 LAPORAN KEUANGAN AUDIT
Audited Financial Report

Sanggahan & Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan. Perum Perhutani tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti. Laporan Tahunan ini memuat kata "Perusahaan", atau "Perum Perhutani" yang mengacu pada Perum Perhutani. Selain itu, kata "Kami" juga digunakan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama, atas pertimbangan kemudahan penyebutan Perum Perhutani.

This Annual Report contains various statements related to the Company's financial conditions, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of prevailing laws and regulations. These statements may contain the prospect of risk and uncertainty, to the possibility of differences with actual developments. Various forward-looking statements in this Annual Report were prepared based on assumptions on the current conditions, as well as projections on future situations related to the Company's business circumstances. Perum Perhutani cannot guarantee that documents whose validity have been confirmed will bring definite results. This Annual Report contains the word "Company", "Perum Perhutani", which refers to Perum Perhutani. In addition, the word "We" is also used on several occasions with similar function, due to the ease of mentioning Perum Perhutani.

Laporan Tahunan Perum Perhutani tahun 2020 bisa dilihat dan di unduh di website resmi Perum Perhutani

Perum Perhutani's 2020 Annual Report can be viewed and downloaded at official website of Perum Perhutani.

www. perhutani.co.id

Kesinambungan Tema

Theme Sustainability

Serving People, Taking Care Planet for Sustainability

Serving People, Taking Care Planet For Sustainability, menopang dari kinerja keuangan (*Profit*) sampai saat ini, aktivitas kita ke depannya akan berfokus kepada peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat (*People*) dan kelestarian lingkungan (*Planet*).

Serving People, Taking Care Planet For Sustainability, Driven by our current financial performance (Profit), our future activities will focus on improving quality of people empowerment (People) and environmental sustainability (Planet).

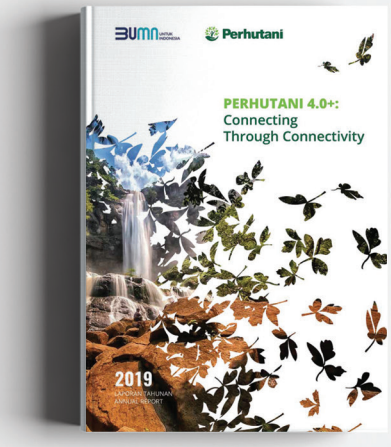

Perhutani 4.0: Connecting Through Connectivity

Tahun 2019 Perum Perhutani mengambil langkah eksekusi besar dengan mencanangkan "Perhutani 4.0: Connecting Through Connectivity" sebagai semangat perusahaan menyambut dunia baru dengan optimis.

In 2019 Perum Perhutani took a major execution step by declaring "Perhutani 4.0: Connecting Through Connectivity" as the spirit of the company to welcome the new world with optimism.

Execute Now!

Execute Now! merupakan cara kerja yang sangat penting bagi Perusahaan, dengan rencana investasi tahun 2018 lebih besar dari tahun 2017, dimana sebagian berasal dari *PROFIT* yang berhasil didapatkan untuk terus mengembangkan fungsi *PLANET* dan *PEOPLE* sesuai dengan misi yang diemban Perusahaan.

Execute Now is a way of work that is vital for the Company, with bigger investment plan in 2018 than 2017, where part of our PROFIT is intended to continuously develop PLANET and PEOPLE functions based on the Company' Mission.

Ikhtisar Kinerja

Performance Highlight

90%

VOLUME PENJUALAN KAYU

Pada tahun 2020 secara umum meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2019 walaupun masih dibawah target RKAP tahun 2020, Total realisasi volume penjualan kayu bundar tercapai sebanyak 811.587m³ atau 90% dari target RKAP tahun 2020. Dibandingkan realisasi penjualan periode yang sama tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 8%.

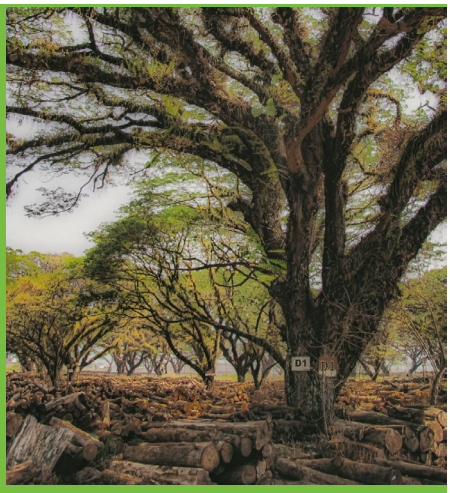

Timber Sales Volume was generally increased in 2020 compared to the same period in 2019 despite was still below the RKAP 2020 target, Total realization of timber sales achieved 811,589m³ or 90% of RKAP 2020 target. There is a 8% growth compared to sales realization in the same period in 2019.

4%

PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN (JATI)

Sampai dengan tahun 2020 tercapai 92% dari target RKAP tahun 2020 meningkat sekitar 4% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan untuk jenis rimba realisasi volume penjualan mencapai 88% dari target RKAP tahun 2020 atau meningkat sebesar 13% jika dibandingkan dengan penjualan tahun 2019.

Growth of Sales Volume (Teak)

As of 2020, achieved 92% of 2020 RKAP Target, or grew approximately by 4% if compared to 2019. However, for non-teak wood, the sales volume realization achieved 88% of the 2020 RKAP target or increased by 13% if compared to the sales in 2019.

Pengelolaan perusahaan diarahkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan perusahaan *(Profit)*, kelestarian SDH *(Planet)*, dan kesejahteraan masyarakat *(People)*.

Management of the Company is aligned to maintain balance of the Company's growth (Profit), sustainability of forest resources (Planet), and welfare of the society (People).

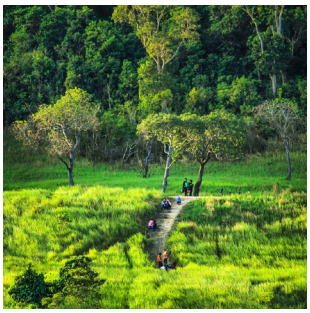

2.434.454,6 ha
Luas kawasan hutan yang dikelola
Area of managed forest

57,6%
1.403.373,2 ha
Hutan Produksi
Production Forest area

16,2%
394.212,1 ha
Hutan Produksi Terbatas
Limited Production Forest

26,2%
636.893,3 ha
Hutan Lindung
Protected Forest

101%
Penanaman Terealisasi
Planting Realization achieved

Total realisasi penanaman tahun 2020 seluas 52.480 ha yang terdiri dari:
- **Tanaman rutin 5.809 ha**
- **Tanaman pembangunan 29.589 ha**
- **Program khusus 1.410 ha**
- **Biomassa 15.013 ha**

In 2020, total planting realization achieved 52,480 ha, comprising of Regular Crops of 5,809 ha, Development Crops of 29,589 ha, Special Program of 1,410 ha, Biomass of 15,013 ha.

Realisasi penyaluran dana tahun 2020 sebesar Rp20,00 miliar atau 108,23% dari RKAP tahun 2020 dengan rincian untuk Program Kemitraan sebesar Rp10,21 Miliar dan untuk Bina Lingkungan sebesar Rp9,79 miliar.

Funds disbursement realization in 2020 amounted Rp20.00 billion or 108.23% of the 2020 RKAP, with details for the Partnership Program of Rp10.21 billion and for Community Development of Rp9.79 billion.

SOSIAL SOCIAL

Dana PKBL

Rp20,00 miliar/ billion

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlight

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Uraian	2020 Audited	2019 Audited	2018 Audited	2017 Audited	2016 Audited	Description
Rp juta / million Rupiah						
Pendapatan	3.927.388	4.137.919	4.382.895	3.619.067	3.689.192	Revenue
Kayu	1.966.455	1.824.401	1.972.582	1.720.032	1.692.616	Wood
Non kayu	1.521.619	1.669.732	2.142.770	1.729.476	1.711.188	Non Wood
Lainnya	439.314	643.786	267.543	169.559	285.388	Others
Beban Pokok Penjualan	(3.452.685)	(3.387.596)	(2.419.702)	(2.107.637)	(2.878.156)	Cost of Revenue
Laba Bruto	474.703	750.323	1.963.193	1.511.430	811.036	Gross Profit
Perubahan nilai wajar aset biologis	596.902	489.868	979.073	1.046.328	-	Changes in the fair value of biological assets
Beban Usaha	(824.438)	(1.025.000)	(1.365.008)	(1.251.932)	(1.306.307)	Operating Expenses
(Rugi)/Laba Usaha	247.167	215.191	598.185	259.498	(495.271)	Operating Income (Loss)
Pendapatan Lain-lain	91.925	89.803	214.556	306.568	200.683	Other Income
Beban Lain-lain	(32.209)	(9.864)	(18.334)	(21.077)	(11.048)	Other Expenses
Laba Sebelum Pajak	306.883	295.130	794.407	544.988	(305.636)	Profit Before Tax
Pajak Penghasilan Kini	92.637	16.213	352.348	(20.066)	(4.921)	Current Tax Expense
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	(534.225)	-	(211.920)	(87.250)	(46.760)	Deferred Tax Benefit (Loss)
Laba Tahun Berjalan	748.471	205.030	653.979	437.672	(357.317)	Profit for The Year
Pengukuran kembali atas imbalan paska kerja	(446.609)	(315.236)	128.781	(360.263)	(113.859)	Remeasurement of Post Employment Benefits Obligations
Beban Pajak Terkait	20.043	78.809	(32.195)	89.650	31.401	Related Income Tax
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	321.905	(31.397)	750.565	167.059	(439.775)	Total Comprehensive Income for The Year
Laba yang Diatribusikan kepada:						Income Attributable to:
Pemilik entitas induk	748.452	205.940	653.954	437.629	(353.809)	Owner of parent entity
Kepentingan non pengendali	19	(910)	25	43	(3.508)	Non-controlling interest
Penghasilan Komprehensif yang Diatribusikan kepada:						Total Comprehensive Income Attributable to:
Pemilik entitas induk	321.969	(30.299)	750.538	167.018	(436.272)	Owner of Parent Entity
Kepentingan non pengendali	(64)	(1.098)	27	41	(3.503)	Non-controlling Interest

Pendapatan Usaha (Rp miliar)
Revenue (Rp billion)

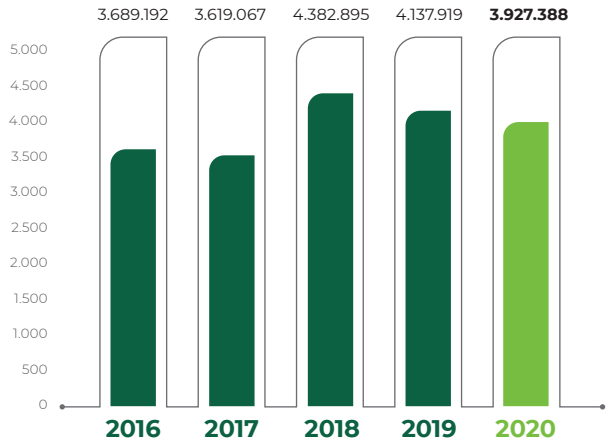

Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)
Profit for The Year (Rp billion)

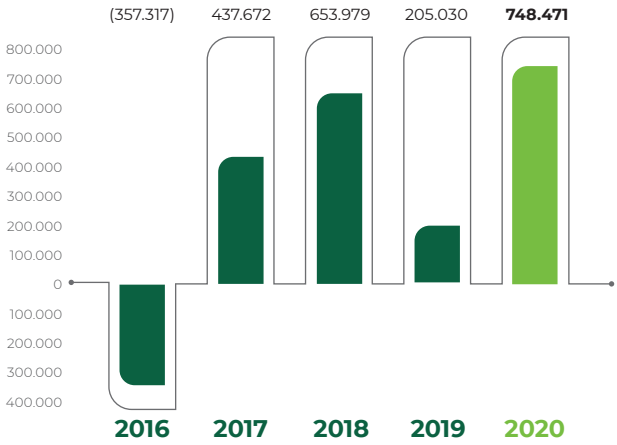

ARUS KAS
Cash Flows

Uraian	2020 Audited	2019 Audited	2018 Audited	2017 Audited	2016 Audited	Description
Rp juta / million Rupiah						
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	544.750	102.172	751.301	420.678	284.374	Cash Flow from Operating Activities
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(708.089)	(489.683)	(391.458)	(258.166)	(283.487)	Cash Flow from Investing Activities
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	(153.791)	45.834	(123.895)	132.632	40.377	Cash Flow from Financing Activities
Kenaikan/(Penurunan) Bersih - Kas dan Setara Kas	(317.130)	(341.677)	235.948	295.144	41.264	Net Increase/ (Decrease) - cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas pada awal tahun	1.024.952	1.366.629	1.130.681	835.537	580.380	Cash and Cash Equivalents at Beginning for the Year
Kas dan Setara Kas pada akhir tahun	707.822	1.024.952	1.366.629	1.130.681	621.644	Cash and Cash Equivalents at End of the Year

Jumlah Aset (Rp miliar)
Total Assets (Rp billion)

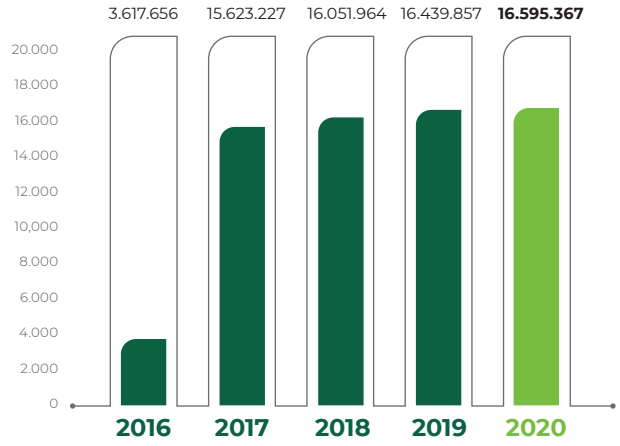

Jumlah Liabilitas (Rp miliar)
Total Liabilities (Rp billion)

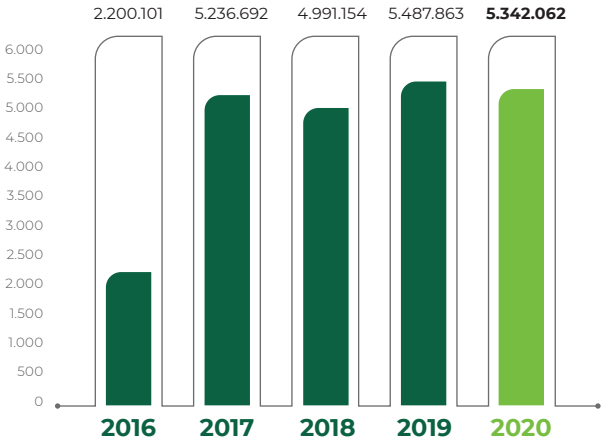

Jumlah Ekuitas (Rp miliar)
Total Equity (Rp billion)

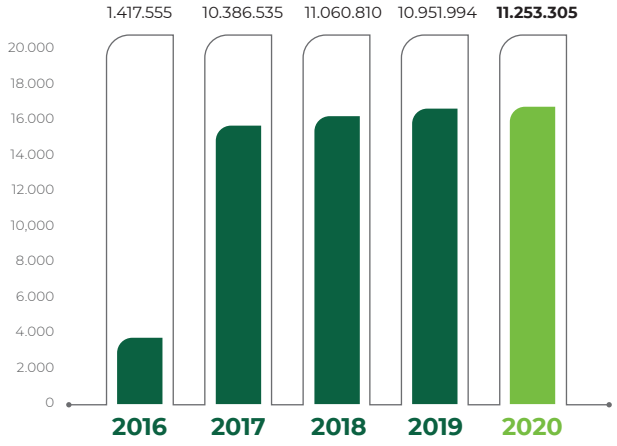

0,95%

Peningkatan Total Aset di tahun 2020 sebesar Rp155.510.000 atau 0,95% dari TotalAset tahun 2019.

There was an increase in Total Assets in 2020 by Rp. 155,510,000 or 0.95% of Total Assets in 2019.

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Consolidated Statement of Fonancial Position

Uraian	2020 Audited	2019 Audited	2018 Audited	2017 Audited	2016 Audited	Description
Rp juta / million Rupiah						
Aset Lancar	2.515.230	2.856.797	3.314.309	3.334.336	1.418.661	Current Assets
Aset Tidak Lancar	14.080.137	13.583.060	12.737.655	12.288.891	2.198.995	Non-current Assets
Total Aset	16.595.367	16.439.857	16.051.964	15.623.227	3.617.656	Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek	1.173.624	1.283.161	987.073	712.246	410.077	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	4.168.438	4.204.702	4.004.081	4.524.446	1.790.024	Non-current Liabilities
Total Liabilitas	5.342.062	5.487.863	4,991,154	5.236.692	2.200.101	Total Liabilities
Ekuitas	11.253.305	10.951.994	11.060.810	10.386.535	1.417.555	Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	16.595.367	16.439.857	16.051.964	15.623.227	3.617.656	Total Liabilities and Equity

Rasio Lancar (%)
Current Ratio (%)

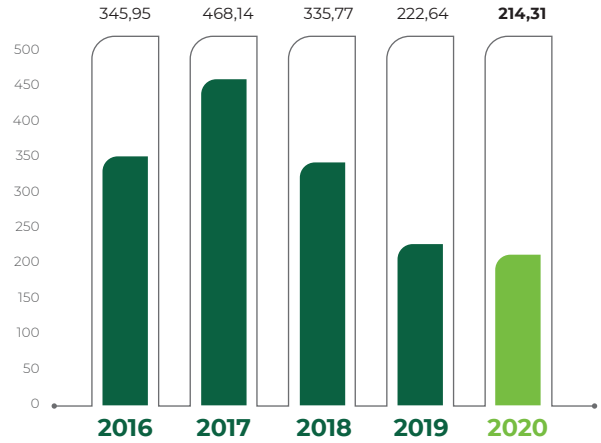

Rasio Utang terhadap Ekuitas (%)
Debt to Equity Ratio (%)

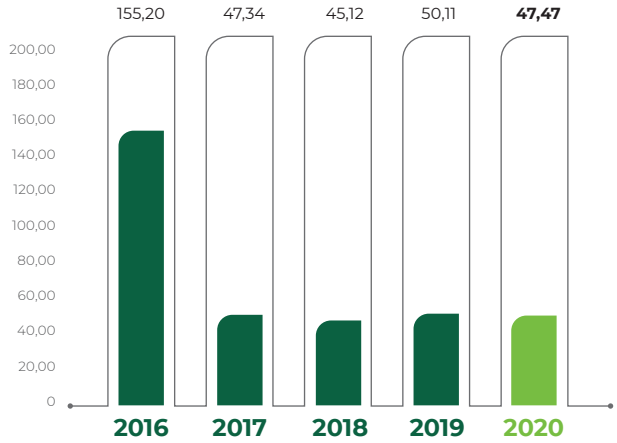

RASIO KEUANGAN
Financial Ratio

Uraian	2020 Audited	2019 Audited	2018 Audited	2017 Audited	2016 Audited	Description
Dalam % / In %						
Rasio Kas	72,09	79,88	138,45	158,75	214,70	Cash Ratio
Rasio Lancar	214,31	222,64	335,77	468,14	345,95	Current Ratio
Rasio Utang terhadap Aktiva	32,19	33,38	31,09	33,52	60,82	Debt to Asset Ratio
Rasio Utang terhadap Ekuitas	47,47	50,11	45,12	47,34	155,20	Debt to Equity Ratio
Rasio Pendapatan Operasional	6,29	5,20	13,65	7,17	(13,42)	Operating Income Ratio
Rasio Laba Bersih terhadap Aset	4,51	1,25	4,07	2,80	(9,88)	Return On Asset (ROA)
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas	6,65	1,87	5,91	3,96	(33,24)	Return On Equity (ROE)
Rasio Laba Bersih terhadap Investasi	5,42	2,41	13,50	15,98	(13,40)	Return On Investment (ROI)
Marjin Laba Bersih	19,06	4,95	14,92	12,09	(9,69)	Net Profit Margin

Ikhtisar Kinerja Operasional

Operational Performance Highlights

IKHTISAR OPERASIONAL PEMASARAN

Operational Highlight in Marketing

Uraian	Satuan Unit	2020	2019	2018	2017	2016	Description
Penjualan Dalam Negeri/ Domestic Sales							
Kayu Jati	m^3	423.437	407.900	352.163	303.387	283.387	Teak Wood
Kayu Rimba	m^3	388.150	343.919	341.899	311.080	306.314	Non-Teak - Wood
Kayu Gergajian Jati	m^3	3.632	2.789	8.058	2.810	3.708	SawnTeak Wood
Kayu Gergajian Rimba	m^3	8.792	5.285	9.540	8.985	9.860	Sawn Non-Teak Wood
Vineer Sayat Jati	m^3	35	0	188.927	61.088	82.671	Teak Slice
FJL Jati	m^3	59	43	223	349	378	Teak FJL
House Componen Jati	m^3	17	13	25	74	62	Teak House Component
Gondorukem	ton	5.950	5.018	6.627	4.619	4.343	Gum Rosin
Terpentin	ton	2.237	1.532	2.844	1.114	1.652	Turpentine
Minyak Kayu Putih	ton	309	322	276	292	187	Eucalyptus Oil
Kopal	ton	431	374	162	267	8.222	Copal
Derivat Gondorekum dan Terpentin	ton	202	189	-	-	971	Gum Rosin and Derivatives
Penjualan Luar Negeri/ Overseas Sales							
Vineer Sayat Jati	m^3	21	36	116	593	-	Teak Slice
Garden Furniture Jati	m^3	237	129	396	943	391	Teak Garden Furniture
Finish Flooring Jati	m^3	1.204	942	3.511	2.399	986	Finish Teak Flooring
Parket Blok Jati	m^3	78	41	1.054	522	535	Teak Parquet
Gondorukem	ton	59.084	60,799	52.987	57.355	61.743	Gum Rosin
Terpentin	ton	11.840	9,842	11.545	10.492	11.545	Turpentine

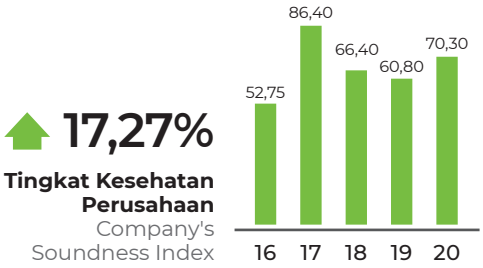

IKHTISAR OPERASIONAL KINERJA PERUSAHAAN 2020
2020 Operational Highlights in Company's Performance

Uraian	2020 Audited	2019 Audited	2018 Audited	2017 Audited	2016 Audited	Description
GCG	84,78	84,49	80, 89	80,89	83,66	GCG
KPKU	527,00	527,00	397,00	397,00	397,00	KPKU

SKOR KINERJA, KPI DAN OPINI AUDITOR
Performance Score, KPI and Auditor Opinion

Uraian	2020 Audited	2019 Audited	2018 Audited	2017 Audited	2016 Audited	Description
Dalam % / In %						
Tingkat Kesehatan Perusahaan	70,30	60,80	66,40	86,40	52,75	Company's Soundness Index
Key Performance Indicator (%)	101,90	96,00	92,91	96,43	52,04	Key Performance Indicator (%)
Kualitas Opini Auditor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Quality of Auditor Opinion

Informasi Harga Saham

Information on Stock Price

Hingga 31 Desember 2020, Perhutani adalah perusahaan non Tbk dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, Perusahaan tidak memiliki informasi tentang jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah dan harga penutupan saham, dan volume perdagangan saham.

As of December 31, 2020, Perhutani has not listed its shares at any Stock Exchange. Therefore, information about total shares outstanding, market capitalization, the highest and lowest prices of share – including closing price, and trading volume are not available.

Informasi Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi

Information on Bonds, Sukuk or Convertible Bonds

Hingga 31 Desember 2020, Perhutani belum menerbitkan obligasi, sukuk, atau obligasi konversi sehingga informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar *(outstanding),* tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk belum dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2020, Perhutani has not issued any bonds, sukuk or convertible bonds; therefore, information about total bonds/sukuk/convertible bonds outstanding, rate of interests/ returns, maturity date, and rating of bonds/ sukuk are not available to be presented in this Annual Report.

Kinerja Sumber Daya Manusia

Hasil perolehan Skor *Assessment* oleh Tim *Self Assessment* Perhutani terhadap pelaksanaan GCG Perum Perhutani Tahun 2020 adalah 84,78 (naik 0,63 poin dari tahun 2019), masih sesuai target KPI Direksi tahun 2020 sebesar 84,00.

Human Resources Performance

Results of the Assessment Score conducted by Perhutani Self Assessment team on Perum Perhutani GCG implementation in 2020 achieved 84,78 (improved 0.63 points from 2019), and still achieved the Board of Directors KPI target for 2020 of 84.00.

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

Pandangan Manajemen yang melihat kondisi tahun depan dengan optimistis, akan membuka peluang terjadinya kesinambungan dalam inovasi yang telah berjalan dengan baik.

The Management views next year's condition optimistically, and will bring the opportunity for sustainability in a well-established innovation.

Laporan Dewan Pengawas

Report from the Supervisory Board

Terkait dengan langkah strategis yang telah diambil dan berhasil diterapkan oleh Direksi dengan pencapaian positif pada tahun 2020, Dewan Pengawas optimis akan perkembangan Perhutani ke depan. Dewan Pengawas yakin, bahwa manajemen akan mampu mewujudkan visi Perusahaan. Selain itu, Direksi juga telah menunjukkan komitmen dan dedikasi secara maksimal dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional Perhutani serta telah mempertimbangkan rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas.

Related to strategic initiatives that have been implemented and successfully carried out by the Board of Directors with positive achievements in 2020, the Supervisory Board optimistically views the optimistically views the future development of Perhutani. The Supervisory Board is confident that the management will be able to realize the Company's vision. In addition, the Board of Directors has also shown maximum commitment and dedication in carrying out Perhutani's business and operational activities and has considered the recommendations and directions of the Supervisory Board.

Salah satu fungsi Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan secara aktif untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemilik Modal.

Pada tahun 2020, tantangan yang dihadapi perusahaan cukup berat. Pandemi global Covid-19 mempengaruhi kondisi perekonomian dan industry secara nasional dan global yang berdampak pada industry kehutanan. Kondisi pandemic Covid-19 tersebut, menambah peran Dewan Pengawas dalam memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan secara

One of the Supervisory Board functions is to perform active supervision to ensure the Company has been managed according to the targets set by the Capital Owners.

In 2020, the Company faced prominent challenges. The global Covid-19 pandemic affected national and global economic as well as industrial conditions, which also affected the forestry industry. The Covid-19 pandemic condition had intensified role of the Supervisory Board in ensuring implementation of health protocols to be implemented strictly and the

Bambang Hendroyono

Ketua Dewan Pengawas
Head of Supervisory Board

ketat dan ketahanan bisnis perusahaan agar perusahaan tetap *survive*.

Dengan pencapaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun 2020, Dewan Pengawas meyakini bahwa Direksi telah melakukan upaya terbaik dalam mengimplementasikan strategi, mengendalikan risiko, serta menerapkan praktik tata kelola yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas melakukan evaluasi intensif dan mendalam terhadap pencapaian kinerja, khususnya target kinerja yang telah di

Company's business resilience to ensure the Company can survive.

Considering performance achievements in 2020, the Supervisory Board believes that the Board of Directors has carried out the best efforts in implementing strategies, mitigating risks, and exercising governance practices according to the corridors of prevailing laws and regulations.

The Supervisory Board has conducted intensive and in-depth evaluations on the performance achievements, particularly the performance

susun dalam Rencana Kerja dan Angggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020. Rancangan RKAP disusun oleh Direksi dengan arahan Dewan Pengawas yang kemudian ditetapkan oleh pemilik modal melalui mekanisme persetujuan Dewan Pengawas. RKAP inilah yang kemudian tertuang menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai dasar evaluasi penilaian kinerja keberhasilan Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perhutani.

targets as set in the Company's Work and Budget Plan (RKAP) 2020. The RKAP is further stipulated as Key Performance Indicator (KPI) and basis for performance assessment evaluation on the Board of Directors achievement in carrying out the management of Perhutani.

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah menunjukkan komitmennya dan lebih akomodatif terhadap iklim usaha yang senantiasa dihadapkan pada tantangan yang besar dan beragam. Catatan penting Dewan Pengawas adalah Direksi beserta jajarannya berhasil melakukan mitigasi terhadap potensi kerugian dari performa tahun-tahun sebelumnya terutama yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Sementara itu, selaras dengan *roadmap* transformasi usaha yang telah digulirkan Perusahaan sejak beberapa tahun lalu, Dewan Pengawas berharap bahwa semangat transformasi tersebut bisa berjalan secara sistemik dan berkelanjutan. Hal ini menjadi salah satu elemen penting Perhutani dalam menjadi agen pembangunan.

Throughout 2020, the Board of Directors has proved their commitment and was being more accommodating towards the business climate that was constantly dealing with enourmous and diverse challenges. A key note for the Supervisory Board is that the Board of Directors and their executives have successfully mitigated potential losses due to the performance in previous years, mainly caused by the Covid-19 Pandemic. Meanwhile, in line with the business transformation roadmap as set out by the Company since few years ago, the Supervisory Board expects that the spirit of transformation to run in systematic and sustainable manners. This is expected to be one of the crucial elements in Perhutani to become an agent of development.

Terkait dengan langkah strategis yang telah diambil dan berhasil diterapkan oleh Direksi dengan pencapaian positif pada tahun 2020, Dewan Pengawas optimis akan perkembangan Perhutani ke depan. Dewan Pengawas yakin, bahwa manajemen akan mampu mewujudkan visi Perusahaan. Selain itu, Direksi juga telah menunjukkan komitmen dan dedikasi secara maksimal dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional Perhutani serta telah mempertimbangkan rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas. Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kinerja

In terms of strategic initiatives that have been taken and successfully implemented by the Board of Directors with positive achievements in 2020, the Supervisory Board is optimistic on future development of Perhutani. The Supervisory Board is confident that the management will be able to achieve the Company's vision. In addition, the Board of Directors has also proved maximum commitment and dedication in running Perhutani's business and operational activities and has considered the recommendations and directions of the Supervisory Board. We would

Direksi dalam menjalankan amanah untuk terus memberikan hasil yang positif dalam pencapaian kinerja baik operasional maupun keuangan.

greatly appreciate the performance of the Board of Directors in carrying out the mandate to continue to deliver positive results in achieving both operational and financial performance.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi

Selain pengawasan atas pencapaian kinerja seperti yang telah dijelaskan di atas, Dewan Pengawas juga melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi Perusahaan yang dilakukan Direksi. Pengawasan atas implementasi strategi oleh Direksi juga dilakukan pada lingkup pelaksanaan prinsip GCG untuk memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2020, Perum Perhutani telah menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020-2024. RJPP tersebut telah disahkan oleh Menteri BUMN selaku Pemilik Modal melalui surat nomor S-177/MBU/03/2021 tanggal 12 Maret 2021. Pada RJPP Perum Perhutani tahun 2020-2024, perusahaan memiliki Visi, Misi, Tujuan dan memenuhi sasaran strategi sebagai upaya memenuhi aspirasi Pemilik Modal, Perum Perhutani telah menyusun empat tema strategis perusahaan yang dituangkan dalam *Strategy House* dengan tagline "RISE", yaitu *Redesign Optimal Forestry Resources Management, Implement Collaborative Social Forestry, Strengthen and Synergize Business Portfolio, Enhance Enablers*. Empat *strategic house* tersebut dijabarkan menjadi 16 inisiatif strategis. Terkait dengan RJPP tersebut, Dewan Pengawas memberikan tanggapan dan arahan kepada Direksi antara lain: 1) rencana hilirisasi Produk Kayu dan Non Kayu harus segera dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan

Supervision on Strategy Implementation

In addition to monitoring over the performance achievements as described above, the Supervisory Board also supervises implementation of the Company's strategy done by the Board of Directors. Supervision of strategy implementation by the Board of Directors is also carried out under the scope of GCG principles implementation to ensure that the Company's management has overall complied to the prevailing laws and regulations.

In 2020, Perum Perhutani has prepared Long Term Plan (RJPP) for 2020-2024. The RJPP has been ratified by the Minister of SOEs as the Capital Owner through letter number S-177/MBU/03/2021 dated March 12, 2021. In Perum Perhutani RJPP for 2020-2024, the Company has a Vision, Mission, Objectives and fulfills strategic targets as an effort to fulfil aspirations of shareholders, Perum Perhutani has formulated four strategic corporate themes as outlined in the Strategy House with the tagline "RISE", which is Redesign Optimal Forestry Resources Management, Implement Collaborative Social Forestry, Strengthen and Synergize Business Portfolio, Enhance Enablers. The four strategic houses are translated into 16 strategic initiatives. Related to the RJPP, the Supervisory Board provides responses and directions to the Board of Directors, including 1) the downstream plan for Wood and Non-Wood Products shall be implemented immediately by considering investment capacity, especially for the

investasi terutama untuk Industri Kayu, GTD dan MKP; 2) Rencana Regrouping Anak Perusahaan harus dilakukan dengan cermat agar tidak kontraproduktif dengan rencana peningkatan pendapatan usaha serta Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada anak perusahaan; 3) Meningkatkan kontinuitas sarana dan prasarana penyadapan getah pinus dan Untuk kepentingan jangka panjang harus segera dilakukan peremajaan dan peningkatan luas tanaman; 4) Untuk itu Direksi perlu membuat Sistem Informasi yang efektif tentang Neraca Sumber Daya Hutan (SDH) yang berbasis database pada tingkat Tapak di KPH; serta 5) Pembukuan Aset Biologis dan Perubahannya setiap periode pelaporan keuangan, Direksi perlu membuat integrasi antara Neraca SDH dan Neraca Keuangan Perusahaan yang artikulatif dan dinamis untuk mengawal pencapaian misi perusahaan, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan pembukuan nilai Aset dalam Neraca Keuangan maupun kesalahan dalam penghitungan Perubahan Nilai Wajar Aset Biologis yang merupakan pendapatan utama dalam *Income Statement* Perusahaan.

Timber, GTD and MKP Industries; 2) Subsidiary regrouping plans shall be carried out carefully, therefore,not being counterproductive to plans to increase operating income and increase supervision and guidance to subsidiaries; 3) Improving continuity of facilities and infrastructure for tapping pine resin and for the long term interest, rejuvenation and expansion of plant area should be carried out immediately; 4) For this reason, the Board of Directors needs to establish an effective Information System on the Forest Resource Balance (SDH) based on a database at the site level in the FMU; and 5) Administration of Biological Assets and their Changes for each financial reporting period, the Board of Directors shall develop an articulative and dynamic integration between SDH Balance Sheet and the Company's Financial Balance to oversee achievement of the Company's mission, and to reduce the risk of errors in recording the value of Assets in the Financial Balance as well as errors in calculations Changes in the Fair Value of Biological Assets as the main revenues in the Company's Income Statement.

Dalam merumuskan target kinerja di awal tahun 2020 sebagimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Perhutani Tahun 2020, Dewan Pengawas berperan memberikan arahan dan masukan sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya, termasuk arahan dan masukan untuk rencana kerja strategis yang dirumuskan Direksi. Untuk itu, Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab agar implementasi rencana strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik setiap tahunnya. Dalam masa pandemi Covid-19, RKAP Tahun 2020 telah dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan bisnis yang mengakibatkan asumsi yang digunakan pada RKAP 2020 menjadi tidak relevan yang berdampak

In formulating performance targets in early 2020 as stated in Perum Perhutani Work and Budget Plan (RKAP) 2020, the Supervisory Board is in charge to provide advice and recommendation based on our capacity and capabilities, including direction and recommendation for the strategic work plan formulated by the Board of Directors. Therefore, the Supervisory Board holds the responsibility to ensure that the implementation of the strategic plan can be carried out properly every year. During the Covid-19 pandemic, the 2020 RKAP has been revised to adjust to economic and business conditions which have resulted in the assumptions used in the 2020 RKAP being irrelevant and affected achievement of the 2020 RKAP. The supervision carried out by the

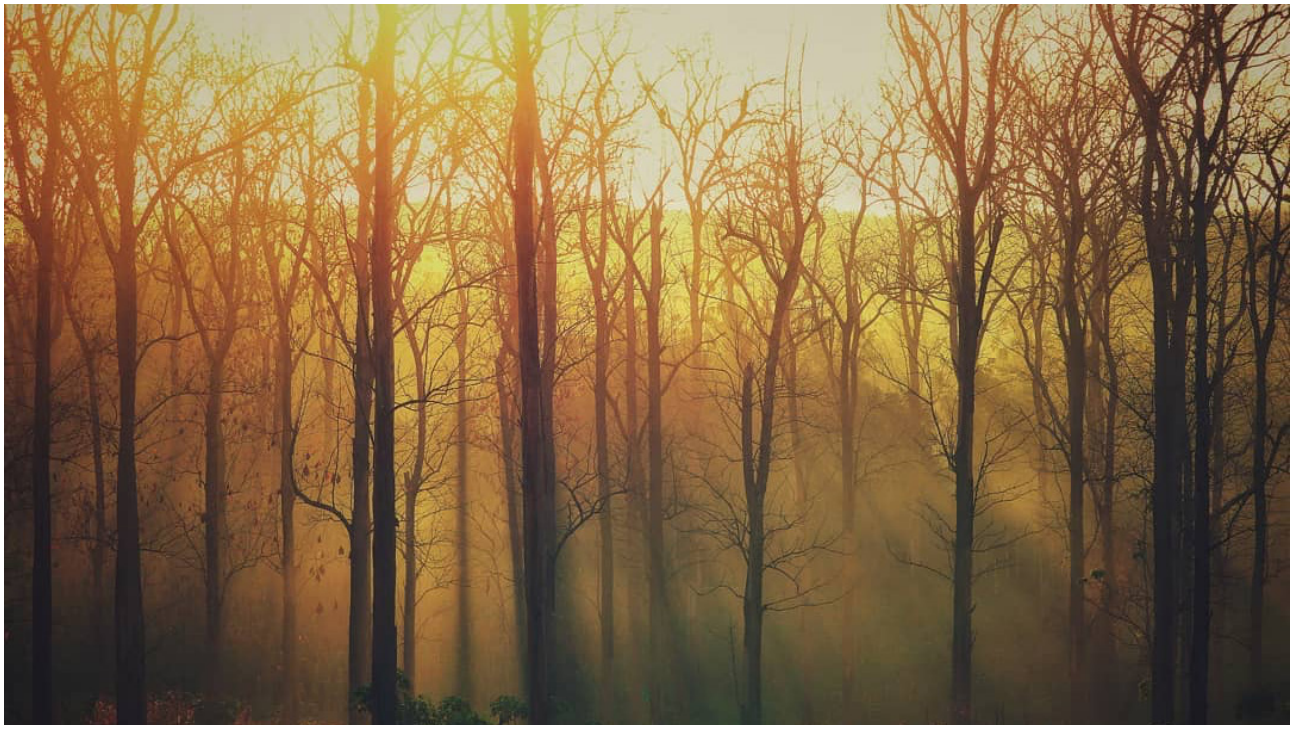

dalam pencapaian RKAP tahun 2020. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terkait dengan revisi RKAP tahun 2020 antara lain: 1) memastikan pelaporan Direksi terkait dengan KPH untuk melaporkan perubahan kondisi kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab dari waktu ke waktu dan juga membuat laporan kinerja; 2) perubahan hutang jangka panjang dalam revisi RKAP 2020 untuk mempersiapkan *cash flow* perusahaanya; serta 3) ketercapaian target pada Revisi RKAP Tahun 2020.

Pengawasan tersebut dijalankan melalui berbagai mekanisme hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan Direksi, dimana Rapat menjadi bagian penting dari proses pengawasan yang interaktif atas implementasi strategi tersebut, agar Dewan Pengawas dapat terus mengikuti arah perkembangan strategi yang dijalankan Direksi, dan sejauh apa strategi tersebut efektif untuk dapat mencapai target yang diharapkan.

Supervisory Board is related to the revision of the RKAP for 2020. 2020, among others 1) to ensure the reporting of the Board of Directors related to the FMU to report changes in the condition of the forest area which is their responsibility over time and also to make a performance report; 2) changes in long-term loans in the 2020 RKAP revision to prepare the Company's cash flows; and 3) achievement of targets in the RKAP 2020 Revision.

The supervision is carried out through various working relation mechanism between the Supervisory Board and Board of Directors, where the Meeting becomes an important part of the interactive monitoring process for the implementation of the strategy, thereby the Supervisory Board can continue to follow the direction and progress of the strategy carried out by the Board of Directors, and degree of the strategy effectiveness in achieving the expected target.

Fungsi Pengawasan dan Hubungan Kerja dengan Direksi

Terciptanya hubungan kerja yang baik antara Dewan Pengawas dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Dalam menjaga hubungan kerja yang baik, Dewan Pengawas dan Direksi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas harus menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi harus menghormati tugas dan wewenang Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Pengawas dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dewan Pengawas berhak memperoleh informasi Perseroan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
5. Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Pengawas.

Dalam kondisi pandemi, pengawasan Dewan Pengawas tetap dilakukan dan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan meskipun dibutuhkan penyesuaian mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi selama pandemi Covid-19. Bentuk mekanisme pengawasan

Supervision Function and Working Relations with the Board of Directors

Establishment of a sound working relationship between the Supervisory Board and Board of Directors becomes crucial where each organ can work according to the function effectively and efficiently. In maintaining a good working relationship, the Supervisory Board and the Board of Directors shall apply the following principles:

1. The Supervisory Board shall respect the duties and authorities of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in the laws and regulations as well as the Articles of Association.
2. The Board of Directors shall respect the duties and authority of the Supervisory Board to supervise and provide advice on the Company's managerial policies.
3. Every working relationship between the Supervisory Board and the Board of Directors is a formal institutional relationship, which shall always refers to an accountable a standard mechanism or correspondence.
4. The Supervisory Board is entitled to obtain Company information accurately, completely and on time.
5. The Board of Directors is responsible upon accuracy, completeness, and timeliness of submitting Company information to the Supervisory Board.

In a pandemic condition, the supervision carried out by the Supervisory Board will continue to be carried out and run based on the set target, despite requiring adjustments on the mechanism according to the needs and conditions during the Covid-19 pandemic.

yang dijalankan oleh Dewan Pengawas selama pandemi antara lain: 1) menggunakan mekanisme *online* (daring) atau virtual dalam kegiatan-kegiatan pembahasan dengan manajemen dan kunjungan kerja pada kantor cabang, dan 2) *desk analysis* tetap dilakukan namun dengan menggunakan data elektronik atau *(softcopy)*.

Sepanjang pandemi, beberapa bentuk pengawasan telah dilakukan, antara lain: (i) pengawasan atas kinerja keuangan dan operasional perusahaan secara berkelanjutan untuk memastikan perusahaan dapat mengeluarkan respon kebijakan yang antisipatif dan adaptif untuk mempertahankan kinerja, (ii) pengawasan atas upaya proyeksi dampak dan keperluan penyesuaian target RKAP, (iii) pengawasan atas strategi dan efektivitas implementasi BCM serta penyesuaian prosedur operasional perusahaan secara menyeluruh, (iv) pengawasan atas upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan pegawai serta pemenuhan kebijakan pemerintah terkait pandemi, dan (v) pengawasan atas kegiatan operasional perusahaan terhadap kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Manifestation of the supervisory mechanism carried out by the Supervisory Board during the pandemic includes 1) using online or virtual mechanisms in discussion activities with management and official visits to branch offices, and 2) desk analysis is still carried out using electronic or softcopy data.

Throughout the pandemic, various forms of supervision have been carried out, including: (i) supervision on the Company's financial and operational performance on an ongoing basis to ensure that the Company can issue anticipatory and adaptive policy responses to maintain performance, (ii) supervision on adjustments on the impact and the need for adjustments on the. RKAP targets, (iii) supervision of the strategy and effectiveness of BCM implementation as well as adjustment of the company's operational procedures as a whole, (iv) supervision on the efforts to protect employee safety and health as well as compliance with government policies related to the pandemic, and (v) supervision on the Company's operational activities to the Company's policies and prevailing regulations.

Pandangan atas Prospek Usaha

Dewan Pengawas memandang bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh dengan tantangan tidak saja bagi Perhutani, tapi juga bagi semua sektor industri.

Dewan Pengawas dan Pemilik Modal telah menyetujui RKAP 2021 yang diajukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan prediksi pertumbuhan ekonomi dan berbagai risiko, Dewan Pengawas menilai bahwa target-target yang ditetapkan oleh Direksi dalam RKAP tersebut merupakan target yang realistis.

Overview on Business Prospects

The Supervisory Board considers 2021 will be a year full of challenges not only for Perhutani, but also for all industrial sectors.

The Supervisory Board and Shareholders have approved the 2021 RKAP proposed by the Board of Directors by considering the economic growth projection and various risks, the Supervisory Board considers that the targets set by the Board of Directors in the RKAP have become realistic targets.

Mengacu pada kinerja Perusahaan tahun 2020, Dewan Pengawas meyakini target-target yang ditetapkan dalam RKAP 2021 dapat dicapai. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan penguatan secara berkelanjutan untuk memperkuat strategi bisnis perusahaan termasuk perlunya pengembangan bisnis dan diversifikasi baik secara organik maupun anorganik, penguatan pengelolaan keuangan Perusahaan secara komprehensif, penguatan pemasaran dan penjualan, penguatan peran investasi, dan yang paling utama penguatan kebijakan sumber daya manusia yang dapat mendorong kapasitas, produktifitas dan profesionalisme.

Target-target yang ditetapkan Direksi merupakan target yang realistis dan sangat mungkin untuk diwujudkan. Dewan Pengawas menilai, industri hutan di Indonesia masih memiliki prospek yang sangat baik. Perusahaan perlu mengantisipasi masih tingginya ketidakpastian risiko perlambatan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan terasa di permulaan tahun 2021 namun diperkirakan akan diiringi oleh rebound dan penguatan menuju akhir tahun yang didukung oleh penguatan aktivitas perdagangan dan ekonomi nasional dan internasional.

Referring to the Company's performance in 2020, the Supervisory Board believes that the targets set in the 2021 RKAP can be achieved. To achieve the targets, continuous consolidation is needed to strengthen the Company's business strategy including the importance of both organic and non-organic business development and diversification, strengthening the Company's comprehensive financial management, intensifying marketing and sales, strengthening role of investment, and most importantly strengthening human resources policy to encourage capacity, productivity and professionalism.

The targets set by the Board of Directors have been realistic targets and are very possible to be achieved. The Supervisory Board considers that the forest industry in Indonesia still has very promising prospects. The Company anticipate the high uncertainty of the risk of an economic slowdown due to the impact of the Covid-19 Pandemic as expected to prolong in early 2021, however, expected to be followed by a rebound and strengthening towards the end of the year supported by strengthening national and international commerce and economic activities.

Pandangan atas Penerapan GCG

Sebagai salah satu BUMN, Perhutani senantiasa berperan aktif dalam proses pembangunan perekonomian nasional dengan cara meningkatkan kinerja Perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG.

Views on the GCG Implementation

As one of the State-Owned Enterprises (SOEs), Perhutani always plays an active role in the national economic development process by improving the Company's performance based on GCG principles.

Bagi Perhutani, GCG didefinisikan sebagai pola pikir dan pola kerja yang diterapkan di seluruh jajaran Perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya sistem manajemen yang efisien dan efektif, sehingga mewujudkan nilai bagi pemangku kepentingan. Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi Perusahaan. Untuk itu, Perhutani senantiasa berpegang pada asas-asas GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*.

Perhutani defines GCG as a mindset and work scheme that is applied at all levels of the Company to increase transparency and accountability in order to create an efficient and effective management system, thereby realizing value for stakeholders. In achieving the vision and carrying out the Company's mission. Therefore, Perhutani always adheres to the GCG principles, including transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan melakukan rapat rutin bulanan bersama Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Pengawas dibantu oleh organ penunjang, yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

The Supervisory Board has carried out supervision over implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors by conducting regular monthly meetings with the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors to support implementation of the duties of the Board of Directors. In carrying out supervisory function, the Supervisory Board is assisted by supporting organs, namely Audit Committee, Risk Management Committee, and Nomination and Remuneration Committee.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada Badan Usaha Milik Negara, Perum Perhutani telah melakukan *self assessment* GCG dengan asesor dari team internal Perhutani dengan mengukur penerapan GCG Tahun 2020 serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Hasil *assessment* yang diperoleh adalah dengan skor 84, 78 dengan predikat baik. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Pengawas antara lain peningkatan pada aspek Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, Direksi dan aspek lainnya.

According to the Minister of State for State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance) In State-Owned Enterprises, Perum Perhutani has conducted a GCG self-assessment with assessors from the internal team of Perhutani by measuring GCG implementation in 2020 and providing recommendations for the necessary improvements. Results of the assessment achieved a score of 84, 78 with GOOD predicate. Some issues that shall be concerned by the Supervisory Board are including improvement in Commitment on Sustainabel Good Corporate Governance implementation, Board of Directors and Other Aspects.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Pengawas

Adanya organ penunjang yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Pengawas. Pelaksanaan rapat-rapat di setiap komite memberikan rekomendasi bagi Dewan Pengawas untuk dapat melakukan tugas pengawasan dan memberikan arahan bagi Direksi.

Secara kualitatif, Dewan Pengawas telah melakukan penilaian atas kinerja dari organ penunjang Dewan Pengawas, mencakup keaktifan Komite dalam menjalankan tugasnya, proses dokumentasi, dan rekomendasi yang diberikan. Atas segala dedikasi dan pelaksanaan tugas yang telah dijalankan, Dewan Pengawas menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota komite.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Pengawas tidak hanya bertanggung jawab kepada hasil yang dicapai tetapi juga terus memantau proses untuk mencapai hasil yang diharapkan melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)*. Dalam hal pelaksanaan GCG, Dewan Pengawas berpandangan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian tujuan Perseroan.

Dewan Pengawas menilai bahwa komite-komite penunjang fungsi Pengawas telah bekerja secara kolektif dan secara independen dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut membuahkan implementasi prinsip GCG di Perseroan berjalan secara maksimal. Hal ini juga didukung oleh komitmen Dewan Pengawas

Assessment on Performance of Committees Under the Supervisory Board

Establishment of supporting organs, such as Audit Committee, Risk Management Committee, and Nominatin and Remuneration Committee has greatly supported implementation of the supervisory duties and functions carried out by the Supervisory Board. Implementation of each committee's meeting has recommendations for the Supervisory Board to carry out supervisory and advisory duties for the Board of Directors.

In qualitative manner, the Supervisory Board has assessed performance of the supporting organs of the Supervisory Board, including the activity of the Committee in carrying out its duties, the documentation process, and the recommendations. The Supervisory Board would appreciate all of the committee's members for their dedications and work achievements.

In carrying out the supervisory function, the Supervisory Board is not only responsible upon the results but also continues to monitor the process to achieve the expected results by means of the Good Corporate Governance implementation. In terms of the GCG implementation, the Supervisory Board is views the Good Corporate Governance principles has become an integrated part of the efforts to achieve the Company's goals.

The Supervisory Board considers that the Supervisory Function supporting committees have worked collectively and independently in carrying out their duties. Work of the committees have contributed to optimum GCG principle implementation in the Company. This is also supported by the commitment of the

bersama dengan Direksi yang berkolaborasi dalam rangka mewujudkan transformasi jangka panjang tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan nilai positif yang berkelanjutan.

Selama tahun 2020, Dewan Pengawas dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Ketiga komite tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik serta memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Pengawas dalam menjalankan fungi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan.

Pandangan atas Penerapan *Whistleblowing System* (WBS)

Penerapan WBS di Perhutani telah dipertajam dengan penerapan prinsip *Whistleblower* untuk dapat menyampaikan atau melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan GCG, baik melalui surat, telepon, email serta media lainnya. Sistem ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya.

Dengan adanya mekanisme WBS diharapkan Perusahaan dapat menegakkan standar pelayanan dan etika, menerapkan sistem pencegahan dini *(early warning system)* dan meningkatkan *confidence*.

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas di Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, komposisi Dewan Pengawas mengalami perubahan, sebagai berikut:

Supervisory Board together with the Board of Directors to collaborate in order to realize a long-term transformation of corporate governance which is expected to gain sustainable positive values.

In 2020, the Supervisory Board was assisted by 3 (three) committees, such as the Audit Committee, Risk Management Committee also Nomination and Remuneration Committee. The three committees carry out their functions properly as well as provide opinions and suggestions to the Supervisory Board in carrying out the supervisory function of the Company's management.

.

Views on Whistleblowing System (WBS) Implementation

WBS implementation in Perhutani has been sharpened by Whistleblower principle implementation to submit or report any action that is considered may violate the provisions regarding violations against GCG implementation, either by mail, telephone, email and other media. This system guarantees confidentiality of the identity of the whistleblower and the report.

Through the WBS mechanism, it is expected that the Company can enforce service and ethical standards, implement an early warning system and increase confidence.

Changes in the Supervisory Board Composition in 2020

Throughout 2020, there was a change in composition of the Supervisory Board, as follows:

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SEBELUMNYA
Previous Supervisory Board composition:

Nama Name	Jabatan Position	
Djarot Kusumayakti	Ketua Dewan Pengawas	Supervisory Board Chairman
Hilman Nugroho	Dewan Pengawas	Supervisory Board
Indriani Widiastuti	Dewan Pengawas	Supervisory Board
Akhmad Sukardi	Dewan Pengawas	Supervisory Board
Kaharuddin Wahab	Dewan Pengawas	Supervisory Board
Haryadi Himawan	Dewan Pengawas	Supervisory Board
Wawan Siswantono	Dewan Pengawas	Supervisory Board

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS PERIODE 31 DESEMBER 2020
Supervisory Board Composition as of December 31, 2020 Period

Nama Name	Jabatan Position	
Bambang Hendroyono	Ketua Dewan Pengawas	Supervisory Board Chairman
Yohanes Babtista Priyatmo Hadi	Dewan Pengawas	Supervisory Board
Bambang Risyanto	Dewan Pengawas Independen	Independent Supervisory Board
Komaruddin Simanjuntak	Dewan Pengawas	Supervisory Board
Chalid Muhammad	Dewan Pengawas Independen	Independent Supervisory Board
Noer Fauzi Rachman	Dewan Pengawas Independen	Independent Supervisory Board

Kami sangat mengapresiasi sumbangsih yang telah diberikan oleh Dewan Pengawas sebelumnya yang telah penuh dedikasi dalam mengembangkan Perhutani untuk lebih maju lagi. Dewan Pengawas berkomitmen untuk melanjutkan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk kepentingan pemilik dan Pemangku Kepentingan lainnya.

We would express our greatest appreciate the endeavours of the former Supervisory Board which has been full of dedication in developing Perhutani to be more progressive. The Supervisory Board is committed to maintain this mandate by always prioritizing good corporate governance principles for interests of the owners and other Stakeholders.

Penutup
Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada Direksi dan jajarannya serta seluruh karyawan Perum Perhutani atas kerja keras dan

Closing Remarks
The Supervisory Board would appreciate the Board of Directors and their management as well as all employees of Perum Perhutani for their

dedikasinya sehingga mampu mewujudkan kinerja yang baik pada tahun 2020 yang penuh dengan tantangan.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemilik Modal dan Pemangku Kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungannya. Apresiasi terdalam juga ditujukan kepada segenap jajaran Direksi, karyawan, serta mitra usaha yang senantiasa mendukung Perhutani untuk tumbuh dan berkembang.

Akhir kata, izinkan kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan dalam rangka meraih hasil positif dan mempertahankan pertumbuhan usaha Perhutani. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua.

hard work and dedication ini achieving good performance in 2020 that was full of challenges.

In this opportunity, we would like to express our gratitude to the Capital Owners and other Stakeholders for their trust and support. Our utmost appreciation is also addressed to all levels of the Board of Directors, employees, and business partners who always support Perhutani to grow and develop.

Finally, allow us to express our utmost gratitude for the trust in achieving positive results and maintain Perhutani's business growth. May the Almighty God always bless us all.

Jakarta, September 2021
Atas nama Dewan Pengawas Perhutani

Jakarta, September 2021
On Behalf of The Supervisory Board

Bambang Hendroyono

Ketua Dewan Pengawas
Supervisory Board Chairman

Profil Dewan Pengawas Periode 31 Desember 2020

Supervisory Board Profile Period December 31, 2020

Bambang Hendroyono
Ketua Dewan Pengawas
Supervisory Board Chairman

Warga Negara Indonesia, Lahir di Tanjung Pinang, 30 September 1964. Menamatkan pendidikan Sarjana di Fakultas Kehutanan IPB (1987), Pasca Sarjana di bidang Manajemen STIE-IPWI Jakarta pada Universitas Brawijaya (1997), dan Doktor Ilmu Administrasi Publik (2016).

Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementrian Kehutanan (2012), Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementrian Kehutanan (2012). Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jendral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas sejak 12 Februari 2020.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-47/MBU/02/2020 tanggal 12 Februari 2020

Indonesian Citizen, Born in Tanjung Pinang on September 30, 1964. Graduated Bachelor's degree from Faculty of Forestry IPB (1987), Post Graduate in Management from STIE – IPWI Jakarta (1997) and Doctor in Public Administrative Science from Universitas Brawijaya (2016).

He was appointed as General Secretary of Forestry Business Development, Ministry of Forestry (2012), General Director of Forestry Business Development, Ministry of Forestry (2012). He is also currently serving as General Secretary of Ministry of Environment and Forestry. He is appointed as Chairman of Supervisory Board since February 12, 2020.

Appointment Decree: SK-47/MBU/02/2020 dated February 12, 2020.

Yohanes Babtista Priyatmo Hadi

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, Lahir di Boyolali, 16 Januari 1972. Menamatkan Pendidikan sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Atmajaya Yogyakarta (1995), Pasca Sarjana MPKP Universitas Indonesia (2007)

Pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementrian BUMN ((2019), Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan (2020). Saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN. Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas sejak 14 Juli 2020.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-238/MBU/07 /2020 tanggal 14 Juli 2020

Indonesian Citizen, Born in Boyolali on January 16, 1972. Graduated Bachelor's degree in Management Economics from Atmajaya University Yogyakarta (1995), Postgraduate Degree of MPKP Universitas Indonesia (2007).

He was appointed as Assistant to Deputy of Construction and Transportation Facilities and Infrastructures, Ministry of SOEs (2019), Assistant to Deputy of Transportation Facilities and Infrastructures (2020). He is also currently serving as Assistant to Deputy of Transportation Facilities and Infrastructures, Ministry of SOEs. He is appointed as Member of Supervisory Board since July 14, 2020.

Appointment Decree: SK-238/MBU/07/2020 dated July 14, 2020.

Bambang Risyanto

Anggota Dewan Pengawas Independen
Independent Member of Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, Lahir di Pekalongan, 27 Desember 1950. Menamatkan Pendidikan Sarjana Kehutanan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1978), Pasca Sarjana Magister Manajemen dari Universitas Satyagama (2002).

Pernah menjabat sebagai Pelaksana tugas PT APU (2008), Pelaksana tugas PT ORI (2012), Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX (2015). Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas sejak 19 Maret 2020.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-83/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020.

Indonesian Citizen, born in Pekalongan on December 27, 1950. Graduated Bachelor's degree in Forestry from Univesitas Gajah Mada Yogyakarta (1978), Postgraduate Degree in Management from Satyagama University (2002).

He was appointed as Acting PT APU (2008), Acting PT ORI (2012), Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara IX (2015). He is appointed as Member of Supervisory Board since March 19, 2020.

Appointment Decree: SK-83/MBU/03/2020 dated March 19, 2020.

Komaruddin Simanjuntak

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, Lahir di Pematang Siantar, 10 Januari 1960. Lulusan AKMIL tahun 1985. Menamatkan Pendiidkan Sarjana bidang Sosial Politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (2010), Pasca Sarjana Manajemen Pertahanan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2015).

Pernah menjabat sebagai Panglima Daerah Militer 9/Udayana (2017), saat ini juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2019). Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas sejak 19 Maret 2020.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-83/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020.

Indonesian Citizen, born in Pematang Siantar on January 10, 1960. Graduated from AKMIL in 1985 and earned Bachelor's degree in Social Political Science from Jenderal Achmad Yani University (2010), Post Graduate of Defense Management from Gajah Mada University Yogyakarta (2015).

He served as Commander of Military Zone 9/ Udayana (2017), he is also currently serving as Expert Staff to Chief of National Disaster Mitigation Agency (BNPB) (2019). He is appointed as Member of Supervisory Board since March 19, 2020.

Appointment Decree: SK-83/MBU/03/2020 dated March 19, 2020.

Chalid Muhammad

Anggota Dewan Pengawas Independen
Independent Member of Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, Lahir di Parigi, 10 Desember 1965. Menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Taduloko, Palu (1991).

Pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif WALHI (2005). Anggota Dewan Pengarah Perubahan Iklim KLHK (2014), Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015). Anggota tim Pertimbangan Adipura KLHK (2015), Anggota Komite Pesisir Pemprov DKI (2018), Wakil Ketua Bidang Konservasi Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik bentukan Kementerian KKP (2020), Saat ini menjabat sebagai Ketua Institut Hijau Indonesia.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-83/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020.

Indonesian Citizen, born in Parigi on December 10, 1965. Graduated Bachelor's degree of Law from Tadulako University, Palu (1991).

He served as Executive Director of WALHI (2005), Member of Steering Committee in Climate Change, KLHK (2014), Senior Advisor to Minister of Environment and Forestry (2015). Member of Adipura Advisory Team KLHK (2015), Vice Chairman in Conservation Affairs, Stakeholders and Public Advisory Commission established by Ministry of KKP (2020). He is also currently serving as Chairman of Indonesia Green Institute.

Appointment Decree: SK-83/MBU/03/2020 dated March 19, 2020.

Noer Fauzi Rachman

Anggota Dewan Pengawas Independen
Independent Member of Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 7 Juni 1965. Menamatkan Pendiidkan Sarjana S1 Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung (1990), PhD in *Environmental Science*, *Policy and Management* dari University of California at Berkeley (UCB), USA (2011).

Pernah menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staff Kepresidenan (2015); Dosen Luar Biasa pada Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran – Bandung (2019 - sekarang). Saat ini aktif sebagai Pengajar tamu di Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB); Sebagai anggota Dewan Pendidikan dan Pengembangan INSIST; dan anggota Dewan Redaksi Jurnal WACANA-INSISTPress.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-126/MBU/04/2020 tanggal 22 April 2020

Indonesian Citizen, born in Jakarta on June 7, 1965. Graduated Bachelor's degree in Psychology from University of Padjajaran Bandung (1990), Ph.D in Environmental Science, Policy and Management from University of California at Berkeley (UCB), USA (2011).

He served as Special Staff to Chief of Presidency Staff (2015), Extraordinary Lecturer at Faculty of Psychology, University of Padjajaran – Bandung (2019 – now). He is currently Guest lecturer at Faculty of Human Ecology, Bogor Agriculture Institute (IPB); Education and Development Board at INSIST; and Member of Editor-in-Chief Board of WACANA-INSISTPress Journal.

Appointment Decree: SK-126/MBU/04/2020 dated April 22, 2020.

Laporan Direksi

Report from Board of Directors

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Pertama-tama, ijinkan kami untuk menyampaikan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Perum Perhutani dapat melalui tahun 2020 yang penuh tantangan.

Dear Stakeholders,
First of all, allow us to express our Praise and Gratitude upon the presence of Almighty God for the endless grace and blessings that brought Perum Perhutani to pass the challenging 2020.

Selanjutnya, perkenankan kami melaporkan kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan memperoleh opini wajar dalam setiap aspek yang meterial. Laporan ini juga merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Furthermore, allow us to present the Company's performance report for the fiscal year ended on December 31, 2020 as audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) and earned unqualified opinion fairly presented in all material respect. This report is also part of the Good Corporate Governance principles implementation.

Pengelolaan Perusahaan telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor,

The Company's management has been carried out by considering various internal and external

baik internal maupun eksternal. Kondisi perekonomian makro, khususnya faktor yang sangat berpengaruh tidak saja di Indonesia tapi juga berdampak bagi seluruh dunia yaitu pandemi Covid-19, yang merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi kinerja Perhutani. Oleh karena itu, dalam perencanaan maupun pelaksanaan strategi Perhutani, Direksi telah mempertimbangkan dengan baik perkembangan perekonomian, baik global maupun nasional, khususnya faktor pandemi Covid-19.

factors. Macroeconomic conditions, especially the factors that are very influential not only in Indonesia but also have an impact globally, which is Covid-19 pandemic, as one of the important issues that affected Perhutani's performance. Therefore, in planning and implementing Perhutani strategy, the Board of Directors has carefully considered global and national economic developments, especially the Covid-19 pandemic factor.

Kondisi Makro Ekonomi dan Inisiatif Strategis Perhutani

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07% *(cumulative to cumulative/c-to-c)* dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%.

Perkembangan diatas merupakan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 serta mempengaruhi seluruh sektor perekonomian. Dengan segala tantangan yang dihadapi Perhutani pada tahun 2020, Perusahaan menjalankan strategi untuk dapat bertahan tapi dengan capaian yang tetap positif.

Dari aspek industri kehutanan, ekspor industri kehutanan Indonesia di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ekspor tahun ini sedikit terkoreksi 4,67% secara *year-on-year*. Namun, dengan situasi perekonomian dunia yang diterjang resesi karena pandemi, pencapaian ini melampaui revisi target yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jumlah ekspor hulu dan hilir industri kehutanan tahun ini mencapai USD11,08 miliar atau jauh melampaui target 2020 di angka USD7 miliar. Implikasi kondisi tersebut terhadap bisnis Perhutani ditunjukkan dengan turunnya hasil penjualan produk Perhutani di tahun 2020 sebesar 5,09% dibandingkan pada tahun 2019.

Macroeconomic Conditions and Strategic Initiatives of Perhutani

The Central Statistics Agency (BPS) reproted that Indonesia's economic growth was contracted by 2.07% throughout 2020 (cumulative to cumulative/c-to-c) compared to 2019. From the production side, the deepest growth contraction occurred in the Transportation and Warehousing by 15.04%. Meanwhile, in terms of expenditure, almost all components were contracted, the Export Component of Goods and Services became the component with the deepest contraction of 7.70%. Meanwhile, the Import of Goods and Services , as a reducing factor, was by 14.71%.

The conditions mentioned above were affected by Covid-19 pandemic that occurred in early 2020 and affected all economic sectors. With all the challenges that Perhutani faced in 2020, the Company implemented a strategy to survive yet with positive results.

Based on forestry industry aspect, Indonesia's forestry industry exports in 2020 was decreasing compared to the previous year. This year's export achievement was slightly corrected by 4.67% year-on-year. However, following the world economy entering a recession due to the pandemic, the achievement exceeded the revised target set by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). The number of upstream and downstream exports of the forestry industry this year reached USD11.08 billion, signfiicantly exceeding the 2020 target of USD7 billion. The implications of this condition for Perhutani's business are indicated by the decline in sales of Perhutani's products in 2020 by 5.09% compared to 2019.

Meskipun demikian, dari sisi kinerja keuangan, Perhutani mencatatkan kinerja yang positif. Jumlah aset Perusahaan pada akhir 2020 tercatat Rp16,60 triliun, meningkat Rp155,51 miliar atau 0,95% dibandingkan dengan 2019 sebesar Rp16,44 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada aset tidak lancar sebesar Rp497,08 miliar atau 3,66%.

However, financial wise, Perhutani recorded a positive performance. As end of 2020, the Company's total assets were recorded achieving Rp16.60 trillion, increased by Rp155.51 billion or 0.95% compared to Rp16.44 trillion in 2019. The increase was driven by an increase in non-current assets of Rp497.08 billion or 3.66%.

Pendapatan Perusahaan pada tahun 2020 tercatat Rp3,93 triliun, turun sebesar Rp210,53 miliar atau 5,09% dibanding tahun 2019 sebesar Rp4,14 triliun atau mencapai 103% dari target RKAP tahun 2020 sebesar Rp3,80 triliun. Pendapatan Perusahaan berasal dari penjualan kayu bulat, kayu olahan, gondorukem dan terpentin, minyak kayu putih, wisata dan agribisnis, dan lain-lain. Penurunan dipengaruhi oleh turunnya pendapatan pada segmen usaha lainnya sebesar Rp204,47 miliar atau 31,76%, segmen non kayu turun Rp148,11 miliar atau 8,87%. Meskipun demikian, pendapatan dari segmen kayu meningkat 142,05 miliar atau 7,79%.

The Company's revenue in 2020 was recorded at Rp3.93 trillion, decreased by Rp210.53 billion or 5.09% compared to Rp4.14 trillion in 2019, or 103% of the RKAP 2020 target of Rp3.80 trillion. The Company's revenue were acquired from the sales of logs, processed wood, gum rosin and turpentine, eucalyptus oil, tourism and agribusiness, and others. The decrease was influenced by the decrease in revenue in other business segments by Rp204.47 billion or 31.76%, the non-timber segment decreased by Rp. 148.11 billion or 8.87%. However, revenue from the timber segment increased by 142.05 billion or 7.79%.

Sedangkan untuk laba bersih tahun berjalan, tercatat sebesar Rp748,47 miliar, sedangkan pada tahun 2019 Perusahaan mencatat sebesar Rp205,03 miliar. Sehingga pada tahun 2020 laba tahun berjalan mengalami peningkatan Rp543,44 miliar atau 265,05% dibanding tahun 2019.

Meanwhile, net profit for the year was recorded at Rp748.47 billion, where the Company recorded Rp205.03 billion in 2019. Therefore, in 2020, profit for the year has increased by Rp543.44 billion or 265.05% compared to 2019.

Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV/2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian, ditopang realisasi stimulus dan kontribusi positif sektor eksternal. Bank Indonesia telah mengarahkan bauran kebijakan akomodatif serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkirakan prospek 2021 akan meningkat secara bertahap.

Selain itu, perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh berlanjutnya program vaksinasi yang mendorong kenaikan mobilitas sehingga konsumsi rumah tangga membaik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan didukung kinerja investasi yang meningkat pasca implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dari sisi ekspor, perdagangan diperkirakan tetap kuat seiring pertumbuhan global yang tetap tinggi dan masih baiknya harga komoditas. Selain itu, berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah dan kebijakan BI yang tetap akomodatif juga diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2021.

Ke depan diperkirakan inflasi akan berangsur naik seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan membaiknya daya beli masyarakat. Inflasi akhir tahun 2021 diperkirakan di kisaran 2,5 persen sampai 3 persen. Pemulihan daya beli ini terkait dengan peningkatan aktivitas ekonomi selama periode adaptasi kebiasaan

Business Prospect

Economic growth in the fourth quarter of 2020 indicated a continuing recovery process, supported by the realization of stimulus and positive contributions from the external sector. Bank Indonesia has directed an accommodative policy mix and strengthened synergies with the Government as well as relevant authorities to support the national economic recovery. Therefore, Bank Indonesia estimates that the 2021 outlook will gradually improve.

In addition, improvement in national economic growth is supported by the sequence of the vaccination program which encourages increasing mobility thereby the household consumption also improves. In addition, economic growth will be supported by higher investment performance following the implementation of the Job Creation Law. In terms of exports, trade is expected to remain strong in line with persistently high global growth and favorable commodity prices. In addition, continued government fiscal stimulus and accommodative BI policies are also expected to support economic growth in 2021.

In the future, inflation will gradually rise in line with increasing economic activity and improving people's purchasing power. By end of 2021, the inflation is estimated in the range of 2.5 percent to 3 percent. This recovery in purchasing power is related to an increase in economic activity during the new normal adaptation period. In

baru atau new normal. Selain itu, bantuan sosial juga berpengaruh besar, walaupun belum optimal untuk mencapai sasaran sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional

addition, social assistance also has a major impact, despite not yet optimal in achieving the target as part of the national economic recovery

Untuk meningkatkan kinerja industri kayu, KLHK telah melakukan cara kerja baru dalam mengelola hutan produksi secara lestari. Pengelolaan hutan produksi dilakukan dengan pendekatan landscape, kemudian analisis spasial untuk melihat area rawan karhutla, konflik tenurial, dan mengintegrasikan sektor hulu-hilir, dan pasar.

To improve performance of the timber industry, the Ministry of Environment and Forestry has implemented a new mechanism in managing production forests in a sustainable manner. Production forest management is carried out using a landscape approach, spatial analysis to see areas prone to forest and land fires, tenure conflicts, and integrating upstream-downstream sectors, and markets.

Perusahaan menyadari akan tantangan yang timbul dari kejadian ini dan dampak potensial untuk sektor bisnis. Perusahaan akan meninjau situasi secara berkelanjutan, bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk mendukung upaya menahan penyebaran Covid-19, dan berusaha untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis.

The Company is aware of the challenges arising from this incident and the potential impact for the business sector. The Company will examine the situation on an ongoing basis, work closely with the appropriate authorities to support efforts to contain the spread of Covid-19, and strive to minimize impact on our business.

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

Tahun 2020, Perhutani telah mencapai sejumlah target operasional yang telah ditetapkan dalam RKAP. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan organisasi. Direksi memandang organisasi Perhutani harus disesuaikan dengan kondisi Perusahaan saat ini. Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan Perhutani membutuhkan organisasi yang kuat dengan fungsi-fungsi yang saling mendukung.

Direksi telah melakukan pengembangan organisasi perusahaan dengan melakukan pengembangan organisasi yang disertai dengan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan.

Human Resource Development and Information Technology

In 2020, Perhutani has achieved some operational targets as stipulated in RKAP. One of the concerns is organizational development. The Board of Directors views that the Perhutani organization shall be adaptive to the Company's current conditions. To achieve the designated targets, Perhutani requires a strong organization with mutually supportive functions.

The Board of Directors has developed the Company's organization by carrying out organizational development followed by the initiatives to improve quality and capacity of the Company's Human Resources (HR).

Direksi juga telah melakukan peningkatan kapasitas teknologi informasi sebagai bagian dari upaya perbaikan proses kerja dan pengembangan usaha Perusahaan. Sebagaimana diketahui, saat ini hampir tidak ada usaha yang dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan teknologi informasi.

The Board of Directors has also upgraded capacity of information technology as part of efforts to improve work processes and develop the Company's business. In general, currently, there is no business will run properly without information technology support.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan *good corporate governance* merupakan proses penerapan prinsip *corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan *soft structure,* sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perhutani. Perhutani senantiasa berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada regulasi, ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar Perhutani.

Penerapan GCG pada Perhutani mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Goverance)* dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012.

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan, Perhutani secara rutin melaksanakan GCG assessment setiap tahunnya. Selanjutnya hasil assessment dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen agar pelaksanaan GCG dapat dilakukan secara efektif melalui tindak lanjut hasil assessment. Pelaksanaan GCG assessment dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian

Good Corporate Governance Implementation

The good corporate governance implementation refers to the process of adapting the corporate governance principles supported by adequate structures and soft structures, in order to produce outcomes that are in line with expectations of Perhutani stakeholders. Perhutani is always committed to exercise GCG in consistent and sustainable manners by complying to prevailing regulations, provisions and norms as well as Perhutani's articles of association.

GCG implementation in Perhutani refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance and its amendment is the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-09/MBU/2012.

In order to continuously improve quality of GCG implementation, Perhutani regularly conducts GCG assessments every year. Furthermore, results of the assessment can be used as a basis for management actions thereby implementation of GCG can be carried out effectively through a follow-up to results of the assessment. The GCG assessment is carried out based on Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned

Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN. Hasil GCG assessment yang terakhir dilaksanakan menunjukkan hasil sebesar 84,78 yang berarti penerapan GCG pada Perhutani masuk dalam kategori Sangat Baik.

Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The results of the last GCG assessment carried out achieved a score of 84.78 which indicates the implementation of GCG in Perhutani is classified in Very Good predicate.

Transparansi juga menjadi perhatian Perhutani dalam memberikan informasi yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan karena Perhutani menyadari transparansi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan keberlanjutan dunia usaha. Keterbukaan informasi selain untuk memenuhi hak publik, juga untuk menyampaikan informasi perusahaan yang benar sesuai aturan yang berlaku. Pada tahun 2020 Perum Perhutani kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan predikat “Menuju Informatif” dengan nilai 87,64 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Transparansi informasi yang komprehensif juga dilakukan melalui penyajian Laporan Keuangan Teraudit, yang telah melalui proses audit independen oleh akuntan publik.

Transparency also becomes a concern of Perhutani in providing comprehensive information to all stakeholders as Perhutani realizes that transparency is an integrated part of sustainable development in business sector. Information disclosure is not only to fulfill public rights, but also to convey correct company information in accordance with prevailing regulations. In 2020 Perum Perhutani won another award as a Public Agency for the Category of State-Owned Enterprises (BUMN) that implemented Public Information Disclosure (KIP) with the title "Towards Informative" with a score of 87.64 organized by the Central Information Commission. Comprehensive information transparency is also carried out through the presentation of the Audited Financial Statements, which have passed an independent audit process by public accountant.

Selain itu, pada tahun 2020 Perum Perhutani mendapatkan Sertfikat ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) /*Anti-Bribery,* sertifikasi ini tak lepas dari kemampuan Perhutani untuk menghadirkan proses dan mekanisme GCG yang dapat mewadahi penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG serta pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

In addition, in 2020 Perum Perhutani earned ISO 37001:2016 Certificate on Anti-Bribery Management System (SMAP)/Anti-Bribery, this certification cannot be separated from Perhutani's capability to present GCG processes and mechanisms that can accommodate the implementation of 5 (five) GCG basic principles as well as compliance with prevailing laws and regulations.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Bagi Perhutani, program dan kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu aspek penting dalam menjalin hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Perhutani menekankan pertumbuhan bisnisnya tidak hanya pada pencapaian aspek keuangan, namun bagaimana Perusahaan mempertimbangkan dampak sosial & lingkungan untuk jangka panjang.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaksanaan tanggung jawab sosial Perseroan dibagi dalam dua kegiatan, yakni *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Tahun 2020, Realisasi penyaluran dana tahun 2020 sebesar Rp20,00 miliar atau 108,23% dari RKAP tahun 2020 dengan rincian untuk Program Kemitraan sebesar Rp10,21 miliar dan untuk Bina Lingkungan sebesar Rp9,79 miliar.

Perhutani juga mengedepankan tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta kesejahteraan setiap karyawannya dengan senantiasa mematuhi setiap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi setiap karyawannya. Berbagai program kesehatan, peningkatan profesionalisme, dan evaluasi kinerja dan kesejahteraan dilakukan secara rutin sebagaimana di tahun-tahun tahun sebelumnya.

Social and Environmental Responsibility Implementation

Perhutani defines social responsibility programs and activities as important aspects in creating harmonious relationships with all stakeholders. Perhutani emphasizes that our business growth not only to achieve financial aspects, but also how the Company considers social & environmental impacts for the long term period.

As a State-Owned Enterprise (SOE), implementation of the corporate social responsibility is divided into two activities, which are Corporate Social Responsibility (CSR) and Partnership and Community Development Program (PKBL). In 2020, the funds disbursement realization achieved Rp20.00 billion or 108.23% of the 2020 RKAP with details disbursement of Rp10.21 billion for Partnership Program and Rp9.79 billion for Community Development.

Perhutani also prioritizes responsibility for occupational health and safety as well as the welfare of each employees by always complying with all labor regulations and upholding human rights of each employee. Several health programs, professional improvement, and performance and welfare evaluations are carried out regularly as in previous years.

Apresiasi

Izinkan kami menutup laporan ini dengan menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pengawas atas rekomendasi, saran, dan nasihat yang diberikan demi mendukung penerapan *good corporate governance* yang optimal dan menyeluruh. Terima kasih kami juga sampaikan

Appreciation

Allow us to close this report by expressing our gratitude to the Supervisory Board upon the recommendations, suggestions, and advice provided to support the optimal and comprehensive good corporate governance implementation. We would also thank all

kepada seluruh karyawan Perhutani atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusinya dalam menggerakkan produktivitas Perusahaan demi meraih visi dan misi yang ingin dicapai.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN yang telah melakukan fungsi pengawasan dan mendukung ketahanan bisnis Perhutani di sepanjang tahun 2020 Perhutani berkomitmen dalam memberikan nilai dan manfaat yang berkelanjutan kepada konsumen dan pemangku kepentingan pada umumnya.

employees of Perhutani for their dedication, hard work, and contribution in supporting the Company's productivity as well as achieving our vision and mission.

We would also thank the Ministry of SOEs for carrying out the supervisory function and supporting Perhutani's business resilience throughout 2020. Perhutani is committed to deliver sustainable value and benefits to our customers and stakeholders in general.

Jakarta, September 2021
Atas nama Direksi Perhutani

Jakarta, September 2021
On behalf of Board of Directors of Perhutani

Wahyu Kuncoro

Direktur Utama
President Director

Profil Direksi Periode 31 Desember 2020

Board of Directors Profile as of December 31, 2020

Wahyu Kuncoro

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia, Lahir di Surakarta, 31 Oktober 1969. Lulusan Sarjana Universitas Sebelas Maret dan meraih gelar Magister Management Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perum Pegadaian.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-55/MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020

Indonesian Citizen, Born in Surakarta on October 31, 1969. Earned Bachelor's degree from Universitas Sebelas Maret and Master's degree of Management from Universitas Gadjah Mada. Previously, He served as Vice President Director at Perum Pegadaian

Appointment Decree: SK-55/MBU/02/2020 dated February 26, 2020

Eko Wahyudi

Direktur Keuangan
Director of Finance

Warga Negara Indonesia, Lahir di Baturaja, 27 November 1963. Lulusan Sarjana Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 1986 dan meraih gelar Magister Sains Universitas Gadjah Mada tahun 2006. Sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Wilayah BRI Malang.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-255/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019.

Indonesian Citizen, Born in Baturaja on Novemeber 27, 1963. Earned Bachelor's degree of Law from Universitas Atmajaya Yogyakarta in 1986 and Master's degree of Science from Universitas Gadjah Mada in 2006. Previously, He served as Chief of BRI Malang Area.

Appointment Decree: SK-255/MBU/10/2019 dated October 17, 2019.

Kemal Sudiro

Direktur SDM, Umum dan IT
Director of HR, General Affair and IT

Warga Negara Indonesia, Lahir di Hannover, 1 Mei 1965. Meraih gelar *Bachelor of Commerce* (Bcomm) *in Finance Degree* dari Bond University, Australia setelah sebelumnya mengenyam pendidikan Business Administration di Sacramento City College, Amerika Serikat. Sebelumnya menjabat sebagai *HR Services & Industrial Head* di Bank Danamon dan menjadi Independent HR & Change Management *Advisor/Consultant* hingga Maret 2019.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-74/MBU/02/2019 tanggal 25 Maret 2019

Indonesian Citizen, Born in Hannover on May 1, 1965. Earned Bachelor of Commerce (Bcomm) in Finance Degree from Bond University, Australia after graduated Business Administration studies degree from Sacramento City College, United States. Previously, He served as HR Services & Industrial Head at Bank Danamon and Independent HR & Change Management Advisory/ Consultant until March 2019.

Appointment Decree: SK-74/MBU/02/2019 dated March 25, 2019.

Ahmad Ibrahim

Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran
Director of Business Development and Marketing

Warga Negara Indonesia, Lahir di Serang, 25 September 1967. Lulusan Sarjana Kehutanan Institut Pertanian Bogor kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar S2 di Forest Economic University of Goettigen Germany. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Perum Perhutani Regional Jawa Timur dan Direktur Utama PT Inhutani IV.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-55/MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020

Indonesian Citizen, Born in Serang on September 25, 1967. Earned Bachelor's degree of Forestry from Institut Pertanian Bogor and continued his education and earned Master's degree from Forest Economic University of Goettigen, Germany. Previously, He served as Division Head of Perhutani East Java Region and President Director of PT Inhutani IV.

Appointment Decree: SK-55/MBU/02/2020 dated February 26, 2020

Bambang Catur Wahyudi

Direktur Operasi
Director of Operation

Warga Negara Indonesia, Lahir di Blora, 20 Maret 1967. Lulusan Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1990 dan S2 Magister Management SDM Satyagama tahun 2001. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran dan Kepala Divisi Perum Perhutani Regional Jawa Tengah.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-43/MBU/02/2019 tanggal 4 Februari 2019.

Indonesian Citizen, Born in Blora on March 20, 1967. Earned Bachelor's degree of Forestry from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta in 1990 and Master's degree of HR Management from Satyagama in 2001. Previously, He served as Director of Business Development and Marketing and Division Head of Perum Perhutani Central Java Region.

Appointment Decree: SK-43/MBU/02/2019 dated February 4, 2019.

Natalis Anis Harjanto

Direktur Perhutanan Sosial
Director of Social Forestry

Warga Negara Indonesia, Lahir di Banyumas, 15 Oktober 1964. Lulusan Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan meraih gelar S2 di Nothern Arizona University (NAU) Flagstaf, Arizona, USA. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional PT Palawi Risorsis dan Direktur Utama PT Inhutani V.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-55/MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020.

Indonesian Citizen, Born in Banyumas on October 15, 1964. Earned Bachelor's degree of Forestry from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta and Master's degree from Northern Arizona University (NAU) Flagstaf, Arizona, USA. Previously, He served as Operations Director of PT Palawi Risorsis and President Director of PT Inhutani V.

Appointment Decree: SK-55/MBU/02/2020 dated February 26, 2020.

Profil Direksi Saat Ini

Profile of Current Board of Directors

Wahyu Kuncoro

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia, Lahir di Surakarta, 31 Oktober 1969. Lulusan Sarjana Universitas Sebelas Maret dan meraih gelar Magister Management Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perum Pegadaian.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-55/MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020

Indonesian Citizen, Born in Surakarta on October 31, 1969. Earned Bachelor's degree from Universitas Sebelas Maret and Master's degree of Management from Universitas Gadjah Mada. Previously, He served as Vice President Director at Perum Pegadaian.

Appointment Decree: SK-55/MBU/02/2020 dated February 26, 2020

Natalis Anis Harjanto

Direktur Operasi & Perhutanan Sosial
Director of Operation & Social Forestry

Warga Negara Indonesia, Lahir di Banyumas, 15 Oktober 1964. Lulusan Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan meraih gelar S2 di Nothern Arizona University (NAU) Flagstaf, Arizona, USA. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional PT Palawi Risorsis dan Direktur Utama PT Inhutani V.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-55/MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020.

Indonesian Citizen, Born in Banyumas on October 15, 1964. Earned Bachelor's degree of Forestry from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta and Master's degree from Northern Arizona University (NAU) Flagstaf, Arizona, USA. Previously, He served as Operations Director of PT Palawi Risorsis and President Director of PT Inhutani V.

Appointment Decree: SK-55/MBU/02/2020 dated February 26, 2020.

Muhamad Denny Ermansyah

Direktur SDM, Umum dan IT
Director of HR, General Affair and IT

Muhamad Denny Ermansyah lahir di Sukabumi 22 Agustus 1971. Menjabat Direktur SDM, Umum dan IT sejak 9 Februari 2021. Ia merupakan lulusan Sarjana Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1995. Karir sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Manajemen Perubahan Perum Perhutani.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-45/MBU/02/2021 tanggal 9 Februari 2021.

Muhamad Denny Ermansyah was born in Sukabumi on August 22, 1971. He has served as Director of Human Resources, General Affairs and IT since February 9, 2021. He is a graduate of the Bachelor of Forestry from Bogor Agricultural University (IPB) in 1995. His previous career served as Head of the Change Management Unit of Perum Perhutani.

Appointment Decree: SK-45/MBU/02/2021 dated February 9, 2021.

Kemal Sudiro

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Warga Negara Indonesia, Lahir di Hannover, 1 Mei 1965. Meraih gelar *Bachelor of Commerce* (Bcomm) in Finance Degree dari Bond University, Australia setelah sebelumnya mengenyam pendidikan *Business Administration* di Sacramento City College, Amerika Serikat. Sebelumnya menjabat sebagai *HR Services & Industrial Head* di Bank Danamon dan menjadi *Independent HR & Change Management Advisor/Consultant* hingga Maret 2019.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-74/MBU/02/2019 tanggal 25 Maret 2019

Indonesian Citizen, Born in Hannover on May 1, 1965. Earned Bachelor of Commerce (Bcomm) in Finance Degree from Bond University, Australia after graduated Business Administration studies degree from Sacramento City College, United States. Previously, He served as HR Services & Industrial Head at Bank Danamon and Independent HR & Change Management Advisory/ Consultant until March 2019.

Appointment Decree: SK-74/MBU/02/2019 dated March 25, 2019.

Ahmad Ibrahim

Direktur Komersial
Director of Commerce

Warga Negara Indonesia, Lahir di Serang, 25 September 1967. Lulusan Sarjana Kehutanan Institut Pertanian Bogor kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar S2 di Forest Economic University of Goettigen Germany. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Perum Perhutani Regional Jawa Timur dan Direktur Utama PT Inhutani IV.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-55/MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020

Indonesian Citizen, Born in Serang on September 25, 1967. Earned Bachelor's degree of Forestry from Institut Pertanian Bogor and continued his education and earned Master's degree from Forest Economic University of Goettigen, Germany. Previously, He served as Division Head of Perhutani East Java Region and President Director of PT Inhutani IV.

Appointment Decree: SK-55/MBU/02/2020 dated February 26, 2020

Endung Trihartaka

Direktur Perencanaan dan Pengembangan
Director of Planning and Development

Endung Trihartaka, Lahir di Rembang 2 Maret 1969. Menjabat Direktur Perencanaan dan Pengembangan sejak 9 Februari 2021. Ia merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1993. Karir sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

Dasar Hukum Penunjukan: SK-45/MBU/02/2021 tanggal 9 Februari 2021

Endung Trihartaka, Born in Rembang March 2, 1969. He has served as Director of Planning and Development since February 9, 2021. He graduated from the Faculty of Forestry, Gajah Mada University, Yogyakarta in 1993. His previous career served as Head of Perum Perhutani Central Java Regional Division.

Appointment Decree: SK-45/MBU/02/2021 dated February 9, 2021

Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Pengawas untuk Laporan Tahunan 2020

Supervisory Board Statements of Responsibility on Annual Report 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Jakarta, September 2021

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report 2020 have been fully disclosed and being solely responsible upon the accountability of the Annual Report Contents altogether with the Financial Statements

Jakarta, September 2021

DEWAN PENGAWAS / SUPERVISORY BOARD

Bambang Hendroyono
Ketua Dewan Pengawas
Supervisory Board Chairman

Yohanes Babtista Priyatmo Hadi
Dewan Pengawas
Supervisory Board

Bambang Risyanto
Dewan Pengawas Independen
Independent Supervisory Board

Komaruddin Simanjuntak
Dewan Pengawas
Supervisory Board

Chalid Muhammad
Dewan Pengawas Independen
Independent Supervisory Board

Noer Fauzi Rachman
Dewan Pengawas Independen
Independent Supervisory Board

Pernyataan Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Tahunan 2020

Board of Directors Statements of Responsibility on Annual Report 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Jakarta, September 2021

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report 2020 have been fully disclosed and being solely responsible upon the accountability of the Annual Report Contents altogether with the Financial Statements

Jakarta, September 2021

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

Wahyu Kuncoro
Direktur Utama
President Director

Natalis Anis Harjanto
Direktur Operasi & Perhutanan Sosial
Director of Operation & Social Forestry

Muhamad Denny Ermansyah
Direktur SDM, Umum dan IT
Director of HR, General Affair and IT

Kemal Sudiro
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Ahmad Ibrahim
Direktur Komersial
Director of Commerce

Endung Trihartaka
Direktur Perencanaan dan Pengembangan
Director of Planning and Development

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

Organisasi yang *agile* dan adaptif merupakan kunci utama untuk mencapai strategi korporat dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

An agile and adaptive organization is the key to achieving corporate strategy in a dynamic business environment

Identitas Perusahaan

Company Identity

NAMA PERUSAHAAN
COMPANY NAME

Perusahaan Umum Kehutanan Negara disingkat Perum Perhutani
Perusahaan Umum Kehutanan Negara or abbreviated as Perum Perhutani

STATUS PERUSAHAAN
COMPANY STATUS

Badan Usaha Milik Negara
State-Owned Enteprise

TANGGAL PEMBENTUKAN
DATE OF ESTABLISHMENT

29 Maret 1961
March 29, 1961

MODAL DASAR
AUTHORIZED CAPITAL

Rp2,59 triliun / trillion

ALAMAT
ADDRESS

Kantor Pusat Perum Perhutani - Graha Perhutani
Perum Perhutani Head office - Graha Perhutani
Jl. TB Simatupang No.22, RT.1/RW.8
Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

(021) 7805730 (hunting)

humas@perhutani.co.id

www.perhutani.co.id

KEPEMIIKAN
OWNERSHIP

100% milik Negara Republik Indonesia.
100% owned by Government of Republic of Indonesia.

PENCATATAN SAHAM
SHARES LISTING

Badan hukum berbentuk Perum yang tidak terbagi atas saham.

The legal entity is in form of Perum, whose ownership is not divided into shares.

DASAR HUKUM
DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
- Republic of Indonesia Government Regulation Number 72 of 2010 on Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
- Republic of Indonesia Government Regulation Number 73 of 2014 on Additional Investment of Republic of Indonesia Government into the Capital of Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Jejak Langkah Perusahaan

Company's Milestone

1961
Berdiri Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara " BPU Perhutani". Sebagai HARI LAHIRNYA PERHUTANI 29 Maret 1961.
The establishment of Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara "BPU Perhutani". March 29th, 1961 set as the anniversary of Perhutani.

1945
Jawatan Kehutanan diambil alih pemerintah Republik Indonesia.
Jawatan Kehutanan taken over by the Indonesian Republic Government.

1942
Ringyo Tyuoo Zimusyo, Jawatan Kehutanan diambil alih pemerintahan Jepang.
Ringyo Tyuoo Zimusyo, Jawatan Kehutanan taken over by Japanese Government.

1940
Pengelolaan hutan jati kembali ke Jawatan Kehutanan.
Management of teak forest returned to Jawatan Kehutanan.

1930
Pengelolaan hutan jati oleh *"Djatibedrijf"* (perusahaan hutan jati pemerintah Hindia Belanda)
Management of teak forest by "Djatibedrijf" (Dutch East Indies Teak Forest Company).

1927
Bosch Ordonnantie, dasar pengelolaan hutan di Jawa dan Madura.
Bosch Ordonnantie, the basis of forest management in Java & Madura..

1897
Dibentuk Jawatan Kehutanan Hindia Belanda.
The establishment of Jawatan Kehutanan Hindia Belanda.

1972
Berdiri Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang disingkat Perum Perhutani.
Established the State Forestry Public Company, which is abbreviated as Perum Perhutani.

2001
Perum Perhutani berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT)
Perum Perhutani transformed into a Limited Liability Company (PT).

2003
PT Perhutani kembali menjadi Perum Perhutani.
PT Perhutani returned to be Perum Perhutani.

2010
Penetapan PP nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
The establishment of Indonesian Republic Government Regulation No. 72 Year 2010 concerning Perusahaan Umum Kehutanan Negara.

2014
Perum Perhutani menjadi induk Holding BUMN Kehutanan dengan masuknya PT Inhutani I sampai V sebagai Anak Perusahaan Perum Perhutani.
Perum Perhutani becomes the holding company of SOE of Forestry by joining PT Inhutani I to V as Perum Perhutani Subsidiar.

2020
Perhutani meresmikan logo baru dan menempati Kantor Pusat baru (Graha Perhutani) yang berlokasi di Jakarta Selatan.
Perhutani inaugurated the new logo and occupied the new Head Office (Graha Perhutani) located in South Jakarta.

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History

Sejarah Perhutani dimulai ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Kehutanan berdasarkan Governement Besluit No. 21 tanggal 9 Februari 1897.

The history of Perhutani began when the Government of the Netherlands East Indies established the Forestry Bureau based on Government Besluit No. 21 dated on September 9, 1897.

Jawatan Kehutanan berakhir dengan diterbitkannya peraturan Bosch Ordonnantie pada tahun 1927 sebagai dasar pengelolaan hutan di Jawa dan Madura. Peraturan tersebuttidak berlangsung lama karena pada tahun 1930 pengelolaan hutan diserahkan kepada *"Djatibedrijf"*, yaitu perusahaan hutan jati pemerintah Hindia Belanda. Sepuluh tahun kemudian *"Djatibedrijf"* mengembalikan pengurusan hutan jati di Jawa dan Madura kepada Jawatan Kehutanan. Pada tahun 1942 ketika pemerintah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang, Jawatan Kehutanan berganti nama menjadi Ringyo Tyuoo Zimusyo.

The Forestry Bureau ended with the publication of Bosch Ordonnantie regulations in 1927 as the basis for forest management in Java and Madura. The regulation did not last long because in 1930 forest management was handed over to "Djatibedrijf", the Dutch East Indies teak forest company. Ten years later, "Djatibedrijf" restored the management of teak forests in Java and Madura to the Forestry Bureau. In 1942 when the Dutch East Indies government fell into the hands of Japan, the Forest Bureau changed its name to Ringyo Tyuoo Zimusyo.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura dilimpahkan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia. Pada tahun 1961 Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara (BPU Perhutani), dan berubah menjadi

Since independence of the Republic of Indonesia on August 17, 1945, rights, obligations, responsibilities and authority of forest management in Java and Madura are delegated to the Forest Bureau of the Republic of Indonesia. In 1961, the Government of Indonesia established the General Board of the State Forestry Company (BPU Perhutani), and later changed into the State

Perubahan Status dan Nama

Perusahaan Pada tahun 2001 Perum Perhutani berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT), kemudian pada tahun 2003 kembali menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Change in Company Status and Name In 2001, status of Perum Perhutani was changed into a Limited Liability Company (PT), and was further changed to become Perusahaan Umum (Perum) in 2003.

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di tahun 1972.

Pada periode 1972-2010 Perhutani mengalami beberapa kali perubahan hukum sejalan dengan perkembangan lingkungan yang ada, hingga di tahun 2010, Pemerintah mengatur pengelolaan kehutanan negara dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.73 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, pemerintah menetapkan Perum Perhutani sebagai induk Holding BUMN Kehutanan dengan PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V sebagai Anak Perusahaan.

Forestry Corporation (Perum Perhutani) in 1972.

In the 1972-2010 period, Perhutani experienced several legal changes in line with the development of the existing environment, until in 2010, the Government regulates the management of state forestry in Government Regulation No. 72 of 2010 on Public Corporation of State Forestry (Perum Perhutani). Furthermore, based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 73 of 2014 on the Addition of Equity Participation of the Republic of Indonesia into the equity of State-Owned Forestry Enterprises (Perum), the government established Perhutani as parent company of the holding of state-owned forestry enterprise with PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V as Subsidiaries.

Bidang Usaha

Business Field

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, pasal 11 ayat (1), maksud dan tujuan usaha Perhutani adalah menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa dari hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pursuant to the Government Regulation No. 72 of 2010 on State-Owned Forestry Enterprises (Perum Perhutani), Article 11 paragraph (1), the purpose and the objective of Perhutani's business is to organize business for public benefit in the form of providing goods and/or services from the forest with the affordable price for the community based on the principles of Sustainable Forest Management and good corporate governance.

Pasal 11 Ayat (2) Kegiatan Usaha Utama

- Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan;
- Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- Rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- Perlindungan hutan dan konservasi alam;
- Pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi;
- Pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan;
- Penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan;
- Pengembangan agroforestry;
- Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat; dan
- Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.

Article 11 Paragraph (2) Main Business Activities

- Forest governance and forest management plans;
- Forest utilization, covering area utilization, utilization of environmental services, utilization of wood and non-wood forest products, wood and non-wood forest product collection
- Forest rehabilitation and reclamation;
- Protection of forests and nature conservation;
- Processing of forest products into raw materials or finished materials;
- Education and training in forestry;
- Research and development in forestry;
- Development of agroforestry;
- Establish and develop Communities Forests and/or Communities Plantation Forest; and
- Trade in forest products and own production or production of other parties.

Pasal 11 Ayat (3) Kegiatan Usaha Lain

Selain kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain berupa:

- Usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk trading house, agro industrial complex;
- Agribisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, *resort, rest area,* rumah sakit, pertambangan galian C, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya; dan
- Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Kegiatan yang diusahakan saat ini berupa produk dan layanan sebagai berikut:

- Kayu Bundar *(log)*
- Kayu olahan dan kayu olahan lanjutan
- Produk kimia hutan: gondorukem, terpentin dan derivatifnya, minyak kayu putih, kopal, dan lak.
- Wisata alam
- Produk pangan dan kesehatan: madu, air madu, air
- Benih dan Bibit tanaman kehutanan
- Penangkaran satwa untuk konservasi perlindungan

Article 11 Paragraph (3) Other Business Activities

In addition to the principal business activities, the Company may conduct other business activities in the form of:

- Efforts to optimize the resources potential for trading house, agro industrial complex;
- Agribusiness, property, warehousing, tourism, hotels, resorts, rest areas, hospitals, C quarry mining, telecommunication infrastructure, utilization of water resources, and other natural resources; and
- Other business activities in accordance with the intent and the Company's objectives.

The activities currently being carried out are in the form of products and services as follows:

- Log
- Processed wood and advanced processed wood
- Forest chemical products: gum rosin, turpentine and its derivatives, Eucalyptus Oil, copal, and lacquers.
- Natural tourism
- Food and health products: honey, honey water, water
- Germs and Seeds of forestry crops
- Animal breeding for conservation and protection

Visi dan Misi Perusahaan

Company Vision and Mission

VISION

Visi

Menjadi Perusahaan Pengelola Hutan Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Masyarakat.

To Become the Sustainable Forest Management Company and Beneficial to the Community.

MISSION

Misi

a. Mengelola Sumber Daya Hutan secara Lestari.
b. Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan.
c. Mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

a. Managing Forest Resources Sustainably.
b. Caring for the benefit of society and the environment.
c. Optimizing the forest business with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Visi Misi Perum Perhutani ditetapkan Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 182/Kpts/Dir/12/2020 tanggal 29 Desember 2020.

Pursuant to Perum Perhutani Board of Directors Decree Number 182/Kpts/Dir/12/2020 dated December 29, 2020, Vision and Mission of Perum Perhutani are as follows:

Review dan Persetujuan Atas Penetapan Visi dan Misi

Pada tahun 2020, Manajemen Perhutani melakukan *review* atas Visi dan Misi Perusahaan. Hasil *review* tersebut menghaslikan visi dan misi baru Perusahaan yang di sahkan melalui Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani 182/Kpts/Dir/12/2020 .

Review and Approval of the Establishment of Vision and Mission

In 2020, Management of Perhutani has reviewed Vision and Mission of the Company. Result of the review generates the Company's new vision and mission as ratified through Perum Perhutani Board of Directors Decree No.182/Kpts/Dir/12/2020.

Tata Nilai Perusahaan

Company Value

Dalam rangka mewujudkan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial *(social welfare)*, penyedia lapangan kerja, dan penyedia talenta, dibutuhkan transformasi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dimana salah satunya melalui penetapan Nilai-Nilai Utama *(Core Values)* Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, Perhutani mengadopsi dan mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip AKHLAK dan telah dikeluarkan Surat Keputusan Direksi dengan No 158/KPTS/DIR/10/2020 tentang Tata Nilai Perusahaan yaitu :

In order to realize the role of State-Owned Enterprises as an engine of economic growth, an accelerator of social welfare, a provider of employment, and a provider of talent, it is necessary to transform the Human Resources of State-Owned Enterprises, one of which is through the determination of Core Values. Human Resources of State-Owned Enterprises as the identity and glue of work culture that supports sustainable performance improvement.

Therefore, Perhutani regulates and optimizes company values based on the AKHLAK principles and has issued a Directors Decree with No. 158/KPTS/DIR/10/2020 concerning Corporate Values.

AMANAH
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

TRUST
Uphold the trust given

KOMPETEN
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

COMPETENT
Continue to learn and develop capabilities

HARMONIS
Saling peduli dan menghargai perbedaan

HARMONIOUS
Mutual care and respect for differences

LOYAL
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

LOYAL
Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State.

ADAPTIF
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

ADAPTIVE
Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change

KOLABORATIF
Membangun kerjasama yang sinergis.

COLLABORATIVE
Build synergistic cooperation

Logo Perusahaan
Company Logo

Perhutani

Logo Perusahaan terinspirasi dari perjalanan PERUM PERHUTANI untuk mengeksplorasi lebih jauh di luar pengelolaan kehutanan yang ada saat ini untuk senantiasa meningkatkan nilai kehutanan di Indonesia.

Inspired from the journey of PERUM PERHUTANI to explore beyond current forestry management to always increase forestry values in Indonesia.

MAKNA WARNA LOGO

- Warna Hijau Hutan melambangkan subur, alam, kekayaan, berkelanjutan, damai, dan permulaan yang baru.

  Green Forest Color symbolizes lush, nature, wealth, sustainability, peace, and new beginnings.

- Warna Hijau Limau melambangkan penuh semangat, energi tinggi, kreativitas, kesegaran, dan keyakinan.

  Lime Green represents passion, high energy, creativity, freshness and confidence.

Pohon kaya akan ragam daun mewakili kekayaan, mimpi, hutan, produk alami dan manusia.

Trees rich with various leaves represent wealth, dreams, forests,natural products and people.

Manusia dan Pohon melambangkan hubungan kuat yang membawa harmoni.

Man and Tree symbolize the strong relationship that brings harmony.

Tangan melambangkan pemeliharaan Ibu Pertiwi.

Hands symbolize the care of Mother Earth.

Gaya Tulisan Perhutani melambangkan pondasi yang kuat untuk pertumbuhan.

Perhutani's writing style symbolizes a strong foundation for growth

Perhutani

Komposisi Pemilik Modal

Shareholders Composition

Perum Perhutani merupakan BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), dimana 100 persen modalnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Perum Perhutani is an SOE in form of Perusahaan Umum (Perum), where 100% of its capital is owned by the Government of the Republic of Indonesia. The Company's capital constitutes the separated state assets and is not divided into shares.

Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure

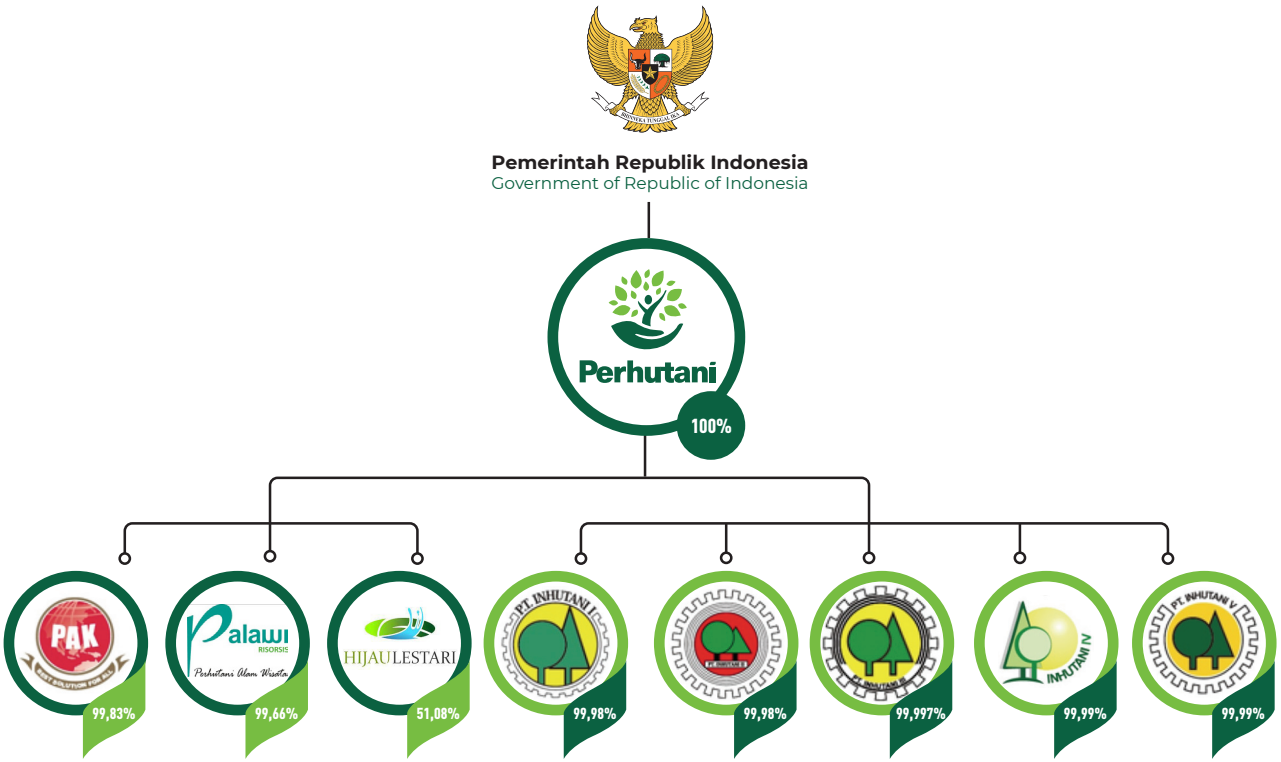

Struktur Organisasi Perusahaan

Organization Structure

Dewan Pengawas
Supervisory Board

WAHYU KUNCORO
Direktur Utama
President Director

Satuan Manajemen Perubahan
Management Unit

AHMAD IBRAHIM
Direktur Pengembangan Bisnis & Pemasaran
Director of Business Planning, Development, Marketing and Strategy

BAMBANG CATUR WAHYUDI *)
Direktur Operasi
Director of Operation

- **Divisi Perencanaan & Pengembangan Bisnis**
  Division of Business Planning & Development
- **Divisi Pemasaran**
  Marketing Division
- **Divisi Pembinaan Anak Perusahaan & Sinergi Bisnis**
  Subsidiary Development & Business Synergy Division
- **Divisi Pengelolaan SDH**
  SDH Management Division
- **Divisi Produksi & Industri**
  Production & Industry Division
- **Divisi Ecotourism & Agroforestry**
  Ecotourism & Agroforestry Division

*) Bambang Catur Wahyudi (Direktur Operasi Perseroan) meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020 dan digantikan sementara oleh Natalis Anis Harjanto sebagai Plt. Direktur Operasi (merangkap DIrektur Perhutanan Sosial) hingga masa jabatan berakhir pada 9 Februari 2021

Struktur Organisasi Perum Perhutani berdasarkan **SK Menteri BUMN Nomor SK-55/MBU/02/2020** tanggal **26 Februari 2020** tentang Pemberhentian, Perubahan Numenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Perhutani.

The organizational structure of Perum Perhutani is based on the Decree of the Minister of SOE Number SK-55/MBU/02/2020 dated February 26, 2020 concerning Dismissal, Changes in Position Numenclature, Transfer of Tasks and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Perhutani.

Satuan Pengawasan Intern
Internal Audit Unit

Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretary

NATALAS ANIS HARJANTO
Direktur Perhutanan Sosial
Director of Social Forestry

KEMAL SUDIRO
Direktur SDM Umum dan IT
Director of HR, General Affairs and IT

EKO WAHYUDI
Direktur Keuangan
Director of Finance

- **Divisi Perencanaan Perhutanan Sosial** — Social Forestry Planning Division
- **Divisi Pengembangan Perhutanan Sosial** — Social Forestry Development Division
- **Divisi SDM dan Umum** — HR and General Affairs Division
- **Divisi Teknologi Informasi** — Information Technology Division
- **Divisi Hukum dan Kepatuhan** — Legal and Compliance Division
- **Divisi Keuangan** — Finance Division
- **Divisi Pengendalian Kinerja & Biaya** — Performance & Cost Controlling Division
- **Divisi Manajemen Risiko** — Risk Management Division

*) Bambang Catur Wahyudi (Operations Director) passed away on September 16, 2020 and is temporarily replaced by Natalis Anis Harjanto as Act. Operations Director (concurrently as Social Forestry Director) until the terms ended on February 9, 2021.

Daftar Entitas Anak dan/ atau Entitas Asosiasi

List of Subsidiaries and/or Associated Entities

PT INHUTANI I

Bidang Usaha: Pengelolaan hutan dan produksi hasil hutan baik berupa hutan alam maupun hutan tanaman dengan produk utama kayu bulat dan getah (Pinus dan Karet) serta Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) dengan produk utama berupa *woodworking*.

Line Of Business : Forest and forest commodities production management both natural and plantation forests with main products such as tumber and latex (Pine and Rubber) and Upstream Wood Processing Industry (IPKH) with woodworking as main product.

Tahun Beroperasi:
Year Of Operations:
1973
Kepemilikan:
Ownership:
Perum Perhutani
(99,98%)

PT INHUTANI II

Bidang Usaha: Pengusahaan hutan meliputi hutan tanaman sebagai usaha inti, hutan alam, produksi kayu gergajian/olahan, jasa kehutanan seperti rehabilitasi DAS dan pelestarian alam.

Line Of Business: Forest commerce, including plantation forest as core business, natural forest, sawn/processed wood production, forestry services such as watershed rehabilitation and nature conservation.

Tahun Beroperasi:
Year Of Operations:
1975
Kepemilikan:
Ownership:
Perum Perhutani
(99,98%)

PT INHUTANI III

Bidang Usaha: Pengusahaan hutan tanaman industri, pengolahan dan industri hasil hutan serta hasil hutan ikutan, reboisasi dan rehabilitasi IPPKH, perbenihan, pembibitan dan penanaman jenis tanaman baru, jasa bidang kehutanan dan jasa wisata hutan.

Tahun Beroperasi:
Year of Operation
1974
Kepemilikan:
Ownership:
Perum Perhutani
(99,997%)

Line Of Business: Industrial forest plantations, processing and industrial forest products and associated forest products, reforestation and rehabilitation of IPPKH, seeding, seeding and planting of new plant species, forestry sector services and forest tourism services.

PT INHUTANI IV

Bidang Usaha: Pengelolaan hutan, pengusahaan hutan, pengolahan dan industri hasil hutan serta hasil hutan ikutan, reboisasi dan rehabilitasi IPPKH, perbenihan, pembibitan dan penanaman jenis tanaman baru.

Line Of Business: Forest management and commerce, forest and sub-forest commodities manufacturing and industry, IPPKH greening and rehabilitation, cultivation. New plantation species cultivation and planting.

Tahun Beroperasi:
Year of Operation
1991
Kepemilikan:
Ownership:
Perum Perhutani
(99,99%)

PT INHUTANI V

Bidang Usaha: Pengelolaan hutan, pengusahaan hutan, pengolahan dan industri hasil hutan serta hasil hutan ikutan, reboisasi dan rehabilitasi IPPKH, perbenihan. Pembibitan dan penanaman jenis tanaman baru, jasa bidang kehutanan dan jasa wisata hutan.

Line Of Business: Forest management and commerce, forest and sub-forest commodities manufacturing and industry, IPPKH greening and rehabilitation, cultivation. New plantation species cultivation and planting, forestry and forest tourism services.

Tahun Beroperasi:
Year of Operation
1974
Kepemilikan:
Ownership:
Perum Perhutani
(99,99%)

PT PALAWI RISORSIS

Bidang Usaha: Jasa kegiatan wisata di alam terbuka, jasa pariwisata, jasa pelatihan dan keterampilan, jasa konfensi, perjalanan insentif dan pameran impresariat, jasa penambangan bahan galian pasir, batu-batuan, pasir, gamping, granit, tanah liat, pasir besi, mineral dan sumber alam lainnya, jasa pengolahan hasil tambang, jasa pengolahan limbah tambang dan kawasan,

Tahun Beroperasi:
Year of Operations
2002
Kepemilikan:
Ownership:
Perum Perhutani
(99,66%)

jasa pengadaaan dan penyimpanan hasil tambang, jasa lingkungan dan pembangkit listrik tenaga air, jasa optimalisasi properti.

Line Of Business: Ecoutourism services, tourism services, training and skill services, convention services, incentives trip and impresariat exhibition, mining services of sand excavation, rocks, sand, limestone, granite, clay, iron sand, minerals and other natural resources, mining product processing services, mining and regional waste processing services, mining product storage and service, environmental services and hydro power plant, property optimization services.

PT Perhutani Anugerah Kimia (PTPAK)

Bidang Usaha: Bergerak di bidang industri, khususnya industri dari segala macam bahan hasil hutan, pertanian dan pekebunan yang dapat diolah dan diperdagangkan, terutama pada pengolahan hasil hutan non kayu berupa getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin, serta produk derivat gondorukem dan derivat terpentin.

Line Of Business: Operated in industrial fields, particularly industry from various forest, agriculture and plantation commodities, especially non-wood forest manufacturing such as pine sap into gum rosin and turpentine, and gum rosin derivatives and turpentine derivatives.

Tahun Beroperasi:
Year of Operations
2002
Kepemilikan:
Ownership:
Perum Perhutani
(99,83%)

PT Bakti Usaha Menanam Hijau Lestari

Bidang Usaha: Bidang jasa, pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, peternakan dan perikanan.

Line Of Business: Operated in services, agtriculture, forestry, industry, trading, livestock and fisheries.

Tahun Beroperasi:
Year of Operation
2009
Kepemilikan:
Ownership:
Perum Perhutani
(51,08%)

Nama dan alamat Entitas dan/ atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Kantor Pusat

Name & Address of Subsidiaries and/or Branch Offices or Representative Offices

KANTOR PERUM PERHUTANI
OFFICE OF PERUM PERHUTANI

Kantor Pusat Perum Perhutani
Head Office of Perum Perhutani

Graha Perhutani
Jl. TB Simatupang No.22, RT.1/RW.8
Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp. : (021) 7805730 (hunting)
Email : humas@perhutani.co.id
Website : www.perhutani.co.id

Divisi Regional Jawa Tengah
Central Java Regional Division

Jl. Pahlawan No. 15-17, Semarang 50243
Telp. : (024) 8413631 (hunting)
Fax. : (024) 8443142

Divisi Regional Jawa Timur
East Java Regional Division

Jl. Genteng Kali No. 49
Tromol Pos 840, Surabaya 6008
Telp. : (031) 5343851 (hunting)
Fax. : (031) 5311784

Divisi Regional Jawa Barat & Banten
West Java & Banten Regional Division

Jl. Soekarno Hatta No.628 KM 14
Bandung 40292
Telp. : (022) 7802871 (hunting
Fax. : (022) 7802972

Pusdikbang SDM Perum Perhutani
Pusdikbang HR Perum Perhutani

Jl. Rimba Mulya No.11 Madiun
http://pusdiklatperhutani.com
Telp. : (0351) 453094
Fax. : (0351) 453093

Puslitbang SDH Perum Perhutani

Jl. Wonosari Batokan
Tromol Pos 6, Cepu 58302
Telp. : (0296) 421233
Fax. : (0296) 422439

ANAK PERUSAHAAN
SUBSIDIARIES

PT Inhutani I

Jl. KH Ahmad Dahlan 69, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Telp. : +62-21 7200402
Fax. : +62-21 72795106
Website : www.inhutani1.co.id

PT Inhutani II

Jl Tebet Timur Raya No.7
Jakarta 12820
Telp. : (021) 8299572
Fax. : (021) 8350862
Website : www.inhutani-2.co.id

PT Inhutani III
Gedung Manggala Wanabakti
Blok IV Lantai 7, Jl Gatot Subroto,
Jakarta 10270, Indonesia
Telp. : (021) 5703265, 5721322 Ext:5379
Fax. : (021) 5703265
Website : www.inhutani3.co.id

PT Inhutani IV
KANTOR DIREKSI
Medan Jl. Tritura, No.6 MEDAN - 20146
Telp : (061) 42078608
Fax : (061) 42078688,
email : kandir@inhutani4.co.id

PT Inhutani V
Graha Perhutani - Lantai 16
Jl. TB Simatupang, Jatipadang, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540

PT Palawi Risorsis
Rukan Tanjung Mas Raya Blok B1/6
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530
Telp. : (021) 7810475
Fax. : (021) 78834061
Website : www.palawi.co.id

PT Perhutani Anugrah Kimia
Gd. Graha Pratama Lt. 3,
Jl. MT. Haryono Kav 15, Jakarta 12810
Telp. : (021) 83709362
Fax. : (021) 83709363
Website : www.pak.co.id

PT BUMN Hijau Lestari I
Jln. Batununggal Indah VI No.30 dan 32
Bandung, Jawa Barat
Telp. : (022) 87529980
Fax. : (022) 87798699
Website : www.bumnhijau.com

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Name and Address of Supporting Institutions and/or Professions

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan
Jl. Jend. Sudirman No.Kav 29-31
Jakarta 12920, Indonesia

PUBLIC ACCOUNTING FIRM
KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan
Jl. Jend. Sudirman No.Kav 29-31
Jakarta 12920, Indonesia

Kronologis Pencatatan Saham

Shares Listing Chronology

Perum Perhutani per 31 Desember 2020 merupakan salah satu BUMN Non Listed Non Keuangan atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, Perum Perhutani tidak dapat menyajikan informasi tentang kronologis pencatatan saham, jenis tindakan korporasi *(corporate action)* yang menyebabkan perubahan jumlah saham, perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku dan nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

As of December 31, 2020, Perum Perhutani is a Non-Finance Non-Listed SOE or not yet listed any shares at Indonesia Stock Exchange. Therefore Perum Perhutani does not present information about shares listing chronology, type of corporate action that caused changes in shares outstanding, changes in number of shares from initial listing until end of fiscal year and name of stock exchange where the Company's shares are listed.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing Chronology

Perum Perhutani per 31 Desember 2020 tidak menerbitkan efek dalam bentuk apapun. Dengan demikian Perum Perhutani tidak dapat menyajikan informasi tentang kronologis pencatatan efek lainnya, jenis tindakan korporasi *(corporate action)* yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya, perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan dan peringkat efek.

As of December 31, 2020, Perum Perhutani has not issued any securities. Therefore, Perum Perhutani does not present information on the chronology of other securities listing, types of corporate action causing changes in other securities outstanding, changes in the number of securities from initial listing up to the end of fiscal year, name of stock exchange on which the Company's other securities are listed and securities rating.

Wilayah Kerja

Operational Area

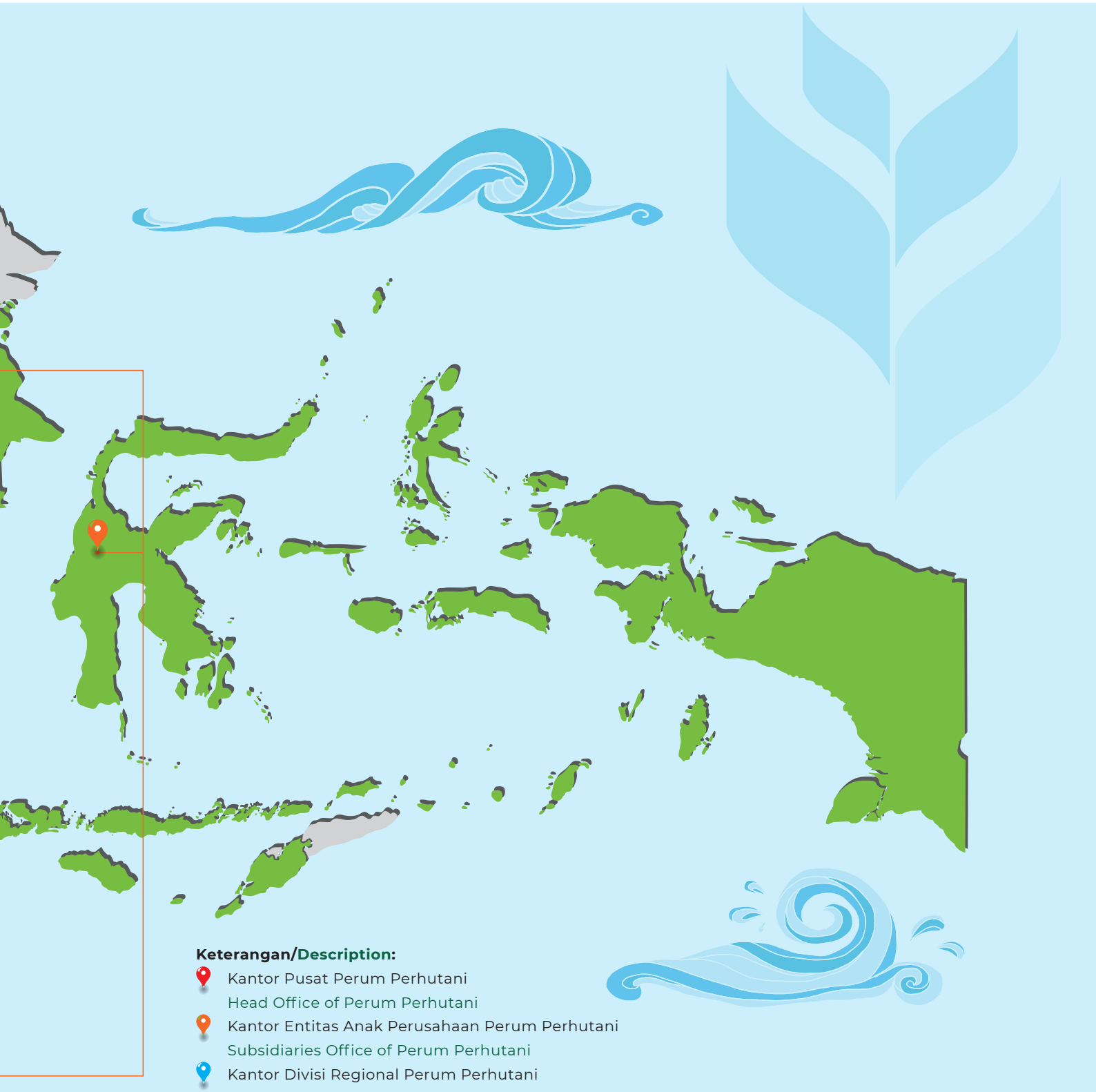

Keterangan/Description:

- Kantor Pusat Perum Perhutani
  Head Office of Perum Perhutani
- Kantor Entitas Anak Perusahaan Perum Perhutani
  Subsidiaries Office of Perum Perhutani
- Kantor Divisi Regional Perum Perhutani
  Regional Division Office of Perum Perhutani
- Puslitbang dan Pusdikbang Perum Perhutani
  Research Center and Pusdikbang of Perum Perhutani
- Pabrik Sagu Perum Perhutani
  Sagu Factory of Perum Perhutani

Informasi Pada Website Perusahaan

Information on Official Website

Perusahaan memiliki website dengan alamat https://www.perhutani.co.id, website diperbaharui secara berkala agar menjadi semakin informatif dan mudah untuk diakses oleh para stakeholders. Website Perusahaan memiliki dua versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

The Company has a website with address at http://www.perhutani.co.id/. The Company always attempts to update the website regularly to be more informative and accessible for the stakeholders. The website is presented bilingual in Indonesian and English languages.

Website Perusahaan juga memuat informasi mengenai praktik GCG yang telah diterapkan oleh Perusahaan antara lain Struktur Organisasi dan Tim Manajemen, Pemilik Modal, *Core Values* serta *Governance Structure* (memuat dokumen-dokumen GCG seperti Pedoman GCG, *Code of Conduct*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Kebijakan *Whistleblowing System*, dan dokumen kebijakan lainnya).

Official website of the Company also presents information of GCG practice that has been implemented by the Management, such as Organization Structure and Management Team, Shareholders, Core values and Governance Structure (disclosing GCG documents such as Code of GCG, Code of Conducts, Gratification Control Guideline, Whistleblowing System Policy and other policy documents).

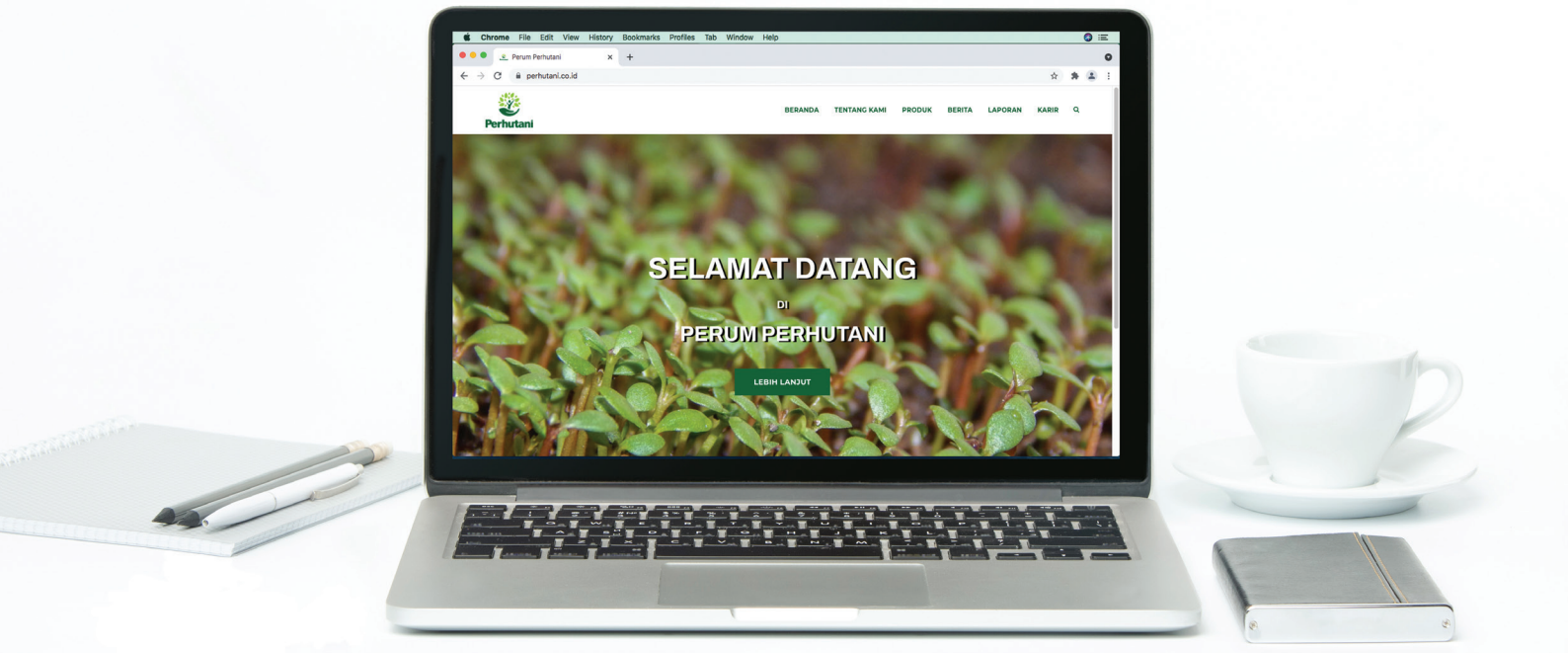

PROFIL	**PROFILE**
Berisi latar Profil Perusahaan, Tata Kelola, Visi & Misi dan Tata Nilai, Wilayah Kerja, Divisi Regional, Sumberdaya Manusia, Group Perusahaan, Sejarah Perusahaan, Logo Perusahaan, Penghargaan.	Contains background of Company Profile, Governance, Vision & Mission and Values, Work Area, Regional Division, Human Resources, Company Group, Company History, Company Logo, Awards.
PRODUK	**PRODUCT**
Berisi Toko Perhutani, Aset, Rosin's update.	Contains Perhutani Stores, Assets, Rosin's updates.
SERTIFIKASI	**CERTIFICATION**
Berisi Hutan bersertifikat, sertifikasi hutan, sertifikasi industri.	Contains certified Forest, forest certification, industrial certification.
RESPONSIBILITY	**RESPONSIBILITY**
Berisi program PHBM, PKBL, Pelestarian lingkungan, program ketahanan pangan, inspirasi, kerjasama.	Contains PHBM programs, PKBL, environmental conservation, food security programs, inspiration, cooperation.
LAPORAN	**REPORT**
Berisi Laporan Tahunan, Laporan Sustainability, Laporan Statistik Perusahaan, Kalender Kegiatan.	Contains Annual Report, Sustainability Report, Company Statistics Report, Activity Calendar.
LAYANAN INFO PUBLIK	**PUBLIC INFORMATION SERVICE**
Berisi penjelasan, PPID, regulasi dan permohonan.	Contains explanations, PPID, regulations and requests
NEWS	**NEWS**
Berisi Press Realese, berita, suara rimba, majalah duta rimba, buku perhutani, rekrutmen karyawan.	Contains Press Realese, news, jungle sound, jungle ambassador magazine, Perhutani book, employee recruitment.
KONTAK	**CONTACT**
Informasi mengenai alamat lengkap Perusahaan, baik kantor pusat maupun perwakilan.	Information regarding the complete address of the Company, both the head office and representatives.

Peristiwa Penting 2020

Important Event 2020

30 JANUARI 2020

Kick Off Meeting 2020

Kick Off Meeting 2020

22 FEBRUARI 2020

Program Rekrutmen Bersama BUMN

SOE Joint Recruitment Program

29 MARET 2020

HUT Perhutani ke-59

59th Anniversary of Perhutani

14 MEI 2020

Penghargaan Corporate Branding PR Award 2020

Corporate Branding PR Award 2020

30 JUNI 2020

Penghargaan Millenial Summit Innovation

Millennial Summit Innovation Award

6 AGUSTUS 2020

Kunjungan Kerjasama Tebu Bersama PTPN

Sugarcane Cooperation Visit with PTPN

12 AGUSTUS 2020

Penyerahan Bantuan Covid-19 oleh Direktur Utama PERUM PERHUTANI

Delivery of Covid-19 Aid by the President Director of PERUM PERHUTANI

26 AGUSTUS 2020

Perhutani Mendapatkan Sertifikasi ISO 37001

Perhutani Gets ISO 37001 Certification

12 NOVEMBER 2020

MOU Kerjasama Komoditi Jagung Koperasi HKTI

MOU of HKTI Cooperative Corn Commodity Cooperation

18 NOVEMBER 2020

MOU Perhutani dengan IPB (Institut Pertanian Bogor)

MOU of Perhutani with IPB (Bogor Agricultural Institute)

25 NOVEMBER 2020

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Public Information Disclosure Award

15 DESEMBER 2020

Perhutani Mendapatkan Penghargaan Sebagai FSC Certificate Holder Pertama

Perhutani Receives Award as the First FSC Certificate Holder

22 DESEMBER 2020

Perhutani Mendapatkan Penghargaan Top Digital and Top Leader Digital On Implementation 2020

Perhutani Receives Top Digital Award and Top Leader Digital On Implementation 2020

29 DESEMBER 2020

- **Launching Perhutani Forestry Institute (PeFI)**
- **Perubahan Logo dan Gedung Baru**

- Launching of Perhutani Forestry Institute (PeFI)
- New Logo and Building Change

Penghargaan

Awards

29 April 2020

Digital Innovation for Excellent Performance: Top Chief Information Officer in Digital Business Process For Forestry Industry 2020

Digital Innovation for Excellent Performance : Top Chief Information Officer in Digital Business Process For Forestry Industry 2020

25 November 2020

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik: Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat

Public Information Disclosure Award : Award from Central Information Commission

14 MEI 2020

Penghargaan Corporate Branding PR Award 2020

Corporate Branding PR Award 2020

30 JUNI 2020

BUMN Millenial Innovation Summit: Runner Up Bussiness Strategy Category & Penghargaan dari Kementrian BUMN

BUMN Millennial Innovation Summit: Runner Up Business Strategy Category Award from the Ministry of SOEs

15 DESEMBER 2020

Perhutani Mendapatkan Penghargaan Sebagai FSC Certificate Holder Pertama

Perhutani Received an Award as the First FSC Certificate Holder

22 DESEMBER 2020

Top Digital and Top Leader Digital On Implementation 2020 Digital Marketing & Human Capital Award 2020: The Best Human Capital in People Development & Technology Services 2020. Penghargaan dari Indonesia Business News.

Top Digital and Top Leader Digital On Implementation 2020. Digital Marketing & Human Capital Award 2020 : The Best Human Capital in People Development & Technology Services 2020 Award from Indonesia Business News.

Sertifikasi

Certification

Certificate

Dengan ini menyatakan

PERUM PERHUTANI

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 9 – 11
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270

telah menetapkan dan menerapkan
sistem manajemen sesuai dengan standar

ISO 37001 : 2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan

untuk ruang lingkup :

Proses perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan hutan

Sertifikasi ini dilakukan sesuai dengan prosedur audit dan sertifikasi PT. CHESNA dan tunduk pada audit pengawasan berkala.

Nomor Sertifikat : CHN 220005
Tanggal Terbit : 11-08-2020
Tanggal Kedaluarsa : 10-08-2023
Revisi : 00

Surabaya, 15-12-2020
Direktur
PT. CHESNA

Dipindai dengan CamScanner

26 Agustus 2020
Anty-Bribery Management System ISO 37001: 2016

Masa Berlaku: 2020 - 2023

August 26, 2020

Anty-Bribery Management System ISO 37001: 2016

Validity Period: 2020 - 2023

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan Predikat “Baik” Wilayah Jawa Barat dan Banten

Pemberi: Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) PT Equality Indonesia

Masa Berlaku: 11 Mei 2016 - 10 Mei 2021

Sustainable Production Forest Management Certification with “Good” Predicate for West Java and Banten Region

Institution: Assessment Institute for Sustainable Production Forest Management (LP-PHPL) PT Equality Indonesia

Validity Period: May 11, 2016 - May 10, 2021

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan predikat "Baik" wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah

Pemberi: Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) PT Equality Indonesia

Masa Berlaku: 18 Mei 2016 - 17 Mei 2021

Certification of Sustainable Production Forest Management with "Good" predicate for East Java and Central Java

Institution: Assessment Institute for Sustainable Production Forest Management (LP-PHPL) PT Equality Indonesia

Validity Period: May 18, 2016 - May 17, 2021

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan Predikat "Baik" Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur

Pemberi: Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) PT Equality Indonesia

Masa Berlaku: 18 Mei 2016 - 17 Mei 2021

Sustainable Production Forest Management Certification with "Good" Predicate for Central Java and East Java Jawa

Institution: Assessment Institute for Sustainable Production Forest Management (LP-PHPL) PT Equality Indonesia

Validity Period: May 18, 2016 - May 17, 2021

Sertifikasi Management System “Forest Management”

Pemberi: SGS

Masa Berlaku: 28 Okt 2016 - 18 Mei 2021

Management System Certification “Forest Management”

Institution: SGS

Validity Period: Oct 28, 2016 - May 18, 2021

Sistem Manajemen Mutu

Pemberi: Mutu Certification International

Masa berlaku: 3 Maret 2014 - 2 Maret 2020

Quality management system

Institution: International Certification Quality Provider

Validity Period: March 3, 2014 - March 2, 2020

Penjelasan:

A. Sertifikasi Mandatory

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak, Perum Perhutani wajib melaksanakan penilaian kinerja PHPL. Sertifikasi PHPL sudah dilaksanakan mulai tahun 2016 dan tahun 2018 dengan Lembaga Penilai PHPL dari PT Equality Indonesia.

Explanation:

A. Mandatory Certification

1. Pursuant to the Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Concerning Performance Assessment of Sustainable Production Forest Management and Verification of Timber Legality in Permit Holders, Management Rights, or in Righ Forests, Perum Perhutani is obliged to implement PHPL performance assessment. PHPL certification has been implemented since 2016, so that 2018 is the second surveillance activity, with PHPL Assessment Institution from PT. Equality Indonesia.

2. Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada 3 (tiga) industri kayu yaitu PPI Kediri, IK Gresik, IK Cepu, dan IK Brumbung. Lembaga sertifikasi yang melaksanakan penilaian adalah PT Brick Indonesia dan PT. Mutu Agung Lestari.

B. Sertifikasi Voluntary

1. Setifikat PHL skema *Forest Management-Forest Stewardship Council* (FM-FSC) sebanyak 1 (satu) sertifikat untuk 8 (delapan) KPH, yaitu KPH Kendal, Cepu, Kebonharjo, Randublatung, Madiun, Banyuwangi Utara, Ciamis, dan Banten. Lembaga Sertifikasi yang melaksanakan penilaian adalah PT SGS Qualifor dengan mengikuti prinsip dan kriteria standard internasional FSC.

2. Sertifikat PHL skema *Controlled Wood-Forest Stewardship Council* sebanyak 1 (satu) sertifikat untuk 49 (empat puluh sembilan) KPH selain 8 (delapan) KPH bersertifikat FM-FSC. Lembaga Sertifikasi yang melaksanakan penilaian adalah PT SGS Qualifor dengan mengikuti prinsip dan kriteria standard internasional FSC.

3. Sertifikat CoC-FSC *(Chain of Custody)* Industri Kayu sebanyak 3 (tiga) sertifikat masing-masing pada Industri Kayu Gresik, Cepu, dan Brumbung. Lembaga Sertifikasi yang melaksanakan penilaian adalah PT Brick Indonesia.

4. Sertifikat ISO 9001:2015 pada 22 (dua puluh dua) area terapan, termasuk pada lokasi wisata. Lembaga sertifikasi yang melaksanakan penilaian adalah PT Mutu Agung Lestari.

2. Timber Legality Verification Certificate (VLK) in 3 (three) wood industries, namely PPI Kediri, IK Gresik, IK Cepu, and IK Brumbung. The certification institutions who performed assessment are PT Brick Indonesia and PT. Agung Lestari Quality.

B. Voluntary Certification

1. PHL certificate for Forest Management-Forest Stewardship Council (FM-FSC) scheme as many as 1 (one) certificate for 8 (eight) KPHs, namely the Kendal, Cepu, Kebonharjo, Randublatung, Madiun, North Banyuwangi, Ciamis and Banten KPHs. The Certification Institution that carries out the assessment is PT SGS Qualifor following the FSC international standard principles and criteria.

2. 1 (one) PHL certificate Controlled Wood-Forest Stewardship Council SFM for 49 (forty nine) KPHs in addition to 8 (eight) FM-FSC- certified KPHs. The Certification Institution that carries out the assessment is PT SGS Qualifor following the FSC international standard principles and criteria.

3. The Wood Industry CoC-FSC (Chain of Custody) Certificate is 3 (three) certificates each in the Wood Gresik, Cepu, and Brumbung Industries. The Certification Institution that carries out the assessment is PT Brick Indonesia.

4. ISO 9001: 2015 certificate on 22 (twenty two) applied areas, including tourist sites. The certification body that carries out the assessment is PT. Agung Lestari Quality.

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCE

Perhutani berkomitmen untuk mempersiapkan Sumber Daya yang mampu menghadapi tantangan yang akan datang melalui peningkatan kompetensi, sebagai upaya antisipasi perubahan kondisi bisnis yang tak menentu di masa depan.

Perhutani is committed to developing its resources to be able to face future challenges through improving employee competences as an effort to anticipate changes in the uncertain business conditions in the future.

Kebijakan Pengelolaan SDM

Human Resources Management Policy

Perhutani menyadari arti penting keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan unggul sebagai salah satu unsur penentu keberlangsungan bisnis di masa depan. Perhutani memandang SDM sebagai aset yang memiliki peran strategis dalam merealisasikan visi dan misi Perhutani.

Perhutani realizes the importance of competent and superior Human Resources (HR) as one of the determinant factors of business continuity in the future. Perhutani views HR as an asset with strategic role in realizing Perhutani's vision and mission.

Kebijakan pengelolaan SDM Perhutani terintegrasi dan merupakan suatu proses manajemen SDM yang erat kaitannya dengan proses seleksi, pengangkatan, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan, promosi, dan mutasi karyawan sesuai dengan bisnis Perhutani yang mencakup dimensi *corporate values, competency, performance, reward, process improvement,* serta *employee engagement.*

Perhutani's HR management policy is integrated and is an HR management process that is closely related to the selection, appointment, training, development, maintenance, promotion and transfer of employees in accordance with Perhutani's business, which includes the dimensions of corporate values, competency, performance, reward, process improvement, and employee engagement.

Roadmap Pengembangan SDM

HR Development Roadmap

Sebagaimana telah ditetapkan dalam *Roadmap* Strategi Pengelolaan dan Pengembangan SDM strategis SDM 2015-2019, Perhutani pada tahun 2020 fokus pada peningkatan kompetensi kepemimpinan di seluruh tingkatan manajemen dalam menunjang pencapaian sasaran perusahaan.

As stipulated in the HR Management and Development Strategy Roadmap that is disclosed in HR Strategic Planning 2015 – 2019 document, in 2020, Perhutani will focus on leadership competency development in all managerial levels in supporting the Company's target achievement.

Banyak hal telah dilakukan oleh Perhutani dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM demi mencapai tujuan utama perusahaan, diantaranya adalah diterapkannya komponen *Competency Based Human Resources Management* (CBHRM) berupa Sistem Manajemen Kinerja (SMK) dan *Competency Level Index* (CLI), serta penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan serikat pekerja karyawan (SEKAR dan SP2P) sebagai tidak lanjut amanat Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Perhutani has done several initiatives to increase HR competency and productivity to achieve main objectives of the Company, including implementation of Competency-Based Human Resources Management (CBHRM) components in form of Performance Management System (SMK) and Competency Level Index (CLI), and signing of Collective Labor Agreement (CLA) with workers union (SEKAR and SP2P) as follow-up of mandate in the RI Law Number 13 of 2013 on Employment.

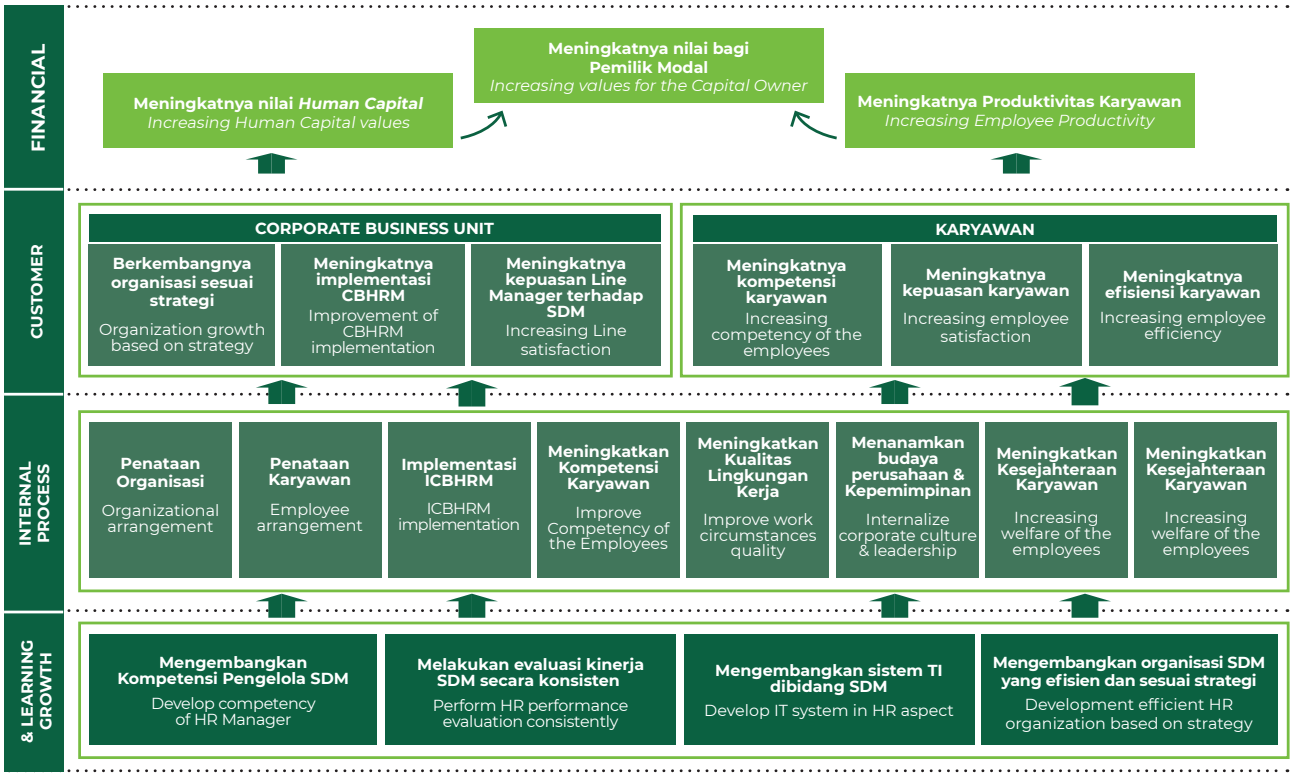

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola SDM

Duty and Responsibility of HR Manager

Pengelolaan SDM pada Perhutani dilaksanakan oleh Direktorat SDM dan Umum melalui Divisi SDM dan Umum yang membawahi Departemen Perencanaan dan Pengembangan SDM serta Departemen SDM dan Hubungan Industrial. Tugas pengelola SDM meliputi pengadaan karyawan, penerapan *reward and punishment*, pengembangan SDM, pemberhentian pegawai, pemberian gaji dan tunjangan, fasilitasi kesehatan dan kerja, kebutuhan perjalanan dinas, pengelolaan SIM SDM, dan pengelolaan fasilitas lainnya yang terkait dengan kesejahteraan karyawan.

HR Manager in Perhutani is carried out by Directorate of HR and General Affairs through HR and General Affairs Division who supervises HR Planning and Development Department and HR and Industrial Relation Department. Duty of the HR manager icnludes employee recruitment, reward and punishment implementation, salary and allowance, health and work facilities, business trip requirements, HR SIM management, and management of other facilities related to employee's welfare.

Rekrutmen

Recruitment

Rekruitmen karyawan dilakukan oleh Perhutani dalam rangka mendapatkan jumlah dan kompetensi karyawan yang tepat dan sesuai dengan sasaran dan strategi perusahaan jangka Panjang. Kebijakan ini dilakukan mengingat besarnya jumlah karyawan yang akan pensiun setiap tahunnya sebanyak 600 orang.

Mekanisme rekruitmen terdiri dari rekruasi internal dan rekruasi ekternal, dimana pelaksanaan rekruasi bekerja sama dengan pihak yang kompeten untuk menjaga transparasi dan obyektifitas system *recruitment*.

Rekruitmen untuk jenjang S1 dan D3 dilakukan secara online melalui IKaT PHT dengan menggunakan aplikasi ReKan (Rekruitmen Karyawan) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Employee recruitment is done by Perhutani to recruit correct employee number and competency that is suitable with the Company's long-term goals and strategy. This policy is done considering high number of employees entering retirement period every year that reached 600 employees.

Recruitment mechanism consists of internal and external recruitments, where implementation of the recruitment cooperates with competent agency to maintain transparency and obejctiveness of the recruitment system.

Recruitment for Bachelor and Diploma 3 Degrees is done online through IkaT PHT by using ReKan (Employee Recruitment) application without discriminating ethnicity, religion, race and groups.

Statistik SDM

HR Statistics

Adapun profil pegawai pada induk perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Employee profile in parent company for the last 3 (three) years is tabulated below:

Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian, dibandingkan dengan tahun 2019 pada periode yang sama mengalami perubahan pada kategori pejabat naik 1% dan staf pelaksana turun 1% sedangkan kategori mandor tidak ada perubahan

The number of employees based on employment status, compared to 2019 in the same period experienced a change in the official category increased by 1% and implementing staff decreased by 1% while the foreman category did not change

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
Employee Composition by Employment Status

Uraian	Jumlah Karyawan Total Employee			Description
	2018	2019	2020	
Pejabat	5.411	5.387	5.357	Officer
Staf Pelaksana	5.246	5.168	4.816	Executing Staff
Mandor	8.400	7.944	7.647	Foreman
Jumlah	19.057	18.499	17.820	Total

Sebaran umur, SDM Perum Perhutani didominasi oleh pegawai berumur 45 tahun up dengan proporsi 68.74% dan di bawah 45 tahun sebesar 31.26%. Dibandingkan dengan tahun 2019, pegawai dengan umur 40 tahun up mengalami peningkatan sebesar 0,63% sedangkan pegawai di bawah 40 tahun mengalami penurunan sebesar 0,63%. Kondisi ini disebabkan karena adanya pertambahan usia karyawan.

Age distribution, Perum Perhutani HR is dominated by employees aged 45 years and up with a proportion of 68.74% and under 45 years at 31.26%. Compared to 2019, employees aged 40 years and up experienced an increase of 0.63% while employees under 40 years experienced a decrease of 0.63%. This condition is caused by the increasing age of employees.

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN USIA
Employee Composition by Age

Uraian	Jumlah Karyawan Total Employee			Description
	2018	2019	2020	
>50 tahun	5.992	6.348	6.858	>50 year old
40 - 49 tahun	10.510	9.770	8.780	40 - 49 year old
30 - 39 tahun	1.960	1.611	1.366	30 - 39 year old
< 30 tahun	595	770	816	< 30 year old
Jumlah	19.057	18.499	17.820	Total

Berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh pegawai yang memiliki tingkat pendidikan menengah yaitu sebesar 80,75%, kemudian pegawai berpendidikan tinggi sebanyak 10,75% dan pegawai berpendidikan rendah sebanyak 8,50%.

Based on the level of education, dominated by employees who have a secondary education level of 80.75%, then employees with high education as much as 10.75% and employees with low education as much as 8.50%.

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN
Employee Composition by Education Level

Uraian	Jumlah Karyawan Total Employee			Description
	2018	2019	2020	
Tinggi	1.664	1.760	1.916	High
Menengah	14.791	14.630	14.389	Moderate
Rendah	2.602	2.109	1.515	Lower
Jumlah	19.057	18.499	17.820	Total

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN LEVEL JABATAN
Employee Composition by Position Level

Uraian	Jumlah Karyawan Total Employee			Description
	2018	2019	2020	
Jenjang I	34	28	29	Level I
Jenjang II	168	170	165	Level II
Jenjang III	577	555	576	Level III

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN LEVEL JABATAN
Employee Composition by Position Level

Uraian	Jumlah Karyawan Total Employee			Description
	2018	2019	2020	
Jenjang IV	1.487	1506	1.482	Level IV
Jenjang V	3.145	3128	3.105	Level V
Jenjang VI	5.246	13071	12.463	Level VI
Jenjang VII	8.400	41		Level VII
Jumlah	19.057	18.499	17.820	Total

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN JABATAN
Employee Composition by Position

Uraian	Jumlah Karyawan Total Employee			Description
	2018	2019	2020	
Kepala Divisi sederajat/ KSPI/ Sekper	34	28	29	Head of Division and equal/ KSPI/Company Secretary
Kepala Departemen sederajat	66	66	67	Department Head and equal
Administratur/GM sederajat/ Administrator	102	104	98	Administrator/ General Manager and equal
Kepala Seksi sederajat	227	210	210	Section Head and equal
Wakil Administratur sederajat	350	345	366	Deputy Administrator and equal
Asper/Kepala Sub Seksi Sederajat	1.487	1.506	1.482	Sub Section Head and equal
Mantri Sederajat	3.145	3.128	3.105	Orderly and equal
Staf	13.646	13.112	12.463	Staff
Jumlah	19.057	18.499	17.820	Total

Jumlah Pegawai

Dengan ditetapkannya Perhutani sebagai induk Holding Company bidang Kehutanan, jumlah pegawai Perhutani Group menjadi 18.889 orang yang terdiri dari induk perusahaan sebanyak 17.820 orang dan anak perusahaan sebanyak 1.069 orang. Rincian pegawai anak perusahaan adalah sebagai berikut:

Total Employees

With the stipulation of Perhutani as the holding company in the forestry sector, the number of employees of the Perhutani Group is 18,889, consisting of 17,820 of the parent company and 1,069 of its subsidiaries. The details of the employees of the subsidiaries are as follows:

RINCIAN PEGAWAI ANAK PERUSAHAAN
Detail Employees in Subsidiaries

Anak Perusahaan Subsidiaries	Jumlah (orang) Total (person)
PT PALAWI	67
PT PAK	45
PT INHUTANI I	453
PT INHUTANI II	222
PT INHUTANI III	99
PT INHUTANI IV	126
PT INHUTANI V	54
BUMN HL	3
JUMLAH/ TOTAL	1.069

Pengelolaan Kinerja
Performance Management

Sejalan dengan sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi, Perum Perhutani juga telah menyiapkan sistem manajemen karir yang lebih komprehensif. Manajemen karir ditujukan untuk memberi peluang kepada pegawai dalam mengembangkan dirinya selaras dengan kebutuhan posisi dalam perusahaan dan dapat memberikan arah pergerakan karir pegawai sesuai potensinya, hal ini akan sangat membantu pegawai dalam menentukan arah karirnya serta membantu perusahaan dalam melaksanakan proses pengembangan karir secara konsisten, dan pada gilirannya akan memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan. Bagi pegawai, karir merupakan indikator proses pengembangan diri, dan bagi perusahaan menggambarkan posisi-posisi yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

In line with competency-based HR development system, Perum Perhutani also has prepared more comprehensive career management system. The career management isintended to give opportunity to the employees for self-development that is in line with position needs in the Company and to illustrate employees career path direction based on their potential, this will highly support the Company in implementing the career development process consistently, and in turn, will give significant benefit for the Company. For the employees, career is a self-development process indicator, and this illustrates the vacant positions in the Company in the context of the Company's goals achievement.

Talent Management

Talent Management

Sebagai suatu rangkaian proses sistem, *Talent Management* memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan yang berkesinambungan. Sebagai tahapan awal dilakukan asesmen pemetaan kompetensi kepada seluruh pegawai untuk memperoleh gambaran awal kompetensi dan potensi yang dimiliki masing-masing pegawai.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut pegawai dikelompokkan kedalam kategori *talent pool* yang berbeda. Kategori dari *talent pool* tersebut akan menentukan pengembangan individu pegawai lebih lanjut dan juga mengarahkan jalur karir yang sesuai dengan pegawai tersebut. Namun tidak hanya berhenti sampai disitu saja, proses tahapan ini akan terus berlanjut sebagai siklus untuk mencari dan menemukan potensi-potensi unggul pegawai dalam perusahaan maupun potensi unggul yang ditemukan melalui perekrutan calon pegawai baru.

As series of a system process, Talent Management has a continuous implementation stages. As initial stage, competency mapping assessment is done to all employees to generate early illustration of individual competency and potential of every employee.

Based on result of the assessment, the employees are classified into different talent pool categories. Category of the talent pool will determine further employee individual development and align career path that is suitable for the employee. However, the process will not be ended there, this staging process will be continued as a scycle to seek and find excellent employees potential in the Company or excellent potential through new employee candidate recruitment.

Program Pengembangan SDM

HR Development Program

Perum Perhutani sangat menyadari arti penting SDM bagi kelangsungan usahanya. Untuk itu, Perum Perhutani pun melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM yang dimilikinya secara berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai dalam mendapatkan program pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan bagi pegawai didasarkan pada kebutuhan pengembangan individu untuk menunjang keberhasilan kinerja dan karir. Pelatihan yang diberikan kepada pegawai selalu diperbarui seiring dengan perubahan teknologi dan standar operasi perusahaan.

Perusahaan melakukan evaluasi secara kontinyu terhadap kompetensi yang dimiliki SDM, khususnya untuk kompetensi yang mengalami

Perum Perhutani highly realizes imporant meaning of HR for the business going concern. Therefore, Perum Perhutani performs set of initiatives to develop HR competency and skill in continuous manner.

In order to achieve the vision and misison, the Company provides equal opportunity to all employees in receiving education and training programs. Training programs for the employees are based on individual development requirements tosupport performance and career achievements. The trainings, which are provided by the employees are updated in line with changes in technology and the Company's operational standards.

The Company performs continuous evaluation on the HR competency, particularly for competency that is changed along the work process scheme/

perubahan dalam alur proses kerja/ teknologi baru/ mekanisme baru.

new technology/new mechanism.

PEMETAAN KEBUTUHAN TRAINING
Mapping Training Needs

Jabatan Position	**Jenis Pelatihan** Type of Training	**Kompetensi yang diharapkan** Expected Competence	**Jumlah Pelatihan** Total Trainings
Kepala Divisi sederajat/ KSPI/ Sekper Head of Division and equal / KSPI/Company Secretary	Pengembangan Eksekutif III dan II Executive Development III and II	Peningkatan Standar Kompetensi BUMN Improvement of SOEs Competency Standards	3
Kepala Departemen sederajat/GM Department Head and equal / General Manager	Pengembangan Eksekutif I Executive Development I	Persiapan untuk Menuju Kompetensi BOD-1 Preparation Towards BOD-1 Competency	3
Administratur/GM sederajat Administrator / General Manager and equal	Diklat Kepemimpinan Lanjutan III Advanced Leadership Training III	Peningkatan Kompetensi Eksekutif Executive Competency Improvement	3
Kepala Seksi sederajat Section Head and equal	Diklat Kepemimpinan Lanjutan II Advanced Leadership Training II	Peningkatan Kompetensi Manajer Manager Competency Improvement	5
Wakil Administratur sederajat Deputy Administrator and equal	Diklat Kepemimpinan Lanjutan I Advanced Leadership Training I	Peningkatan Kompetensi Yunior Manajer Improvement of Junior Manager Competencies	5
Asper/ Kepala Sub Seksi Sederajat/ Asper Deputy Administrator and equal	Diklat Kepemimpinan III Advanced Leadership Training III	Peningkatan Kompetensi Supervisor Supervisor Competency Improvement	5
Mantri Sederajat Orderly and equal	Diklat Kepemimpinan II Leadership Training II	Peningkatan Kompetensi Junior Supervisor Competency Improvement for Junior Supervisors	5
Staf Staff	Diklat Kepemimpinan I Leadership Training I	Peningkatan Kompetensi Calon Supervisor Competency Improvement for Supervisor Candidates	5

Pengembangan Kompetensi

Competency Development

Sepanjang tahun 2020, tercatat sebanyak 1.240 karyawan berpartisipasi mengikuti seluruh kegiatan pelatihan dan/atau program pengembangan karyawan dengan total jumlah kegiatan sebanyak 50 kali baik yang diselenggarakan secara internal *(in-house)* oleh Perseroan maupun pihak eksternal, baik *online* maupun *offline*, dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2020, there were 1,240 employees who participated in all training activities and/or employee development programs with a total of 50 activities, both held internally (in-house) by the Company and external parties, both online and offline, with details as follows: following:

PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Competency Development

Divisi Division		**Jumlah Kegiatan** Total Activities **(Kali/** Times **)**	**Jumlah Peserta** Total Participants **(Orang/** Person**)**
Hukum	Law	5	157
Pemasaran	Marketing	2	78
Renbang Bisnis	Business Plan	1	20
Satuan Manajemen Perubahan (SMP)	Change Management Unit (SMP)	5	16
TI	TI	4	20
Tim ERP	ERP Team	3	149
SDM & UMUM	HR & General	30	800
Jumlah	Total	50	1,240

Biaya Pengembangan SDM

HR Development Budget

Selama tahun 2020, Perum Perhutani telah merealisasikan Rp13.012.039.500 dalam pelaksanaan program-program diklat dan asesmen.

In 2020, Perum Perhutani has allocated Rp13,012,039,500 for training and assessment programs implementation.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

Perhutani tetap menyadari bahwa sejumlah tantangan juga harus dihadapi dengan tepat, karena dapat memberikan pengaruh bagi kinerja Perusahaan.

Perhutani realizes that a number of challenges must also be dealt with appropriately, as they can have an impact on the Company's performance.

2,07%

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2020 TERKONTRAKSI SEBESAR 2,07%

Indonesia's Economic Growth in 2020 was Contracted by 2.07%

Tinjauan Ekonomi Makro

Macroeconomic Review

Perekonomian global sepanjang tahun 2020 tertekan setelah WHO mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 akan mengalami kontraksi

In 2020, global economy throughout was pressured after WHO declared Covid-19 as a pandemic on March 9, 2020. The International Monetary Fund (IMF) projected that global economic growth in 2020 will contract and reach negative values. All countries were

dan mencapai nilai negatif. Seluruh negara mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan manusia dan perekonomian.

taking extraordinary plans to save lives and the economy.

Perekonomian nasional sepanjang 2020 mengalami kontraksi 2,07% secara *year on year*. Kontraksi ini tentu saja dipengaruhi oleh pelemahan di berbagai sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19, dimana arus barang dan jasa untuk kegiatan ekspor impor terhambat karena kebijakan *lockdown* sejumlah negara yang berimbas pada neraca perdagangan. Pelemahan tersebut kemudian juga diikuti oleh berkurangnya aliran masuk modal asing dari pasar keuangan domestik. Menurunnya aktivitas masyarakat juga berimbas pada tingkat konsumsi dalam negeri.

The national economy was contracted by 2.07% year on year throughout 2020. This contraction was surely influenced by the weakening in various economic sectors due following the Covid-19 pandemic, where the flow of goods and services for export-import activities was hampered due to the lockdown policies in several countries that affected the trade balance. This weakening was also followed by a reduction in foreign capital inflows from the domestic financial market. The decline in community activities also has an impact on the level of domestic consumption.

Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%.

In terms of production, the deepest growth contraction occurred in the Transportation and Warehousing Business Field of 15.04%. Meanwhile, in terms of expenditure, almost all components contracted. The Export of Goods and Services component became the component with the deepest contraction of 7.70%. Meanwhile, Imports of Goods and Services, which is a reducing factor, contracted by 14.71%.

Dari 17 sektor lapangan usaha, ada tujuh sektor yang masih tumbuh positif. Sektor yang masih mengalami pertumbuhan positif antara lain pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,75%, jasa keuangan dan asuransi 3,25%, informasi dan komunikasi 10,58%, jasa pendidikan 2,63%, real estate 2,32%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 11,60%, dan pengadaan air 4,94%.

From 17 business sectors, there are seven sectors that were still growing positively. The sectors that are still experiencing positive growth include agriculture, forestry and fisheries by 1.75%, financial and insurance 3.25%, information and communication 10.58%, education 2.63%, real estate 2.32%, health and social activities 11.60%, and water supply 4.94%.

Indeks harga konsumen (IHK) pada Desember 2020 mengalami inflasi sebesar 0,45%. Sementara sepanjang tahun kalender (*year to date*/ytd) dan tahunan mengalami inflasi sebesar

The consumer price index (CPI) in December 2020 experienced inflation of 0.45%. Meanwhile, throughout the calendar year (year to date/ytd) and annual inflation of 1.68%. This annual

1,68 persen. Inflasi tahunan ini merupakan yang terendah sejak BPS merilis angka inflasi. Pandemi membuat aktivitas masyarakat menurun sehingga permintaan melemah, daya beli masyarakat menengah ke bawah turun, dan menengah ke atas cenderung menahan belanja. Hal ini mengakibatkan permintaan dan produksi menurun.

inflation is the lowest since BPS released the inflation figures. The pandemic made people's activities decline so that demand weakened, the purchasing power of the lower middle class fell, and the upper middle class tended to hold back on spending. This resulted in decreased demand and production.

Kebijakan fiskal tahun 2020 dilakukan secara luar biasa *(extraordinary)* dalam rangka membantu masyarakat dan dunia usaha untuk pulih dan bangkit kembali di masa pandemi Covid-19. Presiden mengeluarkan PERPPU No. 1/2020 yang kemudian menjadi UU Nomor 2/202 dijadikan dasar untuk merumuskan dan mengalokasikan anggaran secara *extraordinary* di dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penangan Covid-19.

Fiscal policy in 2020 was carried out in extraordinary measures to help the society and the business world to recover and rebound during the Covid-19 pandemic. The President issued PERPPU No. 1/2020 which later became Law Number 2/202 was used as the basis for formulating and allocating an extraordinary budget in the context of national economic recovery and Covid-19 handling.

Melalui perubahan APBN 2020 pemerintah melebarkan defisit ke 6,34% dari PDB yang outputnya ditujukan terutama di bidang kesehatan, antara lain berupa insentif tenaga kesehatan, bantuan iuran JKN, alat kesehatan, penambahan gedung/ruang baru puskesmas, pembayaran pengobatan pasien dan obat-obatan atau barang habis pakai. Output selanjutnya yaitu di sektor bantuan sosial, bantuan pemerintah, subsidi dan dukungan UMKM, antara lain seperti kartu sembako, diskon listrik, bantuan upah karyawan, BLT Dana Desa dan Subsidi Bunga UMKM. Sektor lainnya yang menjadi output APBN 2020 yaitu sektor pendidikan dan infrastruktur.

Through the revision to the State Budget 2020, the government has widened the deficit to 6.34% of GDP, whose output is primarily in the health sector, including in form of incentives for health workers, JKN contribution assistance, medical devices, additional new buildings/spaces for public health centres, payment for patient treatment and medicines. or consumables. The next output is in the social assistance sector, government assistance, subsidies and support for MSMEs, such as basic food cards, electricity discounts, employee wage assistance, Village Fund BLT and MSME Interest Subsidies. Other sectors that are the output of the 2020 State Budget are the education and infrastructure sectors.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016-2020 (dalam persen)
Indonesia Economic Growth in 2016 – 2020 (in percent)

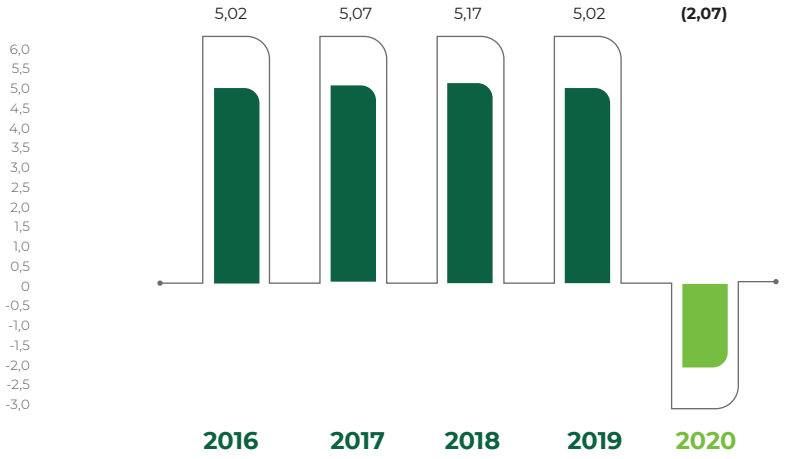

Sumber/Source : BPS

Selama tahun 2020 secara rerata nilai tukar rupiah melemah 2,66% ke level Rp14.525 per USD. Sebab pada pada tahun 2019 nilai tukar Rupiah berada di level Rp14.139 per dolar Amerika Serikat. Rupiah sempat tertekan di awal virus corona mewabah di Indonesia.

In 2020, average rupiah exchange rate weakened 2.66% to the level of Rp14,525 per USD. Because in 2019 the Rupiah exchange rate was at the level of Rp14,139 per US dollar. The rupiah was under pressure at the beginning of the corona virus outbreak in Indonesia.

Defisit neraca transaksi berjalan tercatat sebesar USD4,7 miliar atau 0,4% dari PDB, menurun signifikan dibandingkan dengan defisit pada tahun sebelumnya sebesar USD30,3 miliar atau 2,7% dari PDB. Penurunan defisit neraca transaksi berjalan tersebut terutama ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat kenaikan surplus yang signifikan dari USD3,5 miliar pada tahun 2019 menjadi USD28,2 miliar. Peningkatan surplus ini sejalan dengan melemahnya permintaan domestik dan penurunan ekspor, di tengah kenaikan harga komoditas ekspor.

The current account deficit was recorded at USD4.7 billion or 0.4% of GDP, a significant decrease compared to the deficit in the previous year of USD30.3 billion or 2.7% of GDP. The decline in the current account deficit was mainly supported by the goods trade balance which recorded a significant increase in surplus from USD3.5 billion in 2019 to USD28.2 billion. This increase in surplus was in line with weakening domestic demand and a decline in exports, amidst rising prices for export commodities.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total ekspor Indonesia di sepanjang tahun 2020 sebesar USD163,31 miliar, atau mengalami penurunan sebesar 2,61% yoy bila dibandingkan dengan ekspor di sepanjang tahun 2019 yang sebesar USD 167,68 miliar.

The Central Statistics Agency (BPS) recorded that Indonesia's total exports throughout 2020 were USD 163.31 billion, or decreased by 2.61% yoy when compared to exports throughout 2019 which amounted to USD 167.68 billion.

Bila melihat dari sektornya, baik sektor minyak dan gas (migas) maupun sektor non migas mengalami penurunan ekspor. Ekspor migas pada sepanjang tahun 2020 tercatat sebesar USD8,31 miliar atau anjlok 29,52% yoy dari tahun 2019 yang sebesar USD11,79 miliar. Sementara sektor non migas tercatat sebesar USD155 miliar atau turun 0,57% yoy dari USD155,89 miliar. Penurunan ekspor non migas juga disumbang dari penurunan ekspor hasil tambang dan lainnya. Di mana sektor tersebut mencatat total ekspor sebesar USD19,75 miliar atau terkoreksi 20,70% yoy dari USD24,90 miliar pada sepanjang tahun 2019.

By sector, either oil and gas or non-oil and gas sectors were experiencing a decreasing export. Oil and gas exports throughout 2020 were recorded at USD8.31 billion or dropped 29.52% yoy from 2019 which was USD11.79 billion. Meanwhile, the non-oil and gas sector was recorded at USD155 billion, down 0.57% yoy from USD155.89 billion. The decline in non-oil exports was also contributed by the decline in exports of mining and other products. In which the sector recorded a total export of USD19.75 billion or a correction of 20.70% yoy from USD24.90 billion throughout 2019.

Akan tetapi, ada sektor yang mengalami peningkatan ekspor seperti sektor pertanian. Ekspor hasil pertanian pada tahun lalu tercatat sebesar USD4,12 miliar atau naik 13,98% yoy dari tahun 2019 yang sebesar USD3,61 miliar. Kemudian, ekspor industri pengolahan yang memegang pangsa ekspor 80,30% juga mengalami peningkatan 2,95% dari US$ 127,38 miliar pada tahun 2019, menjadi USD131,13 miliar pada tahun lalu.

However, there are sectors that experienced an increase in exports, such as the agricultural sector. Exports of agricultural products last year were recorded at USD4.12 billion, up 13.98% yoy from 2019 which was USD3.61 billion. Then, exports of the processing industry which held an export share of 80.30% also increased by 2.95% from USD127.38 billion in 2019, to USD131.13 billion last year.

Ekspor industri kehutanan Indonesia di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ekspor tahun ini sedikit terkoreksi 4,67% secara *year-on-year*. Namun, dengan situasi perekonomian dunia yang diterjang resesi karena pandemi, pencapaian ini melampaui revisi target yang ditetapkan KLHK. Jumlah ekspor hulu dan hilir industri kehutanan tahun ini mencapai USD11,08 miliar atau jauh melampaui target 2020 di angka USD7 miliar. Implikasi kondisi tersebut terhadap bisnis Perhutani ditunjukkan dengan turunnya hasil penjualan produk Perhutani di tahun 2020 sebesar 5,09% dibandingkan pada tahun 2019.

Indonesia's forestry industry exports in 2020 decreased compared to the previous year. This year's export achievement was slightly corrected by 4.67% year-on-year. However, with the world economy being hit by a recession due to the pandemic, this achievement exceeded the revised target set by the Ministry of Environment and Forestry. The number of upstream and downstream exports of the forestry industry this year reached USD11.08 billion, far exceeding the 2020 target of USD7 billion. The implications of this condition for Perhutani's business are shown by the decline in sales of Perhutani's products in 2020 by 5.09% compared to 2019.

Tinjauan Industri

Industry Overview

Produksi hutan tanaman industri menorehkan hasil positif dengan tumbuh 14% menjadi 45,5 juta m^3, berdasarkan data dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Bersamaan dengan itu, realisasi penanaman HTI meningkat 42% menjadi 274.000ha dibandingkan dengan tahun lalu. Dampaknya, pekerja pada

Production of industrial forest plantations recorded positive results by growing 14% to 45.5 million m^3, based on data from the Indonesian Association of Forest Entrepreneurs (APHI). Simultaneously, the realization of HTI planting increased by 42% to 274,000ha compared to previous year. Therefore, workers in the forestry

sektor kehutanan terhindar dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Tercatat, jumlah pekerja yang terlibat pada sektor kehutanan dari hulu hingga hilir mencapai 1,5 juta orang.

sector are prevented from being laid off (PHK). The figure recorded that the number of workers involved in the forestry sector from upstream to downstream achieved 1.5 million people.

Produksi kayu hutan alam tahun 2019 mencapai 7,8 juta m^3, sedangkan tahun 2020 hanya tercapai 5,27 juta m^3 atau turun 32,44%. Penurunan produksi hutan alam ini terutama karena berkurangnya permintaan pasokan dari industri pengolahan kayu, terutama industri panel dan *woodworking* yang sebagian besar bahan bakunya menggunakan kayu alam.

Natural forest wood production in 2019 reached 7.8 million m^3, while in 2020 it only reached 5.27 million m^3 or decreased by 32.44%. The decline in natural forest production was mainly due to reduced supply demand from the wood processing industry, especially the panel and woodworking industry, which mostly uses natural wood as raw materials.

Sementara itu, produksi hutan tanaman juga mengalami penurunan tipis, pada tahun 2019 mencapai 39 juta m^3, sementara produksi hutan tanaman tahun 2020 tercatat 45 juta m^3, atau naik 14,35%.

Meanwhile, plantation forest production also experienced a slight decline, reaching 39 million m^3 in 2019, while plantation forest production in 2020 was recorded at 45 million m^3, or increased by 14,35%

Sebagai bagian dari lini konfigurasi bisnis baru kehutanan, kenaikan produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) menunjukkan tren yang menjanjikan, dimana pada tahun 2019 produksi sebesar 380,61 ribu ton, sedangkan tahun 2020 produksinya mencapai 665,02 ribu ton.

As part of the new line of forestry business configuration, the increase in non-timber forest product (NTFP) production shows a promising trend, where in 2019 production was 380.61 thousand tons, while in 2020 production reached 665.02 thousand tons.

Sementara itu, tren ekspor Tanaman dan Satwa Liar (TSL) yang merupakan pengembangan dari HHBK terus meningkat sampai tahun 2020 meski pada tahun 2019 yang lalu sedikit mengalami penurunan. Ekspor produk TSL ini sangat potensial di kembangkan di areal IUPHHK untuk pengembangan bioprospecting.

Meanwhile, the export trend of Wild Plants and Animals (TSL), which is the development of NTFPs, continues to increase until 2020, although in 2019 it slightly decreased. The export of TSL products has the potential to be developed in the IUPHHK area for bioprospecting development.

Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi sebagian besar kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura, mencakup hutan lindung dan hutan produksi. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebesar 2.434.454,6ha. Berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi Hutan Produksi seluas 1.403.373,2ha (57,5%), Hutan

Perum Perhutani's working area covers most of the forest areas on the islands of Java and Madura, including protection forests and production forests. The forest area managed by Perum Perhutani is 2,434,454.6ha. Based on its function, it is divided into Production Forest covering an area of 1,403,373.2ha (57.5%), Limited Production Forest covering an

Produksi Terbatas seluas 394.212,1 ha (16,2%) dan Hutan Lindung seluas 636.869,3 ha (26,2%).

Kegiatan produksi Perum Perhutani dibedakan berdasarkan jenis tebangannya, yaitu:

1) Tebangan A: pemanenan kayu berdasarkan daur tegakan
2) Tebangan B: pemanenan kayu untuk rehabilitasi
3) Tebangan C: pemanenan kayu akibat perubahan kawasan hutan menjadi kawasan lain karena pinjam pakai atau tukar menukar.
4) Tebangan D: pemanenan tak terduga, disebabkan karena bencana alam, kebakaran, hama penyakit, pinjam pakai kawasan dan lain-lain
5) Tebangan E: penjarangan atau pemanenan kayu untuk tindakan silvikultur guna mendapatkan tegakan yang baik pada akhir daur.

Kayu Bulat

Kayu merupakan salah satu produk utama Perhutani yang menunjang pendapatan perusahaan sekitar 38%. Perhutani menjual produk kayu dalam bentuk kayu bulat dan kayu olahan. Sekitar 90% kayu yang diproduksi Perhutani dijual dalam bentuk kayu bulat. Pangsa pasar kayu bulat adalah 100% dalam negeri. Hal ini disebabkan diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat.

Perhutani membedakan kayu bulat menjadi dua yaitu Jati dan Rimba, dimana yang dinamakan kayu Rimba adalah kayu selain dari kayu Jati. Perhutani merupakan salah satu produsen kayu Jati terbesar di dunia dengan rata-rata produksi sebanyak 400 ribu m^3 per tahun. Kayu bulat dijual dalam 3 ukuran yaitu:

- A3 adalah kayu dengan diameter >30 cm.
- A2 adalah kayu dengaan ukuran diameter >20 cm dan <30 cm.
- A1 adalah kayu dengan diameter <20 cm.

area of 394,212.1 ha (16.2%) and Protection Forest covering an area of 636,869.3 ha (26.2%).

Perum Perhutani's production activities are differentiated based on the type of felling, namely:

1) Logging A : timber harvesting based on the standing timber cycle
2) Logging B: harvesting timber for rehabilitation
3) Logging C: harvesting of timber due to the change of forest area into another area due to borrowing or exchanging.
4) Cutting D: unexpected harvesting, caused by natural disasters, fires, pests and diseases, borrowing to use areas and others
5) Logging E: thinning or harvesting of wood for silvicultural action in order to get a good standing timber at the end of the cycle.

Log

Timber is one of Perhutani's main products, which supports the company's revenue of around 38%. Perhutani sells wood products in the form of logs and processed wood. Around 90% of the wood produced by Perhutani is sold in the form of logs. The log market share is 100% domestic. This is due to the enactment of a log export ban.

Perhutani distinguishes logs into two, namely Teak and Rimba, where what is called Rimba wood is wood other than Teak wood. Perhutani is one of the largest teak wood producers in the world with an average production of 400 thousand m^3 per year. The logs are sold in 3 sizes, namely:

- A3 is wood with a diameter >30cm.
- A2 is wood with diameter >20cm and <30cm.
- A1 is wood with a diameter of <20cm.

Perhutani mendominasi produksi kayu Jati A2 dan A3, karena sedikit sekali perorangan/swasta yang mampu memproduksi kayu Jati jenis ini. Hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi kayu Jati A2 dan A3, bisa di atas 30 - 40 tahun, sehingga tidak menarik untuk dibudidayakan oleh perorangan/swasta. Oleh karenanya, untuk kayu-kayu ukuran ini, Perhutani berperan cukup besar dalam mengendalikan harga.

Perhutani dominates the production of A2 and A3 teak wood, because very few individuals/ private sectors are able to produce this type of teak. This is because the time needed to produce A2 and A3 teak wood can be above 30-40 years, so it is not attractive to be cultivated by individuals/ private sectors. Therefore, for timber of this size, Perhutani plays a significant role in controlling prices.

Persaingan cukup sengit ada di kayu sortimen A1. Dengan menjamurnya budidaya kayu rakyat 10 tahun terakhir, produksi kayu jati rakyat ukuran kecil terus meningkat. Apalagi dengan harga yang relatif lebih murah.

The competition is quite fierce in the A1 sortimen wood. With the proliferation of smallholder wood cultivation in the last 10 years, the production of small-scale teak wood continues to increase. Especially with a relatively cheaper price.

Pembeli kayu jati Perhutani umumnya perusahaan-perusahaan yang kemudian mengolahnya menjadi produk-produk jadi dan setengah jadi untuk diekspor. Oleh karena itu, pasar kayu jati Perhutani juga *linier* dengan kondisi perekonomian global. Di pasar global, Jati Perhutani bersaing dengan jati dari beberapa negara tetangga, seperti Myanmar, Thailand, Vietnam dan Malaysia.

Buyers of Perhutani teak are generally companies which then process it into finished and semi-finished products for export. Therefore, the Perhutani teak wood market is also linear with global economic conditions. In the global market, Jati Perhutani competes with teak from several neighboring countries, such as Myanmar, Thailand, Vietnam and Malaysia.

Sementara untuk jenis kayu rimba, Perhutani rata-rata memproduksi sebanyak 400 ribu m^3 dengan jenis: pinus, mahoni, agathis, sonokeling, puspa, rasamala, sono brit, sengon, jabon dan rimba campur. Kompetitor untuk jenis ini cukup banyak dan terus meningkat, yaitu dari hutan rakyat, perusahaan-perusahaan swasta dan beberapa PTPN di Jawa mulai juga terjun ke budidaya kayu, khususnya kayu-kayu jenis *fast growth species* seperti sengon dan jabon.

Meanwhile, for non-teak wood species, Perhutani produces an average of 400 thousand m^3 of the following types: pine, mahogany, agathis, rosewood, puspa, rasamala, sono brit, sengon, jabon and mixed non-teak. There are quite a number of competitors for this species and they are increasing, namely from community forests, private companies and several PTPNs in Java, starting to also engage in wood cultivation, especially fast growth species such as sengon and jabon.

Kayu Olahan

Saat ini, Perhutani memiliki 4 (empat) pabrik Industri Kayu dengan kapasitas produksi sebagai berikut:

Processed Wood

Currently, Perhutani has 4 (four) Timber Industry factories with the following production capacities:

1. Industri Kayu Brumbung yang berlokasi di Mranggen, Grobogan, Jawa Tengah. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 22.100 m^3 per tahun dengan produk-produk yang dihasilkan antara lain: kayu gergajian, FJL, *housing component, furniture* dan *finish flooring*.
2. Industri Kayu Cepu yang berlokasi di Cepu, Jawa Tengah. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 37.000m^3 per tahun dengan produk-produk yang dihasilkan antara lain: *garden furniture, veneer* sayat, *lamella*, RTS dan *housing component*.
3. Industri Kayu Gresik yang berlokasi di Gresik, Saradan dan Jatirogo Jawa Timur. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 22.350m^3 per tahun dengan produk-produk yang dihasilkan antara lain: *decking, flooring, lamela, garden furniture, parquet block* dan *veneer* sayat.
4. Perhutani Plywood Industry (PPI) di Kediri Jawa Timur yang dioperasikan pada tahun 2013. Pabrik ini mengolah sengon menjadi *plywood* dengan kapasitas produksi input 48.000 m^3 per tahun dan *output* 24.000 m^3 per tahun.

Sampai dengan akhir tahun 2020, produksi kayu Jati hanya terealisasi 432.817m^3 atau 93% dari target Revisi RKAP tahun 2020 naik 7% dari realisasi tahun 2019. Sementara terealisasi produksi kayu Rimba sebesar 413.688m^3 atau 117% dari target Revisi RKAP tahun 2020 dan naik 10% dari realisasi tahun 2019. Secara total, produksi kayu tahun 2020 tercapai 846.506m^3 atau 103% dari Revisi RKAP tahun 2020. Pada Revisi RKAP tahun 2020 direncanakan produksi kayu sebanyak 818.496m^3 terdiri dari 465.085m^3 jenis Jati dan 353.411m^3 jenis Rimba. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan permintaan pasar kayu yang sehingga realisasi produksi pun disesuaikan dimana prinsip tebangan yang dianut adalah *market driven*.

1. Brumbung Wood Industry located in Mranggen, Grobogan, Central Java. This factory has a production capacity of 22,100m^3 per year with products such as: sawn wood, FJL, housing components, furniture and finish flooring.
2. Cepu Wood Industry located in Cepu, Central Java. This factory has a production capacity of 37,000m^3 per year with products such as: garden furniture, cut veneer, lamella, RTS and housing components.
3. Gresik Wood Industry located in Gresik, Saradan and Jatirogo, East Java. This factory has a production capacity of 22,350m^3 per year with products such as: decking, flooring, lamellas, garden furniture, parquet blocks and cut veneer.
4. Perhutani Plywood Industry (PPI) in Kediri, East Java, which was operated in 2013. This factory processes sengon into plywood with an input production capacity of 48,000m^3 per year and an output of 24,000m^3 per year.

Until the end of 2020, teak wood production has only realized 432,817m^3 or 93% of the 2020 RKAP Revision target, an increase of 7% from the realization in 2019. Meanwhile, the realization of Non-teak wood production is 413,688m^3 or 117% of the 2020 RKAP Revision target and an increase of 10% of the realization in 2019. In total, wood production in 2020 reached 846,506m^3 or 103% of the 2020 Revised RKAP. In the 2020 Revised RKAP, it is planned to produce 818,496m^3 of wood consisting of 465,085m^3 of teak species and 353,411m^3 of non-teak. This is due to a decrease in market demand for wood, so that the realization of production is adjusted where the felling principle adopted is market driven.

Perum Perhutani mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan, baik berupa kayu gergajian maupun finished product. Pengolahan tersebut dilakukan pada industri milik Perum Perhutani sendiri ataupun dengan melakukan kerja sama pengolahan dengan Pihak III. Produk-produk kayu olahan Perum Perhutani berupa kayu gergajian (RST) dan kayu olahan lanjutan, yaitu antara lain: vineer sayat jati, lamela, *garden furniture, indoor furniture, finished flooring, FJL, housing component, decking, parket block, lamparket, plywood* dan lainnya.

Perum Perhutani processes logs into processed wood, either in the form of sawn wood or finished products. The processing is carried out in the industry owned by Perum Perhutani itself or by cooperating with the third party processing. Perum Perhutani processed wood products in the form of sawn wood (RST) and further processed wood, which include: teak slice, lamellas, garden furniture, indoor furniture, finished flooring, FJL, housing components, decking, parquet blocks, lamparket, plywood and others.

Pada tahun 2020, industri kayu Perhutani telah mengolah bahan baku Kayu Bulat sebanyak sebanyak 61.399 m^3 atau 106% dari target RKAP tahun 2020. Kayu Bulat Jati yang diolah sebanyak 19.738 m^3 dan tercapai 98% dari target RKAP tahun 2020. Kayu Bulat Rimba yang diolah sebanyak 41.661 m^3 atau tercapai 112% dari target RKAP 2020. Secara total, dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi pengolahan Kayu Bulat tahun 2020 lebih tinggi 10%. Dari kayu yang diolah sebesar tersebut dihasilkan kayu gergajian (RST) sebanyak 17.220 m^3 atau 126% dari target RKAP tahun 2020.

In 2020, the Perhutani wood industry has processed 61,399m^3 of raw logs or 106% of the 2020 RKAP target. The processed teak logs are 19,738m^3 and 98% of the 2020 RKAP targets have been processed. 41,661m^3 or reached 112% of the 2020 RKAP target. In total, compared to 2019, the realization of log processing in 2020 was 10% higher. From the processed wood, 17,220m^3 of sawn timber (RST) is produced or 126% of the 2020 RKAP target.

Produk *finished* Perhutani terealisasi di bawah RKAP. Realisasi produk FP Jati tahun 2020 mencapai 2.183m^3 atau 54% dari RKAP tahun 2020. Realisasi tersebut lebih tinggi 22% dari pencapaian pada periode yang sama tahun 2019. Realisasi FP Rimba mencapai 4.519m^3 atau 43% dari RKAP tahun 2020, lebih rendah 51% dari pencapaian pada periode yang sama tahun 2019. Penyebab rendahnya pencapaian tahun 2020 disebabkan oleh kurangnya pangsa pasar dan adanya pandemi Covid-19 sehingga permintaan order turun.

Perhutani's finished products are realized under the RKAP. Realization of FP Teak products in 2020 reached 2,183m^3 or 54% of RKAP in 2020. This realization was 22% higher than the achievement in the same period in 2019. Realization of FP Non-teak reached 4,519m^3 or 43% of RKAP in 2020, 51% lower from the achievement in the same period in 2019. The cause of the low achievement in 2020 was due to the lack of market share and the Covid-19 pandemic so that order demand fell.

Industri Non Kayu

Produk-produk industri non kayu Perum Perhutani terdiri dari Gondorukem, Terpentin dan Derivat, Minyak Kayu Putih, Seedlak dan Kopal.

Gondorukem & Terpentin

Gondorukem dan terpentin merupakan produk olahan dari getah Pinus. Gondorukem banyak digunakan di bidang farmasi dan industri lain. Sedangkan minyak terpentin adalah pelarut yang kuat dan digunakan sebagai bahan baku pelarut cat, bahan baku parfum, desinfektan, dan campuran kimia lainnya. Kontribusi kedua produk ini terhadap total pendapatan Perhutani cukup besar, yakni mencapai sekitar 30%.

Perhutani memiliki delapan pabrik gondorukem dan terpentin (PGT) dengan total kapasitas produksi 92.550 ton yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Daftar PGT dan kapasitas produksinya dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Non-Timber Industrial

Perum Perhutani's non-timber industrial products consist of Gondorukem, Turpentine and Derivates, Eucalyptus Oil, Seedlak and Copal.

Gum Rosin & Terpentine

Gum Rosin and turpentine are processed products from Pine sap. Gum Rosin is widely used in pharmaceutical and other industries. While turpentine oil is a strong solvent and is used as a raw material of paint solvents, perfume raw materials, disinfectants, and other chemical mixtures. The contribution of these two products to the total revenue of Perhutani is quite large, reaching approximately 30%.

Perhutani has eight gum rosin and turpentine plants (PGT) with a total production capacity of 92,550 tons spread across Central Java, East Java and West Java. The list of PGT and production capacity can be seen in the table as follows:

DAFTAR PGT DAN KAPASITAS PRODUKSINYA
The list of PGT and Production Capacity

PGT PGT		**Kapasitas I** Capacity I	**Dibangun Tahun** Built in (year)
Paninggaran	Paninggaran	6.750	1968
Sapuran	Sapuran	6.300	1988
Cimanggu	Cimanggu	13.500	1989
Winduaji	Winduaji	9.000	1989
Sukun	Sukun	18.000	1976
Garahan	Garahan	16.500	1981
Rejo Winangun	Rejo Winangun	12.000	1994
Sindangwangi	Sindangwangi	10.500	1991
Total	Total	92.550	-

Kopal

Kopal adalah hasil olahan getah (resin) yang disadap dari pohon damar. Kopal merupakan bahan dasar bagi cairan pelapis kertas supaya tinta tidak menyebar. Bahan ini juga dipakai

Kopal

Kopal is the result of processed latex (resin) tapped from the damar tree (Agathis dammara [sin A. alba] and some others Agathis). Kopal is the basic material for the paper coating liquid so

sebagai campuran lak dan vernis.

Minyak Kayu Putih

Minyak kayu putih diperoleh dari proses ekstraksi atas daun pohon kayu putih. Produk ini banyak digunakan pada industri farmasi.

Lak

Lak adalah hasil sekresi kutu lak atau dalam bahasa latin disebut Leccifer lacca yang dibudidayakan di ranting pohon kesambi sebagai inang. Lak diolah menjadi bahan isolator alat-alat listrik, bahan kosmetik, tinta dan pelitur.

Ekowisata

Pandemi virus Covid-19 yang saat ini sedang terjadi, cukup berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Di mana sektor ini sangat mengandalkan interaksi wisatawan dan kunjungan. Berdasarkan data BPS (2021), terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,02 juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03 persen. Pandemi juga mengancam 13 juta pekerja di sektor pariwisata dan 32,5 juta pekerja yang secara tidak langsung terkait sektor pariwisata.

Penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata juga sangat menurun. Proyeksi penerimaan devisa dari pariwisata pada tahun 2020 antara 4-7 miliar dolar AS. Sebelum terjadi pandemi, penerimaan devisa pariwisata tahun 2020 ditargetkan sebesar USD 19-21 miliar. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, penurunan yang terjadi cukup signifikan karena penerimaan devisa pariwisata pada tahun sebelumnya hampir mencapai 20 miliar dolar AS.

that the ink does not spread. This material is also used as a mixture of lacquer and varnish.

Eucalyptus Oil

The Eucalyptus Oil is obtained from the extraction process of the cajuput leaves. This product is widely used in the pharmaceutical industry.

Lacquer

Lacquer is the result of the secretion of lacamae or in Latin called Leccifer lacca which is cultivated in twigs of kesambi tree as host. Lacquer is processed into insulating materials of electrical appliances, cosmetic materials, ink and polish.

Ecotourism

The current COVID-19 pandemic has had a significant impact on the tourism sector. Where this sector relies heavily on tourist interactions and visits. Based on BPS data (2021), there was a significant decrease in the number of tourists, both local and foreign tourists. Total foreign tourist visits to Indonesia in 2020 amounted to 4.02 million visits. When compared to 2019, the number of foreign tourists decreased by 75.03 percent. The pandemic also threatens 13 million workers in the tourism sector and 32.5 million workers who are indirectly related to the tourism sector.

The country's foreign exchange earnings from the tourism sector also declined significantly. The projection of foreign exchange earnings from tourism in 2020 is between 4-7 billion US dollars. Prior to the pandemic, tourism foreign exchange earnings in 2020 were targeted at USD 19-21 billion. When compared to 2019, the decline was quite significant because tourism foreign exchange earnings in the previous year almost reached 20 billion US dollars.

Dengan kondisi normal baru, tren wisata para turis akan lebih memperhatikan protokol-protokol yang baru, khususnya terkait kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Kegiatan wisata berbasis alam atau outdoor diprediksikan akan paling cepat rebound. Ekowisata pada saat pandemi COVID-19 ini adalah alternatif untuk wisatawan berwisata, karena ekowisata lebih banyak menyajikan petualangan ke alam bebas, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir dalam sirkulasi udara tertutup yang dipercaya dapat menyebarkan virus corona secara cepat.

With the new normal conditions, tourist trends will pay more attention to new protocols, especially those related to health, safety and comfort. Nature-based or outdoor tourism activities are predicted to rebound the fastest. Ecotourism during the COVID-19 pandemic is an alternative for tourists to travel, because ecotourism presents more adventures to the outdoors, so tourists do not have to worry about closed air circulation which is believed to be able to spread the corona virus quickly.

Meskipun potensi pengembangan ekowisata di areal hutan produksi relatif besar, akan tetapi ekowisata merupakan usaha yang relatif baru dalam pengelolaan hutan produksi, infrastruktur bervariasi dan masih ada keterbatasan SDM, Meski demikian potensi wisatawan lokal sangat besar sehingga usaha ini tetap perlu didorong sebagai bagian dari upaya diversifikasi usaha dan optimalisasi pendapatan dari hutan produksi.

Although the potential for developing ecotourism in production forest areas is relatively large, ecotourism is a relatively new business in production forest management, infrastructure varies and there are still limited human resources. business and optimizing income from production forests

Agribisnis

Usaha agribisnis Perhutani saat ini adalah usaha produk madu yang terdiri madu murni dan derivat madu. Tingkat konsumsi madu negara-negara maju di dunia saat ini 1-1,5 kg per kapita per tahun, sedangkan di Indonesia masih cukup rendah yaitu baru 10-15 gr per kapita per tahun. Hal ini disebabkan pengetahuan masyarakat terhadap produk madu masih kurang, serta masih banyak ditemukannya produksi madu yang tidak memenuhi standar.

Produksi madu di Indonesia saat ini adalah 10.000-12.000 ton per tahun, masih cukup rendah, dan belum mampu mencukupi kebutuhan produksi dalam negeri sebesar 50.000-70.000 ton per tahun (belum termasuk kebutuhan industri farmasi dan kosmetik sebesar 15.000 ton per tahun).

Agribusiness

Perhutani's current agribusiness business is a honey product business consisting of pure honey and honey derivatives. The level of honey consumption in developed countries in the world is currently 1-1.5 kg per capita per year, while in Indonesia it is still quite low at only 10-15 grams per capita per year. This is due to the lack of public knowledge of honey products, and there are still many honey productions that do not meet the standards.

Currently, honey production in Indonesia is 10,000-12,000 tons per year, which is still quite low, and has not been able to meet the domestic production needs of 50,000-70,000 tons per year (not including the pharmaceutical and cosmetic industry needs of 15,000 tons per year).

Kekurangan bahan baku untuk produksi madu domestik masih dicukupi dari impor. Perhutani sebagai salah satu produsen madu di Indonesia dengan merk dagang “Madu Perhutani” masih memiliki peluang untuk mengembangkan produk sekaligus memasok bahan baku madu nasional mengingat kawasan hutan potensial untuk budidaya lebah madu.

Agroforestry

Kegiatan Agroforestry Perum Perhutani hampir seluruhnya dikerjasamakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dimana setiap LMDH memiliki anggota yang merupakan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat penggarap tersebut biasa disebut pesanggem. Tanaman agro ditanaman dalam kawasan hutan dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara LMDH dengan Administratur selaku pimpinan di Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Perhutani mengelola tanaman agro dengan menggunakan pola tanam Agroforestry, dimana tanaman agro/pertanian ditanam bersamaan dengan tanaman kehutanan. Perhutani mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut. Perhutani mendapatkan bagi hasil dari kegiatan Agroforestry dengan besaran yang bervariatif sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani. Saat ini telah terdata lebih kurang 52 jenis komoditas tanaman pertanian yang diusahakan dengan sumber pendanaan dilakukan secara swadaya oleh pesanggem/ anggota LMDH.

The shortage of raw materials for domestic honey production is still met by imports. Perhutani as one of the honey producers in Indonesia with the trademark "Madu Perhutani" still has the opportunity to develop products as well as supply raw materials for national honey considering the potential forest area for honey bee cultivation.

Agroforestry

Perum Perhutani's agroforestry activities are almost entirely in collaboration with the Forest Village Community Institution (LMDH) where each LMDH has members who are communities around the forest. The cultivating community is usually called Pesanggem. Agro plants are planted in forest areas by making a Cooperation Agreement between LMDH and the Administrator as the leader in the Forest Management Unit.

Perhutani manages agro crops using the agroforestry cropping pattern, where agro/ agricultural crops are planted together with forestry crops. Perhutani gets the results of this collaboration. Perhutani gets profit sharing from Agroforestry activities with varying amounts in accordance with the signed cooperation agreement. Currently, approximately 52 types of agricultural crop commodities have been recorded which are cultivated with funding sources carried out independently by Pesanggem/LMDH members.

Tinjauan Bisnis dan Operasi

Business and Operation Review

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Secara garis besar, produk-produk Perhutani Induk dapat dibagi menjadi 3 (tiga) segmen. Yaitu:

Operational Review by Business Segment

Broadly speaking, the products of Perhutani Parent Company can be divided into 3 (three) segments, as follows:

1. Segmen Kayu Bulat dan Kayu Olahan
2. Segmen Non Kayu
3. Segmen Usaha Lainnya

Pada tahun 2020, segmen Kayu Bulat dan Kayu Olahan memberikan kontribusi pendapatan sebesar 50,07% dari total pendapatan usaha atau naik 5,98% dari tahun 2019. Segmen Non Kayu memberikan kontribusi 38,74% dari total pendapatan usaha atau menurun dari tahun 2019 yang berkontribusi 40,35% dari total pendapatan. Sedangkan segmen Usaha Lainnya memberikan kontribusi sebesar 11,19% menurun dari tahun 2019 sebesar 15,56%. Ini berarti segmen Kayu Bulat dan Kayu Olahan masih menjadi tumpuan utama pendapatan Perhutani.

Produk non kayu yang menjadi unggulan Perhutani adalah gondorukem, terpentin, minyak kayu putih, madu, dan berbagai produk hasil hutan non kayu lainnya. Produk gondorukem, terpentin dan minyak kayu putih mendominasi perolehan penjualan produk kelompok ini. Gondorukem dan terpentin dipasarkan sebagian besar (90%) untuk ekspor, sisanya (10%) untuk kebutuhan dalam negeri. Produk-produk lain seperti minyak kayu putih, lak, kopal, madu, AMDK dan produk-produk agroforestry umumnya dijual di dalam negeri. Sementara untuk wisata, disesuaikan dengan karakteristik obyek masing-masing.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di tahun 2020, Divisi Pemasaran Perhutani telah merumuskan beberapa strategi diantaranya:

1. Melakukan Analisa Pasar.
2. Mengevaluasi distributor.
3. Menambah distributor.
4. Menghubungi pembeli yang hilang dalam daftar pembeli.
5. Mendaftar dan aktif dalam situs Alibaba.com.

1. Logs Segment
2. Non-Timber Segment
3. Other Forest Product Segment

In 2020, the Log and Processed Timber segment contributed 50.07% of total operating revenues or an increase of 5.98% from 2019. The Non Timber segment contributed 38.74% of total operating revenues or decreased from 2019 which contributed 40.35% of the total revenue. Meanwhile, the Other Business segment contributed 11.19%, a decrease from 2019 which was 15.56%. This means that the Log and Processed Timber segment is still the main source of Perhutani's income.

Perhutani's main non-timber products are gondorukem, turpentine, eucalyptus oil, honey, and various other non-timber forest products. The products of gondorukem, turpentine and eucalyptus oil dominated the sales of this group's products. Gondorukem and turpentine are marketed mostly (90%) for export, the rest (10%) for domestic needs. Other products such as eucalyptus oil, shellac, copal, honey, bottled water and agroforestry products are generally sold domestically. As for tourism, it is adjusted to the characteristics of each object.

To overcome the challenges that occurred in 2020, the Perhutani’s Marketing Division has formulated several strategies including:

1. Conducting Market Analysis.
2. Evaluate distributors.
3. Adding distributors.
4. Contacting missing buyers in the buyers list.
5. Register and be active on Alibaba.com website.

6. *Customer Relationship Management*
7. Survei harga kayu
8. Survei kebutuhan kayu spesifik
9. Aktif dalam PCA *(Pine Chemical Association)*
10. *Survey* kepuasan pelanggan

Segmen Kayu Bulat

Produksi Kayu Bulat

Permintaan kayu produksi Perhutani sempat mengalami penurunan tajam pada periode tahun 2016-2020. Penyebabnya antara lain:

1. Adanya pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pangsa pasar kayu di seluruh dunia, hal ini berengaruh signifikan terhadap permintaan kayu
2. Adanya pesaing (Hutan Rakyat) dan perubahan dinamika pasar yang cepat.
3. Daya serap pasar masih kurang karena kondisi pasar global mengalami penurunan juga.
4. Komposisi sortimen AI pada RKAP tahun 2020 mendominasi yaitu sebanyak 366.915 m^3 (40,6% dari RKAP tebangan) atau melebihi kebutuhan pasar sehingga tidak seluruhnya terserap pasar.

Poin-poin tersebut menyebabkan para pelanggan harus melakukan berbagai penyesuaian yang mengakibatkan perlambatan penjualan kayu di Perhutani.

Mempertimbangkan turunnya permintaan akibat lesunya pasar kayu, maka dilakukan penundaan tebangan di beberapa lokasi. Tebangan hanya dilaksanakan pada lokasi yang mempunyai prospek pasar yang tinggi. Kedua hal tersebut menyebabkan realisasi produksi kayu secara umum tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Perhutani pada tahun 2020. Selain itu dilakukan pula revisi pada target RKAP untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi.

6. Customer Relationship Management
7. Wood price survey
8. Specific wood needs survey
9. Active in PCA (Pine Chemical Association)
10. Customer Satisfaction Survey

Log Segment

Log Production

The demand for wood produced by Perhutani experienced a sharp decline in the 2016-2020 period. The causes include:

1. The Covid-19 pandemic has greatly affected the wood market share around the world, this has a significant impact on the demand for wood
2. The existence of competitors (People's Forest) and rapid changes in market dynamics.
3. Market absorption is still lacking due to declining global market conditions.
4. The composition of AI sorting in the 2020 RKAP dominates, which is 366,915 m^3 (40.6% of the felled RKAP) or exceeds market demand so that it is not entirely absorbed by the market.

These points have forced customers to make various adjustments which resulted in a slowdown in timber sales at Perhutani.

Considering the decline in demand due to the sluggish timber market, logging was postponed in several locations. Logging is only carried out in locations that have high market prospects. Both of these things caused the realization of wood production in general to not reach the target set by Perhutani in 2020. In addition, revisions were made to the RKAP target to adjust to pandemic conditions.

Sampai dengan akhir tahun 2020, produksi kayu Jati hanya terealisasi 432.817m³ atau 93% dari target Revisi RKAP tahun 2020 naik 7% dari realisasi tahun 2019. Sementara terealisasi produksi kayu Rimba sebesar 413.688m³ atau 117% dari target Revisi RKAP tahun 2020 dan naik 10% dari realisasi tahun 2019. Secara total, produksi kayu tahun 2020 tercapai 846.506m³ atau 103% dari Revisi RKAP tahun 2020. Pada Revisi RKAP tahun 2020 direncanakan produksi kayu sebanyak 818.496m³ terdiri dari 465.085 m³ jenis Jati dan 353.411m³ jenis Rimba. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan permintaan pasar kayu yang sehingga realisasi produksi pun disesuaikan dimana prinsip tebangan yang dianut adalah market driven.

Until the end of 2020, teak wood production has only realized 432,817m³ or 93% of the 2020 RKAP Revision target, an increase of 7% from the realization in 2019. Meanwhile, the realization of Non-teak wood production is 413,688m³ or 117% of the 2020 RKAP Revision target and an increase of 10% of the realization in 2019. In total, wood production in 2020 reached 846,506m³ or 103% of the 2020 Revised RKAP. In the 2020 Revised RKAP, it is planned to produce 818,496m³ of wood consisting of 465,085m³ of teak species and 353,411m³ of non-teak. This is due to a decrease in market demand for wood, so that the realization of production is adjusted where the felling principle adopted is market driven

Penjualan Kayu Bulat

Perhutani berhasil merealisasikan penjualan kayu bulat sebanyak 811.587m³ atau 90% dari target RKAP tahun 2020. Dibandingkan realisasi penjualan periode yang sama tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 8%. Untuk jenis jati, realisasi volume penjualan sampai dengan tahun 2020 tercapai 92% dari target RKAP tahun 2020 meningkat sekitar 4% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan untuk jenis rimba realisasi volume penjualan mencapai 88% dari target RKAP tahun 2020 atau meningkat sebesar 13% jika dibandingkan dengan penjualan tahun 2019.

Log Sales

Perhutani succeeded in realizing the sale of logs of 811,587m³ or 90% of the 2020 RKAP target. Compared to the realization of sales for the same period in 2019, there was an increase of 8%. For teak species, the realization of sales volume up to 2020 reached 92% of the 2020 RKAP target, an increase of around 4% when compared to 2019. As for the non-teak type, the sales volume realization reached 88% of the 2020 RKAP target or an increase of 13% if compared to sales in 2019.

Peningkatan volume penjualan kayu bulat tahun 2020 disebabkan adanya permintaan pasar kayu bulat baik untuk bahan baku eksport maupun lokal meskipun diterjang pandemi.

The increase in the volume of log sales in 2020 was due to the demand for the log market for both export and local raw materials despite the pandemic.

PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN KAYU BULAT TAHUN 2020
The Increase in the Volume of Log Sales in 2020

Volume Penjualan Kayu Bulat Log Sales volume		**Jati** Teak Wood	**Rimba** Non-Teak Wood	**Jumlah** Total
RKAP 2020	RKAP 2020	462.495	440.872	903.367
REAL 2020	REAL 2020	423.437	388.150	811.587
REAL 2019	REAL 2019	403.134	343.919	747.053

Kayu Jati
Teak Wood

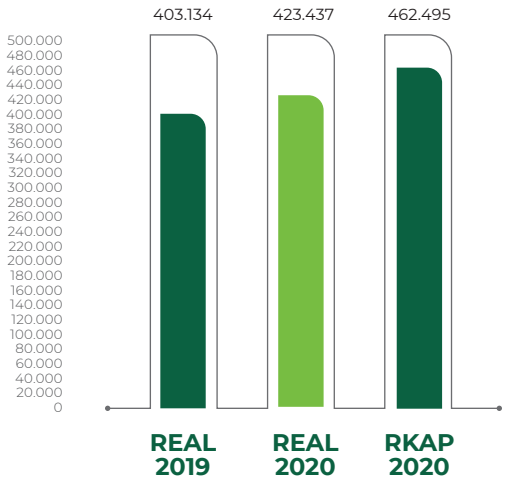

Kayu Rimba
Non-Teak Wood

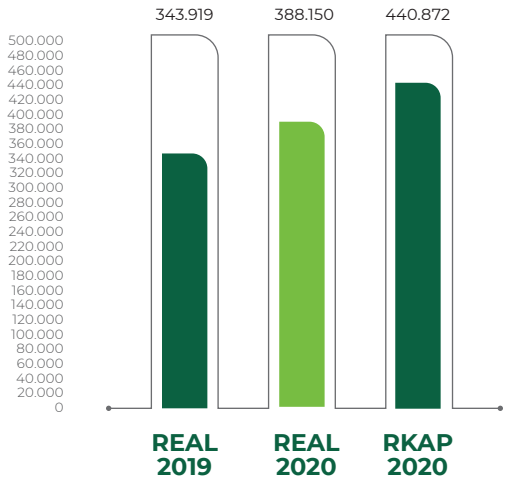

Jumlah Volume Penjualan Kayu Bulat
Total Log Sales Volume

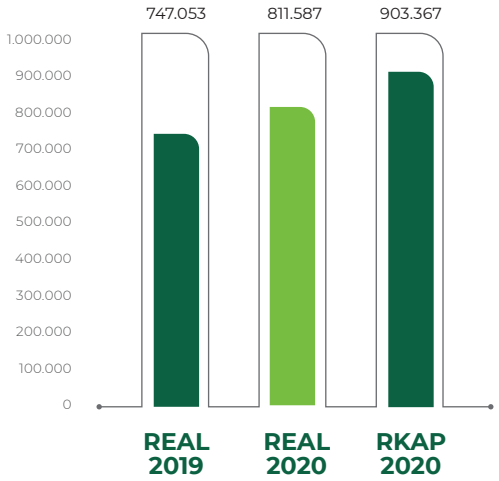

Pendapatan Kayu Bulat

Realisasi pendapatan secara total mencapai 113% dari target RKAP tahun 2020 atau meningkat 10% dari realisasi tahun 2019. Pendapatan kayu jati terealisasi 107% dari target RKAP tahun 2020 atau meningkat sebesar 4% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode yang sama di tahun 2019. Sementara untuk kayu rimba tercapai 133% dari target RKAP tahun 2020 atau meningkat sebesar 34% dari periode yang sama di tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan-kebijakan penjualan yang diambil oleh managemen dalam menghadapi masa pandemi covid-19, sehingga dengan penerapan kebijakan tersebut meningkatkan daya serap pasar yang selama ini menurun. Sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Log Revenue

Total revenue realization reached 113% of the 2020 RKAP target or an increase of 10% from the 2019 realization. Teak wood revenue was realized 107% of the 2020 RKAP target or an increase of 4% when compared to revenue realization in the same period in 2019. Meanwhile, for Non-Teak Wood, 133% of the 2020 RKAP target was achieved or an increase of 34% from the same period in 2019. This was due to the adjustment of sales policies taken by management in the face of the COVID-19 pandemic, so that with the implementation of This increases the market absorption which has been declining so far. As shown in the following graph:

PENDAPATAN KAYU BULAT
Log Revenues

Pendapatan Kayu Bulat Log Revenues		Jati Teak	Rimba Non Teak	Jumlah Total
RKAP 2020	RKAP 2020	1.144.474	307.597	1.452.071
REAL 2020	REAL 2020	1.225.918	410.636	1.636.553
REAL 2019	REAL 2019	1.174.907	307.311	1.482.218

Kayu Jati
Teak Wood

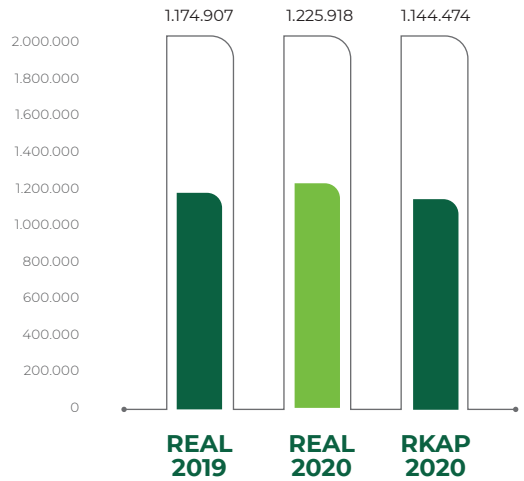

Kayu Rimba
Non-Teak Wood

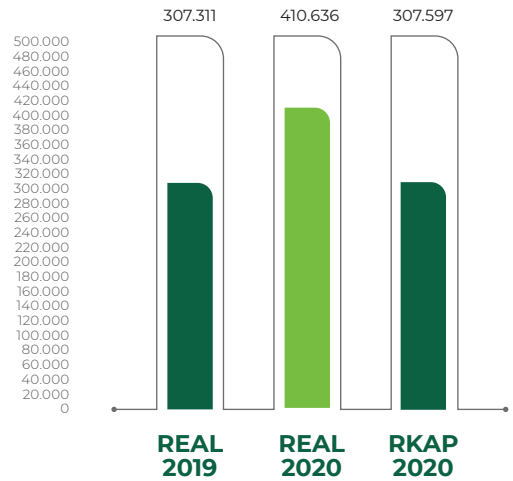

Jumlah Pendapatan Kayu Bulat
Total Log Revenues

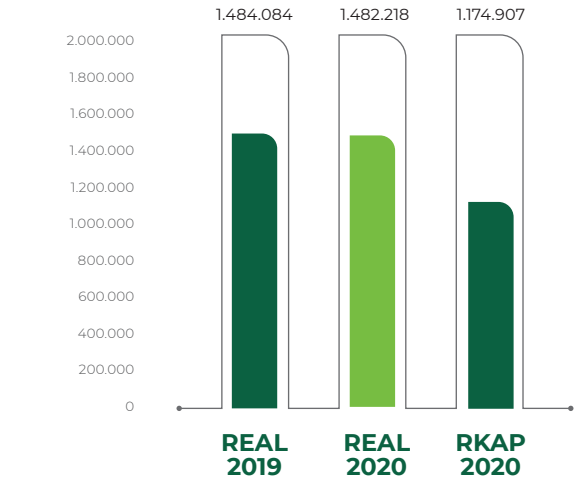

Harga Rata-rata Kayu Bulat

Realisasi harga jual rata-rata kayu jati mencapai 117% dari target RKAP 2020 atau naik 1% dari realisasi tahun sebelumnya. Harga rata-rata penjualan kayu bundar jati dan rimba terealisasi sebesar Rp2.016.481 mengalami peningkatan sebesar 25% dari RKAP tahun 2020 sebesar Rp1.607.398. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan daya serap pasar pada akhir periode tahun 2020, sehingga memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada realisasi harga rata-rata, begitu pula bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar 2%, hal ini disebakan karena adanya penyesuaian kebijakan penjualan pada masa pandemi Covid-19, sehingga manajemen menerapkan kebijakan penjualan dengan sistem bundling dan *discount quantity*.

Average Log Price

The realization of the average selling price of teak wood reached 117% of the 2020 RKAP target, an increase of 1% from the previous year's realization. The average selling price of teak and jungle logs was realized at Rp2,016,481, an increase of 25% from the 2020 RKAP of Rp1,607,398. This was due to an increase in market absorption at the end of the 2020 period, thus making a significant contribution to the realization of the average price, as well as when compared to the same period in 2019 there was an increase of approximately 2%, this was due to an adjustment in sales policy during the Covid-19 pandemic, so management implemented a policy sales with bundling system and discount quantity.

HARGA RATA-RATA KAYU BULAT
Average Log Price

Harga Rata-rata Kayu Bulat Log Average Price		Jati Teak	Rimba Non-Teak	Harga Rata-rata Total
RKAP 2020	RKAP 2020	2.474.564	697.702	1.607.398
REAL 2020	REAL 2020	2.895.150	1.057.929	2.016.481
REAL 2019	REAL 2019	2.880.379	893.557	1.971.509

Profitabilitas Kayu Bulat

Dari segmen kayu bulat ini, pada tahun 2020, menghasilkan pendapatan total sebesar Rp1,64 triliun atau 112,82% dari RKAP 2020 sebesar Rp1,43 triliun dan meningkat 10,40% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,48 triliun. Realisasi Biaya Pokok Penjualan sebesar Rp1,32 triliun atau 99,14% dari RKAP 2020 sebesar Rp1,34 triliun, menurun 13,92% dari tahun sebelumnya Rp1,54 triliun.

Tingkat Gross Profit Margin (GPM) tahun 2020 untuk segmen kayu bulat berada di angka 19,18% atau masuk dalam kategori profitabilitas tinggi, lebih tinggi dari pencapaian GPM tahun 2019 sebesar minus 3,66%.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Perhutani telah mengalami peningkatan kinerja dalam segmen kayu, baik dalam segi efektifitas maupun efisiensi.

Profitability of Logs

From this log segment, in 2020, it generated a total revenue of Rp1.64 trillion or 112.82% of the 2020 RKAP of Rp1.43 trillion and an increase of 10.40% from the previous year of Rp1.48 trillion. The realization of Cost of Goods Sold was Rp1.32 trillion or 99.14% of the 2020 RKAP of Rp1.34 trillion, a decrease of 13.92% from the previous year of Rp1.54 trillion.

The level of Gross Profit Margin (GPM) in 2020 for the log segment is at 19.18% or is included in the high profitability category, higher than the GPM achievement in 2019 of minus 3.66%.

These figures indicated that Perhutani has improved its performance in the timber segment, both in terms of effectiveness and efficiency.

PROFITABILITAS KAYU BULAT
Profitability of Logs

Elemen Element		2020		2019
		RKAP	REAL	
dalam jutaan rupiah / in million Rupiah				
Pendapatan	Revenue	1.452.071	1.638.247	1.484.084
HPP	HPP	1.335.632	1.324.103	1.538.232
Margin	Margin	116.439	314.144	(54.316)
GPM	GPM	8,02%	19,18%	(3,66%)

Dari data tersebut terlihat bahwa program efisiensi yang dilakukan Perhutani sejak semester II tahun 2018 telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan di tahun 2020. Kondisi ini merupakan awal yang baik bagi Perhutani dalam melakukan transformasi bisnis di tahun-tahun mendatang.

From these data, it can be seen that the efficiency program carried out by Perhutani since the second semester of 2018 has shown very significant results in 2020. This condition is a good start for Perhutani in carrying out business transformation in the coming years.

Segmen Kayu Olahan *(Finished Product)*

Perhutani melakukan pengolahan lanjutan terhadap sebagian kayu gergajian (RST) yang dihasilkan. Produk-produk yang kayu lanjutan yang diproduksi antara lain: *Decking, Flooring, Parket Blok, Finger Joint Laminated Flooring, Unijoin Flooring, Furniture, Housing Component, Plywood, Barecore* dll.

Processed Woods (Finished Products) Segment

Perhutani partly conducts further processing of the sawn timber (RST) products. The processed wood products are including: Decking, Flooring, Parquet Block, Finger Joint Laminated Flooring, Unijoin Flooring, Furniture, Housing Component, Plywood, Barecore and other products.

Produksi Kayu Olahan

Pada tahun 2020, industri kayu Perhutani telah mengolah bahan baku Kayu Bulat sebanyak sebanyak 61.399m^3 atau 106% dari target RKAP tahun 2020. Kayu Bulat Jati yang diolah sebanyak 19.738m^3 dan tercapai 98% dari target RKAP tahun 2020. Kayu Bulat Rimba yang diolah sebanyak 41.661m^3 atau tercapai 112% dari target RKAP 2020. Secara total, dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi pengolahan Kayu Bulat tahun 2020 lebih tinggi 10%.

Processed Wood Production

In 2020, Perhutani wood industry has processed 61,399m^3 of raw logs or 106% of the 2020 RKAP target. The processed teak logs are 19,738m^3 and 98% of the 2020 RKAP targets have been processed. As much as 41,661m^3 of logs were processed or reached 112% of the 2020 RKAP target. In total, compared to 2019, the realization of logs processing in 2020 was 10% higher.

Dari kayu yang diolah sebesar tersebut dihasilkan kayu gergajian (RST) sebanyak 17.220m^3 atau 126% dari target RKAP tahun 2020. Untuk kayu gergajian Jati terealisasi sebanyak 3.332m^3 atau 94% dari RKAP tahun 2020 dan untuk kayu Rimba terealisasi 13.889m^3 atau 137% dari RKAP tahun 2020. Realisasi produksi RST di tahun 2020 ini lebih tinggi 28% dari tahun 2019. Rendahnya pencapaian produksi RST disebabkan penyesuaian dengan kondisi pasar.

From the processed wood, 17,220m^3 of sawn timber (RST) was produced or 126% of the 2020 RKAP target. For Teak sawn timber, 3,332m^3 or 94% of the 2020 RKAP was realized and for Non-teak wood, 13,889m^3 or 137% of the 2020 RKAP was realized. RKAP 2020. Realization of RST production in 2020 was 28% higher than 2019. The low achievement of RST production is due to adjustments to market conditions.

Dari data volume realisasi RST dibandingkan volume kayu yang diolah terlihat rata-rata rendemen pengolahan kayu Jati mencapai 17%, dengan jenis produk *decking, flooring* dan parket blok. Adapun untuk kayu rimba rendemen rata-rata mencapai 33%.

From the data on the volume of RST realization compared to the volume of wood processed, it can be seen that the average yield of teak wood processing reached 17%, with the types of products being decking, flooring and parquet blocks. As for non-teak wood, the average yield achieved 33%.

Realisasi produk FP Jati tahun 2020 mencapai 2.183m^3 atau 54% dari RKAP tahun 2020. Realisasi tersebut lebih tinggi 22% dari pencapaian pada periode yang sama tahun 2019. Realisasi FP Rimba mencapai 4.519m^3 atau 43% dari RKAP tahun 2020, lebih rendah 51% dari pencapaian pada periode yang sama tahun 2019. Penyebab rendahnya pencapaian tahun 2020 disebabkan oleh kurangnya pangsa pasar dan adanya pandemi covid-19 sehingga permintaan order turun.

Realization of FP Teak products in 2020 reached 2,183 m^3 or 54% of RKAP in 2020. This realization was 22% higher than the achievement in the same period in 2019. Realization of non-teak FP reached 4,519m^3 or 43% of RKAP in 2020, 51% lower from the achievement in the same period in 2019. The cause of the low achievement in 2020 was due to the lack of market share and the COVID-19 pandemic that caused the fell of order demand.

PRODUKSI KAYU OLAHAN
Processed Wood Production

Jenis / Type		Satuan / Unit	2020		2019
			RKAP	REAL	
dalam jutaan rupiah / in million Rupiah					
RST Jati	Teak	m^3	3.557	3.332	4.150
RST Rimba	Non-teak Wood	m^3	10.135	13.889	9.312
Total RST	Total RST	m^3	13.692	17.220	13.463
Finished Product Jati	Teak Finished Products	m^3	4.052	2.183	1.784
Finished Product Rimba	Non-teak Wood Finished Product	m^3	10.454	4.519	9.264
Total Finished Product	Total Finished Product	m^3	14.506	6.702	11.048

Penjualan Kayu Olahan

Penjualan Dalam Negeri

Penjualan kayu gergajian (RST) sebesar 12.424m^3 atau tercapai 90% dari target RKAP 2020. Volume penjualan RST Jati tercapai 3.632m^3, 92% dari target RKAP tahun 2020 dan RST Rimba 8.792m^3, 89% dari target RKAP tahun 2020.

Volume penjualan dalam negeri untuk *Finished Products* (FP) tercapai 5.410m^3, 34% dari target RKAP tahun 2020. FP Jati tercapai 430m^3, 23%

Sales of Processed Wood

Domestic Sales

Sales of sawn wood (RST) amounted to 12,424m^3 or 90% of the 2020 RKAP target. The sales volume of RST Teak was 3,632m^3, 92% of the 2020 RKAP target and 8,792m^3 RST Non-teak, 89% of the 2020 RKAP target.

Domestic sales volume for Finished Products (FP) reached 5,410m^3, 34% of the 2020 RKAP target. Teak FP reached 430m^3, 23% of the 2020

dari target RKAP tahun 2020, sedangkan volume FP Rimba tercapai 4.980m³, 35% dari target RKAP tahun 2020. Volume penjualan log Jati tercapai 63m³, namun tidak direncanakan dalam RKAP tahun 2020. Rendahnya penjualan ini terjadi karena kurangnya order yang didapat.

RKAP target, while the Non-teak FP volume was 4,980m³, 35% of the RKAP target for the year 2020. The sales volume of teak logs reached 63m³, but it was not planned in the 2020 RKAP. This low sales occurred due to the lack of orders received.

Secara total, penjualan dalam negeri untuk produk kayu olahan adalah sebagai berikut:

In total, domestic sales for processed wood products are as follows:

PENJUALAN KAYU OLAHAN
Sales of Processed Wood

Jenis Type		Satuan Unit	2020		2019
			RKAP	REAL	
RST Jati	Teak	m³	3.963	3.632	2.789
RST Rimba	Non-teak Wood	m³	9.857	8.792	5.285
Finished Product Jati	Teak Finished Products	m³	1.895	430	515
Finished Product Rimba	Non-teak Wood Finished Product	m³	14.197	4.980	5.501
Log Jati	Teak Log	m³	-	63	48
Total	Total	m³	29.911	17.897	15.667

Penjualan Luar Negeri

Realisasi volume penjualan *finished product* luar negeri tercapai 2.719m³ atau 26% dari target RKAP tahun 2020. Volume penjualan *Finished Products* Jati tercapai 2.131m³ atau 62% dari target RKAP tahun 2020 dan *Finished Products* Rimba tercapai 588m³ atau 14% dari target RKAP tahun 2020. Secara total, penjualan ekspor untuk kayu olahan adalah sebagai berikut:

Overseas Sales

Realized sales volume of finished products abroad reached 2,719m³ or 26% of the 2020 RKAP target. The sales volume of Finished Teak products was reached 2,131m³ or 62% of the 2020 RKAP target and Non-Teak Finished Products reached 588m³ or 14% of the 2020 RKAP target. Therefore, total export sales for processed wood are as follows:

PENJUALAN LUAR NEGERI KAYU OLAHAN
Overseas Sales of Processed Wood

Jenis Type		Satuan Unit	2020		2019
			RKAP	REAL	
Finished Product Jati	Teak Finished Products	m³	3.438	2.131	2.034
Finished Product Rimba	Non-teak Wood Finished Product	m³	4.095	588	2.941
Total	Total	m³	7.533	2.719	4.975

Pendapatan Kayu Olahan

Pendapatan yang diperoleh dari penjualan dalam negeri tercapai Rp70,64 miliar atau 123% dari target RKAP 2020. Realisasi ini masih dibawah tahun 2019 yang mencapai Rp74,76 miliar. Faktor penyebabnya adalah bahan baku yang kurang terpenuhi sesuai tata waktu sehingga mempengaruhi kepastian pasar, kenaikan harga produk yang tinggi dan situasi pasar dalam negeri yang masih kurang memungkinkan untuk menyerap produk dalam jumlah besar.

Pendapatan dari hasil penjualan RST sebesar Rp53,40 miliar atau 164% dari target RKAP tahun 2020 dengan rincian RST Jati Rp36,31 miliar atau 156% dari target RKAP tahun 2020 dan RST Rimba Rp17,09 miliar atau 183% dari target RKAP tahun 2020. Penjualan *Finished Products* (FP) tercapai Rp16,84 miliar atau 68% dari target RKAP tahun 2020 dengan rincian *Finished Products* (FP) Jati Rp5,35 miliar atau 66% dari target RKAP tahun 2020 dan *Finished Products* (FP) Rimba Rp11,50 miliar atau 70% dari target RKAP tahun 2020. Sedangkan penjualan log tercapai Rp399 juta, namun tidak direncanakan dalam RKAP tahun 2020.

Hasil penjualan industri kayu dalam negeri masih di bawah target RKAP tahun 2020. Hal ini dikarenakan terjadinya kelesuan pasar pada bulan Maret-Juni 2020. Kelesuan pasar dominan sebagai dampak pandemi Covid-19. Upaa yang telah dilakukan yaitu reorientasi produk kayu olahan. Kelesuan pada pemasaran Plywood sengon disikapi dengan melakukan peningkatan penjualan RST Rimba Mahoni maupun penjualan S4S Sengon. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama pengolahan veneer sayat dengan PT. Duta Mas.

Pendapatan dari pasar ekspor tahun 2020 hanya tercapai Rp80,45 miliar atau 71% dari target RKAP

Processed Wood Revenues

Revenues from domestic sales reached Rp70.64 billion or 123% of the 2020 RKAP target. This realization is still below 2019 which reached Rp74.76 billion. The contributing factors are raw materials that are not fulfilled according to the timetable so that it affects market certainty, high product price increases and the situation in the domestic market which is still less likely to absorb large quantities of product.

Revenue from the sale of RST was Rp53.40 billion or 164% of the 2020 RKAP target, with details RST Jati Rp36.31 billion or 156% of the 2020 RKAP target and RKAP Rimba Rp17.09 billion or 183% of the 2020 RKAP target. Finished Products (FP) sales reached Rp16.84 billion or 68% of the 2020 RKAP target with details of Finished Products (FP) Teak Rp5.35 billion or 66% of the 2020 RKAP target and Finished Products (FP) Non-teak Rp11.50 billion or 70% of the 2020 RKAP target. Meanwhile, log sales reached Rp399 million, but it is not planned in the 2020 RKAP.

The sales results of the domestic wood industry are still below the 2020 RKAP target. This is due to the market sluggishness in March-June 2020. The dominant market slow down is the impact of the Covid-19 pandemic. Efforts that have been made are the reorientation of processed wood products. The sluggishness in the marketing of Plywood Sengon was addressed by increasing sales of RST Rimba Mahoni and sales of S4S Sengon. Another effort that has been made is to cooperate in taping veneer processing with PT Duta Mas.

Revenue from the export market in 2020 only reached Rp80.45 billion or 71% of the 2020 RKAP

tahun 2020. *Finished Products* Jati tercapai Rp79,15 miliar atau 78% dari target RKAP tahun 2020, sedangkan *Finished Products* Rimba tercapai Rp1,30 miliar atau 11% dari target RKAP tahun 2020.

Secara umum pencapaian pendapatan ekspor di tahun 2020 belum mencapai target yang diinginkan. Hal ini disebabkan juga karena adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan order Industri kayu baik di pabrik sendiri maupun hasil kerjasama KSP menurun pada periode Maret-Juni 2020. Terjadinya pandemi menyebabkan beberapa negara tujuan ekspor memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran pandemi yang lebih luas. Namun pada triwulan III dan Triwulan IV terjadi peningkatan order luar negeri terutama *flooring*. Adanya pandemi menyebabkan masyarakat di luar negeri sering berada di rumah dan berusaha membuat suasana kondusif di dalam rumah. Peningkatkan order ini dioptimalkan melalui penjualan produk hasil kerjasama (KSP).

Profitabilitas Kayu Olahan

Dari segmen Kayu Olahan, pada tahun 2020, menghasilkan pendapatan total sebesar Rp151,09 miliar atau 85,15% dari RKAP 2020 dan meningkat 0,07% dari tahun 2019. Realisasi Biaya Pokok Penjualan sebesar Rp70,83 miliar atau 128,33% dari RKAP 2020, meningkat 9,23% dari tahun 2019.

Tingkat Gross Profit Margin (GPM) tahun 2020 untuk segmen industri kayu berada di angka 53% atau masuk dalam kategori profitabilitas tinggi, namun lebih rendah dari pencapaian GPM tahun 2019 sebesar 57%.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Perhutani telah mengalami penurunan kinerja pada segmen industri kayu, terutama dalam segi efisiensi dalam usaha industri kayu.

target. Finished Teak Products reached Rp79.15 billion or 78% of the 2020 RKAP target, while Non-teak Finished Products reached Rp1.30 billion or 11% from the 2020 RKAP target.

In general, achievement of export revenues in 2020 has not reached the desired target. This is also due to the Covid-19 pandemic, which causes orders for the wood industry, both at their own factories and the results of the KSP collaboration, to decline in the March-June 2020 period. The pandemic has caused several export destination countries to impose lockdowns to prevent the wider spread of the pandemic. However, in the third quarter and fourth quarter, there was an increase in foreign orders, especially flooring. The existence of a pandemic causes people abroad to often stay at home and try to create a conducive atmosphere at home. This order increase is optimized through the sale of joint products (KSP).

Processed Wood Profitability

From the Processed Wood segment, in 2020, it generated a total revenue of Rp151.09 billion or 85.15% of the 2020 RKAP and an increase of 0.07% from 2019. Realization of Cost of Goods Sold was Rp70.83 billion or 128.33% of RKAP 2020, an increase of 9.23% from 2019.

The Gross Profit Margin (GPM) level in 2020 for the wood industry segment is at 53% or is included in the high profitability category, but lower than the 2019 GPM achievement of 57%.

These figures show that Perhutani has experienced a decline in performance in the timber industry segment, especially in terms of efficiency in the timber industry.

PROFITABILITAS KAYU OLAHAN
Processed Wood Profitability

Elemen Element		2020 RKAP	2020 REAL	2019
dalam jutaan rupiah / in million Rupiah				
Pendapatan	Revenue	170.429	151.085	150.985
HPP	HPP	55.189	70.826	64.839
Margin	Margin	122.240	80.259	86.146
GPM	GPM	68,90%	53,12%	57,06%

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan profitabilitas segmen usaha kayu sebagai berikut:

From these results, it can be concluded that the profitability of the timber business segment is as follows:

PROFITABILITAS SEGMEN KAYU (KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN)
Profitability of Timber Segment (Log and Processed Timber)

Elemen Element		2020 RKAP	2020 REAL	2019
dalam jutaan rupiah / in million Rupiah				
Pendapatan	Revenue	1.622.500	1.638.247	1.634.901
HPP	Cost of Goods Sold	1.390.821	1.394.929	1.603.071
Margin	Margin	238.679	394.403	31.830
GPM	GPM	14,65%	22,04%	1,95%

Segmen Hasil Hutan Lainnya

Segmen Hasil Hutan Lainnya meliputi produk-produk non kayu, jasa lingkungan, agroforestry dan produk lain, baik yang diolah maupun tidak diolah. Beberapa produk utamanya adalah sebagai berikut:

Produksi Getah Pinus

Sampai dengan tahun 2020, pengolahan terhadap getah pinus terealisasi 84.792 ton atau 88% dari Revisi RKAP tahun 2020. Angka ini turun 5% dari periode yang sama tahun 2019.

Produksi getah damar mencapai 384 ton atau 92% dari RKAP Revisi tahun 2020 atau 94% dari realisasi tahun 2019. Daun kayu putih tercapai 44.700 ton atau 86% dari RKAP Revisi tahun

Other Forest Product Segments

Other Forest Product Segments include non-wood products, environmental services, agroforestry and other products, both processed and unprocessed. Some of the main products are as follows:

Pine Gum Production

As of 2020, 84,792 tons of pine resin has been processed, or 88% of the 2020 RKAP revision. This figure is down 5% from the same period in 2019.

The resin production reached 384 tons or 92% of the 2020 Revised RKAP or 94% of the 2019 realization. Eucalyptus leaves reached 44,700 tons or 86% of the 2020 Revised RKAP. This

2020. Angka ini 107% dari realisasi tahun 2019. Ketidaktercapaian realisasi pengolahan getah pinus tersebut dikarenakan kendala kekurangan tenaga penyadap serta aksesibilitas di beberapa lokasi sadapan yang sulit dan memerlukan perbaikan mengakibatkan produksi getah terhambat sehingga pasokan bahan baku industri getah pinus juga terhambat.

figure is 107% of the 2019 realization. The pine resin was due to the shortage of tappers as well as accessibility in some locations where the taps were difficult and needed repairs resulting in hampered sap production so that the supply of raw materials for the pine resin industry was also hampered.

Produksi Gondorukem dan Terpentin

Sementara Gondorukem yang dihasilkan tercapai 61.241 ton atau 86% dari Revisi RKAP tahun 2020. Angka ini turun 6% dari periode yang sama tahun 2019. Rendemen pengolahan gondorukem tercapai 72,22% atau 99% dari target Revisi RKAP tahun 2020 atau turun 1% dari periode yang sama tahun 2019.

Production of Gum Rosin and Turpentine

While the Gum Rosin produced reached 61,241 tons or 86% of the 2020 RKAP Revision. This figure decreased by 6% from the same period in 2019. The yield of gum rosin processing was 72.22% or 99% of the 2020 RKAP Revision target or decreased 1% from the same period in 2019.

Untuk produksi terpentin tercapai 12.846 ton atau 86% dari Revisi RKAP tahun 2020. Angka ini turun 10% dari periode yang sama tahun 2019. Rendemen pengolahan terpentin tercapai 15,15% atau 99% dari Revisi RKAP tahun 2020 dan turun 5% dari periode yang sama tahun 2019. Sementara untuk derivat yang sudah terealisasi pada tahun 2020 adalah A-Pinene sebesar 486 ton dan Dipenten 90 ton.

For turpentine production, it reached 12,846 tons or 86% of the 2020 RKAP Revision. This figure decreased by 10% from the same period in 2019. The turpentine processing yield reached 15.15% or 99% of the 2020 RKAP Revision and decreased 5% from the previous period. the same in 2019. Meanwhile for derivatives that have been realized in 2020 are A-Pinene of 486 tons and Dipenten of 90 tons.

Minyak Kayu Putih, Kopal dan Lak

Minyak Kayu Putih

Daun yang diolah sampai dengan tahun 2020 sebanyak 44.696 ton atau 86% dari Revisi RKAP tahun 2020. Angka ini naik 7% dari periode yang sama tahun 2019. Sedangkan Minyak Kayu Putih yang dihasilkan tercapai 309 ton atau 73% dari Revisi RKAP tahun 2020. Angka ini turun 5% dari realisasi periode yang sama tahun 2019.

Eucalyptus Oil, Copal and Shellac

Eucalyptus oil

The leaves processed until 2020 were 44,696 tons or 86% of the 2020 RKAP Revision. This figure increased by 7% from the same period in 2019. Meanwhile, Eucalyptus Oil produced reached 309 tons or 73% of the 2020 RKAP revision. This is down 5% from the realization of the same period in 2019.

Tidak tercapainya realisasi pemasakan Daun Kayu Putih dari target tahun 2020 adalah adanya aktifitas pemasakan belum optimal karena DKP dalam kondisi basah cenderung menghasilkan rendemen

The failure to achieve the realization of Eucalyptus Leaf cooking from the 2020 target is that the cooking activity is not optimal because DKP in wet conditions tends to produce low MKP yields.

MKP yang rendah. Rendemen pengolahan Minyak Kayu Putih tercapai 0,69%, masih di bawah target Revisi RKAP tahun 2020 sebesar 0,81%.

The yield of eucalyptus oil processing was reached 0.69%, still below the 2020 RKAP Revision target of 0.81%.

Penurunan rendemen tersebut, terjadi karena terdapat daun kayu putih yang menguning. Selain itu, perlu adanya kegiatan pemupukan untuk meningkatkan produktivitas daun kayu putih serta peningkatan rendemen.

The decrease in yield was due to yellowing of eucalyptus leaves. In addition, fertilization activities are needed to increase the productivity of eucalyptus leaves and increase yield.

Lak Butiran (Seedlak)

Sampai dengan tahun 2020, realisasi produksi Lak mencapai 7 ton.

Sheedllac Granules (Seedlak)

Until 2020, the realization of Lacquer production reaches 7 tons.

Kopal

Produksi kopal mencapai 384 ton atau 92% dari RKAP tahun 2020. Angka ini 92% dari target tahun 2020 dan 94% dari realisasi tahun 2019 pada periode yang sama.

Copal

Copal production reached 384 tons or 92% of the 2020 RKAP. This figure is 92% of the 2020 target and 94% of the 2019 realization in the same period.

Pendapatan Gondorukem & Terpentin

Penjualan domestik Gondorukem tahun 2020 terealisasi sebanyak 5.950 ton atau 57% dari RKAP tahun 2020 dan volume penjualan naik 19% dibandingkan realisasi penjualan tahun 2019. Sementara untuk Terpentin, terjual sebanyak 2.237 ton atau 68% dari RKAP tahun 2020 dan volume penjualan naik 46% dibandingkan realisasi penjualan tahun 2019.

Gum Rosin & Turpentine Income

Domestic sales of gum rosin in 2020 were realized as much as 5,950 tons or 57% of the 2020 RKAP and sales volume increased by 19% compared to the sales realization in 2019. Meanwhile for Turpentine, 2,237 tons or 68% of the 2020 RKAP were sold and sales volume increased 46% compared to realization of sales in 2019.

Untuk Derivat gondorukem dan terpentin, produk yang terjual sebanyak 202 ton di tahun 2020 atau 227% dari RKAP tahun 2020, bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 7%.

For gum rosin and turpentine derivatives, the products sold were 202 tons in 2020 or 227% of the 2020 RKAP, when compared to 2019, an increase of 7%.

Penjualan MKP tahun 2020 terjual 309 ton atau 73% dari RKAP tahun 2020, jika diibandingkan realisasi penjualan ditahun 2019, terjadi penurunan sebesar 4%.

MKP sales in 2020 sold 309 tons or 73% of the 2020 RKAP, when compared to sales realization in 2019, there was a decrease of 4%.

Penjualan Kopal tahun 2020 terjual 431 ton atau 127 % dari RKAP tahun 2020, jika diibandingkan realisasi penjualan ditahun 2019, terjadi kenaikan sebesar 15%.

Copal sales in 2020 sold 431 tons or 127% of the 2020 RKAP, when compared to sales realization in 2019, an increase of 15%.

Harga Rata-rata Gondorukem dan Terpentin

Secara umum, harga rata-rata Gondorukem dan Terpentin mengalami peningkatan. Harga dalam negeri gondorukem terealisasi Rp14,22juta di tahun 2020, naik 6% dari tahun 2019 atau 115% dari target RKAP 2020. Sedangkan untuk terpentin tercapai Rp23,03 juta, turun 49% dari tahun 2019 atau 97% dari target RKAP 2020.

Average price of Gum Rosin and Turpentine

In general, the average price of Gondorukem and Turpentine has increased. The domestic price of gondorukem was realized at Rp14.22 million in 2020, up 6% from 2019 or 115% of the 2020 RKAP target. Meanwhile, turpentine reached Rp23.03 million, down 49% from 2019 or 97% of the 2020 RKAP target.

Harga rata-rata ekspor gondorukem terealisasi Rp14,38 juta, naik 6% dari tahun 2019. Angka ini 109% dari target RKAP 2020. Sedangkan untuk terpentin terealisasi Rp25,67 juta atau turun 39% dari tahun 2019 dan 102% dari target RKAP 2020.

The average export price of gondorukem was realized at Rp14.38 million, up 6% from 2019. This figure was 109% of the 2020 RKAP target. Meanwhile, turpentine was realized at Rp25.67 million, down 39% from 2019 and 102% from the 2020 RKAP target.

Secara total, pendapatan dari penjualan produk industri non kayu di dalam negeri tercapai Rp231,34 miliar atau 72% dari target RKAP 2020, naik 1% dari tahun 2019. Sementara hasil penjualan luar negeri industri non kayu tercapai Rp1,17 triliun atau 106% dari RKAP 2020, menurun 10% dari tahun 2019.

In total, revenue from sales of non-timber industrial products in the country reached Rp231.34 billion or 72% of the 2020 RKAP target, up 1% from 2019. Meanwhile, foreign sales of non-timber industries reached Rp1.17 trillion or 106% of RKAP 2020, decreased by 10% from 2019.

Produk Gondorukem menghasilkan pendapatan sebesar Rp84,64 miliar atau 66% dari RKAP tahun 2020, terjadi kenaikan pendapatan sebesar 25% dibandingkan dengan realisasi pendapatan di tahun 2019. Sedangkan untuk produk Terpentin menghasilkan pendapatan sebesar Rp51,52 miliar atau 66% dari RKAP tahun 2020 dan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan di tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 25%.

The Gum Rosin product generated revenue of Rp84.64 billion or 66% of the 2020 RKAP, an increase in revenue of 25% compared to the realization of revenue in 2019. Meanwhile, the Turpentine product generated revenue of Rp51.52 billion or 66% of the 2020 RKAP. and when compared to the realization of revenue in 2019 there was a decrease of 25%.

Sementara dari pendapatan dalam negeri produk Derivat gondorukem dan terpentin tercapai sebesar Rp6,95 miliar, sedangkan di tahun 2019 tercapai Rp7,21 miliar.

Meanwhile, from domestic revenue, gum rosin and turpentine derivative products reached Rp6.95 billion, while in 2019 it reached Rp7.21 billion.

Produk Minyak Kayu Putih terjual senilai Rp88,24 Miliar atau 79% dari RKAP tahun 2020, terjadi kenaikan pendapatan sebesar 3% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019.

Eucalyptus Oil Products were sold for Rp88.24 billion or 79% of the 2020 RKAP, an increase in revenue of 3% compared to 2019.

Produk Kopal terjual senilai Rp4,36 miliar atau 111% dari RKAP tahun 2020, pendapatan kopal tahun 2020 nilainya hampir sama dengan pendapatan tahun 2019.

Kopal products were sold for Rp4.36 billion or 111% of the 2020 RKAP, the copal revenue in 2020 is almost the same as the 2019 revenue.

TABEL PENDAPATAN DALAM NEGERI PRODUK INDUSTRY NON KAYU TAHUN 2020

Table of Domestic Income of Non-Wood Industry Products in 2020

Jenis Type		Satuan Unit	2020		2019
			RKAP	REAL	
dalam jutaan rupiah / dalam jutaan rupiah					
Gondorukem	Gum Rosin	Rp juta Rp million	128.593	84.635	67.654
Terpentin	Turpentine		78.517	51.516	69.041
Derivat Gondorukem dan Terpentin	Sub-Products of Gum Rosin and Turpentine		1.723	6.945	7.206
Minyak Kayu Putih	Eucalyptus Oil		111.891	88.240	85.556
Kopal	Kopal		3.921	4.356	4.348
Total	Total		320.723	231.337	229.457

Penjualan ekspor Gondorukem tahun 2020 terealisasi sebanyak 59.084 ton atau 100% dari RKAP tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 3% dibandingkan volume penjualan ekspor gondorukem di tahun 2019.

Gum Rosin export sales in 2020 were realized as much as 59,084 tons or 100% of the 2020 RKAP, a decrease of 3% compared to the volume of Gum Rosin export sales in 2019.

Sementara untuk Terpentin, terjual sebanyak 11.840 ton atau 90% dari RKAP tahun 2020, terjadi kenaikan volume penjualan sebesar 20% dibandingkan dengan volume penjualan ekspor terpentin di tahun 2019.

Meanwhile, for Turpentine, 11,840 tons were sold or 90% of the 2020 RKAP, an increase in sales volume of 20% compared to the export sales volume of turpentine in 2019.

Untuk Derivat gondorukem dan terpentin, produk yang terjual sebanyak 659 ton di tahun 2020 dan 1.400 ton di tahun 2019.

For gum rosin and turpentine derivatives, the products sold were 659 tons in 2020 and 1,400 tons in 2019.

Produk Gondorukem menghasilkan pendapatan sebesar Rp849,78 miliar atau 110% dari RKAP tahun 2020, terjadi kenaikan pendapatan

Gum rosin products generated revenue of Rp849.78 billion or 110% of the 2020 RKAP, there was an increase in gum rosin export revenues

ekspor gondorukem sebesar 3% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan untuk produk Terpentin menghasilkan pendapatan sebesar Rp303,98 miliar atau 91% dari RKAP tahun 2020, turun 27% dari realisasi tahun 2019. Sementara dari pendapatan ekspor produk Derivat gondorukem dan terpentin tercapai sebesar Rp19,42 miliar.

of 3% compared to 2019. Meanwhile, Turpentine products generated revenues of Rp303.98 billion or 91% of the 2020 RKAP, a decrease of 27 % of the realization in 2019. Meanwhile, export revenues from gum rosin and turpentine derivative products reached Rp19.42 billion.

TABEL PENDAPATAN LUAR NEGERI PRODUK INDUSTRY NON KAYU TAHUN 2020
Table of Foreign Income of Non-Timber Industry Products in 2020

Jenis Type		Satuan Satuan	2020		2019
			RKAP	REAL	
dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah					
Gondorukem	Gum Rosin	Rp juta Rp million	771.926	849.776	822.617
Terpentin	Turpentine		332.701	303.976	413.810
Derivat Gondorukem dan Terpentin	Sub-Products of Gum Rosin and Turpentine		3.998	19.419	71.846
Total	Total		1.108.625	1.173.170	1.308.274

Profitabilitas Hasil Hutan Lainnya

Pada tahun 2020, segmen hasil hutan lainnya mampu menghasilkan pendapatan total sebesar Rp1,76 triliun atau 100,67% dari RKAP 2020 sebesar Rp1,75 triliun dan turun 14,16% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,05 triliun. Realisasi Biaya Pokok Penjualan sebesar Rp1,07 triliun atau 117,70% dari RKAP 2020 sebesar Rp908,80 miliar, meningkat 22,74% dari tahun sebelumnya sebesar Rp871,44 miliar.

Tingkat Gross Profit Margin (GPM) tahun 2020 untuk segmen hasil hutan lainnya berada di angka 39,25% atau masuk dalam kategori profitabilitas tinggi, namun lebih rendah dari pencapaian GPM tahun 2019 sebesar 57,52%.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ada sedikit penurunan kinerja pada segmen hasil hutan lainnya.

Profitability of Other Forest Products

In 2020, the other forest products segment was able to generate a total revenue of Rp 1.76 trillion or 100.67% of the 2020 RKAP of Rp1.75 trillion and decreased by 14.16% from the previous year of Rp2.05 trillion. The realization of Cost of Goods Sold was Rp1.07 trillion or 117.70% of the 2020 RKAP of Rp908.80 billion, an increase of 22.74% from the previous year of Rp871.44 billion.

The Gross Profit Margin (GPM) level in 2020 for other forest product segments is 39.25% or is in the high profitability category, but lower than the 2019 GPM achievement of 57.52%.

These figures indicate that there has been a slight decline in performance in other forest product segments.

PROFITABILITAS HASIL HUTAN LAINNYA
Profitability of Other Forest Products

Elemen Elemen		2020		2019
		RKAP	REAL	
dalam jutaan rupiah / dalam jutaan rupiah				
Pendapatan	Revenue	1.749.101	1.760.770	2.051.228
HPP	HPP	908.803	1.069.649	871.440
Margin	Margin	840.298	691.121	1.179.788
GPM	GPM	48,04%	39,25%	57,52%

Segmen Usaha Lainnya

Segmen Usaha Lainnya meliputi ekowisata dan agribisnis dan jasa rehabilitasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

Ekowisata

Ekowisata diartikan suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan menyejahterakan penduduk setempat serta mengikutsertakan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. (The International Ecotourism Society, 2015).

Dari *The Travel and Tourism Competitiveness Report* 2015, wisata Indonesia memiliki keunggulan daya tarik alam yang beragam, harga wisata yang kompetitif dan kebijakan prioritas untuk wisata. Perhutani sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai daya tarik alam yang beragam mulai dari pantai, hutan, pegunungan bergerak untuk mengambil peran dalam pembangunan pariwisata Nasional.

Tahun 2020, Perhutani mengelola 652 lokasi wisata yang tersebar di di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat & Banten. Bersama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH dan

Other Business Segments

Other Business Segments include ecotourism and agribusiness and rehabilitation services, with the following explanations:

Ecotourism

Ecotourism is defined as a form of travel to natural areas that is carried out with the aim of conserving the environment and preserving life and the welfare of the local population as well as involving aspects of education and interpretation of the natural environment and community culture with ecological sustainability management. (The International Ecotourism Society, 2015).

From The Travel and Tourism Competitiveness Report 2015, Indonesian tourism has the advantages of various natural attractions, competitive tourism prices and priority policies for tourism. Perhutani as one of the State-Owned Enterprises that has various natural attractions ranging from beaches, forests, mountains is moving to take a role in national tourism development.

In 2020, Perhutani manages 652 tourist sites spread across Central Java, East Java and West Java & Banten. Together with the Forest Village Community Institution/LMDH and the Regional

Pemerintah Daerah, Perhutani secara bertahap membangun lokasi – lokasi wisata baru yang ke depan diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang pendapatan di Perhutani.

Government, Perhutani is gradually building new tourist sites which in the future are expected to be one of the contributors to Perhutani's income.

Dari bidang wisata, sampai dengan 31 Desember 2020, Perhutani mendapatkan pendapatan sebesar Rp153,82 miliar atau 98% dari target RKAP tahun 2020, turun 25% dari periode yang sama pada tahun 2019.

From the tourism sector, as of December 31, 2020, Perhutani earned Rp153.82 billion in revenue or 98% of the 2020 RKAP target, down 25% from the same period in 2019.

Penurunan jumlah pengunjung tidak berdampak pada pendapatan dikarenakan pada tahun 2020 mayoritas lokasi wisata menaikkan harga tiket masuk sekaligus sebagai pembatasan jumlah pengunjung (protokol kesehatan jaga jarak), mulai diterapkannya *e-ticketing* sehingga administrasi pencatatan pendapatan lebih tertib serta revisi target RKAP akibat adanya pandemi Covid-19. Pendapatan tidak tercapai dari target RKAP disebabkan karena menurunnya tingkat kunjungan wisata.

The decrease in the number of visitors has no impact on income because in 2020 the majority of tourist sites will increase the price of entrance tickets as well as limit the number of visitors (health distancing protocols), e-ticketing has begun so that revenue recording administration is more orderly as well as revised RKAP targets due to the Covid-19 pandemic. 19. Revenue was not achieved from the RKAP target due to a decrease in the level of tourist visits.

Sampai dengan tahun 2020 obyek wisata Perum Perhutani dikunjungi oleh sebanyak 11,864 juta orang wisatawan atau 104% dari target Revisi RKAP tahun 2020 dan mengalami penurunan 30% dibanding periode yang sama tahun 2019. Penurunan realisasi pengunjung dikarenakan kebijakan penutupan obyek wisata Perhutani dalam rangka upaya pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

Until 2020, Perum Perhutani tourism objects were visited by as many as 11,864 million tourists or 104% of the 2020 RKAP Revision target and decreased by 30% compared to the same period in 2019. The decrease in visitor realization was due to the policy of closing Perhutani tourism objects in an effort to prevent the spread and handling of Covid-19 based on local government policies.

Agribisnis

Usaha agribisnis Perhutani saat ini adalah usaha produk madu yang terdiri madu murni dan derivat madu. Produk madu yang dihasilkan Perhutani:

1. Madu murni Kelengkeng (volume 650 ml, 220 ml, 390 ml, 215 ml, 120 ml).
2. Madu murni Randu (volume 650 ml, 220 ml,

Agribusiness

Perhutani's current agribusiness business is a honey product business consisting of pure honey and honey derivatives. Honey products produced by Perhutani:

1. Pure Longan Honey (volume 650 ml, 220 ml, 390 ml, 215 ml, 120 ml).
2. Pure Honey Randu (volume 650 ml, 220 ml,

390 ml, 215 ml, 120 ml).
3. Madu murni Bunga Liar (volume 650 ml, 220 ml, 390 ml, 215 ml, 120 ml).
4. Madu murni jenis lain (madu hutan, madu multiflora, madu mangga dsb) (volume 650 ml, 220 ml, 390 ml, 215 ml, 120 ml).
5. Madu plus 3 in 1 (madu, *bee pollen, royal jelly*) volume 220 ml.
6. Madu plus 4 in 1 (madu, *bee pollen, royal jelly, propolis*) volume 220 ml.
7. Sabun madu padat 80 gr.
8. Sabun madu cair *"Honey Plus"* 270 ml.
9. Sabun madu cair 100 ml.

Produk madu Perhutani dijual di *outlet* Perhutani (Jakarta, Bogor, Bandung, Tangerang), kantor Perhutani dan penjualan online.

Produksi Madu pada tahun 2020 sebesar 86,97 ton atau turun 108,76% meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 41,66 ton.

Penyebab tidak tercapainya pendapatan agribisnis antara lain karena kekurangan bahan baku, kurangnya kerja sama penjualan dengan pihak ketiga, uang kerja terbatas, beberapa industri agro berhenti produksi seperti AMDK dan Madu.

390 ml, 215 ml, 120 ml).
3. Pure Wildflower Honey (volume 650 ml, 220 ml, 390 ml, 215 ml, 120 ml).
4. Other types of pure honey (forest honey, multiflora honey, mango honey, etc.) (volume 650 ml, 220 ml, 390 ml, 215 ml, 120 ml).
5. Honey plus 3 in 1 (honey, bee pollen, royal jelly) 220 ml volume.
6. Honey plus 4 in 1 (honey, bee pollen, royal jelly, propolis) 220 ml volume.
7. Solid honey soap 80 gr.
8. Liquid honey soap "Honey Plus" 270 ml.
9. Liquid honey soap 100 ml.

Perhutani honey products are sold at Perhutani outlets (Jakarta, Bogor, Bandung, Tangerang), Perhutani offices and online sales.

Honey production in 2020 was 86.97 tons or decreased by 108.76%, an increase compared to 2019 of 41.66 tons.

The reasons for not achieving agribusiness income are among others the lack of raw materials, lack of sales cooperation with third parties, limited working money, some agro industries stop production such as bottled water and honey.

Jenis Type	2020	2019	2018	2017	2016
Produksi Agribisnis (Kg) Agribusiness Production (Kg)					
Madu/ Honey	86.970	41.661	29.654	33.554	98.834

Pendapatan Agroforestry Perhutani tahun 2020 tercatat sebesar Rp107,75 miliar. Komoditas *Non Offtaker* menyumbang Rp80,26 miliar dan Industri Agro menyumbang Rp27,49 miliar.

Perhutani's Agroforestry revenue in 2020 was recorded at Rp107.75 billion. Non Offtaker Commodities contributed Rp80.26 billion and Agro Industry contributed Rp27.49 billion.

Profitabilitas Segmen Usaha Lainnya

Pada tahun 2020, segmen usaha lainnya mampu menghasilkan pendapatan total sebesar Rp226,83 miliar atau 172,81% dari RKAP 2020 sebesar Rp131,26 miliar dan meningkat 77,84% dari tahun sebelumnya sebesar Rp127,54 miliar. Realisasi Biaya Pokok Penjualan sebesar Rp134,79 miliar atau 152,08% dari RKAP 2020 sebesar Rp88,63 miliar, meningkat 66,03% dari tahun sebelumnya sebesar Rp269,23 miliar.

Profitability of Other Business Segments

In 2020, other business segments were able to generate a total revenue of Rp226.83 billion or 172.81% of the 2020 RKAP of Rp131.26 billion and an increase of 77.84% from the previous year of Rp127.54 billion. The realization of Cost of Goods Sold was Rp134.79 billion or 152.08% of the 2020 RKAP of Rp88.63 billion, an increase of 66.03% from the previous year of Rp269.23 billion.

Tingkat Gross Profit Margin (GPM) tahun 2020 untuk segmen hasil hutan lainnya berada di angka 40,58% atau masuk dalam kategori profitabilitas tinggi, lebih tinggi dari pencapaian GPM tahun 2019 sebesar minus 211,09%.

The Gross Profit Margin (GPM) level in 2020 for other forest product segments is at 40.58% or is included in the high profitability category, higher than the 2019 GPM achievement of minus 211.09%.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Perhutani telah mengalami peningkatan kinerja pada segmen hasil hutan lainnya.

These figures show that Perhutani has improved its performance in other forest product segments.

PROFITABILITAS SEGMEN USAHA LAINNYA
Profitability of Other Business Segments

Elemen Elemen		2020		2019
		RKAP	REAL	
dalam jutaan rupiah / in million Rupiah				
Pendapatan	Revenue	131.257	226.825	127.543
HPP	Cost of Good Sold	88.632	134.790	396.770
Margin	Margin	42.625	92.035	(269.227)
GPM	GPM	32,47%	40,58%	(211,09%)

Profitabilitas Perusahaan per segmen usaha/ lini bisnis pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

The Company's profitability per business segment/line of business in 2020 is presented in the following table:

TABEL PROFITABILITAS PERUSAHAAN PER SEGMEN TAHUN 2020

Company Profitability Table by Segment in 2020

Lini Bisnis Line Of Business		**Realisasi Pendapatan (Rp juta)** Revenue Realization (Rp Million)	**Profitabilitas (%)** Profitability (%)	**Kontribusi terhadap Pendapatan Usaha (%)** Contribution To Revenues (%)
Segmen Kayu	Timber Segment	1.966.455	22,04	50,07
Segmen Non Kayu	Non-Timber Segment	1.521.619	39,25	38,74
Segmen Lainnya	Other Segment	439.314	40,58	11,19
Total	Total	3.927.388	31,18	100,00

Prospek Pengembangan Usaha

Business Development Prospect

PROSPEK USAHA

Perekonomian dunia dalam masa pemulihan setelah terkontraksi besar-besaran akibat pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Apalagi dengan telah ditemukan dan didistribusikannya vaksin oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan Inggris. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 akan membaik dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh tambahan stimulus fiskal yang digelontorkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS), serta prospek vaksinasi yang dilakukan secara lebih meluas.

Namun demikian, proses pemulihan ekonomi global masih belum sempurna. Sebab, proses pemulihan pun cenderung berbeda di setiap negara, serta di beragam sector. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 akan berada di kisaran 4,1% hingga 5,1%. prediksi tersebut didasarkan perbaikan konsumsi swasta yang tidak secepat yang diperkirakan oleh otoritas moneter maupun otoritas fiskal. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa sektor yang terkendala karena mobilitas, dan juga kenaikan kasus Covid-19.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh berlanjutnya program vaksinasi yang mendorong kenaikan mobilitas sehingga konsumsi rumah tangga membaik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan didukung kinerja investasi yang meningkat pasca implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dari sisi

BUSINESS PROSPECT

The world economy is recovering after a massive contraction due to the Covid-19 pandemic since the beginning of 2020. Especially with the discovery and distribution of vaccines by countries such as the United States, China and the United Kingdom. The International Monetary Fund (IMF) estimates that global economic growth in 2021 will improve compared to last year. This is due to the additional fiscal stimulus launched by the United States (US) government, as well as the prospect of vaccination being carried out more broadly.

However, the process of global economic recovery is still not perfect. This is because the recovery process tends to be different in each country, as well as in various sectors. BI estimates that Indonesia's economic growth in 2021 will be in the range of 4.1% to 5.1%. The prediction is based on the improvement in private consumption which is not as fast as predicted by the monetary and fiscal authorities. This is because there are several sectors that are constrained by mobility, as well as the increase in Covid-19 cases.

The improvement in national economic growth is supported by the continuation of the vaccination program which encourages increased mobility so that household consumption improves. In addition, economic growth will be supported by increased investment performance after the implementation of the Job Creation Law. In

ekspor, perdagangan diperkirakan tetap kuat seiring pertumbuhan global yang tetap tinggi dan masih baiknya harga komoditas. Selain itu, berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah dan kebijakan BI yang tetap akomodatif juga diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2021.

terms of exports, trade is expected to remain strong in line with persistently high global growth and favorable commodity prices. In addition, continued government fiscal stimulus and accommodative BI policies are also expected to support economic growth in 2021.

Ke depan diperkirakan inflasi akan berangsur naik seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan membaiknya daya beli masyarakat. Inflasi akhir tahun 2021 diperkirakan di kisaran 2,5 persen sampai 3 persen. Pemulihan daya beli ini terkait dengan peningkatan aktivitas ekonomi selama periode adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Selain itu, bantuan sosial juga berpengaruh besar, walaupun belum optimal untuk mencapai sasaran sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional

In the future, it is estimated that inflation will gradually rise in line with increasing economic activity and improving people's purchasing power. Inflation at the end of 2021 is estimated to be in the range of 2.5 percent to 3 percent. This recovery in purchasing power is related to an increase in economic activity during the period of adaptation to new habits or the new normal. In addition, social assistance also has a major impact, although it is not yet optimal in achieving the target as part of the national economic recovery

Untuk meningkatkan kinerja industri kayu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan cara kerja baru dalam mengelola hutan produksi secara lestari. Pengelolaan hutan produksi dilakukan dengan pendekatan *landscape*, kemudian analisis spasial untuk melihat area rawan karhutla, konflik tenurial, dan mengintegrasikan sektor hulu-hilir, dan pasar.

To improve the performance of the timber industry, the Ministry of Environment and Forestry has implemented a new way of managing production forests in a sustainable manner. Production forest management is carried out using a landscape approach, then spatial analysis to see areas prone to forest and land fires, tenure conflicts, and integrating upstream-downstream sectors, and markets.

Perusahaan menyadari akan tantangan yang timbul dari kejadian ini dan dampak potensial untuk sektor bisnis. Perusahaan akan meninjau situasi secara berkelanjutan, bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk mendukung upaya menahan penyebaran COVID-19, dan berusaha untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis.

The Company is aware of the challenges arising from this incident and the potential impact for the business sector. The company will review the situation on an ongoing basis, work closely with the appropriate authorities to support efforts to contain the spread of COVID-19, and strive to minimize the impact on business.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

Strategi Pemasaran Kayu

a) Kebijakan pemasaran mengacu sistem "MARKET DRIVEN" yaitu pelaksanaan penjualan berdasarkan pada permintaan pasar, kebutuhan untuk penjualan dan untuk BBI sesuai daya serap pasar.
b) Perubahan kebijakan pencairan kayu Sonokeling semula, Sonokeling dibundling dengan Jati, namun di Desember penjualan Sonokeling bisa dilakukan dengan bundling atau tanpa bundling dengan tambahan diff.
c) Kebijakan harga kayu lama untuk persediaan produksi tahun 2019 dan tahun sebelumnya tetap diberlakukan di tahun 2020.
d) Penjualan kayu premium atau kayu pesanan atau kayu kelangkaan dikenakan tambahan harga diferensiasi dengan besaran sesuai kondisi pasar dan ditetapkan oleh Direksi.
e) Melakukan perluasan pasar dengan sasaran pembeli produk sebanyak-banyaknya melalui POTP dan promosi serta menjalin hubungan baik dengan mitra pembeli.
f) Pembukaan saluran penjualan *channeling* untuk memperluas jaringan penjualan.

Beberapa strategi intensif untuk dapat meningkatkan penjualan antara lain melakukan promosi secara intensif portal penjualan online tokoperhutani.com dalam kampanye POTP (Penjualan Online Toko Perhutani) melalui media sosial toko Perhutani (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp *Message* & *E-Mail Blast*) setiap hari 1 sampai dengan 2 postingan, mengikuti kegiatan FDN (Festival Diskon Nasional) setiap tahun satu kali, dan pameran Trade Expo Indonesia setiap tahun minimal satu kali.

Logs Marketing Strategy

a) Marketing policy refers to "MARKET DRIVEN" system, including implementation of sales based on market demand, the need for sales and for BBI according to market absorption.
b) Changes to the original Sonokeling wood liquefaction policy, Sonokeling being bundled with teak, however in December Sonokeling sales can be done by bundling or without bundling with additional diff.
c) The former timber price policy for production supplies in 2018 and the previous year will remain be effective in 2019.
d) Sales of premium or ordered wood or scarce wood are subject to additional differentiation prices according to market conditions and are determined by the Board of Directors.
e) Expand the market with the target of product buyers as much as possible through POTP and promotion and establish good relationships with buyer partners.
f) Opening sales channelling channels to expand the sales network

Several intensive strategies to increase sales include intensive promotion of the online sales portal tokoperhutani.com in the POTP (Perhutani Store Online Sales) campaign through Perhutani store social media (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp Message & E-Mail Blast) every day. 1 to 2 posts, participate in FDN (National Discount Festival) activities once a year, and Trade Expo Indonesia exhibition every year minimum one event.

Realisasi beban pemasaran sepanjang tahun 2020 sebesar Rp45,40 miliar atau mencapai 121% dari RKAP tahun 2020 sebesar Rp37,5 miliar dan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp58,66 miliar, maka mengalami penurunan sebesar 23%. Penurunan terbesar terjadi pada pos biaya mengatur hasil hutan dan biaya penjualan.

Realization of marketing expenses throughout 2020 achieved Rp45.40 billion or 121% of the 2020 RKAP of Rp37.5 billion and when compared to 2019 which was Rp58.66 billion, it decreased by 23%. The biggest decrease occurred in the cost of managing forest products and selling costs.

RENCANA STRATEGIS 2021

Berkaitan dengan pengelolaan *Business Activity*, arah pengembangan bisnis perusahaan bertumpu pada bisnis perusahaan yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bisnis utama, yaitu Bisnis Organik dan Bisnis Non Organik.

a. Kelompok Bisnis Organik

Kelompok Bisnis Organik merupakan bisnis utama yang telah diusahakan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan di masa datang *(Existing Sustainable Business)*. Bisnis utama dalam kelompok ini dipisahkan ke dalam 3 (tiga) sub kelompok yaitu Bisnis Kayu, Bisnis Non Kayu, Bisnis Wisata. Jenis bisnis di luar bisnis utama di kelompokkan ke dalam Bisnis Lain-lain.

b. Kelompok Bisnis Non Organik

Kelompok Bisnis Non Organik merupakan bisnis baru yang dikembangkan dari pemanfaatan peluang yang berhubungan dengan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Perum Perhutani Holding. Bisnis ini antara lain Usaha atau Bisnis Mineral, Bisnis Energi, Bisnis Properti, dan Bisnis Lain-lain.

2021 STRATEGIC PLAN

In relation to the management of Business Activity, the direction of the company's business development rests on the company's business which is grouped into 2 (two) main businesses, namely Organic Business and Non-Organic Business.

a. Organic Business Group

The Organic Business Group is the main business that has been cultivated and is expected to be able to contribute to the progress of the company in the future (Existing Sustainable Business). The main businesses in this group are separated into 3 (three) sub-groups, such as Timber Business, Non-Timber Business, and Tourism Business. Types of business outside the main business are classified into Other Businesses.

b. Non Organic Business Group

The Non-Organic Business Group is a new business developed from the utilization of opportunities related to the potential resources owned by Perum Perhutani Holding. These businesses include Mineral Business or Business, Energy Business, Property Business, and Other Businesses.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Review

Tinjauan mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAK) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bahasan kinerja keuangan Perhutani disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

This financial performance review prepared based on the Company's Financial Statements that are presented in accordance with Indonesian PSAK for the year ended in December 31, 2020. The financial statements have been audited by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) with Unqualified Opinion (WTP).

Perhutani's financial performance is reviewed due to consideration of the Consolidated Financial Statements notes that are an integral part of this Annual Report.

Analisis Laporan Posisi Keuangan
Analysis on Financial Position Statements

Aset
Assets

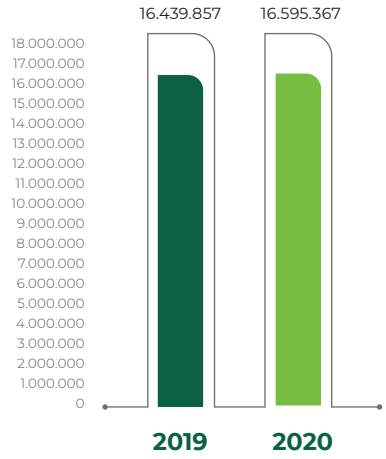

Liabilitas
Liabilities

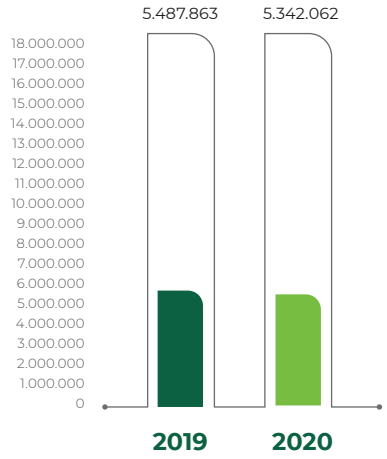

Ekuitas
Equity

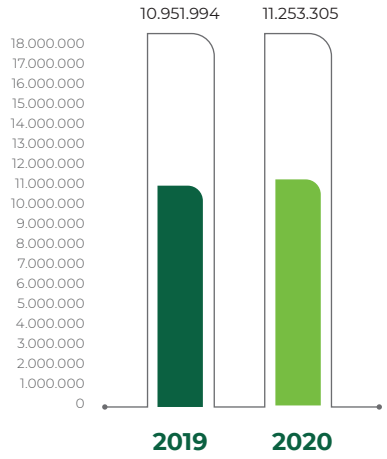

LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN 2020 DAN 2019
Consolidated Statement of Financial Position in 2020 and 2019

Keterangan Description		2020	2019	Kenaikan/(Penurunan) Increase/ Decrease	
				Selisih Difference	%
dalam jutaan rupiah / (in Million Rupiah					
Aset Lancar	Current Assets	2.515.230	2.856.797	(341.567)	(11,96%)
Aset Tidak Lancar	Non-Current Assets	14.080.137	13.583.060	497.077	3,66%
Jumlah Aset	Total Assets	16.595.367	16.439.857	155.510	0,95%
Liabilitas Jangka Pendek	Short-Term Liabilities	1.173.624	1.283.161	(109.537)	(8,54%)
Liabilitas Jangka Panjang	Long-Term Liabilities	4.168.438	4.204.702	(36.264)	(0,86%)
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	5.342.062	5.487.863	(145.801)	(2,66%)
Ekuitas	Equity	11.253.305	10.951.994	301.311	2,75%

Aset

Jumlah aset Perusahaan pada akhir 2020 tercatat Rp16,60 triliun, meningkat Rp155,51 miliar atau 0,95% dibandingkan dengan 2019 sebesar Rp16,44 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada aset tidak lancar sebesar Rp497,08 miliar atau 3,66%.

Assets

As end of 2020, the Company recorded total assets of Rp16.60 trillion, an increase of Rp155.51 billion or 0.95% compared to 2019 of Rp16.44 trillion. The increase was due to an increase in non-current assets of Rp497.08 billion or 3.66%.

Aset Perusahaan terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar sebagaimana dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

The Company's assets consist of current assets and non-current assets as presented in the description below.

TABEL ASET TAHUN 2020 DAN 2019
Table of Assets in 2020 and 2019

Keterangan Description		2020	2019	Kenaikan/(Penurunan) Increase/ Decrease	
				Selisih Difference	%
dalam jutaan rupiah / in Million Rupiah					
Aset Lancar	**Current Assets**				
Kas dan Setara Kas	Cash and Cash Equivalent	707.822	1.024.952	(317.130)	(30,94%)
Kas yang dibatasi penggunaannya	Restricted Cash	138.221	13.552	124.669	919,93%
Piutang Usaha	Trade Receivables	168.674	179.085	(10.411)	(5,81%)
Aset Keuangan Lancar Lainnya	Other Current Financial Assets	65.735	68.946	(3.211)	(4,66%)
Aset Biologis	Biological Assets	1.134.811	1.128.004	6.807	0,60%
Persediaan	Inventories	267.160	398.485	(131.325)	(32,96%)
Pajak Dibayar Dimuka	Prepaid Taxes				
Pajak Lainnya	Other Taxes	2.267	4.248	(1.981)	(46,63%)
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	Prepayments and Advances	15.667	23.432	(7.765)	(33,14%)
Aset lancar lainnya	Other Current Assets	14.873	16.093	(1.220)	(7,58%)
Jumlah Aset Lancar	Total Current Assets	2.515.230	2.856.797	(341.567)	(11,96%)
Aset Tidak Lancar	**Non Current Assets**				
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	Other Non-current Financial Assets	13.052	32.825	(19.773)	(60,24%)
Pajak dibayar di muka	Prepaid taxes	142.544	127.052	15.492	12,19%
Investasi Pada Entitas Asosiasi	Investment in Associates	72.156	82.876	(10.720)	(12,93%)
Tanaman Produktif	Bearer Plants	1.078.520	812.149	266.371	32,80%
Aset Tetap	Fixed Assets	786.707	832.028	(45.321)	(5,45%)
Aset Biologis	Biological Asset	11.861.080	11.618.528	242.552	2,09%
Aset Tak Berwujud	Intangible Asset	41.779	44.892	(3.113)	(6,93%)
Aset Pajak Tangguhan	Deferred Tax Assets	23.285	26.118	(2.833)	(10,85%)
Aset Hak Guna	Right-of-Use Assets	42.051	-	-	-
Aset Tidak Lancar Lainnya	Other Non-Current Assets	18.963	6.592	12.371	187,67%
Jumlah Aset Tidak Lancar	Total Non-Current Assets	14.080.137	13.583.060	497.077	3,66%
JUMLAH ASET	TOTAL ASSETS	16.595.367	16.439.857	155.510	0,95%

Aset Lancar

Jumlah aset lancar pada 2020 sebesar Rp2,52 triliun, menurun Rp341,57 miliar jika dibandingkan dengan periode 2019 sebesar Rp2,86 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar Rp317,13 miliar atau 30,94%.

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas, kas pada bank berupa rupiah dan dolar, dan deposito jangka pendek dengan bank pemerintah.

Kas dan setara kas Perusahaan pada 2020 sebesar Rp707,82 triliun, turun Rp317,13 miliar atau 30,94% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1,02 triliun. Penurunan terlihat pada akun deposito berjangka sebesar Rp258,64 miliar atau 67,91% dan kas pada bank sebesar Rp57,44 miliar atau 8,99%.

b. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya Perusahaan pada 2020 sebesar Rp138,22 miliar, meningkat Rp124,67 miliar atau 919,93% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp13,56 miliar.

Peningkatan signifikan terlihat pada kas di bank pemerintah seperti BNI dan BRI. Selain itu, ada penempatan kas pada bank Mandiri sebesar Rp50 miliar. Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya di BNI, BRI, Mandiri digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman bank dan jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan rehabilitasi yang masih berjalan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha Perusahaan selama 2020 tercatat Rp168,67 miliar, mengalami

Current assets

Total current assets in 2020 amounted to Rp2.52 trillion, a decrease of Rp341.57 billion compared to the 2019 period of Rp2.86 trillion. This decrease was mainly due to a decrease in cash and cash equivalents of Rp317.13 billion or 30.94%.

a. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks in the form of rupiah and dollars, and short-term deposits with state-owned banks.

The Company's cash and cash equivalents in 2020 amounted to Rp707.82 trillion, decreased by Rp317.13 billion or 30.94% compared to 2019 of Rp1.02 trillion. The decrease was seen in time deposit accounts of Rp258.64 billion or 67.91% and cash in banks of Rp57.44 billion or 8.99%.

b. Restricted Cash

The Company's restricted cash in 2020 was Rp138.22 billion, an increase of Rp124.67 billion or 919.93% compared to 2019 of Rp13.56 billion.

A significant increase was seen in cash at state banks such as BNI and BRI. In addition, there was a cash placement at Bank Mandiri amounting to Rp50 billion. The restricted cash placements in BNI, BRI, Mandiri are used as collateral for bank loans and performance guarantees for rehabilitation works that are still ongoing as of the financial reporting date.

c. Trade Receivables

The Company's trade receivables during 2020 were recorded at Rp168.67 billion, a decrease

penurunan Rp10,41 miliar atau 5,81% dibandingkan 2019 sebesar Rp179,09 miliar.

Piutang usaha tersebut terbagi atas piutang usaha dengan pihak ketiga dan pihak berelasi yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 98,62% dan 1,38% dari piutang usaha bersih.

d. Aset Keuangan Lancar Lainnya

Aset keuangan lancar lainnya pada akhir tahun 2020 sebesar Rp65,74 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp3,21 miliar atau 4,66% dari akhir tahun 2019 sebesar Rp68,95 miliar.

Penurunan ini terutama disebabkan adanya peningkatan penyisihan aset keuangan lancar lainnya sebesar Rp13,96 miliar.

e. Aset Biologis

Aset biologis pada akhir tahun 2020 sebesar Rp1,13 triliun, mengalami sedikit peningkatan sebesar Rp6,81 miliar atau 0,60% dari akhir tahun 2019 sebesar Rp1,12 triliun.

f. Persediaan

Persediaan yang dimiliki oleh Perusahaan terdiri dari kayu bulat, gondorukem, kayu olahan, terpentin, getah pinus, suku cadang dan bahan pembantu, dan produk lainnya. Persediaan pada tahun 2020 tercatat Rp267,16 miliar, menurun Rp131,33 miliar atau 32,96% dibanding dengan tahun 2019 sebesar Rp398,49 miliar. Penurunan tersebut disebabkan penurunan persediaan kayu bulat, gondorukem, terpentin, dan getah pinus.

g. Pajak Dibayar Dimuka

Pajak dibayar dimuka pada 2020 tercatat Rp2,27 miliar, menurun 1,98 miliar atau 46,63% dibandingkan dengan tahun 2019

of Rp10.41 billion or 5.81% compared to 2019 of Rp179.09 billion.

The trade receivables are divided into trade receivables from third parties and related parties which contributed 98.62% and 1.38% of the net trade receivables, respectively.

.

d. Other Current Financial Assets

Other current financial assets at the end of 2020 amounted to Rp65.74 billion, a decrease of Rp3.21 billion or 4.66% from the end of 2019 of Rp68.95 billion.

This decrease was mainly due to an increase in the provision for other current financial assets of Rp13.96 billion.

e. Biological Asset

Biological assets at the end of 2020 amounted to Rp1.13 trillion, a slight increase of Rp6.81 billion or 0.60% from the end of 2019 of Rp1.12 trillion.

f. Inventories

Inventories owned by the Company consist of logs, gondorukem, processed wood, turpentine, pine resin, spare parts and auxiliary materials, and other products. Inventories in 2020 were recorded at Rp267.16 billion, a decrease of Rp131.33 billion or 32.96% compared to 2019 of Rp398.49 billion. The decrease was due to a decrease in the supply of logs, gondorukem, turpentine, and pine resin.

g. Prepaid taxes

Prepaid taxes in 2020 were recorded at Rp2.27 billion, a decrease of 1.98 billion or 46.63% compared to 2019 of Rp4.25 billion.

sebesar Rp4,25 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan PPh Pasal 28A sebesar Rp15,49 miliar atau 12,19%.

h. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka dan uang muka pada 2020 tercatat Rp15,67 miliar, menurun Rp7,77 miliar atau 33,14% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp23,43 miliar.

i. Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya pada 2020 tercatat Rp14,87 miliar, turun Rp1,22 miliar atau 7,58% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp16,09 miliar.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perusahaan pada 2020 tercatat Rp14,08 triliun, meningkat Rp497,08 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp13,58 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan tanaman produktif sebesar Rp266,37 miliar atau 32,80%.

a. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Aset keuangan tidak lancar lainnya pada tahun 2020 tercatat Rp13,05 miliar, menurun Rp19,77 miliar atau 60,24% dibanding tahun 2019 sebesar Rp32,83 miliar.

b. Investasi Pada Entitas Asosiasi

Investasi pada entitas asosiasi pada tahun 2020 tercatat Rp72,16 miliar, menurun Rp10,72 miliar atau 12,93% dibanding tahun 2019 sebesar Rp82,88 miliar.

c. Tanaman Produktif

Aset tanaman produktif yaitu tanaman yang menghasilkan produk non kayu (Tanaman Pinus, Kayu Putih, Karet). Produk dari aset tanaman produktif adalah berupa aset biologis produktif agrikultur (PSAK 69) dan

This decrease was due to an increase in Income Tax Article 28A by Rp15.49 billion or 12.19%.

h. Prepayment and Advances

Prepayment and advances in 2020 were recorded at Rp15.67 billion, a decrease of Rp7.77 billion or 33.14% compared to 2019 of Rp23.43 billion.

i. Other Current Assets

Other current assets in 2020 were recorded at Rp14.87 billion, a decrease of Rp1.22 billion or 7.58% compared to 2019 of Rp16.09 billion.

Non-Current Assets

The Company's total non-current assets in 2020 were recorded at Rp14.08 trillion, an increase of Rp497.08 billion compared to 2019 of Rp13.58 trillion. The increase was mainly due to an increase in bearer plants of Rp266.37 billion or 32.80%.

a. Other Non-Current Financial Assets

Other non-current financial assets in 2020 were recorded at Rp13.05 billion, a decrease of Rp19.77 billion or 60.24% compared to 2019 of Rp32.83 billion.

b. Investment in Associates

Investment in associates in 2020 was recorded at Rp72.16 billion, a decrease of Rp10.72 billion or 12.93% compared to 2019 of Rp82.88 billion.

c. Bearer Plants

Bearer plant assets are plants that produce non-timber products (Pines, Eucalyptus, Rubber). Product of bearer plant assets is in the form of agricultural bearer biological assets (PSAK 69) and is categorized as current

di kategorikan sebagai aset lancar (Getah Pinus, Daun Kayu Putih, Getah Karet).

Tanaman produktif pada tahun 2020 tercatat Rp1,08 triliun, meningkat Rp266,37 miliar atau 32,80% dibanding tahun 2019 sebesar Rp812,15 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan tanaman belum menghasilkan sebesar Rp245,39 miliar atau 36,26%.

d. Aset Tetap

Aset tetap Perusahaan terdiri dari tanah, bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan instalasi, tempat penimbunan kayu, alat berat dan mesin industri, kendaraan bermotor, peralatan kantor, serta aset dalam penyelesaian. Perusahaan mencatat nilai buku aset tetap pada 2020 sebesar Rp786,71 miliar, menurun Rp45,32 miliar atau 5,45% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp832,03 miliar. Penurunan ini disebabkan meningkatnya depresiasi tanah dan bangunan tahun 2020.

e. Aset Biologis

Aset biologis tanaman yaitu kelompok tanaman yang menghasilkan produk kayu, dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu Aset Biologis Tanaman Dalam Pembangunan dan Aset Biologis Belum Siap Tebang (Aset Tetap) serta Aset Biologis Siap Tebang (Aset Lancar). Pada 2020, aset biologis tercatat Rp11,86 triliun, meningkat Rp242,55 miliar atau 2,09% dibandingkan pada 2019 sebesar Rp11,62 triliun.

f. Aset Tak Berwujud

Pada tahun 2020, aset tak berwujud tercatat Rp41,78 miliar, turun Rp3,11 miliar atau 6,93% dibandingkan pada 2019 sebesar Rp44,89 miliar.

assets (Pinus sap, Eucalyptus leaves, Rubber sap).

Bearer plants in 2020 were recorded at Rp1.08 trillion, an increase of Rp266.37 billion or 32.80% compared to 2019 of Rp812.15 billion. The increase was due to an increase in immature plantations of Rp245.39 billion or 36.26%.

d. Fixed assets

The Company's fixed assets consist of land, buildings, roads and bridges, machinery and installations, wood stockpiles, heavy equipment and industrial machinery, motor vehicles, office equipment, and assets under construction. The company recorded a book value of fixed assets in 2020 of Rp786.71 billion, a decrease of Rp45.32 billion or 5.45% compared to 2019 of Rp832.03 billion. This decrease was due to the increase in land and building depreciation in 2020.

e. Biological Asset

Plant biological assets, namely groups of plants that produce wood products, are grouped into 3 (three), namely Biological Assets of Plants Under Construction and Biological Assets Not Ready to Cut (Fixed Assets) and Biological Assets Ready to Cut (Current Assets). In 2020, biological assets were recorded at Rp11.86 trillion, an increase of Rp242.55 billion or 2.09% compared to 2019 of Rp11.62 trillion.

f. Intangible Assets

In 2020, intangible assets were recorded at Rp41.78 billion, a decrease of Rp3.11 billion or 6.93% compared to 2019 of Rp44.89 billion.

g. Aset Pajak Tangguhan

Perusahaan mencatat aset pajak tangguhan beserta penyesuaian aset pajak tangguhan dan dampak penerapan PSAK 24 (revisi 2013), pada 2020 berjumlah Rp23,29 miliar, menurun Rp2,83 miliar atau 10,85% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp26,12 miliar.

h. Aset Hak Guna

Perusahaan mencatat aset hak guna sebesar Rp42,05 miliar.

i. Aset Tidak Lancar Lainnya

Pada 2020, aset tidak lancar lainnya tercatat Rp18,96 miliar, meningkat Rp12,37 miliar atau 187,67% dibandingkan pada 2019 sebesar Rp6,59 miliar.

g. Deferred Tax Assets

The company recorded deferred tax assets along with adjustments to deferred tax assets and the impact of the implementation of PSAK 24 (revised 2013), in 2020 amounting to Rp23.29 billion, a decrease of Rp2.83 billion or 10.85% compared to 2019 of Rp26.12 billion.

h. Right-of-Use Assets

The company recorded right-of-use assets of Rp42.05 billion.

i. Other Non-Current Assets

In 2020, other non-current assets were recorded at Rp18.96 billion, an increase of Rp12.37 billion or 187.67% compared to 2019 of Rp6.59 billion.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perusahaan pada 2020 tercatat Rp5,34 triliun, menurun Rp145,80 miliar atau 2,66% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp5,49 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp109,54 miliar atau 8,54% dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp36,26 miliar atau 0,86%.

Liabilities

The Company's total liabilities in 2020 were recorded at Rp5.34 trillion, a decrease of Rp145.80 billion or 2.66% compared to 2019 of Rp5.49 trillion. This decrease was influenced by a decrease in current liabilities by Rp109.54 billion or 8.54% and a decrease in long-term liabilities by Rp36.26 billion or 0.86%.

TABEL LIABILITAS TAHUN 2020 DAN 2019
Table of Liabilities in 2019 and 2018

Keterangan Description		2020	2019	Kenaikan/(Penurunan) Increase/ Decrease	
				Selisih Difference	%
dalam jutaan rupiah / in Millions Rupiah					
Liabilitas Jangka Pendek	**Short-Term Liabilities**				
Utang Usaha	Trade Payables	63.987	219.120	(155.133)	(70,80%)
Beban Akrual	Accrued Expenses	231.217	212.330	18.887	8,90%
Utang Pajak	Tax Payables			0	
Pajak Penghasilan	Income Tax	44.745	29.302	15.443	52,70%

TABEL LIABILITAS TAHUN 2020 DAN 2019
Table of Liabilities in 2019 and 2018

Keterangan Description		2020	2019	Kenaikan/(Penurunan) Increase/ Decrease	
				Selisih Difference	%
Pajak Lainnya	Other Taxes	316.434	287.573	28.861	10,04%
Pinjaman	Borrowings				
Pinjaman bank	Bank Loans	189.530	285.233	(95.703)	(33,55%)
Pinjaman pihak ketiga	Third Party Borrowings	540	702	(162)	(23,08%)
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	Other Short-Term Financial Liabilities	14.373	7.188	(155.133)	(70,80%)
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Other Short-Term Liabilities	148.502	111.047	18.887	8,90%
Liabilitas sewa pembiayaan jangka pendek	Short-Term Finance Lease Liabilities	26.501	-	-	-
Kewajiban Imbalan Kerja Karyawan Jangka Pendek	Short Term Employee Benefits Obligations	137.795	130.666	7.129	5,46%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Total Current Liabilities	1.173.624	1.283.161	(109.537)	(8,54%)
Liabilitas Jangka Panjang	**Non-Current Liabilities**				
Pinjaman	Borrowings				
Pinjaman bank	Bank Loans	201.947	122.021	79.926	65,50%
Pinjaman pihak ketiga	Third Party Borrowings	183.947	179.951	3.996	2,22%
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	Other Short-Term Financial Liabilities	66.115	55.970	10.145	18,13%
Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang	Long-Term Finance Lease Liabilities	17.434	-	-	-
Liabilitas Pajak Tangguhan	Deferred Tax Liabilities	1.973.658	2.530.759	(557.101)	(22,01%)
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	Other Long-Term Liabilities	3.600	3.412	188	5,51%
Kewajiban Imbalan Pascakerja	Post-Employment Benefit Obligations	1.721.737	1.312.589	409.148	31,17%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	Total Non-Current Liabilities	4.168.438	4.204.702	(36.264)	(0,86%)
Jumlah Liabilitas	**Total Liabilities**	**5.342.062**	**5.487.863**	**(145.801)**	**(2,66%)**

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perusahaan pada 2020 tercatat Rp1,17 triliun, menurun Rp109,54 miliar atau 8,54% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,28 triliun. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya saldo utang usaha.

a. Utang Usaha

Utang usaha Perusahaan terdiri dari utang pihak ketiga dan utang pihak berelasi. Utang usaha pada 2020 tercatat Rp63,99 miliar, menurun Rp155,13 miliar atau 70,80% dibandingkan pada 2019 sebesar Rp219,12 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp174,10 miliar atau 387,14%.

b. Beban Akrual

Beban akrual Perusahaan terdiri atas eksploitasi, tanaman dan operasional, industri, pemeliharaan sarana dan prasarana, pemasaran, gaji dan tunjangan, PBB, serta lain-lain. Beban akrual pada tahun 2020 tercatat Rp231,22 miliar, meningkat Rp18,89 miliar atau 8,90% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp212,33 miliar. Peningkatan terbesar karena adanya biaya atas tuntutan hukum sebesar Rp35 miliar atas Sanksi Denda oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

c. Utang Pajak

Utang pajak terdiri dari pajak penghasilan dan pajak lain-lain. Perusahaan mencatat utang pajak pada 2020 sebesar Rp361,18 miliar, meningkat Rp44,30 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp316,88 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp30,19 miliar atau 12,35%.

d. Pinjaman

Pinjaman jangka pendek perusahaan yang

Short-term liabilities

The Company's short-term liabilities in 2020 were recorded at Rp1.17 trillion, a decrease of Rp109.54 billion or 8.54% compared to 2019 of Rp1.28 trillion. This decrease was largely due to a decrease in the balance of trade payables.

a. Trade Payables

The Company's trade payables consist of payables to third parties and payables to related parties. Trade payables in 2020 were recorded at Rp63.99 billion, a decrease of Rp155.13 billion or 70.80% compared to 2019 of Rp219.12 billion. This decrease was due to a decrease in third party trade payables by Rp174.10 billion or 387.14%.

b. Accrued Expenses

The Company's accrued expenses consist of exploitation, plants and operations, industry, maintenance of facilities and infrastructure, marketing, salaries and allowances, PBB, and others. Accrued expenses in 2020 were recorded at Rp231.22 billion, an increase of Rp18.89 billion or 8.90% compared to 2019 of Rp212.33 billion. The largest increase was due to the costs of lawsuits amounting to Rp35 billion for the Sanctioned Fines by the Provincial Government of North Kalimantan.

c. Tax Payables

Taxes payable consist of income tax and other taxes. The company recorded tax payables in 2020 of Rp361.18 billion, an increase of Rp44.30 billion compared to 2019 of Rp316.88 billion. This increase was due to an increase in Land and Building Tax by Rp30.19 billion or 12.35%.

d. Borrowings

The company's short-term loans consisting

terdiri dari pinjaman bank dan pinjaman pihak ketiga pada tahun 2020 tercatat Rp190,07 miliar, menurun Rp95,87 miliar dibanding tahun 2019 tercatat Rp285,94 miliar. Penurunan ini karena turunnya bagian jangka pendek dari pinjaman pihak bank.

of bank loans and third party loans in 2020 were recorded at Rp190.07 billion, a decrease of Rp95.87 billion compared to 2019 which was recorded at Rp285.94 billion. This decrease was due to a decrease in the short-term portion of bank loans.

e. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

Perusahaan mencatat liabilitas keuangan jangka pendek lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp14,37 miliar, menurun sebesar Rp155,13 miliar atau 70,80% dibanding tahun 2019 sebesar Rp7,19 miliar.

e. Other Short-Term Financial Liabilities

The Company recorded other short-term financial liabilities in 2020 of Rp14.37 billion, a decrease of Rp155.13 billion or 70.80% compared to 2019 of Rp7.19 billion.

f. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas jangka pendek lainnya terdiri dari uang muka pelanggan dan liabilitas lancar lainnya. Pada tahun 2020, liabilitas jangka pendek lainnya tercatat Rp148,50 miliar, meningkat Rp18,89 miliar atau 8,90% dibanding tahun 2019 sebesar Rp111,05 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh uang muka pelanggan yang meningkat Rp18,98 miliar atau 27,85%.

f. Other Short-Term Liabilities

Other current liabilities consist of advances from customers and other current liabilities. In 2020, other short-term liabilities were recorded at Rp148.50 billion, an increase of Rp18.89 billion or 8.90% compared to 2019 of Rp111.05 billion. The increase was due to customer advances which increased by Rp18.98 billion or 27.85%.

g. Liabilitas sewa pembiayaan jangka pendek

Perusahaan mencatatkan liabilitas sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp26,50 miliar.

g. Short-term finance lease liabilities

The Company recorded short-term finance lease liabilities of Rp26.50 billion.

h. Kewajiban Imbalan Kerja Karyawan Jangka Pendek

Perusahaan mencatat kewajiban imbalan kerja karyawan jangka pendek pada tahun 2020 sebesar Rp137,80 miliar, meningkat Rp7,13 miliar atau 5,46% dibanding tahun 2019 sebesar Rp130,67 miliar. Imbalan kerja karyawan jangka pendek merupakan provisi akrual bonus untuk pegawai.

Besarnya bonus yang akan dibagikan bergantung pada keputusan Direksi

h. Short-Term Employee Benefit Obligations

The Company recorded short-term employee benefits obligations in 2020 of Rp137.80 billion, an increase of Rp7.13 billion or 5.46% compared to 2019 of Rp130.67 billion. Short-term employee benefits are a bonus accrual provision for employees.

The amount of the bonus to be distributed depends on the decision of the Company's

Perusahaan sesuai dengan ketetapan anggaran dasar hasil Rapat Pembahasan Bersama (“RPB”) di awal tahun.

Board of Directors in accordance with the provisions of the articles of association resulting from the Joint Discussion Meeting ("RPB") at the beginning of the year.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang tercatat Rp4,17 triliun pada tahun 2020, menurun Rp36,26 miliar atau 0,86% dibanding tahun 2019 sebesar Rp4,20 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya liabilitas pajak tangguhan.

Long-Term Liabilities

Long-term liabilities were recorded at Rp4.17 trillion in 2020, a decrease of Rp36.26 billion or 0.86% compared to 2019 of Rp4.20 trillion. The decrease was influenced by the decrease in deferred tax liabilities.

a. Pinjaman

Pinjaman jangka panjang Perusahaan terdiri atas pinjaman bank dan pinjaman pihak ketiga. Pada tahun 2020, pinjaman jangka panjang tercatat Rp385,89 miliar, meningkat Rp83,92 miliar atau 27,79% dibanding tahun 2019 yang tercatat Rp301,97 miliar. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya saldo utang bank selama tahun 2020.

Pinjaman bank digunakan untuk kegiatan kredit investasi, kredit kendaraan bermotor, dana reboisasi, dan dana program kemitraan yang digunakan oleh induk perusahaan maupun anak perusahaan.

a. Borrowings

The Company's long-term loans consist of bank loans and third party loans. In 2020, long-term loans were recorded at Rp385.89 billion, an increase of Rp83.92 billion or 27.79% compared to 2019 which was recorded at Rp301.97 billion. This increase was due to an increase in bank loan balances during 2020.

Bank loans are used for investment credit, motor vehicle loans, reforestation funds, and partnership program funds used by the parent company and subsidiaries.

b. Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya

Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya pada tahun 2020 tercatat Rp66,12 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp10,15 miliar atau 18,13% dibanding tahun 2019 sebesar Rp55,97 miliar. Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya terdiri dari dana reboisasi, iuran pensiun, utang potongan karyawan lainnya, iuran asuransi kesehatan, utang dana sosial, dan liabilitas keuangan jangka panjang lainnya.

Dana reboisasi merupakan penyaluran dana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pembangunan Hutan

b. Other Long-Term Financial Liabilities

Other long-term financial liabilities in 2020 were recorded at Rp66.12 billion, an increase of Rp10.15 billion or 18.13% compared to 2019 of Rp55.97 billion. Other long-term financial liabilities consist of reforestation funds, pension contributions, other employee deductions payable, health insurance contributions, social fund payables, and other long-term financial liabilities.

The reforestation fund is a disbursement of funds from the Ministry of Environment and Forestry for the development of Industrial

Tanaman Industri (HTI) yang disalurkan melalui Bank Mandiri ke PT. Inhutani V.

c. Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang

Perusahaan mencatatkan liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang sebesar Rp17,43 miliar.

d. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan perusahaan pada tahun 2020 tercatat Rp1,97 triliun, menurun Rp557,10 miliar atau 22,01% dibanding tahun 2019 sebesar Rp2,53 triliun.

e. Liabilitas Jangka Panjang Lainnya

Liabilitas jangka panjang lainnya perusahaan pada tahun 2020 tercatat Rp3,60 miliar, meningkat Rp188 juta atau 5,51% dibanding tahun 2019 sebesar Rp3,41 miliar.

e. Kewajiban Imbalan Pascakerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja dalam bentuk pemberian program masa persiapan pensiun dan tunjangan uang duka dan penguburan. Kewajiban imbalan pascakerja perusahaan pada tahun 2020 tercatat Rp1,72 triliun, meningkat Rp409,15 miliar atau 31,17% dibanding tahun 2019 sebesar Rp1,31 triliun.

Ekuitas

Ekuitas Perusahaan terdiri dari modal negara, tambahan modal disetor, saldo laba yang belum dicadangkan dan dicadangkan, rugi komprehensif lainnya, dan kepentingan non-pengendali. Pada tahun 2020, Perusahaan mencatat jumlah ekuitas sebesar Rp11,25 triliun, meningkat sebesar Rp301,31 miliar atau 2,75% dibanding tahun 2019 sebesar Rp10,95 triliun.

Plantation Forests (HTI) which is disbursed through Bank Mandiri to PT Inhutani V.

c. Long-term finance lease liabilities

The Company recorded long-term finance lease liabilities of Rp17.43 billion.

d. Deferred Tax Liabilities

The company's deferred tax liability in 2020 was recorded at Rp1.97 trillion, a decrease of Rp557.10 billion or 22.01% compared to 2019 of Rp2.53 trillion.

e. Other Long-Term Liabilities

The company's other long-term liabilities in 2020 were recorded at Rp3.60 billion, an increase of Rp188 million or 5.51% compared to 2019 of Rp3.41 billion.

e. Obligation of Post-employment Benefits

The Company provides post-employment benefits in the form of retirement preparation programs and funeral and funeral allowances. The company's post-employment benefit obligation in 2020 was recorded at Rp1.72 trillion, an increase of Rp409.15 billion or 31.17% compared to 2019 of Rp1.31 trillion.

Equity

The Company's equity consists of state capital, additional paid-in capital, retained earnings that have not been reserved and reserved, other comprehensive losses, and non-controlling interests. In 2020, the Company recorded total equity of Rp11.25 trillion, an increase of Rp301.31 billion or 2.75% compared to 2019 of Rp10.95 trillion.

EKUITAS TAHUN 2020 DAN 2019
Equity in 2020 and 2019

Keterangan Description		2020	2019	Kenaikan/(Penurunan) Increase/ Decrease	
				Selisih Difference	%
dalam jutaan rupiah / in Million Rupiah					
Modal Negara	State Capital	2.586.303	2.586.303	0	0,00%
Tambahan Modal Disetor	Additional Paid in Capital	(1.334.148)	(1.334.148)	0	0,00%
Saldo Laba	Retained Earnings				
Belum Dicadangkan	Unappropriated	8.465.177	7.922.665	542.512	6,85%
Dicadangkan	Appropriated				
Cadangan Tujuan Khusus	Special Purpose Reserves	205.476	205.476	0	0,00%
Cadangan Umum	General Reserves	2.780.151	2.594.805	185.346	7,14%
Rugi Komprehensif Lainnya	Other Comprehensive Income	(1.440.907)	(1.014.424)	(426.483)	42,04%
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Equity Attributable to Owners of the Parent	11.262.052	10.960.677	301.375	2,75%
Kepentingan Non-Pengendali	Non-Controlling Interest	(8.747)	(8.683)	(64)	0,74%
Jumlah Ekuitas	**Total Equity**	**11.253.305**	**10.951.994**	**301.311**	**2,75%**

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Analysis of the Consolidated Statements of Income and Other Comprehensive Income

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN TAHUN 2020 DAN 2019

Table of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income in 2020 and 2019

Keterangan Description		2020	2019	Kenaikan/(Penurunan) Increase/ Decrease	
				Selisih Difference	%
dalam jutaan rupiah / in Million Rupiah					
Pendapatan	Revenue	3.927.388	4.137.919	(210.531)	(5,09%)
Kayu	Wood	1.966.455	1.824.401	142.054	7,79%
Non Kayu	Non Wood	1.521.619	1.669.732	(148.113)	(8,87%)
Lainnya	Others	439.314	643.786	(204.472)	(31,76%)
Beban Pokok Penjualan	Cost of Revenue	(3.452.685)	(3.387.596)	(65.089)	1,92%
Laba Bruto	Gross Profit	474.703	750.323	(275.620)	(36,73%)
Perubahan Nilai Wajar Aset Biologis	Change in Fair Value of Biological Assets	596.902	489.868	107.034	21,85%
Beban Usaha	Operating Expenses				
Beban Pemasaran dan Distribusi	Marketing and Distribution Expenses	(49.568)	(62.350)	(12.782)	(20,50%)
Beban Umum dan Administrasi	General and Administrative Expenses	(774.870)	(962.650)	(187.780)	(19,51%)
Laba Usaha	Operating Income	247.167	215.191	31.976	14,86%
Penghasilan Keuangan	Finance Income	23.380	35.136	(11.756)	(33,46%)
Beban Keuangan	Finance Costs	(32.209)	(9.864)	(22.345)	226,53%
Pendapatan Lainnya, Bersih	Other income, net	68.545	54.667	13.878	25,39%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Profit Before Income Tax	306.883	295.130	11.753	3,98%
Beban Pajak Penghasilan	Income Tax Expense	441.588	(90.100)	531.688	(590,11%)
Laba Tahun Berjalan	Profit for the Year	748.471	205.030	543.441	265,05%

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN TAHUN 2020 DAN 2019

Table of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income in 2020 and 2019

Keterangan Description		2020	2019	Kenaikan/(Penurunan) Increase/ Decrease	
				Selisih Difference	%
Laba (Rugi) Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income/(Loss)					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi Items that will not be reclassified to profit or loss					
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	Remeasurement of Post-employment Benefits	(446.609)	(315.236)	(131.373)	41,67%
Beban pajak terkait	Related Income Tax	20.043	78.809	(58.766)	(74,57%)
Laba/(Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan, setelah pajak	Other Comprehensive income/(loss) for The Year, Net of Tax	(426,566)	(236,427)	(190.139)	80,42%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Total Comprehensive Income for the Year	321.905	(31,397)	353.302	(1.125,27%)
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada: Profit for The Year Attributable To:					
Pemilik Entitas Induk	Owner of Parent Entity	748.452	205.940	542.512	263,43%
Kepentingan Non-Pengendali	Non-Controlling Interest	19	(910)	929	(102,09%)
Jumlah	Total	748.471	205.030	543.441	265,05%
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income Attributable To					
Pemilik Entitas Induk	Owner of Parent Entity	321.969	(30.299)	352.268	(1.162,64%)
Kepentingan Non-Pengendali	Non-controlling	(64)	(1,098)	(63)	5.728,78%
Jumlah	Total	321.905	(31,397)	321.936	(1.025.373,12%)

Pendapatan

Pendapatan Perusahaan pada tahun 2020 tercatat Rp3,93 triliun, turun sebesar Rp210,53 miliar atau 5,09% dibanding tahun 2019 sebesar Rp4,14 triliun. Pendapatan Perusahaan berasal dari penjualan kayu bulat, kayu olahan, gondorukem dan terpentin, minyak kayu putih, wisata dan agribisnis, dan lain-lain. Penurunan dipengaruhi oleh turunnya pendapatan pada segmen usaha lainnya sebesar Rp204,47 miliar atau 31,76%, segmen non kayu turun Rp148,11 miliar atau 8,87%. Meskipun demikian, pendapatan dari segmen kayu meningkat 142,05 miliar atau 7,79%.

Revenue

The Company's revenue in 2020 was recorded at Rp3.93 trillion, a decrease of Rp210.53 billion or 5.09% compared to 2019 of Rp4.14 trillion. The Company's revenue comes from the sale of logs, processed wood, gondorukem and turpentine, eucalyptus oil, tourism and agribusiness, and others. The decrease was influenced by the decrease in revenue in other business segments by Rp204.47 billion or 31.76%, while the non-timber segment decreased by Rp148.11 billion or 8.87%. Nevertheless, revenue from the timber segment increased by 142.05 billion or 7.79%.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan pada tahun 2020 tercatat Rp3,45 triliun, lebih tinggi sebesar Rp65,09 miliar atau 1,92% dibanding tahun 2019 sebesar Rp3,39 triliun.

Cost of Revenue

The cost of revenue in 2020 was recorded at Rp3.45 trillion, higher by Rp65.09 billion or 1.92% compared to 2019 which was Rp3.39 trillion.

Laba Bruto

Pada 2020, Perusahaan mencatat laba bruto sebesar Rp474,70 miliar, lebih rendah Rp275,62 miliar atau 36,73% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp750,32 miliar.

Gross Profit

In 2020, the Company recorded a gross profit of Rp474.70 billion, Rp275.62 billion or 36.73% lower compared to 2019 of Rp750.32 billion.

Beban Usaha

Beban usaha Perusahaan terdiri dari beban pemasaran dan distribusi serta beban umum dan administrasi yang secara total pada 2020 tercatat Rp824,44 miliar, lebih rendah Rp200,56 miliar atau 19,57% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1,03 triliun.

Operating Expenses

The Company's operating expenses consist of marketing and distribution expenses as well as general and administrative expenses which totaled Rp824.44 billion in 2020, Rp200.56 billion or 19.57% lower compared to 2019 of Rp1.03 trillion.

Laba Usaha

Pada 2020, Perusahaan mencatat laba usaha sebesar Rp247,17 miliar, lebih tinggi Rp31,98 miliar atau 14,86% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp215,19 miliar.

Operating Profit

In 2020, the Company recorded operating profit of Rp247.17 billion, Rp31.98 billion higher or 14.86% compared to 2019 which was Rp215.19 billion.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Perusahaan mencatat laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp306,88 miliar pada 2020. Sedangkan pada tahun 2019 Perusahaan tercatat sebesar Rp295,13 miliar. Perusahaan mengalami peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp11,75 miliar atau 3,98% dibanding tahun 2019.

Profit Before Income Tax

The company recorded profit before income tax of Rp306.88 billion in 2020. Meanwhile, in 2019 the Company was recorded at Rp295.13 billion. The company experienced an increase in profit before income tax by Rp11.75 billion or 3.98% compared to 2019.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perusahaan terdiri atas pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pada tahun 2020, beban pajak penghasilan tercatat surplus 441,59 miliar, dibanding tahun 2019 tercatat beban sebesar Rp90,10 miliar. Artinya perusahaan mendapat manfaat atas pajak penghasilan sebesar Rp534,23 miliar yang berasal dari manfaat pajak tangguhan. Hal ini dikarenakan adanya stimulus dari pemerintah untuk mendukung industri-industri dari dampak pandemi. Pajak penghasilan kini tercatat Rp92,64 miliar pada tahun 2020, mengalami peningkatan Rp76,42 miliar atau 471,37% dibanding tahun 2019 sebesar Rp16,21 miliar. Sedangkan manfaat pajak penghasilan tangguhan pada tahun 2020 sebesar Rp534,23 miliar, menurun Rp608,11 miliar atau 823,03% dibanding tahun 2019 yang mencatatkan beban sebesar Rp73,89 miliar.

Income Tax Expense

The Company's income tax expense consists of current income tax and deferred income tax. In 2020, income tax expense recorded a surplus of 441.59 billion, compared to 2019 of Rp90.10 billion. This means that the company will benefit from income tax of Rp534.23 billion which comes from deferred tax benefits. This is due to the stimulus from the government to support industries from the impact of the pandemic. Income tax is now recorded at Rp92.64 billion in 2020, an increase of Rp76.42 billion or 471.37% compared to 2019 of Rp16.21 billion. Meanwhile, the benefit of deferred income tax in 2020 was Rp534.23 billion, a decrease of Rp608.11 billion or 823.03% compared to 2019 which recorded an expense of Rp73.89 billion.

Laba Tahun Berjalan

Perusahaan mencatat laba tahun berjalan pada tahun 2020 sebesar Rp748,47 miliar, sedangkan pada tahun 2019 Perusahaan mencatat sebesar Rp205,03 miliar. Sehingga pada tahun 2020 laba tahun berjalan mengalami peningkatan Rp543,44 miliar atau 265,05% dibanding tahun 2019.

Profit For The Year

The Company recorded profit for the year in 2020 of Rp748.47 billion, while in 2019 the Company recorded Rp205.03 billion. So that in 2020 profit for the year has increased by Rp543.44 billion or 265.05% compared to 2019.

Terdapat penambahan sumbangan laba tahun 2020 dari manfaat pajak tangguhan sebesar Rp534,23 miliar, bersumber dari diterbitkannya

There was an additional profit contribution in 2020 from deferred tax benefits of Rp534.23 billion, sourced from the issuance of the

ketetapan/stimulus Pemerintah mengurangi tarif Pajak Penghasilan Badan yang semula sebesar 25%; menjadi 22% untuk tahun 2020-2021 dan 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya, sesuai dengan Pasal 5 bagian 1 dari Perppu No. 1 tahun 2020, Perppu tersebut telah diundangkan dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2020 yang berlaku efektif 18 Mei 2020.

Government's decision/stimulus to reduce the Corporate Income Tax rate which was originally 25%; to 22% for 2020-2021 and 20% for 2022 and beyond, in accordance with Article 5 part 1 of Perppu No. 1 of 2020, the Perppu has been promulgated in Law no. 2 of 2020 which is effective May 18, 2020.

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pada 2020, Perusahaan mencatat jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp321,91 miliar, turun Rp353,30 miliar atau 1.125,27% dibandingkan tahun 2019 yang mencatatkan rugi komprehensif sebesar Rp31,40 miliar.

Total Comprehensive Income for the Year

In 2020, the Company recorded total comprehensive income for the year of Rp321.91 billion, decreased by Rp353.30 billion or 1,125.27% compared to 2019 which recorded a comprehensive loss of Rp31.40 billion.

Analisis Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Cash Flows Analysis

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN TAHUN 2020 DAN 2019
Table of Consolidated Statement of Cash Flows in 2020 and 2019

Keterangan Description		2020	2019	Kenaikan/(Penurunan) Increase/ Decrease	
				Selisih Difference	%
dalam jutaan rupiah / in million Rupiah					
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities					
Penerimaan dari pelanggan	Receipts from customers	3.938.597	4.177.839	(239.242)	(5,73%)
Pembayaran kepada pemasok	Payment to suppliers	(1.774.869)	(1.926.524)	339.371	(16,05%)
Pembayaran kepada karyawan	Payment to employees	(1.644.466)	(1.955.261)	113.215	(6,44%)
Pembayaran beban keuangan	Payment of financial expenses	(32.209)	(9.864)	(22.345)	226,53%
Penerimaan bunga	Interest receipt	23.380	35.136	(11.756)	(33,46%)
Penerimaan Pencairan Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Restricted Cash Disbursement Receipts	2.090	73	2.017	2763,01%
Penerimaan lainnya	Other admissions	151.971	44.410	107.561	242,20%
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	Restricted cash placement	(27.621)	0	-	0
Pembayaran pajak penghasilan badan	Payment of corporate income tax	(92,123)	(273,501)	181.378	(66,32%)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	Net Cash Flows From Operating Activities	544.750	102.172	442.578	433,17%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Operating Activities					
Perolehan Tanaman Produktif	Acquisition Productive Crops	(294.949)	(197.547)	(97.402)	49,31%
Perolehan Aset Biologis	Acquisition Biological Assets	(218.869)	(190.347)	(28.522)	14,98%
Perolehan Aset Tetap	Acquisition of Fixed Assets	(198.302)	(137.458)	(60.844)	44,26%

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN TAHUN 2020 DAN 2019

Table of Consolidated Statement of Cash Flows in 2020 and 2019

Keterangan Description		2020	2019	Kenaikan/(Penurunan) Increase/ Decrease	
				Selisih Difference	%
Hasil penjualan aset tetap	Proceeds from the sale of fixed assets	1.114	2.213	(1.099)	(49,66%)
Penerimaan dividen dari investasi Saham	Receipt of dividends from stock investments	2.917	15.483	(12.566)	(81,16%)
Penerimaan Divestasi Saham	Share Divestment Acceptance	-	17.973	-	-
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	Net Cash Flow Used for Investing Activities	(708,089)	(489,683)	(218.406)	(44,60%)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash flows from Financing Activities					
Penerimaan pinjaman bank	Receipts from bank loans	2.180.626	3.763.331	(1.582.705)	(42,06%)
Pembayaran pinjaman bank	Bank Loan Payment	(2.196.403)	(3.688.955)	1.492.552	(40,46%)
Penerimaan pinjaman pihak ketiga	Acceptance of Third Party Loans	4.566	561	4.005	713,90%
Pembayaran pinjaman pihak ketiga	Third Party Loan Payment	(732)	(872)	140	(16,06%)
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	Restricted cash placement	(110.600)	(3.462)	(107.138)	3.094,69%
Penarikan kas yang yang dibatasi penggunaannya	Restricted cash withdrawals	11.462	52.650	(41.188)	(78,23%)
Pembayaran sewa	Funding from non-controlling interests	(22.116)	0	-	-
Pembayaran dividen kepada pemilik modal	Payment of dividends to owners of capital	(20,594)	(7.7419)	56.825	(73,40%)
Arus Kas Bersih (Digunakan Untuk)/ Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	Net Cash Flow (Used for)/ Gained from Financing Activities	(153,791)	45.834	(199.625)	(435,54%)
Penurunan Bersih - Kas dan Setara Kas	Net increase Cash and cash equivalents	(317,130)	(341,677)	24.547	(7,18%)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	1.024.952	1.366.629	(341.677)	(25,00%)
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	707.822	1.024.952	(317.130)	(30,94%)

Kas dan setara kas pada 2020 tercatat Rp707,82 miliar, mengalami penurunan Rp317,13 miliar atau 30,94% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,02 triliun. Penurunan tersebut didominasi oleh deposito berjangka sebesar Rp258,64 miliar atau 67,91% dan kas pada bank sebesar Rp57,44 miliar atau 8,99%. Kas dan setara kas Perusahaan terdiri atas kas, kas pada bank berupa rupiah dan dollar Amerika Serikat, dan deposito jangka pendek dengan bank pemerintah.

Cash and cash equivalents in 2020 were recorded at Rp707.82 billion, a decrease of Rp317.13 billion or 30.94% compared to 2019 of Rp1.02 trillion. The decline was dominated by time deposits of Rp258.64 billion or 67.91% and cash in banks of Rp57.44 billion or 8.99%. The Company's cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks in the form of rupiah and US dollars, and short-term deposits with state banks.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi Perusahaan terdiri atas penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, penerimaan bunga, penerimaan pencairan kas yang dibatasi penggunaannya, dan pembayaran pajak penghasilan.

Cash Flow from Operating Activities

The Company's operating activities consist of receipts from customers, payments to suppliers, payments to employees, interest receipts, receipts of restricted cash disbursements, and payment of income tax.

Pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp544,75 miliar, meningkat Rp442,58 miliar atau 433,17% dibanding tahun 2019 sebesar Rp102,17 miliar. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp339,37 miliar atau 16,05%.

In 2020, cash flow from operating activities was Rp544.75 billion, an increase of Rp442.58 billion or 433.17% compared to 2019 of Rp102.17 billion. This increase was mainly influenced by a decrease in payments to suppliers by Rp339.37 billion or 16.05%.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi Perusahaan terdiri atas perolehan tanaman produktif, perolehan aset biologis, perolehan aset tetap, hasil penjualan aset tetap, penerimaan dividen dari investasi saham, dan penerimaan divestasi saham. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2020 sebesar Rp708,09 miliar, meningkat Rp218,41 miliar atau 44,60% dibanding tahun 2019 sebesar Rp489,68 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penambahan perolehan tanaman produktif sebesar Rp97,40 miliar atau 49,31%.

Cash Flow from Investing Activities

The Company's investment activities consist of acquisition of plants, acquisition of biological assets, acquisition of property, plant and equipment, proceeds from sale of property and equipment, receipt of dividends from share investment, and receipt of share divestment. Cash flows used for investing activities in 2020 amounted to Rp708.09 billion, an increase of Rp218.41 billion or 44.60% compared to 2019 of Rp489.68 billion. This increase was influenced by the addition of productive plants of Rp97.40 billion or 49.31%.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan Perusahaan terdiri dari penerimaan dan pembayaran pinjaman bank, penerimaan dan pembayaran pinjaman pihak ketiga, penempatan dan penarikan kas yang dibatasi penggunaannya, pendanaan dari kepentingan non-pengendali, dan pembayaran dividen kepada pemilik modal. Pada tahun 2020, arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat Rp153,79 miliar, meningkat Rp199,63 miliar atau 435,54% dibanding tahun 2019 yang mencatatkan perolehan arus kas sebesar Rp45,83 miliar. Perubahan ini disebabkan karena adanya peningkatan penempatan kas yang dibatasi penggunaannya untuk jaminan pinjaman sebesar Rp107,14 miliar. penerimaan pinjaman bank sebesar Rp77,24 miliar atau 59,95%.

Cash Flows from Financing Activities

The Company's financing activities consist of receipts and payments of bank loans, receipts and payments of third party loans, placements and withdrawals of restricted cash, funding from non-controlling interests, and dividend payments to shareholders. In 2020, cash flow used for financing activities was recorded at Rp153.79 billion, an increase of Rp199.63 billion or 435.54% compared to 2019 which recorded cash flow gains of Rp45.83 billion. This change was due to an increase in restricted cash placements for loan guarantees amounting to Rp107.14 billion. receipt of bank loans amounting to Rp77.24 billion or 59.95%.

Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas

Akibat dari aktivitas Perusahaan di atas, tercatat penurunan bersih kas dan setara kas sebesar Rp341,68 miliar pada tahun 2020, terdapat perubahan sebesar Rp236,29 miliar dibanding tahun 2019 yang mencatatkan kenaikan sebesar Rp235,95 miliar. Sehingga setelah ditambahkan dengan saldo awal kas dan setara kas, saldo akhir pada tahun 2020 menjadi Rp1,02 triliun, turun Rp341,68 miliar atau 25,00% dibanding tahun 2019 sebesar Rp1,37 triliun.

Net Increase in Cash and Cash Equivalents

As a result of the Company's activities above, there was a net decrease in cash and cash equivalents of Rp341.68 billion in 2020, there was a change of Rp236.29 billion compared to 2019 which recorded an increase of Rp235.95 billion. So after adding the initial balance of cash and cash equivalents, the final balance in 2020 was Rp1.02 trillion, a decrease of Rp341.68 billion or 25.00% compared to 2019 which was Rp1.37 trillion.

Analisis Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Consolidated Statement of Changes in Equity Analysis

Laporan perubahan ekuitas pada akhir 2020 memperlihatkan jumlah modal sebesar Rp2,59 triliun dan tambahan modal disetor Rp1,33 triliun yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2019. Selain itu, terdapat saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp8,47 triliun, cadangan tujuan khusus Rp205,48 miliar, cadangan umum Rp2,78 triliun, rugi komprehensif lainnya Rp1,44 triliun dan kepentingan non-pengendali Rp8,75 miliar.

The report on changes in equity at the end of 2020 shows total capital of Rp2.59 trillion and additional paid-in capital of Rp1.33 trillion which did not change from 2019. In addition, there was an unreserved retained earnings of Rp8.47 trillion, special purpose reserves of Rp205.48. billion, general reserves of Rp2.78 trillion, other comprehensive losses of Rp1.44 trillion and non-controlling interests of Rp8.75 billion.

Analisis Rasio Keuangan Konsolidasian
Analysis on Consolidated Financial Ratio

RASIO KINERJA KEUANGAN (%)
Financial Ratio

Keterangan Description		2020	2019	2018	2017	2016
Rasio Kas	Cash Ratio	60,31	79,88	138,45	158,75	214,70
Rasio Lancar	Current Ration	214,31	222,64	335,77	468,14	345,95
Rasio Utang terhadap Aktiva	Debt to Asset Ratio	32,19	33,38	31,09	33,52	60,82
Rasio Utang terhadap Ekuitas	Debt to Equity Ratio	47,47	50,11	45,12	47,34	155,20
Rasio Pendapatan Operasional	Operating Income Ratio	6,29	5,20	13,65	7,17	(13,42)
Rasio Laba Bersih terhadap Aset	Return On Asset (ROA)	4,51	1,25	4,07	2,80	(9,88)
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas	Return On Equity (ROE)	6,65	1,87	5,91	3,96	(33,24)
Rasio Laba Bersih terhadap Investasi	Return On Investment (ROI)	5,42	2,41	13,50	15,98	(13,40)
Marjin Laba Bersih	Net Profit Margin	19,06	4,95	14,92	12,09	(9,69)

Berikut adalah analisis mengenai rasio keuangan konsolidasian penting yang menggambarkan pencapaian kinerja keuangan dan operasional Perusahaan pada 2020 dan 2019.

The following is an analysis of the important consolidated financial ratios that describe the achievement of the Company's financial and operational performance in 2020 and 2019.

Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang tercermin pada rasio kas dan rasio lancar.

Liquidity Ratio

Liquidity Ratio is a measure used to calculate the level of the Company's ability to meet its short-term liabilities, which is reflected in the cash ratio and current ratio.

Rasio kas *(cash ratio)* Perusahaan pada 2020 sebesar 60,31%, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 79,88%. Hal ini berarti bahwa kas dan setara kas Perusahaan masih mampu memenuhi liabilitas jangka pendeknya sebanyak 0,6 kali atau 1 rupiah liabilitas jangka pendek Perusahaan dapat dijamin pembayarannya dengan 0,6 rupiah kas dan setara kas Perusahaan.

The Company's cash ratio in 2020 was 60.31%, a decrease compared to 2019 of 79.88%. This means that the Company's cash and cash equivalents are still able to meet its short-term liabilities as much as 0.6 times or 1 rupiah. The Company can be guaranteed payment with 0.6 rupiah of cash and cash equivalents of the Company.

Rasio lancar (current ratio) Perusahaan pada 2020 tercatat 214,31%, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 222,64%. Hal ini berarti bahwa aset lancar Perusahaan mampu memenuhi liabilitas jangka pendek Perusahaan sebanyak 2,1 kali atau 1 rupiah liabilitas jangka pendek Perusahaan dapat dijamin pembayarannya dengan 2,1 rupiah aset lancar.

The Company's current ratio in 2020 was recorded at 214.31%, a decrease compared to 2019 of 222.64%. This means that the Company's current assets are able to meet the Company's short-term liabilities as much as 2.1 times or 1 rupiah of the Company's short-term liabilities can be guaranteed payment with 2.1 rupiah of current assets.

Nilai ideal kedua rasio likuiditas ini adalah minimum sebesar 150%. Semakin besar nilai rasio akan semakin baik dan Perusahaan dalam kondisi sehat.

The ideal value of these two liquidity ratios is a minimum of 150%. The higher the ratio value, the better and the Company is in a healthy condition.

Rasio Leverage atau Solvabilitas

Rasio Leverage atau Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan ini antara lain dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap aset (debt to total asset), merupakan rasio yang digunakan untuk

Leverage Ratio or Solvency

The Leverage or Solvency Ratio shows the Company's ability to pay all of its obligations, both short-term and long-term. This capability can be measured, among others, through the ratio of liabilities to assets (debt to total assets), is a ratio used to measure the extent to which the Company's

mengukur sejauh mana aset Perusahaan dibiayai dengan liabilitas Perusahaan, dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset, semakin besar rasio ini maka semakin besar kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi.

assets are financed with the Company's liabilities, calculated by comparing total liabilities with total assets, the greater this ratio, the greater company obligations that must be met.

Selain itu, kemampuan Perusahaan juga dapat diukur dari rasio liabilitas terhadap ekuitas *(debt to total equity)*, yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan liabilitasnya, dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas, semakin kecil rasio ini, maka semakin baik.

In addition, the Company's ability can also be measured from the ratio of liabilities to equity (debt to total equity), which is used to measure how much of each rupiah of own capital is pledged as collateral for its overall liabilities, calculated by comparing the total liabilities to the total equity, the smaller this ratio, the better.

Rasio liabilitas terhadap aset Perusahaan pada 2020 tercatat 32,19% atau sedikit menurun dari tahun 2019 sebesar 33,38%. Hal ini berarti bahwa perusahaan didanai oleh liabilitasnya hanya sekitar 30% dan menunjukkan bahwa pendanaan perusahaan masih dapat dibiayai oleh aset yang dimiliki.

The Company's liability to assets ratio in 2020 was recorded at 32.19% or slightly decreased from 2019 of 33.38%. This means that the company is funded by only about 30% of its liabilities and shows that the company's funding can still be financed by its assets.

Rasio liabilitas terhadap ekuitas *(debt to equity ratio)* Perusahaan pada 2020 tercatat 47,47% atau menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 50,11%. Hal ini menunjukkan besarnya pendanaan Perusahaan yang dibiayai oleh total liabilitas lebih kecil dengan pendanaan yang dibiayai ekuitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan Perusahaan yang dibiayai oleh kreditor lebih kecil dari pendanaan yang dibiayai oleh pemilik modal.

The Company's debt to equity ratio in 2020 was recorded at 47.47% or decreased compared to 2019 of 50.11%. This shows that the amount of the Company's funding that is financed by total liabilities is smaller than that of its equity-financed funding. This shows that the Company's funding financed by creditors is smaller than the funding financed by the owners of capital.

Semakin besar nilai kedua rasio diatas, maka semakin besar liabilitas yang dimiliki Perusahaan, artinya semakin besar kewajiban Perusahaan yang harus dipenuhi.

The greater the value of the two ratios above, the greater the liability of the Company, meaning the greater the Company's obligations that must be met.

Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah ukuran yang dipergunakan Perusahaan untuk menghitung hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan

Profitability Ratio

The profitability ratio is key metric the Company uses to calculate the net results of various policies and decisions taken by the management that

keputusan yang diambil manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen dalam mengelola Perusahaan.

Rasio ini merupakan rasio utama dalam seluruh laporan keuangan, karena tujuan utama Perusahaan adalah hasil operasi/keuntungan. Adapun tingkat profitabilitas perusahaan pada 2020 ditunjukkan dengan rasio Net Profit Margin, Return on Investment dan Return on Equity.

Rasio Marjin Laba Bersih

Pada 2020, Perusahaan mencatat rasio profit margin sebesar 19,06%, berarti bahwa besarnya presentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari setiap penjualannya sebesar 19,06% atau meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,95%.

Rasio Laba Bersih terhadap Investasi

Pada 2020, Perusahaan mencatat rasio return on investment sebesar 5,42% atau meningkat bila dibandingkan dengan 2019 sebesar 2,41%. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan laba sebelum bunga, pajak dan penyusutan yang dihasilkan oleh Perusahaan dan peningkatan aset Perusahaan yang dipergunakan.

Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas

Pada 2020, Perusahaan mencatat rasio *return on equity* sebesar 6,65% atau meningkat bila dibandingkan dengan 2019 sebesar 1,87%. Peningkatan ini disebabkan karena naiknya perolehan laba bersih.

will give the final answer to the question of how effectively the management has managed the Company.

This ratio is the key ratio in all financial statements, since the Company's primary objective is operational results/profits. The Company's profitability level in 2020 was measured by looking at its Net Profit Margin, Return on Investment and Return on Equity.

Net Profit Margin Ratio

In 2020, the Company recorded a profit margin ratio of 19.06%, meaning that the percentage of net profit obtained by the company from each sale was 19.06% or an increase compared to 2019 of 4.95%.

Net Profit to Investment Ratio

In 2020, the Company recorded a return on investment ratio of 5.42%, an increase compared to 2019 of 2.41%. This increase was due to an increase in earnings before interest, taxes and depreciation generated by the Company and an increase in the Company's assets used.

Ratio of Net Profit to Equity

In 2020, the Company recorded a return on equity ratio of 6.65% or an increase compared to 2019 of 1.87%. This increase was due to the increase in net profit.

Tinjauan Keuangan Lainnya
Other Financial Reviews

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang dapat dilihat melalui rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek antara lain dapat diukur melalui rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki Perusahaan dengan jumlah liabilitas jangka pendeknya, sedangkan rasio lancar dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendeknya.

Ability To Pay Debt

The ability to pay debt can be measured through liquidity and solvency ratios. Liquidity ratio shows the Company's ability to meet its short-term liabilities, can be measured by looking at its cash ratio and current ratio. Cash ratio is calculated by comparing the Company's cash and cash equivalents to its short-term liabilities, while current ratio is calculated by comparing total current assets with total short-term liabilities.

RASIO LIKUIDITAS (%)
Liquidity Ratio

Keterangan Description		2020	2019	%
Rasio Kas	Cash Ratio	60,31	79,88	(19,57)
Rasio Lancar	Current Ratio	214,31	222,64	(8,33)

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya antara lain dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap aset *(debt to total asset ratio)* dengan cara membandingkan total liabilitas terhadap total asetnya dan rasio liabilitas terhadap ekuitas *(debt to equity ratio)* dengan cara membandingkan jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitasnya.

Solvency ratio shows the Company's ability to pay its obligations, which can be measured through debt to total asset ratio, which is calculated by comparing total liabilities to total assets; and debt to equity ratio, which is calculated by comparing total liabilities to total equity.

RASIO SOLVABILITAS (%)
Solvency Ratio

Keterangan Description		2020	2019	%
Rasio Utang terhadap Aktiva	Debt to Asset Ratio	32,19	33,38	(1,19)
Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Aktiva	Long-term Debt Ratio to Assets	25,12	25,58	(0,46)
Rasio Utang terhadap Ekuitas	Debt to Equity Ratio	47,47	50,11	(2,64)
Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas	Long-term Debt Ratio to Equity	37,04	38,39	(1,35)
Rasio Lancar	Current Ratio	214,31	222,64	(8,33)

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan non usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tak tertagih, dihapuskan secara langsung untuk mengurangi nilai tercatatnya. Kolektibilitas piutang Perusahaan berdasarkan collection period ratio pada 2020 sebesar 16 hari, sama dengan tahun 2019 sebesar 16 hari. Hal ini disebabkan piutang usaha relatif stabil. Piutang usaha Perusahaan merupakan piutang jangka

Receivable Collectability Rate

Accounts receivable is the amount a customer owes the Company for the sales of merchandise or services in a normal business activity. If a receivable are estimated to be billed within one year or less (or in the normal operating cycle if longer), then the receivable shall be classified as current asset. Otherwise, the receivable may be presented as non-current assets.

Trade receivables from operating and non-operating activities are initially recognized at fair values and subsequently measured at amortized cost using effective interest method, and if the discounting impact is significant, net of the impairment provision.

The collectibility of trade and non-trade receivables is reviewed periodically. Receivables that are known to be uncollectible are written off directly to reduce their carrying amount. The collectibility of the Company's receivables is based on the collection period ratio in 2020 of 16 days, the same as in 2019 of 16 days. This is due to the relatively stable trade receivables. The Company's trade receivables are short-term

pendek karena kolektibilitasnya di bawah satu tahun. Perusahaan tidak memiliki piutang jangka Panjang.

receivables because the collectibility is less than one year. The company has no long-term receivables.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Accounts Receivable

Keterangan Description		2020	2019
Lancar	Curent	85.355	100.519
Jatuh tempo:	Due date:		
1-30 hari	1-30 days	47.591	74.842
30-90 hari	30-90 days	26.438	3.523
Lebih dari 90 hari	More than 90 days	120.646	107.938
Penyisihan penurunan nilai pihak ketiga	Allowance for impairment of third parties	(111.298)	(107.737)
Penyisihan penurunan nilai pihak berelasi	Allowance for impairment of related parties	(58)	-
Piutang usaha, bersih	Accounts receivable, net	168.674	179.085

Struktur Modal
Capital Structure

Tujuan utama pengelolaan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa rasio modal tetap terjaga untuk mendukung bisnis Perusahaan. Pemilihan ini didasarkan pada penyesuaian yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap kondisi perekonomian Indonesia dan lebih mempertimbangkan risiko bisnis yang ada.

Main purpose of the Company's management is to ensure that capital ratio is maintained to support the Company's business. This selection is based on adjustment done by the Company on Indonesian economic condition and more considering current business risk.

STRUKTUR MODAL
Capital Structure

Keterangan Description		2020	%	2019	%	Δ	Δ%
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	5.342.062	32,19	5.487.863	33,38	(145.801)	(1,19)
Liabilitas berbasis bunga	Interest Based Liabilities	435.412	2,62	407.254	2,48	28.158	0,14
Jumlah Ekuitas	Total Equity	11.253.305	67,81	10.951.994	66,62	301.311	1,19
Jumlah modal	Total Capital	16.595.367	100,00	16.439.857	100,00	155.510	0,00

Komposisi struktur modal Perusahaan pada 2020 lebih didominasi oleh ekuitas dibanding liabilitas. Pada 2020, aset yang dibiayai ekuitas adalah sebesar 67,81%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 66,62%, sedangkan aset yang dibiayai liabilitas adalah sebesar 32,19% lebih tinggi dibandingkan pada 2019 sebesar 33,38%.

The composition of the Company's capital structure in 2020 is dominated by equity rather than liabilities. In 2020, assets financed by equity were 67.81%, higher than 2019 at 66.62%, while assets financed by liabilities were 32.19% higher than in 2019 at 33.38%.

Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Perusahaan mengelola struktur modal dan hasil pengembalian kepada Pemilik Modal yang optimal dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan profitabilitas baik masa sekarang maupun yang akan datang, perkiraan arus kas operasi, estimasi belanja modal, dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Management Policy on Capital Structure

The Company manages capital structure and optimum returns to shareholders by always considering needs of capital in the future and good profitability both today and in the future, operational cash flows projection, capital expenditure estimation and strategic investment opportunity projection.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Capital Expenditure

Perusahaan memiliki ikatan yang material dengan mitra untuk investasi belanja modal pada tahun 2020 untuk beberapa tujuan sebagai berikut:

The Company has material commitment with the partners for capital expenditure investment in 2018 for the following purposes:

INVESTASI
Investment

Keterangan Description	**Tujuan** Purposes	**Pihak Kedua** Second Parties	**Jangka Waktu** Period of time
Pengembangan Wisata Tourism Development	Pengembangan Wana Wisata Penggaron di Jawa Tengah Penggaron Tourism Area Development in Central Java	PT Penggaron Sarana Semesta	35 tahun/ years
Optimalisasi Aset Tanaman Optimization of Plant Assets	Pemanfaatan Persemaian Proyek Penanaman Tanaman Biomassa. Utilization of Biomass Planting Project Nurseries	PT KOFPI	2 tahun/ years

Sumber dana yang digunakan selain dari Perusahaan dan mitra, juga berasal dari perbankan dan investor lainnya. Seluruh mata uang yang menjadi digunakan dalam transaksi atau perikatan adalah dalam rupiah sehingga tidak ada risiko nilai tukar mata asing.

The source of funds used apart from the Company and partners, also comes from banks and other investors. All currencies used in transactions or engagements are in rupiah so there is no foreign exchange rate risk.

Investasi Barang Modal

Capital Goods Investment

Realisasi investasi tahun 2020 tercapai sebesar Rp506,81 miliar, atau 80% dari RKAP tahun 2020 yang ditargetkan sebesar Rp636,84 miliar.

Realization of investment in 2020 reached Rp506.81 billion, or 80% of the 2020 RKAP which was targeted at Rp636.84 billion.

INVESTASI
Investment

Keterangan Description		Nilai Investasi (Rp juta) Value (Rp million)
INVESTASI SARPRA	**SARPRA INVESTMENT**	42.178
Bangunan dan tanah	Building and land	24.539
Jalan dan jembatan	Roads and bridges	2.592
Bengkel dan Instalasi	Workshop and Installation	387
Tempat Penimbunan (Kayu dan Getah)	Stockpile (Wood and Sap)	439
Mesin/alat industry	Industrial machines/tools	10.658
Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	Motor Vehicles and Heavy Equipment	2.208
Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Tak Bermotor	Office Supplies and Non-Motorized Vehicles	1.354
ASET TANAMAN	**PLANT ASSETS**	464.300
Tanaman Kehutanan Rutin	Routine Forestry Plants	259.016
Tanaman Kehutanan Pembangunan	Development Forestry Plants	205.284
PENYERTAAN	**PARTICIPATION**	336
Buy Back Inhutani I-V	Buy Back Inhutani I-V	336

Perbandingan Antara Target Pada Awal Tahun Buku Dengan Hasil yang Dicapai (Realisasi), dan Target atau Proyeksi yang Ingin Dicapai Untuk 1 Tahun Mendatang

Comparison Between Target at Beginning of Fiscal Year with Results (Realization) and Target or Projection for Next Year

PERBANDINGAN ANTARA TARGET PADA AWAL TAHUN BUKU DENGAN HASIL YANG DICAPAI (REALISASI), DAN TARGET ATAU PROYEKSI YANG INGIN DICAPAI UNTUK SATU TAHUN MENDATANG

Comparison Between Target at Beginning of Fiscal Year with Results (Realization) and Target or Projection for Next Year

Keterangan Description		**Realisasi 2020** Realizataion 2020	**Target 2020** Target 2020	**Pencapaian** Achievements (%)	**Proyeksi 2021** Projections 2021
Aset Lancar	Current Asset	2.515.230	2.659.051	94,59%	2.602.247
Aset Tidak Lancar	Non-Current Asset	14.080.137	13.818.048	101,90%	14.141.106
Jumlah Aset	Total Assets	16.595.367	16.477.099	100,72%	16.743.353
Liabilitas Jangka Pendek	Current Liabilities	1.173.624	1.093.903	107,29%	931.942
Liabilitas Jangka Panjang	Non-Current Liabilities	4.168.438	4.392.893	94,89%	4.365.059
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	5.342.062	5.486.796	97,36%	5.297.002
Ekuitas	Equity	11.253.305	10.990.303	102,39%	11.446.351

Realisasi aset lancar tahun 2020 sebesar Rp2,52 triliun mencapai 95% dari target RKAP 2020. Bila dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp2,86 triliun, maka mengalami penurunan 12% atau sebesar Rp341,57 miliar. Penurunan ini disebabkan karena penyelesaian kewajiban-kewajiban jangka pendek perusahaan dan serapan pasar yang cukup baik yang

Realization of current assets in 2020 amounted to Rp2.52 trillion, reaching 95% of the 2020 RKAP target. When compared to 2019 which amounted to Rp2.86 trillion, it experienced a decrease of 12% or Rp341.57 billion. This decrease was due to the settlement of the company's short-term obligations and a fairly good market absorption which caused a decrease in the value of cash

menyebabkan turunnya nilai kas dan setara kas, persediaan dan aset keuangan lancar.

Realisasi aset tidak lancar tahun 2020 sebesar Rp14,08 triliun tercapai 102% dari target RKAP 2020. Bila dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp13,58 triliun, maka mengalami peningkatan 4% atau sebesar Rp497,08 miliar. Peningkatan ini disebabkan karena pertambahan nilai aset biologis dan aset produktif.

Perusahaan memproyeksikan aset lancar pada RKAP 2021 akan mencapai Rp2,60 triliun dan aset tidak lancar pada RKAP 2021 akan mencapai Rp14,14 triliun.

Realisasi liabilitas jangka pendek tahun 2020 sebesar Rp1,17 triliun mencapai 107% dari target RKAP tahun 2020. Bila dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp1,28 triliun, maka turun sebesar 9%. Penurunan tersebut seiring dengan percepatan pembayaran utang usaha dan utang bank bagian lancar.

Realisasi liabilitas jangka panjang tahun 2020 sebesar Rp4,17 triliun mencapai 95% dari RKAP tahun 2020. Bila dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp4,2 triliun maka turun sebesar 1%. Penurunan terbesar terjadi pada liabilitas pajak tangguhan dikarenakan adanya penurunan tarif pajak.

Perusahaan memproyeksikan liabilitas jangka pendek pada RKAP 2021 akan mencapai Rp931,94 miliar dan liabilitas jangka panjang akan mencapai Rp4,37 triliun.

and cash equivalents, inventories and current financial assets.

Realization of non-current assets in 2020 amounted to Rp14.08 trillion, achieving 102% of the 2020 RKAP target. When compared to 2019 which amounted to Rp13.58 trillion, there was an increase of 4% or Rp497.08 billion. This increase was due to the increase in the value of biological assets and productive assets.

The company projects that current assets in the 2021 RKAP will reach Rp2.60 trillion and non-current assets in the 2021 RKAP will reach Rp14.14 trillion.

Realization of short-term liabilities in 2020 amounted to Rp1.17 trillion, reaching 107% of the 2020 RKAP target. When compared to 2019 which was Rp1.28 trillion, it decreased by 9%. The decline was in line with the acceleration of payment of trade payables and the current portion of bank loans.

Realization of long-term liabilities in 2020 amounted to Rp4.17 trillion, reaching 95% of the 2020 RKAP. When compared to 2019 which amounted to Rp4.2 trillion, it decreased by 1%. The largest decrease occurred in deferred tax liabilities due to a decrease in tax rates.

The company projects that its short-term liabilities in its 2021 RKAP will reach Rp931,94 billion and long-term liabilities will reach Rp4.37 trillion.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN

Consolidated Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Keterangan Description		Realisasi 2020 Realization	Target 2020 Target	Pencapaian Achievements (%)	Proyeksi 2021 Projection
Pendapatan	Revenue	3.927.388	3.796.777	103,44%	4.195.028
Beban Pokok Pendapatan	Cost of Revenue	(3.452.685)	(2.672.746)	129,18%	3.628.845
Laba Bruto	Gross Profit	474.703	1.124.031	42,23%	1.224.630
Perubahan Nilai Wajar Aset Biologis	Change in fair value of biological Assets	596.902	645.536	92,47%	658.447
Beban Usaha / Operating Expenses					
Beban Pemasaran dan Distribusi	Marketing and Distribution Expenses	(49.568)	(61.195)	81,00%	49.243
Beban Umum dan Administrasi	General/ and Administrative Expenses	(774.870)	(891.838)	86,88%	921.205
Laba Usaha	Operating Income	247.167	170.997	144,54%	254.182
Pendapatan Lainnya, Bersih	Other income, net	68.545	162.622	42,15%	81.827
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Profit Before Income Taxes	306.883	195.242	157,18%	336.099
Beban Pajak Penghasilan	Income tax Expense	441.588	(190.773)	(231,47%)	73.922
Laba Tahun Berjalan	Profit for The Year	748.471	576.659	129,79%	262.087

Realisasi pendapatan usaha pokok sepanjang tahun 2020 sebesar Rp3,93 triliun atau mencapai 103% dari target RKAP tahun 2020 sebesar Rp3,80 triliun. Bila dibandingkan dengan 2019 yang sebesar Rp4,14 triliun maka mengalami penurunan sebesar 5%. Penurunan tersebut disebabkan karena turunnya pendapatan dari penjualan GTD, Wisata dan Industri Kayu yang antara lain karena adanya pandemi Covid-19.

The realization of basic operating income throughout 2020 was IDR3.93 trillion or reached 103% of the 2020 RKAP target of IDR3.80 trillion. When compared to 2019, which amounted to Rp4.14 trillion, it decreased by 5%. The decrease was due to a decrease in revenue from sales of GTD, Tourism and the Timber Industry, which was partly due to the Covid-19 pandemic.

Perusahaan memproyeksikan pendapatan pada RKAP 2021 akan mencapai Rp4,20 triliun sedangkan laba tahun berjalan pada RKAP 2021 akan mencapai Rp262,09 miliar.

The company projects that revenue in the 2021 RKAP will reach Rp4.20 trillion, while the profit for the year in the 2021 RKAP will reach Rp262.09 billion.

OPERASIONAL
Operational

Keterangan Description		Satuan Unit	Realisasi 2020 Realization	Target 2020 Target	Pencapaian Achievements (%)	Proyeksi 2021 Projection
Beban Pemasaran	Marketing Expenses	Rp juta	49.568	61.195	81,00%	49.243
Jumlah SDM	Total HC	Orang	17.820	18.520	96,22%	17.012
Produksi	Production					
Kayu Bulat	Log	m^3	846.506	818.496	103,42%	944.407
Kayu Olahan	Processed Wood	m^3	17.220	13.692	125,77%	23.574
Non kayu	Non Wood					
· Getah pinus	Getah pinus	ton	83.257	93.764	88,79%	93.677
· Daun kayu putih	Daun kayu putih	ton	44.700	41.645	107,34%	53.683
Finished Product Jati	Finished Product Jati	m^3	2.183	4.052	53,87%	3.217
Finished Product Rimba	Finished Product Rimba	m^3	4.519	10.454	43,23%	10.719

Secara total, produksi kayu bulat tahun 2020 tercapai 846.506 m^3 atau 103% dari Revisi RKAP tahun 2020 yang direncanakan produksi kayu sebanyak 818.496 m^3.

Realisasi beban pemasaran tahun 2020 sebesar Rp49,56 miliar atau 81% dari RKAP tahun 2020 sebesar Rp61,195 miliar dan bila dibanding dengan 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp118,69 miliar atau turun 47,5%. Penurunan terbesar terjadi pada pos biaya mengatur hasil hutan dan biaya penjualan.

In total, log production in 2020 reached 846,506m^3 or 103% of the 2020 Revised RKAP, which is planned for wood production of 818,496m^3.

The realization of marketing expenses in 2020 was Rp. 62.35 billion or 101.5% of the RKAP in 2020 of Rp. 61.43 billion and compared to December 31, 2019 of Rp. The biggest decrease occurred in the cost of managing forest products and selling costs.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
Company's Soundness Index

Indikator Penilaian Assessment Indicators		Skor Penilaian Assesment Score			%	
		Standar Kinerja	2020	2019	Pencapaian Achievement	Naik/ Turun Increase/ Decrease
Aspek Keuangan	Financial Aspect	70,00	43,00	37,00	61,43	16,22
Aspek Operasional	Operational Aspect	15,00	12,30	12,80	17,57	(3,91)
Aspek Administrasi	Administrative Aspect	15,00	15,00	11,00	100,00	36,36
Total Skor	Total Score	100,00	70,30	60,80	468,67	15,63
Tingkat Kesehatan	Soundness Level		Sehat /A/ Healthy	Sehat /A/ Healthy		

Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LHEK) Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dan entitas anak (Grup) disusun berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP.100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

Pada tahun 2020, tingkat kesehatan Perusahaan di atas target, meningkat dibanding dengan kondisi tahun 2019. Secara umum, hal ini disebabkan kinerja Perusahaan di bidang keuangan yang sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.

Perusahaan tetap berupaya untuk meningkatkan kinerja di segala bidang usaha untuk tahun-tahun mendatang dan tetap optimis dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif.

The Performance Evaluation Report (LHEK) of Public Company (Perum) Perhutani and its subsidiaries (Group) was prepared based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number KEP.100/MBU/2002 concerning Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises.

In 2020, the Company's health level was above the target, increasing compared to the conditions in 2019. In general, this was due to the Company's performance in the financial sector which slightly improved compared to last year.

The Company continues to strive to improve performance in all business fields for the coming years and remains optimistic in the face of increasingly competitive global competition.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Subsequent Material Information and Facts After Accountant's Report Date

Setelah tanggal 31 December 2020, berdasarkan surat Direksi dan surat rekomendasi Dewan Pengawas pada tanggal 1 Februari 2021 Grup memutuskan untuk melakukan regrouping terhadap seluruh anak perusahaan dengan perubahan untuk menggabungkan IHT I, IHT II dan IHT III menjadi IHT I sebagai entitas utama, sedangkan IHT IV, IHT V dan PAK akan digabungkan menjadi IHT V sebagai entitas utama serta BUMN HL akan dilikuidasi dan tidak ada perubahan untuk Palawi. Perubahan ini tidak akan merubah komposisi kepemilikan Perusahaan terhadap entitas anak dan ditargetkan selesai terlaksana di November 2021. Pada tanggal 29 Maret 2021, Perusahaan telah mengirimkan surat ke Kementrian LHK untuk melakukan koordinasi pemindahaan ijin IUPHHK.

After December 31, 2020, based on the letter of the Board of Directors and the recommendation letter of the Supervisory Board on February 1, 2021, the Group decided to regroup all subsidiaries with changes to merge IHT I, IHT II and IHT III into IHT I as the main entity, while IHT IV, IHT V and PAK will be merged into IHT V as the main entity and BUMN HL will be liquidated and there will be no changes for Palawi. This change will not change the composition of the Company's ownership of the subsidiaries and is targeted for completion in November 2021. On March 29, 2021, the Company has sent a letter to the Ministry of Environment and Forestry to coordinate the transfer of IUPHHK permits.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Share Ownership Program by Employees and/or Management Implemented by the Company (ESOP/MSOP)

Saham Perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah RI, oleh sebab itu tidak terdapat informasi mengenai kepemilikan saham oleh karyawan maupun manajemen lainnya.

The Company's shares are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia, therefore there is no information regarding share ownership by employees or other management.

Dividen
Dividend

Untuk tahun 2020, Hasil Rapat Pembahasan Bersama dengan Kementerian BUMN perusahaan dikenakan deviden. Berdasarkan Surat Nomor S-472 / MBU / 07 / 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perum Kehutanan Negara Tahun Buku 2019 telah ditetapkan besaran dividen yang akan dibayar oleh Perum Perhutani dengan perhitungan sebagai berikut:

For 2020, the results of the Joint Discussion Meeting with the Ministry of SOEs are subject to dividends. Based on Letter Number S-472/MBU/07/2020 dated July 6, 2020 concerning Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of the State Forestry Corporation for the 2019 Fiscal Year, the amount of dividends to be paid by Perum Perhutani has been determined with the following calculation:

DIVIDEN
Dividend

Uraian Description		**Satuan** Unit	2020	2019
Laba Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Profit Attributable to owners of the parent entity	Rp	205.940.000.000	653.954.000.000
Payout Ratio	Payout Ratio	%	10%	11,83
Nilai	Value	Rp	20.594.000.000	77.419.000.000
Cadangan	Reserves	Rp	185.346.000.000	576.535.000.000

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Hingga 31 Desember 2020, Perhutani merupakan BUMN yang tidak memperjualbelikan sahamnya pada Bursa Efek.

As of December 31, 2020, Perhutani is a BUMN that does not trade its shares on the Stock Exchange.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or Transaction with Affiliated Parties

Pihak Berelasi dan Sifat Hubungan

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan. Pihak berelasi termasuk anak usaha, Pemilik Modal pengendali dan mayoritas, induk dari Pemilik Modal mayoritas, dan Pemilik Modal akhir.

Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Related Parties And Nature of Relationship

Related parties refer to companies and individuals with direct and non-direct ownership or managerial affiliations with the Company. Related parties include subsidiaries, controlling and majority shareholders, parent of majority shareholders and ultimate shareholders.

Disclosure of balance and significant transactions with related parties are as follows:

PENGUNGKAPAN SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
Disclosure of balance and significant transactions with related parties

Sifat Hubungan Nature of Relationship	**Pihak Berelasi** Related Parties	**Jenis Transaksi** Transaction Type
Entitas berelasi dengan Pemerintah Related Entity with Government	BRI, BTN, BNI, Mandiri, BPD dan BRI Agroniaga	Penempatan dana pada bank dan penghasilan dan beban keuangan, Deposito berjangka, Pinjaman, Kas yang dibatasi penggunaannya Placement of funds with banks and financial income and expenses, time deposits, loans, restricted cash
	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Timah (Persero), Tbk. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) I, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Aneka Tambang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Nganjuk, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pendapatan jasa rehabilitasi Rehabilitation service income
	PT Telkom (Persero), Tbk	Beban jasa telekomunikasi Accounts receivable and income

PENGUNGKAPAN SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
Disclosure of balance and significant transactions with related parties

Sifat Hubungan Nature of Relationship	Pihak Berelasi Related Parties	Jenis Transaksi Transaction Type
Pemilik modal Capital Owner	Pemerintah Indonesia Government of Indonesia	Kekayaan Negara yang disisihkan State assets set aside
Entitas asosiasi Associated Entities	PT Idec Abadi Wood Industries ("Idec AWI")	Pendapatan penjualan kayu Income from sales of timber and stock investment
Personil manajemen kunci Key Management Personnel	Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Supervisory Board and Board of Directors	Remunerasi dan kompensasi Remuneration and compensation

Jumlah Transaksi Material dengan Pihak Berelasi

Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi:

Number of Material Transactions with Related Parties

Details of items related to related party transactions:

RINCIAN ITEM YANG TERKAIT DENGAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI
Details of Items Related to Related Party Transactions

Keterangan Description		2020	2019
KAS DAN SETARA KAS	**CASH AND CASH EQUIVALENT**		
Kas pada bank	Cash at bank		
Entitas berelasi dengan Pemerintah	Government related entities	578.846	638.111
Deposita berjangka	Time deposits		
Entitas berelasi dengan Pemerintah	Government related entities	122.202	376.837
Jumlah	**Total**	**701.048**	**1.014.948**
KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	**RESTRICTED CASH**		
Kas pada bank	Cash at bank		
Entitas berelasi dengan Pemerintah	Government related entities	67.621	2.496
Deposita berjangka	Time deposits		
Entitas berelasi dengan Pemerintah	Government related entities	70.600	11.056
Jumlah	**Total**	**138.221**	**13.552**
PIUTANG USAHA	**TRADE RECEIVABLES**		
Idec AWI	Idec AWI	1.032	1.598
Timah	Timah	939	1.111
Garuda	PLN	-	31
Pertamina Gas	Garuda	-	28
Entitas berelasi dengan pemerintah lainnya	Government' other related entities	401	605
Jumlah	**Total**	**2.381**	**3.345**

RINCIAN ITEM YANG TERKAIT DENGAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI
Details of Items Related to Related Party Transactions

Keterangan Description		2020	2019
PIUTANG USAHA	**ACCOUNTS RECEIVABLE**		
Pelindo I	Pelindo I	-	44
Pinjaman bank	Bank Loan		
Entitas berelasi dengan pemerintah	Government' other related entities	377.733	393.559
PENDAPATAN	**REVENUES**		
BPDASHL	BPDASHL	104.668	248.260
Idec AWI	Idec AWI	22.198	23.004
Bappeda Kab. Nganjuk	Bappeda Kab. Nganjuk	9.595	
Kementerian PUPR	Kementerian PUPR	9.533	
Timah	Lead	5.490	5.446
Inalum	Inalum	1.318	3.914
Lainnya	Other	7.329	5.022
Jumlah	**Total**	**164.758**	**287.758**
Penghasilan keuangan	Financial income		
Entitas berelasi dengan pemerintah	Government related entities	23.319	32.123
Beban keuangan	Financial Expenses		
Entitas berelasi dengan pemerintah	Government related entities	32.176	16.102

Alasan Dilakukannya Transaksi

Seperti halnya transaksi pada umumnya, transaksi dengan Pihak Berelasi yang dilakukan Perusahaan dilakukan untuk mendukung operasional Perusahaan.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-pihak Berelasi/ Berafiliasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan persyaratan, tingkat harga, dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Tidak

Reasons for Conducting The Transaction

As with common transactions with third parties, the Company's transactions with Related Parties are conducted to support the Company's operations.

Explanation on Transaction Fairness

The fairness of all transactions conducted by the Company with Related/Affiliated Parties has been disclosed in the financial statements, and is in conformity with PSAK 7 (2014 revision) standard on "Related Party Disclosures". All transactions with related parties, conducted under terms, price levels and normal conditions as performed with third parties and have been disclosed in the financial statements. There is no difference in pricing policy and terms of

ada perbedaan kebijakan harga dan syarat transaksi antara pihak- pihak berelasi dan pihak ketiga.

transactions between related parties and third parties.

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Mekanisme review Perusahaan atas transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi dilakukan melalui proses audit, khususnya audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, dimana mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Company's Policy Related to Review Mechanism On Transactions

The Company's review mechanism on transactions with Related Parties is conducted through an audit process, in particular audit by public accountant and published, in which the mechanism is set out in PSAK 7 (2014 revision) on "Related Party Disclosures".

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diIndonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Fulfillment of Related Regulations and Provision

The fulfillment of related regulations and terms, namely Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, is conducted through the disclosure of PSAK 7 (2014 revision) on "Related Party Disclosures" in the Company's 2020 financial statements audited by Public Accountant.

Kompensasi Manajemen Kunci

Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan merupakan personil manajemen kunci. Remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

Key Management Compensation

The Boards of Supervisory and Directors of the Company are considered key management personnel. Remuneration for the Boards of Supervisory and Directors of the Company for the years ended 31 December 2020 and 2019 was as follows:

REMUNERASI UNTUK DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN
Remuneration for the Boards of Supervisory and Directors of the Company

Keterangan Description		2020	2019
Remunerasi	Remuneration	26.414	37.369

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Changes in Laws and Regulations That Have a Significant Impact on the Company

1. **Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan**

   Peraturan ini diterbitkan berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain:

   (1) guna optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan ekspor produk industri kehutanan pada masa pandemi Covid-19 dan berdasarkan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 22 Mei 2020, perlu mengubah ketentuan mengenai kriteria teknis produk industri kehutanan yang dapat diekspor; dan

   (2) ketentuan ekspor produk kehutanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Permendag ini untuk memberikan kepastian berusaha guna mendukung efektivitas pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan, dan perlu pengaturan kembali ketentuan ekspor produk industri kehutanan.

   Produk industri kehutanan hanya dapat dieskpor oleh perusahaan yang memiliki nomor induk berusaha (NIB) & tanda daftar industri atau izin usaha industri dan perusahaan perdagangan yang memiliki

1. **Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 74 of 2020 concerning Provisions for the Export of Forestry Industry Products**

   This regulation was issued based on several considerations, including:

   (1) in order to optimize the utilization and increase exports of forestry industry products during the Covid-19 pandemic and based on the decision of the Coordinating Ministerial Meeting on 22 May 2020, it is necessary to amend the provisions regarding the technical criteria for exportable forestry industry products; and

   (2) provisions on the export of forestry products are no longer in accordance with developments and legal needs in society. This Minister of Trade Regulation is to provide business certainty to support the effectiveness of the implementation of the export of forest industry products, and it is necessary to re-regulate the provisions on the export of forestry industry products.

   Forestry industry products can only be exported by companies that have a business registration number (NIB) & industrial registration certificate or industrial business license and trading companies that have

NIB & surat izin usaha perdagangan. Ekspor produk industri kehutanan wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK). Dokumen ini sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang kepada kantor pabean.

an NIB & trading business license. Exports of forestry industry products must be accompanied by a V-Legal document issued by the Timber Legality Verification Agency (LVLK). This document is a complementary customs document that is required in the delivery of customs notification of export of goods to the customs office.

2. **Undang Undang No. 2 Tahun 2020 yang berlaku efektif 18 Mei 2020**

   Undang-undang ini mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah telah mengurangi tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi 22% untuk tahun 2020-2021 dan 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya, sesuai dengan Pasal 5 bagian 1 dari UU yang sebelumnya adalah Perppu No. 1 tahun 2020. Tarif pajak sebelumnya untuk tahun 2019 adalah 25%. Dengan demikian, dampak atas perubahan tarif pajak terhadap perusahaan adalah sebesar Rp544.094.

2. **Law no. 2 of 2020 which is effective 18 May 2020**

   This law regulates the State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or in Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability. The government has reduced the Corporate Income Tax rate to 22% for 2020-2021 and 20% for 2022 and beyond, in accordance with Article 5 part 1 of the Law which previously was Perppu No. 1 year 2020. The previous tax rate for 2019 was 25%. Thus, the impact of changes in tax rates on the company is Rp544,094.

3. **UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja**

   UU Cipta Kerja sektor kehutanan menjadi momentum bagi pemegang perizinan berusaha untuk meningkatkan kinerja kelola usahanya dengan memberikan peluang kerja sama investasi dalam pemanfaatan hutan bersama *stakeholders*.

3. **Law Number 11/2020 concerning Job Creation**

   The Law on Job Creation in the forestry sector is a momentum for permit holders to try to improve their business management performance by providing opportunities for investment cooperation in forest utilization with stakeholders.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan Pada Tahun Buku Terakhir

Changes in Accounting Policies Implemented by the Company in the Last Financial Year

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK"). Standar dan interpretasi baru/revisi lain yang berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- ISAK 36 "Interpretasi atas interaksi antara ketentuan mengenai hak tanah dalam PSAK 16: aset tetap dan PSAK 73: sewa"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan" dan PSAK 25 "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama"
- Amandemen PSAK 55 "Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran"
- Amandemen PSAK 60 "Instrumen keuangan: pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak asuransi"
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen keuangan - fitur percepatan pelunasan dengan kompensasi negatif"
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen keuangan - reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 73 "Sewa: konsesi sewa terhadap Covid-19"
- Penyesuaian tahunan PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan"

Changes to the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of the Statement of Financial Accounting Standards ("ISAK") Other new/revised standards and interpretations applicable for financial years beginning on or after January 1, 2020 are as follows:

- ISAK 36 "Interpretation of the interaction between provisions regarding land rights in PSAK 16: fixed assets and PSAK 73: leases"
- Amendments to PSAK 1 "Presentation of financial statements" and PSAK 25 "Accounting policies, changes in accounting estimates, and errors
- Amendment to PSAK 15 "Investments in associates and joint ventures"
- Amendments to PSAK 55 "Financial instruments: recognition and measurement"
- Amendments to PSAK 60 "Financial instruments: disclosures on interest rate benchmark reform"
- Amendments to PSAK 62 "Insurance contracts"
- Amendment to PSAK 71 "Financial instruments - feature of accelerated repayment with negative compensation"
- Amendment to PSAK 71 "Financial instruments - reform of interest rate reference"
- Amendment to PSAK 73 "Leases: lease concessions against Covid-19"
- Annual adjustment of PSAK 1 "Presentation of financial statements"

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, perubahan-perubahan tersebut tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

At the time of issuance of these consolidated financial statements, these changes did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had a material effect on the amounts reported for the current or prior year.

Penerapan dari standar, interpretasi baru/ revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

The adoption of the following new/revised standard interpretations, which are effective January 1, 2020, resulted in substantial changes to the Company's accounting policies and had a material effect on the amounts reported for the current or prior year.

- **PSAK 71 "Instrumen keuangan"**
  Penerapan atas PSAK 71 tersebut tidak memiliki dampak terhadap saldo awal laba ditahan yang belum dicadangkan pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

- **PSAK 71 "Financial instruments"**
  The adoption of PSAK 71 has no impact on the opening balance of retained earnings that has not been reserved in the Company's consolidated financial statements..

- **PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"**
  Perusahaan menerapkan PSAK 72 yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi Perusahaan tidak menyajikan Kembali komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar. Penerapan atas PSAK 72 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian

- **PSAK 72 "Revenue from contracts with customers"**
  The Company applies PSAK 72 which is effective for the financial year starting on January 1, 2020, but the Company does not present a comparative Restatement for the previous reporting period as permitted under the special transitional provisions in the standard. The adoption of PSAK 72 has no significant impact on the consolidated financial statements

- **PSAK 73 "Sewa"**
  Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Perusahaan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:
  - Menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
  - Akuntansi sewa operasi yang masa

- **PSAK 73 "Lease"**
  In applying PSAK 73 for the first time, the Company applies the following practical methods permitted by the standard:
  - Apply a single discount rate to a portfolio of leases with fairly similar characteristics;
  - Accounting for operating leases whose leases expire within 12 months from

sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;

- Pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal;
- Menggunakan tinjauan ke belakang *("hindsight")* dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

January 1, 2020 are treated as short-term leases;

- Exclusion of initial direct costs from the measurement of right-of-use assets at the date of initial application;
- Use hindsight ("hindsight") in determining the lease term if the contract contains an option to extend or terminate the lease.

Informasi Kelangsungan Usaha

Information on Business Continuity

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Tahun 2020.

Sepanjang tahun 2020, terdapat ketidakpastian perekonomian akibat dampak wabah Covid-19. Pandemi tersebut mempengaruhi, antara lain, permintaan global untuk produk dan layanan dan rantai pasokan. Manajemen telah menilai dampak yang mungkin timbul dari peristiwa ini terhadap operasi Grup dan percaya bahwa tidak ada dampak negatif yang signifikan pada tanggal penandatanganan laporan keuangan konsolidasian. Namun, manajemen akan terus memantau situasi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko terkait di masa depan.

Things that have the Potential to Have a Significant Impact on the Company's Business Continuity in 2020.

Throughout 2020, there was economic uncertainty due to the impact of the Covid-19 outbreak. The pandemic affected, among other things, global demand for products and services and supply chains. Management has assessed the possible impact of this event on the Group's operations and believes that there is no significant negative impact at the signing date of the consolidated financial statements. However, management will continue to monitor this situation and take necessary actions to address related risks in the future.

Assessment Manajemen akan Kelangsungan Usaha Tahun 2020

Manajemen berkeyakinan tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian kinerja operasional Perhutani yang optimal dan meningkat setiap tahunnya.

Management Assessment of Business Continuity in 2020

Management believes that there are no things that have the potential to significantly affect the continuity of its business. This can be seen from the achievement of Perhutani's optimal operational performance and increasing every year.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment

Asumsi kelangsungan usaha Perhutani didasarkan pada asumsi-asumsi dari internal Perusahaan yang giat memperkuat kinerja operasionalnya.

Assumptions Used by Management in Conducting Assessment

The assumption of Perhutani's business continuity is based on the assumptions of the Company's internal activities that are actively strengthening its operational performance.

Kontribusi kepada Negara

Contribution to the Country

Perusahaan memberikan kontribusi finansial kepada negara dalam bentuk pembayaran dividen dan kewajiban pajak. Dalam hal perpajakan, Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak. Kontribusi Perusahaan ke kas negara tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp643,46 miliar, turun 18% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp780,73 miliar.

The company makes financial contributions to the state in the form of dividend payments and tax obligations. In terms of taxation, the Company is committed to fulfilling its obligations as a Taxpayer, Tax Withholder, and Tax Collector. The Company's contribution to the state treasury was recorded at Rp643.46 billion in 2020, a decrease of 18% compared to 2019 of Rp780.73 billion.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) merupakan komitmen utama Perhutani dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis.

In carrying out its business activities, Perhutani has a firm commitment to implement Good Corporate Governance (GCG) practices.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance

Perhutani berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap aktivitas bisnis

Perhutani is committed to implement the Good Corporate Governance principles in a comprehensive and sustainable manners in every business activity.

Dasar Kebijakan GCG

Perhutani mengacu pada kebijakan terkait dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai wujud kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diantranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Direksi & Dekom Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan perubahannya.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER09/ MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01

GCG Policy Basic

Perhutani refers to related policies in realizing good corporate governance as a form of the Company's compliance with applicable regulations. These policies include the following:

1. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.
2. Minister of SOE Regulation No:PER-01/ MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise.
3. Minister of SOE Regulation No.PER-03/ MBU/02/2015 dated February 17, 2017, concerning Board of Directors Members Appointment and Dismissal Procedure and Requirements in State-Owned Enterprise.
4. Minister of SOE Regulation No.PER-09/ MBU/2012 dated July 6, 2012 as Amendment on the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/ MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Good Corporate Governance Implementation

Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara.

5. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada Badan Usaha Milik Negara.

in State-Owned Enterprise.

5. Secretary to the Minsitry of State-Owned Enterprise Decree Number.SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Good Corporate Governance Implementation Assessment and Evaluation Indicators/ Parameters in State-Owned Enterprise.

Prinsip GCG

Perhutani berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap aktivitas bisnis, meliputi prinsip:

Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Responsibilitas

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independen

Keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

GCG Principles

Perhutani is committed to implement the Good Corporate Governance principles in a comprehensive and sustainable manner in every business activity, including the principles, as follows:

Transparency

Openness in carrying out the decision-making process, and openness in disclosing material and relevant information about the company.

Accountability

Clarity of functions, implementation, and accountability of organs so that the company's management is carried out effectively.

Responsibility

Conformity in the management of the company to the laws and regulations and sound corporate principles.

Independent

A situation where the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations and sound corporate principles.

Kewajaran

Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Fairness

Fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and laws and regulations.

Roadmap GCG

Perhutani terus melakukan pernyempurnaan implementasi GCG sehingga menjadi warga Negara yang baik dengan melakukan berbagai upaya selama tahun 2020, antara lain:

1. Seluruh karyawan Perusahaan termasuk Komite Dewan Pengawas menandatangani Pernyataan Kepatuhan atas *Code of Conduct* setiap tahun;
2. Dewan Pengawas dan Direksi menandatangani Pakta Integritas dalam memberikan rekomendasi/ persetujuan terhadap tindakan-tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Perusahaan telah melakukan pelaporan LHKPN dengan Jumlah 5 Direksi yang wajib menyampaikan LHKPN, seluruh Direksi telah menyampaikan LHKPN kepada KPK sebagaimana dimaksud;
4. Melakukan analisa risiko secara terstruktur memilih peluang bisnis dengan mengoptimalkan Unit pengelola manajemen risiko;
5. Menyusun *internal control report* yang mencakup evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian internal secara korporat;
6. Direksi menyampaikan laporan manajemen kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal secara tepat waktu;
7. Perusahaan telah menindaklanjuti *Area of Improvement Self Assessment* penerapan GCG yang diasistensi oleh Badan Pengawasan

GCG Roadmap

Perhutani continuously improve GCG implementation to be good corporate citizen by doing various initiatives in 2020, such as:

1. All employees in the Company, including the Committees under Supervisory Board sign Declaration of the Compliance to the Code of Conducts every year;
2. Supervisory Board and Board of Directors sign the Integrity Pact in giving recommendation/ approval for the Board of Directors' initiative that require written approval from the Supervisory Board as mentioned in the Company's Articles of Association.
3. The Company has submitted LHKPN reporting with 5 Directors who are required to submit LHKPN, all of the Board of Directors have submitted LHKPN to KPK as required;
4. Perform risk analysis structurally in selecting business opportunity by optimizing the risk management unit;
5. Prepare Internal Control Report that includes evaluation/assessment on effectiveness of internal control at corporate level;
6. Board of Directors submits management report to the Supervisory Board and Shareholders on time;
7. The Company has followed-up Area of Improvement from the GCG Self-Assessment assisted by the Financial & Development Supervisory Agency (BPKP);

Keuangan & Pembangunan (BPKP);
8. Pemantauan tindak lanjut hasil audit internal dan audit eksternal;
9. Pelaksanaan kegiatan *corporate social responsibility* secara berkelanjutan; melalui kegiatan-kegiatan CSR yang menitikberatkan pada 4 aspek tanggung jawab sosial yaitu:
   a. Tanggung jawab sosial terkait Lingkungan hidup.
   b. Tanggung jawab sosial terkait Pegawai dan K3.
   c. Tanggung jawab sosial terkait Sosial Kemasyarakatan.
   d. Tanggung jawab sosial terkait pelanggan.

8. Monitoring follow-up of the internal and external audits results;
9. Implementation of Corporate Social Responsibility activity in continuus manner; through CSR activities that focused on 4 social responsibility aspects, as follows:
   a. Social responsibility related to Environment.
   b. Social responsibility related to Employees and HSE.
   c. Social responsibility related to Social Community.
   d. Social responsibility related to customers.

Komitmen Implementasi GCG Secara Berkelanjutan

Komitmen Perhutani terhadap Implementasi GCG tercermin dari konsistensi dan keseriusan Perhutani dalam mengimplementasikan kebijakan GCG, *Code of Conduct*, Kebijakan Benturan Kepentingan, Kebijakan Gratifikasi, Kebijakan LHKPN maupun Kebijakan Whistleblowing System. Perhutani senantiasa melakukan sosialisasi dan internalisasi berbagai kebijakan tersebut dalam rangka mewujudkan implementasi GCG secara berkelanjutan dan sesuai *best practice*.

Commitment to Sustainable GCG Implementation

Perhutani's commitment to GCG implementation is reflected in the consistency and seriousness of Perhutani in implementing the GCG policy, Code of Conduct, Conflict of Interest Policy, Gratification Policy, LHKPN Policy and Whistleblowing System Policy. Perhutani continues to socialize and internalize these various policies in order to realize the implementation of GCG in a sustainable manner and according to best practice.

Sosialisasi GCG

Sosialisasi GCG dilakukan kepada setiap insan yang ada di lingkungan Perhutani melalui forum formal maupun media informasi lain. Sosialisasi secara formal (tatap muka) telah dilakukan dalam forum rapat dan *gathering*, serta melalui media informasi lain seperti portal internal dan website Perhutani.

GCG Socialization

GCG socialization is carried out to every individual within Perhutani through formal forums and other information media. Formal socialization (face to face) has been carried out in meeting and gathering forums, as well as through other information media such as the internal portal and Perhutani website.

Penilaian dan Evaluasi Impplementasi GCG

Perhutani melakukan penilaian terhadap implementasi GCG Perusahaan secara rutin untuk menilai tingkat pemenuhan aspek-aspek GCG dan menjadi bahan dalam menyusun strategi improvement implementasi GCG Perusahaan di tahun berikutnya.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor.PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap GCG dalam bentuk: (a) penilaian *(assessment)* yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun; (b) evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) Aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara Nomor.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* yang terdiri dari 6 (enam) aspek, 43 (empat puluh tiga) indikator penerapan Tata Kelola Perusahaan dan 153 parameter pengujian.

GCG Implementation Assessment And Evaluation

Perhutani conducts an assessment of the Company's GCG implementation regularly to assess the level of compliance with GCG aspects and becomes an ingredient in formulating an improvement strategy for the Company's GCG implementation in the following year.

Based on Article 44 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of SOE Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, the Company is required to measure GCG in the form of: (a) assessment, which is a program to identify the GCG implementation in SOEs by measuring the implementation and implementation of GCG in SOEs which is carried out periodically every 2 (two) years; (b) evaluation (review), which is a program to describe the follow-up to the implementation and implementation of GCG in SOEs carried out in the following year after the assessment as referred to in letter a, which includes evaluation of the results of the assessment and follow-up on the improvement recommendations.

Assessment and evaluation is carried out using a measuring instrument consisting of 6 (six) Aspects with a predetermined weight as stipulated in the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/ Parameters of Assessment and Evaluation on the Implementation of Good Corporate Governance which consists of 6 (six) aspects, 43 (forty three) indicators of the implementation of Good Corporate Governance and 153 testing parameters.

Pelaksanaan evaluasi implementasi GCG Perusahaan di tahun 2020 dilakukan secara mandiri *(self assessment)*. Pelaksanaan evaluasi GCG dimulai pada bulan Januari 2020 dan berakhir pada bulan Juli 2020. Evaluasi implementasi GCG tersebut menunjukkan hasil dengan predikat "Baik" mencakup 6 (enam) aspek yang diukur yaitu Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan, Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi dan aspek lainnya. Evaluasi GCG tahun 2020 memperoleh skor 84,78 dari target skor 84 meningkat dibandingkan pencapaian tahun 2019 dengan skor 84,49.

The evaluation of the Company's GCG implementation in 2020 is carried out independently (self-assessment). The implementation of the GCG evaluation begins in January 2020 and ends in July 2020. The GCG implementation evaluation showed results with the predicate of "very good" covering 6 (six) aspects measured, such as Commitment to the Implementation of Sustainable Governance, Capital Owners, Supervisory Board, Board of Directors, Information Disclosure and Transparency and other aspects. The 2020 GCG evaluation obtained a score of 84.78 from a target score of 84, an increase compared to the achievement in 2019 with a score of 84.49.

PENILAIAN DAN EVALUASI GCG TAHUN 2020
2020 GCG Assessment and Evaluation

Aspek Aspect		Bobot Weight	Capaian Achievement	%	Predikat Predicate
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan	Commitment to the Implementation of Governance in a sustainable manner	7,00	6,07	86,68%	Sangat Baik Very Good
Pemilik Modal/RPB	Owner of Capital/RPB	9,00	8,61	95,68%	Sangat Baik Very Good
Dewan Pengawas	Supervisory Board	35,00	33,49	95,70%	Sangat Baik Very Good
Direksi	Directors	35,00	29,06	83,02%	Baik Good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi	Information Disclosure and Transparency	9,00	7,55	83,87%	Baik Good
Aspek lainnya	Other aspects	10,00	-	-	
Total	Total	100,00	84,78		Baik Good

Ringkasan Hasil Evaluasi GCG Perhutani Tahun 2020

Perhutani secara umum memiliki komitmen yang baik untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan,

Summary of Perhutani's 2020 GCG Evaluation Results

Perhutani in general has a good commitment to implementing Good Corporate Governance in a sustainable manner, among others supported

antara lain didukung dengan adanya Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang telah dimutakhirkan dan ditetapkan pada 2019.

Perusahaan telah mengeluarkan kebijakan dan panduan tambahan diantaranya seperti Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas, Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran, Pedoman Gratifikasi, Pedoman Pengadaan barang dan jasa, Kebijakan Corporate Social Responsibility dan Kebijakan pendukung lainnya. Sebagai perwujudan atas komitmen pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengungkapan informasi, pertanggungjawaban terhadap penegakkan peraturan, akuntabilitas pembagian tanggung jawab, kemandirian profesional tanpa benturan kepentingan, dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan di lingkungan Perusahaan serta melakukan pengelolaan pelaporan pelanggaran *(whistle-blowing system)* dan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Perhutani berupaya secara konsisten untuk memastikan hak-hak Pemilik Modal terpenuhi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan kebijakan Perusahaan. Pemenuhan Pemilik Modal dilakukan antara lain melalui pemberian informasi terkini atas kondisi Perusahaan, pengambilan keputusan dalam RPB, dan terutama turut mendukung pencapaian dan sinergi BUMN. Dewan Pengawas beserta perangkat pendukungnya (Komite dan Sekretaris) menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan secara berkelanjutan dan melekat. Fungsi pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan Perusahaan yang efisien dan efektif sesuai dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

by the existence of the Corporate Governance Guidelines which have been updated and established in 2019.

The Company has issued additional policies and guidelines such as Guidelines for the Board of Directors and Supervisory Board, Management of Violation Reports, Guidelines for Gratification, Guidelines for Procurement of Goods and Services, Corporate Social Responsibility Policies and other supporting policies. As a manifestation of the commitment to implementing Good Corporate Governance, the Company continues to apply the principles of transparency in information disclosure, accountability for law enforcement, accountability for sharing responsibilities, professional independence without conflicts of interest, and equality in fulfilling the rights of stakeholders within the Company and conducting management of reporting violations (whistle-blowing system) and reporting on State Administrators' Assets.

Perhutani strives consistently to ensure that the rights of Capital Owners are fulfilled as stipulated in the Articles of Association and Company policies. Fulfillment of Capital Owners is carried out, among others, by providing the latest information on the condition of the Company, making decisions in the RPB, and especially supporting the achievement and synergy of SOEs. The Supervisory Board and its supporting apparatus (Committee and Secretary) carry out the supervisory function of the Company's business activities and operations in a sustainable and inherent manner. The supervisory function is carried out with the aim of ensuring efficient and effective management of the Company in accordance with the interests of all stakeholders. The background of the members

Latar belakang anggota Dewan Pengawas dengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan bidang usaha Perusahaan cukup memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, antara lain melalui pemberian masukan kepada Manajemen Perusahaan.

of the Supervisory Board with competencies and qualifications in accordance with the Company's line of business is sufficient to provide added value to the Company, among others through providing input to the Company's Management.

Direksi Perusahaan sebagai fungsi pelaksana/ pengurus bertanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. *"Tone of the top"* Direksi beserta jajaran Manajemen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* dirasakan cukup baik, dengan menciptakan budaya dan etika Perusahaan, serta menciptakan struktur, proses, dan kinerja Perusahaan. Perhutani senantiasa berupaya mewujudkan kemudahan akses atas informasi dan data perusahaan dengan menyediakan media-media informasi seperti majalah, buletin, portal, website, serta memenuhi aspek-aspek penyusunan Laporan Tahunan yang sesuai dengan ketentuan.

The Company's Board of Directors as the executive/management function is responsible for daily activities to achieve the Company's vision and mission. The "tone of the top" of the Board of Directors and the Management towards the implementation of Good Corporate Governance is considered quite good, by creating a corporate culture and ethics, as well as creating the structure, processes, and performance of the Company. Perhutani always strives to achieve easy access to company information and data by providing information media such as magazines, bulletins, portals, websites, as well as fulfilling the aspects of preparing the Annual Report in accordance with the provisions.

Ke depannya, Perhutani akan senantiasa melakukan peningkatan penerapan GCG di seluruh lini usaha melalui beberapa peningkatan operasional untuk mendukung pengelolaan Perusahaan yang sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pengoptimalan fungsi Komite-komite pendukung Tugas Dewan Pengawas dan Direksi, perluasan internalisasi Pakta Integritas ke seluruh insan Perhutani, pengembangan sistem manajemen risiko yang diikuti penilaian berkala dan pembentukan Komite Pemantau Risiko, serta penerapan kebijakan sumber daya manusia dan intensifikasi pelaksanaan keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan.

In the future, Perhutani will continue to improve the implementation of GCG in all business lines through several operational improvements to support the management of the Company in accordance with Good Corporate Governance, optimizing the functions of the Supporting Committees for the Duties of the Supervisory Board and the Board of Directors, expanding the internalization of the Integrity Pact to all employees. Perhutani, the development of a risk management system followed by periodic assessments and the establishment of a Risk Monitoring Committee, as well as the implementation of human resource policies and intensification of the implementation of occupational safety, health and environmental management.

Struktur Organ Tata Kelola

Governance Structure

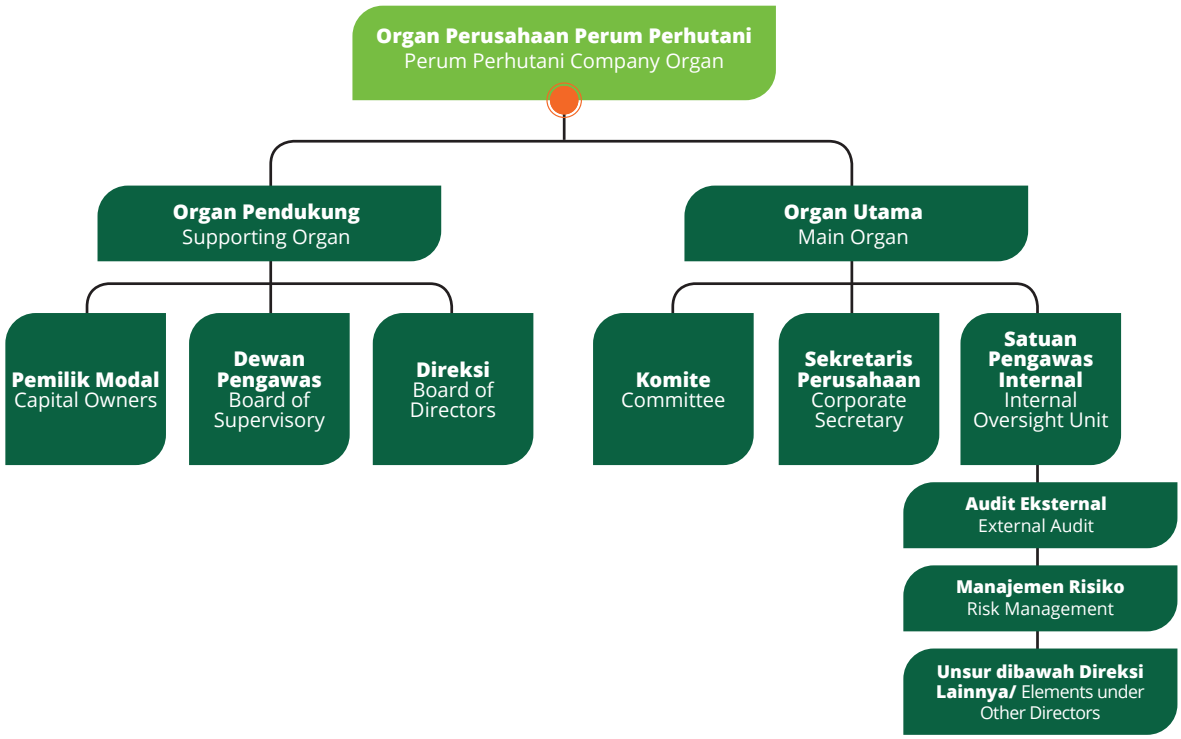

Struktur Organ Tata Kelola *(Governance Structure)* Perhutani yang bertanggung jawab atas implementasi GCG di lingkungan Perusahaan dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Organ Inti yang terdiri dari Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi.
2. Organ Pendukung yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengendalian Internal, Manajemen Risiko dan Unit lain organ Perusahaan yang berada di bawah garis koordinasi Direksi serta Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit dan komite Manajemen Risiko di bawah garis koordinasi Dewan Pengawas.

Perhutani's Governance Structure which is responsible for the implementation of GCG within the Company is grouped into 2 (two), namely:

1. Core Organs consisting of Capital Owners, Supervisory Board and Directors.
2. Supporting Organs consisting of the Corporate Secretary, Internal Control Unit, Risk Management and other units of the Company's organs under the coordination line of the Board of Directors and the Secretary of the Supervisory Board, the Audit Committee and the Risk Management committee under the coordination line of the Supervisory Board

Struktur Kebijakan Tata Kelola *(Governance Soft Structure)*

Kebijakan GCG yang menjadi pedoman organ tata kelola perusahaan telah disusun sebagai rancang bangun pengelolaan GCG yang terintegrasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam strategi Perusahaan yang sejalan dengan budaya dan visi Perhutani. Kebijakan tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan regulasi, *best practices* serta kondisi dan perkembangan bisnis Perusahaan. Kebijakan tersebut senantiasa dievaluasi dan dimutakhirkan agar senantiasa relevan dengan perkembangan bisnis Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Perhutani telah memiliki *Governance Soft Structure* yang terdiri dari:

1. **Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(GCG Code)***
   Pedoman Tata Kelola Perusahaan memuat prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan Perusahaan agar dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Perusahaan senantiasa sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini disusun dengan maksud untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang ada di Perusahaan disusun dengan pendekatan Objective, Risk, dan Control yang diarahkan guna mendorong dan menghidupkan check and balance setiap proses bisnis pada setiap level maupun fungsi manajemen berdasarkan jiwa dan prinsip-prinsip GCG.

2. **Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas *(Board Manual)***
   Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas mencakup aspek terkait pelaksanaan hubungan kerja antar Organ Dewan Pengawas dan Organ Direksi di lingkungan Perhutani dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar

Governance Soft Structure

GCG Policy as guideline of the corporate governance organ has been prepared as a GCG management framework that is integrated and becomes inseparable part in the Company's strategy that is in line with culture and vision of Perhutani. The policy is prepared by considering regulatory update, best practices as well as condition and development of the Company's business. The policy is always be evaluated and updated to always be relevant with the Company's business development and prevailing regulation. Perhutani has Governance Soft-Structure that includes:

1. **Code of Corporate Governance (GCG Code)**
   Code of Corporate Governance includes basic principles in managing the Company, so that in running the business, the Company always complie with the GCG principles implementation. This Code of Corporate Governance is prepared with purpose to ensure that every policy in the Company has been prepared with Objective, Risk and Control approach that is aligned to encourage and revive check and balance in every business process at every management level and function based on the GCG spirit and principles.

2. **Manual for boardof Directors and Supervisory board (Board manual)**
   Board Manual for the Board of Directors and Supervisory Board covers the aspects related to implementation of work relation between Organs under the Supervisory Board and Organs udner the Board of Directors in Perhutani by referring to

Perhutani dan/atau ketentuan lain yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk menjadi rujukan/ pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing Organ; meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar Organ; dan menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

3. Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)*

Pedoman Perilaku berisi panduan dalam bertindak dan berperilaku agar sesuai dengan etika bisnis, etika kerja. Pedoman Perilaku Perhutani secara umum mengatur tentang Tata Nilai Perhutani yaitu Integritas, Inovatif, Fokus pada Pelanggan dan Unggul; Etika Bisnis yang mengatur tentang kepatuhan terhadap peraturan perundangan, penerimaan hadiah, suap dan gratifikasi, kepedulian Perusahaan terhadap kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja, komitmen Perusahaan kepada stakeholders; Etika Kerja yang mengatur tentang Komitmen Insan Perhutani di dalam dan di luar Perusahaan, Komitmen sebagai atasan, Komitmen sebagai bawahan, Komitmen terhadap catatan, dokumen dan informasi, Komitmen terhadap aset Perusahaan, Komitmen terhadap benturan kepentingan, Komitmen terhadap kegiatan politik, perilaku asusila, menjaga rahasia Perusahaan, serta; Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku. *Code of Conduct* wajib diaplikasikan oleh Insan Perhutani di seluruh jajaran Perusahaan. Dalam pelaksanaan perwujudan komitmen penerapan Pedoman Perilaku ini, insan Perhutani diwajibkan untuk menandatangani pernyataan kepatuhan dan integritas terhadap Pedoman Perilaku Perhutani.

provisions as disclosed in Perhutani's Articles of Association and/or other pvoisions that are regulated in prevailing Law with purpose to be the reference/guideline concerning main duty and work function of each Organ; to improve quality and effectiveness of work relation among the Organs; and to implement GCG principles such as transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.

3. Code of Conduct

Code of Conducts contains the guideline to act and behave according to business ethics, work ethics. Perhutani Code of Conducts generally regulates Values of Perhutani such as Integrity, Innovative, Customer Focus and Excellence; Business Ethics that regulates compliance with the regulation, acceptance of reward, bribery and gratification, the Company's concern on occupational health, safety and environment, the Company's commitment to the stakeholders; Work Ethics that regulates Commitment of Perhutani's Personnel inside and outside the Company, Commitment as Leaders, Commitment as Subordinate, Commitment on notes, documents and information, Commitment on assets of the Company, Commitment on conflict of interest, Commitment on political activity, dishonor attitude, protecting confidentiality of the Company, and; Code of Conducts Implementation and Enforcement. Code of Conduct shall be applied by Perhutani's Personnel at entire levels of the Company. In the implementation of this Code of Conducts commitment, Perhutani's Personnel is required to sign declaration of compliance and integrity pact on Perhutani's Code of Conducts.

4. **Piagam Komite (Committee Charter)**
   Berisikan tata kerja komite-komite dalam melaksanakan fungsinya membantu tugas pengawasan Dewan Pengawas. Piagam Komite diantaranya mencakup uraian tugas masing-masing Komite Pengawas dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas guna mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen di Perusahaan.

5. **Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter)**
   Berisikan tata kerja Internal Audit dalam melaksanakan fungsi assurance dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal sebagai bagian dari implementasi GCG. Piagam Audit Internal mencakup visi dan misi; sasaran internal audit; kedudukan unit internal audit; wewenang; kewajiban; independensi; tanggung jawab; standar audit; ruang lingkup kegiatan audit; dan hubungan dengan auditor eksternal dan Komite Audit.

6. **Kebijakan Manajemen Risiko**
   Kebijakan Manajemen Risiko mengatur pengelolaan risiko pada tingkat Perusahaan (Enterpirse) sampai dengan risk owner pada tingkat business process; peran pimpinan puncak pada pembentukan lingkungan internal; kebutuhan infrastruktur pengelola manajemen risiko; pengukuran budaya risiko sebagai tolak ukur keberhasilan pengelolaan risiko pada tingkat perusahaan; serta tahapan pengelolaan risiko.

7. **Kebijakan Pengendalian Internal**
   Kebijakan Pengendalian Internal mengatur tanggung jawab dan peran serta seluruh stakeholder dalam pembentukan, penerapan dan evaluasi pengendalian internal perusahaan.

4. **Committee Charter**
   Disclosing work procedure of the committees in exercising their functions to help supervisory duty of the Supervisory Board. Committee Charters namely include description of duty for each Commitee under the Supervisory Board in supporting implementation of the Supervisory Board's duty to establish competent and independent monitoring system and implementation in the Company.

5. **Internal Audit Charter**
   Disclosing work procedure of the Internal Audit in exercising assurance function in Itnernal Control System as part of GCG implementation. Internal Audit Charter includes vision and mission; objectives of the internal audit; position of internal audit unit; authority; obligation; independency; responsibility; audit standard; scope of audit activity; and relationship with external auditor and Audit Committee.

6. **Risk Management Policy**
   Risk Management Policy regulates risk management at corporate (enterprise) until risk owners at business process level; role of top managment in internal control establishment; requirements of risk management infrastructure; risk culture measurement as indicator of the risk management succeed at enterprise level; and risk mitigation stage.

7. **Internal Control Policy**
   Internal Control Policy regulates responsibility and role of all stakeholders in the Company's internal control establishment, implementation and evaluation.

8. Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian Gratifikasi ditetapkan dalam rangka mengimplementasikan Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* dan bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi seluruh Insan Perhutani dalam hal penerimaan gratifikasi dan pelaporannya sehingga terhindar dari benturan kepentingan *(Conflict of Interest)* yang dapat merugikan diri sendiri, Perusahaan dan masyarakat. Kebijakan pengendalian gratifikasi mencakup prinsip dasar pengendalian gratifikasi; pemberian yang dikategorikan gratifikasi dan dapat menimbulkan *Conflict of Interest* yang harus dilaporkan; gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan tata cara pelaporan gratifikasi.

8. Internal Control Policy

Gratification control is applied in order to implement Code of Conduct and aims to provide clear guideline for all Perhutani's Personnel in the context of gratification acceptance and its report to avoid Conflict of Interest that may cause loss individually, to the Company and society. The Gratification Controlling Policy includes basic principle of gratification controlling; appreciation that is clasified as gratification and may cause Conflict of Interest that shall be reported; gratification that may not be reported and Gratification Reporting Mechanism.

9. Kebijakan Whistleblowing System

Kebijakan *Whistleblowing System* berisi panduan pelaporan dari berbagai dugaan melanggar hukum & peraturan perusahaan, benturan kepentingan, kecurangan, korupsi, suap serta pencurian yang terjadi di lingkungan kerja Perusahaan sehingga dapat meminimalisir risiko akibat pelanggaran. Kebijakan *Whistleblowing System* mencakup tujuan; peran dan tanggung jawab mulai dari Dewan Pengawas, Direksi serta fungsi-fungsi organisasi dalam Perusahaan yang terkait dengan pengelolaan WBS; ketentuan umum pengelolaan WBS; ketentuan lain seperti sanksi, pelindungan pelapor, Penerimaan Laporan Pelanggaran, dan Tindak lanjut Laporan Pelanggaran serta peninjauan kembali dan revisi kebijakan *Whistleblowing System.*

9. Whistleblowing System Policy

Whistleblowing System Policy contans guideline of reporting for various indications of violation against the law & corproate regulation, fraud, corruption, bribery and robbery that occured in the Company's work circumstances to minimize the risk caused by any violation. The Whistleblowing System Policy includes objectives; role and responsibility startingfrom Supervisory Board, Board of Directors and organization functions in the Company related to WBS management; general provision on WBS management; other regulations such as punishment, protection to whistleblower, Violation Report Acceptance, and follow-up of the violation report as well as Whistleblowing System Policy review and revision.

10. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan pedoman dalam menjalankan kegiatan pengadaan bagi Perusahaan yang berisi: Prinsip–Prinsip Pengadaan; Pemenuhan Ketentuan Regulasi Bisnis dan Kehutanan; Pengelolaan Penyedia Barang dan Jasa; Kemitraan Strategis untuk Pengadaan Barang dan Jasa.

10. Goods and Services Procurement Policy

Goods and Services Procurement Policy is a guideline to organize procurement activity for the Company that includes: Procurement Principles; Fulfillment of Business and Forestry Regulation Provision; Goods and Services Suppliers Management; Strategic Partnership for Goods and Services Procurement.

Dewan Pengawas

Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas Perhutani telah memenuhi persyaratan umum, diantaranya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku baik dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perhutani dan ketentuan yang berlaku.

Members of the Supervisory Board of Perhutani have met the general requirements, including having expertise, integrity, leadership, honesty, good behavior and high dedication to advancing and developing Perhutani and applicable regulations.

Persyaratan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perhutani wajib memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomer PER-02/MBU/02/2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Persyaratan lain anggota Dewan Pengawas diatur dalam Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas yang di dalamnya mencakup tentang

Supervisory Board Requirements

Supervisory Board of Perhutani shall comply with fit and proper test requirements by adhering to provisions in the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and other regulations related to the Company's business activity.

Appointment of the Supervisory Board is done by considering integrity, dedication, understanding on the Company's managerial issues related to one of the management's functions, having sufficient knowledge in the Company's business field and allocate sufficient time to perform the duties.

Other requirements for the Supervisory Board membesr are regulated in the Board Manual for the Board of Directors and the Supervisory Board, which

persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Direksi. Pedoman tersebut mengacu kepada Peraturan Peraturan Menteri Negara BUMN No.: PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

1. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
2. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/ wakil kepala daerah;
3. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas;
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Pengawas kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas;
5. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut; dan
6. Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Pengawas yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.

includes the requirements and procedures for the appointment of members of the Supervisory Board and Directors. The guideline refers to Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No.: PER-02/MBU/02/2015 dated February 17, 2015, concerning Requirements for Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Supervisory Board of State- Owned Enterprises, among others:

1. Not being a member of a political party, and/or a member of the legislature and/or not being nominated as a legislative candidate;
2. Not being mayor/vice meyor and/or not being nominated as a mayor/vice mayor candidate.
3. Not serving in any position with conflict of interest potential to the company concerned except to sign a statement of willingness to resign from the position if elected as a member of the Supervisory Board;
4. Not serving in any that is prohibited under the law to be served concurrently by the Supervisory Board except signing a statement of willingness to resign from the position if elected as a member of the Supervisory Board;
5. Not serving as a member of the Supervisory Board at the company concerned for 2 (two) consecutive periods; and
6. Physically and mentally healthy, not suffering from an illness that can hinder the implementation of duties as a member of the Supervisory Board as evidenced by a health certificate from the hospital.

Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Dewan Pengawas

Anggota Dewan Pengawas Perhutani wajib dinyatakan lulus dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan *(Fit & Proper Test)* yang dilakukan oleh Pemilik Modal. Adapun penjelasan status Uji Kelayakan dan Kepatutan Dewan Pengawas yang menjabat pada tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Feasibility and Property Assessment of The Supervisory Board

Members of the Perhutani Supervisory Board must be declared to have passed the Fit & Proper Test conducted by the Capital Owner. The explanation of the Fit and Proper Test status of the Supervisory Board who took office in 2020 can be explained in the following table:

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS TAHUN 2020
Proper Test for the Composition of the Supervisory Board in 2020

Nama Name	**Domisili** Domicile	**Status** Status	**Pelaksana Fit & Proper Test** Implementing Fit & Proper Test
Bambang Hendroyono	Jakarta	Lulus Pass	Kementrian BUMN Ministry of SOE
Bambang Risyanto	Jakarta	Lulus Pass	Kementrian BUMN Ministry of SOE
Chalid Muhammad	Jakarta	Lulus Pass	Kementrian BUMN Ministry of SOE
Komaruddin Simanjuntak	Jakarta	Lulus Pass	Kementrian BUMN Ministry of SOE
Noer Fauzi Rachman	Jakarta	Lulus Pass	Kementrian BUMN Ministry of SOE
YB. Priyatmo Hadi	Jakarta	Lulus Pass	Kementrian BUMN Ministry of SOE

Pemberhentian Dewan Pengawas

Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan atas persetujuan Pemilik Modal. Adapun pemberhentian anggota Dewan Pengawas dapat dilakukan apabila yang bersangkutan:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/ atau negara;

Supervisory Board Dismissal

The Supervisory Board can be dismissed incidentally according to previaling regulation and approval from the Shareholders. The Supervisory Board member dismissal can be done under following conditons:

1. Failed to perform the duty appropriately;
2. Not implementing or violating provisions of the Law or Articles of Association;
3. Involved in action that cause loss to the Company and/or the Country;

4. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan yang seharusnya dihormati selaku anggota Dewan Pengawas;
6. Mengundurkan diri.

4. Committed guilty under inkracht court decision;
5. Committed action violating the ethics and/or appropriateness that shall be honored as the Supervisory Board member; and
6. Resigned.

Komposisi Dewan Pengawas

Komposisi anggota Dewan Pengawas Perhutani sampai dengan 31 Desember 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Modal adalah sebagai berikut:

Composition of the Supervisory Board

The composition of the members of the Perhutani Supervisory Board as of December 31, 2020 based on the Deed of Decree of the Capital Owners is as follows:

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS
Composition of The Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	SK Menteri BUMN Decree of the Minister of SOEs
Bambang Hendroyono	Ketua/ Chairman	Jakarta	SK-47/MBU/02/2020 tgl 12 Februari 2020
Bambang Risyanto	Anggota/ Member	Jakarta	SK-83/MBU/03/2020 tgl 19 Maret 2020
Chalid Muhammad	Anggota/ Member	Jakarta	SK-83/MBU/03/2020 tgl 19 Maret 2020
Komaruddin Simanjuntak	Anggota/ Member	Jakarta	SK-83/MBU/03/2020 tgl 19 Maret 2020
Noer Fauzi Rachman	Anggota/ Member	Jakarta	SK-126/MBU/04/2020 tgl 22 April 2020
YB. Priyatmo Hadi	Anggota/ Member	Jakarta	SK-238/MBU/07/2020 tgl 14 Juli 2020

Pedoman Kerja Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perhutani telah dilengkapi pedoman kerja pelaksanaan tugasnya yang dimuat dalam Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas dan telah dikukuhkan dengan di tandatangani oleh Dewan Pengawas dan Direksi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang dan dimutakhirkan secara berkala.

Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas merupakan naskah yang telah disepakati Direksi dan Dewan Pengawas dan wajib dijadikan

Board Manual for Supervisory Board

Supervisory Board of Perhutani has been equipped with board manual for the duty implementation as included in Board Manual for Board of Directors and Supervisory Board and ratified as well as signed by the Supervisory Board and Board of Directors. The Manual is prepared according to the prevailing law and regulation and always be reviewed and updated periodically.

The Board Manual for Board of Directors and Supervisory Board is a manuscript that has been agreed by the Board of Directors and Supervisory

pedoman atau rujukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ, agar meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ Perusahaan sejalan dengan penerapan asas-asas GCG untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Pengawas antara lain mencakup:

1. Dewan Pengawas meliputi: Susunan serta Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas; Persyaratan dan kriteria menjadi Anggota Dewan Pengawas; Mekanisme Pengangkatan; Mekanisme Pengunduran Diri; Perangkapan Jabatan Anggota Dewan Pengawas; Penilaian Kinerja Dewan Pengawas; Organ Pendukung Dewan Pengawas.
2. Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi, meliputi: Pertemuan Formal; Pertemuan Informal; Komunikasi Formal; Komunikasi Informal.
3. Tindakan Tertentu Perusahaan meliputi: Transaksi Material; Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan; Transaksi Benturan Kepentingan; Pertanggungjawaban Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Tugas Dewan Pengawas:

1. Melakukan Pengawasan terhadap kebijakan Pengurusan dan jalannya Pengurusan pada umumnya baik

Board and shall be used as guidance or reference in implementing main duties and work function of each organ, to improve quality and effectiveness of work relation among the Company's Organs to be in line with GCG principles implementation to achieve Vision and Mission of the Company. The Manual regulates various aspects of the Supervisory Board including:

1. Supevisory Board, including: Composition and Duty and Authority of Supervisory Board; Requiremetns and criteria to be appointed as Supervisory Board member; Appointment mechanism; Concurrent position of the Supervisory Board member; Supervisory Board performance assessment; Supporting Organs under Supervisory Board.
2. Supervisory Board and Board of Directors Work Relation Mechanism: formal meeting; non-formal meeting; formal communication; non-formal communication.
3. Specific corporate action, including: material transaction; affiliated transaction and conflict of interest in specific transaction; affiliated transaction and conflict of interest; conflict of interest transaction; Board of Directors accountability.

Duty and Responsibility of Supervisory Board

Supervisory Board performs the duty and responsibility independently and not involved in decision-making related to operational activity excet other issues as stipulated in the Articles of Association and prevailing Law.

a. Duty of Supervisory Board:

1. Perform monitoring upon managerial policy and general managerial pracatice both regarding the Company or its

mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
2. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

b. Wewenang Dewan Pengawas:

1. Melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
8. Membentuk komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu, dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;

business, which are done by the Board of Directors; and
2. Provide advise to the Board of Directors including Monitoring on implementation of the Company's Long-Term Plan, Work and Budget Plan, Articles of Association, Ministerial Decree, and provisions of the Law for the Company's interests according to the Company's purpose and objectives.

b. Authority of Supervisory Board:

1. Examine books, letters and other documents, check cash for verification purposes and other securities, and check assets of the Company;
2. Entering the yard, building and office used by the Company;
3. Request an explanation from the Board of Directors and/orother Executives regarding all issues related to the management of the Company;
4. Acknowledge all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Supervisory Board meeting;
6. Appoint and dismiss the Secretary of the Supervisory Board if deemed necessary;
7. Temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of this Government Regulation;
8. Establish a committee other than the audit committee, if deemed necessary by taking into account the Company's ability;
9. Hire experts for certain matters and within a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary;

10. Melakukan tindakan Pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
12. Melaksanakan kewenangan Pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Menteri.

10. Perform managerial activity in the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of this Government Regulation;
11. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed; and
12. Implementing other supervisory authorities insofar as they do not conflict with the provisions of legislation, articles of association, and/or ministerial decisions.

Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab secara internal agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatan berjalan efektif. Berikut pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas:

The Supervisory Board performs division of duty and responsibility internally to enable effective supervisory and advisory functions implementation. Division of the Supervisory Board duty and responsibility is as follows:

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS
Division of the Supervisory Board Duty and Responsibility

Nama Name	**Jabatan** Position	**Tugas** Duty	
Bambang Hendroyono	Ketua Dewan Pengawas Chairman of Supervisory Board	Melakukan koordinasi dengan segenap anggota Dewan Pengawas maupun perangkat Dewan Pengawas berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas	Perform coordination with the Supervisory Board members and organs under the Supervisory Board related to duty and authority of Supervisory Board.
Komaruddin	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	1. Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Hukum serta Keamanan dan Perlindungan Hutan. 2. Sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko Perum Perhutani	1. Handle activities related to the duties and authorities of the Supervisory Board, especially in the fields of Law and Forest Security and Protection. 2. As Chairman of the Risk Management Committee of Perum Perhutani
Chalid Muhammad	Anggota Dewan Pengawas Independen Independent Member of Supervisory Board	1. Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Keuangan, RKAP & RJPP, Laporan Manajemen, Pemeriksaan Umum dan Khusus, Pengendalian Internal, Penunjukan KAP, Proses Audit Laporan Keuangan. 2. Sebagai Ketua Komite Audit Perum Perhutani	1. Handling activities related to the duties and authorities of the Supervisory Board, especially in the fields of Finance, RKAP & RJPP, Management Reports, General and Special Audits, Internal Controls, Appointment of KAP, Financial Report Audit Process 2. As Chairman of the Audit Committee of Perum Perhutani

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS
Division of the Supervisory Board Duty and Responsibility

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duty	
Noer Fauzi Rachman	Anggota Dewan Pengawas Independen Independent Member of Supervisory Board	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Penelitian dan Pengembangan Produksi dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan , Konservasi Lingkungan Hidup , Perhutanan Sosial.	Handling activities related to the duties and authorities of the Supervisory Board, especially in the fields of Research and Development, Production and Management of Forest Resources, Environmental Conservation, Social Forestry.
Bambang Risyanto	Anggota Dewan Pengawas Independen Independent Member of Supervisory Board	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Operasional dan Industri, Pengembangan Bisnis, dan Pemasaran.	Handling activities related to the duties and authorities of the Supervisory Board, especially in the fields of Operations and Industry, Business Development, and Marketing.
Yohanes Babtista Priyatmo Hadi	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	Bertugas menangani kegiatan yang berkiatan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) serta Humas dan Umum.	Handling activities related to the duties and authorities of the Supervisory Board, especially in the fields of Organization, Human Resources (HR), as well as Public Relations and General Affairs.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Pengawas

Program kerja Dewan Pengawas Perum Perhutani tahun 2020 dapat diuraikan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Melaksanakan Rapat dalam rangka review analisis kinerja bulanan Perusahaan, mengetahui perkembangan kondisi serta masalah-masalah aktual yang dialami perusahaan termasuk pemberian nasihat/ saran kepada Direksi. Rapat Dewan Pengawas terdiri dari Rapat Internal, Rapat Gabungan Dengan Direksi, Rapat Pembahasan Bersama dengan Pemilik Modal serta Rapat Lain dengan Pihak Luar yang diadakan sesuai dengan kebutuhan.
b. Melaksanakan kegiatan kunjungan ke lapangan guna mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih akurat/jelas mengenai bidang atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian.
c. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan, kompetensi dan wawasan dalam bentuk mengikuti/ menghadiri Pelatihan,

Supervisory Board Work and Budget Plan (RKA)

Work Plan of Perum Perhutani Supervisory Board in 2020 is described principally, as follows:

a. Organize Meetings in the context of reviewing the Company's monthly performance analysis, knowing the progress of the conditions and actual problems experienced by the company including providing advice/ advice to the Board of Directors. Supervisory Board meetings include of Internal Meetings, Joint Meetings with Directors, Joint Discussion Meetings with Capital Owners and Other Meetings with External Parties that is held as needed.
b. Perform official visits to obtain a more accurate/clear picture and information about the fields or things that need attention.
c. Perform activities to increase knowledge, competence and insight in the form of attending Training, Seminars, Workshops, or

Seminar, Workshop atau pertemuan ilmiah.

d. Melakukan konsultasi atas inisitatif Dewan Pengawas atau undangan dari Pemilik Modal (Kementerian BUMN) atas hal-hal yang dianggap penting oleh Dewan Pengawas atau Pemilik Modal guna kelancaran jalannya operasi perusahaan.

e. Melakukan pengawasan dan pemberian saran/masukan/arahan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan, antara lain menyangkut:
   1. Perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang berdampak pada usaha dan kinerja perusahaan.
   2. Respon/tindak lanjut atas saran, permasalahan atau keluhan dari *stakeholder*.
   3. Kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.
   4. Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.
   5. Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
   6. Kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya.
   7. Kebijakan mutu dan pelayanan.
   8. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
   9. Transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Pengawas atau Pemilik Modal.
   10. Proses pengusulan dan penunjukan auditor eksternal.
   11. Efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah pengaduan yang berkaitan dengan BUMN.
   12. Kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.
   13. Pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemilik Modal.

scientific meetings.

d. Conduct consultations on the initiative of the Supervisory Board or invitation from the Capital Owner (Ministry of BUMN) on issues that are deemed important by the Supervisory Board or Capital Owner for the smooth running of the company's operations.

e. Supervise and provide advice/input/direction on management policies and the course of management of the Company, including concerning:
   1. Changes in the business environment and problems that affect the business and performance of the company.
   2. Response/follow-up on suggestions, problems or complaints from stakeholders.
   3. Company information technology system policies and their implementation.
   4. Policy and implementation of career development.
   5. Accounting policies and preparation of financial statements in accordance with Financial Accounting Standards (SAK).
   6. Policies for the procurement of goods and services and their implementation.
   7. Quality and service policies.
   8. Compliance with laws and agreements and agreements with third parties.
   9. Transactions or actions of the Board of Directors within the scope of the authority of the Supervisory Board or Capital Owner.
   10. The process of proposing and appointing an external auditor.
   11. Effectiveness of the implementation of external and internal audits as well as the implementation of review of complaints relating to SOEs.
   12. Policies and implementation of management of subsidiaries/joint ventures.
   13. Monitoring Board of Directors performance and reporting to Capital Owners.

14. Penelaahan usulan remunerasi Direksi.
15. Pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengawas.

f. Menyampaikan pendapat/ tanggapan/ masukan kepada Pemilik Modal atas Laporan Manajemen berkala, Laporan Tahunan dan Usulan RKAP dan RJPP.
g. Menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Dewan Pengawas.
h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan.
i. Pemantauan atas Tindak Lanjut Keputusan/ Arahan Pemilik Modal dan Hasil/Temuan Audit Internal dan Eksternal.
j. Melaksanakan Kegiatan sosial dan kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka membangun hubungan yang harmonis dengan stakeholders Perum Perhutani dalam membantu Direksi menyelesaikan persoalan tertentu yang dihadapi perusahaan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 bahwa semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Kegiatan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas senantiasa menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan dan penasihatan atas keberlangsungan Perusahaan. Dewan Pengawas telah merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2020 sebagai wujud dari implementasi tugas dan tanggung jawabnya terhadap Perusahaan.

Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Tahun 2020

Dewan Pengawas Perhutani dalam menjalankan tugas pengawasan dan penasehatan

14. Review of the proposed remuneration of the Board of Directors.
15. Measurement and assessment of the performance of the Supervisory Board

f. Deliver opinions/responses/input to the Capital Owner for periodic Management Reports, Annual Reports and Proposed RKAP and RJPP.
g. Prepare and submit the Annual Work Program along with the Supervisory Board Budget Plan.
h. Compile and submit the Supervision Task Report.
i. Monitoring of Follow-Up of Capital Owner's Decision/Direction and Results/Findings of Internal and External Audit.
j. Carrying out social activities and other activities deemed necessary in order to build a harmonious relationship with stakeholders of Perum Perhutani in helping the Board of Directors solve certain problems experienced by the company.

In accordance with the provisions in Article 64 of Government Regulation Number 72 of 2010, explaining all costs required to carry out the duties of the Supervisory Board are borne by the company and are clearly stated in the Company's Work and Budget Plan

Supervisory Board Activity

Supervisory Board always maintains accountability of supervisory and advisory duty impelmentation on the Company's sustainability. The Supervisory Board had implemented the Work and Budget Plan for 2020 as actualization of duty and responsibility implementation to the Company.

Approval and Recommendations of The 2020 Board of Supervisors

The Supervisory Board of Perhutani in carrying out its supervisory and advisory duties includes

diantaranya melakukan telaah atas usulan dan tindakan Direksi untuk memberikan persetujuan serta rekomendasi sebagai upaya perbaikan sesuai tata kelola yang baik guna mendorong peningkatan kinerja Perusahaan.

reviewing the recommendations and actions of the Board of Directors to provide approval and recommendations as an effort to improve according to good governance in order to encourage the improvement of the Company's performance.

Selama tahun 2020, Dewan Pengawas telah memberikan berbagai persetujuan yang bersifat pengawasan dan penasehatan antara lain:

During 2020, the Supervisory Board has given various supervisory and advisory approvals, including:

PERSETUJUAN YANG BERSIFAT PENGAWASAN DAN PENASEHATAN DI TAHUN 2020

Supervisory Board Advisory Approvals in 2020

No.	Keterangan Information	
1.	Tanggapan/Pendapat/Saran Dewan Pengawas atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).	Responses/Opinions/Suggestions of the Supervisory Board on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Company's Long-Term Plan (RJPP).
2.	Tanggapan/Pendapat/Saran Dewan Pengawas terkait pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemilik Modal.	Responses/Opinions/Suggestions of the Supervisory Board regarding the monitoring of the performance of the Board of Directors and reporting to the Capital Owners.
3.	Penyampaian laporan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengawas.	Submission of measurement and assessment reports on performance of the Supervisory Board.
4.	Penyampaian Program kerja dan Anggaran Dewan Pengawas.	Submission of the work program and budget of the Supervisory Board.
5.	Proses pengusulan dan penunjukan auditor eksternal	Process for nominating and appointing external auditors
6.	Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).	Accounting policies and preparation of financial statements are in accordance with Financial Accounting Standards (SAK).
7.	Tanggapan/Pendapat/Saran terkait transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Pengawas atau Menteri BUMN (Pemilik Modal).	Responses/Opinions/Suggestions related to transactions or actions of the Board of Directors within the scope of authority of the Supervisory Board or the Minister of SOEs (Capital Owners).
8.	Tindak lanjut Permasalahan SDM	Follow-up on Human Resources (HR) Issues
9.	Persetujuan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Cuti Direksi	Approval of Overseas Official Travel and Board of Directors Leave
10.	Tanggapan/Pendapat/Saran terkait permasalahan Penting di Perusahaan.	Feedback/Opinions/Suggestions related to Important issues in the Company.
11.	Keputusan Dewan Pengawas :	Decision of the Supervisory Board:
	a) Surat Keputusan No. 01/DWAS-PHT/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Perhutani.	a) Decree No. 01/DWAS-PHT/2020 dated February 12, 2020 regarding the Appointment of the Acting President Director of Perum Perhutani.
	b) Surat Keputusan No. 02/DWAS-PHT/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Pengawas Perum Perhutani.	b) Decree No. 02/DWAS-PHT/2020 dated April 1, 2020 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Audit Committee of the Supervisory Board of Perum Perhutani.

PERSETUJUAN YANG BERSIFAT PENGAWASAN DAN PENASEHATAN DI TAHUN 2020
Supervisory Board Advisory Approvals in 2020

No.	Keterangan Information	
	c) Surat Keputusan No. 03/DWAS-PHT/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Pengawas Perum Perhutani.	c) Decree No. 03/DWAS-PHT/2020 dated April 14, 2020 regarding the Division of Duties of the Supervisory Board of Perum Perhutani.
	d) Surat Keputusan No. 04/DWAS-PHT/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pembagian Tugas Kesekretariatan Dewan Pengawas Perum Perhutani.	d) Decree No. 04/DWAS-PHT/2020 dated April 14, 2020 regarding the Division of Secretariat Duties of the Supervisory Board of Perum Perhutani.
	e) Surat Keputusan No. 05/DWAS-PHT/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komite Manajemen Risiko Dewan Pengawas Perum Perhutani.	e) Decree No. 05/DWAS-PHT/2020 dated April 14, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of the Chairperson of the Risk Management Committee of the Perum Perhutani Supervisory Board.
	f) Surat Keputusan No. 06/DWAS-PHT/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Dewan Pengawas Perum Perhutani.	f) Decree No. 06/DWAS-PHT/2020 dated April 28, 2020 regarding the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee of the Supervisory Board of Perum Perhutani.
	g) Surat Keputusan No. 07/DWAS-PHT/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi Dan Remunerasi Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.	g) Decree No. 07/DWAS-PHT/2020 dated 28 April 2020 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee for State Forestry Public Companies (Perum).
	h) Surat Keputusan No.08/DWAS-PHT/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Pengawas Perum Perhutani.	h) Decree No.08/DWAS-PHT/2020 dated June 2, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Audit Committee of the Supervisory Board of Perum Perhutani.
	i) Surat Keputusan No. 09/DWAS-PHT/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko Dewan Pengawas Perum Perhutani.	i) Decree No. 09/DWAS-PHT/2020 dated June 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Risk Management Committee of the Supervisory Board of Perum Perhutani.
	j) Surat Keputusan No. 10/DWAS-PHT/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komite Manajemen Risiko Dewan Pengawas Perum Perhutani	j) Decree No. 10/DWAS-PHT/2020 dated June 22, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of the Chairperson of the Risk Management Committee of the Perum Perhutani Supervisory Board.
	k) Surat Keputusan No. 11/DWAS-PHT/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi Dewan Pengawas Perum Perhutani.	k) Decree No. 11/DWAS-PHT/2020 dated June 22, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Perum Perhutani.
	l) Surat Keputusan No. 11-B/DWAS- PHT/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Pengawas.	l) Decree No. 11-B/DWAS- IPM/2020 dated 20 July 2020 regarding the Division of Duties of the Supervisory Board.
	m) Surat Keputusan No. 12/DWAS- PHT/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Operasi Perum Perhutani.	m) Decree No. 12/DWAS- IPM/2020 dated September 21, 2020 regarding the Appointment of the Acting Director of Operations of Perum Perhutani.
	n) Surat Keputusan No. 13/DWAS-PHT/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Perum Perhutani.	n) Decree No. 13/DWAS-PHT/2020 dated November 16, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Supervisory Board of Perum Perhutani.

Program Pengenalan Bagi Anggota Dewan Pengawas

Program Pengenalan bagi Dewan Pengawas yang baru menjabat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Dewan Pengawas Baru terkait kondisi-kondisi yang ada dalam Perusahaan sehingga Dewan Pengawas Perusahaan mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas Perusahaan baik secara organisasi maupun operasional. Penanggung jawab Program Pengenalan bagi anggota Dewan Pengawas Baru berada pada fungsi Sekretaris Perusahaan.

Sepanjang tahun 2020, telah dilakukan proses pengenalan Perusahaan kepada Dewan Pengawas Baru, dibuktikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh para Dewan Pengawas. Materi Program Pengenalan tersebut setidak-tidaknya meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan;

Introduction Program for Members of The Board of Supervisory

The Introduction Program for the newly appointed Supervisory Board aims to provide an understanding to the New Supervisory Board regarding the conditions that exist within the Company so that the Company's Supervisory Board gains a comprehensive understanding of the Company both organizationally and operationally. The person in charge of the Introduction Program for members of the New Supervisory Board is in the function of the Corporate Secretary.

Throughout 2020, the Company introduced the Company to the New Supervisory Board is evidenced by the Minutes signed by the Supervisory Board. The Introductory Program materials at least include:

1. Implementation of GCG principles;
2. An overview of the Company with regard to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Supervisory Board and the Board of Directors as well as things that are not allowed;
5. Legislation related to the Company's business activities;

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Tahun 2020

Perhutani memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Dewan Pengawas merupakan upaya *update knowlegde* untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penasihatan dalam pengelolaan Bisnis Perusahaan.

Competence Development of The Supervisory Board In 2020

Perhutani is committed to creating superior and competitive human resources by conducting competency development programs for all employees. Competency development of the Supervisory Board is an effort to update knowledge to support the implementation of supervisory and advisory duties in managing the Company's Business.

Penilaian atas Kinerja Masing-Masing Komite yang berada di bawah Dewan Pengawas

Sepanjang tahun 2020, komite-komite di bawah Dewan Pengawas telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite-komite di bawah Dewan Pengawas mencakup:

1. Komite Audit
2. Komite Manajemen Risiko

Dewan Pengawas melaksanakan penilaian terhadap komite-komite tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria
   Kriteria penilaian komite-komite di bawah Dewan Pengawas berdasarkan kepatuhan terhadap pedoman dan tata tertib kerja serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.
2. Proses
   Penilaian dilakukan oleh Dewan Pengawas dan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Hasil
   Dewan Pengawas secara periodik melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas menilai bahwa selama tahun 2020 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif.

Assessment of the Performance of Each Committee under the Supervisory Board

Throughout 2020, the committees under the Supervisory Board have carried out their functions and responsibilities well. The committees under the Supervisory Board include:

1. Audit Committee
2. Risk Management Committee

The Supervisory Board carries out an assessment of these committees with the following provisions:

1. Criteria
   The evaluation criteria for the committees under the Supervisory Board are based on compliance with the guidelines and work procedures as well as the work realization/ implementation of each committee's duties.
2. Process
   The assessment is carried out by the Supervisory Board and is carried out 1 (one) time in 1 (one) year..
3. Results
   The Supervisory Board periodically evaluates the effectiveness of the performance of the committees under the Supervisory Board. The Supervisory Board considers that during 2020 the committees have carried out their duties and responsibilities quite effectively.

Dewan Pengawas Independen

Independent Supervisory Board

Independensi merupakan aspek yang harus diperhatikan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. Hal tersebut penting agar pengelolaan Perusahaan dilakukan semata-mata untuk kepentingan mencapai tujuan Perusahaan.

Independence is an aspect that must be considered to minimize the possibility of a conflict of interest. It is important that the management of the Company is carried out solely for the benefit of achieving the Company's objectives.

Pengawas Independen dan Independensi Dewan Pengawas

Pengawas Independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perhutani, yang dapat mempengaruhi kemampuanya untuk bertindak independen.

Semua Pengawas pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain.

Independent Supervisor and Independent Supervisory Board

Independent Supervisor is a member of the Supervisory Board who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the Supervisory Board, members of the Board of Directors and/or controlling shareholder or relationship with Perhutani, which may affect their ability to act independently.

All supervisors are essentially independent and are expected to be able to carry out their duties independently, solely for the benefit of the company, regardless of the influence of various parties who have interests that may conflict with the interests of other parties

Kriteria Independensi

Dewan Pengawas independen memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya anggota Direksi dan/atau Pemilik Modal pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuanya untuk bertindak independen.
2. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Umum.
3. Memahami peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan Core Business Perusahaan.
4. Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan Dewan Pengawas/Pengawas perusahaan pemasok dan pelanggan signifikan dari Perusahaan atau perusahaan afiliasinya.
5. Mantan anggota Direksi dapat menjadi anggota Dewan Pengawas/Pengawas setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
6. Bukan merupakan penasihat profesional Perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok usaha dengan Perusahaan.

Sampai dengan Desember 2020 Perhutani memiliki 3 (tiga) orang Dewan Pengawas Independen yaitu Chalid Muhammad, Noer Fauzi Rachman dan Bambang Risyanto . Dalam menerapkan Prisip Tata Kelola Perusahaan yang baik Dewan Pengawas setiap tahun selalu memperbaharui Pakta Integritas dan dalam memberikan Persetujuan atas Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

Independency Criteria

Independent Supervisory Board shall fulfill the requirements, at least as follows:

1. Supervisory Board Member without financial, managerial, shares ownership and/or other family affiliations with other Sueprvisory Board Members, Board of Directors members and/or controlling shareholders or any affiliation with the respective SOEs, that may influence his/her independency.
2. Understand the law concerning Perusahaan Umum.
3. Understand the law, mainly related to Core Business of the Company.
4. Not being the significant suppliers and customer sor appointed in Executives and Board of Commissioners/Supervisory Board position in the suppliers company and significant customers of the Company or its affiliated companies.
5. Former Board of Directors members is eligible to be appointed as Board of Commissioners/ Supervisory Board Member after no longer serving as Board of Directors member minimum within 1 (one) year.
6. Not serving as professional advisory of the Company or other companies under the same business group with the Company.

As of December 2020, Perhutani has 3 (three) Independent Supervisory Boards, namely Chalid Muhammad, Noer Fauzi Rachman and Bambang Risyanto. In implementing the Principles of Good Corporate Governance, the Supervisory Board always renews the Integrity Pact every year and in providing Approval to the Proposed Actions of the Board of Directors which must obtain a recommendation from the Supervisory Board.

Hubungan Afiliasi

Affiliated Relationship

Hubungan afiliasi meliputi hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Dewan Pengawas dengan sesama anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi serta Pemilik Modal Perusahaan, hubungan kepemilikan saham dan hubungan kepengurusan (rangkap jabatan) pada perusahaan lain. Hubungan Keluarga dan Keuangan Dewan Pengawas selama periode tahun 2020 sebagai berikut:

Affiliation relationships include family and financial relationships between members of the Supervisory Board and fellow members of the Supervisory Board and/or members of the Board of Directors as well as the Company's Capital Owners, share ownership relationships and management relationships (concurrent positions) in other companies. Family Relations and Financial Supervisory Board for the 2020 period, as follows:

HUBUNGAN KELUARGA DAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
Family Relations and Finances of Supervisory Board Members

Nama Name	**Hubungan Keluarga Dengan** Family Affiliation With			**Hubungan Keuangan Dengan** Financial Affiliation With		
	Dewan Pengawas Supervisory Board	**Direksi** Board of Directors	**Pemegang Saham** Saham Shareholders	**Dewan Pengawas** Supervisory Board	**Direksi** Board of Directors	**Pemegang Saham** Saham Shareholders
Bambang Hendroyono	Nihil /None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None
Bambang Risyanto	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None
Chalid Muhammad	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None
Komaruddin Simanjuntak	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None
Noer Fauzi Rachman	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None
YB. Priyatmo Hadi	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None	Nihil/None

Seluruh anggota Dewan Pengawas telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada tahun 2020, baik kepemilikan pada Perhutani maupun pada perusahaan lainnya dan diperbaharui setiap tahunnya. Berikut tabel kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas Perhutani:

All of the Supervisory Board members have disclosed their shares ownership in 2020 both ownership at Perhutani or other companies and renewed every year. Perhutani's Supervisory Board members shares ownership is as follows:

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS
Supervisory Board Shares Ownership

Nama Name	**Kepemilikan Saham di Perhutani** Shares Ownership in Perhutani	**Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain** Shares Ownership in Other Companies
Bambang Hendroyono	Nihil / None	Nihil / None
Bambang Risyanto	Nihil / None	Nihil / None
Chalid Muhammad	Nihil / None	Nihil / None
Komaruddin Simanjuntak	Nihil / None	Nihil / None
Noer Fauzi Rachman	Nihil / None	Nihil / None
YB. Priyatmo Hadi	Nihil / None	Nihil / None

Perangkapan Jabatan Anggota Dewan Pengawas

Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan GCG, Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas Perhutani.

Di dalam menduduki jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas Perhutani, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap Jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mempunyai Jabatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/ kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau,
2. Mempunyai Jabatan di Perusahaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan;
3. Apabila seorang anggota Dewan Pengawas merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan lain, maka penyimpangan tersebut hanya diperbolehkan untuk satu jabatan anggota Dewan Pengawas.

Concurrent Position of The Supervisory Board Member

All of the Supervisory Board Members do not serve in concurrent position that is prohibited under the prevailing law on GCG implementation, Articles of Association and Board Manual of Board of Directors and Supervisory Board in Perhutani.

In serving the position as Supervisory Board member in Perhutani is prohibited to concurrently serve in other positions, with requirements, as follows:

1. Serving in any position that violates the law, committee of political party and/or mayor/ vice mayor or the candidates; and/or
2. Serving in any position in other companies that may cause direct and non-direct conflict of interest with the Company's interest;
3. If a Supervisory Board member is serving as Supervisory Board member in other companies, the discretion is only allowed for one Supervisory Board member position.

Direksi

Board of Directors

Dalam pengangkatan Anggota Direksi, Perusahaan mempertimbangkan kriteria dan persyaratan serta kelulusan dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* oleh fungsi *Talent Pool* yang diselenggarakan oleh Pemilik Modal.

In the appointment of the Board of Directors members, the Company considers the criteria and requirements as well as passing the Fit and Proper Test by the Talent Pool function organized by the Shareholders.

Persyaratan Direksi

Dengan mengacu pada Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas, Perhutani telah mengatur persyaratan kepatutan atau syarat formil yang harus dimiliki oleh calon anggota Direksi, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan materil untuk menjadi Direksi Perhutani adalah seorang Direksi wajib memiliki:

Board of Directors Requirements

By referring to the Board Manual for Board of Directors and Supervisory Board, Perhutani has regulated appropriateness or formal requirements that shall be fulfilled by a Board of Directors member candidate, which is individual with capability to perform legal action, unless within 5 (five) years prior the appointment has been:

1. Declared bankrupt;
2. Appointed a member of the Board of Directors or member of the Supervisory Board who is declared guilty in causing a BUMN, Subsidiary and/or Company to be bankrupt;
3. Punished for committing a criminal offense that is detrimental to the state's finances, SOEs, Subsidiaries, Companies, and/or related to the financial sector..

Material requirement for becoming a Board of Directors in Perhutani regulates the Board of Directors shall have:

1. Pengalaman atau rekam jejak yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
2. Keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, pemahaman yang baik terhadap manajemen dan tatakelola perusahaan dan kemampuan untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan;
3. Integritas, dalam artian calon anggota Direksi tersebut tidak pernah terlibat melakukan perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan, perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik);
4. Kepemimpinan dalam artian mempunyai kemampuan untuk memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan, membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan agar mampu mewujudkan tujuan Perusahaan.
5. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan yang bersangkutan Pemenuhan persyaratan

1. Experience or track record that shows the success in managing SOEs, BUMN Subsidiaries, Companies and/or those related to the financial sector;
2. Adequate expertise and knowledge in the field of business of the Company, good understanding of management and corporate governance and the ability to decide and implement strategic policies in the context of developing the Company's business;
3. Integrity, in the sense that the prospective member of the Board of Directors has never been involved in doing deviant acts and practices in the place where he/she works before nominating (dishonest), an act of injury that can be categorized as not meeting the agreed commitments at the place concerned working before nomination, actions categorized as being able to provide unlawful benefits to the concerned and/or other parties prior to nomination, actions that can be categorized as violations that can be categorized as violations of the provisions with the principles of healthy corporate management (behaving non- well);
4. Leadership, defines as a capability to formula teandarticulatethecompany'svision, generate enthusiasm (give new energy) and provide motivation to officials and employees to be able to realize the Company's goals.
5. Having a strong will (enthusiasm) and high dedication to advance and develop the Company concerned Fulfillment of the formal requirements, evidenced by a

formil tersebut, dibuktikandengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

Selain kriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas, calon anggota Direksi juga disyaratkan:

1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dan calon/anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten;
2. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/ atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
3. Tdak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
4. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya;
5. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter
6. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

Pengangkatan Direksi

Pengangkatan anggota Direksi Perusahaan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Direksi yang akan diangkat harus lulus dalam *Fit & Proper Test* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan GCG.

statement signed by prospective members of the Board of Directors and the letter is kept by the Company.

In addition to the criteria mentioned above, the Board of Directors members candidates are also required:

1. Not being a member of a political party and/ or a legislative candidate and/or legislative member. Candidates for legislative members or legislative members consist of candidates/ members of the DPR, DPD, Provincial/ City/ Regency DPRD;
2. Not a Mayor/Vice Mayor Candidate and/or Mayor/Vice Mayor.
3. Not serving as Board of Directors member in the respective SOEs for 2 (two) consecutive periods;
4. Dedicated and allocate full time to do their jobs; and
5. Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that can hinder the implementation of duties as a Director of SOEs), as evidenced by a health certificate from the Doctor
6. Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that can hinder the implementation of duties as a member of the Board of Directors as evidenced by a health certificate from a government hospital.

Board of Directors Appointment

Appointment of the Board of Directors members in the Company refers to GCG principles, such as transparency, independency, accountability, responsibiity and fairness. Board of Directors who will be appointed shall pass Fit & Proper Test according to prevailing law and GCG provisions.

Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Direksi

Proses penentuan calon anggota Direksi dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip GCG dan melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Pemilik Modal.Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit & Proper Test)* Direksi yang menjabat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Board of Directors Fit and Proper Test

Board of Directors members candidate stipulation process is done based on GCG principles and passed the Fit and Proper Test assessment done by the Capital Owner. Result of Fit and Proper Test for the Board of Directors serving in 2020 is as follows:

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN KOMPOSISI DIREKSI TAHUN 2020
Board of Directors Fit and Proper Test in 2020

Nama Name	Domisili Domicile	Status Status	Pelaksana Fit & Proper Test Fit & Proper Test Implementation
Wahyu Kuncoro	Jakarta	Lulus / Pass	Kementrian BUMN / Ministry of SOEs
Eko Wahyudi	Jakarta	Lulus / Pass	Kementrian BUMN / Ministry of SOEs
Kemal Sudiro	Jakarta	Lulus / Pass	Kementrian BUMN / Ministry of SOEs
Ahmad Ibrahim	Jakarta	Lulus / Pass	Kementrian BUMN / Ministry of SOEs
Natalas Anis Harjanto	Jakarta	Lulus / Pass	Kementrian BUMN / Ministry of SOEs

Komposisi Direksi

Pemilik Modal menetapkan susunan komposisi Direksi setelah melalui seleksi yang ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Susunan lengkap Direksi Perhutani periode per 31 Desember 2020 yang ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Pemilik Modal sebagai berikut:

Board of Directors Composition

Capital Owner stipulates Board of Directors composition after passed a tight selection according to the prevailing regulation. Complete composition of Board of Directors in Perhutani as of December 31, 2020 period as stipulated in the Capital Owners Resolutions Deed, as follows:

KOMPOSISI DIREKSI
Board of Directors Composition

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Decree	Periode Period
Wahyu Kuncoro	Direktur Utama President Director	SK-55/MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020	2020 - Sekarang 2020 - now
Eko Wahyudi	Direktur Keuangan Director of Finance	SK-255/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019	2019 - Februari 2021 2019 - February 2021
Kemal Sudiro	Direktur SDM, Umum & IT Director of HR, General Affairs and IT	SK-74/MBU/02/2019 tanggal 25 Maret 2019	2019 - Sekarang 2019 - now

KOMPOSISI DIREKSI
Board of Directors Composition

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Decree	Periode Period
Ahmad Ibrahim	Direktur Pengembangan Bisnis & Pemasaran Director of Business Planning and Development	SK-55/MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020	2020 - Sekarang 2020 - now
Natalas Anis Harjanto	Direktur Perhutanan Sosial & Plt. Direktur Operasi Director of Social Forestry & Plt. Operations Director	SK-55/MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020 SK-12/DWAS-PHT/2020 tanggal 21 September 2020	2020 - Sekarang 2020 - now

Pedoman dan Tata Kerja Direksi

Direksi Perhutani telah memiliki pedoman kerja yang secara khusus diuraikan dalam Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas *(Board Manual)*. Selain itu, Direksi juga mengacu pada Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan tugas Direksi. Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen tersebut senantiasa ditinjau ulang dan dimutakhirkan secara berkala.

Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Direksi antara lain mencakup ketentuan mengenai:

1. **Direksi, meliputi:**
   - Susunan Direksi
   - Tugas dan Wewenang Direksi
   - Pembagian tugas masing-masing Direksi
   - Pengangkatan Anggota Direksi
   - Mekanisme Pengangkatan Anggota Direksi
   - Pemberhentian Anggota Direksi
   - Pengunduran Diri Anggota Direksi
   - Perangkapan Jabatan Anggota Direksi
   - Rapat dan Pengambilan Keputusan Direksi
   - Ketentuan Ijin Cuti Direksi
   - Penilaian Kinerja Direksi
   - Perbuatan Direksi Yang Memerlukan

Board Manual for Board of Directors

Board of Directors of Perhutani has a work manual that is specifically described in the Board Manual for Board of Directors and Supervisory Board. In addition, the Board of Directors also refers to the Articles of Association, Code of Corporate Governance and other regulations related to the Board of Directors duty implementation. Board Manual for the Board of Directors and Supervisory Board is prepared based on prevailing law and regulation. The document is always be reviewed and updated regularly.

Board Manual for the Board of Directors and Supervisory Board regulates various aspects about the Board of Directors namely including the regulation on

1. **Board of Directors, including:**
   - Board of Directors composition
   - Board of Directors duty and authority
   - Division of BoD Individual Duty
   - BoD Members appointment
   - BoD Appointed mechanism
   - BoD Members Dismissal.
   - BoD Members Resignation.
   - BoDs Members Concurrent Position.
   - BoDs Meeting and Board of Directors Decision-Making.
   - BoDs Leaves Permit Regulation.
   - BoDs Action that Requires Written

Persetujuan Tertulis Dewan Pengawas
- Organ Pendukung Direksi

2. Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi, meliputi:
- Pertemuan Formal;
- Pertemuan Informal;
- Komunikasi Formal;
- Komunikasi Informal.

3. Tindakan Tertentu Perusahaan, meliputi:
- Transaksi Material
- Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
- Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
- Transaksi Benturan Kepentingan
- Pertanggungjawaban Direksi

Approval from Supervisory Board.
- BoDs Supporting Organs.

2. Supervisory Board and Board of Directors Work Relation Mechanism, including:
- Formal Meeting;
- Non-Formal Meeting;
- Formal Communication;
- Non-Formal Communication.

3. Specific Corporate Action, including:
- Material Transaction
- Affiliated Transaction and Conflict of Interest in Specific Transaction
- Affiliated Transaction and Conflict of Interest
- Conflict of Interest Transaction
- Board of Directors Accountability

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi dijabarkan secara khusus dalam Board Manual sebagai acuan pengelolaan Perusahaan bagi Direksi. Selain itu, Board Manual menjadi bagian dari kebijakan pendukung dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi yang juga berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Board Manual yang ditetapkan, tugas pokok Direksi secara kolegial melalui Rapat Direksi berwenang untuk:

1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusahaan;

Board of Directors Duty and Responsibility

Duty and responsibility of the Board of Directors are explained specifically in Board Manual for the Board of Directors and Supervisory Board as reference of the Company's management for the Board of Directors. In addition, Board Manual for the Board of Directors and Supervisory Board also becomes part of supporting policy in ensuring GCG implementationinallorganization levels and stages that also upholds and refers to the Articles of Association as well as internal regulation and the prevailing law.

According to the stipulated Board Manual for Board of Directors and Supervisory Board, main duty of the Board of Directors collegially through the board of Directors holds the authority to:

1. Lead and manage the Company according to the purpose and objectives of the Company and always attempts to improve efficiency and effectiveness of the Company;

2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
3. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
4. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan;
5. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
6. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan, risalah Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi, risalah Rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain;
7. Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
8. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
9. Menerapkan *good corporate governance* secara konsisten;
10. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan;
11. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian Perusahaan, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
    a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
    c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung

2. Maintain and manage assets of the Company;
3. The Board of Directors is fully responsible to perform its duties on behalf of interests of the Company in achieving its purpose and objectives;
4. Perform their duties with good faith and full responsibility for the interests and business of the Company by coomplying with the laws and regulations;
5. Establish and maintain the Company's books and administration in accordance with the norms that prevail to a Company;
6. Keep at the Company's domicile, minutes of the Joint Meetings of the Supervisory and Board of Directors, minutes of Board of Directors Meetings, annual reports, financial documents, and other documents;
7. Design the accounting system according to the Financial Accounting Standards and based on the internal control principles, especially the management, recording, storage and supervision function;
8. Prepare complete composition of the Company's organization with the job description;
9. Applying good corporate governance consistently;
10. Every member of the Board of Directors is fully responsible personally if the respective member is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company;
11. The Board of Directors members cannot be accounted for the losses of the Company, if the person concerned can prove that:
    a. The loss is not due to an error or negligence;
    b. Has carried out management in good faith and prudence for the interests and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
    c. Do not have a conflict of interest, either directly or indirectly, over management

atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.

12. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi;
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau Menteri;
14. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Pengawas dan Menteri.

Selain tugas pokok di atas, Direksi meliliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Board Manual. Direksi juga membuat laporan harta kekayaan masing-masing dengan cara mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku. Formulir LHKPN harus diisi dengan jujur, benar dan lengkap disertai dengan dokumen pendukung serta menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Koordinator Pengelolaan LHKPN. Sejalan dengan Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing Direksi sesuai bidangnya.

actions that result in losses; and

d. Has taken action to prevent sequence of the loss.

12. Actions taken by the Board of Directors members besides the actions decided by the Board of Directors meeting are the personal responsibility of the person concerned until the action is approved by the Board of Directors meeting;
13. Provide periodic reports in a manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Supervisory Board and/or Minister;
14. Provide an explanation of every issue, which is asked or requested by the Supervisory Board member and the Minister.

In addition to main duties mentioned above, the Board of Directors has the obligations as regulated in the Board Manual for Board of Directors and Supervisory Board (Board Manual). The Board of Directors also prepares individual wealth assets reports by completing the State Official Wealth Report (LHKPN) according to prevailing law. The LHKPN Form shall be completed honesly, correctly and completely equipped with supporting documents and submit to the Commission of Eradication Commission (KPK) through the LHKPN Management Coordinator. According to the Board Manual for Board of Directors and Supervisory Board (Board Manual) that regulates division of duty and responsibility to each Board of Directors according to the field.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

DIREKTUR UTAMA

a. Mengorganisasi visi dan misi Perusahaan secara keseluruhan;
b. Memutuskan dan menentukan kebijakan tertinggi Perusahaan berdasarkan masukan dari anggota Direksi lain melalui Rapat Direksi;
c. Menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan;
d. Mengkoordinir penyiapan Rencana jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya, dan menyampaikan kepada Dewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Mengkoordinir, mengupayakan dan menjamin seluruh fungsi bersinergi dalam mendorong terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan untuk tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan;
f. Menetapkan kebijakan dalam pembuatan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Perusahaan;
h. Membangun budaya Perusahaan yang unggul berdasarkan tata nilai yang telah ditetapkan;
i. Memimpin rapat Direksi dan rapat gabungan dengan Dewan Pengawas secara rutin;
j. Mewakili Perusahaan dalam memberikan penjelasan kepada Anggota Dewan Pengawas dan Menteri apabila diminta yang terkait hal-hal pengurusan Perusahaan;
k. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
l. Melakukan pengawasan, pembinaan Karyawan dan penilaian kinerja terhadap

Board of Directors Individual Duty And Responsibility

PRESIDENT DIRECTOR

a. Organizing the overall vision and mission of the Company;
b. Decide and determine the highest policy of the Company based on input from other members of the Board of Directors through the Board of Directors Meeting;
c. To determine the blue print of the Company's organization;
d. Coordinate the preparation of the Company's Long-term Plan, Company Work Plan and Budget and its amendments, and submit it to the Supervisory Board and the Minister for approval from the Minister in accordance with the provisions of the legislation;
e. Coordinate, seek and ensure that all functions synergize in encouraging the implementation of the Company's business and activities to achieve the Company's goals and objectives;
f. Establish policies in the preparation of annual reports in accordance with the provisions of laws and regulations;
g. Establish policies in an effort to improve the efficiency and effectiveness of the Company's performance;
h. Building a superior corporate culture based on established values;
i. To chair meetings of the Board of Directors and joint meetings with the Supervisory Board on a regular basis;
j. Representing the Company in providing explanations to the Members of the Supervisory Board and the Minister if requested related to matters relating to the management of the Company;
k. Set Your Own Estimated Price (HPS);
l. Supervising, coaching employees and evaluating the performance of their

bawahannya pada jajaran Direktorat Utama;
m. Melakukan upaya-upaya penyederhanaan proses dengan berinovasi termasuk reformasi birokrasi;
n. Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik serta melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan;
o. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Peraturan Nenteri; dan
p. Menjalankan segala tindakan lain yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar, ketetapan Menteri atau peraturan perundang-undangan.

subordinates in the Main Directorate;
m. Make efforts to simplify processes by innovating, including reforms bureaucracy;
n. Develop and implement governance good corporate governance and perform continuous corrective action;
o. Representing the Company both inside and outside the Court regarding all matters and all events with restrictions as regulated in the provisions of laws and regulations, Articles Ministerial Rules and Regulations; and
p. Carry out all other actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company in accordance with the Articles of Association, Ministerial Decrees or laws and regulations

DIREKTUR PENGEMBANGAN BISNIS DAN PEMASARAN

a. Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan penyusunan visi dan misi Perusahaan bidang Direktorat Pengembangan Bisnis dan Pemasaran, Rencana Umum Perusahaan (RUP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Tahunan (RKTP), serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
b. Mengawal biaya dan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan Perusahaan;
c. Menciptakan bisnis yang kompetitif secara efektif dan efisien;
d. Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal baik makro maupun mikro untuk kepentingan perumusan kebijakan, strategi, penyusunan rencana, pengembangan bisnis, dan pemasaran;

BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING DIRECTOR

a. Directing, planning and controlling the preparation of the Company's vision and mission in the fields of the Directorate of Business Development and Marketing, General Corporate Plan (RUP), Company Long Term Plan (RJPP), Annual Work Plan (RKTP), and Corporate Work Plan and Budget (RKAP);
b. Control costs and revenues in accordance with the targets set by the Company;
c. Creating a globally competitive business effective and efficient;
d. Directing, planning and controlling the analysis of the internal and external business environment both macro and micro for the purposes of policy formulation, strategy, planning, business development, and marketing;

e. Mengarahkan dan merencanakan kajian terhadap potensi bisnis dan/'atau melakukan evaluasi terhadap hasil kajian potensi bisnis;
f. Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan perumusan arah kebijakan dan penetapan strategi Pembinaan Anak Perusahaan;
g. Nembangun sinergi bisnis Perusahaan sebagai Induk Holding dengan Anak Perusahaan untuk meningkatkan kinerja sesuai strategi Perusahaan untuk mencapai hasil usaha/bisnis pada seluruh usaha Perusahaan serta melakukan pembinaan teknis terhadap Anak Perusahaan;
h. Menetapkan kebijakan analisa, riset dan pengembangan inovasi strategi pemasaran;
i. Menetapkan kebijakan dalam mengakuisisi pelanggan baru, menjaga serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, dengan menerapkan Customer Relationship Management (CRM);
j. Menetapkan kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengelola kegiatan promosi produk kayu bundar, hasil industri kayu dan non kayu serta jasa lingkungan;
k. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja bidang perencanaan, pemasaran, pengembangan dan sinergi bisnis pada Divisi Regional serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhutani;
l. Mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan pada bidang perencanaan, pengembangan, pemasaran dan sinergi bisnis;
m. Menjamin ketersediaan dan bertanggung jawab atas laporan kinerja Direktorat Pengembabangan Bisnis dan Pemasaran secara periodik kepada Direktur Utama;
n. Melakukan pembinaan Karyawan dan penilaian kinerja terhadap bawahannya pada jajaran Direktorat Pengembangan Bisnis dan Pemasaran;

e. Directing and planning a study of business potential and/or evaluating the results of a business potential study;
f. To direct, plan and control the formulation of policy directions and the establishment of strategies for the Development of Subsidiaries;
g. Build business synergy between the Company as the Holding Parent with Subsidiaries to improve performance according to the Company's strategy to achieve business/business results in all of the Company's businesses as well as provide technical guidance to Subsidiaries;
h. Establish policies for analysis, research and development of marketing strategy innovations;
i. Establish policies in acquiring new customers, maintaining and improving customer satisfaction and loyalty, by implementing Customer Relationship Management (CRM);
j. Establish policies in organizing and managing promotional activities for Log products, wood and non-timber industrial products and environmental services;
k. Monitor and evaluate the implementation of work plans in the fields of planning, marketing, development and business synergy in the Regional Division as well as the Perhutani Research and Development Center;
l. Controlling, monitoring and evaluating the implementation of work in the areas of planning, development, marketing and business synergy;
m. Ensure the availability of and be responsible for the performance reports of the Directorate of Business Development and Marketing periodically to the President Director;
n. Conducting employee development and performance appraisal of their subordinates in the Directorate of Business Development and Marketing;

o. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah/Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
p. Nengembangkan dan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik serta melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan.

o. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Government Regulation/Company Articles of Association and stipulated by the Minister based on the provisions of the legislation; and
p. Develop and implement good corporate governance and take continuous improvement actions.

DIREKTUR OPERASI

a. Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan penyusunan visi dan misi Perusahaan bidang Operasional dan Divisi Regional terkait bidang pengelolaan Sumber Daya Hutan, Produksi dan Industri Hasil Hutan, Ecotourism, Agroforestry dan Jasa Lingkungan termasuk pada hutan lindung, Rencana Umum Perusahaan (RUP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Tahunan (RKTP), serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
b. Mengarahkan pengendalian pelaksanaan kebijakan, strategi dan program kerja disertai penyusunan prosedur kerja dan standar biaya bidang Sumber Daya Hutan, Produksi dan Industri Hasil Hutan, Ecotourism, Agroforestry dan Jasa Lingkungan termasuk pada hutan lindung;
c. Mengarahkan pengendalian kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu untuk kepastian pasokan bahan baku industri, sesuai dengan kapasitas, mutu, tata waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan;
d. Mengarahkan pengendalian kegiatan pengelolaan proses produksi pada industri secara efektif, efisien dan memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi Perusahaan;
e. Merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan Operation Excellence Program,

OPERATIONS DIRECTOR

a. Directing, planning and controlling the preparation of the Company's vision and mission in the field of Operations and Regional Divisions related to the management of Forest Resources, Production and Industry of Forest Products, Ecotourism, Agroforestry and Environmental Services including protected forests, General Company Plans (RUP), Term Plans Company Length (RJPP), Annual Work Plan (RKTP), and Company Work Plan and Budget (RKAP);
b. Directing the control of the implementation of policies, strategies and work programs accompanied by the preparation of work procedures and cost standards in the fields of Forest Resources, Production and Industry of Forest Products, Ecotourism, Agroforestry and Environmental Services, including protected forests;
c. Directing the control of timber and non-timber forest product collection activities to ensure the supply of industrial raw materials, in accordance with the required capacity, quality, timing and specifications;
d. Directing the control of production process management activities in the industry effectively, efficiently and providing added value and profit for the Company;
e. Planning, directing and controlling the Operation Excellence Program,

f. Melakukan pembinaan Karyawan dan penilaian kinerja terhadap bawahannya pada jajaran Direktorat Operasi.
g. Menjamin ketersediaan dan bertanggung jawab atas laporan kinerja Direktorat Operasi secara periodik kepada Direktur Utama;
h. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja operasional;
1. Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik serta melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan; dan
j. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah/Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Conducting employee development and performance appraisal of their subordinates in the Directorate of Operations.
g. Ensure the availability of and be responsible for the performance report of the Operations Directorate periodically to the President Director;
h. Monitor and evaluate operational performance;
i. Develop and implement good corporate governance and take continuous improvement actions; and
j. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Government Regulation/Company Articles of Association and stipulated by the Minister based on the provisions of the legislation.

DIREKTUR PERHUTANAN SOSIAL

a. Mengarahkan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Strategis bidang Perhutanan Sosial dan Project Management Unit (PMU) ERP dan Business Process Reegpineering,
b. Merancang strategi dan sasaran Perhutanan Sosial serta penyiapan kawasan Perhutanan Sosial;
c. Mengarahkan dan mwnantau sosialisasi Perhutanan Sosial serta mengawasi verifikasi baik dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Perhutanan Sosial dan verifikasi teknis (subyek & obyek;
d. Berkoordinasi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) sampai dengan penerbitan Surat Keputusan Direksi terkait Perhutanan Sosial dan PzoyerrNaz/apemer/Z tY/zT(PMU) ERP dan Business Pr‹x:ess Reenpineefi ,
e. Mengarahkan pengolahan data base dan pelaporan perencanaan Perhutanan Sosial

SOCIAL FOREST DIRECTOR

a. Directing the preparation of the Company's Long Term Plan (RJPP) as well as the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Strategic Plan for Social Forestry and Project Management Unit (PMU) ERP and Business Process Reegpineering,
b. Designing strategies and targets for Social Forestry and preparing Social Forestry areas;
c. Directing and monitoring the socialization of Social Forestry as well as supervising the verification of both documents related to the implementation of Social Forestry and technical verification (subjects & objects;
d. Coordinate across Ministries and Institutions (K/L) until the issuance of the Decree of the Board of Directors regarding Social Forestry and Project Management Unit (PMU) ERP and Business Process Reengineering,
e. Directing data base processing and reporting on Social Forestry planning as well as ERP Project Management Unit (PMU) and

serta Project Management Unit(PMU) ERP dan Business Process Reenpineeriny,

f. Mengevaluasi penanganan konflik Perhutanan Sosial serta melakukan koordinasi lintas organisasi jika diperlukan dalam penyelesaian konflik dan mengarahkan pembinaan pendamping bina lingkungan;
g. Merancang strategi dan sasaran panberdayaan Perhutanan Sosal;
h. Mengawasi pembentukan & Pembinaan Usaha Kek›mpok (KUPS);
i. Mengawas jalannya pemetaan keberhasilan kelompok dan tindak lanjutnya;
j. Merancang materi dan sasaran pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
k. Mengevaluasi skema kerjasama dan membangun sinergi dukungan fasilitas pengembangan Perhutanan Sosial;
l. Mengevaluasi kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial dan dan Project Management Unit (PMU) ERP dan Business Process Reegpineering
m. Bertanggung jawab atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada seluruh proses bisnis Perusahaan termasuk menetapkan kebijakan khusus atas program kerja, sosialisasi, internalisasi dan evaluasi penerapan;
n. Menjamin tersedianya laporan kegiatan Direktorat Perhutanan Sosial;
0. Melakukan pembinaan Karyawan dan penilaian kinerja terhadap bawahannya pada jajaran Direktorat Perhutanan Sosial; dan
p. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah/Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Business Process Reengineering,

f. Evaluating the handling of social forestry conflicts and conducting cross-organizational coordination if needed in conflict resolution and directing the development of environmental development assistants;
g. Designing strategies and targets for Social Forestry Empowerment;
h. Supervise the formation & Development of Business Groups (KUPS);
i. Supervise the mapping of the group's success and its follow-up;
j. Designing materials and targets for social forestry business development;
k. Evaluate cooperation schemes and build synergies of facility support development of Social Forestry;
l. Evaluating the management activities of Social Forestry and ERP Project Management Unit (PMU) and Business Process Reegpineering
m. Responsible for the application of the principle good corporate governance in all of the Company's business processes including establishing special policies on work programs, socialization, internalization and evaluation of implementation;
n. Ensure the availability of activity reports of the Directorate of Social Forestry;
o. Conducting employee development and performance appraisal of their subordinates at the Directorate of Social Forestry; and
p. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Government Regulation/Company Articles of Association and stipulated by the Minister based on the provisions of the legislation.

DIREKTUR SDM, UMUM DAN IT

a. Mengarahkan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Strategis bidang SDM, Umum, Sarana & Prasarana, Aset, Informasi Teknologi, Hukum dan Kepatuhan, serta Pengadaan Barang dan Jasa;
b. Menyediakan SDM yang berintegritas, kompeten dan produktif sesuai kebutuhan Perusahaan;
c. Menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Merancang, mengelola dan mengawasi serta mengevaluasi operasional dari sistem informasi (software dan aplikasi) dan pendukungnya (Hardware, infrastruktur, telekomunikasi);
e. Menjamin tersedianya Barang dan Jasa mdalui pengadaan guna mendukung jalannya bisnis maupun operasional Peusahaan;
f. Mengendalikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan SDM, Umum, Sarana & Prasarana, Aset, Informasi Teknologi, Hukum dan Kepatuhan, serta Pengadaan Barang dan Jasa;
g. Mengevaluasi kegiatan pengelolaan SDM, Umum, Sarana & Prasarana, Aset, Informasi Teknologi, Hukum dan Kepatuhan, serta Pengadaan Barang dan Jasa;
h. Bertanggung jawab atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada seluruh proses bisnis Perusahaan termasuk menetapkan kebijakan khusus atas program kerja, sosialisasi, internalisasi dan evaluasi penerapan;
i. Menjamin tersedianya laporan kegiatan Direktorat SDM, Umum dan IT;
j. Melakukan pembinaan Karyawan dan penilaan kinerja terhadap bawahannya pada

HR, GENERAL AFFAIRS AND IT

a. Directing the preparation of the Company's Long-Term Plan (RJPP) as well as the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Strategic Plan of Human Resources, General Affairs, Facilities & Infrastructure, Assets, Information Technology, Law and Compliance, as well as the Procurement of Goods and Services;
b. Provide human resources with integrity, competence and productivity according to the needs of the Company;
c. Maintain the Company's compliance with the provisions of laws and regulations;
d. Designing, managing and supervising and evaluating the operations of information systems (software and applications) and their supports (hardware, infrastructure, telecommunications);
e. Ensuring the availability of goods and services through procurement to support the running of the business and operations of the company;
f. Controlling and supervising the management of HR, General Affairs, Facilities & Infrastructure, Assets, Information Technology, Law and Compliance, as well as the Procurement of Goods and Services;
g. Evaluating the activities of managing human resources, general, facilities & infrastructure, assets, information technology, law and compliance, as well as the procurement of goods and services;
h. Responsible for the application of the principles of good corporate governance in all business processes of the Company including establishing special policies on work programs, socialization, internalization and evaluation of implementation;
i. Ensuring the availability of activity reports for the Directorate of Human Resources, General Affairs and IT;
j. Conducting employee development and performance appraisal of their subordinates

jajaran Direktorat SDM, Umum dan IT; dan

k. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah/Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIREKTUR KEUANGAN

a. Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan penyusunan visi dan misi Perusahaan bidang Keuangan Rencana Umum Perusahaan (RUP), Rencana jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Tahunan (RKTP), serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
b. Mengelola fungsi Akuntansi dalam memproses data dan informaasi Keuangan untuk menghasilkan laporan Keuangan yang dibutuhkan Perusahaan secara akurat dan tepat waktu;
c. Menyediakan informasi ketersediaan Anggaran yang disampaikan secara periodik guna menbantu Perusahaan dalam proses pengambilan keputusan;
d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan, pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak Perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi arus kas Perusahaan (cashflow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan ketersediaan biaya untuk operasional Perusahaan dan kesehatan kondisi Keuangan;
f. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menganalisa kondisi keuangan Perusahaan untuk dapat memberikan masukan dari sisi Keuangan bagi Perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, baik untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional

at the Directorate of Human Resources, General Affairs and IT; and

11. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Government Regulation/Company Articles of Association and stipulated by the Minister based on the provisions of the legislation.

FINANCE DIRECTOR

a. Directing, planning and controlling the preparation of the company's vision and mission in the field of Finance, the Company's General Plan (RUP), the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Annual Work Plan (RKTP), and the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
b. Managing the Accounting function in processing financial data and information to produce financial reports needed by the Company in an accurate and timely manner;
c. Provide information on the availability of the Budget which is submitted periodically to assist the Company in the decision-making process;
d. Coordinate and control the planning, reporting and payment of the Company's tax obligations to be efficient, accurate, timely and in accordance with the provisions of the legislation;
e. Planning, coordinating and supervising the Company's cash flow (cashflow), especially the management of receivables and payables, thereby ensuring the availability of costs for the Company's operations and sound financial condition;
f. Plan, coordinate, and analyze the Company's financial condition to be able to provide input from the financial side for the Company in making business decisions, both for investment needs, expansion, operations and other financial conditions;

maupun kondisi Keuangan lainnya;

g. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh Perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan;

h. Mengarahkan dan mengkoordinir dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan Keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Pembahasan Bersama (RPB);

i. Mengarahkan dan mengembangkan pelaksanaan program manajemen risiko secara terpadu;

j. Mengkoordinir penyajian laporan Keuangan konsolidasian Anak Perusahaan;

k. Nerencanakan, mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan dan Pengembangan Koperasi;

l. Merencanakan, mengarahkan dan mengembangkan financial modelling serta financial projection dan evaluation;

m. Mengembangkan dan melaksanakan tata kelo Perusahaan yang baik serta melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan; dan

n. Melaksanakan pembinaan Karyawan dan penilaian kinerja terhadap bawahannya pada jajaran Direktorat Keuangan.

g. Plan and consolidate taxation throughout the Company to ensure cost efficiency and compliance to tax regulations;

h. Directing and coordinating in preparation of accountability reports and all information regarding the condition and operation of the Company in the form of reports on the Company's activities, including financial reports, both in the form of annual reports and in the form of other periodic reports related to the implementation of the activities of the Joint Discussion Meeting (RPB);

i. To direct and develop the implementation of an integrated risk management program;

j. Coordinate the presentation of the consolidated financial statements of the Subsidiaries;

k. Planning, directing and coordinating the implementation of the Community Development and Cooperative Development Partnership Program;

l. Planning, directing and developing financial modeling as well as financial projection and evaluation;

m. Develop and implement good corporate governance and take continuous improvement actions; and

n. Carry out employee development and performance appraisal of their subordinates in the Directorate of Finance.

Realisasi Pelaksanaan Tugas Direksi

Pada tahun 2020, Direksi Perhutani telah melaksanakan berbagai kegiatan program kerja sebagai sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan tersebut salah

Realization of The Implementation of the Duties of The Board of Directors

In 2020, the Board of Directors of Perhutani has carried out various work program activities as a form of carrying out their duties and responsibilities. One of these activities is through

satunya adalah melalui rapat Direksi dan rapat bersama Dewan Pengawas.

Program Pengenalan Bagi Direksi Baru

Program pengenalan bagi anggota Direksi baru dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada anggota Direksi baru terkait kondisi-kondisi yang ada dalam Perusahaan sehingga anggota Direksi yang baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas Perusahaan baik secara organisasi maupun operasional. Penanggung jawab Program Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru menjabat berada pada fungsi Sekretaris Perusahaan.

Materi yang diperkenalkan kepada Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Baru sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Pada tahun 2020 telah diadakan program pengenalan terhadap Direksi yaitu kepada Direktur Utama dan Direktur Pengembangan & Bisnis Pemasaran.

Board of Directors meetings and joint meetings with the Supervisory Board

Orientation Program for New Board of Directors

Orientation program for new Board of Directors member aims to provide understanding to the new Board of Directors member related to conditions in the ompany to enable the new Board of Directors member to obtain comprehensive understanding on the Company both at organization and operational levels. Person-in-Charge for the Board of Directors member Orientation program is under Corporate Secretary function.

Materials that are introduce to the new Supervisory Board and New Board of Directors Member are at least including:

1. Implementation of Good Corporate Governance principles;
2. Illustration about the Company related to purpose, nature and scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive positions, risk and other strategic issues;
3. Information related to the delegated authority, internal and external audits, internal control system and policy, including Audit Committee;
4. Description about duty and responsibility of the Supervisory Board and Board of Directors and prohibitions;
5. Law and regulation related to the Company's business activity.

In 2020, an introduction program for the Board of Directors was held, namely the President Director and the Director of Marketing & Business Development.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2020

Program pengembangan bagi Direksi merupakan upaya peningkatkan pengetahuan dan keahlian serta memperoleh pemahaman terkini terhadap kondisi ekonomi, manajemen, bisnis dan teknologi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Direksi Perhutani.

Board of Directors' Competence Development Program for 2020

The development program for the Board of Directors is an effort to increase knowledge and expertise as well as obtain the latest understanding of economic, management, business and technology conditions relevant to the implementation of the duties of the Board of Directors of Perhutani.

Hubungan Afiliasi Direksi Dengan Anggota Dewan Pengawas dan Pemilik Modal Utama Atau Pengendali

Perhutani berupaya menjaga Independensi Direksi dengan meminimalisir potensi adanya benturan kepentingan dari hubungan afiliasi yang meliputi hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas serta Pemilik Modal Perusahaan, hubungan kepengurusan dan hubungan kepemilikan saham pada perusahaan lain. Hubungan Keluarga, Keuangan dan Kepengurusan Direksi per Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Affiliation Between Board of Directors Members And Supervisory Board Board of Directors and Capital Owner

Perhutani strives to maintain independency of the Board of Directors in minimizing conflict of interes tpotential in the affiliation that includes family and financial affiliations among the Board of Directors members and/or Supervisory Board Members and Capital Owner of the Company, managerial, shares ownership affiliations in other companies. As of December 2020, Family, Financial and Managerial Affiliations of the Board of Directors is as follows:

HUBUNGAN KELUARGA, KEUANGAN DAN KEPENGURUSAN ANGGOTA DIREKSI
Affiliation Between Board of Directors Members

Nama Name	**Hubungan Keluarga Dengan** Familial Relationship With			**Hubungan Keuangan Dengan** Financial Relationship With			**Hubungan Kepengurusan pada Perusahaan Lain Sebagai** Management Relationships with Other Companies As		
	Dewan Pengawas Supervisory Board	**Direksi** Board of directors	**Pemilik Modal** Capital Ownership	**Dewan Pengawas** Supervisory Board	**Direksi** Board of directors	**Pemilik Modal** Capital Ownership	**Dewan Pengawas** Supervisory Board	**Direksi** Board of directors	**Pemilik Modal** Capital Ownership
Wahyu Kuncoro	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Eko Wahyudi	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Kemal Sudiro	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Ahmad Ibrahim	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Natalas Anis Harjanto	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Selain itu, masing-masing Direksi pada komposisi Direksi yang baru telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik kepemilikan pada Perhutani maupun pada perusahaan lainnya dan diperbaharui setiap tahunnya. Per Desember 2020 kepemilikan saham anggota Direksi Perhutani adalah sebagai berikut:

In addition, each of the Directors in the composition of the new Board of Directors has disclosed its share ownership, both ownership in Perhutani and in other companies and is renewed annually. As of December 2020, the share ownership of members of the Board of Directors of Perhutani is as follows:

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI
Directors' Share Ownership

Nama Name	**Kepemilikan Saham di Perhutani** Shares Ownership in Perhutani	**Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain** Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain
Wahyu Kuncoro	Nihil / None	Nihil/ None
Eko Wahyudi	Nihil / None	Nihil/ None
Kemal Sudiro	Nihil/ None	Nihil/ None
Ahmad Ibrahim	Nihil/ None	Nihil/ None
Natalas Anis Harjanto	Nihil/ None	Nihil/ None

Penilaian Kinerja Unit Kerja Dibawah Direksi

Direksi melakukan evaluasi atas unit kerja di bawah Direksi, dengan dasar penilaian KPI yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja.

Assessment on Performance Of Work Units Under The BOD

Board of Directors evaluates work units under the Board of Directors based on KPI assessment that is stipulated by each work unit.

PENILAIAN KINERJA UNIT KERJA DIBAWAH DIREKSI
Assessment on Performance of Work Units Under the Board of Directors

Jabatan Position	**KPI** KPI		**Target** Target	**Relisasi** Realization	**%**
Sekretaris Perusahaan	Penyusunan Laporan Manajemen	Preparation of Management Reports	5	5	100%
	Tone Positif Pemberitaan	Positive News Coverage	-	4.341	100%
Divisi SPI	Audit Rutin	Regular Audit	33	40	121%
	PTL	PTL	57	55	96%
Divisi Manajemen Risiko	Penyusunan kajian Manajemen Risiko Rutin	Preparaiton of Regular Risk Management Review	1	1	100%
	Penyusunan kajian Manajemen Risiko insidentil/proyek	Preparation of Incidental/ Project Risk Management Review	10	20	200%

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi

Performance Assessment of the Supervisory Board and the Board of Directors

Perhutani telah memiliki Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi yang tercantum dalam Kriteria evaluasi kinerja Dewan Pengawas dan Direksi yang ditetapkan dengan membuat perbandingan atas pencapaian program kerja yang direalisasikan oleh Dewan Pengawas dan Direksi.

Perhutani already has a Performance Assessment Policy for the Supervisory Board and the Board of Directors which is listed in the Performance Evaluation Criteria for the Supervisory Board and the Board of Directors which is determined by making a comparison of the achievements of the work program realized by the Supervisory Board and the Board of Directors.

Penilaian Kinerja Pengawas

Penilaian Dewan Pengawas dilakukan secara kolegial berdasarkan RKA dan Key Performance Indicator (KPI) oleh Pemilik Modal sebagai gambaran kinerja pengawasan Dewan Pengawas. Sementara terkait pemenuhan aspek GCG, penilaian dan evaluasi dilakukan melalui assessment GCG. Selain itu, Dewan Pengawas dapat melakukan penilaian secara self assessment atas kinerja pengawasan yang telah dijalankan.

Supervisory Board Performance Assessment

Supervisory Board assessment is done collegially based on RKA and Key Performance Indicators (KPI) by Capital Owner as illustration of Supervisory Board supervisory performance. However, related to fulfillment of GCG aspects, the asessment and evaulation are done through GCG assessment. In addition, the Supervisory Board may also perform self-assessment on the implemented supervisory performance.

Key Performance Indicators (KPI)

KPI menjadi salah satu dasar Pemilik Modal dalam menilai kinerja Dewan Pengawas. KPI dibahas dan disepakati bersama Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi dalam RPB. Berikut merupakan KPI Dewan Pengawas tahun 2020 :

Key Performance Indicators (KPI)

KPI becomes one of Capital Owner consideraiton in evaluating the Supervisory Board performance. The KPI is discussed and agreed altogether by the Capital Owner, Supervisory Board and Board of Directors in the RPB. The Supervisory Board KPI in 2020 is as follows:

KPI DEWAN PENGAWAS TAHUN 2020
Supervisory Board KPI in 2020

Indikator Indicators		**Rumusan** Formula		**Bobot** Weight	**Skor** Score
Aspek Pengawasan & Pengarahan / Supevisory & Advisory Aspect:				60%	62,6
Review/ analisis kinerja perusahaan	Analysis on company's performance	Rapat pembahasan kinerja perusahaaan bersama Direksi	Discussion meeting on the Company's performance with the Board of Directors	15%	20
Rapat Dewas – Jumlah Rapat	Board Meeting – Total meetings	Rapat internal Dewas	Supevisory Board internal Meetings	15%	13
Kehadiran rapat	Meeting Attendance	% jumlah Dewas yang hadir	% total attending supervisory board	10%	13
Memberikan nasihat/saran kepada Direksi	Provide advise/ recommendation to the Board of Directors	Jumlah laporan/ risalah yang didalamnya terdapat saran Dewas kepada Direksi	Total reports/ MoM that discloses recommendation from the Supervisory Board to the Board of Directors	10%	10
Monitoring tindak lanjut hasil/ temuan audit internal/ eksternal	Monitoring on internal/ external	Jumlah laporan monitoring atas hasil/ temuan audit	Total monitoring report on audit findings/result	10%	10
Aspek Pelaporan/ Reporting Aspect				30%	30
Menyusun dan Menyampaikan program kerja tahunan	Prepare and submit annual work program	Jumlah Program Kerja tahunan	Total annual work program	5%	5
Menyampaikan laporan/ pendapat/ saran kepada Pemilik Modal	Submit report/ recommendation/ suggestion to Capital Owner	Jumlah Tanggapan yang disampaikan kepada Pemilik Modal	Total Opinion submitted to Capital Owner	10%	10
Menyampaikan laporan tugas pengawasan	Submit supervisory duty report	Jumlah Laporan Tugas Pengawasan	Total Supervisory Duty Report	5%	5
Menyampaikan balasan/ tanggapan atas surat Direksi	Submit opinion/ feedback on Board of Directors Letter	% jumlah surat Direksi yang sudah ditanggapi oleh Dewas	% total Board of Directors letter that has been responded by the Supervisory Board	10%	10
Aspek Dinamis/Lain-lain/ Dynamic Aspect/ Others:				10%	3,75
Peninjauan/ kunjungan lapangan Official Visits	Official Visits	Jumlah kunjungan	Total visits	5%	3,75
Peningkatan kompetensi dan pengetahuan	Competency and knowledge development	Jumlah seminar/ workshop/lokakarya/ pelatihan yang diikuti	Total participated seminar/workshop/ trainings	5%	0
Jumlah Bobot	**Total Weight**			**100%**	**96,3**

Realisasi skor KPI Dewan Pengawas tahun 2020 adalah **96,3 (sangat baik).**

Realization of Supervisory Board KPI score in 2020 is 96,3 (very good).

Penilaian GCG Aspek Dewan Pengawas

Dewan Pengawas menjadi salah satu aspek yang dinilai secara khusus dalam penilaian penerapan Good Corporate Governance (GCG) sebagai representasi dari fungsi pengawasan yang dijalankan Perhutani. Penilaian aspek tersebut tersebut memberikan gambaran sejauh mana Dewan Pengawas telah memenuhi standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian terhadap penerapan GCG dilaksanakan berdasarkan indikator yang dimuat standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Pada penilaian terhadap penerapan tahun pelaksanaan 2020 yang dilaksanakan secara mandiri (self assessment) dengan penerapan GCG untuk aspek Dewan Pengawas mencapai skor 33,49 dari skor maksimum 35 atau 95,70% dengan kategori predikat “Sangat Baik”.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara kolegial maupun individual oleh Pemilik Modal. Penilaian kinerja oleh Pemilik Modal dilakukan dalam RPB pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan, untuk kinerja tahun buku 2020.

GCG Assessment On Supervisory Board Aspect

The Supervisory Board is one of aspects that is assessed specifically in the Good Corporate Governance (GCG) assessment as representation of the supervisory function implemented in Perhutani. Assessment on the aspect provides illustration on how far the Supervisory Board has complied with good corporate governance implementation standard. The GCG assessment is done based on indicators that are disclosed in assessment tools stanard as in the Secretary of Minister of SOEs Decree Number SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012. In the assessment of the implementation of the 2020 implementation year which was carried out independently (self-assessment) with the implementation of GCG for the Supervisory Board aspect, it achieved a score of 33.49 out of a maximum score of 35 or 95.70% with the category "Very Good".

Board of Directors Performance Assessment

The Board of Directors assessment is done collegially and individually by the Capital Owner. Performance Assessment by the Capital Owner is done in the RPB on the Company’s Annual Report Ratification, for performance in fiscal year 2020.

RPB memberikan pelunasan pembebasan tanggung jawab *(aquite of the charge)* kepada Direksi atas segala hasil pengurusan dan pengelolaan perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. Indikator penilaian kinerja Direksi meliputi aspek sebagai berikut:

1. Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Kontrak Manajemen tahun 2020;
2. Pencapaian Kinerja Operasional dan Keuangan tahun 2020;
3. Pelaksanaan implemantasi GCG tahun 2020

RPB granted responsibility discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors upon every result of managerial and management of the Company that have been done for fiscal year ended on December 31, 2019. The Board of Directors performance assessment indicators including following aspects:

1. Achievement of Key Performance Indicators (KPI) in Management Contract for 2020;
2. Achievement of Operational and Financial Performances in 2020;
3. GCG implementation in 2020.

Key Performance Indikator (KPI) di Tahun 2020

KPI Perum Perhutani merujuk pada Surat Menteri BUMN Republik Indoneisia nomor S-975/MBU/11/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Persetujuan KPI Perusahaan Umum Kehutanan Negara Tahun 2020.

Berdasarkan surat tersebut, terdapat 5 Prioritas penilaian BUMN :

1. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia,
2. Inovasi Model bisnis,
3. Kepemimpinan teknologi,
4. Pengembangan Investasi,
5. Pengembangan Talenta.

Sampai dengan tahun 2020 ketercapaian KPI Korporat sebesar 98,8%. Hal ini disebabkan Karena pencapaian pemeliharaan tanaman tahun II dan III hanya tercapai sebesar 98% yang disebabkan karena terbitnya SK IPHPS, adanya proyek nasional pembangunan bendungan dan tebangan KHDTK. Sehingga luas tanaman berkurang. Berikut Rincian pencapaian KPI Korporat :

Key Performance Indicator (KPI) in 2020

Perum Perhutani's KPI refers to the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia number S-975/MBU/11/2020 dated December 3, 2020 regarding the 2020 State Forestry Public Company KPI Approval.

Based on the letter, there are 5 priority assessments of SOEs:

1. Economic and Social Value for Indonesia,
2. Business Model Innovation,
3. Technology leadership,
4. Investment Development,
5. Talent Development.

As of 2020, achievement of Corporate KPI is 98.8%. The achievement was due to the achievement of plant maintenance in years II and III only achieved by 98% due to the issuance of the IPHPS Decree, the existence of a national project for dam construction and KHDTK logging. Therefore, the plant area is reduced. Detail Corporate KPI Achievement is as follows:

PENCAPAIAN KPI KORPORAT
Corporate KPI Achievement

No	KPI		Satuan Unit	Target Target 2020	Bobot Weight (%)	Realisasi / Realization		
						s.d Des until Dec	Pencapaian Achievement	%
A.	**Nilai Ekonomi dan Sosial/ Economic and Social Value**							
1.	Net Income/ Laba Bersih	Net Income / Net Profit	Rp miliar Rp bilion	152,289	5%	748,5	110%	5,5%
2.	EBITDA	EBITDA		277,222	5%	473,6	110%	5,5%
3.	Interest Bearing debt to EBITDA RATIO	Interest Bearing debt to EBITDA RATIO	kali Times	1,400	4%	1,07x	76%	3,06%
4.	Arus Kas Operasi	Operating Cash Flow	Rp miliar Rp bilion	270,426	3%	544,7	110%	3,3%
5.	Pemeliharaan Tanaman Tahun ke II dan III	Plant Maintenance Years II and III	Ha	93,472	4%	91.906	98%	3,9%
6.	Luas Tanaman tahun Berjalan	Current Year's Crop Area	Ha	36.808	4%	38.858	106%	4,22%
7.	Uraian Kelompok Perhutanan Sosisal	Proposed Social Forestry Group	Kelompok Group	215	5%	392	110%	5,5%
					30%			**31,01%**
B.	**Inovasi Model Bisnis/ Business Model Innovation**							
1.	Implementasi Barcode terbangun	Cutting Barcode Implementation	Waktu Time	100%	100%	100%	100%	15%
2.	Impementasi Socio Partnership	Implementation of SocioPartnership	Kontrak Contract	427	10%	3.156	110%	11%
					25%			**26%**
C.	**Optimalisasi Investasi/ Investment Optimization**							
1.	Revitalisas PMKP Sukun tahap I	Revitalization of PMKP Sukun phase I	Waktu Time	100%	4%	100%	100%	4,0%
2.	Penanaman Tanaman Biomassa	Biomass Crop Planting	Ha	13.667	6%	13.663	100%	6,0%
3.	Prosentase Tumbuh Tanaman Biomassa tahun ke II	Percentage of growing Biomass Plants in year II	%	92	5%	94,54	103%	5,14%
					15%			**15,14%**
D.	**Kepemimpinan Teknologi/** Kepemimpinan Teknologi							
1.	Implementasi Sistem Persediaan dan Penjualan (DILAN)	Inventory and Sales System Implementation (DILAN)	Waktu Time	100%	5%	100%	100%	5,0%

PENCAPAIAN KPI KORPORAT
Corporate KPI Achievement

No		KPI	Satuan Unit	Target Target 2020	Bobot Weight (%)	Realisasi / Realization		
						s.d Des until Dec	Pencapaian Achievement	%
2.	Pilot Project Aplikasi Perhutani Performance management System (PPMS)	Perhutani Performance Management System (PPMS) Application Pilot Project	Waktu Time	100%	5%	100%	100%	5,0%
3.	Pengembangan ERP Merah Putih FICO dan HCM	FICO and HCM Merah Red and White ERP Development	Waktu Time	100%	5%	100%	100%	5,0%
					15%			**15%**
D.	**Pengembangan Talenta/ Talent Development**							
1.	Pembentukan Indonesia Forestry Institute	Establishment of Indonesia Forestry Institute	Waktu Time	100%	5%	95%	95%	4,75%
2.	Memperoleh persetujuan Kementerian BUMN untuk Program Suksesi Direksi dan Pengembangan Top Talent Muda (< 40 tahun)	Obtained approval from the Ministry of SOEs for the Talent Development Program, including the Directors Succession Program and Young Top Talent Development (≤40 years)	Waktu Time	100%	10%	100%	100%	10,0%
						15%		**14,75%**
	TOTAL					**100%**		**101,90%**

Penilaian GCG Aspek Direksi

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui Penilaian GCG, dimana salah satu aspek yang diukur adalah penerapan tata kelola perusahaan di tingkat Direksi dan organ penunjang. Penilaian terhadap penerapan GCG dilaksanakan berdasarkan indikator yang dimuat standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Hasil penilaian GCG aspek Direksi untuk tahun buku 2020 mendapatkan skor 29,06 dari skor maksimal 35,00 atau setara dengan 83,02%.

GCG Assessment for Board of Directors Aspect

The performance assessment of the Board of Directors is also carried out through GCG Assessment, where one aspect that is measured is the implementation of corporate governance at the level of the Board of Directors and supporting organs. The assessment of the implementation of GCG is carried out based on the indicators contained in the standard test tool for the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012. The results of the GCG assessment of the Board of Directors for the 2020 financial year received a score of 29.06 from a maximum score of 35.00 or equivalent to 83.02%.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Pengawas, Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi

Meeting Frequency and Level of Attendance of the Supervisory Board, Directors, and Joint Meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors

Rapat Dewan Pengawas

Rapat Dewan Pengawas dilaksanakan dalam rangka review analisis kinerja bulanan Perusahaan, mengetahui perkembangan kondisi serta masalah-masalah aktual yang dialami perusahaan termasuk pemberian nasihat/saran kepada Direksi. Rapat Dewan Pengawas terdiri dari Rapat Internal, Rapat Gabungan dengan Direksi dan Rapat Pembahasan Bersama dengan Pemilik Modal.

Dalam kesempatan Rapat Pembahasan Bersama, Dewan Pengawas menyampaikan pendapat/ tanggapan/ masukan kepada Pemilik Modal atas Laporan Tahunan dan Usulan RKAP serta masalah-masalah penting lainnya. Berikut Daftar kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat Internal Dewan Pengawas :

Supervisory Board Meeting

The Supervisory Board Meeting is arranged in order to review the Company's monthly performance analysis, to find out about developments in conditions and actual problems experienced by the company, including providing advice/suggestions to the Board of Directors. The Supervisory Board meetings consist of Internal Meetings, Joint Meetings with Directors and Joint Discussion Meetings with Capital Owners.

In the Joint Discussion Meeting, the Supervisory Board presented its opinions/comments/input to the Capital Owner on the Annual Report and Proposed RKAP as well as other important issues. The following is a list of the attendance of the Supervisory Board in the Internal Meeting of the Supervisory Board:

REALISASI TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN PENGAWAS PADA TAHUN 2020
List of the attendance of the Supervisory Board in the Internal Meeting of the Supervisory Board

Nama Name	**Jabatan** Position	**Kehadiran Rapat /** Total Attendance		
		Jumlah Rapat Total Meetings	**Peserta dihadiri** Meetings Attended	**%**
Bambang Hendroyono	Ketua/ Chairman	24	22	92,0
Bambang Risyanto	Anggota/ Member	22	22	100,0
Chalid Muhammad	Anggota/ Member	22	22	100,0
Komaruddin Simanjuntak	Anggota/ Member	17	17	100,0
Noer Fauzi Rachman	Anggota/ Member	22	21	95,0
YB. Priyatmo Hadi	Anggota/ Member	12	9	75,0

Keterangan: Persentase tingkat kehadiran rapat disesuaikan dengan masa jabatan masing-masing Dewan Pengawas selama tahun 2020.

Information: The meeting attendance level percentage is adjusted to the terms of office of each Supervisory Board throughout 2020.

AGENDA RAPAT INTERNAL DEWAN PENGAWAS
Board of Supervisory Internal Meetings Agenda

Tanggal Date	**Agenda Utama** Main Agenda	
21 Januari 2020	• Evaluasi tindak lanjut arahan Dewas & surat Dewas No.S- 68/DWAS-PHT/2019 tanggal 19 Desember 2019; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Desember 2019; • Pembahasan progres Audit KAP Tahun Buku 2019; • Lain-lain	• Evaluation of follow-up to the Supervisory Board Direction & Letter of the Council No.S-68/DWAS-PHT/2019 dated December 19, 2019; • Discussion on the Company's performance up to December 2019; • Discussion on the progress of KAP Audit for Fiscal Year 2019; • Others
28 Februari 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Januari 2020; • Arahan Dewas menindaklanjuti Surat ke Wamen II; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion on the company's performance until January 2020; • Supervisory Board's Direction to follow up the letter to the Vice Minister II; • Others
31 Maret 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Februari 2020; • Pembahasan progress audit Tahun Buku 2019; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion on the company's performance until February 2020; • Discussion on the audit progress for 2019 Fiscal Year; • Others
20 April 2020	Pembahasan Perhutanan Sosial	Discussion on Social Forestry
25 Juni 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Mei 2020; • Pembahasan Revisi RKAP tahun 2020; • Pembahasan budidaya tanaman pangan; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion on the company's performance as of May 2020; • Discussion on the 2020 RKAP revision; • Discussion of food crop cultivation; • Others
11 Agustus 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan Laporan Manajemen s.d Triwulan II Tahun 2020; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Juli 2020; • Lain-lain.	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion of Management Reports as of 2nd Quarter of 2020; • Discussion on the company's performance as of July 2020; • Others.
28 September 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Agustus 2020; • Pembahasan RJPP Perhutani Tahun 2020 - 2024; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion on the company's performance as of August 2020; • Discussion on Perhutani RJPP 2020-2024; • Others

AGENDA RAPAT INTERNAL DEWAN PENGAWAS
Board of Supervisory Internal Meetings Agenda

Tanggal Date	Agenda Utama Main Agenda	
27 Oktober 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Triwulan III tahun 2020; • Pembahasan lanjutan RJPP Perhutani Tahun 2020 - 2024; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion on the company's performance as of third quarter of 2020; • Further discussion of the 2020 - 2024 Perhutani RJPP; • Others
26 November 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Oktober 2020; • Pembahasan Tindak lanjut Aspirasi Pemilik Modal untuk RKAP 2021; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion on the company's performance until October 2020; • Discussion on the follow-up to shareholders' aspirations for the 2021 RKAP; • Others
22 Desember 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja Perusahaan s.d November 2020; • Hal-hal strategis; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion of the Company's performance as of November 2020; • Strategic matters; • Others

Rapat Gabungan

Rapat gabungan bersama Dewan Pengawas selama tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 16 kali.

Management Meeting

Joint meetings with the Supervisory Board in 2020 were held 16 times.

FREKUENSI RAPAT GABUNGAN
Management Meeting Frequency

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attended	%
Bambang Hendroyono	Ketua / Chairman	16	16	100%
Bambang Risyanto	Anggota / Member	16	16	100%
Chalid Muhammad	Anggota / Member	16	16	100%
Komaruddin Simanjuntak	Anggota / Member	16	16	100%
Noer Fauzi Rachman	Anggota / Member	16	16	100%
YB. Priyatmo Hadi	Anggota/ Member	16	16	100%
Wahyu Kuncoro	Direktur Utama / President Director	16	16	100%
Eko Wahyudi	Direktur Keuangan / Director of Finance	16	16	100%
Kemal Sudiro	Direktur SDM, Umum & IT/ Directof of HR, General and IT	16	16	100%
Ahmad Ibrahim	Direktur Pengembangan Bisnis & Pemasaran/ Directof of Development and Business Marketing	16	16	100%

FREKUENSI RAPAT GABUNGAN
Management Meeting Frequency

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attended	%
Bambang Catur Wahyudi*	Direktur Operasi/ Operations Director	12	12	100%
Natalas Anis Harjanto	Direktur Perhutanan Sosial & Plt. Direktur Operasi/ Director of Social Forestry & Plt. Operations Director	16	16	100%

*) Bambang Catur Wahyudi (Direktur Operasi Perseroan) meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020 dan digantikan sementara oleh Natalis Anis Harjanto sebagai Plt. Direktur Operasi (merangkap DIrektur Perhutanan Sosial) hingga masa jabatan berakhir pada 9 Februari 2021

*) Bambang Catur Wahyudi (Operations Director) passed away on September 16, 2020 and is temporarily replaced by Natalis Anis Harjanto as Act. Operations Director (concurrently as Social Forestry Director) until the terms ended on February 9, 2021.

AGENDA RAPAT GABUNGAN DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI
Joint Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Utama Main Agenda	
27 Jan 2020	• Evaluasi tindak lanjut arahan Dewas & surat Dewas No.S- 68/DWAS-PHT/2019 tanggal 19 Desember 2019; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Desember 2019; • Pembahasan progres Audit KAP Tahun Buku 2019; • Lain-lain	• Evaluation of follow-up to the direction of the Dewas & the letter of the Council No.S-68/ DWAS-PHT/2019 dated December 19, 2019; • Discussion on the company's performance up to December 2019; • Discussion on the progress of KAP Audit for Fiscal Year 2019; • Others
28 Feb 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Januari 2020; • Paparan Kadivre dan Kadiv Perhutani mengatasi krisis degradasi SDH secara holistik; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion on the company's performance until January 2020; • Kadivre and Kadiv Perhutani's presentations in overcoming the SDH degradation crisis holistically; • Others
31 Mar 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Februari 2020; • Pembahasan progress audit Tahun Buku 2020; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion on the company's performance until February 2020; • Discussion on audit progress for the 2020 Financial Year; • Others
17 April 2020	• Pembahasan Perhutanan Sosial	• Discussion on Social Forestry
20 April 2020	• Pembahasan Perhutanan Sosial	• Discussion on Social Forestry
24 April 2020	• Pembahasan kinerja Operasional Perum Perhutani	• Discussion on the operational performance of Perum Perhutani
08 Mei 2020	• Pembahasan kinerja Keuangan Perum Perhutani; • Pembahasan SDM, Umum & IT Perum Perhutani	• Discussion on the financial performance of Perum Perhutani; • Human Resources, General & IT discussion of Perum Perhutani

AGENDA RAPAT GABUNGAN DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI
Joint Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda Utama Main Agenda	
15 Mei 2020	• Pembahasan kinerja Keuangan Perum Perhutani	• Discussion on the financial performance of Perum Perhutani
29 Jun 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Mei 2020; • Pembahasan Revisi RKAP tahun 2020; • Pembahasan budidaya tanaman pangan; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion on the company's performance until May 2020; • Discussion on the 2020 RKAP revision; • Discussion of food crop cultivation; • Others
17 Jul 2020	• Pembahasan konflik tenurial di lingkungan Perum Perhutani;	• Discussion on tenure conflicts within Perum Perhutani;
23 Jul 2020	• Pembahasan lanjutan konflik tenurial di lingkungan Perum Perhutani	• Further discussion of tenure conflicts within Perum Perhutani
11 Aug 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan Laporan Manajemen s.d Triwulan II Tahun 2020; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Juli 2020; • Lain-lain.	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion of Management Reports as of 2nd Quarter of 2020; • Discussion on the company's performance as of July 2020; • Others.
29 Sept 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Agustus 2020; • Pembahasan RJPP Perhutani Tahun 2020 - 2024; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion on the company's performance as of August 2020; • Discussion on Perhutani RJPP 2020-2024; • Others
27 Okt 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Triwulan III tahun 2020; • Pembahasan lanjutan RJPP Perhutani Tahun 2020 - 2024; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion on the company's performance as of third quarter of 2020; • Further discussion of Perhutani RJPP 2020 - 2024; • Others
27 Nov 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja perusahaan s.d Oktober 2020; • Pembahasan Tindak lanjut Aspirasi Pemilik Modal untuk RKAP Tahun 2021; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion on the company's performance as of October 2020; • Discussion on the follow-up to shareholders' aspirations for the 2021 RKAP; • Others
28 Des 2020	• Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; • Pembahasan kinerja Perusahaan s.d November 2020; • Hal-hal strategis upaya Direksi dalam memenuhi target RKAP 2020; • Lain-lain	• Follow-up evaluation of the results of previous meetings; • Discussion of the Company's performance until November 2020; • Strategic matters of the Board of Directors' efforts in meeting the 2020 RKAP targets; • Others

Rapat Direksi

Sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, secara berkala Direksi mengadakan rapat, baik rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi terkait kinerja Perusahaan secara menyeluruh yang dibuat dalam Laporan Kinerja/Manajemen setiap bulan dan rapat khusus bila diperlukan. Rapat internal Direksi selama tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 34 kali. Selama tahun 2020, agenda rapat dan frekuensi kehadiran Direksi dalam rapat internal Direksi adalah sebagai berikut:

Board Of Directors Meeting

In line with the Company's Articles of Association, the Board of Directors periodically holds meetings, both internal meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings of the Board of Supervisors with the Board of Directors regarding the Company's overall performance which is made in the Performance/Management Report every month and special meetings if necessary. During 2020, the 34 meeting agenda and the frequency of attendance of the Board of Directors in the internal meetings of the Board of Directors are as follows:

FREKUENSI RAPAT DIREKSI
Board of Directors Meeting Frequency

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Total Meetings	**Kehadiran** Attended	%
Wahyu Kuncoro	Direktur Utama / President Director	33	33	100%
Eko Wahyudi	Direktur Keuangan / Directof of Finance	34	34	100%
Kemal Sudiro	Direktur SDM, Umum & IT/ Directof of HR, General and IT	34	34	100%
Ahmad Ibrahim	Direktur Pengembangan Bisnis & Pemasaran/ Directof of Development and Business Marketing	33	33	100%
Bambang Catur Wahyudi*	Direktur Operasi/ Operations Director	23	23	100%
Natalas Anis Harjanto	Direktur Perhutanan Sosial & Plt. Direktur Operasi/ Director of Social Forestry & Plt. Operations Director	33	33	100%

*) Bambang Catur Wahyudi (Direktur Operasi Perseroan) meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020 dan digantikan sementara oleh Natalis Anis Harjanto sebagai Plt. Direktur Operasi (merangkap DIrektur Perhutanan Sosial) hingga masa jabatan berakhir pada 9 Februari 2021.

*) Bambang Catur Wahyudi (Operations Director) passed away on September 16, 2020 and is temporarily replaced by Natalis Anis Harjanto as Act. Operations Director (concurrently as Social Forestry Director) until the terms ended on February 9, 2021.

AGENDA RAPAT DIREKSI
Board of Director Meetings Agenda

	Tanggal Date	**Agenda Utama** Main Agenda	
1.	24 Feb 2020	*Socio Partnership Project Madiun, Progres Report* Divisi IT, SDM, dll	Socio Partnership Project, Madiun, Progress Report of IT Division, Human Resources, etc.
2.	16 Mar 2020	Rencana & Realisasi Pendapatan s.d 13 Maret 2020, Pengamatan KPH Pareto per 13 Maret 2020, Evaluasi Produksi s.d 13 Maret 2020, Struktur Organisasi, dll	Revenue Plan & Realization until March 13, 2020, Observation of Pareto FMU as of March 13, 2020, Production Evaluation until March 13 2020, Organizational Structure, etc.

AGENDA RAPAT DIREKSI
Board of Director Meetings Agenda

	Tanggal Date	Agenda Utama Main Agenda	
3.	23 Mar 2020	Operasional Kegiatan Perkantoran terkait dengan Covid-19, Progres Pendapatan Perusahaan, dll	Office Operational Activities related to Covid-19, Company Revenue Progress, etc.
4.	24 Mar 2020	Kendaraan Dinas Direksi, dll	Board of Directors' official vehicles, etc.
5.	6 Apr 2020	Rencana Aksi Korporasi Anak Perusahaan Perhutani	Perhutani Subsidiary Corporate Action Plan
6.	13 Apr 2020	Tindaklanjut Rapat Direksi Sebelumnya, Kenaikan Gaji dan Bonus, Desain Interior Gedung Perhutani, dll	Follow-up of the previous Board of Directors' Meeting, Increase in Salary and Bonuses, Interior Design of Perhutani Building, etc.
7.	20 Apr 2020	Pengembangan SDM, Perhitungan Bonus, Evaluasi Kinerja Ketua Tim HPS, Pengadaan Kendaraan Dinas, Usulan Lingkup Direktorat Operasi, Ecotourism & Agroforestry, Produksi & Industri, dll	HR Development, Bonus Calculation, Performance Evaluation of the HPS Team Leader, Procurement of Official Vehicles, Proposed Scope of the Operations Directorate, Ecotourism & Agroforestry, Production & Industry, etc.
8.	27 Apr 2020	Laporan Perjalanan Dinas Direktur Perhutanan Sosial, Produksi & Industri, SDM & Keuangan, Progres Bidang Pemasaran, Realisasi Pendapatan s.d 24 April 2020, dll	Official Travel Report of the Director of Social Forestry, Production & Industry, HR & Finance, Progress in Marketing, Realization of Revenues up to 24 April 2020, etc.
9.	4 Mei 2020	Desain Interior Gedung Kantor Pusat Perhutani, Usulan THR Yayasan Taruna Rimba Perhutani (YTRP), Pemasaran GTD & Kayu, Keuangan, dll	Interior Design of Perhutani Head Office Building, THR Proposal of Perhutani Taruna Rimba Foundation (YTRP), GTD & Timber Marketing, Finance, etc.
10.	11 Mei 2020	Titik Temu RPKH dengan Rencana Pemanfaatan Pemegang IPHPS dan KHDTK, Ganti Rugi Tegakan, Laporan Progres Badan Otorita Borobudur, Update Pedoman Perhutanan Sosial, Analisis Produksi, Penjualan dan Sisa Sediaan Kayu Jati, Kerjasama Agroforestry dengan PT Chita Agri Indonesia, Rehabitlitasi Hutan dan Lahan (RHL), dll	RPKH Meeting Point with Planned Use of IPHPS and KHDTK Holders, Stand Compensation, Progress Report of the Borobudur Authority, Update on Social Forestry Guidelines, Analysis of Production, Sales and Residual Inventory of Teak Timber, Agroforestry Cooperation with PT Chita Agri Indonesia, Forest and Land Rehabilitation (RHL)), etc.
11.	14 Mei 2020	Laporan Keuangan (Persiapan Rapat Dewas dan Laporan Audited 2019), dll	Financial Statements (Preparation for the 2019 Board of Directors' Meeting and Audited Report), etc.
12	18 Mei 2020	Hasil Pemeriksaan BPK, Progres Report TI, Usulan PT SAS Kreasindo Utama untuk Kayu Jati, dll	BPK Examination Results, IT Progress Report, PT SAS Kreasindo Utama's Proposal for Teak Wood, etc.
13	27 Mei 2020	Persiapan The New Normal Covid-19 Perhutani, Analisis Produksi, dll	Preparation for Perhutani's New Normal Covid-19, Production Analysis, etc.
14	2 Juni 2020	Persiapan The New Normal Covid-19 Perhutani, Investasi, Kerjasama PT Sima Agung, Progres Industri Sagu Papua, Pemasaran, Pengadaan Barang/Jasa, dll	Preparation for Perhutani's New Normal Covid-19, Investment, PT Sima Agung Cooperation, Papua Sago Industry Progress, Marketing, Procurement of Goods/Services, etc.

AGENDA RAPAT DIREKSI
Board of Director Meetings Agenda

	Tanggal Date	Agenda Utama Main Agenda	
15.	3 Juni 2020	Progres Gedung Baru Perhutani, Bidang Pemasaran meliputi : Kajian Penjualan Sonokeling Tanpa Bundling, Harga Kayu dan Tindaklanjut Rapat Agen, dll	Perhutani's New Building Progress, Marketing Sector includes: Study of Sonokeling Sales Without Bundling, Timber Prices and Follow-up Agent Meetings, etc.
16.	8 Juni 2020	Progres Gedung Baru Perhutani, Surat Bupati Lebak terkait permohonan Hibah Aset, Pemasaran, Rencana Kerjasama Telkom, Progres Pedoman Perhutanan Sosial, Surat SPOP PBB ke Dirjen Pajak, Surat Revisi RKAP 2020, dll	Perhutani's new building progress, Lebak Regent's letter regarding the application for Asset Grants, Marketing, Telkom's Cooperation Plan, Progress of Social Forestry Guidelines, PBB SPOP Letter to the Director General of Taxes, 2020 RKAP Revised Letter, etc.
17.	15 Juni 2020	Pembayaran Gedung Kantor Baru Perhutani, dll	Payment for Perhutani's New Office Building, etc.
18.	15 Juni 2020	Impelementasi ERP Perhutani dengan Telkom	Perhutani ERP Implementation with Telkom
19.	18 Juni 2020	Progres Laporan Tahun 2019 Audited, Revisi RKAP 2020, Pemasaran, dll	Audited Progress Report 2019, Revised RKAP 2020, Marketing, etc.
20.	13 Juli 2020	Penjelasan perihal beberapa surat menyurat: a) Usulan tugas belajar bidang IT; b) Permohonan bantuan biaya pendidikan Sdr Sri Yuniarti (Janda Alm Badaruddin Amin/ Mantan KKPH Parengan); c) Pemasaran (update pendapatan dan penetapan harga biomassa di KPH Semarang); d) Pembahasan dengan Telkom – ACI, dll	Explanation of several correspondences: a) Proposed study assignments in the IT field; b) Application for tuition assistance for Mr. Sri Yuniarti (Widow of the late Badaruddin Amin/Former KKPH Parengan); c) Marketing (revenue updates and biomass pricing in KPH Semarang); d) Discussion with Telkom – ACI, etc.
21.	20 Jul 2020	Program Yayasan Jati Sejahtera, Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi, Usulan RUPS Teknis Anak Perusahaan, dll	Jati Sejahtera Foundation Program, Division of Duties and Authorities of Members of the Board of Directors, Proposals for Subsidiary Technical GMS, etc.
22.	3 Aug 2020	Penyampaian Proposal Assessment Center Indonesia (ACI) oleh PT Telkom, Usulan Uji Coba Penerapan Off Taker Kopi & Jagung serta Laporan Rencana Perbaikan PPCI, Evaluasi Kinerja Produksi s.d Juli 2020, dll	Submission of the Indonesian Assessment Center Proposal by PT Telkom, Proposed Tests for the Application of Coffee & Corn Off Takers and PPCI Improvement Plan Reports, Production Performance Evaluation until July 2020, etc.
23.	10 Aug 2020	Review Struktur Organisasi, dll	Organizational Structure Review, etc.
24.	14 Sept 2020	Pengembangan POTP, Rebranding dan Repricing Minyak Kayu Putih Perhutani, dll	POTP Development, Rebranding and Repricing of Perhutani Eucalyptus Oil, etc.
25.	12 Okt 2020	Arahan WaMen tentang BUMN Research Institute, Kinerja Dapen dan Rencana pengalihan PPMP ke PPIP, Rencana Optimalisasi Aset kaitannya dengna Menyelesaikan Masalah Dapen, Rekrutmen Mandor tahun 2020, GSH, dll	Vice Minister's directions regarding BUMN Research Institute, Dapen Performance and Plans for transferring PPMP to PPIP, Asset Optimization Plans related to Resolving Dapen Problems, 2020 Foreman Recruitment, GSH, etc.
26.	21 Okt 2020	Pengadaan Interior Gedung Tahap II, Pembentukan BUMN Research Institutes untuk Perhutani, dll	Phase II Building Interior Procurement, Establishment of BUMN Research Institutes for Perhutani, etc.

AGENDA RAPAT DIREKSI
Board of Director Meetings Agenda

	Tanggal Date	Agenda Utama Main Agenda	
27	23 Okt 2020	Penyampaian Aduan dari Masyarakat Kedu Utara, Whistleblowing System (WBS), dll	Submission of Complaints from the North Kedu Community, Whistle Blowing System (WBS), etc.
28	26 Okt 2020	Pembahasan Anggaran Pengembangan SDM, Pelepasan Aset Perhutani, Investasi, dll	Discussion on HR Development Budget, Release of Perhutani Assets, Investment, etc.
29	13 Nov 2020	Logo Baru tahun 2020, Transformasi Website & Launching Video Perhutani, Swakelola Pekerjaan Fitting Out Interior Tahap II, dll	New Logo 2020, Website Transformation & Video Launching of Perhutani, Self-Management of Phase II Interior Fitting Out Work, etc.
30	23 Nov 2020	Perundingan PKB Tahap IV, dll	Phase IV CLA negotiations, etc.
31	30 Nov 2020	Update RJPP 2020-2024, Arahan Menteri/ Wakil Menteri BUMN, Pencapaian KPI sesuai 5 Program Prioritas Kementerian BUMN, dll	Updated RJPP 2020-2024, Directions of the Minister/Vice Minister of SOEs, Achievement of KPIs according to the 5 Priority Programs of the Ministry of SOEs, etc.
32	1 Des 2020	Kepemimpinan Teknologi (KPI), Persiapan RJPP dengan Wakil Menteri BUMN, Pending Matters, dll	Technology Leadership (KPI), RJPP Preparation with Deputy Minister of SOEs, Pending Matters, etc
33	11 Des 2020	E-procurement, dll	E-procurement, etc.
34	14 Des 2020	Key Issues PWC, dll	PWC Key Issues, etc.
Notulen Program Pengenalan Anggota Direksi/Dewas Baru Minutes of the Introduction of New Members of the Board of Directors/Supervisory Board			
1.	2 Mar 2020	Program Pengenalan Anggota Direksi Baru – Wahyu Kuncoro (Direktur Utama)	Introductory Program for the New Member of Board of Directors – Wahyu Kuncoro (President Director)
2.	2 Mar 2020	Program Pengenalan Anggota Direksi Baru – Natalas Anis Harjanto (Direktur Perhutanan Sosial)	Introductory Program for the New Member of Board of Directors – Natalas Anis Harjanto (Director of Social Forestry)
3.	2 Mar 2020	Program Pengenalan Anggota Direksi Baru – Ahmad Ibrahim (Direktur Pengembangan Bisnis & Pemasaran)	Introductory Program for the New Member of Board of Directors – Ahmad Ibrahim (Director of Business Dev. & Marketing)
4.	5 Mei 2020	Program Pengenalan Bagi Anggota Dewan Pengawas – Bambang Risyanto	Introductory Program for Members of the Supervisory Board – Bambang Risyanto
5.	5 Mei 2020	Program Pengenalan Anggota Dewan Pengawas Independen - Noer Fauzi Rachman	Introductory Program for Members of the Independent Supervisory Board - Noer Fauzi Rachman
6.	5 Mei 2020	Program Pengenalan Anggota Dewan Pengawas Independen – Chalid Muhammad	Introductory Program for Members of the Independent Supervisory Board – Chalid Muhammad
7.	5 Mei 2020	Program Pengenalan Bagi Anggota Dewan Pengawas – Komaruddin Simanjuntak	Introductory Program for Members of the Supervisory Board – Komaruddin Simanjuntak
8.	12 Feb 2020	Program Pengenalan Bagi Ketua Dewan Pengawas – Bambang Hendroyono	Introductory Program for the Chairperson of the Supervisory Board – Bambang Hendroyono
9.	14 Jul 2020	Program Pengenalan Bagi Anggota Dewan Pengawas – Yohanes Babptista Priyatmo Hadi	Introductory Program for Members of the Supervisory Board – Yohanes Babptista Priyatmo Hadi

Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Remuneration Policy for Supervisory Board and Board of Directors

Besaran remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi didasarkan atas capaian kinerja Perusahaan. Untuk menyusun dasar penetapan dan rekomendasi besaran remunerasi yang kredibel didukung oleh database yang kuat dari berbagai sumber.

Amount of remuneration for the Board of Supervisors and Directors is based on the Company's performance achievements. To formulate the basis for determining and recommending a credible amount of remuneration, it is supported by a strong database from various sources.

Dasar Kebijakan

Penetapan remunerasi Direksi berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta dengan memperhatikan market competitiveness untuk level jabatan Direksi.

Policy Framework

Remuneration for the Board of Directors refers to the Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board Remuneration Guideline in State- Owned Enterprise with the latest amendment through the Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number PER-06/MBU/06/2018 dated June 4, 2018 concerning Third Amendment on the Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number PER-04/MBU/2014 concerning Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board Remuneration Guideline in State-Owned Enterprise and considering market competitiveness for Board of Directors position level.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Kebijakan dan prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Pengawas terdiri dari beberapa tahapan yang mencakup proses penyusunan, analisis, pengajuan, dan penetapan.

Supervisory Board and Board of Directors Remuneration Procedure

The policies and procedures for determining remuneration for the Supervisory Board consist of several stages covering the process of preparation, analysis, submission and determination.

Perusahaan menetapkan penghasilan berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap serta insentif yang bersifat variable dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

1. Kinerja/ *Key Performance Indicator* (KPI),
2. Ukuran (*size*),
3. Pertumbuhan Perusahaan, dan
4. Tingkat inflasi.

The Company stipulates remuneration in form of Salary or Wages, Allowances and fixed Facilities and variabel incentives that are done by considering criteria, as follows:

1. Key Performance Indicator (KPI),
2. Size,
3. Company's Growth, and
4. Inflation Rate.

Selain itu, pemberian remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi juga mempertimbangkan pencapaian jangka panjang sebagai hasil dari pada sistem yang telah dibangun di dalam Perusahaan.

In addition, remuneration payment for the Supervisory Board and Supervisory Board also considers long-term achievement as result of the system established in the Company.

Mekanisme Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Honorarium;
2. Tunjangan;
3. Fasilitas;
4. Tantiem.

Supervisory Board and Board of Directors Remuneration Mechanism

Based on the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/06/2016 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Supervisory Board for State-Owned Enterprises, the components of the income for the Board of Commissioners consist of:

1. Honorarium;
2. Allowances;
3. Facilities;
4. Incentives.

Berikut ini merupakan tahapan pengajuan usulan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi:

- Perusahaan menyusun usulan remunerasi
- Pembahasan usulan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi juga melihat kesesuaian kinerja Dewan Pengawas dan Direksi dengan KPI yang ditetapkan.
- Penetapan usulan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi juga memperhatikan kondisi perusahaan, apakah kondisi keuangan perusahaan dapat memenuhi

The stages of submitting a remuneration proposal for the Board of Supervisors and Board of Directors is as follows:

- The company prepares a remuneration proposal
- Discussion of the proposed remuneration for the Board of Supervisors and Directors also looks at the suitability of the performance of the Supervisory Board and the Board of Directors with the established KPIs.
- Determination of the proposed remuneration for the Board of Supervisors and Directors

usulan tersebut atau tidak.

- Penetapan usulan besaran formula remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi memperhatikan faktor penyesuaian industri, inflasi dan faktor jabatan agar relevan.
- Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap usulan besaran formula remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi
- Berdasarkan hasil telaah terhadap usulan besaran formula remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi, selanjutnya diusulkan dalam agenda pembahasan RPB.
- Keputusan Penetapan besaran formula remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi dituangkan dalam risalah RPB Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.

also takes into account the condition of the company, whether the company's financial condition can meet the proposal or not.

- Determination of the proposed amount of the remuneration formula for the Board of Supervisors and the Board of Directors taking into account industry adjustment factors, inflation and occupational factors to make it relevant.
- The Supervisory Board reviews the proposed remuneration formula for the Board of Trustees and the Board of Directors
- Based on the results of a review of the proposed amount of the remuneration formula for the Board of Supervisors and Directors, it is then proposed in the RPB discussion agenda.
- The decision to determine the amount of the remuneration formula for the Board of Supervisors and Directors is outlined in the minutes of the RPB for the Financial Statements Fiscal Year 2020.

Realisasi Anggaran Remunerasi dan *Key Performance Indicators*

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2020 adalah sebesar Rp 6,67 miliar.

Realization of Remuneration Budget and Key Performance Indicators

The amount of Remuneration for the Board of Commissioners in 2020 amounted Rp6.67 billion.

Struktur dan Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas

Struktur remunerasi Dewan Pengawas memperhatikan ketentuan regulator maupun internal Perusahaan sesuai dengan persetujuan Pemilik Modal. Komponen Remunerasi Dewan Pengawas meliputi:

1. Honorarium per bulan,
2. Tunjangan yang terdiri dari:
   a. Tunjangan Hari Raya,
   b. Santunan Purna Jabatan (25%),
   c. Tunjangan Transportasi (20%)
3. Fasilitas yang terdiri dari:
   a. Fasilitas Kesehatan,

Supervisory Board Remuneration Structure and Amount

Supervisory Board remuneration structure concerns provisions of the regulators and the Company's internally according to approval from the Capital Owner. The Supervisory Board remuneration components are including:

1. Monthly wages,
2. Allowances, including:
   a. Religious Holiday Allowance,
   b. Post-Employment Benefit (25%),
   c. Transportation Allowance (20%),
3. Facilities, including:
   a. Health facilities,

b. Fasilitas Perkumpulan Profesi,
c. Fasilitas Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum
4. Tantiem.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka jumlah remunerasi Dewan Pengawas Perhutani tahun 2020 adalah sebagai berikut:

b. Professional Association facility,
c. Legal Assistance and Legal Protection facilities,
4. Incentives..

Referring to the provisions, amount of remuneration for Supervisory Board in Perhutani in 2020 is as follows:

REMUNERASI DEWAN PENGAWAS
Supervisory Board Remuneration

Nama Name	**Remunerasi** Remuneration	**THR** Allowance	**Jumlah Per Tahun** Total Per Annum
Bambang Hendroyono	78.750.000	78.750.000	1.023.750.000
Bambang Risyanto	70.875.000	70.875.000	921.375.000
Chalid Muhammad	70.875.000	70.875.000	921.375.000
Komaruddin Simanjuntak	70.875.000	70.875.000	921.375.000
Noer Fauzi Rachman	70.875.000	70.875.000	921.375.000
YB. Priyatmo Hadi	70.875.000	70.875.000	921.375.000

Struktur dan Jumlah Remunerasi Direksi

Struktur remunerasi Direksi memperhatikan ketentuan regulator maupun internal Perusahaan sesuai dengan persetujuan Pemilik Modal. Komponen remunerasi Direksi Perhutani meliputi:

1. Gaji per bulan,
2. Tunjangan yang terdiri dari:
   a. Tunjangan Hari Raya,
   b. Tunjangan Perumahan,
   c. Santunan Purna Jabatan (25%),
   d. Tunjangan Komunikasi,
3. Fasilitas yang terdiri dari:
   a. Fasilitas kendaraan dinas,
   b. Fasilitas Kesehatan,
   c. Fasilitas Perkumpulan Profesi,
   d. Fasilitas Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum,
   e. Fasilitas Club Membership, dan
   f. Fasilitas biaya representasi

Board of Directors Remuneration Structure and Amount

Board of Directors remuneration structure concerns provisions of the regulators and the Company's internally according to approval from the Capital Owner. The Board of Directors remuneration components in Perhutani are including:

1. Monthly salary,
2. Allowances, including:
   a. Religious Holiday Allowance,
   b. Housing Allowance,
   c. Post-Employmetn Benefit (25%),
   d. Communication Allowance,
3. Facilities, including:
   a. Operational vehicle facility,
   b. Health facilities,
   c. Professional Association facility,
   d. Legal Assistance and Legal Protection facilities,
   e. Club Membership facility, and
   f. Representative cost facility.

4. Cuti Tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja
5. Tantiem, termasuk jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi.

4. Annual Leaves of 12 (twelve) work days
5. Incentives, including type and amount of short-term and long-term/post-employment benefits for every Board of Directors members.

REMUNERASI DIREKSI
Board of Directors Remuneration

Nama Name	Gaji Paket/bulan Package Salary/month	THR/tahun Allowance/year
Wahyu Kuncoro	175.000.000	175.000.000
Eko Wahyudi	148.750.000	148.750.000
Kemal Sudiro	157.500.000	157.500.000
Ahmad Ibrahim	148.750.000	148.750.000
Bambang Catur Wahyudi*	148.750.000	148.750.000
Natalas Anis Harjanto	148.750.000	148.750.000

Hubungan Antara Remunerasi dan Kinerja Perusahaan

Kebijakan dan prosedur penetapan remunerasi bagi Direksi terdiri dari beberapa tahapan yang mencakup proses penyusunan, analisa, pengajuan, dan penetapan. Penyusunan kebijakan dan usulan remunerasi dilaksanakan Dewan Pengawas dan Direksi kepada Pemilik Modal. Pada tahapan terakhir, rekomendasi remunerasi diajukan dalam RPB Tahunan yang berwenang mengambil keputusan akhir penetapan remunerasi Direksi. Komitmen Direksi dalam mencapai KPI 2018 dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disetujui oleh Dewan Pengawas. Hal-hal yang menjadi tolok ukur pencapaian KPI berfungsi sebagai target Perusahaan yang diupayakan untuk direalisasikan secara optimal.

Relation Between Remuneration and Performance of The Company

Remuneration policy and procedure for the Board of Directors consist of several stages including preparation, analysis, proposal and stipulation process. The remuneration policy and proposal preparation is carried out by the Supervisory Board and Board of Directors to the Capital Owner. At the last stage, remuneration recommendation is proposed in the Annual RPB with authority to take final decision on Board of Directors remuneration stipulation. Commitment of the Board of Directors in achieving KPI 2018 is disclosed in Company's Work and Budget Plan as approved by the Supervisory Board. Issues as indicators of the KPI achievement, which are functioned as the Company's targets are seek to be executed optimally.

Kebijakan Keberagaman Anggota Dewan Pengawas dan Direksi

Supervisory Board and Board of Directors Members Diversity Policy

Perhutani yakin bahwa kebijakan keberagaman merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait proses pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan serta fungsi pengelolaan Perusahaan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan alternatif pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. Perhutani telah memiliki kebijakan keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi yang dimuat dalam Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas. Perhutani memperhatikan aspek keberagaman terkait pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin dalam menentukan komposisi Dewan Pengawas dan Direksi namun tetap mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Keberagaman komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Perhutani dijabarkan sebagai berikut:

Perhutani believes that diversity policy is a positive aspect, particularly related to decision- making process in the implementation of supervisory and managerial functions in the Company. The policy is expected to give alternative decision-making by considering various broader aspects. Perhutani has a Supervisory Board and Board of Directors Composition diversity policy that is disclosed in Board Manual for Board of Directors and Supevisory Board. Perhutani concerns diversity aspects related to education, career experience, age and gender in stipulating composition of the Supervisory Board and Board of Directors, however, still considering requirements of the Company according to the operated business field. The Supevisory Board and Board of Directors composition diversity in Perhutani is explained below:

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Supervisory Board Composition Diversity

Pendidikan Education	**Pengalaman Kerja** Career Experience		**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender
Ekonomi Perusahaan Corporate Economy	Direktur Utama Perum BULOG	President Director of Perum BULOG	Keberagaman usia anggota Dewan Pengawas Perhutani pada tahun buku 2020 adalah 51 sd 64 tahun.	Keberagaman usia anggota Dewan Pengawas Perhutani pada tahun buku 2020 adalah 51 sd 64 tahun.
Kehutanan Forestry	Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Director General of Sustainable Production Forest Management (PHPL) Ministry of Environment and Forestry		

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS
Supervisory Board Composition Diversity

Pendidikan Education	**Pengalaman Kerja** Career Experience		**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender
AKABRI	Deputi II (BIN)	Deputi II (BIN)	The age diversity of members of the Perhutani Supervisory Board in the 2020 financial year is 51 to 64 years.	The age diversity of members of the Perhutani Supervisory Board in the 2020 financial year is 51 to 64 years
	Direktur Bina Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Director of Social Forestry Development Ministry of Environment and Forestry		
Teknologi Informasi Information Technology				

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI
Board of Directors Composition Diversity

Pendidikan Education	**Pengalaman Kerja** Career Experience		**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender
Ilmu Akuntansi Accounting Studies	Group Chief Financial Officer	Group Chief Financial Officer	Keberagaman usia anggota Direksi Perhutani pada tahun buku 2020 adalah 48 sd 57 tahun.	Sampai dengan akhir 2020 komposisi anggota Direksi Perhutani tediri dari 5 (lima) orang laki-laki.
ilmu Ekonomi Economics Studies	Kepala Divisi Perbankan	Head of Banking Division		
Ilmu Kehutanan Forestry Studies	Staf Khusus Panglima TNI	Special Staff to Chief of TNI	The age diversity of members of the Board of Directors of Perhutani in the 2020 financial year is 48 to 57 years.	Until the end of 2020 the composition of the Board of Directors of Perhutani consists of 5 (five) men.
Ilmu Psikologi Psychology Studies	Direktur SDM dan Umum	HR and General Affairs Director		
Ilmu Kehutanan Forestry Studies				

Sekretaris Dewan Pengawas

Secretary to the Supervisory Board

Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas dibantu oleh staf Sekretariat Dewan Pengawas yang diangkat dan diberhentikan Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari luar Perusahaan.

The Supervisory Board may establish a Supervisory Board Secretariat led by the Supervisory Board Secretary assisted by the Supervisory Board Secretariat staff who are appointed and dismissed by the Supervisory Board. The Secretary to the Supervisory Board is from outside the Company.

Sekretaris Dewan Pengawas sebagai organ pendukung dalam struktur GCG Perusahaan di bawah struktur Dewan Pengawas memiliki peran yang besar dalam memastikan Dewan Pengawas menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan best practices dan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

As supporting organ in the Company's GCG structure under the Supervisory Board structure, Secretary to Supervisory Board has significant role in ensuring the Supervisory Board has implemented GCG principles according to best practices and prevailing Law.

Selain itu, Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup fungsi pengawasan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

In addition, the Secretary to Supervisory Board holds the duty and funciton in administration and secretariat activities implementation under the supervisory function scope and directly responsible to the Supervisory Board.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 13/DWAS-PHT/2017 tanggal 16 November 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Perhutani, Sekretaris Dewan Pengawas Perhutani saat ini dijabat oleh Wita Puspitarini.

Pursuant to Supervisory Board Decree No. 13/ DWAS-PHT/2017 dated November 16, 2017 concerning Appointment and Dismissal of Secretary to Supervisory Board in Perhutani, the Secretary to Supervisory Board in Perhutani is currently served by Wita Puspitarini.

Profil Sekretaris Dewan Pengawas

Profile of Secretary to Supervisory Board

WITA PUSPITARINI

Sekretaris Dewan Pengawas
Secretary To Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, 28 Agustus 1984. Menyelesaikan studi S1 Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung tahun 2007. S2 Universitas Indonesia Jakarta tahun 2018. Pada tahun 2009 menjadi PNS di Kementerian BUMN. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Perhutani sejak 16 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas nomor SK Pengangkatan No. 13/DWAS-PHT/2017.

Indonesian citizen, born in Jombang, August 28, 1984. Completed his undergraduate studies at Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung in 2007. Masters degree at the Universitas Indonesia Jakarta in 2018. In 2009 he became a civil servant at the Ministry of SOEs. Served as Secretary of the Supervisory Board of Perhutani since November 16, 2020 based on the Decree of the Supervisory Board number SK Appointment No. 13/DWAS-PHT/2017.

Pedoman Kerja dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas, dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pedoman Kerja yang yang tercantum dalam Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas *(Board Manual)*, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pengurusan komunikasi dan penyelenggaraan administrasi Dewan Pengawas dan kesekretariatan Dewan Pengawas sesuai hukum dan prinsip GCG;
2. Mempersiapkan keputusan terhadap usulan perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Pengawas;
3. Mempersiapkan materi awal dalam hal nasihat yang akan disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi;

Work Manual and Responsibility of Secretary to Supervisory Board

In peforming her duty, the Secretary to Supervisory Board refers to Work Manual as disclosed in Board Manual for the Board of Directors and Supervisory Board, with duty and responsibility, as follows:

1. Coordinate arrangement of communication and administration for the Supervisory Board and secretariat of the Supervisory Board accordign to the GCG law and principle;
2. Prepare decision on Board of Directors legal action proposal that requires written approval from the Supervisory Board;
3. Prepare initial brief in terms of advise that will be provided by the Supervisory Board to the Board of Directors;

4. Mempersiapkan pendapat dan saran (tanggapan) Dewan Pengawas yang akan disampaikan kepada RPB mengenai RJPP, RKAP dan Laporan Tahunan;
5. Mempersiapkan tugas Dewan Pengawas dalam menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan ke dalam RKAP;
6. Mempersiapkan usulan Dewan Pengawas kepada RPB mengenai Akuntan Publik yang akan digunakan oleh Perusahaan;
7. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas
8. Mempersiapkan materi laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku terkait pada RPB;
9. Melaksanakan kewajiban lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Pengawas.

4. Prepare suggestion and recommendation (opinion) from the Supervisory Board to be presented in RPB concerning the RJPP, RKAP and Annual Report;
5. Prepare duty of the Supervisory Board in preparing annual work plan and included in the RKAP;
6. Prepare Supervisory Board recommendation to the RPB concenring Public Accountant that will be applied by the Company;
7. Prepare minutes of Supervisory Board Meeting;
8. Prepare material of report concerning supervisory duty that has been carried out by the Supervisory Board during the related fiscal year in the RPB;
9. Perform other obligations assigned by the Supervisory Board.

Remunerasi Sekretaris Dewan Pengawas

Remunerasi Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Pengawas terdiri dari:

1. Honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
2. Fasilitas;
3. Tunjangan; dan/atau
4. Tantiem atau insentif kerja

Secretary to Supervisory Board Remuneration

The Secretary to Supervisory Board remuneration is stipulated by the Supervisory Board by considering capability of the Company. Amount and type of the Secretary to Supervisory Board remuneration consists of:

1. Wages, maximum 15% (fifteen percent) of the President Director's salary.
2. Facilities;
3. Allowances; and/or
4. Work Incentives or Bonus.

Kegiatan Sekretaris Dewan Pengawas Tahun 2020

Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas selama tahun 2020, antara lain:

Activities of Secretary to Supervisory Board In 2020

Supervisory Board Secretariate is led by a Secretary to Supervisory Board who is in charge to perform activities to help the Supervisory Board in performing the duties. Activities of the Supervisory Board Secretariat in 2020 are as follows:

a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat *(briefing sheet)* Dewan Pengawas;
b. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas;
e. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Pengawas;
f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Sekretaris Dewan Pengawas selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
a. Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas;
d. Sebagai penghubung *(liaison officer)* Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Sekretaris Dewan Pengawas memegang peran penting dalam meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG perusahaan, khususnya untuk lingkup Dewan Pengawas.

a. Preparing for meetings, including the Board of Supervisor's briefing sheet;
b. Make minutes of the meeting of the Supervisory Board in accordance with the provisions of the articles of association of the Company;
c. Administering Supervisory Board documents, whether incoming mail, outgoing mail, minutes of meetings or other documents;
d. Drafting the Work Plan and Budget of the Supervisory Board;
e. To draft Board of Supervisors Reports;
f. Perform other duties of the Supervisory Board.

In addition to performing the above duties, the Secretary of the Board of Supervisors as the head of the Secretariat, performs other tasks as follows:
a. Ensure that the Supervisory Board complies with prevailing laws and regulations and applies GCG principles;
b. Provide information required by the Supervisory Board periodically and/or at any time if requested;
c. To coordinate members of the Committee, if necessary in order to facilitate the duties of the Board of Supervisors;
d. As a liaison officer of the Board of Supervisors with other parties

Secretary to the Supervisory Board plays an important role in improving the implementation of the company's GCG principles, particularly in the scope of the Supervisory Board.

Komite-komite Dewan Pengawas

Committees Under The Supervisory Board

Dewan Pengawas terus mengoptimalkan penerapan GCG dan melakukan restrukturisasi organ pendukung Dewan Pengawas khusunya pada komposisi komite Dewan Pengawas dengan membentuk komite sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas/Dewan Pengawas BUMN dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perhutani.
2. Dewan Pengawas dapat membentuk komite yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

The Supervisory Board continues to optimize the implementation of GCG and restructure the supporting organs of the Supervisory Board, especially in the composition of the Supervisory Board committee by forming the following committees:

1. In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Supervisory Board/Supervisory Board of BUMN and in accordance with the Articles of Association of Perhutani.
2. The Supervisory Board may form a committee that works collectively and functions to assist the Supervisory Board in carrying out its duties.

Persyaratan Anggota Komite

Anggota Komite wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Perusahan, antara lain:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan dan menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
4. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.

Committee Requirement

Committee members shal fulfill fit and proper requirements as stipulated by the Company, as follows:

1. Having good integrity and knowledge as well as sufficient work experience that are related to the committee's duty;
2. Not having any personal interest/affiliation that may cause negative impact and conflict of interest to the Company;
3. Having sufficient knowledge in the Company's business field and allocate sufficient time to finish the duties;
4. Having capability to cooperate and communicate effectively.

Proses Pemilihan Anggota Komite yang Berasal dari Pihak Independen

Rangkaian Proses Pemilihan Anggota Komite yang Berasal dari Pihak Independen adalah sebagai

Appointment Process of Committee Members from Independent Party

Series of Appointment Process of Committee Members from Independent Party is explained

berikut:

1. Dewan Pengawas mengusulkan nama calon anggota komite dari pihak independen yang dipersiapkan oleh Sekretaris Dewan Pengawas, yang mana calon anggota komite harus memenuhi persyaratan dan berasal dari luar Perusahaan.
2. Calon anggota komite dari pihak independen diharuskan memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas Komite terkait dan tidak diperbolehkan memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainya, Direksi dan/atau Pemilik Modal yang bisa mempengaruhi independensinya.
3. Dewan Pengawas akan melakukan seleksi berupa wawancara dan background check untuk meneliti kapabilitas para calon anggota komite yang diajukan.
4. Dewan Pengawas selanjutnya memutuskan siapakah yang terpilih sebagai anggota komite dari pihak independen dengan mempertimbangkan hasil seleksi melalui Rapat Internal Dewan Pengawas.
5. Pengangkatan anggota Komite dari pihak Independen dicantumkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Perhutani. Pemberhentian anggota Komite dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya, anggota komite mengundurkan diri dan/atau diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas. Masa kerja anggota komite sesuai surat keputusan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Surat Keputusan ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan.

below:

1. Supervisory Board proposes list of committee members name candidates from independent parties, as prepared by the Secretary to the Supervisory Board, wher ethe Committee member candidate shall fulfill the requirements and external party of the Company.
2. Committee member candidate from independent party is required to have sufficient knowledge and career experience in the Committee's work field and not allowed to have any financial, managerial, shares ownership, and/or family affiliations with other Supervisory Board members, Board of Directors and/or Shareholders that may influence his/her independency.
3. Supervisory Board will perform a selection in form of interview and background check to examine capability of the proposed commitee member candidates.
4. Next, the Supervisory Board will decide the selected committee member from independent party with purpose to consider result of selection through Supervisory Board Internal Meeting.
5. Appointmet of Committee member from Independent Party is disclosed in the Supervisory Baord Decree.

Appointment and Dismissal of Committee Members

The appointment and dismissal of Committee members is carried out based on a Decree issued by the Perhutani Supervisory Board. Dismissal of a member of the Committee can be done if the member concerned ends his/her term of office, the committee member resigns and/or is dismissed based on the decision of the Supervisory Board. The term of office of the committee members according to the decision letter is 3 (three) years as of the signing of this Decree and can be extended once for 2 (two) years of office.

KOMITE AUDIT
Audit Committee

Komite Audit dibentuk guna melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan (oversight) yang efektif atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Audit Committee in Perhutani was established to encourage the consistent application of GCG principles. The principles that make Perhutani more transparent, accountable, comply with laws and regulations, be independent in maintaining sustainability and treat stakeholders equally.

Komite Audit dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas No.02/DWAS-PHT/2017 dan Keputusan Dewan Pengawas No.07/DWAS-PHT/2017. Komite Audit menjalankan tugas berdasarkan mandat yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas. Tugas utama adalah memberikan pendapat independen dan profesional kepada Dewan Pengawas berkenaan dengan pengendalian internal yang memadai, peningkatan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan dengan melakukan kajian ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik, serta peningkatan praktik GCG sehubungan dengan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Pengawas.

Audit Committee is established accordign to the Supervisory Board Decree No. 02/DWAS-PHT/2017 and Supervisory Board Decree No. 07/DWAS-PHT/2017. The Audit Committee performs the duty based on mandate as stipulated in the Supervisory Board Decree. Main duty is to provide independent and professional opinion to the Supervisory Board related to sufficient internal control, improvement of disclosure and financial reporting quality by performing review on the audit scope, accuracy as well as independency and objectiveness of the public accountant, and improvement of GCG practice in relation to the Supervisory Board's supervisory duty and function.

Komposisi dan Profil Komite Audit

Komposisi Komite Audit yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dari Dewan Pengawas, dan 3 (tiga) orang anggota independen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang audit, akuntansi, keuangan, dan tata kelola.

Audit Committee Composition and Profile

Audit Committee composition consists of 1 (one) Chairman from the Supervisory Board, and 3 (three) Independent members with knowledge and experience in Audit, Accounting, Finance and Governance.

KOMPOSISI DAN PROFIL KOMITE AUDIT
Audit Committee Composition And Profile

Nama Name	**Jabatan** Position	**Keterangan** Description	
Hilman Nugroho	Ketua/ Chairman	• SK Pengangkatan No. 04/ DWAS-PHT/2019 tgl 30 Juli 2019 • SK Pemberhentian No. 06/ DWAS-PHT/2020 tgl 28 April 2020.	• Appointment Decree No. 04/DWAS-PHT/2019 on 30 July 2019 • Termination Decree No. 06/ DWAS-PHT/2020 April 28, 2020
Chalid Muhammad	Ketua/ Chairman	SK Pengangkatan No.06/ DWAS-PHT/2020 tgl 28 April 2020.	Appointment Decree No. 06/ DWAS-PHT/2020 dated 28 April 2020
Made Santiyasa	Anggota/ Member	SK Pengangkatan No. 07/ DWAS-PHT/2017 tgl 2 Juni 2017	SK Appointment No. 07/ DWAS-PHT/2017 2 June 2017
Abdul Mukhit	Anggota/ Member	• SK Pengangkatan No. 05/ DWAS-PHT/2019 tgl 02 Agustus 2019 • SK Pemberhentian No. 02/ DWAS-PHT/2020 tgl 01 April 2020.	• Appointment Decree No. 05/DWAS-PHT/2019 on 02 August 2019 • Termination Decree No. 02/ DWAS-PHT/2020 April 01, 2020.
M Farkhan Supriyadi	Anggota/ Member	SK Pengangkatan No.02/ DWAS-PHT/2020 tgl 01 April 2020.	Appointment Decree No. 02/ DWAS-PHT/2020 dated 01 April 2020.

Profil ringkas dari masing-masing anggota Komite Audit dipaparkan sebagai berikut.

Brief Profile of each Committee Audit Member is presented as follows:

Profil Anggota Komite Audit

Audit Committee Member Profile

CHALID MUHAMMAD

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profil Beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris.
His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners.

MADE SANTIYASA

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Warga Negara Indonesia, Lahir di Tabanan, 6 Februari 1957. Menyelesaikan studi di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan tahun 1982. Sebelumnya adalah PNS di Kementerian Kehutanan dengan jabatan terakhir sebagai Pemeriksa/Auditor Madya pada Inspektorat Jenderal (2017). Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Perum Perhutani sejak 2 Juni 2017.

Indonesian citizen, born in Tabanan, February 6, 1957. Completed his studies at Gadjah Mada University, Faculty of Forestry in 1982. Previously, he was a civil servant at the Ministry of Forestry with his last position as Examiner/Middle Auditor at the Inspectorate General (2017). Appointed as a Member of the Audit Committee of Perum Perhutani since 2 June 2017.

M FARKHAN SUPRIYADI

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Warga Negara Indonesia, Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Diponegoro dan Magister Finance dari Universitas Trisakti. Berpengalaman di industri keuangan sejak tahun 1995 dan pernah bekerja di PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Perum Perhutani sejak 1 April 2020.

Indonesian citizen, holds a Bachelor's degree in Accounting from Diponegoro University and a Masters in Finance from Trisakti University. Experienced in the financial industry since 1995 and has worked at PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Appointed as a Member of the Audit Committee of Perum Perhutani since April 1, 2020.

Independensi Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit harus merupakan pihak yang independen, minimal salah satu diantaranya harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan, untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan Perhutani. Berikut ini merupakan status independensi anggota Komite Audit per 31 Desember 2020.

Independence of Audit Committee Members

Members of the Audit Committee must be independent parties, at least one of whom must have expertise in accounting and/or finance, to avoid conflicts of interest in the decision-making process in achieving Perhutani's goals. The following is the independence status of members of the Audit Committee as of December 31, 2020.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT
Independence of Audit Committee Members

Kriteria Independensi Independency Criteria		Chalid Muhammad	Made Santiyasa	M Farkhan Supriyadi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan Direksi	Not having any financial affiliation with Supervisory Board and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi	Not having any managerial affiliation in the Company, subsidiaries or affiliated company	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan	Does not have a share ownership relationship in the Company	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau sesama anggota komite.	Has no family relationship with the Supervisory Board, Board of Directors and/or fellow committee members.	✓	✓	✓

Pedoman Komite Audit

Pedoman Komite Audit secara garis besar memuat tujuan, fungsi, tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit tanggal 12 Agustus 2014. Pedoman Komite Audit senantiasa ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan Perusahaan.

Audit Committee Charter

Audit Committee Charter generally discloses purpose, function, duty and responsibility that are stipulated according to the Audit Committee Charter dated August 12, 2014. The Audit Committee Charter is always be reviewed and updated periodically according to the Company's provisions and needs.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Pedoman Komite Audit yaitu:

Duty and Responsibility Of Audit Committee

Duty and responsibility of Audit Committee based on the Audit Committee charter are as follows:

1. Membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya.
6. Selain tugas-tugas tersebut di atas, Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Januari 2020.
2. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Februari 2020.
3. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Maret 2020.
4. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan April 2020.
5. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Mei 2020.
6. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juni 2020.
7. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juli 2020.
8. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Agustus 2020.

1. Assist the Supervisory Board to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external duties of auditors and internal auditors.
2. Assess the implementation of activities and audit results conducted by the Internal Control Unit as well as external auditors.
3. Provide recommendations on the improvement of management control system and its implementation.
4. Ensure there has been a satisfactory review procedure for any information issued by the company.
5. To identify things that require the attention of the Supervisory Board as well as carry out other duties of Supervisory Board.
6. In addition to these tasks, the Supervisory Board may provide other assignments to the Audit Committee whose implementation is always guided by the Audit Committee Charter.

Audit Committee Activity Report 2020

In 2020, the Audit Committee has carried out its duties in accordance with applicable regulations, including the following activities:

1. Prepared the review and agenda for Supervisory Board meeting in January 2020.
2. Prepare the review and agenda for Supervisory Board meeting in February 2020.
3. Prepared the review and agenda for Supervisory Board meeting in March 2020.
4. Prepared the review and agenda for Supervisory Board meeting in April 2020.
5. Prepared the review and agenda for Supervisory Board meeting in May 2020.
6. Prepare the review and agenda for Supervisory Board meeting in June 2020.
7. Prepared the review and agenda for Supervisory Board meeting in July 2020.
8. Prepared the review and agenda for Supervisory Board meeting in August 2020.

9. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan September 2020.
10. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Oktober 2020.
11. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan November 2020.
12. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Desember 2020.

9. Prepared the review and materials for Supervisory Board meeting in September 2020.
10. Prepared the review and materials for Supervisory Board meeting in October 2020.
11. Prepared the review and materials for Supervisory Board meeting in November 2020.
12. Prepared the review and materials for Supervisory Board meeting in December 2020

Evaluasi Atas Kinerja Auditor Eksternal

Komite Audit telah menelaah dan membahas dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) yang bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia serta terkait efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, kualitas dan akseptabilitas dari standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan.

Evaluation on External Auditor's Performance

Audit Committee has reviewed and discussed withKAPTanudiredja,Wibisana, Rintis& Partners (PwC) with responsibility to provide opinion on fairness of the financial statements presentation and notes on the financial statements according to Indonesian Financial Accounting Standards and related to effectivenes of the internal control on the financial reporting, quality and acceptance of the financial accounting standard applied by the Company.

Penilaian Atas Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal

Komite Audit telah melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui penelaahan Laporan Hasil Audit yang tertera pada Risalah Rapat Komite. Audit internal telah dilakukan sesuai dengan rencana audit tahunan.

Evaluation on Effectiveness of Internal Audit Implementation

Audit Committee has conducted assessment on effectiveness of the internal audit implementation through a review on Audit Report as disclosed in the Minutes of Committee Meeting. Internal Audit has been implemented based on the annual audit plan.

Penilaian Atas Efektivitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Komite Audit telah melakukan penilaian atas efektivitas penerapan tata kelola perusahaan melalui penelaahan Laporan Hasil Asesmen GCG yang dilakukan perusahaan yang saat ini berjalan memadai namun masih perlu ditingkatkan.

Evaluation on Effectiveness of The Corporate Governance Implementation

Audit Committee has conducted assessment on effectiveness of the corporate governance implementation through a review on GCG Assessment Report that is done by the Company currently and has been appropriate while still needs to be improved.

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Audit Committee Meeting

Throughout 2020, the Audit Committee held 12 meetings with attendance level of the members, as follows:

RAPAT KOMITE AUDIT
Audit Committee Meeting

Name Name	**Jumlah Rapat** Total Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase Kehadiran** Attendance Percentage
Hilman Nugroho*	3	3	100
Abdul Mukhit*	3	3	100
Chalid Muhammad**	9	9	100
Made Santiyasa	12	12	100
M Farkhan Supriyadi**	9	9	100

*Menjabat hingga April 2020
**Menjabat sejak April 2020

*Served until April 2020
**Served since April 2020

Program Pengembangan Komite Audit

Peningkatan Kompetensi Komite Audit mengenai perkembangan dunia usaha khususnya terkait pelaksanaan kebijakan sistem pengendalian internal dan audit. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam mengawal aktivitas Perusahaan.

Development Program For Audit Committee

Increasing the Competence of the Audit Committee regarding developments in the business world, particularly in relation to the implementation of internal control system policies and audits. These activities are expected to be able to support the implementation of the duties and responsibilities of the Audit Committee in overseeing the Company's activities.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dibentuk untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The Risk Management and Compliance Committee was established to assist the Supervisory Board in carrying out its risk oversight responsibilities in accordance with applicable regulations.

Komite Manajemen Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 02/DWAS-PHT/2015 tanggal 27 Agustus 2015. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab memantau kajian atas pengembangan usaha antara lain dalam bentuk investasi, proyek, atau produk baru sesuai dengan strategi Perusahaan, serta melakukan kajian atas kebijakan, praktik pengelolaan risiko, dan tindakan mitigasi yang diambil oleh Perusahaan.

The Risk Management Committee is established based on Decree No. 02/DWAS-PHT/2015 dated August 27, 2015. The Risk Management Committee is responsible for monitoring studies on business development, including in the form of investments, projects, or new products in accordance with the Company's strategy, as well as reviewing policies, risk management practices, and actions mitigation taken by the Company.

Komposisi dan Profil Komite Manajemen Risiko

Susunan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Composition and Profile of the Risk Management Committee

The composition of the Risk Management Committee is as follows:

KOMPOSISI DAN PROFIL KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Composition and Profile of the Risk Management Committee

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	
Haryadi Himawan	Ketua/ Chairman	• SK Pengangkatan No.04/DWAS-PHT/2019 tgl 30 Juli 2019 • SK Pemberhentian No. 05 /DWAS-PHT/2020 tgl 14 April 2020	• Appointment Decree No. 04/ DWAS-PHT/2019 dated 30 July 2019 • Termination Decree No. 05 /DWAS-PHT/2020 April 14, 2020
Indriani Widiastuti	Ketua/ Chairman	• SK Pengangkatan No. 05/ DWAS-PHT/2020 tgl 14 April 2020 • SK Pemberhentian No. 10 / DWAS-PHT/2020 tgl 22 Juni 2020	• Appointment Decree No. 05/ DWAS-PHT/2020 April 14, 2020 • Termination Decree No. 10 / DWAS-PHT/2020 June 22, 2020
Komaruddin Simanjuntak	Ketua/ Chairman	SK Pengangkatan No. 10/DWAS-PHT/2020 tgl 22 Juni 2020	Appointment Decree No. 10/DWAS-PHT/2020 June 22, 2020
Moch. Ali Wafa Pujiono	Anggota/ Member	SK Pengangkatan No.07/DWAS-PHT/2017 tgl 2 Juni 2017.	Appointment Decree No.07/DWAS-PHT/2017 dated 2 June 2017
Muchamad Iman Tawakal	Anggota/ Member	SK Pengangkatan No.06/DWAS-PHT/2019 tgl 02 Agustus 2019	Appointment Decree No. 06/DWAS-PHT/2019 dated 02 August 2019

Profil ringkas dari masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko dipaparkan sebagai berikut.

Brief profile of each Risk Management Committee member is presented below:

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Member Profile

KOMARUDDIN SIMANJUNTAK

Ketua Komite Manajemen RIsiko
Chairman of the Risk Management Committee

Profil Beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris.
His profile can be seen on the Profile of the Board of Commissioners

MOCHAMAD ALI WAFA PUJIONO

Anggota Komite Manajemen RIsiko
Member of Risk Management Committee

Warga Negara Indonesia, Lahir di Trenggalek, 1 Maret 1957. Menyesaikan studi S1 di IPB tahun 1981 dan S2 Manajemen Hutan di Universitas Mulawarman tahun 2006. Sebelumnya adalah Sekretaris Korpri Unit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Maret tahun 2017. Diangkat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko sejak 2 Juni 2017.

Indonesian citizen, born in Trenggalek on March 1, 1957. Completed his undergraduate studies at IPB in 1981 and Master's degree in Forest Management at Mulawarman University in 2006. Previously was Secretary of the Korpri Unit of the Ministry of Environment and Forestry until March 2017. Appointed as a Member of the Management Committee Risk since June 2, 2017.

MUCHAMAD IMAN TAWAKAL

Anggota Komite Manajemen RIsiko
Member of Risk Management Committee

Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan studi Si di IPB tahun 1984, S2 Institut Manajemen Prasetiya Mulya tahun 1991, S2 Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya tahun 1993. Sebelumnya adalah Komisaris Utama PT.Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha. Diangkat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko sejak 02 Agustus 2019.

Indonesian citizens. Completed his Bachelor's studies at IPB in 1984, Master's Prasetiya Mulya Management Institute in 1991, Masters in Prasetiya Mulya School of Management in 1993. Previously was the President Commissioner of PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha. Appointed as a Member of the Risk Management Committee since August 2, 2019.

Independensi Komite Manajemen Risiko

Independensi menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan Perhutani secara individu maupun tujuan grup bersama Induk Perusahaan. Berikut status independensi anggota Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2020.

Independency of Risk Management Committee

Independency becomes an aspect that shall be concerned to avoid conflict of interest on decision-making process in Perhutani's goals achievement individually and collective group achievement altogether with the Parent Company. Independency status of th Risk Management Committee as of December 31, 2019 is as follows:

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee Members Independency

Kriteria Independensi Independency Criteria		Komaruddin Simanjuntak	Moch. Ali Wafa Pujiono	Muchamad Iman Tawakal
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan direksi	Not having any financial affiliation with Supervisory Board and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi	Not having any managerial affiliation in the Company, subsidiaries or affiliated company	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan	Not having any shares ownersship affiliation in the Company	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, direksi dan/atau sesama anggota komite .	Not having family affiliation with Supervisory Board, Board of Directors and/or other committee members	✓	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Sesuai dengan Piagam Manajemen Risiko yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 2014 dinyatakan bahwa Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Pengawas dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Pengawas guna memastikan diterapkannya Manajemen Risiko Perusahaan *(Enterprises Risk Management)* serta kebijakan Nominasi dan Remunerasi secara efektif dan efisien. Adapun tugas Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a. Membantu Dewan Pengawas dalam melakukan evaluasi dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko, nominasi & remunerasi dan pemberian pendapat kepada Dewan Pengawas sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manajemen risiko dan kebijakan nominasi & remunerasi.
b. Membantu Dewan Pengawas dalam mengkaji dan melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi yang berkaitan dengan hubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Pengawas.
c. Membantu Dewan Pengawas dalam melakukan evaluasi dan melakukan analisis atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan, dan kegiatan lain perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Pengawas.
d. Membantu Dewan Pengawas dalam melakukan evaluasi dan mengkaji Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Perusahaan, dan Rencana Jangka Panjang

Duty and Responsibility of Risk Management Committee

According to the Risk Management Charter passed on August 12, 2014, it is stated that the Risk Management Committee has the duty and responsibility of assisting the Supervisory Board by providing professional and independent opinion to the Supervisory Board to ensure the implementation of Enterprise Risk Management as well as the Nomination and Nomination policies. Remuneration effectively and efficiently. The duties of the Risk Management Committee are as follows:

a. Support the Supervisory Board in evaluating and reviewing the risk management policy, nomination & remuneration and opinion to the Supervisory Board periodically as consideraiton in giving recommendation and approval on the risk management policy and nomination & remuneration policy.
b. Support the Supervisory Board in reviewing and evaluating accountability of the Board of Directors related to business relation or business activity that shall be provided by recommendation or approval from the Supervisory Board.
c. Support the Supervisory Board in evaluating and performing analysis on every proposal from the Board of Directors related to investment cooperation, capital investment, joint venture establishment, sales o fthe Company's assets, and other corporate activities to obtain recommendation or approval from the Supervisory Board.
d. Support the Supervisory Board in evaluating and reviewing Company's Work and Budget Plan (RKAP), Corporate Business Plan, and Long-Term Plan to obtain recommendation

perusahaan untuk mendapat rekomendasi atau persetujuan Dewan Pengawas.

e. Membantu Dewan Pengawas dalam memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut.
f. Memberikan masukan kepada Dewan Pengawas dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko dan kebijakan nominasi & remunerasi Perusahaan.
g. Menjalankan tugas-tugas lainnya yang sewaktu-waktu diberikan oleh Dewan Pengawas.

Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Januari 2020.
2. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Februari 2020.
3. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Maret 2020.
4. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan April 2020.
5. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Mei 2020.
6. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juni 2020.
7. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Juli 2020.
8. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Agustus 2020.
9. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan September 2020.
10. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Oktober 2020.

or approval from Supervisory Board.

e. Support the Supervisory Board in monitoring key risks experienced by the Company and ensuring the Board of Directors have implemented necessary actions to identify, measure, monitor and mitigate the risks.
f. Provide recommendations to the Supervisory Board as improvement and development of risk management policy and nomination & remuneration policy in the Company.
g. Perform other duties assigned by the Supervisory Board.

Risk Management Committee Activity Report 2020

During 2020, the Risk Management Committee has carried out its duties in accordance with applicable regulations, including the following activities:

1. Prepared the review and materials for the January 2020 Supervisory Board meeting.
2. Prepare the review and materials for the Supervisory Board meeting in February 2020.
3. Prepared the review and materials for the March 2020 Supervisory Board meeting.
4. Prepared the review and materials for the April 2020 Supervisory Board meeting.
5. Prepared the review and materials for the Supervisory Board meeting in May 2020.
6. Prepare the review and materials for the Supervisory Board meeting in June 2020.
7. Prepared the review and materials for the Supervisory Board meeting in July 2020.
8. Prepared the review and materials for the Supervisory Board meeting in August 2020.
9. Prepared the review and materials for the September 2020 Supervisory Board meeting.
10. Prepare the review and materials for the Supervisory Board meeting in October 2020.

11. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan November 2020.
12. Menyiapkan telaahan dan bahan rapat Dewan Pengawas bulan Desember 2020.

11. Prepared the review and materials for the November 2020 Supervisory Board meeting.
12. Prepared the review and materials for the Supervisory Board meeting in December 2020.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Terkait tingkat kehadiran anggota komite secara rinci dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Risk Management Committee Meeting

Related to attendance level of the Committee members, the detail information is tabulated below:

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Meeting Frequency and Attendance Level of the Risk Management Committee Meeting

Name Name	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance
Haryadi Himawan	12	12	100
Moch. Ali Wafa Pujiono	12	12	100
Muchamad Imam Tawakal	12	12	100

Jalannya rapat, perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dan keputusan yang diambil dalam rapat Komite telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite. Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite serta didistribusikan kepada Ketua Komite, Sekretaris Dewan Pengawas dan Peserta Rapat.

The proceedings of the meeting, dissenting opinions and decisions taken at the Committee meetings have been properly recorded and documented in the minutes of the Committee meetings. The minutes of the meeting are signed by the Chair and Members of the Committee and distributed to the Chair of the Committee, Secretary to the Supervisory Board and Meeting Participants.

Program Pengembangan Komite Manajemen Risiko

Peningkatan Kompetensi dan memperbaharui pengetahuan Komite Manajemen Risiko mengenai perkembangan dunia usaha khususnya terkait pelaksanaan pengembangan usaha dan manajemen risiko. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dalam mengawal aktivitas pengembangan usaha, pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal Perusahaan. Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat program pengembangan yang diikuti Anggota Komite Manajemen Risiko.

Risk Management Committee Development Program

Competency improvement and updating the knowledge of the Risk Management Committee regarding the development of the business world, especially related to the implementation of business development and risk management. These activities are expected to support the implementation of the duties and responsibilities of the Risk Management Committee in overseeing the activities of business development, risk management and the Company's internal control system. Throughout 2020, no development programs participated by Members of the Risk Management Committee.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan salah satu Komite penunjang Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat mengenai penetapan kualifkasi dan proses nominasi serta remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Nomination and Remuneration Committee is one of the supporting committees under the Board of Commissioners established to assist the Supervisory Board in carrying out supervisory and advisory functions regarding determination of qualifications and the nomination process as well as remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors.

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Pengawas Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 07/DWA9-PHT/2020 tangal 28 April 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Umum Pengawas Perusahaan (PERUM) Kehutanan Negara dan Surat Keputusan No. 11/DWAS-PHT/2020 tanggal 22 Juni 2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas Perum Perhutani.

The Nomination and Remuneration Committee was established referring to Perum Perhutani Supervisory Board Decree Number: 07/DWA9-PHT/2020 dated April 28, 2020 concerning Establishment of the Nomination and Remuneration Committee for State Forestry Public Company Supervisory Companies (PERUM) and Decree No. 11/DWAS-PHT/2020 dated June 22, 2020 Regarding the dismissal and appointment of members of the Nomination and Remuneration Committee Perum Perhutani Supervisory Board.

KOMPOSISI DAN PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Nomination and Remuneration Committee Composition and Profile

Nama Name	**Jabatan** Position	**Keterangan** Description	
Bambang Hendroyono	Ketua/ Chairman	Surat Keputusan No. 11/DWAS-PHT/2020 tanggal 22 Juni 2020	Decree No. 11/DWAS-PHT/2020 dated June 22, 2020
Bambang Risyanto	Anggota/ Member	Surat Keputusan No. 11/DWAS-PHT/2020 tanggal 22 Juni 2020	Decree No. 11/DWAS-PHT/2020 dated June 22, 2020
Komaruddin Simanjuntak	Anggota/ Member	Surat Keputusan No. 11/DWAS-PHT/2020 tanggal 22 Juni 2020	Decree No. 11/DWAS-PHT/2020 dated June 22, 2020

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

BAMBANG HENDROYONO

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of The Nomination and Remuneration Committee

Profil Beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris.
His profile can be seen on the Profile of the Board of Commissioners

BAMBANG RISYANTO

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of The Nomination and Remuneration Committee

Profil Beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris.
His profile can be seen on the Profile of the Board of Commissioners

KOMARUDDIN SIMANJUNTAK

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of The Nomination and Remuneration Committee

Profil Beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris.
His profile can be seen on the Profile of the Board of Commissioners

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Independensi menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan Perhutani secara individu maupun tujuan grup bersama Induk Perusahaan. Berikut status independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2020.

Independency of Nomination and Remuneration Committee Members

Independency refers to matter that shall be considered to avoid conflicts of interest in the decision-making process in achieving Perhutani's individual and group goals with the Parent Company. The independency status of the Nomination and Remuneration Committee members as of December 31, 2020 is as follows.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Independency of Nomination and Remuneration Committee Members

Kriteria Independensi Independency Criteria		**Bambang Hendroyono**	**Bambang Risyanto**	**Komaruddin Simanjuntak**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan direksi	Not having any financial affiliation with Supervisory Board and Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi	Not having any managerial affiliation in the Company, subsidiaries or affiliated companies.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan	Not having any family affiliation with BoC, BoD and/or other committee members.	✓	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas utama Komite Nominasi dan Remunerasi adalah membantu Dewan Pengawas dalam :

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai:
   a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Pengawas;
   b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.
2. Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas berdasarkan

Duty and Responsibility of Risk Management Committee

Main duty of the Nomination and Remuneration Committee is to assist the Supervisory Board, among others:

Related to the Nomination function:

1. Provide recommendations to the Supervisory Board regarding:
   a) The composition of the positions of members of the Board of Directors and/ or members of the Supervisory Board;
   b) Policies and criteria required in the Nomination process; and
   c) Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/ or members of the Supervisory Board.
2. Assist the Supervisory Board in assessing the

tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.
5. Menyediakan talent pool berupa data dan profil calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.

performance of members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board based on the benchmarks that have been prepared as evaluation material.
3. Provide recommendations to the Supervisory Board regarding the capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board.
4. Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board to the Supervisory Board to be submitted to the Capital Owners.
5. Provide a talent pool in the form of data and profiles of prospective members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai struktur remunerasi; kebijakan atas remunerasi; dan besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing Direksi dan/anggota Dewan Pengawas.

Related to the Remuneration function:
1. Provide recommendations to the Supervisory Board regarding the remuneration structure; policy on remuneration; and the amount of remuneration.
2. Assist the Supervisory Board in assessing the performance in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/member of the Supervisory Board.

Sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merangkap sebagai Dewan Pengawas, maka masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini, sama dengan masa jabatannya sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan honorarium atau penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Dewan Pengawas.

As a member of the Nomination and Remuneration Committee who also serves as the Supervisory Board, the term of office of the members of the Nomination and Remuneration Committee as referred to the FIRST DIKTUM of this resolution is the same as their term of office as the Supervisory Board of Perum Perhutani and the concerned person does not receive any honorarium or additional salaries other than salary as Supervisory Board.

Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2020, tidak ada program pelatihan yang diikuti oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penilaian Kinerja Nominasi dan Remunerasi

Evaluasi Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Pengawas. Metode penilaian kinerja tersebut berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam RKA tahunan Komite yang dilaporkan secara tahunan dalam laporan Komite.

Penilaian juga dilakukan atas saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi terkait penyempurnaan *soft-structure* pendukung pelaksanaan nominasi dan remunerasi Perusahaan. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengawas untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite.

Nomination and Remuneration Committee Activity Report 2020

Throughout 2020, the Nomination and Remuneration Committee has conducted the duties according to prevailing regulations.

Nomination and Remuneration Committee Competency Development

Throughout 2020, there is no training participated by the Nomination and Remuneration Committee.

Nomination and Remuneration Performance Assessment

Nomination and Remuneration Committee Performance Assessment is carried out every 1 (one) year by the Supervisory Board. The performance assessment method is based on realization and completion of the work program as stipulated in the Committee's annual RKA which is reported annually in the Committee's report.

An assessment is also carried out on the suggestions, recommendations and feedback provided by the Nomination and Remuneration Committee concerning improvement of the soft-structure to support implementation of the Company's nomination and remuneration. Results of the assessment are considered by the Supervisory Board to reappoint and/or dismiss members of the Committee.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada BUMN, Direksi Perhutani dibantu oleh organ pendukung antara lain unit Corporate Secretary dan unit Internal Audit.

As described in the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S. MBU/2012 concerning Parameter Indicators for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance In BUMN, the Board of Directors of Perhutani is assisted by supporting organs including the Corporate Secretary unit and the Internal Audit unit.

Perhutani menempatkan seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Perhutani places a Corporate Secretary who is directly responsible to the President Director

STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan Direksi serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan dibantu oleh seksi Komunikasi Perusahaan dan seksi Pelaporan Korporasi. Sekretaris Perusahaan bertugas Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, serta pelayanan pemberian informasi yang dibutuhkan mengenai data atau performance Perhutani dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada kepada pemilik modal lainnya sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu.

CORPORATE SECRETARY ORGANIZATION STRUCTURE

Perhutani assigns a Corporate Secretary who is directly responsible to President Director. Corporate Secretary is assisted by a Corporate Communication section and Corporate Reporting section. Corporate Secretary is in charge to provide information that are required by Board of Directors and Supervisory Board regularly and/or incidentally if requested, and provision service of information that are required regarding Perhutani's data or performance under the limits as set in the Information Protocol applied in the Company and other reports submission to other capital owners on time according to prevailing law.

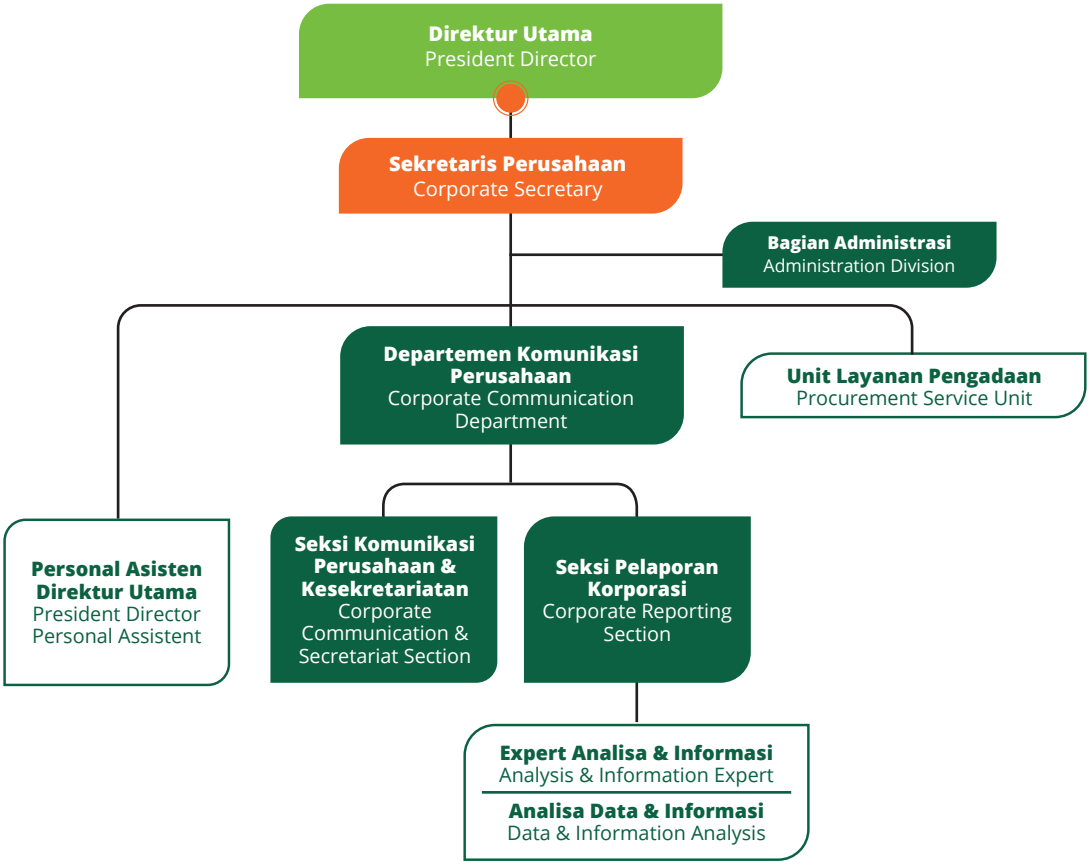

KUALIFIKASI DAN PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Kualifikasi dan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting untuk memastikan aspek keterbukaan informasi, memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan dengan tetap memperhatikan prinsip standar etika Perusahaan, prinsip tata kelola Perusahaan, dan nilai-nilai Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan yang diangkat, telah memenuhi kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman kerja yang ditentukan perusahaan. Pengalaman profesional dan kompetensi yang dimiliki mencakup

CORPORATE SECRETARY QUALIFICATION AND PROFILE

Qualification And Competence

Corporate Secretary has an important role in ensuring the disclosure of information, facilitating communication between the Company's organs, is responsible for formulating policies, planning and ensuring the effectiveness and transparency of corporate communications, institutional relationships by observing the principles of the Company's ethical standards, principles of corporate governance, and corporate values. the value of the company.

The appointed Corporate Secretary has fulfilled educational, competency and work experience qualification as stipulated by the Company. The professional and competency experience including knowledge on legal, corporate

pengetahuan tentang hukum, proses bisnis perusahaan, manajemen keuangan, dan komunikasi perusahaan.

business process, financial management and corporate communication aspects.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

PROFILE OF CORPORATE SECRETARY

ASEP RUSNANDAR

Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan

Masa Jabatan 21 Agustus 2018 - 2020
Lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1965, berdomisili di Bandung. Memperoleh Sarjana Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 1991 dan meraih gelar MM (Master Manajemen) dari Universitas Satyagama pada tahun 2002. Meniti Karir di Perum Perhutani sejak 1994 dan telah bertugas di berbagai bidang. Posisi terakhir sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Riwayat jabatan kami sajikan dalam tabel berikut:

Term of Office 21 August 2018 - 2020
Born in Bandung on December 27, 1965, lives in Bandung. Earned his Bachelor of Agriculture from Institut Pertanian Bogor in 1991 and MM (Master of Management) degree from Universitas Satyagama in 2002. He has pursued a career at Perum Perhutani since 1994 and has served in various fields. His last position was Head of the Centre for Education and Human Resources Development. His career experience is presented in the following table:

RIWAYAT JABATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
Riwayat Jabatan Sekretaris Perusahaan

Tahun Year	**Jabatan** Position		**Satuan Kerja** Work Unit	**Regional** Regional
1994	Staf pelaksana	Executing Staff	Kantor Pusat Headquarter	Kantor Pusat Headquarter
1995	Staf Pelaksana Pembinaan SDH	Sdh Guidance Staff	Kantor Unit III Office Unit III	Jawa Barat & Banten West Java & Banten
1996	Asper Pongpoklandak	Asper Pongpoklandak	KPH Cianjur	
2000	Asper Cianjur	Asper Cianjur	KPH Cianjur	
2000	Asper Pangandaran	Asper Pangandaran	KPH Ciamis	
2002	Asper Garawangi	Asper Garawangi	KPH Kuningan	
2002	KTKU	KTKU	KPH Bandung Selatan South Bandung KPH	
2004	KTKU	KTKU	KPH Ciamis	
2005	Wakil Adm	Deputy Adm	KPH Bandung Selatan South Bandung KPH	

RIWAYAT JABATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Riwayat Jabatan Sekretaris Perusahaan

Tahun Year	Jabatan Position		Satuan Kerja Work Unit	Regional Regional
2006	Kepala Seksi Humas dan Informasi	Head of Public Relations and Information Section	Kantor Divisi Regional III Regional Division III Office	
2007	Kepala Seksi SDM	Head of HR Section	Kantor Divisi Regional III Regional Division III Office	Jawa Barat & Banten West Java & Banten
2010	Kepala Seksi Perencanaan Hutan	Head of Forest Planning Section	Biro Perencanaan Planning Bureau	
2011	Administratur	Administrator	KPH Bogor	
2014	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan	Head of General Affairs and Equipment	Kantor Pusat Headquarter	
2014	Kepala Biro Pelayanan Sumber-daya Manusia dan Hubungan Industrial	Head of Bureau of Human Resources and Industrial Relations	Kantor Pusat Headquarter	
2015	Kepala Biro SDM, Umum dan Sarpra	Head Of HR, General Affairs and Sarpra Bureau	Kantor Pusat Headquarter	Kantor Pusat Headquarter
2017	Kepala Departemen SDM dan Umum	Head of HR And General Department		
2017	Kepala Pusat Pendidikan dan Pengembangan SDM	Head Of Center For Education And HR Development	Pusdikbang SDM HR Center for Education and Development	
2018	Sekretaris Perusahaan	Company Secretary	Kantor Pusat	

TUGAS DAN KEWAJIBAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Secara umum tugas Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menjembatani komunikasi pihak eksternal dan internal perusahaan
2. Menjalankan fungsi media relation dengan stakeholder
3. Menyelaraskan kebijakan internal Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengkaji dan menerjemahkan peraturan dan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan
5. Berperan sebagai penghubung komunikasi antara Direksi, Dewan Pengawas, Manajemen dalam organisasi Perusahaan, serta Pemilik Modal
6. Mengorganisir kegiatan protokoler, tata laksana, kesekretariatan dan kerumahtanggaan Direksi

DUTIES AND OBLIGATIONS OF CORPORATE SECRETARY

In general, the duties of the Corporate Secretary are as follows:

1. Bridging communication between external and internal parties of the company
2. Carry out the function of media relations with stakeholders
3. Aligning the Company's internal policies with prevailing laws and regulations
4. Review and translate regulations and laws issued by the government relating to the Company's business
5. Serves as a communication liaison between the Board of Directors, the Supervisory Board, Management within the Company organization, and shareholders
6. Organizing protocol, governance, secretarial and housekeeping activities for the Board of Directors

7. Mengorganisir kegiatan rapat Direksi, Pendokumentasian hasil-hasil rapat, serta mengkomunikasikan hasil-hasil rapat kepada segenap manajemen untuk ditindaklanjuti
8. Melaporkan, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Sekretariat Direksi kepada Deputi Direktur Pengembangan Stratejik dan Transformasi Perusahaan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dari pimpinan

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2020

Untuk mengkomunikasikan arah kebijakan Perusahaan dan menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholders, melalui kegiatan Humas, Sekretaris Perusahaan melaksanakan berbagai kegiatan guna menyampaikan pesan, visi dan misi perusahaan dengan pihak eksternal dan internal dalam rangka tercipta dan terpeliharanya citra, opini, serta peran positif masyarakat terhadap keberadaan Perum Perhutani.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan, sepanjang tahun 2020, dapat disampaikan, sebagai berikut:

Terkait dengan Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi

- Menyusun jadwal dan tahapan kegiatan menjelang rapat
- Mengikuti rapat-rapat Direksi, rapat gabungan Direksi dan Dewan Pengawas
- Membuat risalah rapat yang dilakukan Direksi, gabungan Direksi dan Dewan Pengawas
- Mengkoordinir pelaksanaan tindaklanjut dari hasil rapat, keputusan dan arahan Direksi, gabungan Direksi dan Dewan Pengawas

7. Organizing Board of Directors meeting activities, documenting meeting results, and communicating meeting results to all management for follow-up
8. Report, communicate and coordinate the duties of the Secretariat of the Board of Directors to the Deputy Director for Corporate Strategic Development and Transformation
9. Carry out other relevant tasks from the leadership

CORPORATE SECRETARY DUTIES IN 2020

To communicate the direction of the Company's policies and establish communication with all stakeholders, through public relations activities, the Corporate Secretary carries out various activities to convey the message, vision and mission of the company with external and internal parties in order to create and maintain the image, opinion, and positive role of the community towards the existence of Perum Perhutani.

The implementation of tasks carried out by the Corporate Secretary, throughout 2020, can be conveyed, as follows:

Related to Capital Owners, Supervisory Board and Directors:

- Prepare a schedule and stages of activities before the meeting
- Participate in Board of Directors meetings, joint meetings of the Board of Directors and Supervisory Board
- Make minutes of meetings conducted by the Board of Directors, the joint Board of Directors and the Supervisory Board
- Coordinate the implementation of follow-up on the results of meetings, decisions and directions of the Board of Directors, the joint

- Pelaksanaan tugas-tugas protokoler, kesekretariatan dan kerumahtanggaan Direksi
- Mengelola dokumen perusahaan
- Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi

Terkait dengan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan

- Memastikan perusahaan mematuhi peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- Melakukan kajian atas perubahan dan perkembangan peraturan perundangan yang terkait dengan bidang usaha perusahaan
- Menyeleksi informasi yang relevan untuk dipublikasikan
- Mengkoordinasikan dan memastikan proses penerapan GCG di lingkungan perusahaan

Terkait dengan Kantor Satuan Kerja

- Mengumumkan kebijakan dan produk hukum internal perusahaan serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan
- Melancarkan informasi/komunikasi Direksi dan Manajemen dibawah Direksi

Berkaitan Pemangku kepentingan lainnya

- Sekretaris Perusahaan bertugas memberikan informasi yang materiil dan relevan kepada stakeholders
- Mengorganisasikan dan melakukan koordinasi kegiatan perusahaan dengan stakeholders

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka untuk peningkatan kemampuan dan kapabilitas Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan Perhutani dan jajarannya aktif mengikuti program pelatihan dan pengembangan atau pendidikan serta seminar.

Board of Directors and the Supervisory Board

- Implementation of protocol, secretarial and household duties of the Board of Directors
- Manage company documents
- Report the implementation of their duties to the Board of Directors

In relation to the Company's compliance with laws and regulations

- Ensuring the company complies with applicable laws and regulations
- Conduct a study on changes and developments in laws and regulations related to the company's line of business
- Selecting relevant information for publication
- Coordinate and ensure the process of implementing GCG within the company

Related to the Office of the Work Unit

- Announce the company's internal legal policies and products as well as laws and regulations related to the company's business activities
- Streamlining information/communication for the Board of Directors and Management under the Board of Directors

With regard to other Stakeholders

- The Corporate Secretary is tasked with providing material and relevant information to stakeholders
- Organizing and coordinating company activities with stakeholders

Corporate Secretary Competency Training and Improvement

In order to improve the capabilities and capabilities of the Corporate Secretary, the Corporate Secretary of Perhutani and his staff actively participate in training and development or education programs as well as seminars.

Internal Audit

Internal Audit

Aktivitas Audit Internal adalah bagian dari proses tata kelola perusahaan yang memberikan jaminan atas sistem pengendalian internal, efektivitas dan efisiensi operasi, ketaatan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan dan kehandalan pelaporan.

Internal Audit activity is part of the corporate governance process that provides assurance on the internal control system, the effectiveness and efficiency of operations, compliance with applicable laws and regulations as well as the accuracy and reliability of reporting.

SATUAN PENGAWAS INTERN
Internal Supervisory Unit

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 28, bahwa Direksi BUMN wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang dilakukan dengan:

a. Membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI);
b. Membuat Piagam Pengawasan Intern.

Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud butir (a) di atas, antara lain meliputi:

a. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko,

In accordance with the Regulation of the Minister of SOE Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises Article 28, that the Board of Directors of SOEs is obliged to carry out internal supervision carried out by:

a. Establishing an Internal Control Unit (SPI);
b. Making an Internal Audit Charter.

The function of internal control as referred to in point (a) above, includes but is not limited to:

a. Evaluation of the effectiveness of the implementation of internal control, risk

dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.

b. Pemeriksaan dan penilaian atas eisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, pengamanan aset perusahaan, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

SPI bertindak secara independen sebagai unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menjadi mitra manajemen dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan risiko serta penerapan pengendalian internal di lingkungan Perhutani.

Dasar Hukum Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara, Bab VI, Pasal 67-69.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Bab VI, Pasal 66-70.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Bagian Kesembilan, Pasal 83-87.
4. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), Bagian Kedelapan, Pasal 28.

Struktur Organisasi SPI

Sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 143/KPTS/Dir/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Struktur Organisasi Perum Perhutani yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan dengan SK Direksi No. 1670/KPTS/DIR/2017 Tgl. 14 Juli 2017 dan terakhir diubah dengan SK No.: 007/KPTS/ DIR/2018 Pasal 8,

management, and corporate governance processes, in accordance with the laws and regulations and Company policies.

b. Examination and assessment of efficiency and effectiveness in finance, operations, human resources, safeguarding company assets, information technology, and other activities.

SPI acts independently as a work unit that reports directly to the President Director and is a management partner in realizing good corporate governance, risk management and the implementation of internal control within Perhutani.

Legal Framework of Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit (SPI) is established based on the following regulations:

1. Law Number 19 of 2013 concerning Stat-Owned Enterprise, Chapter VI, Article 67 – 69.
2. Government Regulation Number 45 of 2005 on State-Owned Enterprise Establishment, Management and Dismissal Chapter VI, Article 66-70.
3. Government Regulation Number 72 of 2010 concerning Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Chapter Ninth, Articles 83 – 87.
4. Ministerial Regulation Number 01 of 2011 concerning Good Corporate Governance Implementation, Chapter Eight, Article 28.

Organization Structure of SPI

Pursuant to Perum Perhutani Board of Directors Decree Number 143/KPTS/Dir/2017 dated February 27, 2017 concerning Organization Structure of Perum Perhutani that experienced 2 (two) changes through the Board of Directors Decree No. 1670/ KPTS/DIR/2017 dated July 14, 2017 and the latest amendment through Decree

Satuan Pengawasan Intern (SPI) berada di bawah Direktorat Utama dipimpin oleh Direktur Utama yang dikepalai oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern. Dalam setiap penugasannya, Satuan Pengawasan Intern (SPI) melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Utama.

No. : 007/KPTS/ DIR/2018 article 8, the Internal Audit Unit (SPI) is under Main Directorate is supervised by President Director and led by a Head of Internal Audit Unit. In every assignment, the Internal Audit Unit (SPI) reports the activites to President Director.

Kedudukan dan Struktur Organisasi SPI adalah sebagai berikut:

Position and Organization Structure of SPI are as follows:

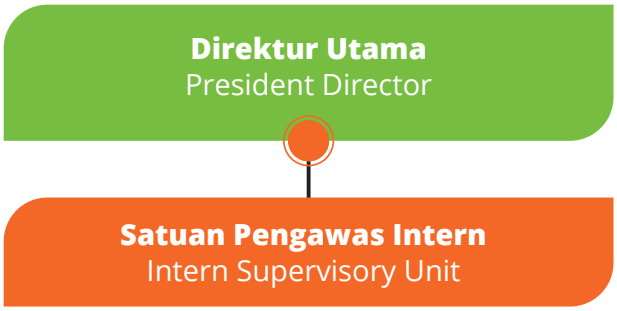

Profil Kepala SPI

Profile of Head SPI

DJONI SURATNO

Kepala SPI
Head of SPI

Masa Jabatan: 09 Januari 2020 - sekarang
Diangkat menjadi Kepala SPI Berdasarkan Surat Keputusan nomor S-01/DWAS-PHT/RHS/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Mutasi Kepala satuan Pengawasan Internal Perum Perhutani, Djoni Suratno menjabat Kepala SPI menggantikan Agus Dwi Nurjanto. Riwayat pendidikan Djoni Suratno ditempuh di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pendidikan, pelatihan dan seminar yang diikuti oleh Djoni Suratno berkaitan dengan profesi auditor antara lain : Professional Certificate

Term of Office: January 9, 2020 - present
Appointed Head of SPI Based on Decree number S-01/DWAS-PHT/RHS/2020 dated January 9, 2020 regarding the transfer of the Head of the Internal Control Unit of Perum Perhutani, Djoni Suratno served as Head of SPI replacing Agus Dwi Nurjanto. Djoni Suratno's educational history was taken at the State College of Accountancy (STAN). Education, training and seminars attended by Djoni Suratno related to the auditor profession, including: Professional

In Strategy Execution (CSEP) Tahun 2015, Certified Risk Management Officer (CRMO) Tahun 2016, Certified In Risk Governance Professional (CRGP) Tahun 2018, Certification In Audit Committee Practices Tahun 2019.

Pedoman Kerja SPI

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI berpedoman kepada Piagam Audit Internal, yaitu dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen atas berfungsinya suatu unit pengawasan internal di sebuah organisasi atau badan hukum. Piagam Audit Intern atau Internal Audit Charter berisi:

1. Pengesahan
2. Pendahuluan
3. Dasar Hukum
4. Visi dan Misi
5. Kedudukan
6. Wewenang
7. Ruang Lingkup Tugas
8. Tanggung Jawab
9. Kewajiban
10. Kode Etik
11. Penutup

Tugas, Kewenangan dan Ruang Lingkup Kegiatan SPI

SPI ikut berperan dan mendukung terwujudnya sasaran Perhutani melalui pendekatan sistematis dan obyektif. SPI juga melaksanakan evaluasi atas kefektivitas pengendalian internal, pengelolaan risiko, proses pelaksanaan operasional dengan memanfaatkan sumber daya serta memberikan masukan-masukan guna kepuasan pelanggan.

Adapun kewenangan SPI sebagai berikut:

1. SPI berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas, semua catatan, dokumen dan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya
2. Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Certificate In Strategy Execution (CSEP) 2015, Certified Risk Management Officer (CRMO) 2016, Certified In Risk Governance Professional (CRGP) 2018, Certification In Audit Committee Practices in 2019.

SPI Charter

In carrying out the duties, SPI refers to the Internal Audit Charter, as a formal document containing acknowledgement of existence and commitment on the functioning of particular internal audit unit in an organization or legal entity. Internal Audit Charter contains:

1. Ratification
2. Introduction
3. Legal Framework
4. Vision and Mission
5. Position
6. Authority
7. Scope of Duty
8. Responsibility
9. Obligation
10. Ethical Code
11. Closing

Duty, Authority and Scope of Spi Activities

SPI participates and supports Perhutani's goals achievement through a systematic and objective approach. SPI also evaluates effectiveness of internal controls, risk management, operational implementation processes by utilizing resources and providing input for customer satisfaction.

Authority of SPI is as follows:

1. SPI is eligible to access in full, free and unlimited, all records, documents and or information about employees, funds, assets and other resources of the Company related to the implementation of their duties.
2. SPI has the greatest authority to perform

3. SPI berwenang seluas-luasnya untuk melaksanakan investigasi dalam upaya mencari pembuktian atas dugaan atau adanya indikasi penyimpangan.
4. SPI memiliki wewenang untuk menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta mengalokasikan sumber daya audit dan teknik audit yang dipandang perlu sesuai tujuan audit.
5. SPI memiliki wewenang melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pimpinan di semua level Manajemen.
6. SPI dapat memanfaatkan sumber daya Perusahaan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan sistem otorisasi yang berlaku dalam Perusahaan dan dapat menggunakan bantuan tenaga ahli/ konsultan dengan persetujuan dari Direktur Utama.

Sumber Daya Manusia SPI

SPI harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan audit. Piagam Internal Audit mengharuskan auditor memenuhi kualifikasi yakni Auditor bersertifikat Qualified Internal Auditor (QIA) atau setara, mengacu pada standar dari The Institute of Internal Auditors (IIA).

Selain itu, auditor harus memenuhi standar perilaku yang diatur dalam Piagam Internal Audit, antara lain:

1. Auditor Internal harus menegakkan kode etik yang terdiri dari prinsip dan perilaku.
2. Menghindari aktivitas yang merugikan dan/ atau patut dicurigai dapat merugikan profesi auditor internal atau organisasi.
3. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun baik langsung maupun tidak langsung dari auditee, rekanan atau pihak yang tidak berkepentingan, untuk menjaga independensi dan objektivitas proses audit.

investigations in an effort to find evidence of allegations or indications of irregularities.

3. SPI has the authority to determine the focus, scope and schedule of the audit, and allocate audit resources and audit techniques that are deemed necessary according to the audit objectives.
4. SPI has the authority to coordinate and consult with leaders at all levels of management.
5. SPI is eligible to use the Company's resources to support the successful implementation of its duties in accordance with the applicable authorization system in the Company and can use the assistance of experts/consultants with the approval of the President Director.

SPI Personnel

SPI shall be supported by competent human resources (HR) to support the success of the audit. The Internal Audit Charter requires the auditor to fulfill qualifications of certified Qualified Internal Auditor (QIA) Auditor or equivalent, referring to the standards of The Institute of Internal Auditors (IIA).

In addition, the auditors shall also fulfill behavioral standards set forth in the Internal Audit Charter, including:

1. Internal auditors must enforce a code of ethics consisting of principles and behavior.
2. Avoiding activities that are detrimental to and/or suspected to be detrimental to the profession of the internal auditor or organization.
3. Not accepting gifts in any form and from anyone, directly or indirectly, from the auditee, partners or unauthorized parties, to maintain the independence and objectivity of the audit process.

4. Mematuhi standar profesional auditor internal dan kebijakan serta aturan organisasi

4. Comply with internal auditor professional standards and organizational policies and rules.

Jumlah Pegawai SPI

Perhutani terus berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia SPI untuk menunjang pelaksanaan fungsi audit internal dalam sistem pengendalian internal Perusahaan. Sampai dengan Desember 2020, jumlah Pegawai SPI adalah 38 orang, yang terdiri dari internal auditor sebanyak 37 orang dan tenaga administrasi sebanyak 1 orang, berikut rincian SDM SPI hingga 31 Desember 2020:

Number of SPI Employees

Perhutani continues to strive to meet the needs of SPI human resources to support the implementation of the internal audit function in the Company's internal control system. As of December 2020, the number of SPI employees is 38 people, consisting of 37 internal auditors and 1 administrative staff, following are the details of SPI HR as of December 31, 2020

PEGAWAI SPI
SPI Employee

Nama Name	**Bidang** Field		**Jabatan** Position
Djoni Suratno	Kepala SPI	Head of SPI	Kepala SPI
Dadang Kadarsyah Rizal	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Kepala Departemen PO & PDD
Jhon Akang Saragih	Pertanian	Agriculture	Anggota SPI
Tubagus Aep Saepudin	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Anggota SPI
M. Alwan Sholeh	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Auditor Utama SPI
Daddy Hermawan	Keuangan	Finance	Auditor Utama SPI
Suparno	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Auditor Utama SPI
Cecep Hidayat	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Auditor Madya SPI
Sujarwanto	Keuangan	Finance	Auditor Madya SPI
Cecep Mahmudin	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Auditor Madya SPI
Farid Ma'ruf	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Auditor Madya SPI
Dikdik Prestiansyach	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Auditor Madya SPI
Dede Setiana	Keuangan	Finance	Auditor Madya SPI
Schilman Pardede	Keuangan	Finance	Auditor Madya SPI
Willy Tanjung Saputro	Umum & Pengadaan	General & Procurement	Auditor Madya SPI
Taufan Bandanu Aji	Keuangan/Umum	Finance/General	Auditor Madya SPI
Dedi Suparman	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Auditor Madya SPI
Nandra Uskarwinandra	Keuangan	Finance	Auditor Madya SPI
R.A. Reny Anggraeni	SMD & Umum	High School & General	Kasi Madya PDD
Asep Holik	Pemasaran Log	Log Marketing	Kasi Utama Ren Opr
Sueb	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Auditor Madya SPI
Tri Mantoro	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Auditor Madya SPI
Rahmat Subaidi	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Auditor Madya SPI
Hadianta MA	Umum & Pengadaan	General & Procurement	Auditor Madya SPI

PEGAWAI SPI
SPI Employee

Nama Name	Bidang Field		Jabatan Position
Danny Setiadhy	Keuangan/Umum	Finance/General	Auditor Madya SPI
Yusep Sumantri	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Auditor Muda SPI
Dadang Suhara	Keuangan	Finance	Auditor Muda SPI
Engkos Mashuri	Teknik Industri	Industrial Engineering	Auditor Muda SPI
Acep Winatarahardja	Sarpra/Umum	Sarpra/General	Auditor Muda SPI
Cirkam	Sarpra P & J	Sarpra P & J	Auditor Muda SPI
Endro Suprayitno	Tata Usaha & Umum	Administration & General	staf TU SPI
Imam Rizqi Ramdani	Teknis Kehutanan	Forestry Technical	Staf Pelaksana SPI

Sertifikasi Profesi Auditor Internal

SPI telah didukung dengan kualitas auditor yang memadai dalam menunjang tugas dan tanggung jawabnya. Dari keseluruhan auditor SPI, sebanyak 1 (satu) orang auditor telah dikukuhkan sebagai Profesional Internal Auditor.

Internal Auditor Professional Certification

SPI has been supported with adequate auditor's quality in supporting their duty and responsibility. From all of the SPI auditors, 1 (one) auditor has been inaugurated as Professional Internal Auditor.

SERTIFIKASI PROFESI AUDITOR INTERNAL
Internal Auditor Professional Certification

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
Dadang Kadarsyah Rizal	Auditor Utama Main Auditor	Asosiasi Auditor Internal (Registrasi sertifikat PIA-1194)

Pengembangan Kompetensi Auditor Internal Tahun 2020

Program pengembangan kompetensi bagi sumber daya manusia SPI sangat dibutuhkan seiring dengan terus berkembangnya bisnis Perusahaan. Program pengembangan kompetensi tersebut dilakukan secara internal maupun melalui lembaga eksternal.

Hingga Desember 2020, auditor internal Perhutani telah mengikuti berbagai program pelatihan sebagai berikut:

Competency Development For Internal Auditor In 2020

Competency development program for SPI's personnel is highly needed in line with growing business of the Company. The competency development program is done internally and through external agencies.

Until December 2020, the internal auditors in Perhutani have participated in training programs, as follows:

PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL
Competency Development Program

Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program		Nama Name
Dasar-Dasar Audit	Auditing Fundamentals	Wijanarko
Audit Komunikasi Dan Psikologi	Communication and Psychology Audit	Engkos Mashuri
Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016	Socialization of Anti-Bribery Management System (SMAP) ISO 37001:2016	Djoni Suratno
		Dadang Kadarsyah Rizal
		Wijanarko
		Jhon Akang Saragih
Internal Audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016	Internal Audit Anti Bribery Management System (SMAP) ISO 37001:2016	Djoni Suratno
		Dadang Kadarsyah Rizal
		Dikdik Prestiansyah
		Schilman Pardede
		Nandra Uskarwinandra
		Engkos Mashuri
Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara Dimasa Pandemi Covid-19	Challenges of State Financial Accountability During the Covid-19 Pandemic	Sujarwanto
Infografis	Infographics	Dadang Kadarsyah Rizal
		Engkos Mashuri
		Asep Holik
Strategis Percepatan Perhutani Sosial	Strategic Perhutani Social Acceleration	Dadang Kadarsyah Rizal
		Wijanarko
		Daddy Hermawan
		Muh Alwan Sholeh
		Cecep Mahmudin
		Dikdik Prestiansyach
		Sujarwanto
		Danny Setiadhy
		Dedi Suparman
		Engkos Mashuri
		Hadianta M.A
Pemulihan Tepat Sasaran Ekonomi Nasional	Recovery is Right on the Target of the National Economy	Engkos Mashuri
Peran Desa Dalam Perhutani Sosial	The Role of the Village in Social Perhutani	Dadang Kadarsyah Rizal
		Daddy Hermawan
		Muh Alwan Sholeh
		Sujarwanto
		Danny Setiadhy
		Engkos Mashuri
Pengembangan Potensi Kekayaan Intelektual	Intellectual Property Potential Development	Engkos Mashuri

PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL
Competency Development Program

Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program		Nama Name
Peran KPH Dalam Perhutanan Sosial	The Role of FMUs in Social Forestry	Dadang Kadarsyah Rizal
Pelatihan Anti Korupsi Dasar SPI BUMN	SOE SPI Basic Anti-Corruption Training	Dadang Kadarsyah Rizal
Pendidikan Anti Korupsi	Anti-Corruption Education	Daddy Hermawan
		Suparno
		Cecep Hidayat
		Danny Setiadhy
		Engkos Mashuri
Membangun Integritas Korporasi Melalui SMAP Melalui ISO 37001	Building Corporate Integrity Through SMAP Through ISO 37001	Dadang Kadarsyah Rizal
		Daddy Hermawan
		Suparno
		Danny Setiadhy
		Hadianta M.A
		Engkos Mashuri
Mencegah Korupsi dan Politisasi Birokrasi untuk Menciptakan Birokrasi Modern dan Profesional	Preventing Corruption and Politicization of the Bureaucracy to Create a Modern and Professional Bureaucracy	Danny Setiadhy
		Engkos Mashuri
		Asep Holik
Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa	Goods & Services Procurement Training	Daddy Hermawan
		Danny Setiadhy
		Hadianta M.A
		Engkos Mashuri
Bedah Buku Anti Suap Cara Mudah menerapkan SMAP Berbasis ISO 37001:2016	Anti-Bribery Book Review Easy Ways to implement SMAP Based on ISO 37001:2016	Dadang Kadarsyah Rizal
		Jhon Akang Saragih
		Muh Alwan Sholeh
		Dikdik Prestiansyach
		Danny Setiadhy
		Hadianta M.A
		Engkos Mashuri
- Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001: 2015) - Pengadaan Jasa Kontruksi 2021 - Strategi Pengadaan Th 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 - Penerapan Commercial Integrity Di BUMN & Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara - Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sintem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) - Jerat & Celah Hukum Pengadaan Dalam Keadaan Darurat	- Quality Management System (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) - Procurement of Construction Services 2021 - Procurement Strategy for 2021 & Completion of Final Work in 2020 - Application of Commercial Integrity in BUMN & Its Impact on State Revenue - Training on the Procurement of Goods & Services for Provider Performance Information System (SIKAP) - Snares & loopholes in Procurement Laws in an Emergency	Engkos Mashuri

Pelaksanaan Kegiatan SPI tahun 2020

Kegiatan SPI dijalankan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk tahun 2020, kegiatan tersebut diantaranya:

1. Memberikan rekomendasi (masukan atas prosedur) meningkatkan proses tata kelola.
2. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan pengendalian intern kepada perusahaan.
3. Mengevaluasi sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi.
4. Memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen.

Melaksanakan audit merujuk kepada Audit Plan 2020, detail pada tabel berikut:

Implementation of SPI Activities In 2020

SPI activities are carried out based on the plans that have been set for 2020, these activities include:

1. Provide recommendations (input on procedures) that improve governance processes.
2. Contribute to the improvement of risk management and internal control
3. Evaluating the extent to which the objectives and objectives of the program and operational activities have been determined in line with the goals of the organization.
4. Provide input on the consistency of the results obtained from activities and programs with the goals and objectives that have been set to management.

Carry out an audit referring to the 2020 Audit Plan, details in the following table:

PELAKSANAAN AUDIT PLAN 2020
Audit Plan Implementation in 2020

No.	Satuan Kerja Work Unit	
1	Kantor Pusat	Head Office
2	PUSDIKLAT SDM	PUSDIKLAT SDM
3	PUSLITBANG SDH	PUSLITBANG SDH
4	Divisi Regional Jawa Tengah	Central Java Regional Division
5	Divisi Regional Jawa Timur	East Java Regional Division
6	Divisi Regional Jawa Barat & Banten	West Java & Banten Regional Division
7	PDTT	PDTT

Realisasi Audit rutin SPI sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 9 Tematik atau 112,5% dari rencana revisi PKPT 8 Tematik dengan realisasi jumlah satuan kerja 40 atau 121% dari rencana revisi PKPT sebanyak 33 satuan Kerja atau 28% dengan jumlah temuan awal sebanyak 691 temuan, adanya penghentian aktivitas pemeriksaan rutin pada triwulan II tahun 2020

The realization of routine SPI audits as of December 31, 2020 is 9 Thematic or 112.5% of the planned 8 Thematic PKPT revision with the realization of the number of work units 40 or 121% of the planned PKPT revision of 33 Work units or 28% with the number of initial findings of 691 the findings, there was a cessation of routine inspection activities in the second quarter of

akibat adanya pandemik Covid-19 dan untuk menghindari penyebarannya di lingkungan Perum Perhutani, sesuai kebijakan Direksi Nomor 0033/001.3/SDMU&IT/DIR/2020 Tanggal 15 Maret 2020 perihal Penundaan dan Pembatasan Sementara Kegiatan Dinas.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut di Obyek Pemeriksaan Rutin tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 55 Satuan Kerja atau 96% dari revisi PKPT 2020 sebanyak 57 satuan kerja termasuk BPK-RI, dengan jumlah temuan 1.396 temuan tuntas 91% atau 1.269 temuan dan sisa MDP sebanyak 127 temuan.

2020 due to the Covid-19 pandemic and to avoid its spread in the Perum Perhutani environment, according to the policy of the Board of Directors Number 0033/001.3/SDMU&IT/DIR/2020 dated March 15, 2020 regarding Postponement and Temporary Restrictions on Activities Service.

Follow-up Monitoring of Audit Findings

As of December 31, 2020, follow-up monitoring has been carried out at Routine Inspection Objects in 2018, 2019 and 2020 as many as 55 Work Units or 96% of the 2020 PKPT revision as many as 57 work units including BPK-RI, with a total of 1,396 findings completed 91 % or 1,269 findings and the remaining MDP are 127 findings.

SATUAN PENGENDALI INTERNAL
Internal Control Unit

Pembentukan Sistem Pengendalian Internal juga dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Perhutani sebagai warga Perhutani yang baik, tunduk dan patuh terhadap prinsip penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The establishment of an Internal Control System is also intended to realize Perhutani's commitment as a good Perhutani citizen, submitting and complying with the principles of implementing Good Corporate Governance.

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal

Pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Internal Perhutani dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin Perusahaan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui efektivitas

Internal Control System Policy

Understanding of Perhutani's Internal Control System is carried out continuously by the Company's leaders and all employees to provide adequate confidence in the achievement of organizational goals through the effectiveness

dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perusahaan, keandalan pelaporan keuangan dan kinerja yang disusun, dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal di Perhutani merupakan salah satu wujud penerapan GCG. Penerapan sistem pengendalian internal diarahkan untuk memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki kehandalan laporan dan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Perhutani menerapkan kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal dengan Keputusan Direksi No.174/KPTS/Dir/2011 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perhutani (SPIPHT) yang diperbaharui pada Tahun 2018 dengan Prosedur Kerja Sistem Pengendalian Intern (PK-SMPHT-14-2-006)

Dalam penetapan kebijakan tersebut, Perhutani berpedoman pada Internal Control-Integrated Framework oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions* (COSO) yang terakhir telah disempurnakan dengan terbitnya COSO 2013 dengan 5 komponen dan 17 prinsip.

Sistem Pengendalian Internal Perhutani terdiri dari 5 (lima) elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian *(Control Environment)*
2. Penilaian Risiko *(Risk Assessment)*
3. Kegiatan pengendalian *(Control Activities)*
4. Informasi dan komunikasi *(Information & Communications)*
5. Pemantauan *(Monitoring)*

Berikut penjabaran komponen dan prinsip pengendalian internal:

and efficiency of achieving the objectives of implementing programs and activities carried out by the Company, reliability of financial reporting and performance compiled, and compliance to the applicable laws and regulations.

The Internal Control System at Perhutani is a form of GCG implementation. The implementation of the internal control system is directed at ensuring that the Company has reliable financial reports and information, compliance with applicable regulations and the efficiency and effectiveness of operational activities. Perhutani implements policies and implements an internal control system with the Decree of the Board of Directors No. 174/KPTS/Dir/2011 concerning Guidelines for the Perhutani Internal Control System (SPIPHT) which was updated in 2018 with the Internal Control System Work Procedure (PK-SMPHT-14-2-006)

In determining the policy, Perhutani is guided by the Internal Control-Integrated Framework by The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO), which has recently been refined by the issuance of COSO 2013 with 5 components and 17 principles.

Perhutani's Internal Control System consists of 5 (five) main elements that are interrelated with each other, namely:

1. Control environment
2. Risk Assessment
3. Control Activities
4. Information and communication
5. Monitoring

The following describes the components and principles of internal control:

KOMPONEN DAN PRINSIP PENGENDALIAN INTERNAL
Components and principles of internal control

Komponen Component	Prinsip Pengendalian Internal Internal Controling Principal	
Lingkungan Pengendali Controlling Environme	· Komitmen terhadap integritas dan nilai etika · Melaksanakan tanggung jawab pengawasan · Menetapkan struktur, wewenang dan tanggung jawab · Komitmen terhadap kompetensi · Mendorong akuntabilitas	· Commitment on integrity and ethical values · Implementation of audit responsibility · Stipulate structure, authority and responsibility · Commitment on competency · Encourage accountability
Penilaian Risiko Risk Assessment	· Menentukan tujuan · Mengidentifikasi dan menanalisis risiko · Menilai risiko fraud · Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan signifikan	· Goal setting · Risk identification and analysis · Measure fraud risk · Identify and analyse significant change
Kegiatan Pengendalian Control Activity	· Mengembangkan kegiatan pengendalian · Mengembangkan kontrol umum atas teknologi · Memperinci ke dalam kebijakan dan prosedur	· Develop controlling activity · Develop general control on technology · Detailing into policy and procedure
Informasi Komunikasi Communication Information	· Menggunakan informasi yang relevan · Komunikasi internal yang efektif · Komunikasi eksternal yang efektif	· Use relevant information · Effective internal communication · Effective external communication
Kegiatan Monitoring Monitoring Activity	· Evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah · Mengevaluasi dan melaporkan setiap kekurangan	· Sustainable and/or separated Evaluation · Evaluate and report every weakness

Kerangka Sistem Pengendalian Internal Perhutani

Direksi memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan sistem pengendalian internal *(set the tone from the top)*. Direksi menerapkan sistem pengendalian internal melalui penetapan kebijakan pengelolaan perusahaan, rencana strategis dan struktur organisasi secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dewan Pengawas memiliki peran dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar dan Rapat Pembahasan Bersama (RPB). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Pengawas membentuk Komite

Perhutani Internal Control System Framework

The Board of Directors has the role and responsibility to supervise and direct the implementation of the internal control system (set the tone from the top). The Board of Directors implements an internal control system through the determination of company management policies, strategic plans and organizational structures consistently and complies with applicable regulations.

The Supervisory Board has a role and responsibility in supervising the management of the company by the Board of Directors as well as providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long Term Plan (RJPP), Company Work Plan and Budget (RKAP), provisions of the Articles of Association and Joint Discussion Meetings (RPB). In carrying out these duties, the Supervisory Board established a Supervisory Board Level

Tingkat Dewan Pengawas yakni Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Kantor Akuntan Publik, Lembaga Sertifikasi Mutu, dan Regulator merupakan bagian sistem pengendalian Perhutani yang berasal dari eksternal perusahaan. Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab untuk memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan. Lembaga Sertifikasi Mutu bertanggung jawab memberikan penilaian kesesuaian Perhutani dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik, dirancang dalam rangka memberikan jaminan yang memadai dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Penerapan pengendalian internal diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan entitas yaitu efektivitas dan efisiensi operasi termasuk didalamnya pengamanan aset, kehandalan pelaporan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perhutani melakukan evaluasi atau penilaian atas efektivitas pengendalian internal pada tingkat korporat maupun tingkat operasional antara lain melalui evaluasi atas kebijakan, pedoman maupun prosedur beserta penerapannya yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu kantor akuntan publik maupun pihak internal yaitu fungsi Audit Internal dan Manajemen Risiko.

Agar proses evaluasi dan monitoring terhadap penerapan aktivitas operasional berbasis risiko, Perusahaan juga telah memiliki Komite Manajemen Risiko, sehingga setiap kebijakan yang diambil Direksi telah mempertimbangkan risiko dan mencerminkan penerapan prinsip-prinsip GCG.

Committee, namely the Audit Committee and the Risk Management Committee.

Public Accounting Firms, Quality Certification Institutes, and Regulators are part of the Perhutani control system originating from external to the company. The Public Accounting Firm is responsible for providing an assessment of the fairness of the financial statements. The Quality Certification Agency is responsible for providing an assessment of Perhutani's conformity with the established quality standards.

Evaluation of The Effectiveness of Internal Control System

Internal control is a form of implementation of good corporate governance, designed in order to provide adequate guarantees in an effort to achieve the entity's objectives. The implementation of internal control is directed to support the achievement of the entity's objectives, namely the effectiveness and efficiency of operations including asset security, financial reporting reliability and compliance with laws and regulations.

Perhutani evaluates or assesses the effectiveness of internal controls at the corporate and operational levels, among others through evaluation of policies, guidelines and procedures and their implementation by external parties, namely public accounting firms and internal parties, namely the Internal Audit and Risk Management functions.

In order to evaluate and monitor the impleme ntation of risk-based operational activities, the Company also has a Risk Management Committee, so that every policy taken by the Board of Directors has considered risks and reflects the implementation of GCG principles.

.

Akuntan Publik

Public Accountant

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RPB dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Pengawas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), sebagai auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan independen atas laporan keuangan Perhutani untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Based on the authority mandated by the RPB and considering recommendations from the Audit Committee as well as the prevailing laws and regulations, the Supervisory Board has appointed the Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) Public Accountant Firm, as an external auditor to conduct an independent audit on Perhutani's financial reports for for the period ended December 31, 2020.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk untuk mengaudit Laporan Keuangan Perhutani Tahun Buku 2020 yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) setelah mendapatkan persetujuan RPB. Penunjukkan tersebut telah memenuhi ketentuan jumlah periode akuntan publik.

Untuk menjaga profesionalitas dan independensi dalam pelaporan, Perhutani dalam menentukan auditor eksternal berlandaskan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Pasal 3 terkait pembatasan masa pemberian jasa dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh

Public Accountant Firm Appointment

The Public Accounting Firm (KAP) appointed to audit Perhutani's Financial Statements for Fiscal Year 2020 is the Public Accounting Firm (KAP) KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) after obtaining RPB approval. The appointment has complied with the provisions for the number of periods of public accounting.

To maintain professionalism and independence in reporting, Perhutani determines the external auditor based on the provisions of the Minister of Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008 concerning Public Accountant Services, Article 3 regarding the limitation of the service provision period in which the Public Accounting Firm (KAP) may only conduct audits. for a maximum of 6 (six) consecutive financial years and by a

seorang Akuntan Publik maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memberikan jasa Audit kepada Perhutani mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Public Accountant for a maximum of 3 (three) consecutive financial years. Public Accountants and Public Accounting Firms (KAP) that have provided audit services to Perhutani from 2016 to 2020 are as follows:

AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PERHUTANI

Perhutani Public Accountant and Public Accountant Firm (KAP)

Tahun Buku Fiscal Year	**Akuntan** Accountant	**Kantor Akuntan Publik** Public Accountant Firm	**Ruang Lingkup Audit** Audit Scope	**Opini Audit** Audit opinion	**Biaya Audit** Audit Fee (Rupiah)
2020	Yusron, S.E.,Ak.,CPA (NIAP 0243)	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perum Perhutani Perum Perhutani Consolidated Financial Statements	Wajar dalam hal yang material Fairly, in all material respects	4.904.900.000
2019	Yusron, S.E.,Ak.,CPA (NIAP 0243)	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perum Perhutani Perum Perhutani Consolidated Financial Statements	Wajar dalam hal yang material Fairly, in all material respects	2.475.000.000
2018	Yusron, S.E.,Ak.,CPA (NIAP 0243)	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perum Perhutani dan penambahan Aset Tanaman Perum Perhutani Audit on Perum Perhutani Consolidated Financial Statements	Wajar dalam hal yang material Fairly, in all material respects	2.320.530.000
2017	Yusron, S.E.,Ak.,CPA (NIAP 0243)	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perum Perhutani Perum Perhutani Audit on Perum Perhutani Consolidated Financial Statements	Wajar dalam hal yang material Fairly, in all material respects	1.903.000.000
2016	Yusron, S.E., Ak, CPA (NIAP 0243)	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perum Perhutani Perum Perhutani Audit on Perum Perhutani Consolidated Financial Statements	Wajar dalam hal yang material Fairly, in all material respects	1.852.400.000

Hasil Audit dan Jasa Lainnya

Hasil audit tahun buku 2020 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perhutani menyatakan bahwa laporan keuangan Perhutani telah disajikan secara wajar tanpa pengecualian dan bebas dari salah saji material berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Audit Results and Other Services

Audit Result on Perhutani's Consolidated Financial Statements Fiscal Year 2020 proved that Perhutani's financial statements were presented fairly without exception and were free from material misstatement based on generally accepted accounting principles in Indonesia.

Efektivitas Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengendalian Internal melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan dan meningkatkan kinerja baik dari segi keuangan maupun operasional. Perhutani berupaya menindaklanjuti setiap temuan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga secara efektif mampu menekan temuan-temuan ditahun berikutnya.

The Effectiveness of Audit Implementation by Public Accountant

The Audit Committee coordinates with the Internal Control Unit to review the effectiveness of the external audit implementation to ensure that all findings can be followed up in accordance with the assigned authority and improve performance both in terms of finance and operations. Perhutani seeks to follow up on any findings from the audit by the Public Accounting Firm, so that it can effectively suppress findings in the following year.

Manajemen Risiko

Risk Management

Review dan analisis risiko-risiko di Perhutani dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi agar risiko-risiko yang mempengaruhi kelangsungan bisnis Perhutani

The review and analysis of risks in Perhutani is carried out as an effort to anticipate risks that affect Perhutani's business continuity.

Sistem Manajemen Risiko dituangkan dalam Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 1958/KPTS/DIR/2017 tentang Pedoman Manajemen Risiko Perum Perhutani. Dalam Pelaksanaannya Pedoman Manajemen Risiko dijabarkan dalam bentuk prosedur kerja. Prosedur Kerja Manajemen Risiko yang berlaku di Perhutani adalah Prosedur Kerja Penyusunan Kajian Manajemen Risiko PK-SMPHT.13-001.

The Risk Management System is set forth in the Risk Management Guidelines established through the Decree of the Board of Directors of Perum Perhutani number: 1958/KPTS/ DIR/2017 concerning the Perum Perhutani Risk Management Guidelines. In its implementation the Risk Management Guidelines are described in the form of wor kprocedures. TheRiskManagement Work Procedure in force in Perhutani is the Work Procedure for Preparing the Risk Management Study Program PK- SMPHT.13-001.

Komitmen Manajemen Perhutani

Manajemen Perum Perhutani menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan dan implementasi Manajemen Risiko sangat ditentukan oleh komitmen yang kuat dari segenap jajaran manajemen sampai dengan karyawan.

Komitmen manajemen Perum Perhutani antara lain untuk memastikan bahwa implementasi penerapan Manajemen Risiko di Perum Perhutani dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, memastikan bahwa Perum Perhutani memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menangani Manajemen Risiko, memastikan bahwa pelaksanaan Manajemen

Commitment of Perhutani's Management

Management of Perum Perhutani realizes that the successful implementation and implementation of Risk Management is largely determined by a strong commitment from all levels of management to employees.

Commitment of Perum Perhutani's management includes ensuring that the implementation of Risk Management at Perum Perhutani is carried out consistently and continuously, ensuring that Perum Perhutani has adequate human resources to handle Risk Management, ensuring that the implementation of Risk Management can minimize the possibility

Risiko dapat meminimalkan kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh semua kegiatan, memastikan bahwa kinerja sistem Manajemen Risiko tersosialisasi di seluruh jenjang organisasi dan secara berkesinambungan melakukan pemantauan serta kaji ulang terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko, memastikan bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko searah dengan kebijakan perusahaan serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kebijakan Manajemen Risiko Perhutani

Untuk menerapkan komitmen manajemen, Direksi menetapkan kebijakan Manajemen Risiko antara lain Manajemen Risiko merupakan landasan berpikir dan bertindak sebagai bagian dari pengambilan keputusan, perusahaan menerapkan Manajemen Risiko secara komprehensif dan terintegrasi pada setiap aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan sebagai bagian dari GCG, Perusahaan menyediakan dan mengalokasikan sumberdaya yang cukup untuk mencapai tujuan Manajemen Risiko.

Perusahaan menyadari bahwa di dalam mengelola risiko diperlukan sumber daya serta pengetahuan yang memadai melalui pelatihan dan komunikasi yang baik dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan. Hasil pengukuran kinerja sistem Manajemen Risiko yang tersosialisasi di seluruh jenjang organisasi dan secara berkesinambungan, serta melakukan pemantauan serta kaji ulang terhadap pelaksanaan sistem Manajemen Risiko di Perum Perhutani guna pencapaian peningkatan berkelanjutan pada setiap lini organisasi yang menjawab setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi didalam pelaksanaan sistem Manajemen Risiko ini.

of losses incurred by all activities, ensuring that the performance of the Risk Management system is socialized at all levels of the organization and continuously monitors and reviews the implementation of Risk Management, ensuring that the implementation of Risk Management is in line with company policies and in accordance with prevailing regulations and regulations.

Perhutani Management Policy

To implement the management's commitment, the Board of Directors has stipulated Risk Management policy including Risk Management is the foundation of thinking and acts as part of decision making, the company implements Risk Management in a comprehensive and integrated manner in every organizational activity to achieve company goals as part of GCG, the Company provides and allocates sufficient resources to achieve Risk Management objectives.

The company realizes that managing risk requires adequate resources and knowledge through training and good communication with internal and external parties of the company. The results of the performance measurement of the Risk Management system are socialized at all levels of the organization and continuously, as well as monitoring and reviewing the implementation of the Risk Management system at Perum Perhutani to achieve continuous improvement in each line of organization that responds to developments and changes in the implementation of the Risk Management system.

Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko

Organization Structure of Risk Management Implementation

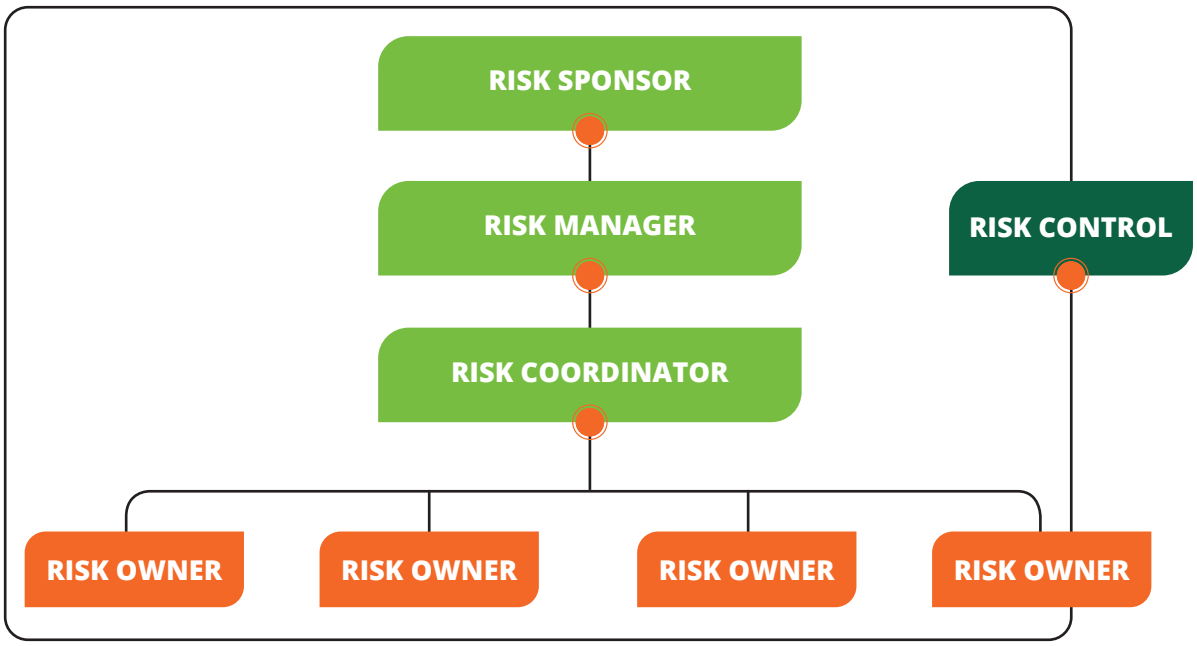

Dari bagan Struktur Organisasi Manajemen Risiko di atas, terdapat 6 (enam) unsur yang berperan dalam penerapan Manajemen Risiko, yaitu:

- Dewan Pengawas berperan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Risk Sponsor (Direksi/BoD);
- *Risk Sponsor* (Direksi) bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko perusahaan;
- *Risk Manager* (Direktur yang membidangi MR) berperan mengoordinasikan penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja dan fungsi yang ada di perusahaan;
- *Risk Coordinator* (Kepala Divisi Regional, Kepala Divisi, dan Kepala Pusat) berperan dalam mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko lingkup unit kerja masing-masing;
- *Risk Control* (Satuan Pengawas Internal/SPI) berperan melaksanakan aktivitas assurance dan consulting independen, untuk memberi nilai tambah dan memperbaiki kegiatan

From the Risk Management Organizational Structure chart above, there are 6 (six) elements that play a role in the implementation of Risk Management, namely:

- The Supervisory Board plays a role in carrying out the supervisory function on the implementation of risk management carried out by the Risk Sponsor (Board of Directors/BoD);
- The Risk Sponsor (Board of Directors) is responsible for the implementation of the company's risk management;
- Risk Manager (Director in charge of MR) has the role of coordinating the implementation of risk management in all work units and functions in the company;
- Risk Coordinator (Head of Regional Division, Head of Division, and Head of Center) plays a role in coordinating the implementation of risk management within the scope of each work unit;
- Risk Control (Internal Supervisory Unit/SPI) has the role of carrying out independent

operasi perusahaan, membantu perusahaan mencapai tujuan dengan melakukan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam mengevaluasi efektivitas proses manajemen risiko;

- *Risk Owner* (Unit Kerja Pemilik Risiko) merupakan fungsi pemilik risiko yang memiliki serangkaian tahapan proses kegiatan kerja.

assurance and consulting activities, to provide added value and improve the company's operations, to assist the company in achieving its goals by taking a systematic and structured approach in evaluating the effectiveness of the risk management process;

- Risk Owner (Risk Owner Work Unit) is a risk owner function that has a series of stages of work activity processes.

Saat ini jumlah pegawai Unit kerja Manajemen Risiko sebanyak 5 orang. 1 Orang ter Certified Risk Management Officer.

Currently, the number of employees of the Risk Management Unit is 5 people. 1 Certified Risk Management Officer.

Profil Kepala Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Manajemen Risiko adalah memastikan tata kelola dan kepatuhan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi Manajemen Risiko secara terintegrasi, konsisten dan berkesinambungan guna mendukung tercapainya GCG dan visi Perusahaan berdasarkan prosedur dan regulasi yang berlaku. Berikut profil Kepala Manajemen Risiko Perhutani.

Head of Risk Management Profile

The duties and responsibilities of the Head of Risk Management are to ensure that the governance and compliance of the Company are in accordance with applicable regulations through planning, implementing and monitoring the implementation of Risk Management in an integrated, consistent and sustainable manner to support the achievement of GCG and the Company's vision based on applicable procedures and regulations. The following is the profile of the Head of Risk Management of Perhutani.

YULISTYO ANANTA SOEJOSO

Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of Risk Management Division

Yulistyo Ananta Soejoso menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko Perum Perhutani sejak Agustus 2018. Telah menduduki berbagai jabatan sepanjang karir beliau di Perum Perhutani diantaranya Kepala Departemen Keuangan

Yulistyo Ananta Soejoso is appointed as Head of Risk Management Division in Perum Perhutani since August 2018. He has been appointed in various positions during his career in Perum Perhutani, such as Head of Finance Department East Java Regional

Divisi Regional Jawa Timur (2017), Kepala Departemen Keuangan Divisi Regional Jawa Tengah (2012), Kepala Departemen Akuntansi Kantor Pusat (2011), Kepala Seksi Akuntansi Divisi Regional Jawa Tengah (2009) dan Kepala Seksi Akuntansi Kantor Pusat (2006). Yulistyo Ananta Soejoso lahir di Blora, 11 Juli 1967. Lulusan S1 Universitas Airlangga Jurusan Akuntansi tahun 1985 dan S2 Universitas Diponegoro Jurusan Akuntansi tahun 2010.

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko sesuai dengan ISO 31000 sebagai berikut:

1. **Manajemen Risiko harus memberikan nilai tambah**
   Manajemen Risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan kemungkinan pencapaian perusahaan secara nyata, selain itu, juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk reputasi, corporate governance, efisiensi operasi, dan lain-lain.

2. **Manajemen Risiko merupakan bagian dari proses organisasi**
   Bahwa setiap proses bisnis terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan sasaran proses tersebut tidak tercapai. Untuk melaksanakan proses tersebut terdapat berbagai hal yang dapat menghalangi pencapaian sasaran. Karena itu setiap penanggung jawab harus mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan ketidaktercapaian dan dapat mengelolanya bila hal tersebut terjadi. Mengingat suatu risiko mempunyai keterkaitan dengan risiko lainnya, maka proses pembahasan masalah harus transparan dan melibatkan semua pihak dalam organisasi.

Division (2017), Head of Financial Department Central Java Regional Division (2012), Head of Accounting Department at Head Ofice (2011), Head of Accounting Section Central Java Regional Division (2009) and Head of Accounting Section at Head Office (2006). Yulistyo Ananata Soejoso was born in Blora on July 11, 1967. He graduated from Bachelor Degree of Accounting from Universitas Airlangga in 1985 and Master Degree of Accounting from Universitas Diponegoro in 2010.

Risk Management Principles

Risk Management princoples are in accordance with ISO 31000 as follows:

1. **Risk Management must provide added value**
   Risk Management contributes through increasing possibility of concrete corporate achievement, as also provides improvements in aspects of safety, occupational health, compliance with laws and regulations, environmental protection, public perception, product quality, reputation, corporate governance, operational efficiency, and others.

2. **Risk Management is part of the organizational process**
   That every business process has things that can cause the target process not to be reached. To carry out the process there are various things that can hinder the achievement of goals. Therefore, each person in charge must prepare himself for the possibilities of non-achievement and can manage it if this happens. Given that a risk has a relationship with other risks, the process of discussing the problem must be transparent and involve all parties in the organization.

3. **Manajemen Risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan**

   Manajemen Risiko membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan informasi selengkap mungkin. Manajemen yang berwenang wajib memberikan keputusan penanganan atas risiko yang terjadi dan segera melaksanakan contingency plan yang telah direncanakan. Keputusan harus dipilih apabila hal yang dikhawatirkan memang terjadi dan segera dilaksanakan berdasarkan alternatif yang tersedia.

4. **Manajemen Risiko secara khusus menangani ketidakpastian**

   Manajemen Risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan memperkirakan bagaimana sifat ketidakpastian dan bagaimana cara penanganannya.

5. **Manajemen Risiko bersifat sistematis, terstruktur dan tepat waktu**

   Manajemen Risiko bersifat sistematis, terstruktur dan tepat waktu untuk memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi sehingga hasilnya dapat diperbandingkan dan memberikan perbaikan serta memastikan bahwa sistem Manajemen Risiko berjalan dengan konsisten dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran organisasi.

6. **Manajemen Risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia**

   Untuk melakukan Manajemen Risiko diperlukan data-data yang akurat dan mutakhir, sehingga peran penanggung jawab (unit kerja/ risk owner) dalam menginformasikan data-data tersebut sangat penting, untuk kemudian oleh petugas manajemen risiko difasilitasi dalam pengolahannya.

3. **Risk Management is part of decision making**

   Risk Management helps decision makers to make decisions on the basis of the choices available with as complete information as possible. The authorized management must provide a handling decision on the risks that occur and immediately implement the designated contingency plan. Decisions must be chosen if the things that are feared do occur and are immediately implemented based on available alternatives.

4. **Risk Management specifically handles uncertainty**

   Risk Management specifically handles uncertainty aspect in the decision making process and estimates how the nature of uncertainty and the mitigation plan.

5. **Risk Management is systematic, structured and timely**

   Risk Management is systematic, structured and on time to contribute to efficiency and consistency so that results can be compared and provide improvements and ensure that the Risk Management system runs consistently and contributes to the achievement of organizational goals.

6. **Risk Management is based on the best information available**

   To carry out Risk Management, accurate and up-to-date data are needed to enable role of the person in charge (work unit/risk owner) in informing these data is very important, then risk management officers are facilitated in their processing.

7. **Manajemen Risiko adalah khas untuk masing-masing penggunanya (Risk Owner)**
   Dalam prinsip ini ditekankan bahwa setiap orang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga ukuran keberhasilan masing-masing individu menjadi berbeda. Atas dasar ini maka setiap orang harus berupaya memahami apa yang menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilannya, yaitu hal-hal yang menghalangi pencapaian sasaran tugas dan tanggung jawabnya.

8. **Manajemen Risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya**
   Manajemen organisasi harus menyadari bahwa Manajemen Risiko diterapkan oleh anggota organisasi/karyawan yang mempunyai kapabilitas, kepentingan dan persepsi yang berbeda. Karena itu perlu dilakukan proses manajemen perubahan guna memiliki persamaan persepsi dan kapabilitas yang memadai.

9. **Manajemen Risiko bersifat transparan dan inklusif**
   Untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko tetap relevan dan terkini, para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan pada setiap tingkatan organisasi dilibatkan secara efektif. Proses inputing risiko wajib mencantumkan secara transparan data-data masalah yang terjadi dalam unit kerja dan/atau kompartemennya terutama yang melibatkan semua pihak dalam perusahaan.

10. **Manajemen Risiko bersifat dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan**
    Tugas manajemen untuk memastikan bahwa manajemen risiko senantiasa memperhatikan, merasakan dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi terkait faktor internal (SDM, struktur organisasi,

7. **Risk Management is typical for each user (Risk Owner)**
   In this principle it is emphasized that each person has different duties and responsibilities, so that the size of each individual's success is different. On this basis, each person must strive to understand what is the obstacle in achieving success, such as issues that constrain the achievement of the duty and responsibilities.

8. **Risk Management considers human and cultural factors**
   Organizational management must be aware that Risk Management is implemented by members of the organization/employee who have different capabilities, interests and perceptions. Therefore, a change management process needs to be carried out in order to have adequate perceptions and capabilities.

9. **Risk Management is transparent and inclusive**
   To ensure that Risk Management remains relevant and up-to-date, stakeholders and decision makers at every level of the organization are effectively involved. The risk inputing process must include transparently the data of problems that occur in work units and/or compartments, especially those involving all parties in the company.

.

10. **Risk Management is dynamic, repetitive and responsive to changes**
    The task of management is to ensure that risk management is always concerned, feels and responds to changes that occur related to internal factors (HR, organizational structure, work procedures, etc.) and external factors

prosedur kerja, dll) dan faktor eksternal (sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, dll).

11. **Manajemen Risiko harus memfasilitasi perbaikan dan peningkatan organisasi**
Dalam hal ini peran petugas Manajemen Risiko senantiasa mengembangkan dan menerapkan strategi Manajemen Risiko serta meningkatkan kematangan pelaksanaan Manajemen Risiko, memfasilitasi perbaikan berkelanjutan organisasi yang diukur dari tingkat kematangan Manajemen Risikonya dan membantu menerapkan perbaikan sistem pengendalian sehingga terjadi peningkatan organisasi secara berkelanjutan.

(social, political, economic, cultural, legal, etc.).

11. **Risk management must facilitate organizational improvement and improvement**
In this case the role of the Risk Management officer constantly develops and implements a Risk Management strategy and increases the maturity of the implementation of Risk Management, facilitates the continuous improvement of the organization as measured by the maturity level of Risk Management and helps implement improvements to the control system so that there is an ongoing organization improvement.

KerangkaProses Manajemen Risiko

Risk Management Process Framework

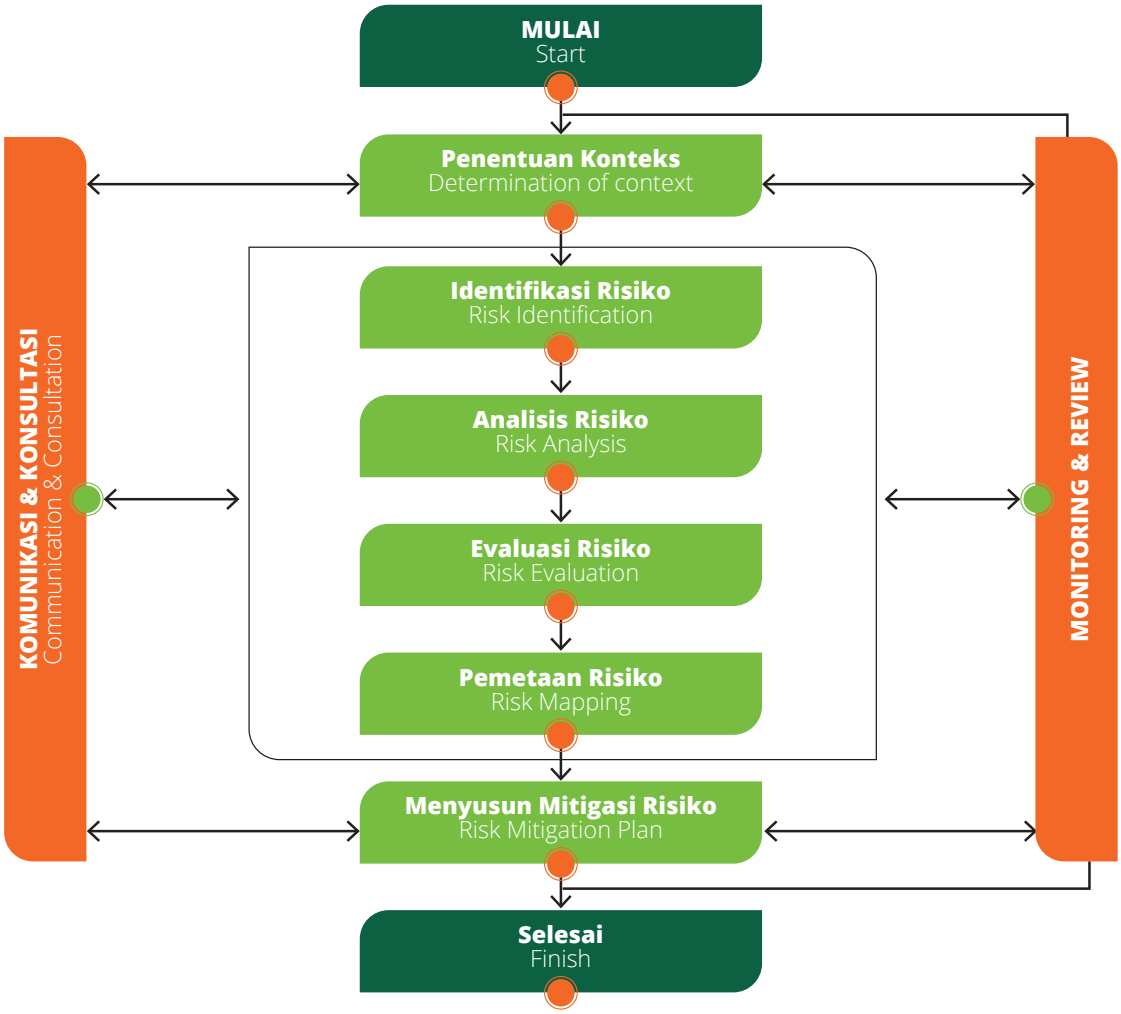

Sosialisasi Manajemen Risiko

Dalam mencapai tujuan, setiap organisasi pasti berhadapan dengan risiko. Manajemen risiko membantu organisasi dalam mengelola setiap risiko yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Awareness para pengambil keputusan sangat penting dalam implementasi MR di Perum Perhutani. Penerapan MR di Perum Perhutani diarahkan pada pengelolaan risiko-risiko yang dapat menunda, menghambat dan menurunkan pencapaian sasaran organisasi.

Risk Management Socialization

In achieving the goals, every organization certainly encountered several risks. Risk management helps the organization to manage every risks potential, which have an impact in achieving organizational goals. Awareness of decision makers is very important in the implementation of MR at Perhutani Corporation. The application of MR at Perum Perhutani is directed at managing risks that can delay, hinder and reduce the achievement of organization's goals.

Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Selama tahun 2020 Divisi Manajemen Risiko telah mengikutkan beberapa Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sebagai berikut :

Risk Management Competency Development

During 2020 the Risk Management Division has included several Human Resources to obtain competency development as follows:

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Competency Development

Pelatihan Training		**Peserta** Participants	**Waktu** Time
Certified Risk Management Professional (CRMP)	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Expert Madya Manajemen Risiko	24-28 Agustus 2020
Seminar Strategic Risk Management and Risk Based Budgeting in Economic Recession	Seminar on Strategic Risk Management and Risk Based Budgeting in Economic Recession	Expert Madya Manajemen Risiko	21 November 2020
Risk Mangement Talk: Mitigasi Risiko Strategis untuk Keberlanjutan Bisnis Perusahaan	Risk Management Talk : Strategic Risk Mitigation for Corporate Business Sustainability	Kadiv Manajemen Risiko dan Expert Manajemen Risiko	17 Desember 2020

Monitoring dan Review

Kegiatan monitoring dan review risiko dilakukan dalam rangka memastikan bahwa tindakan mitigasi risiko yang diambil oleh Korporat atau Satuan Unit Kerja telah sesuai dengan rencana antara lain RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran

Monitoring and Review

Risk monitoring and review activities are carried out in order to ensure that the risk mitigation actions taken by the Corporate or Work Unit Unit are in accordance with plans including the RKAP (Corporate Work Plan and Budget) and KPI (Key

Perusahaan) dan KPI (Key Performance Indicator) serta hasil evaluasi PICA (Problem Identification Corrective Action). Pada tahap ini dimungkinkan untuk dilakukan pembatalan atau penambahan rencana tindak, dengan mempertimbangkan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing Satuan Unit Kerja.

Performance Indicator) and PICA evaluation results (Problem Identification Corrective Action). At this stage, a cancellation or addition of an action plan is possible, considering the conditions faced by each Work Unit.

Monitoring dan review (Pemantauan) risiko dilakukan oleh Pemilik Risiko secara terus menerus sehingga risiko yang ada menurun dibawah standar risiko yang ditetapkan oleh Direksi.

Risk monitoring and review is carried out by the Risk Owner continuously so that the existing risks decrease below the risk standards set by the Board of Directors.

Profil Risiko Korporat

Profil risiko merupakan gambaran risiko-risiko yang teridentifikasi selama Perhutani menjalankan aktivitasnya serta tingkat kegawatan penanganan terhadap risiko agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Pengungkapan penyebab dan dampak terjadinya suatu risiko menjadi salah satu dasar pengendalian risiko dan pengembilan keputusan yang diambil. Risiko-risiko pada tingkat tertentu (ekstrim dan tinggi) menjadi perhatian Perhutani tanpa melupakan keberadaan risiko-risiko yang berada pada level rendah dan menengah agar risiko tidak meningkat levelnya. Penanganan risiko dilakukan perusahaan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Pengelolaan risiko dilakukan pada masing-masing satuan unit kerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Corporate Risk Profile

Risk profile is an illustration of the risks identified during Perhutani's carrying out its activities and the level of emergency handling of risks so as not to have a greater impact on achieving company goals. Disclosure of the causes and effects of a risk is one of the bases of risk control and the decisions taken. Risks at a certain level (extreme and high) are of concern to Perhutani without forgetting the existence of risk risks that are at the low and middle levels so that the risk does not increase. Risk management is carried out by the company based on the company's capabilities. Risk management is carried out in each work unit in accordance with the given authority.

PROFIL RISIKO KORPORAT
Corporate Risk Profile

	Uraian Risiko Risk Profile	Penyebab Cause	Score Score	Level Level	Mitigasi Mitigation
I.	**Tingkat Kesehatan Perusahaan**/ Company's Soundness Level				
1.	Target pencapaian tingkat kesehatan perusahaan tidak tercapai.	Pendapatan produk kayu, non kayu dan wisata tidak tercapai dan pengembangan usaha baru tidak berhasil	20	Ekstrim	Pricing Policy; CRM; Promosi; Pengawalan Produksi Kayu Premium; Pengawalan target turnover (rasio penjualan persediaan); Sinergi bisnis multipihak; Pengembangan KPH Mandiri; Pemberian kewenangan kepada Adm dalam pengembangan usaha; Pembukaan pangsa pasar baru termasuk pasar produk PPCI
	Company's soundness level achievement is below the target	Wood, non-wood and tourism revenues are below the expectation and new business development failed	20	Extreeme	Pricing Policy; CRM; Promotion; Safeguarding Premium Wood Production; Safeguarding turnover turn over (inventory sales ratio); Multiplayers business synergy; Development of KPH Mandiri; Authority delegation to the Adm in business development; New market share penetration including PPCI product market
2.		Kegiatan operasional (Tanaman, Keamanan & Produksi) tidak mencapai target yang ditetapkan.	20	Ekstrim	Operational Excellent; Peningkatan dan peningkatan produksi laku jual; Pengawalan prosen tumbuh tanaman sampai tahun ke 3 secara teknis dan keamanan (patroli, komsos, dll).
		Operational activity (Plantation, Safety & Production) not achieving the expected target.	20	Extreeme	Operational Excellent; Improvement and increasing selling behaviour production; Safeguarding percentage of plantation growth until the third year in technical and security apect (patrol, komsos, etc)
II.	**SKOR KPKU/ SKOR KPKU**				
3.	Nilai KPKU tidak tercapai	Kapabilitas dan pemahaman tentang KPKU masih rendah	12	Tinggi	Internalisasi KPKU; Asesmen KPKU Mandiri;
	KPKU value not achieved	Low KPKU Capability and understanding	12	High	KPKU Internalization; KPKU Self-Assessment;
III.	**NILAI GCG/ NILAI GCG**				
4.	Target Nilai GCG tidak tercapai	Komitmen; Keteladan Organ Perusahaan (Direksi) dan manajemen kunci dalam mengimple-mentasikan tata kelola perusahaan masih perlu ditingkatkan.	9	Tinggi	Sosialisasi GCG kepada organ perusahaan dan manajemen kunci; Monitoring dan evaluasi program kerja GCG pada setiap parameter GCG; Pembangunan budaya perusahaan yang baru (INTIKU).
	GCG Value Target is not achieved	Commitment/Role Model in corporate governance impelementation by Company's Organ (Board of Directors) needs to be improved	9	High	GCG socialization to company organs and key management; Monitoring and evaluating GCG work programs on each GCG parameter; New corporate culture development (INTIKU).

PROFIL RISIKO KORPORAT
Corporate Risk Profile

	Uraian Risiko Risk Profile	Penyebab Cause	Score Score	Level Level	Mitigasi Mitigation
		Prinsip-prinsip GCG dan indikator GCG belum menjadi internal best practices.	9	Tinggi	Sosialisasi GCG ke semua level di perusahaan.
		Principles and indicators have not become internal best practices	9	High	GCG Socialization to all levels in the Company.
		Sistem Pengendalian Intern & Manajemen Risiko sebagai sistem pertahanan internal organisasi perusahaan belum maksimal.	9	Tinggi	Evaluasi dan perbaikan sistem Pengendalian Intern; Pembuatan Kajian Risiko oleh masing-masing Satuan Kerja.
		Internal Control & Risk Management system as a company internal defense system has not been optimized	9	High	Evaluation and improvement of the Internal Control system; Preparation of Risk Assessment by each Work Unit
IV.	**Produksi SDH/ Forest Resources Production/** Forest Resources Production				
7	Target luas tanaman tidak tercapai	Adanya penundaan/ penghentian tebangan.	12	Tinggi	Penggunaan Drone dan GPS untuk monitoring dan evaluasi tanaman pada satuan pengelola terkecil/anak petak.
	Plantation area is below the target	Cutting delay/ suspension	12	High	Using Drone and GPS to monitor and evaluate plantation in the smallest managing unit/sub-land
V	**Tanaman Tahun Ke-3 / Third Year Plantation/** Third Year Plantation				
8.	Target Keberhasilan Tanaman Tahun Ke-3 tidak tercapai	Pemeliharaan tahun ke 2 dan 3 tidak sesuai ketentuan dan tata waktu.	16	Ekstrim	Monev pemeliharaan tanaman tahun ke 2 dan 3; Pengawalan tindak lanjut terhadap monev tahun ke-2 (sulaman, babad, gulud, dangir, pemupukan, dll); Dibuat sistem penilaian dan pemantauan tanaman menggunakan foto satelit dan atau Drone berbasis IT.
	Third Year Plantation Result is below the target	Maintenance in 2nd and 3rd years are not according to the regulation and time frame	16	Extreme	Plant maintenance monev for the 2nd and 3rd year; Escort follow-up to the second year of monitoring and evaluation (embroidery, chronicle, gulud, dangir, fertilization, etc.); Created a crop assessment and monitoring system using satellite photos and or IT-based drones.
9.		Gangguan Keamanan Hutan (kebakaran, bibrikan, penggembalaan, dll)	16	Ekstrim	Pengadaan sarpra penanganan kebakaran hutan; Pengakuan Perlindungan Kerjasama Kemitraan (KULINKK) Permenhut LHK No. P83/ MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial; Dibuat kebijakan pengelolaan aset tanaman; Penghitungan nilai tanaman sebagai aset; Pembuatan daftar inventarisasi aset tanaman dan bukti pendukung apabila terjadi perubahan aset; Mekanisme monitoring dan evaluasi tanaman sebagai aset.

PROFIL RISIKO KORPORAT
Corporate Risk Profile

Uraian Risiko Risk Profile		Penyebab Cause	Score Score	Level Level	Mitigasi Mitigation
		Forest Fire Issue (fire, calibration, grazing, etc)	16	Extreme	Procurement of infrastructure for handling forest fires; Recognition of Protection of Partnership Cooperation (KULINKK) Permenhut LHK No. P83/ MenLHK/Setjen/ Kum.1/10/2016 concerning Social Forestry; Established plant asset management policy; Calculation of plant value as an asset; Making an inventory list of plant assets and supporting evidence in the event of a change in assets; Mechanism of monitoring and evaluating plants as assets.
10.		Serangan Hama Penyakit	12	Tinggi	Penggunaan jenis klon unggul (kayu putih) yang lebih tahan terhadap serangan hama penyakit; Pemberantasan hama penyakit; Konsistensi dalam menjalankan rekomendasi (fisik dan finansial yang optimal) dari Puslitbang.
		Disease Attack	12	High	Application of Superior types of clones (eucalyptus) that are more resistant to pests and diseases; Combating the pests disease; Consistency in carrying out recommendations (optimal physical and financial) of the Research and Development Center.
VI.	**Penurunan Jumlah Pencurian Pohon / Decreasing Plantation Robbery**				
11.	Peningkatan jumlah pencurian pohon	Kekurangan SDM, Sarpra dan Anggaran untuk Patroli Rutin.	16	Ekstrim	Mencukupi jumlah SDM, Sarpra dan Anggaran sesuai tata waktu; Pelatihan Komsos, Kesamaptaan, Spionase dan Bela Diri secara rutin; Pengadaan alat komunikasi HT di wilayah KPH rawan.
	Increasing plantation robbery cases	Lack of HR, Infrastructures and Budget for Patrol Routine	16	Extreme	Sufficient HR personnel, Sarpra and Budget according to the time frame; Routine Training on Social Services, Maternity, Spying and Self Defense; Procurement of HT communication equipment in KPH areas is vulnerable.
VII.	**Agroforestry**				
12.	Target pelaksanaan ketahanan pangan beras tidak tercapai	Teknologi dan sistem budidaya padi oleh petani hutan masih rendah.	12	Tinggi	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Dirjen Tanaman Pangan) terkait penyuluhan lapangan, bantuan benih dan pupuk bersubsidi; Pembuatan demplot budidaya padi di lahan hutan; Penerapan intensifikasi budidaya padi (penggunaan benih unggul, pemupukan tepat waktu, guna, dosis); Optimalisasi hasil produksi melalui kerjasama dengan hilir.

PROFIL RISIKO KORPORAT
Corporate Risk Profile

	Uraian Risiko Risk Profile	Penyebab Cause	Score Score	Level Level	Mitigasi Mitigation
	Rice food security mplementation below the target	Rice cultivation technology and system by forest farmers is still low	12	High	Coordination with the Ministry of Agriculture (Directorate General of Food Crops) related to field extension, subsidized seed and fertilizer assistance; Making demonstration plots for rice cultivation on forest land; Application of intensification of rice cultivation (use of superior seeds, timely fertilization, use, dosage); Optimization of production results through collaboration with downstream.
13.		Tidak dilakukan pencatatan secara menyeluruh.	9	Tinggi	Pengawalan Tim Khusus pengawalan Agroforestry di dingkat KPH dan BKPH terkait inventarisasi data-data petani hutan tanaman padi, kebutuhan benih unggul & pupuk dan produksi padi sehingga terhimpun database tanaman padi; Pengawalan bagi hasil melalui kerjasama dg hilir.
		Not conducting comprehensive administration	9	High	Agroforestry Special Task Force escort at KPH and BKPH levels is related to the inventory of data on farmers of rice plantations, the need for superior seeds & fertilizers and rice production so that a database of rice plants is collected; Maintain profit sharing through cooperation with downstream.
14.		Terjadi gagal panen karena perubahan cuaca dan HPT.	9	Tinggi	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Dirjen Tanaman Pangan); Dibuat mekanisme pelaporan serangan hama penyakit atau kegagalan panen karena bencana/ perubahan cuaca.
		Harvest default due to changing weather and HPT	9	High	Coordination with the Ministry of Agriculture (Director General of Food Crops); Mechanism for reporting pest attacks or crop failures due to disasters/ weather changes
15.	Target pelaksanaan ketahanan pangan jagung tidak tercapai	Teknologi dan sistem budidaya jagung oleh petani hutan masih rendah.	16	Ekstrim	Koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Dirjen Tanaman Pangan) terkait penyuluhan lapangan, bantuan benih dan pupuk bersubsidi; Pembuatan demplot budidaya jagung di lahan hutan; Penerapan intensifikasi budidaya jagung (penggunaan benih unggul, pemupukan tepat waktu, guna, dosis); Optimalisasi hasil produksi melalui kerjasama dengan hilir.

PROFIL RISIKO KORPORAT
Corporate Risk Profile

	Uraian Risiko Risk Profile	Penyebab Cause	Score Score	Level Level	Mitigasi Mitigation
	Corn food security implementation is below the target	Corn cultivation technology and system by forest farmers is still low	16	Extreme	Coordination with the Ministry of Agriculture (Director General of Food Crops) related to field counseling, subsidized seed and fertilizer assistance; Making demplot cultivation of corn on forest land; Application of intensification of corn cultivation (use of superior seeds, fertilization on time, use, dosage); Optimizing production through collaboration with downstream.
16.		Tidak dilakukan pencatatan hasil panen secara menyeluruh.	16	Ekstrim	Pengawalan Tim Khusus pengawalan Agroforestry di dingkat KPH dan BKPH terkait inventarisasi data-data petani hutan tanaman jagung, kebutuhan benih unggul & pupuk dan produksi jagung sehingga terhimpun database tanaman jagung; Pengawalan bagi hasil melalui kerjasama dengan hilir.
		Not conducting comprehensive administration	16	Extreme	Agroforestry Special Task Force escort at KPH and BKPH levels is related to the inventory of data on farmers of corn plantations, the need for superior seeds & fertilizers and corn production so that a database of corn plants is collected; Maintain profit sharing through cooperation with downstream.
17.	Target pelaksanaan Ketahanan Pangan Tebu tidak tercapai	Belum dilakukan revisi RPKH dan RTT perubahan oleh KLHK.	16	Ekstrim	Pengajuan revisi RPKH ke Kementerian LHK untuk wilayah Divreg Jateng; Pengajuan izin ke Kementerian LHK untuk wilayah Divreg Jawa Barat dan Banten.
	Sugarcane food security implementation is below the target	Not conducting RPKH and RTT Revision by KLHK	16	Extreme	Submission of revised RPKH to the Ministry of Environment and Forestry for the Divreg Central Java region; Submission of permission to the LHK Ministry for the Divreg of West Java and Banten area.
18.		Lokasi tanaman tebu digarap oleh masyarakat dengan komoditas lain.	9	Tinggi	Pembuatan PKS Pengamanan Kegiatan Agroforestry Tebu dengan LMDH.
		Sugar cane plantation area is cultivated by the community with other commodities	9	High	Preparation of MOU on Sugarcane Agroforestry Activity Securing with LMDH
19		Pelaksanaan penanaman tebu tidak sesuai aturan dan tata waktu.	9	Tinggi	Monitoring evaluasi pelaksanaan penanaman tebu;
		Sugarcane planting implementation is not suitable with regulation and time frame.	9	High	Monitoring sugarcane planting implementation evaluation

PROFIL RISIKO KORPORAT
Corporate Risk Profile

	Uraian Risiko Risk Profile	Penyebab Cause	Score Score	Level Level	Mitigasi Mitigation
VIII.	**CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI)/ CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI)**				
20.	Target pencapaian Customer Satisfacion Index (CSI) tidak tercapai	Penyediaan produk tidak sesuai spesifikasi : 1. Subjektifitas penguji 2. Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan dengan benar 3. Alat pengujian tidak akurat 4. Mesin pabrik yang rusak (industri kayu & non kayu) 5. Tempat penyimpanan yang kurang kondusif	6	Menegah	1. Pelatihan Penguji untuk meningkatkan Kompetensi 2. Kalibrasi alat pengujian dan mesin produksi 3. Produk di asuransikan 4. Peningkatan pengawasan pengujian melalui uji sampling hasil pengujian secara berkala.
	Customer Satisfacion Index (CSI) achievement is below the target	Provision of products not according to specifications, such as: 1. Tester's subjectivity 2. Standard Operating Procedures are not implemented correctly 3. Testing equipment is inaccurate 4. Broken factory machinery (wood & non-wood industry) 5. Conducive storage area	6	high	1. Training of Assessor to improve Competence 2. Calibration of testing equipment and production machines 3. The product is insured 4. Increased supervision of testing through regular sampling test results
21.		1. Tidak ada kepastiaan informasi ketersediaan produk; 2. Tidak ada kepastian alokasi produk; 3. Keterbatasan waktu upload kapling by demand dikarenakan server POTP perlu maintenance setiap hari.	6	Menegah	1. Penyampaian informasi ketersediaan produk ke konsumen melalui website Toko Perhutani 2. Penyampaian rencana produksi dan alokasi produk ke konsumen melalui Contact Center 3. Optimalisasi komunikasi dengan tim IT dan Telkom.
		1. There is no certainty about information on product availability; 2. There is no certainty of product allocation; 3. Limited time to upload lots by demand because POTP servers need maintenance every day.	6	Middle	1. Submission of information on product availability to consumers through the Perhutani Shop website 2. Submission of production plans and product allocation to consumers through the Contact Center 3. Optimizing communication with the IT and Telkom teams
22.		Pelayanan yang kurang cepat : 1. Petugas pelayanan ekspor di KBM yang kurang responsif 2. Pekerjaan Divisi Pemasaran yang overload (Kantor Pusat)	8	Menegah	1. Pelatihan/Training Customer Service Excellent 2. Evaluasi SO 3. Penambahan Staf

PROFIL RISIKO KORPORAT
Corporate Risk Profile

Uraian Risiko Risk Profile		Penyebab Cause	Score Score	Level Level	Mitigasi Mitigation
		Slow service: : 1. Export service officers in KBM are less responsive 2. The work of the overloaded Marketing Division (Head Office)	8	Middle	1. Excellent Customer Service Training 2. Evaluate SO 3. Add staff
23.		Komplain Metode Pembayaran dari pelanggan 1. Biaya transfer mahal 2. Kebijakan down payment tidak dapat dipenuhi oleh distributor 3. Kurangnya koordinasi dari pihak ke3 (Telkom)	12	Tinggi	1. MOU dengan Pihak Perbankan 2. Edukasi tata cara pembayaran oleh Contact Centre
		Payment Method Complaints from customers: 1. Expensive transfer fees 2. The down payment policy cannot be met by the distributor 3. Lack of coordination from 3rd party (Telkom)	12	High	1. MOU with Banks 2. Education procedures for payment by the Contact Center
IX.	**PEMENUHAN LAPORAN BERKALA/ PEMENUHAN LAPORAN BERKALA**				
24.	Target ketepatan pemenuhan laporan berkala tidak tercapai	Mutasi/Promosi karyawan yang menyebabkan banyaknya admin Portal BUMN yang baru dan belum berpengalaman (Admin Portal BUMN meliputi : 1. Portal FIS (Financial Information System) 5 orang 2. Portal Publik, Formasi 3 orang, eksisting 1 orang 3. Portal SDM 2 orang 4. Portal Aset, Formasi 5 orang, eksisting 2 orang 5. Portal PKBL 1 orang (belum mengikuti Kursus)	16	Ekstrim	Evaluasi pengisian Portal BUMN; Revisi SK Penunjukan Tim Pengelola Portal BUMN; Pelatihan pengisian Portal.
	Periodic reports submission is below the target	Employee mutations/ promotions that cause many new and inexperienced BUMN Portal admins (BUMN Portal Admin includes: 1. Portal FIS (Financial Information System) 5 people 2. Public Portal, Formation of 3 people, existing 1 person 3. HR portal 2 people 4. Asset Portal, Formation of 5 people, existing 2 people 5. PKBL portal 1 person (not yet following the course)	16	Extreme	Evaluation of BUMN Portal completion; Revision of Decree on Appointment of BUMN Portal Management Team; Training on the Portal completion.

PROFIL RISIKO KORPORAT
Corporate Risk Profile

	Uraian Risiko Risk Profile	Penyebab Cause	Score Score	Level Level	Mitigasi Mitigation
X.	**EMPLOYEE SATISFACTION INDEX (ESI)**				
25.	Target Employee Satisfaction Index (ESI) tidak tercapai	Kondisi keuangan perusahaan menyebabkan bonus dan apresiasi kinerja tidak dapat dibayarkan; Kenaikan gaji dalam 4 tahun terakhir belum dilakukan.	15	Tinggi	Pengawalan pembayaran apresiasi kinerja triwulan IV tahun 2017 agar tepat waktu; Perhitungan bonus disesuaikan dengan hasil audit KAP; Perhitungan kenaikan gaji karena kenaikan UMR.
	Employee Satisfaction Index (ESI) is below the target	The company's financial condition causes performance bonuses and appreciation not to be paid; The salary appraisal has not bee made within the last 4 years	15	High	Safeguard payment of performance appreciation for quarter IV of 2017 to be on time; The bonus calculation is adjusted to the results of the KAP audit; Calculation of salary increases due to increase in UMR
XI.	**COMPETENCY LEVEL INDEX (CLI)**				
26	Competency Level Index (CLI) tidak tercapai	Kompetensi SDM yang masih rendah karena kurangnya program pengembangan karyawan akibat adanya CRP.	12	Tinggi	Pengembangan program karyawan yang fokus pada peningkatan gap kompetensi; Pelaksanaan coaching minimal setiap semester.
	Level Index (CLI) is below the Target	HR competencies are still low due to the lack of employee development programs due to the CRP	12	High	Employee program development that focuses on increasing competency gaps; Implementation of minimum coaching every semester
XII.	**PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA/ LABOR PRODUCTIVITY**				
27.	Target Produktivitas Tenaga Kerja tidak tercapai	Pendapatan perusahaan rendah dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja.	16	Ekstrim	Pengembangan program karyawan yang fokus pada peningkatan gap kompetensi; Pelaksanaan coaching minimal setiap semester.
	Manpower productivity is below the target	The company's income is low compared to the number of employees.	16	Extreme	Employee program development that focuses on increasing competency gaps; Implementation of minimum coaching every semester
XIII.	**LABA USAHA/OPERATING PROFIT**				
28.	Target pencapaian laba bersih perusahaan tidak tercapai	Pendapatan pada portofolio produk utama tidak tercapai.	20	Ekstrim	Pricing Policy; CRM; Promosi; Pengawalan Produksi Kayu Premium; Pengawalan target turnover.
	Net Operating income of the Company is below the target	Revenues from the main product portfolio is below the target	20	Extreme	Pricing Policy; CRM; Promotion; Maintain the Premium Wood Production; Maintain the turnover target
29		Inefisiensi industri kayu dan non kayu (kapasitas industri tidak tercapai).	16	Ekstrim	Trading bahan baku (sinergi dengan Anak Perusahaan); Pengendalian biaya overhead pabrik; Kerjasama pengolahan dan pemasaran kayu.
		Wood and non-wood industry inefficiency (industry capacity is below the target	16	Extreme	Raw materials trading (synergy with Subsidiaries); Factory overhead control; Cooperation in processing and marketing of wood

PROFIL RISIKO KORPORAT
Corporate Risk Profile

	Uraian Risiko Risk Profile	Penyebab Cause	Score Score	Level Level	Mitigasi Mitigation
30.		Inefisiensi biaya perjalanan dinas, kantor dan rumah tangga.	6	Menegah	Pelaksanaan program CRP pada setiap Satuan Kerja sebagai KPI. Implementation of CRP program in every Work Unit as KPI.
		Business trip, office and internal affairs cost inefficiency	6	Middle	Implementation of CRP program in every Work Unit as KPI.
XIV	**CURRENT RATIO**				
31.	Target pencapain current ratio tidak tercapai Current ratio achievement is below the target	Besarnya piutang usaha yang macet.	16	Ekstrim	Kerjasama dengan JPN; Selektif dalam pemilihan Mitra; Kerjasama dengan Lawyer; Penagihan oleh Tim Piutang.
		High possibility of loss trade receivables	16	Extreme	Cooperaiton with JPN; Selective in Partner Selection; Partnership with Lawyer; Collection by Receivables Team
32.		Penurunan nilai persediaan.	16	Ekstrim	Program WIG dan 4DX (untuk persediaan); Market Driven.
		Increasing inventory values	16	Extreme	WIG and 4DX Program (for inventories); Market Driven
33.		Tingginya hutang lancar.	16	Ekstrim	Pengendalian pendanaan dan pengawalan hasil investasi.
		High current liabilities	16	Extreme	Financing Control and Investment Return Monitoring
XV.	**AVERAGE ASSET to AVERAGE EQUITY**				
34.	Target Average Asset to Average Equity Minimum tidak tercapai Target Average Asset to Average Equity Minimum tidak tercapai	Laba tidak tercapai.	6	Menegah	Operasional excellent bidang pemasaran
		Laba tidak tercapai.	6	Middle	Operasional excellent bidang pemasaran
35.		Belum ada Pedoman baku tentang pengelolaan aset tanaman.	12	Tinggi	Dibuat kebijakan pengelolaan aset tanaman; Penghitungan nilai tanaman sebagai aset; Pembuatan daftar inventarisasi aset tanaman dan bukti pendukung apabila terjadi perubahan aset; Mekanisme monitoring dan evaluasi tanaman sebagai aset.
		Belum ada Pedoman baku tentang pengelolaan aset tanaman.	12	High	Preparation of plantation assets management policy; Calculation of plantation alues as assets; Preparation of list of plantation assets inventory and supporting evidence if there is any changes in assets; Plantation Monitoring and evaluation as assets.

PEMETAAN RISIKO KORPORAT

Untuk memberikan gambaran secara utuh hasil identifikasi risiko korporat maka dilakukan pemetaan risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan risiko tersebut terjadi. Hasil pemetaan risiko sebagai berikut :

CORPORATE RISK MAPPING

To provide complete illustration on the corporate risk identification result, risk mapping based on impact and risk potential is occurred. Result of the risk mapping is as follows:

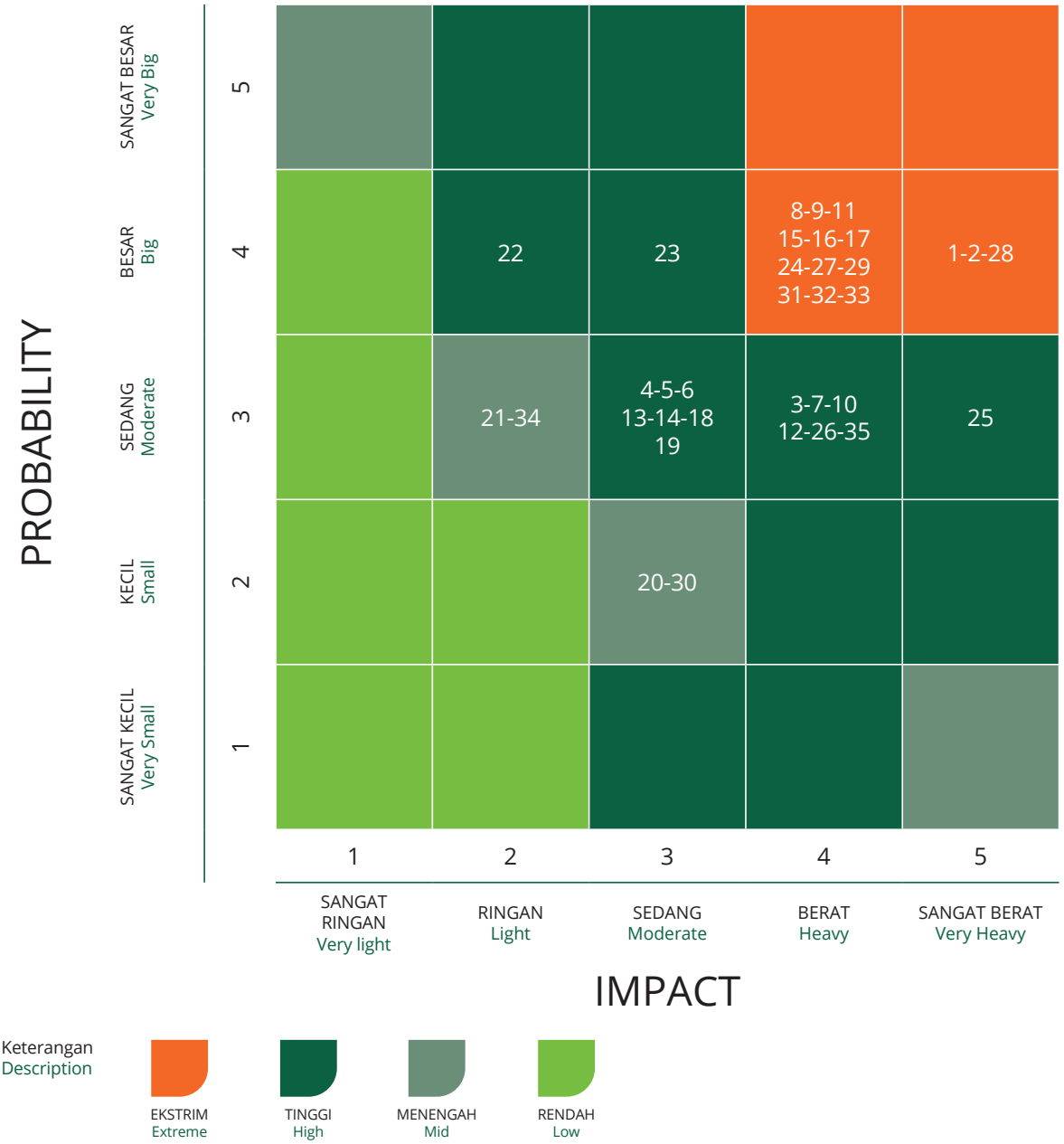

Keterangan
Description

EKSTRIM Extreme
TINGGI High
MENENGAH Mid
RENDAH Low

EVALUASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

Risiko-risiko tersebut di atas akan selalu dimonitor dan dievaluasi dengan memperhatikan dinamika kegiatan usaha dan peraturan-peraturan terkait, termasuk memetakan risiko-risiko yang mungkin belum teridentifikasi.

Melalui penerapan sistem manajemen risiko dalam kegiatan operasional, Perhutani memperoleh keakuratan dalam mengidentifikasi risiko industri, keuangan, serta lainnya. Perhutani juga mampu menjadikan budaya pengelolaan risiko sebagai bagian dari budaya pegawai.

Perhutani meninjau sistem dan kebijakan manajemen risiko secara berkala untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi bisnis dan industri. Dalam menjalankan operasi Perusahaan, risiko-risiko diatur secara hati-hati untuk menghindari potensi kerugian Perhutani. Perhutani juga senantiasa mengingatkan karyawan mengenai kesadaran risiko agar mereka dapat berkontribusi dalam mengelola risiko dan memberikan masukan yang penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, manajemen beserta seluruh karyawan berkomitmen dalam menjalankan pengelolaan risiko di seluruh fungsi dan aktivitas bisnis perusahaan.

Evaluasi implementasi manajemen risiko dilakukan melalui monitoring dan review risiko. Melalui monitoring dan review risiko, diketahui efektivitas dari rencana pengendalian dan rencana pengendalian lainnya yang akan dilakukan pada periode mendatang. Melalui hasil review dan memperhatikan perkembangan bisnis serta kebutuhan bisnis dimasa mendatang. Selama tahun 2020 beberapa kegiatan yang dilaksanakan Divisi Manajemen Risiko sebagai berikut :

EVALUATION OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

The risks mentioned above will always be monitored and evaluated by taking into account the dynamics of business activities and related regulations, including mapping the risks that may not have been identified.

Through the application of a risk management system in operational activities, Perhutani gains accuracy in identifying industrial, financial, and other risks. Perhutani is also able to make risk management culture part of its employee culture.

Perhutani periodically reviews the risk management system and policies to be adjusted to the business and industry conditions. In carrying out the Company's operations, risks are carefully managed to avoid potential losses to Perhutani. Perhutani also constantly reminds employees of risk awareness so that they can contribute in managing risk and provide important input in decision making. Thus, the management and all employees are committed to carrying out risk management in all functions and business activities of the company.

Evaluation of risk management implementation is carried out through risk monitoring and review. Through risk monitoring and review, it is known the effectiveness of the control plan and other control plans that will be carried out in the coming period. Through the results of a review and paying attention to business developments and business needs in the future. During 2020 several activities carried out by the Risk Management Division were as follows:

1. **Penyusunan RKAP Divisi Manajemen Risiko tahun 2021**
   Pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan sebagai pedoman kegiatan dengan mempertimbangkan seberapa besar tingkat pencapaian target perusahaaan dan efisiensi anggaran biaya yang ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan.
2. **Penyusunan Profil Risiko Korporat tahun 2020**
   Pembahasan dan penyusunan profil risiko korporat dilakukan bersama dengan Divisi terkait yang ada di Kantor Pusat dengan target pencapaian RKAP dan KPI tahun 2020. Selama proses penyusunan profil risiko korporat juga ditetapkan risk appetite (target yang diinginkan Direksi) dan risk tolerance (toleransi target yang masih diperbolehkan).
3. **Penyusunan Kajian Manajemen Risiko Proyek/Insidentil :**
   a. Kajian Manajemen Risiko Kerjasama Pengembangan Wana Wisata Menoreh antara Perum Perhutani dengan Badan Otorita Borobudur (BOB) di KPH Kedu Selatan Divisi Regional Jawa Tengah (Januari).
   b. Kajian Manajemen Risiko Rencana Kerjasama Retail Indomaret di Kantor Asper Ambulu KPH Jember Divisi Regional Jawa Timur (Januari).
   c. Kajian Manajemen Risiko Rencana Retail Indomaret di Rumah Dinas Asper Lembang KPH Bandung Utara Divisi Regional Jawa Barat & Banten (Januari).
   d. Kajian Manajemen Risiko Rencana Perpanjangan Optimalisasi Aset Tanah & Bangunan di Kelurahan Pekauman KPH Kendal Divisi Regional Jawa Tengah (Januari).
   e. Kajian Manajemen Risiko Penunjukan

1. **Preparation of the RKAP of the Risk Management Division in 2021**
   Discussion and preparation of the Company's Budget Work Plan as a guideline for activities by considering the level of achievement of the company's targets and the efficiency of the budget set to achieve company goals.
2. **Preparation of the 2020 Corporate Risk Profile**
   The discussion and preparation of the corporate risk profile is carried out together with the relevant Divisions at the Head Office with the target of achieving the 2020 RKAP and KPI. During the process of compiling the corporate risk profile, risk appetite (target desired by the Board of Directors) and risk tolerance (tolerance targets are still allowed).
3. **Preparation of Project/Incidental Risk Management Study:**
   a. Risk Management Study on Cooperation in the Development of Menoreh Tourism Area between Perum Perhutani and the Borobudur Authority Agency (BOB) at KPH Kedu Selatan, Central Java Regional Division (January).
   b. Risk Management Study on Indomaret Retail Cooperation Plan at Asper Ambulu KPH Jember Regional Division East Java Office (January).
   c. Risk Management Study on Indomaret Retail Plan at Asper Lembang KPH North Bandung Regional Division West Java & Banten (January).
   d. Risk Management Study on the Extension Plan for Optimization of Land & Building Assets in the Pekauman Village, KPH Kendal, Central Java Regional Division (January).
   e. Risk Management Study Direct

Langsung Jasa Konsultansi Program Kajian Bisnis, Restrukturisasi Hutang Anak Perusahaan dan Implementasi Hasil Kajian Konsolidasi Anak Perusahaan Perum Perhutani (Januari).

f. Kajian Manajemen Risiko Pembatasan Sosial Berskala Besar DKI Akibat Wabah Covid-19 (April).
g. Kajian Manajemen Risiko Pengajuan Fasilitas Standby Loan untuk Menjamin Stabilitas Cashflow sebagai Dampak Covid-19 (Mei).
h. Kajian Manajemen Risiko Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Tanaman Padi dan Jagung antara Perhutani dengan PT Chita Agri Indonesia di KPH Indramayu dan KPH Majalengka Divisi Regional Jawa Barat dan Banten (Mei).
i. Kajian Manajemen Risiko Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) Kerjasama Perhutani dengan BPDASHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Mei).
j. Kajian Manajemen Risiko Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Penataan Lahan Melalui Mekanisme Kerjasama antara Perum Perhutani dengan PT Trans Marga Jateng di KPH Semarang Divisi Regional Jawa Tengah (Juli).
k. Kajian Manajemen Risiko Rencana Kerjamasa Biomassa – (KSO) Hulu antara Perum Perhutani dengan PT Kaliandra Merah Nusantara (KMN) (September).
l. Kajian Manajemen Risiko Pengadaan Pekerjaan Fitting Out Interior dan Furniture Gedung Kantor Pusat Perhutani Tahap II Tahap 2020.
m. Kajian Manajemen Risiko Pengadaan Jasa Konsultan Pengawalan Implementasi Rebranding Perum Perhutani (November).
n. Kajian Manajemen Risiko Rencana Penghapusbukuan dan

Appointment of Consultancy Services for Business Study Programs, Debt Restructuring of Subsidiaries and Implementation of Consolidated Study Results of Perum Perhutani Subsidiaries (January).

f. Jakarta Capital City's Large-Scale Social Restriction Risk Management Study Due to the Covid-19 Outbreak (April).
g. Risk Management Study on Standby Loan Facility Application to Ensure Cashflow Stability as Impact of Covid-19 (May).
h. Risk Management Study on Cooperation in the Use and Utilization of Forest Areas for Rice and Corn Plants between Perhutani and PT Chita Agri Indonesia at KPH Indramayu and KPH Majalengka Regional Divisions of West Java and Banten (May).
i. Risk Management Study on Protection Forest Rehabilitation (RHL) in collaboration between Perhutani and BPDASHL of the Ministry of Environment and Forestry (May).
j. Risk Management Study on the Use of Forest Areas for Land Planning Activities through a Cooperation Mechanism between Perum Perhutani and PT Trans Marga Jateng at KPH Semarang Regional Division of Central Java (July).
k. Risk Management Study on Upstream Biomass – (KSO) Work Plan between Perum Perhutani and PT Kaliandra Merah Nusantara (KMN) (September).
l. Risk Management Study on Procurement of Interior and Furniture Fitting Out Work for Perhutani Head Office Building Phase II Phase 2020.
m. Risk Management Study on Procurement of Consultant Services for the Implementation of Perum Perhutani's Rebranding Implementation (November).

Pemindahtanganan Aktiva Tetap Perum Perhutani (November).

o. Kajian Manajemen Risiko Rencana Kerjasama Usaha Wana Wisata Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Orchid Forest antara Perum Perhutani dengan PT. Jala Energi (PT JE) di KPH Bandung Utara Divisi Regional Jawa Barat & Banten (November).

p. Rencana Tukar Menukar Aktiva Tetap Tanah DK/Perusahaan di KPH Saradan Divisi Regional Jawa Timur oleh Masyarakat Desa Sugihwaras dan Pajaran (Desember).

q. Rencana Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Cikole antara Perum Perhutani dengan PT. Karya Putra Grafika (PT KPG) di KPH Bandung Utara, Divisi Regional Jawa Barat & Banten (Desember).

r. Rencana Kerjasama Sewa Aset untuk Resto Selasar Trembesi di TPK Madiun KPH Madiun Divisi Regional Jawa Timur (Desember).

s. Rencana Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset (Sarpra) Perum Perhutani yang Berada di Area Jateng Valley Penggaron, Semarang (Desember).

t. Rencana Penghapusbukuan Aktiva Tepat (Bangunan) Los TPK Saradan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur (Desember)

4. Penyusunan Kajian Ekonomis :

a. Kajian Ekonomis Terkait Usul Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Tanah Perusahaan yang Terkena Proyek Fly Over Ganefo di Brumbung Desa Mranggen Kabupaten Demak Jawa Tengah (Januari).

n. Study of Risk Management Plan for Write-off and Transfer of Fixed Assets of Perum Perhutani (November).

o. Study of Risk Management Plan for Business Cooperation of Wana Wisata for Utilization of Environmental Services for Orchid Forest Tourism between Perum Perhutani and PT. Jala Energi (PT JE) at KPH North Bandung West Java & Banten Regional Division (November).

p. Plan for Exchange of Fixed Assets of DK/Company Land in KPH Sara and East Java Regional Division by the Village Community of Sugihwaras and Pajajaran (December).

q. Cooperation Plan for Utilization of Cikole Tourism Environmental Services between Perum Perhutani and PT. Karya Putra Graphic (PT KPG) at KPH North Bandung, West Java & Banten Regional Division (December).

r. Asset Rental Cooperation Plan for the Trembesi Selasar Restaurant at TPK Madiun KPH Madiun East Java Regional Division (December).

s. Plan for Write-Off and Asset Transfer (Sarpra) Perum Perhutani Located in the Central Java Valley Area Penggaron, Semarang (December).

t. Plan for Write-off of Exact Assets (Buildings) Los TPK Saradan Perum Perhutani East Java Regional Division (December)

4. Preparation of the Economic Study:

a. Economic Study Regarding the Proposal for the Elimination and Transfer of Fixed Assets of the Company's Land Affected by the Ganefo Fly Over Project in Brumbung, Mranggen Village, Demak Regency, Central Java (January).

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO

Untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, Perhutani melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Setiap tahun, Perhutani melakukan pengukuran efektivitas penerapan manajemen risiko melalui *Enterprise Risk Management* (ERM) *Maturity Assessment* dan penilaian implementasi road map. Penilaian terhadap ERM Maturity dilakukan terhadap enam pilar utama, yaitu Kebijakan dan Strategi, Kepemimpinan, Sumber Daya Manusia, Stakeholders, Proses Bisnis dan Penanganan Risiko, dan Hasil.

Implementasi ERM terintegrasi dengan strategi perusahaan yang dimiliki oleh Perhutani. Sehingga setiap pengambilan keputusan Perhutani telah mempertimbangkan risiko dalam bisnis. Implementasi tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga tindakan mitigasi terhadap risiko tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sebagai upaya untuk menjaga pencapaian sasaran yang diharapkan oleh Perhutani.

Hasil dari penilaian tingkat maturitas tersebut akan dijadikan salah satu acuan dalam menyusun program kerja implementasi manajemen risiko di Perhutani. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat perbaikan dalam efektivitas manajemen risiko.

EVALUATION OF RISK MANAGEMENT EFFECTIVENESS

To improve the effectiveness of risk management, Perhutani makes continuous improvements. Every year, Perhutani measures the effectiveness of risk management implementation through the Enterprise Risk Management (ERM) Maturity Assessment and road map implementation assessment. Assessment of ERM Maturity is carried out on six main pillars, namely Policy and Strategy, Leadership, Human Resources, Stakeholders, Business Process and Risk Management, and Results.

ERM implementation is integrated with Perhutani's corporate strategy. So that every decision made by Perhutani has considered the risks in the business. The implementation is carried out with the aim of providing an overview of the risks that may occur so that mitigation actions against these risks can be carried out properly as an effort to maintain the achievement of the targets expected by Perhutani.

The results of the maturity level assessment will be used as a reference in preparing a work program for implementing risk management in Perhutani. This is intended so that there is an improvement in the effectiveness of risk management.

Akses Informasi Perusahaan

Corporate Information Access

Dalam rangka memudahkan komunikasi dan akses para pemangku kepentingan termasuk informasi terbaru mengenai laporan kondisi keuangan, non keuangan, dan data perusahaan lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban transparansi serta akuntabilitas perusahaan, Perhutani senantiasa melakukan pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi.

In order to facilitate communication and access to stakeholders, including the latest information regarding reports on financial, non-financial conditions, and other company data related to accountability for transparency and corporate accountability, Perhutani continues to update the facilities and infrastructure to support the delivery of information.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PERUSAHAAN

Kebijakan komunikasi Perhutani mengatur mengatur mengenai Komunikasi Keluar Perusahaan. Kebijakan ini mencakup antara lain ketentuan yang mengatur peran dan tanggung jawab beberapa organ perusahaan (Ketua Dewan Pengawas Direktur Utama, Direktur Keuangan, Investor Relation, dan Sekretaris Perusahaan) terkait pengelolaan informasi Perusahaan.

WEBSITE KORPORAT

Sebagai sarana stakeholder untuk mengakses informasi dan data perusahaan, Perum Perhutani mengelola website korporat, yaitu: website korporat www.perhutani.co.id dan website Majalah Duta Rimba online. Hal tersebut agar majalah internal dapat diakses sebagai informasi publik secara luas.

CORPORATE INFORMATION MANAGEMENT POLICY

Perhutani's communication policy regulates the External Corporate Communication. This policy includes, among others, regulating role and responsibility of some company's organs (Chairman of Supervisory Board, President Director, Investor Relation and Corporate Secretary) related to corporate information management.

CORPORATE WEBSITE

As a channel for the stakeholders to access company information and data, Perum Perhutani manages corporate websites, which is the corporate website www.perhutani.co.id and online Duta Rimba Magazine website. This aims to ensure that the internal magazines is accessible broadly as public information.

Pada website perusahaan ini dipublikasikan tentang profil perusahaan, produk-produk yang dihasilkan, tanggungjawab sosial, laporan perusahaan, berita-berita terbaru mengenai perusahaan, alamat kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi perusahaan dan satuan-satuan kerjanya. Informasi yang sama juga bisa diperoleh dari Portal BUMN : http://www.bumn. go.id/perhutani.

The official website presents about company profiles, products, social responsibility, company reports, latest news about the company, contact addresses that are available to contact the company and its work units. Similar information can also be obtained from the BUMN Portal: http://www.bumn.go.id/perhutani.

Sampai dengan tahun 2020 telah diposting sebanyak 2.392 *posting* pada rubrik Suara Rimba, 31 *posting Press Release* dan 4.341 *posting* berita positif perusahaan yang diperoleh dari berbagai sumber media, baik media online maupun media cetak. Serta *posting* berita pada Portal BUMN sebanyak 1.152 berita.

As of 2020, 2,392 posts have been posted in the Suara Rimba rubric, 31 Press Release posts and 4,341 positive company news posts obtained from various media sources, both online and print media. As well as posting news on the BUMN Portal as many as 1,152 news.

Tone pemberitaan Perum Perhutani dari media massa menunjukkan 4.341 berita positif (87%), 506 berita netral (10%) dan 155 berita negatif (3%). Media yang paling aktif memberitakan isu terkait Perum Perhutani sampai Triwulan III tahun 2020 adalah jawapos.com, Tribun Jabar dan koran Tempo.

Perum Perhutani's tone of news from the mass media showed 4,341 positive news (87%), 506 neutral news (10%) and 155 negative news (3%). The media that were most active in reporting issues related to Perum Perhutani until the third quarter of 2020 were Jawapos.com, Tribun Jabar and the Tempo newspaper.

AKSES INFORMASI

Penyampaian informasi seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan dan investor disediakan melalui situs di www.perhutani.co.id. Informasi yang sama juga bisa diperoleh dari Portal BUMN http://www.bumn.go.id/perhutani serta majalah internal perusahaan DUTA RIMBA yang diterbitkan dua bulan sekali dan dapat diakses secara digital di situs web dan aplikasi HIGO. Perhutani juga memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan, yaitu:

Facebook Fan Page	: Perum Perhutani
Twitter	: @PerumPerhutani
Instagram	: Perum Perhutani
Youtube	: Perum Perhutani

ACCESS INFORMATION

The widest possible distribution of information for stakeholders and investors is provided through the website at www.perhutani.co.id. The same information can also be obtained from the BUMN Portal http://www.bumn.go.id/perhutani as well as the company's internal magazine DUTA RIMBA which is published every two months and can be accessed digitally on the HIGO website and application. Perhutani also utilizes social media to interact with stakeholders, namely:

Facebook Fan Page	: Perum Perhutani
Twitter	: @PerumPerhutani
Instagram	: Perum Perhutani
Youtube	: Perum Perhutani

Untuk interaksi dengan stakeholders, Perum Perhutani juga memanfaatkan sosial media yaitu: facebook di www.facebook.com/perumperhutani, twitter dan instagram di @perumperhutani. Sampai dengan tahun 2020 halaman Facebook Perhutani dengan followers sebanyak 10.807. Sedangkan akun twitter dengan followers 4.555 dan akun instagram dengan followers 24.757.

Pengelolaan Inhouse Magazine

Majalah Duta Rimba sebagai majalah resmi (inhouse magazine) yang diterbitkan oleh Perum Perhutani merupakan sarana publikasi program-program, kebijakan perusahaan, promosi produk, dan penyebarluasan informasi antara Perhutani dengan stakeholder.

Kontak Informasi

Perhutani menyediakan ruang layanan informasi publik di Kantor Pusat selain menyediakan saluran E-mail humas@perhutani.co.id serta layanan informasi publik melalui situs web www. perhutani.co.id untuk mengakomodir kebutuhan para pemangku kepentingan akan informasi perusahaan. Demikian juga untuk pelanggan perusahaan, Perhutani membuka *Call Center* 1500-235.

Annual Report

Annual Report disusun setiap tahunnya yang memaparkan ringkasan kinerja Perusahaan baik keuangan maupun operasional, Profil Perusahaan dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan termasuk Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Annual Report ini akan disampaikan kepada Pemilik Modal, regulator, organisasi massa, media massa dan masyarakat.

Forum Komunikasi Internal

Sarana komunikasi bagi pegawai dengan manajemen yang secara berkala dilakukan baik korporasi maupun per masing-masing unit kerja

For interaction with stakeholders, Perum Perhutani also uses social media, namely: Facebook at www.facebook.com/perumperhutani, Twitter and Instagram at @perumperhutani. Until 2020, Perhutani's Facebook page has 10,807 followers. Meanwhile, a twitter account with 4,555 followers and an Instagram account with 24,757 followers.

Inhouse Magazine Management

Duta Rimba magazine as an official magazine (inhouse magazine) that is published by Perum Perhutani as means of publication for the Company's programs, policies, product promotion and dissemination of information between Perhutani and stakeholders.

Information Contacts

Perhutani provides public information service channel at the Head Office besides providing e-mail channel at humas@perhutani.co.id and public information service via website www. perhutani.co.id to accommodate needs of the stakeholders on the Company's information. Perhutani also provides customer care in form of Call Center 1500-235.

Annual Report

Annual Report is prepared every year that presents summary of the Company's performance both financial and operational performances, Company Profile and Corporate Governance implementation including Corporate Social Responsibility activity. The Annual Report will be delivered to Shareholders, Regulators, Mass Organization and public.

Internal Communication Forum

Communication channel for employees to the management that are regularly carried out both at corporate and individual levels are namely

antara lain melalui family gathering, pertemuan bulanan, *morning briefing*.

Selain melalui saluran-saluran informasi tersebut, Perhutani juga menggunakan media eksternal sebagai upaya untuk memberikan informasi dan data Perhutani ke publik. Selain itu, Perhutani telah melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemilik Modal dan Dewan Pengawas dengan menyampaikan Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Pemilik Modal.

Saluran Permintaan Informasi Langsung

Adapun permintaan komunikasi secara langsung dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan dengan alamat:

Kantor Pusat Perum Perhutani
Graha Perhutani
Jl. TB Simatupang No.22, RT.1/RW.8
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
Tel. (021) 7805730 (hunting)
email : humas@perhutani.co.id
www.perumperhutani.co.id

Perhutani secara umum telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Kebijakan Komunikasi Keluar dan Pedoman Kebijakan Perusahaan. Pada tahun 2020, tidak terjadi kejadian/ kasus atau temuan unit audit internal terkait pelanggaran dalam Kebijakan Komunikasi Keluar atau Pedoman Kebijakan Perusahaan, seperti kebocoran informasi yang bersifat rahasia.

through family gatherings, monthly meetings, morning briefings.

In addition to the information channels, Perhutani also uses external media as an effort to provide Perhutani information and data to the public. In addition, Perhutani has reported relevant information to the Shareholders and the Board of Commissioners by submitting Monthly, Quarterly and Annual Management Reports to the Board of Commissioners before being submitted to the Shareholders.

Direct Inquiry Channel

The request for direct communication can be submitted to the Corporate Secretary at the following address

Perum Perhutani Head Office
Graha Perhutani
Jl. TB Simatupang No.22, RT.1/RW.8
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
Tel. (021) 7805730 (hunting)
email : humas@perhutani.co.id
www.perumperhutani.co.id

In general, Perhutani has followed the procedures set out in the Outgoing Communications Policy and Company Policy Guidelines. In 2020, there were no incidents/cases or findings of the internal audit unit related to violations in the Outgoing Communications Policy or Company Policy Guidelines, such as leakage of confidential information.

Perkara Penting

Litigation

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang terjadi di Perhutani untuk periode Januari – Desember 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Legal Case

Legal cases occured in Perhutani for January – December 2020 period is presented below:

PERMASALAHAN PIDANA YANG TERJADI DI PERHUTANI
Civil Case Occured in Perhutani

Uraian Description		**Satuan** Unit	**Realisasi** Realization
Laporan terjadinya tindak pidana kehutanan	Forestry Crime Report	Laporan / Reports	7.787
Pembuatan Berkas Perkara	Case Files Preparation	Berkas / Files	303
Penyerahan BP ke Jaksa PU	BP Submission to PU Attorney	Berkas / Files	251
Penyerahan BP ke PN	BP Submission to PN	Berkas / Files	207
Putusan PN	PN Verdicts	Berkas / Files	146
Sisa Perkara	Remaining Cases	Berkas / Files	215

PERMASALAHAN HUKUM YANG TERJADI DI PERHUTANI
Civil Case Involving Perhutani

	Perkara/Materi Gugatan Lawsuit Case/Material	**Status Perkara** Case Status	**Pengaruh terhadap Perhutani** Impact to the Company
1.	Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/1998/ PN.Pwk antara Ahli waris Emad Bin Uci dkk sebagai Penggugat melawan Perum Perhutani sebagai Tergugat, objek gugatan klaim tanah kawasan hutan seluas 88,90 ha dan tuntutan ganti rugi tegakan Rp.167.571.437.200.	Tingkat PN Perhutani Kalah; Tingkat Banding (I) Perhutani Menang; Tingkat Kasasi (I) Perhutani Kalah; Tingkat Banding (II) Perhutani Menang; Tingkat Kasasi (II) Perhutani Menang; Tingkat PK Perhutani Kalah; Saat ini Perhutani dalam proses mengajukan PK diatas PK.	Kehilangan Aset dan Kerugian Finansial
	Civil Case Number 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk between the heirs of Emad Bin Uci et al as the Plaintiff against Perum Perhutani as the Defendant, the object of a claim for land claiming a forest area covering an area of 88.90 ha and a claim for compensation for standing timber of Rp.167,571,437,200 .	Perhutani PN Level Loses; Appeal Level (I) Perhutani Wins; Level of Cassation (I) Perhutani Lost; Appeal Level (II) Perhutani Wins; Level of Cassation (II) Perhutani Wins; Perhutani's PK Level Loses; Currently Perhutani is in the process of submitting a PK above the PK.	Loss of Assets and Financial Losses

PERMASALAHAN HUKUM YANG TERJADI DI PERHUTANI
Civil Case Involving Perhutani

	Perkara/Materi Gugatan Lawsuit Case/Material	**Status Perkara** Case Status	**Pengaruh terhadap Perhutani** Impact to the Company
2.	Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Idm, antara Amin Tukirno sebagai Penggugat melawan Perhutani sebagai Tergugat, objek gugatan Wanprestasi atas PKS Optimalisasi asset pemanfaatan tanah eks TPK Haurgeulis, tuntutan ganti rugi Rp.62,9 Miliar	Tingkat PN Perhutani Menang; Tingkat Banding Perhutani Menang; Tingkat Kasasi Perhutani Menang; Tingkat PK Perhutani Menang. (Pengajuan Eksekusi terhadap putusan MA yang menghukum Amin Tukirno sebesar Rp 12.900.000,-)	Kehilangan Lahan dan Kerugian Finansial
	Civil Case Number 15/Pdt.G/2014/PN.Idm, between Amin Tukirno as the Plaintiff against Perhutani as the Defendant, the object of the Default lawsuit on PKS Optimization of assets utilization of the former TPK Haurgeulis land, claims for compensation of Rp.62.9 billion	Perhutani PN Level Wins; Perhutani's Appeal Level Wins; Perhutani's Cassation Level Wins; Perhutani's PK Level Wins. (Submission of Execution of the Supreme Court's decision that sentenced Amin Tukirno to Rp. 12,900,000,-)	Loss of Assets and Financial Losses
3.	Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.Bth/2019/PN.Slw antara Sadirin B Rakhmat, dkk sebagai Pelawan melawan Perhutani sebagai Terlawan I, objek gugatan tanah kawasan hutan seluas ±94Ha.	Dalam proses di PN Slawi	Kehilangan Lahan
	Civil Case Number 48/Pdt.Bth/2019/PN.Slw between Sadirin B Rakhmat, et al as Opponents against Perhutani as Defendant I, the object of a land claim in a forest area of ±94ha.	In progress at Slawi District Court	Loss of Land
4	Perkara Perdata Nomor 154/PDT.G/2020/PN.Smg antara PT Sima Agung sebagai Penggugat melawan Perhutani sebagai Tergugat, mengenai Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Kayu dan Pemasaran Hasil Industri Kayu.	Dalam proses di PN Semarang	Kerugian Finansial
	Civil Case Number 154/PDT.G/2020/PN.Smg between PT Sima Agung as the Plaintiff against Perhutani as the Defendant, regarding Default of the Timber Processing Cooperation Agreement and the Marketing of Timber Industrial Products.	In progress at the Semarang District Court	Loss of Land
5.	Perkara Perdata Nomor 138/Pdt.G/2020/PN.Blt, antara Sugiono sebagai Penggugat melawan Perhutani sebagai Tergugat, Objek gugatan mengenai klaim kayu sono yang berada di Kawasan Hutan di Desa Balerejo BKPH Wlingi – Blitar.	Dalam proses di PN Blitar)	Kehilangan Aset
	Civil Case Number 138/Pdt.G/2020/PN.Blt, between Sugiono as the Plaintiff against Perhutani as the Defendant, The object of the lawsuit regarding the claim of sono wood located in the Forest Area in Balerejo Village BKPH Wlingi – Blitar.	In process at Blitar District Court	Loss of Assets

PERMASALAHAN HUKUM YANG TERJADI DI PERHUTANI
Civil Case Involving Perhutani

	Perkara/Materi Gugatan Lawsuit Case/Material	**Status Perkara** Case Status	**Pengaruh terhadap Perhutani** Impact to the Company
6.	Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/ PN.Bkl di Pengadilan Negeri Bangkalan antara Mohammad Ghufron, Drs. Ec sebagai Penggugat melawan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan dan Perusahaan sebagai Tergugat. Objek gugatan klaim kawasan hutan.	Gugatan dicabut oleh Penggugat	
	Civil Case Number 1/Pdt.G/2020/PN.Bkl at the Bangkalan District Court between Mohammad Ghufron, Drs. Ec as Plaintiff against Perum Perhutani East Java Regional Division, Bureau of Forest Resources Planning and Company as Defendant. The object of the claim for the forest area claim.	Plaintiff withdraws the lawsuit	
7.	Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2020/ PN.Bkl di Pengadilan Negeri Bangkalan antara Mohammad Mahrus, dkk sebagai Para Penggugat melawan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan dan Perusahaan sebagai Tergugat. Objek gugatan klaim kawasan hutan.	Gugatan dicabut oleh Penggugat	Tidak Ada Konsekuensi Hukum Bagi Perhutani
	Civil Case Number 2/Pdt.G/2020/PN.Bkl in the Bangkalan District Court between Mohammad Mahrus, et al as Plaintiffs against Perum Perhutani East Java Regional Division, Bureau of Forest Resource Planning and the Company as Defendants. The object of the claim for the forest area claim.	Plaintiff withdraws the lawsuit	There are no legal consequences for Perhutani
8.	Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Bkl di Pengadilan Negeri Bangkalan antara Lilik Sulistiawati, dkk sebagai Para Penggugat melawan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan dan Perusahaan sebagai Tergugat. Objek gugatan klaim kawasan hutan.	Gugatan dicabut oleh Penggugat	Kehilangan Lahan dan Kerugian
	Civil Case Number 3/Pdt.G/2020/PN.Bkl in Bangkalan District Court between Lilik Sulistiawati, et al as Plaintiffs against Perum Perhutani East Java Regional Division, Bureau of Forest Resource Planning and the Company as Defendants. The object of the claim for the forest area claim.	Plaintiff withdraws the lawsuit	Loss of Land and Losses

PERMASALAHAN HUKUM YANG TERJADI DI PERHUTANI
Civil Case Involving Perhutani

	Perkara/Materi Gugatan Lawsuit Case/Material	**Status Perkara** Case Status	**Pengaruh terhadap Perhutani** Impact to the Company
9.	Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2020/ PN.Blt, antara Supito dkk sebagai Penggugat melawan Perhutani sebagai Tergugat, Objek gugatan mengenai klaim kawasan hutan seluas 987 Ha Desa Tulungrejo – Blitar.	Gugatan dicabut oleh Penggugat	Kehilangan Lahan dan Kerugian Finansial
	Civil Case Number 70/Pdt.G/2020/PN.Blt, between Supito et al as Plaintiffs against Perhutani as Defendants, Object of lawsuit regarding claims of forest area of 987 Ha in Tulungrejo Village – Blitar.	Plaintiff withdraws the lawsuit	Loss of Land and Financial Losses
10.	Perkara Perdata Nomor 97/Pdt.G/2020/ PN.Blt, antara Sugiono sebagai Penggugat melawan Perhutani sebagai Tergugat, Objek gugatan mengenai klaim kayu sono yang berada di Kawasan Hutan di Desa Balerejo BKPH Wlingi – Blitar.	Gugatan dicabut oleh Penggugat	Kerugian Finansial
	Civil Case Number 97/Pdt.G/2020/PN.Blt, between Sugiono as the Plaintiff against Perhutani as the Defendant, the object of the lawsuit regarding the claim of sono wood located in the Forest Area in Balerejo Village BKPH Wlingi – Blitar.	Plaintiff withdraws the lawsuit	Financial Losses
11.	Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2020/ PN.Jmr, antara Untung Suropati bin Arimbi sebagai Penggugat melawan Perum Perhutani sebagai Tergugat, Objek gugatan Tuntutan Ganti Rugi Senilai 1.840.000.000. Penggugat merasa dirugikan karena pernah ditahan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Jember.	(Putusan PN Jember menyatakan Gugatan tidak dapat diterima).	Kehilangan Lahan dan Kerugian Finansial
	Civil Case Number 2/Pdt.G/2020/PN.Jmr, between Untung Suropati bin Arimbi as the Plaintiff against Perum Perhutani as the Defendant, the object of the claim for Compensation in the Value of 1,840,000,000. The Plaintiff felt aggrieved because he had been detained by the Public Prosecutor and Judge of the Jember District Court.	The decision of the Jember District Court stated that the lawsuit was unacceptable	Loss of Land and Financial Losses
12.	Perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2019/ PN.Blt, antara Musatun dkk sebagai Penggugat melawan Perum Perhutani sebagai Tergugat IV, objek gugatan Klaim Kawasan Hutan.	Putusan PN Blitar memenangkan Perhutani. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, sampai dengan 26 Februari 2020 Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding.	
	Civil case Number 89/Pdt.G/2019/PN.Blt, between Musatun et al as Plaintiffs against Perum Perhutani as Defendant IV, the object of a claim for Forest Area Claims.	The Blitar District Court's decision won Perhutani. The decision has permanent legal force, as of February 26, 2020, the Plaintiff has not filed an appeal.	

PERMASALAHAN HUKUM YANG TERJADI DI PERHUTANI
Civil Case Involving Perhutani

	Perkara/Materi Gugatan Lawsuit Case/Material	Status Perkara Case Status	Pengaruh terhadap Perhutani Impact to the Company
13.	Perkara Perdata Nomor 358/Pdt.G/2015/PN.Smg antara Perhutani cq. Kantor Hukum TSA sebagai Penggugat melawan Yudi Iskandar (Direktur CV Fastika Alta) sebagai Tergugat, mengenai wanprestasi terkait utang piutang trading sebesar Rp. 1.295.033.297,5.	Tingkat PN Perhutani menang; Tingkat Banding Perhutani Menang; Tergugat tidak mengajukan Kasasi. (Perhutani dalam proses mengajukan eksekusi)	Pihak Penggugat Tidak Mengajukan Kasasi, Sehingga Tidak Ada Konsekuensi Hukum Bagi Perhutani
	Civil Case Number 358/Pdt.G/2015/PN.Smg between Perhutani cq. TSA Law Office as the Plaintiff against Yudi Iskandar (Director of CV Fastika Alta) as the Defendant, regarding a default related to trading receivables amounting to Rp. 1,295,033,297.5.	Perhutani PN level won; Perhutani's Appeal Level Wins; The Defendant did not file a Cassation. (Perhutani is in the process of applying for execution)	The Plaintiff Did Not File an Cassation, So There Are No Legal Consequences for Perhutani
14.	Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2018/PN.Kpn antara Denan (Adenan) sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Dirjen Kehutanan Cq. Perum Perhutani Unit II Administrasi Kabupaten Malang Cq. BKPH Kepanjen sebagai Para Tergugat. Objek gugatan klaim kawasan hutan dan tuntutan ganti rugi sebesar Rp4 Miliar.	Tingkat PN Perhutani menang; Tingkat Banding Perhutani menang; Tingkat Kasasi Perhutani menang.	
	Civil Case Number 85/Pdt.G/2018/PN.Kpn between Denan (Adenan) as the Plaintiff against the Government of the Republic of Indonesia Cq. Ministry of Environment and Forestry Cq. Director General of Forestry Cq. Perum Perhutani Unit II Administration of Malang Regency Cq. BKPH Kepanjen as Defendants. The object of the claim for forest area claims and claims for compensation amounting to Rp4 billion.	Perhutani PN level won; Appeal level Perhutani won; Perhutani's Cassation Level won.	
15.	Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Skb antara Perhutani sebagai Penggugat dengan Ahli Waris Gatot Achmad Basoeni (Ny Toeti Rahayu dan Gatot Denny Irianto) sebagai Tergugat, objek gugatan Klaim kepemilikan tanah dan bangunan (Guest House) di Jl Teuku Umar No. 50 Bojonegoro.	Tingkat PN Perhutani Kalah; Tingkat Banding Perhutani Kalah; Tingkat Kasasi Perhutani Menang, putusan tanggal 2 Juni 2020	
	Civil Case Number 20/Pdt.G/2017/PN.Skb between Perhutani as Plaintiff and Gatot Achmad Basoeni's heirs (Mrs. Toeti Rahayu and Gatot Denny Irianto) as Defendant, object of claim for land and building ownership (Guest House) on Jl Teuku Omar No. 50 Bojonegoro.	Perhutani PN Level Loses; Perhutani's Appeal Level Lost; Perhutani's Cassation Level Wins, decision dated June 2, 2020	

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

Sampai dengan Desember 2020, terdapat beberapa perkara hukum yang dihadapi anak perusahaan, antara lain:

LITIGATION INVOLVING SUBSIDIARIES

As of December 2020, there were some legal cases involving the subsidiaries, as follows:

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN
Litigation Involving Subsidiaries

Anak Perusahaan Subsidiaries	Jumlah Perkara Pidana Total	Jumlah Perkara Perdata Total
PT Inhutani I	Nihil/ None	Nihil/ None
PT Inhutani II	Nihil/ None	2 (dua/ two)
PT Inhutani III	Nihil/ None	Nihil/ None
PT Inhutani IV	Nihil/ None	Nihil/ None
PT Inhutani V	Nihil/ None	1 (satu/ one)
PT Palawi Risorsis	Nihil/ None	Nihil/ None
PT Perhutani Anugerah Kimia (PT PAK)	Nihil/ None	Nihil/ None
PT Bakti Usaha Menanam Hijau Lestari	Nihil/ None	Nihil/ None

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI DEWAN PENGAWASAN DAN DIREKSI

Pada tahun 2020, tidak terdapat kasus yang dihadapi oleh Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang pada saat ini masih menjabat.

LITIGATION INVOLVING SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS

In 2020, there is no case involving the Supervisory Board and Board of Directors members who are currently serving.

SANKSI ADMINISTRATIF

Pada tahun 2020, tidak terdapat sanksi administrasi yang diberikan kepada Perhutani dari otoritas maupun Pemilik Modal.

ADMINISTRATIVE SANCTION

In 2020, there is no administrative sanction charged to Perhutani from the authority or shareholders.

PENGARUH TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN

Bahwa terhadap perkara hukum yang dihadapi oleh Perusahaan, oleh karena Perusahaan masih melakukan upaya hukum maka perkara hukum tersebut di atas sampai saat ini belum mempengaruhi operasional Perusahaan.

IMPACT ON THE COMPANY'S CONDITION

Regarding the legal cases involving the Company, as the Company is under litigation process, the legal cases mentioned above have not yet affected the Company's operations recently.

Pedoman Etika Perusahaan

Code of Ethics

Sebagai pedoman sikap dan perilaku, Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja mengacu pada praktik industri terbaik dengan memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

As a guide to attitudes and behavior, the Code of Business Ethics and Work Ethics refers to the best industry practices by taking into account compliance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

MUATAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Kebijakan terkait Code of Conduct telah ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi yang ditanda tangani pada tanggal 22 Februari 2016. Secara umum muatan Kode Etik Perusahaan yang dimiliki Perhutani adalah sebagai berikut:

Isi Pedoman Perilaku:

- Bab. I. Pendahuluan
- Bab. II. Etika Bisnis
- Bab. III. Etika Kerja
- Bab. IV. Komitmen terhadap Hal-hal Khusus
- Bab. V. Penegakan Pedoman Perilaku Perusahaan.
- Bab. VI. Penutup

CODE OF CONDUCTS CONTETNS

Policy related to Code of Conduct has been implemented through Supervisory Board and Board of Directors Joint Decree that was signed on February 22, 2016. In general, contents of the Company's Code of Conducts in Perhutani are as follows:

Code of Conducts Contents:

- Chapter. I. Introduction
- Chapter. II. Business Ethics
- Chapter. III. Work Ethics
- Chapter. IV. Commitment on Specific Issues
- Chapter. V. Code of Conducts Enforcement
- Chapter. VI. Closing

KOMITMEN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Sebagai salah satu upaya dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perhutani menerbitkan Pedoman Perilaku/ *Code of Conduct* yang berisi panduan dalam bertindak dan berperilaku dalam pelaksanaan kerja sehari-

SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS COMMITMENT

As an initiative of good corporate governance implementation, Perhutani has issued Code of Conducts that contains guideline to act and behave in daily work implementation. All of the Supervisory Board and Board of Directors have

hari. Seluruh jajaran Dewan Pengawas dan Direksi melakukan penandatanganan Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* sebagai wujud bahwa Dewan Pengawas dan Direksi menerima, memahami dan bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum di dalamnya serta mengesahkan Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* tersebut.

ETIKA BISNIS PERHUTANI

Etika bisnis merupakan sejumlah ketentuan yang menjadi acuan bagi Perhutani maupun individu yang bertidak atas nama Perhutani dalam menjalankan aktifitas bisnisnya yang mengatur hak dan kewajibannya terhadap *stakeholders* dan ketentuan yang berlaku.

Etika bisnis merupakan sikap dasar Perusahaan dalam berhubungan dan melakukan aktivitas bisnis dengan semua *Stakeholders*, yaitu dengan:

a) Mengedepankan Budaya Perusahaan, prinsip-prinsip GCG dan melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip integritas antara lain:
   1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan.
   2. Mengedepankan prinsip itikad baik, tingkat keakuratan tinggi, bersikap independen yang berarti bebas dari pengaruh dan tekanan siapapun.
   3. Melaksanakan seluruh aktivitas bisnis perusahaan dengan penuh kehati-hatian *(Duty of Care and Loyalty)*
   4. Menghindari segala tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
   5. Mengutamakan kepatuhan dan pemahaman

signed Code of Conducts as manifestation that the Supervisory Board and Board of Directors accepted, understood and willign to comply with all regulations as well as ratified the Code of Conduct.

PERHUTANI BUSINES ETHICS

Business ethics is a set of provisions that become guideline for Perhutani and individuals who act on behalf of Perhutani in running the business activities, which regulate their rights and obligations to stakeholders and prevailing provisions.

Business ethics is the basic attitude of the Company in dealing with and conducting business activities with all stakeholders, namely through:

a) Promoting Corporate Culture, GCG principles and fully implementing the principles of integrity include:
   1. Carry out duties and authorities in accordance with Company regulations and legislation.
   2. Promote the principle of good faith, high level of accuracy, being independent which means free from anyone's influence and pressure.
   3. Carry out all the company's business activities with care (Duty of Care and Loyalty)
   4. Avoid all actions, behaviours or actions that can cause conflicts of interest and always prioritize the interests of the Company above personal, family, group or group interests.
   5. Prioritize compliance and understanding of laws and regulations and heeding the

terhadap peraturan perundang-undangan serta mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu dan penting untuk dilakukan *(Duty Abiding the Laws)*.

b) Mengutamakan mutu dan layanan produk dengan tetap melindungi hutan dari praktek bisnis ilegal dan menjaga ekosistem serta lingkungan.
c) Menghargai kinerja dan prestasi karyawan tanpa membeda-bedakan ras, agama, gender maupun status Karyawan.

ETIKA KERJA PERHUTANI

Setiap Insan Perhutani harus menjaga citra dan reputasi Perusahaan guna mendukung kelancaran usaha dan kelangsungan bisnis Perusahaan. Etika kerja Perhutani mengatur hubungan antar individu baik di dalam Perusahaan maupun di luar Perusahaan dalam aktivitas kerja sehari-hari yang diharapkan mampu menjaga citra baik Perhutani. Etika Kerja Perhutani mengatur antara lain:

1. Sikap Dasar Individu
2. Perilaku Individu di Dalam dan di Luar Perusahaan
3. Etika Kerja Jajaran Manajemen dan Karyawan
   a. Perilaku sebagai Atasan Terhadap Bawahan
   b. Perilaku sebagai Bawahan terhadap Atasan
   c. Perilaku sebagai Rekan Kerja

SOSIALISASI *CODE OF CONDUCT*

Perhutani memastikan bahwa setiap Insan Perusahaan mengetahui dan memahami *Code of Conduct* serta peduli terhadap penerapan perilaku yang baik di lingkungan maupun di luar Perusahaan. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi CoC bagi seluruh elemen, mulai dari level operasional sampai kepada top management yang ada di lingkungan Perusahaan.

prevailing norms in society including considering the best practices, which are deemed necessary and important to be done (Duty Abiding the Laws).

b) Prioritize product quality and services while protecting forests from illegal business practices and protecting ecosystems and the environment.
c) Respect employee performance and achievements without discriminating against race, religion, gender or employee status.

PERHUTANI WORK ETHICS

Every Perhutani Personnel shall maintain corporate image and reputation to support smooth and going concern of the Company's business. Perhutani work ethics regulates the cross-individual relationship both inside and outside the Company in daily work activity that is expected to maintain positive image of Perhutani. Perhutani Work Ethics regulates, among others:

1. Basic Individual Attitude
2. Individual Attitude inside and otuside the Company
3. Work Etic for Management and Employees
   a. Attitude from Executive to Subordinate
   b. Attitude as Subordinate to Executive
   c. Attitude as Work Partner

CODE OF CONDUCT SOCIALIZATION

Perhutani ensures that every Company Personnel has acknowledged and understood the Code of Conduct and aware on the implementation of good conducts to the environment and external circumstances the Company. An initiative to achieve this purpose is by conducting CoC socialization for all elements, starting from operational to top management levels in the Company.

Sepanjang tahun 2020, telah dilakukan sosialisasi CoC Perusahaan yang melibatkan segenap karyawan di seluruh jenjang organisasi di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan. Selain itu, sosialisasi CoC termasuk budaya perusahaan dilakukan melalui website Perusahaan yang dapat diakses baik pihak internal maupun eksternal Perhutani. Penyebaran CoC juga dilakuan melalui email oleh Unit Learning Center Perhutani dan Buletin Perhutani.

SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN PERUSAHAAN

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik diberikan untuk mencegah terjadinya prilaku indisipliner dan memberikan efek jera kepada para pelanggar kode etik di lingkungan Perhutani. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik, dikategorikan kedalam 3 (tiga) jenis sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi Ringan, berupa Surat Pernyataan Tidak Puas
2. Sanksi Sedang, berupa Surat Peringatan dan Pemotongan Apresiasi Kerja.
3. Sanksi Berat, berupa Demosi sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN DISIPLIN PERUSAHAAN

Implementasi dan penegakkan CoC Perhutani dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus menerus dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan. Jenjang pelaksanaan dalam penerapan *Code of Conduct* Perhutani dilakukan sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas bertanggung jawab atas dipatuhinya Nilai-nilai Inti dan Komitmen Perhutani yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko;
b. Direksi bertanggung jawab atas penerapan atas nilai-nilai inti dan komitmen Perhutani di lingkungan Perusahaan;

Throughout 2020, socialization of the CoC Company has been conducted involving all employees at all levels of the organization at the Head Office and Representative Office. In addition, CoC socialization including corporate culture is carried out through the Company's website which can be accessed by both internal and external parties of Perhutani. The CoC distribution was also carried out via email as done by the Perhutani Learning Center Unit and Perhutani Bulletin.

COMPANY'S DISCIPLINE VIOLATION PUNISHMENT

Punishment to the code of conducts violation will be administered to prevent the case of non- discipline action and to give deterrent effect to the code of conducts offender in Perhutani circumstances. Punishment on the code of conducts violation is clasified into 3 (three) types of punishments:

1. Low Punishment, in form of Dissatisfaction Statement Letter.
2. Medium Punishment, in form of Warning Letter and Work Benefit Deduction.
3. Heavy Punishment, in form of Demotion up to Employment Termination.

CORPORATE DISCIPLINE IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT

Perhutani CoC implementation and enforcement are done with full of awareness and continuously in form of attitude, actions, commitment and regulations. The Perhutani Code of conduct implementation stage is as follows:

a. Supervisory Board is responsible upon compliance with Core Values and Perhutani's Commitment that is supported by Audit Committee and Risk Management Committee;
b. Board of Directors is responsible upon implementatio of Perhutani's core values and commitment in the Company;

c. Setiap Insan Perhutani menerima dan menandatangani formulir pernyataan kepatuhan terhadap Nilai-nilai Inti dan komitmen GCG dalam *Code of Conduct*. Pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas Perhutani diwajibkan menandatangani pernyataan komitmen kepatuhan terhadap pedoman etika Perusahaan.

c. Every Perhutani's Personnel accepts and signs compliance declaration form on Core Values and GCG Commitment in the Code of Conduct. The employees. Board of Directors and Supervisory Board of Perhtuani are required to sign declaration of compliance statements to the Code of Conducts.

PELANGGARAN *CODE OF CONDUCT* TAHUN 2020

Salah satu upaya Perhutani dalam penegakkan CoC adalah menyediakan fasilitas bagi pengaduan terhadap pelanggaran CoC. Setiap insan Perhutani harus melaporkan setiap penyimpangan terhadap nilai-nilai Inti dan *Code of Conduct* kepada pengelola pelaporan pelanggaran melalui website Perhutani, pelapor diwajibkan untuk memberikan identitas jelas dan identitas pelapor akan dilindungi. Pengelola akan menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajian terhadap laporan tersebut kepada Direksi sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Selama tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran terhadap CoC.

CODE OF CONDUCT VIOLATIONS IN 2020

One of Perhutani's efforts to enforce CoC is to provide facilities for complaints against CoC violations. Every employee of Perhutani must report any deviation from the Core values and Code of Conduct to the manager of reporting violations through the Perhutani website, the reporter is required to provide a clear identity and the identity of the reporter will be protected. The manager will follow up on each report and submit the results of the study on the report to the Board of Directors in accordance with the scope of responsibility. The Board of Directors decides to provide coaching actions, disciplinary sanctions and/or corrective and preventive actions that must be carried out by direct superiors in their respective environments in accordance with the provisions of the Collective Labor Agreement (PKB). During 2020, there were no violations of the CoC.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi diperbaharui dalam Keputusan Direktur Utama No. 1984/KPTS/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan pelaporan, analisis dan tindak lanjut gratifikasi. Selanjutnya Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan bersama-sama dengan Unit Pengendali Gratifikasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan gratifikasi diantaranya

GRATIFICATION CONTROLLING

Gratification Controlling Policy is renewed in President Director Decree No. 1984/KPTS/DIR/2017 concerning Gratification Controlling Guideline. Head of Legal and Compliance Division is appointed as person-in-charge in Gratification reporting, analysis and follow-up management. Next, altogether with the Gratification Controlling Unit, the Head of Legal and Compliance Division are responsible over the gratification management, namely as managed

dikelola dalam program tanggung jawab sosial Praktik Operasi yang Adil.

Selama tahun 2020, tidak terdapat laporan gratifikasi yang dilaporkan oleh pegawai. Hal ini sama jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang nihil laporan.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Proses pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pemenuhan setiap kebutuhan Perhutani dalam menunjang tata kelola dan operasional Perusahaan. Perhutani telah melakukan proses pengadaan secara terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan wajar diantara penyedia barang dan jasa dan memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Perusahaan juga telah memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan oleh unit terkait berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PERHUTANI

Pedoman terkait pengadaan barang dan jasa Perusahaan telah ditetapkan oleh Direktur Utama Perhutani melalui SK Direksi No. 322/KPTS/Dir/2019 yang disahkan pada tanggal 19 Maret 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa sebagai Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Perhutani berupaya mewujudkan kegiatan pengadaan yang efektif, aman, cepat, transparan, efisien dan akuntabel, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Senantiasa tunduk dan patuh terhadap regulasi internal maupun eksternal.
2. Berpedoman terhadap budaya Perusahaan dan Code of Conduct.
3. Menggunakan sistem teknologi informasi.

in Fair Operations Practice social responsibility program.

In 2020, there is no gratification report submitted by the employees. This remains the same with 2019 with zero report.

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

Goods and services procurement becomes initiative to fulfill every needs of Perhutani in supporting the Company's governance and operations. Perhutani has implemented transparent procurement process for the goods and services suppliers who fulfilled the requirements through fair and healthy competition among the goods and services suppliers and fulfill specific requirements based on clear and transparent provisions and procedure. The Company has also formulated Owner Estimate (OE) that is calculated by related unit based on accountable data.

POLICY FOR PROCUREMENT OF PERHUTANI GOODS AND SERVICES

Guidelines related to the procurement of the Company's goods and services have been determined by the President Director of Perhutani through the Decree of the Board of Directors No. 322/KPTS/Dir/2019 which was ratified on March 19, 2019 regarding Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods/Services as Guidelines for Procurement of Goods and Services. Perhutani seeks to realize procurement activities that are effective, safe, fast, transparent, efficient and accountable, by doing the following:

1. Always comply with and comply with internal and external regulations.
2. Guided by the Company's culture and Code of Conduct.
3. Using information technology systems.

Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Perhutani dikategorikan kedalam beberapa metode sebagai berikut:

Methods of Procurement of Goods and Services

The procurement of goods and services carried out by Perhutani is categorized into several methods as follows:

METODE PENGADAAN BARANG DAN JASA
Methods of Procurement of Goods and Services

Mekanisme Mechanism	Defenisi Definition	
Pelelangan Terbatas Limited Auction	Metode Pengadaan melalui pelelangan dengan cara mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon Penyedia yang terdaftar	Procurement method through auction by inviting at least 3 (three) registered Provider candidates
Pelelangan Terbuka Open Auction	Metode Pengadaan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui elektronik (website), papan pengumuman resmi atau jika diperlukan dapat juga melalui media massa, yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa yang memenuhi syarat.	The Procurement method is carried out openly with announcements widely through electronics (websites), official bulletin boards or if necessary can also be through mass media, which can be followed by all providers of goods/services that meet the requirements.
Penunjukan Langsung Direct appointment	Metode Pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk satu atau lebih penyedia yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan.	Methods for the procurement of goods/services by appointing one or more providers who are considered capable of carrying out the work.
Pengadaan Langsung Direct Procurement	Pengadaan barang/jasa secara langsung kepada satu penyedia jasa setinggi-tingginya dengan nilai Rp 30 juta.	Procurement of goods/services directly to one service provider with a maximum value of Rp. 30 million.
Penunjukan Langsung dengan Metode Open Book Direct Appointment with Open Book Method	Metode pemilihan penyedia barang/ jasa yang memperlombakan gagasan/ ide kreativitas, inovasi atau barang/ benda tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.	The method of selecting a provider of goods/services that competes for ideas/ creativity ideas, innovations or certain goods/objects whose prices/costs cannot be determined based on unit prices.

KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2020

Perhutani telah menyelesaikan sejumlah kegiatan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan operasi Perusahaan pada tahun 2020 melalui mekanisme dan metode yang ditetapkan Perusahaan. Nilai pengadaan telah dikalkulasikan oleh unit terkait berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT ACTIVITY IN 2020

Perhutani has completed several procurement activities to fulfll operational needs of the Company in 2020 through the mechanisms and methods established by the Company. The procurement value has been calculated by the related unit based on data that can be accounted for.

PROGRAM BAGI PEMASOK

Pemasok atau vendor merupakan mitra bisnis strategis yang menunjang kegiatan bisnis Perhutani. Oleh karena itu, Perhutani terus berupaya menjaga hubungan yang harmonis kepada para pemasok atau rekanan. Perhutani juga berupaya meningkatkan kualitas kerjasama dan memberikan pemahaman kepada pemasok terkait proses pengadaan yang sesuai dengan kebijakan Perhutani maupun informasi lain yang bermanfaat bagi pemasok. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menciptakan proses pengadaan yang kompetitif, efektif dan efisien.

PROGRAM FOR SUPPLIERS

Suppliers or vendors refer to strategic business partners who support Perhutani's business activities. Therefore, Perhutani continues to strive to maintain harmonious relations with its suppliers or partners. Perhutani also seeks to improve the quality of cooperation and provide understanding to suppliers regarding the procurement process in accordance with Perhutani's policies and other information that is beneficial to suppliers. The activity is expected to be able to create a competitive, effective and efficient procurement process.

SERVEI KEPUASAN PEMASOK

Perhutani mengadakan survei kepada pemasok untuk mengetahui kualitas kerja sama antara Perhutani dengan pemasok dari perspektif pemasok. Perhutani menerima setiap masukan yang membangun dari pemasok untuk perbaikan kualitas pengadaan dan kerja sama di masa yang akan datang.

SUPPLIER SATISFACTION SURVEY

Perhutani has conducted a survey of suppliers to determine the quality of cooperation between Perhutani and suppliers from the supplier's perspective. Perhutani welcomes every constructive input from the supplier to improve the quality of procurement and cooperation in the future.

AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perhutani secara rutin melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas pengelolaannya. Audit pengadaan barang dan jasa dilakukan guna memastikan kegiatan pengadaan Perhutani telah dijalankan sesuai dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dimiliki Perhutani serta untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses pengadaan yang telah dilakukan.

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT AUDIT

Perhutani has regularly performed audits on goods and services procurement implementation activities to improve the quality of its management. The procurement of goods and services audits is carried out to ensure that Perhutani's procurement activities have been carried out in accordance with the policy of procurement of goods and services owned by Perhutani and to determine the effectiveness and efficiency of the procurement process that has been carried out.

Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing System (WBS)

WBS berlaku secara universal dan setara untuk seluruh individu Perhutani, pada seluruh jenjang kepegawaian termasuk Direksi, Dewan Pengawas dan anggota-anggota Komite di bawah Dewan Pengawas, pelaksana sistem pelaporan pelanggaran itu sendiri serta pihak eksternal yang dapat memberikan informasi terkait tindakan pelanggaran yang terjadi.

WBS applies universally and equally to all Perhutani individuals, at all levels of employment including the Board of Directors, the Supervisory Board and members of the Committees under the Supervisory Board, the implementers of the violation reporting system itself as well as external parties who can provide information related to the violations that occurred.

KEBIJAKAN WBS

Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang disahkan Sistem Pengaduan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor: 1075/KPTS/DIR/2015.

Pelaksanaan WBS mengacu pada beberapa peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012;

WBS POLICY

Management of Whistleblowing (Violation Reporting) which is ratified as Whistle Blowing System (WBS) is stipulated under Decree Number: 1075/KPTS/DIR/2015.

The WBS implementation refers to several laws and regulations, including:

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Government Regulation Number 72 of 2010 concerning Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
3. SOE Minister Regulation Number PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as amended by SOE Minister Regulation Number PER-09/MBU/2012;

4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2015 tentang Benturan Kepentingan.

TUJUAN WBS PERHUTANI

Sebagai bagian dari Fraud Control System (FCS) dan termasuk dalam GCG soft structure yang dimiliki Perhutani, Kebijakan WBS memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

a. Sebagai wadah dan panduan untuk penerimaan pelaporan dari berbagai dugaan melanggar hukum & peraturan Perusahaan, benturan kepentingan, kecurangan, korupsi, suap serta pencurian yang terjadi di lingkungan kerja Perusahaan;
b. Membangun sistem penanganan pengaduan yang tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab;
c. Memberi pemahaman yang sama tentang fungsi, peran dan proses-proses Sistem Pelaporan Pelanggaran serta menjamin kesinambungan sistem manajemen meskipun terjadi perubahan organisasi dan rotasi sumber daya manusia dengan menciptakan budaya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance);
d. Menyediakan cara penyampaian yang efektif untuk informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
e. Menciptakan keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, dan kepercayaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran yang efektif;
f. Menyediakan mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran;
g. Menyediakan kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik

4. Minister of BUMN Regulation Number PER-01/MBU/2015 concerning Conflict of Interest.

OBJECTIVES OF PERHUTANI WBS

As part of the Fraud Control System (FCS) and included in the GCG soft structure owned by Perhutani, the WBS Policy has the following objectives::

a. As a forum and guidance for receiving reports of various allegations of violating Company laws & regulations, conflicts of interest, fraud, corruption, bribery and theft that occur in the Company's work environment;
b. Establish a responsive, transparent, safe and responsible complaint handling system;
c. Provide the same understanding concerning the functions, roles and processes of the Whistleblowing System and ensuring the continuity of the management system despite organizational changes and the rotation of human resources by creating a culture of Good Corporate Governance;
d. Provide effective delivery methods for important and critical information for the Company to everyone who shall immediately handle the process securely;
e. Creating a reluctance to commit violations, with increasing willingness to report violations, and trust in an effective Whistleblowing System;
f. Providing an early warning system mechanism for the possibility of a violation;
g. Provide opportunities to deal with violations problems internally first, before expanding into a public violation problem and involving the authorities;

dan melibatkan aparat yang berwenang;

h. Mengurangi risiko yang dihadapi Perusahaan, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;

i. Mengurangi biaya dalam menangani suatu perkara akibat dari terjadinya pelanggaran;

j. Meningkatnya reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator, dan masyarakat umum.

LINGKUP KEBIJAKAN WBS PERHUTANI

Lingkup pengaduan/penyingkapan yang ditindaklanjuti oleh sistem pelaporan pelanggaran antara lain :

1. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Korupsi, kolusi, nepotisme, tindakan kekerasan fisik, pemerasan, pencurian, penyuapan, gratifikasi, pelecehan seksual, penggunaan narkoba, kecurangan, perbuatan tindak pidana kehutanan, perbuatan yang membahayakan keamanan hutan, keselamatan kerja, kesehatan kerja dan keamanan perusahaan & perbuatan tindak pidana lainnya).
2. Pelanggaran etika Perusahaan (Code of Conduct/CoC) atau norma-norma kesopanan, antara lain : benturan kepentingan, insider trading, etika kerja, dan kegiatan politik.
3. Pelanggaran peraturan Perusahaan (Peraturan Kerja Bersama dan Peraturan Disiplin Kepegawaian).

PIHAK PENGELOLA PENGADUAN

WBS Perhutani dikelola oleh Komite Pelaporan Pelanggaran, dengan komposisi sebagai berikut:

h. Reduce the risks encountered by the Company, the consequences of violations in terms of finance, operations, law, work safety, and reputation;

i. Reduce costs in handling a case resulting from a violation;

j. Build the Company's reputation in the eyes of stakeholders (stakeholders), regulators, and the general public;

SCOPE OF PERHUTANI WBS POLICY

The scope of report/disclosures followed up by the violation reporting system include:

1. Violation of laws and regulations (Corruption, collusion, nepotism, acts of physical violence, extortion, theft, bribery, gratification, sexual harassment, drug use, fraud, acts of forestry crime, acts that endanger forest security, work safety, health work and company security & other criminal acts).
2. Violations of interests, insider trading, work ethics, and political activities, Code of Conduct (CoC) or politeness norms.
3. Violations of corporate regulations(Joint Work Rules and Employee Discipline Regulations).

REPORT MANAGERS

WBS in Perhutani is managed by Whistleblowing Committee, with compositions as follows:

KOMITE PELAPORAN PELANGGARAN
Wihistleblowing Committee

Jabatan osotio	Kedudukan dalam Komite Position In The Committee	
Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan	Ketua merangkap Anggota	Chairman and Member
Deputi Direktur PPK Deputi Direktur PPK	Wakil Ketua merangkap Anggota	Vice Chairman and Member
Kepala Biro Pembinaan SDM Kepala Biro Pembinaan SDM	Sekretaris merangkap Anggota	Secretary and Member
Kepala Biro Hukum & Kepatuhan Kepala Biro Hukum & Kepatuhan	Anggota	Member
Kepala Biro Pengawasan SPI Kepala Biro Pengawasan SPI	Anggota	Member
Petugas Khusus Bidang SDM Petugas Khusus Bidang SDM	Administrasi	Administration

Pengelolaan WBS Perhutani diatur dalam sebuah Prosedur Kerja Nomor: PK-SMPHT.15-016 tentang Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengaduan Pelanggaran.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Secara khusus, Perusahaan menyediakan sarana pelaksanaan WBS melalui media resmi https://layanan.perhutani.co.id/wbs. Secara berkala, tim yang ditunjuk memantau dan melakukan tindak lanjut atas pelaporan WBS yang diterima baik melalui email, website www.perhutani.co.id, maupun yang disampaikan secara langsung.

PIHAK YANG DAPAT MELAPOR DAN DILAPORKAN DALAM WBS

Seluruh pemangku kepentingan perusahaan dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi di perusahaan, antara lain: Pelanggan, Vendor/Supplier, Mitra Bisnis, Karyawan/Pegawai, Dewan Pengawas, Direksi dan Pemilik Modal. Sedangkan pihak yang dapat dilaporkan sebagai pelaku pelanggaran adalah Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh pegawai Perusahaan. Sanksi

Pengelolaan WBS Perhutani diatur dalam sebuah Prosedur Kerja Nomor: PK-SMPHT.15-016 tentang Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengaduan Pelanggaran.

VIOLATION REPORT SUBMISION

The Company specifically provides WBS implementation channel through official channel at https://layanan.perhutani.co.id/wbs. The team who is appointed to supervise and perform follow-up of the WBS reporting accepted either via email, website www. perhutani.co.id or direct report submission.

ELIGIBLE WHISTLEBLOWER AND REPORTED PARTY IN WBS

All stakeholders of the Company are eligible to report violations in the Company, such as: Customers, Vendors/Suppliers, Business Partners, Employees, Supervisory Board, Board of Directors and Shareholders. Meanwhile, the party who is considered eligible to be reported are including Supervisory Board, Board of Directors and all employees of the Company.

dapat diberikan kepada pelapor apabila terbukti bahwa laporan yang disampaikan ternyata fitnah dan terbukti bahwa laporan yang disampaikan mempunyai tujuan lain yang menyimpang dari maksud dan tujuan Kebijakan WBS. Sanksi dimaksud mengacu pada ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Punishment can be charge to the whistleblower if the submitted report is proven as slander and the report is proven having another intention tha violate purpose and objectives of WBS Policy. The punisment refers to prevailing law in the Company.

SOSIALISASI WBS

Sosialisasi WBS telah dilakukan dengan metode penyebaran pamflet dan penyebaran informasi yang dimuat dalam Buletin Bulanan yang dibagikan kepada seluruh pegawai serta pada website Perusahaan. Sosialisasi WBS akan terus dilakukan secara berjenjang dan bertahap kepada seluruh stakeholder dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan WBS.

WBS SOCIALIZAITON

WBS socialization has been conducted through leaflet distribution method as well as information dissemination in Monthly Bulletin that is distributed to all employees and also on the Company's website. The WBS socialization will be continuously done in stages and gradually to all stakeholders to improve effectiveness of WBS implementation.

PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN

Perhutani berkomitmen melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan melarang segala bentuk diskriminasi, pelecehan dan/atau pembalasan dendam terhadap para Pelapor atau yang memberikan informasi, membantu dalam penyelidikan atau melanjutkan atau melakukan apapun yang terkait dengan WBS. Setiap Pelapor yang mendapatkan tekanan, ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya dapat mengadukan hal tersebut kepada saluran yang telah disediakan Perusahaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara internal Perusahaan, Pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perusahaan, seperti Mediator, Kepolisian atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan dibiayai Perusahaan.

PROTECTION TO WHISTLEBLOWER

Perhutani is committed to protecting violators who have good intentions and prohibits all forms of discrimination, harassment and/or counter measure against the Whistleblowers or who provide information, assist in investigations or continue or do anything related to the WBS. Every Whistleblower who gets pressure, threats or other retaliation that he experiences can complain about this to the channels provided by the Company. If it cannot be resolved internally, the Whistleblower is guaranteed the rights to proceed to the independent agency outside the Company, such as a Mediator, Police or Witness and Victim Protection Agency (LPSK) that is financed by the Company.

Setiap Pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari Perusahaan berupa:

1. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan, Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk memberikan jaminan

Every Whistleblowers will receive protection from the Company in form of:

1. The identity of the whistleblower is guaranteed by the company, The protection for the whistleblower is intended to guarantee

atas kerahasian identitas pelapor dan perlindungan dari tindakan yang merugikan pelapor. Perlindungan pelapor bertujuan untuk menumbuhkan rasa aman bagi Insan Perhutani dan pelapor lainnya. Kebijakan perlindungan pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap Insan Perhutani dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan atas pelanggaran yang terjadi dilingkup Perhutani.

2. Pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya.
3 Data dan bukti-bukti pengaduan terjaga kerahasiaanya
4. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun
5. Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya.
6. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.
7. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor yang mempunyai itikad baik sebagai berikut :
   - Pemecatan yang tidak adil;
   - Penurunan jabatan atau pangkat;
   - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
   - Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personel file record).

Bagi Pelapor yang terlibat dalam Pelanggaran akan mendapat keringanan sanksi. Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum jika diperlukan, sejalan dengan yang diatur

the confidentiality of the identity of the whistleblower and protection from actions that harm the whistleblower. The protection of the whistleblower aims to foster a sense of security for Perhutani Individuals and other whistleblowers. The whistleblower's protection policy is also intended to encourage every Perhutani employee and other Whistleblowers to dare to report violations occurring in the Perhutani circle.

2. The whistleblower is guaranteed the right to obtain information regarding the follow-up of his report.
3. Data and evidence of complaints are kept confidential
4. The company guarantees the protection of the whistleblower from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the whistleblower maintains the confidentiality of the violations that are reported to any party
5. The whistleblower can complain if he gets a reply in the form of pressure or threat or other retaliation he has experienced.
6. Protection of whistleblowers also applies to the parties who carry out the investigation as well as those who provide information related to the complaint/disclosure.
7. The company provides protection to the whistleblower who has good faith as follows:
   - Unfair dismissal;
   - Decline in rank or rank;
   - Harassment or discrimination in all its forms;
   - Records that are harmful in his personal data file (record file personnel).

Whistleblowers involved in violations will receive sanctions. The company will also provide legal protection if needed, in line with those stipulated in paragraph 43 of Law No. 15 of 2002 jo. UU

pada pasal 43 UU No. 15 tahun 2002 jo. UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13 UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 PP No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

MEKANISME DAN PENANGANAN PELAPORAN

1. Admin WBS menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan pelanggaran, dengan ketentuan:
   a. Apabila pengaduan tidak lengkap, akan dikonfirmasikan kepada Pelapor untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
   b. Apabila dalam jangka waktu 7 hari kalender, Pelapor tidak melengkapi bukti-bukti pengaduan maka pengaduan tidak akan ditindak lanjuti dan dianggap selesai.
   c. Apabila pengaduan lengkap maka pengaduan akan diteruskan ke Komite WBS melalui email yang hanya dapat di akses oleh Komite WBS.

2. Komite WBS menerima laporan dari Admin WBS dan melakukan investigasi awal terhadap Pengaduan. Hasil investigasi atau kajian dan rekomendasi dari Komite WBS dilaporkan kepada Direktur Utama untuk mendapat Keputusan tindak lanjut.

3. Berdasarkan laporan Komite WBS, Direktur Utama menetapkan:
   a. Keputusan apakah akan dilakukan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;
   b. Apabila terdapat bukti yang cukup maka Direktur Utama memutuskan pemberian sanksi sesuai peraturan perusahaan, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk

no. 25 of 2003 concerning Money Laundering and Article 13 of Law No.13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, and Article 5 PP No. 57 of 2003 concerning Procedures for Special Protection for Whistleblowers and Witnesses in Money Laundering Crimes.

REPORTING MECHANISM AND HANDLING

1. WBS Admin receives and verifies whistleblowing system completenes, with terms and conditions:
   a. If the report is incomplete, it will be confirmed to the Whistleblower to be completed within a maximum period of 7 (seven) calendar days from the receipt of the report.
   b. If within 7 calendar days, the Whistleblower does not complete the evidence of the report, the report will not be followed up and considered closed.
   c. If the report is complete, the report will be forwarded to the WBS Committee via email which can only be accessed by the WBS Committee.

2. The WBS Committee receives the reports from the WBS Admin and performs an initial investigation of the Complaints. The results of the investigation or review and recommendations from the WBS Committee are reported to the President Director for a follow-up decision.
3. Based on the WBS Committee report, the President Director will stipulate:
   a. Decision whether to be examined by the Examining Team;
   b. If there is sufficient evidence, the President Director decides to sanction according to company regulations, or is forwarded to the investigator for further

di proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau

c. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup, maka Direktur Utama memutuskan proses pengaduan dinyatakan selesai (closed).

4. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama.

5. Dari laporan Tim Pemeriksa, Direktur Utama menetapkan keputusan tindakan selanjutnya, yaitu:
   a. Apabila pengaduan tidak terbukti maka dinyatakan selesai; atau
   b. Apabila pengaduan terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak aparat penegak hukum untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Seluruh proses investigasi awal maupun pemeriksaan atas pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Komite WBS atau Tim Pemeriksa.

7. Seluruh proses Sistem Pengaduan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan *(accountability)* dengan tata waktu pengelolaan Pengaduan.

processing in accordance with the laws and regulations; or

c. If there is insufficient evidence, the President Director decides that the reporting process is closed.

4. The Examining Team conducts a special examination of complaints and reports the results to the President Director.

5. From the Examining Team report, the President Director determines the decision on further actions, namely:
   a. If the complaint is not proven then it is declared complete; or
   b. If the complaint is proven or requires follow-up, it will be subject to sanctions in accordance with the applicable provisions, or forwarded to the law enforcement authorities for further processing in accordance with the laws and regulations.

6. The overall process of initial investigation and examination of complaints must be made a Minutes signed by all WBS Committees or Examining Team..

7. The entire process of the Whistleblowig System must be well-documented and accountable with the time frame for reporting management

ALUR WHISTLEBLOWING SYSTEM PERHUTANI

PERHUTANI WHISTLEBLOWING SYSTEM

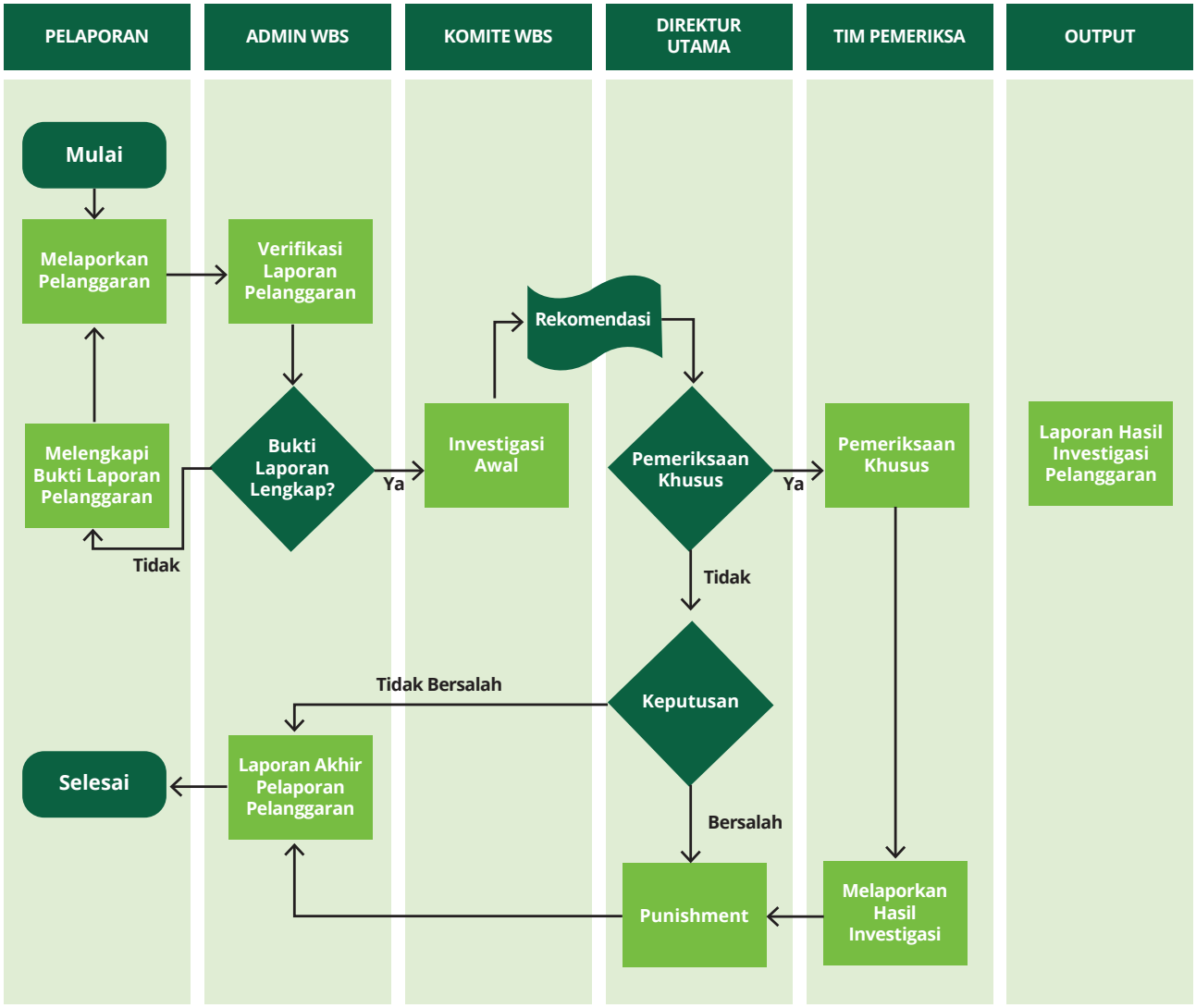

PELAPORAN PELANGGARAN DAN TINDAK LANJUT

Selama tahun 2020 tercatat 24 laporan pengaduan yang masuk ke akun WBS. Laporan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat 19 laporan pengaduan. Kenaikan terjadi karena kesadaran pemangku kepentingan Perhutani untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi.

Dari 24 laporan yang masuk, telah diproses oleh pengelola WBS dan dinyatakan selesai.

VIOLATION REPORTING AND FOLLOW-UP

During 2020 there were 24 complaints reports that entered the WBS account. Reports have increased compared to 2019 which recorded 19 complaints reports. The increase occurred because of the awareness of Perhutani stakeholders to report all forms of irregularities that occurred.

From 24 reports that have been submitted, they have been processed by the WBS manager and declared complete.

Perhutani melalui unit terkait secara aktif merespon dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk guna meminimalisir dampak atau risiko yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut terhadap Perusahaan. Seluruh laporan yang masuk telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Perusahaan. Akan tetapi laporan tidak dapat di proses lebih lanjut karena data yang disampaikan pelapor kurang lengkap. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman pelapor terhadap sistem WBS yang ada, oleh sebab itu perlu bagi Perhutani untuk lebih menguatkan sosialisasi WBS.

Perhutani through the related units actively responds and follows up on every incoming report in order to minimize the impact or risk arising from the violation to the Company. All incoming reports have been followed up entirely by the Company. However, the report cannot be processed further because the data submitted by the reporter is incomplete. This is due to the reporter's lack of understanding of the existing WBS system, therefore it is necessary for Perhutani to further strengthen WBS socialization.

SANKSI BAGI PELANGGAR

Sanksi bagi terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran antara lain berupa teguran, peringatan tertulis, penurunan kelas jabatan, hingga pemecatan. Sanksi bagi pihak lain yang bekerja sama dengan Perhutani antara lain berupa pemutusan kontrak kerjasama. Selama tahun 2020, tidak terdapat sanksi yang diberikan sebagai tindak lanjut atas pelaporan pelanggaran.

SANCTIONS FOR VIOLERS

Sanctions for those who are proven to have committed violations have been stipulated in the Collective Labor Agreement (PKB). Sanctions for employees who are proven to have committed violations include warnings, written warnings, demotion of class positions, to dismissal. Sanctions for other parties who cooperate with Perhutani include termination of the cooperation contract. During 2020, there were no sanctions given as a follow-up to reporting violations.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Perhutani menyadari bahwa kegiatan operasional yang dijalankannya dapat memberikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Hal ini menjadi dasar pelaksanaan program tanggung jawab sosial *(Corporate Social Responsibility)* Perusahaan.

Perhutani realizes that its operational activities can have an economic, social and environmental impact on the community. This is the basis for implementing the Company's Corporate Social Responsibility program.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Komitmen Tanggung Jawab Sosial

Perhutani melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara terpadu yang merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diwujudkan dalam bentuk kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Landasan hukum pelaksanaan program CSR adalah:

1. Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15, 17 & 34.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan & Bina Lingkungan BUMN.
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha

Social Responsibility Commitment

Perhutani implements Social and Environmental Responsibility (CSR) in an integrated manner, which is the company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment for the benefit of the company, the local community and society in general. The implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) is realized in the form of the Partnership and Community Development Program (PKBL).

The legal basis for implementing CSR programs are:

1. Article 74 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and Regulations Government No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility.
2. Law Number 25 of 2007 concerning Investment Articles 15, 17 & 34.
3. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
4. Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 concerning the SOE Partnership & Community Development Program.
5. Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016, concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Programs and Community Development

Milik Negara.

6. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/ MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/ MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Methoda dan lingkup *due diligent* terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan.

Tanggung jawab pengelolaan program kemitraan dan bina lingkungan serta kegiatan CSR di Perhutani dilakukan oleh Unit PKBL yang berada di bawah pengawasan Direksi. Unit PKBL mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menentukan methoda dan lingkup *due diligence* terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Metode dan lingkup *due diligence* terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan mengacu pada peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/ MBU/7/2017 Tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Lingkup kerja Unit PKBL antara lain:

1. Sekurang-kurangnya melakukan fungsi pembinaan (evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, *monitoring*, promosi dan lainnya termasuk fungsi administrasi dan keuangan).
2. Pada kantor pusat dibentuk dengan memerhatikan jumlah dana yang dikelola, luas wilayah binaan dan jumlah mitra binaan serta mempertimbangkan kondisi perusahaan, sedangkan bentuk pelaksanaan di kantor cabang/perwakilan disesuaikan dengan kebutuhan.

Programs for Owned Enterprises Country.

6. Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017, concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Programs and Business Entity Development Programs State Owned.

Methods and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts of the Company's activities

The responsibility for managing partnership programs and environmental development as well as CSR activities in Perhutani is carried out by the PKBL Unit which is under the supervision of the Board of Directors. The PKBL unit has the duty and responsibility to determine the method and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts of the company's activities. The method and scope of due diligence on social, economic and environmental impacts refers to the regulation of the Minister of SOEs Number: PER-02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/ MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises. The scope of work of the PKBL Unit includes:

1. At least to carry out coaching functions (evaluation, distribution, billing, training, monitoring, promotion and others including administrative and financial functions).
2. At the head office, it is established by taking into account the amount of funds managed, the area of the fostered area and the number of fostered partners and taking into account the condition of the company, while the form of implementation at the branch/representative offices is adjusted to the needs.

3. Bertanggungjawab langsung kepada Direksi Perusahaan yang ditetapkan dalam rapat Direksi, sedangkan karyawan yang ditunjuk untuk menangani unit PKBL memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan karyawan lain di BUMN pembina yang bersangkutan.

3. Responsible directly to the Board of Directors of the Company as determined in the meeting of the Board of Directors, while the employee appointed to handle the PKBL unit has the same rights and obligations as other employees in the related BUMN supervisor.

Stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh dan isu-isu penting pada dampak dari kegiatan perusahaan.

Dengan bidang usaha yang langsung berhubungan dengan kepentingan publik, Perhutani menyadari keberhasilan usaha dalam jangka panjang sangat erat kaitannya dengan kemampuan perusahaan dalam berinteraksi dan menyelenggarakan hubungan positif yang memberi mutual benefit dengan para pemangku kepentingan. Interaksi positif dimaksud adalah dipahami dan dipenuhinya harapan pemangku kepentingan melalui pengelolaan seluruh sumber daya secara optimal dan efisien.

Berikut stakeholder penting dan isu-isu penting pada dampak dari kegiatan Perhutani:

Important stakeholders affected or influential and important issues on the impact of the company's activities.

With a business field that is directly related to the public interest, Perhutani realizes that long-term business success is closely related to the company's ability to interact and maintain positive relationships that provide mutual benefits with stakeholders. The positive interaction is the understanding and fulfillment of stakeholder expectations through optimal and efficient management of all resources.

The following are important stakeholders and important issues on the impact of Perhutani's activities:

ISU-ISU PENTING PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERHUTANI
Important Issues on The Impact of Perhutani Activities

Stakeholder	Isu Penting Inportant Issues	Dampak dari Kegiatan Impact on Activity
Pemilik Modal	• Tata kelola perusahaan yang baik • Kepatuhan pada peraturan • Ketersediaan informasi mengenai perusahaan	• Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik • Rapat pembahasan bersama • Penerbitan laporan keuangan tahunan • Penyajian informasi secara berkala melalui *website* perusahaan, media cetak, dan media elektronik
Shareholders	• Good corporate governance • Compliance with regulations • Availability of information about the company	• Implementation of good corporate governance • Joint discussion meeting • Issuance of annual financial reports • Periodic presentation of information through the company's website, print media and electronic media

ISU-ISU PENTING PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERHUTANI
Important Issues on The Impact of Perhutani Activities

Stakeholder	Isu Penting Inportant Issues	Dampak dari Kegiatan Impact on Activity
Karyawan & Serikat Pekerja	• Kepatuhan pada peraturan pemerintah mengenai ketenagakerjaan • Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan • Kesejahteraan karyawan	• Pemenuhan peraturan pemerintah mengenai ketenagakerjaan • Forum *bipartite* dengan serikat pekerja • Program kesejahteraan karyawan • Program kesehatan dan keselamatan kerja • Penilaian kinerja dan perencanaan karir • Penghargaan atas prestasi kerja dan masa kerja
Employees & Unions	• Compliance with government regulations regarding employment • Employee involvement in decision making • Employee welfare	• Compliance with government regulations regarding employment • Bipartite forums with trade unions • Employee welfare program • Occupational health and safety programs • Performance appraisal and career planning • Awards for work performance and years of service
Pelanggan	• Pemenuhan hak pelanggan • Kepuasan pelanggan	• Pemenuhan kewajiban sesuai kontrak • Pengawasan mutu dengan sertifikasi mutu layanan
Customer	• Fulfillment of customer rights • Customer satisfaction	• Fulfillment of obligations under the contract • Quality control with service quality certification
Pemerintah	• Kepatuhan pada undang-undang dan peraturan pemerintah • Ketersediaan informasi yang relevan dengan kepentingan pemerintah	• Pemenuhan undang-undang dan peraturan pemerintah • Penerbitan laporan keuangan tahunan • Dialog dengan pemerintah secara langsung maupun melalui asosiasi • Penyajian informasi secara teratur melalui website perusahaan, media cetak dan media elektronik
Government	• Compliance with government laws and regulations • Availability of information relevant to government interests	• Compliance with government laws and regulations • Issuance of annual financial reports • Dialogue with the government directly or through associations • Regular presentation of information through the company's website, print media and electronic media
Masyarakat	• Peningkatan kesejahteraan melalui kesempatan kerja dan kesempatan menjadi pemasok • Program pengembangan masyarakat • Pelibatan masyarakat • Ketersedian informasi yang relevan dengan kepentingan masyarakat.	• Penyerapan tenaga kerja dari masyarakat • Penyerapan produk (barang dan jasa) dari masyarakat sebagai pemasok • Pelaksanaan program pengembangan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan • Dialog dengan masyarakat secara formal maupun informal.
Society	• Improved welfare through employment and supplier opportunities • Community development programs • Community engagement • Availability of information relevant to the interests of the community	• Absorption of labor from the community • Absorption of products (goods and services) from the community as suppliers • Implementation of community development programs in the fields of economy, education and health • Dialogue with the community, both formally and informally

ISU-ISU PENTING PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERHUTANI
Important Issues on The Impact of Perhutani Activities

Stakeholder	Isu Penting Inportant Issues	Dampak dari Kegiatan Impact on Activity
Lingkungan	Keseimbangan ekosistem melalui pemeliharaan lingkungan, pelestarian alam dan perlindungan keanekaragaman hayati.	• Perolehan peringkat PROPER • Pengelolaan limbah secara baik • Program pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Environment	Ecosystem balance through environmental preservation, nature conservation and biodiversity protection	• Acquired PROPER rating • Good waste management • Environmental and biodiversity conservation programs

1. Memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.
   a. Mempertahankan dan meningkatkan nilai usaha sesuai harapan Pemilik Modal.
   b. Menghormati hak-hak dan tanggung jawab Pemilik Modal sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
   c. Memberikan layanan dengan kualitas yang melebihi harapan pelanggan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan.

2. Akses informasi
   a. Kesetaraan dan perlakuan yang adil.
   b. Tidak berlaku diskriminasi.
   c. Menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

3. Memberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku.
   a. Menjaga hubungan yang harmonis dengan regulator.
   b. Seluruh insan Angkasa Pura II tunduk dan mematuhi hukum dan perundang-undangan, dan peraturan bisnis terkait yang berlaku.

4. Perhutani melaporkan secara rutin kepada pemerintah sebagai regulator.

1. Ensure the company's business continuity in the long term.
   a. Maintain and increase business value according to shareholder expectations.
   b. Respect the rights and responsibilities of shareholders in accordance with the laws and regulations and other applicable provisions.
   c. Provide services of a quality that exceed customer expectations and increase value for customers.

2. Access information
   a. Equality and fair treatment.
   b. No discrimination applies.
   c. Ensure safety, health and safety at work.

3. Provide rights in accordance with applicable regulations.
   a. Maintain a harmonious relationship with regulators.
   b. All personnel of Angkasa Pura II are subject to and comply with applicable laws and regulations, and related business regulations.

4. Perhutani reports regularly to the government as a regulator.

a. Mekanisme pengadaan secara adil dan transparan.
b. Sistem seleksi dan evaluasi secara obyektif dalam pemilihan mitra.
c. Tidak ada pungutan biaya apapun dalam proses pengadaan.

a. Procurement mechanism is fair and transparent.
b. Selection and evaluation system objectively in partner selection.
c. There are no fees in the procurement process.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Kewajiban Maupun yang Melebihi Kewajiban.

Pelaksanaan program kemitraan, program bina lingkungan dan kegiatan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan baik mencakup bidang/sektor usaha, bentuk program bantuan dan wilayah. Lingkup penyaluran program kemintraan mencakup 8 (delapan) bidang/sektor, yaitu:

a. Perdagangan
b. Industri
c. Pertanian
d. Perkebunan
e. Perikanan
f. Peternakan
g. Jasa
h. Lainnya.

Adapun lingkup pelaksanaan program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk bantuan, antara lain:

a. Korban bencana alam
b. Sarana ibadah
c. Sarana pendidikan
d. Sarana kesehatan
e. Sarana umum
f. Pelestarian alam
g. Sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Scope of Social Responsibility Obligations or Exceeding Obligations

Implementation of partnership programs, environmental development programs and CSR activities as a form of corporate social responsibility covering the business sector/sector, the form of the assistance program and the region. The scope of the distribution of the partnership program includes 8 (eight) fields/sectors, namely:

a. Trading
b. Industry
c. Agriculture
d. Plantation
e. Fishery
f. Farm
g. Service
h. Other.

The scope of implementation of the Community Development program is distributed in the form of assistance, including:

a. Victims of natural disasters
b. Means of worship
c. Educational facilities
d. Health facilities
e. Public facilities
f. Nature conservation
g. Social society in the context of alleviation poverty.

Strategi dan Program Kerja Perusahaan dalam Menangani Isu-Isu Sosial

Stategi perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan serta kegiatan

Company Strategy and Work Program in Handling Social Issues

The strategy for planning and implementing partnership and environmental development

CSR Perhutani selalu mempertimbangkan 3 (tiga) prinsip sebagai berikut:

1. ***Proximity***
   Kedekatan program CSR tersebut dengan posisi geografis kegiatan bisnis Perusahaan.
2. ***Relevance***
   Sejauh mana kegiatan CSR tersebut relevan bisnis Perusahaan, meningkatkan *brand awareness* dan sebagai upaya mitigasi risiko Perusahaan terhadap aktivitas bisnisnya yang memberi dampak pada lingkungan dan sosial.
3. ***Magnitude***
   Bagaimana program CSR dapat memberikan efek/dampak yang paling besar kepada *stakeholders* yang terkena dampak program.

Program Tanggung Jawab Sosial

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diwujudkan dalam bentuk kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2017 Tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial

Pengalokasian anggaran program kemitraan dan bina lingkungan serta kegiatan CSR dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan rencana kerja yang disusun setiap tahunnya. Untuk membiayai pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan serta kegiatan

CSR programs as well as Perhutani's CSR activities always considers 3 (three) principles as follows:

1. **Proximity**
   The proximity of the CSR program to the geographical position of the Company's business activities..
2. **Relevance**
   The extent to which CSR activities are relevant to the Company's business, increase brand awareness and as an effort to mitigate the Company's risks to its business activities that have an environmental and social impact.
3. **Magnitude**
   How CSR programs can have the greatest effect/impact on stakeholders affected by the program.

Social Responsibility Program

The implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) is realized in the form of Partnership and Community Development Program (PKBL) activities in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State Owned State-Owned Enterprises Number: PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Programs and State-Owned Enterprises Environmental Development Programs.

Social Responsibility Financing and Budget

The budget allocation for partnership and community development programs as well as CSR activities is budgeted annually in accordance with the work plan that is prepared every year. To finance the implementation of partnership and environmental development programs as

CSR, Perhutani telah menganggarkan sejumlah pendanaan yang berasal dari:

a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan Rapat Pembahasan Bersama ("RPB")
b. Sumber lain yang sah.

well as CSR activities, Perhutani has budgeted a number of funding originating from:

a. Provision for net profit after tax determined by the Joint Discussion Meeting ("RPB")
b. Other legitimate sources.

Metode dan Lingkup *Due Diligent* Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Perhutani memiliki komitmen untuk mengadopsi standar dan prinsip-prinsip internasional dalam upaya menilai risiko dan meningkatkan dampak positif dari kegiatan komersial yang dilakukan terhadap aspek lingkungan, dan pengembangan sosial serta ekonomi. Untuk itu, kebijakan dan kegiatan usaha Perhutani mengacu kepada berbagai sistem manajemen dan standar internasional, yaitu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja OHSAS 18001, dan terakhir Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ISO 26000.

Perhutani memetakan kebutuhan kelompok berdasarkan asas materialitas yang mengacu pada pemangku kepentingan dan mempunyai dampak penting pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam proses penyusunan laporan ini dilaksanakan dengan empat tahapan sebagai berikut:

Due Diligent Method an Scope On Social, Economics and Environment Impact

Perhutani has a commitment to adopt international standards and principles in measuring risks and improving positive impact from the implemented commercial activities on environment, social development and economics aspect. Therefore, policy and business activity of Perhutani refer to several management system and international standers, such as ISO 9010 Quality Management System, ISO 14001 Environment Management System, OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System, and ISO 26000 Corporate Social Responsibility Guideline.

Perhutani has prepared group needs mapping based on materiality aspect referring to the stakeholders with important impact in economics, social and environment aspects. During this report preparation process, four stages have been implemented, as follow:

TAHAPAN LAPORAN
Report Phase

Tahap I Prioritas Phase I Identification	**Tahap II Prioritas** Phase Ii Priority	**Tahap III Validasi** Phase Iii Validasi
Isu yang amat relevan dan memiliki pengaruh terhadap usaha Perhutani dan memiliki dampak signifikan terhadap para pemangku kepentingan. Aspects that are extremly relevant with an advancing influence that generate eminant impact on KPC's business and stakeholders.	Perhutani melakukan pemilahan data dan karakterisasi data, maka didapatlah data dampak sosial. Berdasarkan data dampak sosial maka diperoleh data otentik tentang data aspek sosial dan data potensi dampak pada masyarakat. Perhutani conducts data sorting and data characterization, so that social impact data can be obtained. Based on social impact data, authentic data is obtained about data on social aspects and data on potential impacts on society.	Dari hasil pemilahan dan penilaian berdasarkan persepsi dan dampak terhadap keberlanjutan perusahaan, maka Perhutani membuat program dan anggaran biaya. Based on results of the sorting and assessment based on perceptions and the impact on the company's sustainability, next, Perhutani will create program and a budget.
1. Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat 2. Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundangan yang Berlaku 3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4. Pengelolaan dan Kinerja Lingkungan Isu yang cukup relevan dan memiliki cukup pengaruh terhadap usaha Perhutani dan memiliki dampak signifikan terhadap para pemangku kepentingan. 1. Contributions to the Economic Growth of Community 2. Compliance With Applicable Rules and Regulations 3. Occupational Health and Safety 4. Environmental Management and Performance Aspects that relevant with influence that generate eminant impact on Perhutani's business and stakeholders.	• Data lingkungan mengacu pada ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dokumen AMDAL; • Data kinerja keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan dan Standar Internasional OHSAS 18000; • Data keuangan mengacu pada PSAK; • Data konversi emisi karbon mengacu pada standar konversi CarbonTrust UK. • Environmental data refers to Ministry regulations Environment and Forestry (KLHK) and AMDAL documents; • Occupational safety and health performance data refers to the provisions of the Ministry of Manpower and International Standard OHSAS 18000; • Financial data refers to PSAK; • Carbon emission conversion data refer to UK CarbonTrust conversion standards.	
1. *Resettlement* dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat 2. Infrastruktur Pendukung 3. Rencana Strategis Keberlanjutan 4. Kualitas Produk 5. Program Pemberdayaan Masyarakat 1. Resettlement dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat 2. Infrastruktur Pendukung 3. Rencana Strategis Keberlanjutan 4. Kualitas Produk 5. Program Pemberdayaan Masyarakat		

TAHAPAN LAPORAN
Report Phase

Tahap I Prioritas Phase I Identification	Tahap II Prioritas Phase Ii Priority	Tahap III Validasi Phase Iii Validasi
Isu yang kurang relevan dan memiliki sedikit pengaruh terhadap usaha Perhutani dan memiliki dampak signifikan terhadap para pemangku kepentingan. Aspects that are moderately relevant with an extensive influence that generate less impact on Perhutani's business and stakeholders		
1. Keberlanjutan Tenaga Kerja Pasca Tambang 2. Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan 3. Perlindungan HAM 4. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan 5. Pelibatan Supplier dan Kontraktor Lokal 1. Sustainable Employment Post Mining 2. Marketing and Customer Service 3. Human Rights Protection 4. Employee Training and Development 5. Local Supplier and Contractor Engagement		

Dari metoda ini, Perhutani menerapkan mekanisme penerimaan keluhan dampak sosial terhadap masyarakat sebagai berikut:

From this method, Perhutani implements a mechanism for receiving social impact complaints on the community as follows:

Mekanisme pengaduan memiliki langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, pihak perusahaan mempublikasikan prosedur pengelolaan keluhan untuk masyarakat pada wilayah sekitar perusahaan. Kedua, pihak perusahaan menunjukkan agen lokal untuk menerima, menampung dan mencatat keluhan

Complaints mechanism has the following steps: First, the company publishes complaints management procedures for the community in the Company's operational area. Second, the company shows the local agent to receive, accommodate and record the complaints that are addressed further to the company. Third,

yang kemudian diberikan pada perusahaan. Ketiga, pihak perusahaan dan agen lokal meninjau dan menyelidiki keluhan serta saling memberikan masukan atas berbagai keluhan masyarakat. Keempat, apabila keluhan masyarakat berkaitan dengan dampak yang tergolong berat maka pihak perusahaan bersama agen lokal akan mengembangkan alternatif resolusi penyelesaian dan segera memberi respon penyelesaian secara cepat. Namun apabila, keluhan masyarakat tergolong ringan maka pihak agen lokal yang akan memberikan alternatif resolusi penyelesaian dan respon secara cepat. Kelima, secara periodik sebulan sekali pihak perusahaan melakukan ricek data keluhan pada agen lokal, *monitoring* pelaporan dan mengadakan evaluasi Standar Operasional (SOP) mekanisme keluhan yang telah berlaku. Standar operasional mekanisme keluhan bersifat dinamis yakni apabila ada yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat maka dapat diganti.

the company and local agents review and investigate complaints as well as provide input to various complaints from the public. Fourth, if the complaints from the society are related to a relatively heavy impact, the company and the local agent will develop alternative resolution solutions and immediately respond to the settlement. However, if the complaints from the society are relatively low, the local agency will provide an alternative resolution resolution and quick response. Fifth, once a month the company periodically conducts a complaint data report on local agents, monitors reporting and conducts an operational standard evaluation (SOP) of the complaints mechanism that has been applied. The operational standard of the complaints mechanism is dynamic, namely when any condition is not suitable with the conditions of the community, it can be replaced.

Implementasi penerapan kegiatan *corporate social responsibility* terkait Hak Asasi Manusia Perhutani sudah diterapkan dan dalam perjalannya selalu berusaha mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk saat ini perusahaan masih berupaya untuk mengikuti ketentuan salah satunya ISO 26000.

The implementation of the implementation of Corporate Social Responsibility activities related to Perhutani's Fair Operations has been implemented and in its journey always tries to follow the applicable regulations. For now, the company is still trying to follow the provisions, one of which is ISO 26000.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia

Social Responsibility Related to Human Rights

Rumusan dan Perencanaan HAM

Perhutani mendefinisikan HAM sebagai hak mendasar bagi setiap individu yang terlibat maupun yang terkena dampak dari kegiatan operasi dan usaha yang dilakukan Perusahaan. Komitmen Perhutani untuk menghormati hak asasi manusia diwujudkan dalam Peraturan Perusahaan dan juga standar operasional yang ada seperti Sistem Manajemen, Perilaku Bisnis dan Kode Etik. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perhutani mengadopsi Kebijakan Hak Asasi Manusia yang kemudian dituangkan dalam perencanaan berbagai aktifitas operasional sehingga prinsip-prinsip HAM menjadi pertimbangan Perhutani dan menjadi dasar dari seluruh perencanaan dan pelaksanaan operasional mulai dari aturan hingga tahapan implementasi.

Implementasi penerapan kegiatan *corporate social responsibility* terkait Hak Asasi Manusia Perhutani sudah diterapkan dan dalam perjalannya selalu berusaha mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk saat ini perusahaan masih berupaya untuk mengikuti ketentuan salah satunya ISO 26000.

Perhutani memberian perhatian serius berkaitan dengan dampak aktivitas operasional organisasi pada hak-hak asasi manusia *(due diligence)*. Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional Perusahaan sehari-hari dan dalam interaksi dengan para pemangku

Human Rights Formulation and Planning

Perhutani defines human rights as a fundamental right for every individual involved or affected by the Company's operations and business activities. Perhutani's commitment to respecting human rights is embodied in Company Regulations as well as existing operational standards such as Management System, Business Conduct and Code of Ethics. To realize this commitment, Perhutani adopts a Human Rights Policy which is then outlined in the planning of various operational activities so that human rights principles are considered by Perhutani and become the basis of all operational planning and implementation starting from the rules to the implementation stage.

The implementation of corporate social responsibility activities related to Perhutani's Human Rights has been implemented and in its journey always tries to follow the applicable regulations. For now, the company is still trying to follow the provisions, one of which is ISO 26000.

Perhutani pays serious attention to the impact of the organization's operational activities on human rights (due diligence). Protection of human rights (HAM) is an integral part of the Company's daily operations and in interactions with stakeholders, both in the work environment with Company employees, to our interactions

kepentingan,baik di lingkungan kerja dengan para pegawai Perusahaan, sampai interaksi kami dengan masyarakat sekitar area operasi bandara.

with the community around the airport's operational area.

Komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dilakukan dalam bentuk:

1. Tanggungjawab berkaitan dengan risiko yang mungkin diakibatkan oleh situasi di organisasi terhadap hak asasi manusia.
2. Menyelesaikan keluhan-keluhan pemangku kepentingan berkaitan dengan hak-hak asasi *(resolving grievances)*.
3. Mengantisipasi hal-hal yang bersifar diskriminatif dan penanganan kelompok-kelompok rentan *(discrimination and vulnerable groups)*.
4. Penghormatan terhadap hak-hak sipil dan politik yang dimiliki masing-masing individu *(civil and political rights)*
5. Penghormatan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat *(economic, social and cultural rights)*, dan hak-hak dasar karyawan ketika di tempat kerja *(fundamental rights at work)*
6. Dan lain-lain.

Commitment to the protection of human rights is carried out in the form of:

1. Responsibility relates to the risks that the situation in the organization may pose to human rights.
2. Resolving stakeholder complaints related to human rights (Resolving grievances).
3. Anticipating discriminatory matters and handling vulnerable groups (Discrimination & vulnerable groups).
4. Respect for the civil and political rights of each individual (Civil and political rights)
5. Respect for the economic, social and cultural rights of the community (Economic, social and cultural rights), and the basic rights of employees at work (Fundamental rights at work)
6. And others

Hal-hal tersebut dilakukan untuk menempatkan manusia sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia, Perhutani patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan. Perhutani juga menentang segala diskriminasi dan memegang prinsip kemanusiaan serta menghormati hak asasi manusia dalam pengelolaan sumber daya manusia.

These things are done to place humans in accordance with their rights as whole human beings. In the management of human resource management, Perhutani complies with and complies with the laws and regulations related to manpower. Perhutani also opposes all discrimination and upholds humanitarian principles and respects human rights in the management of human resources.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil

Social Responsibility Regarding Fair Operation

Komitmen dan Kebijakan

Implementasi penerapan kegiatan *corporate social responsibility* terkait Operasi Yang Adil Perhutani sudah diterapkan dan dalam perjalannya selalu berusaha mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk saat ini perusahaan masih berupaya untuk mengikuti ketentuan salah satunya ISO 26000.

Perhutani melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan operasi perusahaan yang adil. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka menjalankan operasi yang adil diantaranya:

1. Dukungan dan tindakan pencegahan korupsi *(Anti- Corruption)* melalui:
   a. Penetapan kebijakan gratifikasi dan anti korupsi,
   b. Sosialisasi dan implementasi GCG, COC, kebijakan gratifikasi dan anti korupsi
   c. Saluran mekanisme pelaporan gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
   d. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menyuarakan budaya anti korupsi.

2. Penghindaran terhadap perilaku pelanggaran hukum, terutama penggunaan pengaruh politik *(responsible political involvement)* Dalam menjalankan usaha, Perhutani mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan sehingga terhindar dari perilaku pelanggaran hukum. Komitmen

Commitments and Policies

The implementation of the implementation of Corporate Social Responsibility activities related to Perhutani's Fair Operations has been implemented and in its journey always tries to follow the applicable regulations. For now, the company is still trying to follow the provisions, one of which is ISO 26000.

Perhutani makes various efforts to realize a fair management of the company's operations. Efforts that have been made to carry out fair operations include:

1. Support and action to prevent corruption (Anti-Corruption) through:
   a. Determination of gratification and anti-corruption policies,
   b. Socialization and implementation of GCG, COC, gratification and anti-corruption policies
   c. Channels of gratification reporting mechanisms and State Administrator Wealth Report (LHKPN)
   d. Take an active role in activities that promote an anti-corruption culture.

2. Avoidance of law-breaking behavior, especially the use of political influence (Responsible political involvement) In running its business, Perhutani complies with the provisions and laws and regulations so as to avoid unlawful behavior. The commitment to this has been stated in the

terhadap hal tersebut diantaranya telah dituangkan dalam pedoman etika (kode etik) terkait aktivitas politik.

ethical guidelines (code of ethics) related to political activities.

3. Berkompetisi dengan pesaing sejara jujur dan adil *(Fair Competition)*, Perhutani berkomitmen menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan. Perhutani menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai budaya dan etika bisnis harus dibangun dan dijalankan dalam menjaga iklim bisnis yang kondusif.

3. Compete with competitors in an honest and fair manner (Fair Competition), Perum Perhutani is committed to creating clean business practices and avoiding all forms of fraud. Perhutani makes healthy business competition a culture and business ethics must be built and implemented in order to maintain a conducive business climate.

4. Mempromosikan program tanggungjawab sosial di wilayah-wilayah yang terkena dampak aktivitas operasi perusahaan *(Promoting social responsibility in the sphere of influence)*.

4. Promoting social responsibility programs in areas affected by the company's operations.

5. Menghormati hak-hak kekayaan seperti hak paten, hak cipta dan lain sebagainya *(Respect for property rights)*.

5. Respect property rights such as patents, copyrights and so on.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat

Corporate Social Responsibility to the Community

Komitmen Perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan melalui berbagai program yang bersifat rutin dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mewujudkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan Perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar maupun di luar wilayah operasional Perusahaan.

The Company's commitment to social and community development is realized through a variety of routine and continuous programs that aim to realize community participation and support for the Company's activities while improving the quality of life of people living in the surrounding environment and outside the Company's operational areas

Kebijakan

Perhutani berkomitmen untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan, mengimplementasikan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Bantuan dana bergulir program kemitraan yang diberikan melalui PKBL diutamakan untuk para wirausaha kecil di sekitar kawasan hutan agar nantinya dapat berkembang menjadi wirausaha berintegritas, tangguh, profesional dan mandiri. Pelaksanaan PKBL di Perhutani mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-02/ MBU/07/2017 tanggal 20 Juli

Policy

Perhutani is committed to providing social and economic benefits to communities around the Company's operational areas, implementing social and environmental responsibility activities covering economic, education, health, infrastructure and environmental aspects, as well as community empowerment.

The partnership program revolving fund assistance provided through PKBL is prioritized for small entrepreneurs around forest areas so that later they can develop into entrepreneurs with integrity, tough, professional and independent. The implementation of PKBL in Perhutani refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-02/MBU/07/2017 dated July

2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil.

Struktur Fungsional

Struktur Fungsional PKBL Perhutani didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No.472/KPTS/DIR/2016 tentang Unit Pelaksana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Perum Perhutani. Struktur fungsional tersebut berada di bawah Divisi Keuangan, dengan susunan sebagai berikut :

Tingkat Direksi: Direktur Utama

- Direktur Utama
- Direktur Keuangan
- Kepala Divisi Keuangan
- Kepala Departemen Akuntansi/Verifikasi PKBL
- Kasi PKBL

Tingkat Divisi Regional

- Kepala Departemen Keuangan
- Kasi PKBL

Tingkat KPH

- Kepala Tata Usaha
- Kepala Seksi PSDH
- Kela Sub Seksi Keuangan & PKBL

Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan

Tata cara penyaluran dana Program Kemitraan diatur sebagai berikut :

- Calon mitra binaan mengajukan proposal permohonan pinjaman.
- Seleksi proposal
- Unit pelaksana selanjutnya melakukan *survey*/cek ke lapangan
- Setelah semua syarat sudah terpenuhi

20, 2017 concerning the second amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Program and Community Development Program for SOE with Small Businesses.

Functional Structure

Structure of Perhutani PKBL Functional refers to the Board of Directors Decree No. 472/KPTS/ DIR/2016 concerning Perum Perhutani Partnership and Community Development Program (PKBL) Implementation Unit. The functional structure is under the Finance Division, with structures, as follows:

Board of Directors level:

- President Director
- Director of Finance
- Head of Finance Division
- Head of Department of Accounting/PKBL Verification
- Kasi PKBL

Regional Division Level

- Head of Finance Department
- Kasi PKBL

FMU level

- Head of Administration
- Head of PSDH Section
- Head of Finance & PKBL Sub-Section

Mechanism of Partnership Program Funds Disbursement

Partnership Program funds disbursement mechanism is regulated as follows:

- Prospective partner submits loans application proposal
- Proposal selection
- Executor unit will next perform field survey/checking to the field.
- After all requirements have been fulfilled,

maka diterbitkan Surat Keputusan dari Unit/ Wilayah setempat tentang persetujuan perolehan pinjaman.

- Berdasarkan Surat Keputusan dari Unit/ Wilayah setempat, maka dalam penyaluran terhadap mitra binaan yang disetujui

Struktur Fungsional PKBL Perhutani

Struktur Fungsional PKBL Perhutani didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No.472/KPTS/ DIR/2016 tentang Unit Pelaksana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Perum Perhutani. Struktur fungsional tersebut berada di bawah Divisi Keuangan, dengan susunan sebagai berikut :

- Tingkat Direksi: Direktur Keuangan
- Tingkat Kantor Divisi Regional: Kepala Biro Keuangan
- Tingkat KPH: Kepala Tata Usaha

Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan

Tata cara penyaluran dana Program Kemitraan diatur sebagai berikut :

1. Calon mitra binaan mengajukan proposal permohonan pinjaman.
2. Seleksi proposal
3. Unit pelaksana selanjutnya melakukan *survey*/cek ke lapangan
4. Setelah semua syarat sudah terpenuhi maka diterbitkan Surat Keputusan dari Unit/ Wilayah setempat tentang persetujuan perolehan pinjaman.
5. Berdasarkan Surat Keputusan dari Unit/ Wilayah setempat, maka dalam penyaluran terhadap mitra binaan yang disetujui Sasaran penyaluran bantuan program Bina Lingkungan Perhutani adalah sebagai berikut:
   - Bantuan korban bencana alam
   - Bantuan pendidikan dan atau pelatihan

Decree from local Unit/Area will be issued concerning the loans application approval

- Pursuant to Decree from the local Unit/ Area, disbursement for the partner who is approved to obtain loans will be governed in an Agreement Letter/Contract as commitment with the partners.

Structure of Perhutani's PKBL Functional Officer

Perhutani's PKBL Functional Structure refers to the Board of Directors Decree No. 472/KPTS/ DIR/2016 concerning the Implementing Unit for the Partnership Program and Community Development Program (PKBL) of Perum Perhutani. The functional structure is under the Finance Division, with the structure, as follows:

- Board of Directors Level: Finance Director
- Regional Division Office Level: Head of
- Finance Bureau
- FMU level: Head of Administration

Mechanism of Partnership Program Fund Distribution

The procedures for distributing Partnership Program funds are as follows:

1. Prospective fostered partners submit a loan application proposal.
2. Selection of proposals
3. Next, the officer unit conducts a survey/ check into the field
4. After all the requirements have been met, a Decree from the local Unit/Territory is issued regarding the approval for the loan.
5. Based on a decree from the local unit/ area, then in distribution to approved foster partners, the targets for distributing the Perhutani's Community Development program assistance are as follows:
   - Donation for natural disasters victims
   - Education and or training aid
   - Health improvement aid

- Bantuan peningkatan kesehatan
- Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum
- Bantuan sarana ibadah
- Bantuan pelestarian alam
- Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan

- Development aid for public infrastructure and facilities
- Religious facilities aid
- Nature conservation aid
- Community social aid in the context of poverty alleviation

Realisasi Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Implementasi kegiatan Program Kemitraan tahun 2020 lebih diarahkan kepada program-program yang menunjang kegiatan pengelolaan SDH sedangkan kegiatan Bina Lingkungan lebih diarahkan pada program-program yang menunjang pembinaan komunikasi perusahaan dengan MDH melalui bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, sarana ibadah, perbaikan sarana prasarana umum, pelestarian alam dan program sosial dalam rangka peningkatan kemiskinan.

Tahun 2020 rencana PKBL Perusahaan yang akan disalurkan sebesar Rp18,48 miliar terdiri dari Dana Program Kemitraan sebesar Rp8,72 miliar dan dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp9,76 miliar. Realisasi penyaluran dana tahun 2020 sebesar Rp20,00 Miliar atau 108,23% dari RKAP tahun 2020 dengan rincian untuk Program Kemitraan sebesar Rp10,21 Miliar dan untuk Bina Lingkungan sebesar Rp9,79 Miliar.

Realization of Partnership and Community Development Program Funds

The implementation of the 2020 Partnership Program activities is more directed at programs that support SDH management activities while Community Development activities are more directed at programs that support the development of corporate communication with MDH through natural disaster assistance, education and training, health improvement, worship facilities, repairs public infrastructure, nature conservation and social programs in the context of increasing poverty.

In 2020, the Company's PKBL plan to be distributed is Rp18.48 billion, consisting of Partnership Program Funds of Rp. 8.72 billion and Community Development Program funds of Rp9.76 billion. Realization of disbursement of funds in 2020 amounted to Rp20.00 billion or 108.23% of the 2020 RKAP with details for the Partnership Program of Rp10.21 billion and for Community Development of Rp9.79 billion.

Implementasi Tanggung Jawab Sosial

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan suatu program kepedulian BUMN terhadap masyarakat dan sekaligus

Implementation of Social Responsibility

Partnership and Community Development Program

The Partnership and Community Development Program (PKBL) is a program of BUMN's concern for the community as well as a tangible

sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial BUMN.

Implementasi kegiatan Program Kemitraan tahun 2020 lebih diarahkan kepada program-program yang menunjang pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) sedangkan kegiatan Bina Lingkungan lebih diarahkan kepada program – program yang menunjang pembinaan komunikasi perusahaan dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) melalui bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, sarana ibadah, perbaikan sarana dan prasarana umum, pelestarian alam dan program sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Agroforestry

Kegiatan Agroforestry Perum Perhutani hampir seluruhnya dikerjasamakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dimana setiap LMDH memiliki anggota yang merupakan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat penggarap tersebut biasa disebut *pesanggem*. Tanaman agro ditanaman dalam kawasan hutan dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara LMDH dengan Administratur selaku pimpinan di Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Perhutani mengelola tanaman agro dengan menggunakan pola tanam Agroforestry, dimana tanaman agro/pertanian ditanam bersamaan dengan tanaman kehutanan. Perhutani mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut. Perhutani mendapatkan bagi hasil dari kegiatan Agroforestry dengan besaran yang bervariatif sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani. Saat ini telah terdata lebih kurang 52 jenis komoditas tanaman pertanian yang diusahakan dengan sumber pendanaan dilakukan secara swadaya oleh pesanggem/anggota LMDH. Rencana dan realisasi pendapatan sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

manifestation of BUMN's social responsibility.

Implementation of the Partnership Program activities in 2020 is more directed to programs that support the management of Forest Resources (SDH) while Community Development activities are more directed to programs that support the development of corporate communication with Forest Village Communities (MDH) through natural disaster assistance, education and training, health improvement, worship facilities, improvement of public facilities and infrastructure, nature conservation and social programs in the context of poverty alleviation.

Agroforestry

Perum Perhutani's agroforestry activities are almost entirely in collaboration with the Forest Village Community Institution (LMDH) where each LMDH has members who are communities around the forest. The cultivating community is usually called Pesanggem. Agro plants are planted in forest areas by making a Cooperation Agreement between LMDH and the Administrator as the leader in the Forest Management Unit.

Perhutani manages agri-crops using the agroforestry cropping pattern, where agro/agricultural crops are planted together with forestry crops. Perhutani gets the results of this collaboration. Perhutani gets profit sharing from Agroforestry activities with varying amounts in accordance with the signed cooperation agreement. Currently, approximately 52 types of agricultural crop commodities have been recorded which are cultivated with funding sources carried out independently by Pesanggem/LMDH members. The plan and realization of income up to 2020 are as follows:

RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2020
Revenue plan and Realization up to 2020

Uraian Description		Satuan Unit	2020
Pendapatan	Revenue	Rp Juta Rp Million	107.754
Komoditas *Non Offtaker*	Non Offtaker Commodities	Rp Juta Rp Million	80.263
Industri Agro	Agroindustry	Rp Juta Rp Million	27.490

Gambaran Manfaat CSR bagi Pemangku Kepentingan

Strategi CSR merupakan pendekatan yang mensinergikan CSR dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan mensinergikan adalah bahwa menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi perusahaan. Dengan menerapkan strategi CSR yang benar maka perusahaan dapat menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merk produk (loyalitas) atau citra perusahaan yang baik. Dengan fokus pada pemberdayaan melalui pendekatan kolaboratif dengan pemerintah

Illustration on CSR Benefits for Stakeholders

CSR strategy refers to an approach that synergizes CSR with overall strategies of the Company. Synergy means to treat CSR as part of the Company's strategy. By implementing correct CSR strategy, the Company will be capable in maintaining and increasing competitiveness through brand reputation and loyalty or good corporate image By focusing on empowerment through collaborative approach with the Government and local community, Perhutani always attempts to purse public

dan masyarakat lokal, Perhutani berupaya terus bagi peningkatan kesejahteraan bersama yang dicapai melalui program-program pemberdayaan ekonomi dengan program pelayanan untuk menutupi kesenjangan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan akses dan kualitas kesehatan masyarakat diperluas area cakupannya di luar kegiatan operasional serta peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk akses air dan sanitasi dasar.

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Keberadaan Perusahaan juga memberikan dampak ekonomi tidak langsung melalui penerimaan tenaga kerja lokal. Melalui proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Dengan pola rekrutmen tersebut, Perhutani turut berkontribusi menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal yang berada di wilayah kerja sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan.

Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi

Dalam rangka penegakan penyelenggaraan Perusahaan yang bersih dan transparan, Perhutani turut berpartisipasi dalam pemberantasan praktik fraud, korupsi, dan pencucian uang. Secara periodik Perusahaan melakukan sosialisasi dan komunikasi pencegahan korupsi sebagai komitmen implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pengendalian Gratifikasi, dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* atau WBS) melalui portal, majalah Perhutani, pengumuman, dan sosialisasi langsung kepada

welfare improvement that will be achieved through economy development programs by providing services to bridge the gap, increase educational access and quality, increase health access and quality, expand scope of area for the society beyond operational activities as well as improve environmental quality, including access to clean water and basic sanitation.

Use of Local Labor

The existence of the Company also has an indirect economic impact through the recruitment of local workers. Through an open recruitment process, the Company provides equal opportunities to the entire community in accordance with predetermined qualifications. With this recruitment pattern, Perhutani also contributes to creating job opportunities for local communities in the work area so that it is expected to be able to reduce the unemployment rate in Indonesia as well as increase the income of the people around the Company's operational areas.

Anti-Corruption Policies and Procedures Communication

In order to enforce clean and transparent corporate governance, Perhutani participates in eradicating fraud, corruption and money laundering practices. The Company periodically disseminates and communicates corruption prevention as a commitment to implementing Good Corporate Governance, Gratification Control, and the Whistleblowing System (WBS) through portals, Perhutani magazines, announcements, and direct socialization to Perhutani personnel. With this socialization, it is hoped that the Company's

Insan Perhutani. Dengan adanya sosialiasi ini diharapkan insan Perusahaan dapat mengetahui lebih dini atas segala tindakan yang bisa mengarah kepada korupsi. Hal ini dikarenakan dengan mengetahui suatu perbuataan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah suatu upaya awal yang dapat dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi.

personnel can find out early on all actions that can lead to corruption. This is because knowing an act that can be categorized as corruption is an initial effort that can be done to prevent anyone from committing corruption.cegah agar seseorang tidak melakukan korupsi.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam pelaksanaannya, kegiatan operasional Perusahaan dapat memberikan dampak positif dan negatif pada kehidupan masyarakat sekitar. Untuk mencegah timbulnya dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, Perhutani telah memenuhi aturan terkait ijin gangguan, AMDAL, dan lain-lain. Selain itu, Perhutani juga telah menyediakan saluran komunikasi yang memiliki prosedur pengelola keluhan yang terkoordinir Departeman Humas Perhutani. Saluran komunikasi tersebut dibuat untuk mengumpulkan, mencatat, dan menangani komentar, keluhan, dan klaim masyarakat yang terkena dampak akibat kegiatan operasional Perusahaan.

Selama tahun 2020, Perhutani tidak menerima pengaduan dari masyarakat sekitar terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan operasional Perusahaan.

Handling Public Complaints

In practice, the Company's operational activities can have a positive and negative impact on the lives of the surrounding community. To prevent negative impacts on the environment and surrounding communities, Perhutani has complied with regulations regarding nuisance permits, AMDAL, and others. In addition, Perhutani has also provided a communication channel that has a complaint management procedure coordinated by the Department of Public Relations of Perhutani. These communication channels are created to collect, record, and handle comments, complaints, and claims of communities affected by the Company's operational activities.

In 2020, Perhutani did not receive any complaints from the surrounding community regarding the negative impacts caused by the Company's operational activities.

Dampak Kegiatan Tanggung Jawab Sosial

Konsistensi Perhutani dalam pelaksanaan program CSR khususnya pada pengembangan sosial kemasyarakatan akan memberikan reputasi yang baik atau good brand image kepada berbagai elemen bisnis. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan Perhutani telah memberikan dampak di beberapa aspek kehidupan warga desa binaan

Impact of Social Responsibility Activities

Perhutani's consistency in implementing CSR programs, especially in social community development, will provide a good reputation or good brand image to various business elements. The Partnership and Community Development Program that has been implemented by Perhutani has had an impact on several aspects of the lives of the assisted villagers. This is

yang telah dibantu. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan Program Kemitraan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha telah berdampak pada pembangunan ekonomi mitra binaan dengan berkembangnya usaha mereka sehingga meningkatkan taraf hidup. Sedangkan program Bina Lingkungan memiliki tujuan untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana disekitar tempat tinggal masyarakat, memberikan pelatihan keterampilan bagi warga disekitar wilayah kerja dan atau memberikan bantuan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Dimana dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan tingkat kualitas hidup masyarakat baik peningkatan lingkungan tempat tinggal dan atau peningkatan individunya.

shown, among other things, by the Partnership Program which is implemented with the aim of developing businesses which has an impact on the economic development of the fostered partners by developing their businesses so as to improve their standard of living. Meanwhile, the Community Development program has the aim of empowering the social conditions of the community through improving facilities and infrastructure around the community's residence, providing skills training for residents around the work area and or providing assistance to support community life. Where from these activities can improve the level of quality of life of the community, both improving the living environment and or increasing the individual.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibility on Environment

Sepanjang tahun 2020, Perhutani mengembangkan serta melanjutkan program pelestarian lingkungan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Melalui pengembangan program ini, diharapkan mampu memberikan nilai lebih pada pelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat sekitar lokasi operasional Perusahaan.

Throughout 2020, Perhutani developed and continued the environmental conservation program that had been carried out in the previous year. Through the development of this program, it is expected to be able to provide added value to the preservation of the environment and the surrounding community, especially the community around the Company's operational locations.

Kebijakan dan Rencana Program

Perhutani menyadari bahwa menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tugas dan tanggung jawab bersama warga dunia, termasuk bagi Perhutani. Sekecil apapun tindakan dan kebijakan yang berdampak positif bagi lingkungan.

Sebagai Perusahaan yang bertanggung jawab, Perhutani memberikan dukungan dan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai kebijakan dan tindakan riil di lapangan. Dengan upaya itu, maka Perhutani ikut berperan untuk mengurangi dampak negatif kerusakan lingkungan bagi manusia, sekaligus bermanfaat bagi generasi mendatang agar bisa menikmati kehidupan yang lebih baik di bumi. Keberlanjutan kehidupan di bumi niscaya akan menjadi berkah pula bagi keberlanjutan Perusahaan.

Policy and Program Plan

Perhutani realizes that preserving the environment is a joint duty and responsibility of the citizens of the world, including for Perhutani. Even the smallest actions and policies will have a positive impact on the environment.

As a responsible company, Perhutani provides support and commitment to preserve the environment through various policies and real actions in the field. With this effort, Perhutani plays a role in reducing the negative impact of environmental damage on humans, as well as benefiting future generations so that they can enjoy a better life on earth. Sustainability of life on earth will undoubtedly be a blessing for the sustainability of the Company.

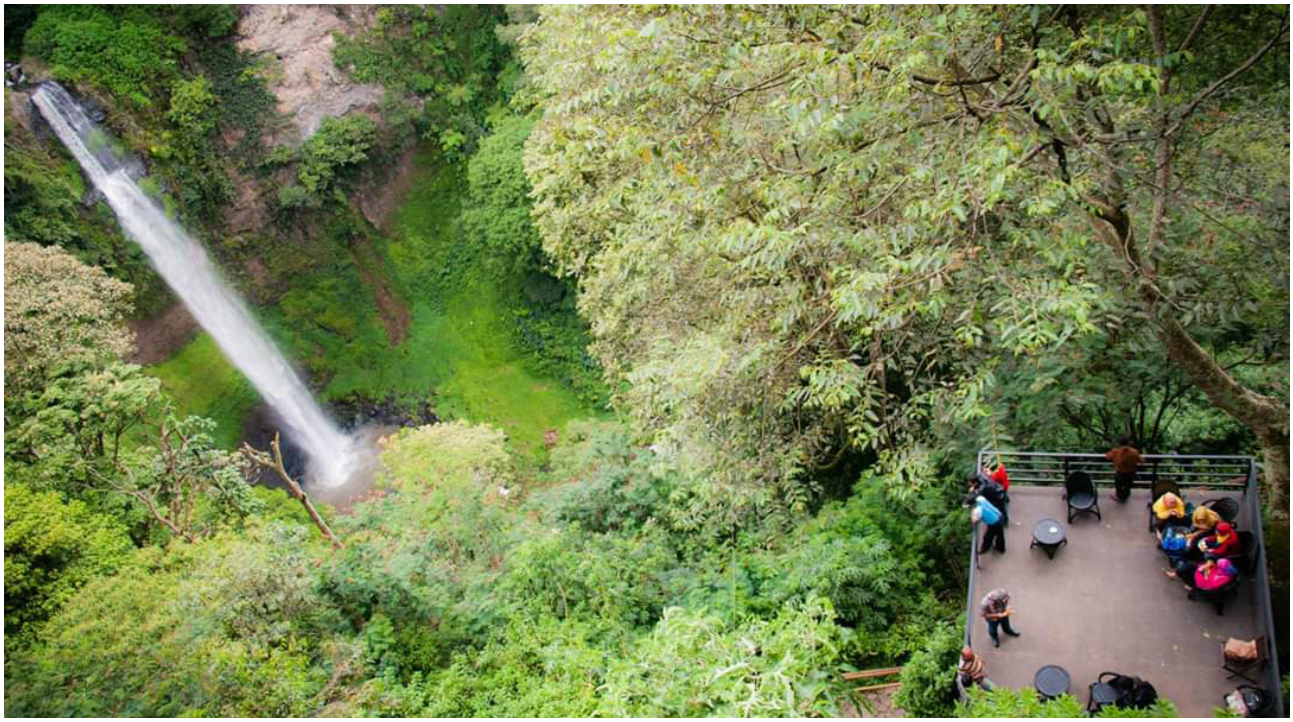

Berbagai wujud pelestarian lingkungan dilaksanakan oleh Perhutani, selain melakukan pelestarian lingkungan sungai, Perhutani juga mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan dengan mempraktikkan operasional kantor yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, kami seoptimal mungkin menerapkan prinsip 3R, yakni *Reduce, Reuse, Recycle*. Untuk mengurangi penggunaan energi listrik misalnya, Perusahaan mengambil kebijakan untuk mengganti lampu biasa dengan lampu yang hemat energi atau LED, mematikan lampu ruangan yang tidak dipakai, dan sebagainya. Adapun untuk menghemat air, selain mengeluarkan himbauan agar menggunakan air secara bijaksana, kami juga secara berkala mengontrol instalasi air di perkantoran sehingga bisa dilakukan perbaikan jika ada kebocoran atau kerusakan.

Various means of environmental conservation are carried out by Perhutani, in addition to preserving the river environment, Perhutani also manifests concern for the environment by practicing environmentally friendly office operations. In this case, we optimally apply the 3R principle, namely Reduce, Reuse, Recycle. To reduce the use of electrical energy, for example, the Company takes a policy to replace ordinary lamps with energy-efficient lamps or LEDs, turn off room lights that are not in use, and so on. As for saving water, apart from issuing calls to use water wisely, we also periodically control water installations in offices so that repairs can be made if there is a leak or damage.

Perhutani adalah perusahan dengan berbasis Sumberdaya hutan, setiap kegiatannya berprioritas pada pengelolaan sumberdaya hutan, terjaganya sumberdaya hutan maka terjaga juga Perum Perhutani sebagai perusahaan.

Perhutani is a Company based on Forest Management, every of its activity prioritizes forest resources management, the forest resources conservation will also preserve Perhutani as a company.

Program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahan terdapat pada Sasaran Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH) yaitu :

a. **Kelola SDH**
   Terciptanya peningkatan produktivitas lahan guna menjamin keberlanjutan perusahan dan mendukung peran dan fungsi SDH.
b. **Kelola Sosial**
   Terbangunnya kesamaan pandangan tentang PHBM dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kebersamaan, keterbukaan, komunikasi, keikhlasan lingkup internal Perhutani dan sinergisitas dengan para pihak dalam mengimplementasikan PHBM. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai upaya dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
c. **Perlindungan SDH**
   Turunnya gangguan keamanan hutan dalam rangka meningkatkan produktifitas SDH dan meningkatnya kinerja perusahaan.

Environment program related to the Company's operational activity is part of the Forest Resources Management (PSDH) target, as follows:

a. **Forest Resources (SDH)**
   Management Achievement of increasing land productivity to ensure sustainability of the Company and to support Forest Resources (SDH) role and function.
b. **Social Management**
   Establishment of similar perspective on PHBM as well as social and environmental responsibility, solidarity, transparency, communication, sincerity in internal circumstances of Perhutani and synergy with everyone in implementing PHBM. The social and environmental responsibility becomes the initiative to maintain forest conservation and to improve welfare of the forest rural society.
c. **Forest Resources (SDH)**
   Conservation Decreasing forest security threat in order to improve SDH productivity and increasing performance of the Company.

Aktivitas Operasional Ramah Lingkungan

Sepanjang tahun 2020, Perhutani turut berpartisipasi dalam mencegah perubahan iklim dan pemanasan global melalui pengelolaan operasional yang ramah lingkungan. Efektivitas dan efisiensi penggunaan energi dan material merupakan salah satu fokus kegiatan Perusahaan terhadap tanggung jawab sosial Perusahaan dalam menjaga kualitas lingkungan. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh Perhutani antara lain:

Penghematan Penggunaan Kertas

Perhutani telah menjalankan berbagai kegiatan untuk menjaga lingkungan hidup. Salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan kertas melalui penerapan *paperless system*.

Environmentally Friendly Operational Activities

Throughout 2020, Perhutani participated in preventing climate change and global warming through environmentally friendly operational management. The effectiveness and efficiency of the use of energy and materials is one of the focuses of the Company's activities towards the Company's social responsibility in maintaining environmental quality. Various initiatives that have been carried out by Perhutani include:

Saving Paper Use

Perhutani has implemented various activities to protect the environment. One of them is to reduce the use of paper through implementation of paperless system.

Perhutani menyadari bahwa penggunaan kertas yang berlebihan akan menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan yaitu dapat memicu terjadinya kegundulan hutan. Sejalan dengan program efisiensi yang dijalankan Perusahaan, Perhutani mengajak insan Perusahaan untuk menghemat pengunaan kertas melalui berbagai inisiatif penghematan yang dapat berdampak positif bagi lingkungan, yaitu:

1. Efisiensi penggunaan kertas dalam aktivitas perusahaan
2. Penggunaan kertas *reuse* dalam aktivitas perusahaan
3. Kampanye penghematan kertas melalui stiker yang ditempelkan pada mesin printer dan fotokopi
4. Daur ulang sampah kertas menjadi *recyle book*.

Perhutani realizes that excessive use of paper will have a negative impact on the environment, which can lead to deforestation. In line with the efficiency program carried out by the Company, Perhutani invites the Company's personnel to save paper use through various savings initiatives that can have a positive impact on the environment, as follows:

1. Efficient use of paper in company activities
2. Use of reused paper in company activities
3. Paper saving campaign through stickers affixed to printers and copiers
4. Recycle paper waste into recycling books.

Penghematan Penggunaan Energi Listrik

Antara lain dengan menggunakan lampu hemat energi dan *freon* ramah lingkungan;

Savings in electricity use

Among others by using energy-saving lamps and environmentally friendly freon;

Uji Emisi

Perhutani rutin juga melakukan uji emisi terhadap seluruh moda angkutan yang dimiliki. Dengan hanya mengoperasikan kendaraan yang lolos uji emisi, otomatis Perhutani ikut mengurangi emisi sehingga turut serta menjaga kelestarian lingkungan.

Emission Test

Perhutani also conducts emission tests on all modes of transportation regularly. By only operating vehicles that pass the emission test, Perhutani automatically reduces emissions thereby participates in preserving the environment.

PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN

Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) yang dilakukan Perhutani terdiri dari 6 hal pokok yaitu Perencanaan Hutan, Pembinaan Hutan, Produksi Hasil Hutan, Industri Hasil Hutan, Perhutanan Sosial dan Perlindungan Hutan.

FOREST RESOURCES MANAGEMENT

Perhutani carries out Forest Resource Management (SDH) that consists of 6 main things, such as Forest Planning, Forest Development, Forest Product Production, Forest Products Industry, Social Forestry and Forest Protection.

1. Perencanaan Sumberdaya Hutan

Secara garis besar kegiatan perencanaan SDH terbagi dalam 3 (tiga) kelompok kegiatan yaitu Pengukuhan Hutan, Penataan Hutan dan Perencanaan Prasarana Hutan.

a. Pengukuhan Hutan

Pengukuhan Hutan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai upaya memperoleh kepastian hukum mengenai batas dan status kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Kegiatannya meliputi penerbitan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan, yang berasal dari proses tukar menukar, pinjam pakai dan kompensasi. Dalam hal ini perhutani mendukung kegiatan dimaksud antara lain supporting data dan lain-lain. Oleh karena itu realisasinya tergantung pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Penataan Hutan

Dalam rangka mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan dilakukan penyusunan buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH). Kegiatannya antara lain: penataan hutan yang terdiri dari kegiatan tata batas hutan, pembagian hutan, inventarisasi hutan, pengukuran perpetaan dan sarana prasarana hutan.

Realisasi kegiatan Penataan Hutan tahun 2020 sebagai berikut:

1) Penataan I (tata batas, pembagian hutan, inventarisasi hutan dan pengukuran) pada tahun 2020 diprioritaskan untuk

1. Forest Resource Planning

In general, SDH planning activities are classified into 3 (three) groups of activities, which are Forest Inauguration, Forest Arrangement and Forest Infrastructure Planning.

a. Forest Inauguration

Forest inauguration refers to an activity carried out by the Ministry of Environment and Forestry as an initiative to acquire legal certainty regarding boundaries and status of the forest areas managed by Perum Perhutani. Its activities include the issuance of forest area designations, forest area boundary demarcation, forest area mapping and forest area determination, which originate from the exchange, borrow-to-use and compensation processes. In this case, Perhutani supports the said activities, including supporting data and others. Therefore, the realization depends on the Ministry of Environment and Forestry.

b. Forest Arrangement

In order to maintain the sustainability of forest resources, the preparation of the Forest Sustainability Management Plan (RPKH) book is carried out. Its activities include: forest management which consists of forest boundary demarcation, forest division, forest inventory, mapping and forest infrastructure measurement.

The realization of Forest Management activities in 2020 is as follows:

1) Arrangement I (demarcation, forest division, forest inventory and measurement) in 2020 is prioritized to

menyelesaikan kegiatan lapangan yang menunjang penyelesaian RPKH tahun 2020.

Realisasi kegiatan penataan tahun 2020 sebagai berikut :

a) Pemeriksaan pal batas teralisasi 55.658 pal atau 98% dari rencana sebanyak 56.815 buah. Pemeriksaan pal ini dilakukan oleh PHW dan telah selesai dilaksanakan pada KPH Randublatung, Cepu, Mojokerto, Malang dan Banyuwangi Utara. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemasangan pal tahun 2020 merupakan kegiatan tambahan yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya mempertahankan kemantapan kawasan hutan
b) Kegiatan inventarisasi hutan berupa risalah dengan PU terealisasi 136.623 ha atau 90% dari rencana seluas 152.223 Ha. Realisasi kegiatan risalah tidak sesuai dengan target karena ada beberapa lokasi yang merupakan IPHPS tidak dilakukan risalah dan ada beberapa lokasi yang curam sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan serta adanya perubahan beberapa risalah dengan PU menjadi risalah okuler. Untuk risalah okuler terealisasi 130.770 ha atau 147% dari rencana sebesar 116.003 ha. Kegiatan risalah ini dilaksanakan oleh PHW pada KPH penataan yaitu Pekalongan Timur, Banyumas Barat, Gundih, Mantingan, Kediri, Bojonegoro, Madiun, Mojokerto, Malang, Jember, Banyuwangi Utara dan Bandung Utara.
c) Kegiatan markir terealisasi 69.319 hm atau 98% dari dari rencana sebesar 70.605 hm. Kegiatan markir dilaksanakan oleh PHW pada KPH

complete activities fields that support the completion of the 2020 RPKH.

The realization of structuring activities in 2020 is as follows:

a) Inspection of realized limit pals of 55,658 pals or 98% of the planned 56,815 units. This pal examination was carried out by PHW and has been completed in KPH Randublatung, Cepu, Mojokerto, Malang and North Banyuwangi. Meanwhile, the implementation of the pal installation activities in 2020 is an additional activity carried out as an effort to maintain the stability of the forest area
b) Forest inventory activities in the form of minutes with PU realized 136,623 ha or 90% of the planned 152,223 ha. The realization of the minutes of activity was not in accordance with the target because there were several locations which were IPHPS, no minutes were carried out and there were some steep locations that made it impossible to carry out the activities and there was a change in some of the minutes with PU into ocular treatises. For the ocular minutes, 130,770 ha were realized or 147% of the 116,003 ha plan. This tract activity was carried out by PHW at structuring KPHs, including East Pekalongan, West Banyumas, Gundih, Mantingan, Kediri, Bojonegoro, Madiun, Mojokerto, Malang, Jember, North Banyuwangi and North Bandung.
c) Marking activities realized 69,319 hm or 98% of the planned 70,605 hm. Marking activities were carried out by PHW at KPH Pekalongan Timur, Banyumas Barat, Mantingan, Bojonegoro,

Pekalongan Timur, Banyumas Barat, Mantingan, Bojonegoro, Padangan, Parengan, Jatirogo, Tuban, Ngawi, Saradan, Madiun, Lawu Ds, Kediri, Jombang, Malang, Banyuwangi Utara, KPH Sukabumi dan Bandung Utara.

d) Pengukuran, antara lain meliputi pengukuran batas anak petak teralisasi 36.285 hm atau 158% dari rencana sebesar 22.945. Pengukuran diprioritaskan pada lokasi yang rawan konflik dan ukur anak petak yang mengalami perubahan.

2) Kegiatan Penataan II berupa Penyusunan RPKH Rutin sebanyak 9 KPH .

c. Perencanaan Sarana & Prasarana

Kegiatan perencanaan prasarana hutan ditujukan untuk menyusun sistem jaringan jalan angkutan yang sesuai dengan kondisi lapangan dengan prioritas pada lokasi yang akan dipungut hasilnya (tebangan dan sadapan).

Beberapa kegiatan perancanaan tahun 2020 sebagai berikut :

1) Kegiatan penilaian tanaman tahun ke-3 yang merupakan tanaman tahun 2018 telah selesai dilaksanakan oleh PHW. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan tanaman, monitoring terhadap perubahan kelas hutan serta pertimbangan dalam penetapan RTT pemeliharaan tahun ke-4. Realisasi kegiatan dilapangan berupa pembuatan petak ukur sebanyak 42.979 PU. Hasil penilaian tanaman tahun ke-3 yaitu % tumbuh tanaman pokok sebesar 74,77%.

2) Dalam rangka mewujudkan

Padangan, Parengan, Jatirogo, Tuban, Ngawi, Saradan, Madiun, Lawu Ds, Kediri, Jombang, Malang, North Banyuwangi, KPH Sukabumi and North Bandung.

d) Measurement, including measuring the boundary of the sub-plot realized 36,285 hm or 158% of the 22,945 plan. The measurement is prioritized in locations that are prone to conflict and measure the changing sub-plots.

2) Arrangement II Activity in form of Regular RPKH preparation as 9 KPHs

c. Facilities & Infrastructure Planning

Forest infrastructure planning activities are aimed to prepare a transport road network system based on field conditions with priority on locations where the results will be collected (logged and tapping).

Some of the planning activities for 2020 are as follows:

1) The 3rd year plant assessment activity which is a 2018 plant has been completed by PHW. This activity is carried out with the aim of knowing the success of plants, monitoring changes in forest class and considerations in determining the 4th year maintenance RTT. Realization of activities in the field in the form of making plots of 42,979 PU. The results of the 3rd year plant assessment, namely the % growth of the main crop of 74.77%.

2) In order to realize the stabilization of the Java - Madura forest area and the One Map Policy, in accordance

pemantapan kawasan hutan Jawa – Madura dan Kebijakan Satu Peta maka sesuai dengan hasil rapat dan FGD dengan BPKH XI Yogyakarta Wilayah Jawa – Madura, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka direncanakan pembuatan role model untuk Divisi Regional Jawa Tengah tahun ini dilaksanakan pada KPH Surakarta dan Divisi Regional Jawa Barat dan Banten pada KPH Banten, KPH Sukabumi, KPH Bandung Utara serta KPH Indramayu.

with the results of the meeting and FGD with BPKH XI Yogyakarta for the Java - Madura Region, the Directorate of Inauguration and Administration of Forest Areas, the Ministry of Environment and Forestry, it is planned to create a role model for the Division This year's Central Java Region was held at KPH Surakarta and Regional Divisions for West Java and Banten at KPH Banten, KPH Sukabumi, KPH North Bandung and KPH Indramayu.

2. Pembinaan Hutan

Kegiatan Rehabilitasi SDH & Lingkungan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan dalam rangka menjamin kelestarian produksi, sosial dan lingkungan sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH). Aktivitasnya terdiri dari pembuatan tanaman, pemeliharaan tanaman serta perawatan hutan.

Adapun realisasi kegiatan sampai dengan tahun 2020 sebagian besar telah mencapai target tetapi beberapa kegiatan pada pemeliharaan IV dan V dan perawatan hutan tidak mencapai target dikarenakan lokasi pemeliharaan yang masih digarap oleh masyarakat, KHDTK, IPHPS, bencana alam dan tidak bisa dilakukan tunjuk tolet. Kegiatan Pembinaan Hutan adalah sebagai berikut:

a. Pembuatan Tanaman

Berdasarkan asal tebangannya, kegiatan pembuatan tanaman Perum Perhutani dibagi menjadi Tanaman Rutin, yaitu yang berasal dari tebangan habis

2. Forest Development

SDH & Environmental Rehabilitation Activities are carried out to increase the productivity of forest resources in order to ensure production, social and environmental sustainability as planned in the Forest Sustainability Regulatory Plan (RPKH). Its activities consist of plant manufacture, plant maintenance and forest maintenance.

As for the realization of activities up to 2020, most of them have reached the target, but some activities in maintenance IV and V and forest care did not reach the target due to maintenance locations that are still being worked on by the community, KHDTK, IPHPS, natural disasters and cannot show toilets. Forest Development Activities are as follows:

a. Plant Making

Based on the origin of the harvest, Perum Perhutani's plant-making activities are divided into Routine Plants, namely those from clear cutting according to the cycle (Logging A) and Development

sesuai daur (Tebangan A) dan Tanaman Pembangunan, yaitu yang berasal dari tebangan rehabilitasi (Tebangan B) untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Plants, namely those originating from rehabilitation logging (Logging B) to increase land productivity.

Selain itu terdapat pula program-program khusus pembuatan tanaman yaitu RHL (Rehabilitasi Hutan Lindung), HAS (Hutan Alam Sekunder)/KPS (Kawasan Perlindungan Setempat), pembuatan tanaman yang berasal dari teknik Opslag Culture, KRT (Kerapatan tegakan), Pengkayaan dan Agroforestry.

In addition, there are also special programs for plant production, namely RHL (Rehabilitation of Protected Forests), HAS (Secondary Natural Forests)/KPS (Local Protected Areas), manufacture of plants derived from Opslag Culture techniques, KRT (stand density), Enrichment and Agroforestry.

Jenis-jenis tanaman yang dikembangkan oleh Perum Perhutani diantaranya yaitu Jati, Pinus, Sengon, Mahoni, dan Kayu Putih. Sedangkan tahapan pembuatan tanaman terdiri dari pembibitan, persiapan lapangan dan pelaksanaan pembuatan tanaman.

The types of plants developed by Perum Perhutani include teak, pine, sengon, mahogany, and eucalyptus. While the stages of making plants consist of seeding, field preparation and implementation of making plants.

b. Pemeliharaan Tanaman dan Perawatan Hutan

Kegiatan pemeliharaan tanaman dan perawatan hutan merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan pembuatan tanaman yang bertujuan agar tanaman dapat tumbuh sehat sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang ditetapkan serta meningkatkan kualitas tanaman sehingga pada akhir daur didapatkan tegakan bernilai ekonomis tinggi.

b. Plant Maintenance and Forest Care

Plant maintenance and forest maintenance activities are follow-up activities from plant-making activities with the aim that plants can grow healthily in accordance with the growth rate set and improve plant quality so that at the end of the cycle, stands of high economic value are obtained.

Kegiatan pemeliharaan tanaman dilakukan pada tanaman umur 1 dan 2 tahun (Pemeliharaan Tanaman Tahun II dan III), sedangkan perawatan hutan terdiri dari pemeliharaan tanaman umur 3 tahun dan 4 tahun (Pemeliharaan Tanaman Tahun IV dan V) dan persiapan penjarangan dilakukan pada tegakan umur 5 tahun ke atas sesuai jadwal yang ditetapkan.

Plant maintenance activities were carried out on plants aged 1 and 2 years (Plant Maintenance Years II and III), while forest maintenance consisted of maintaining the 3 and 4 years plantation (Plant Maintenance Years IV and V) and thinning preparations were carried out on 5 years or older stands based on schedule.

.

3. Produksi Hasil Hutan Dan Industri Hasil Hutan

Pembahasan terkait produksi dan industri hasil hutan dapat dilihat pada Bab Analisa dan Kinerja Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

4. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Agar implementasi rencana kerja Perhutanan Sosial dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan, perlu adanya perbaikan tata kelola Perhutanan Sosial yang meliputi: tata kelola kawasan hutan, tata kelola masyarakat desa hutan dan tata kelola usaha Perhutanan Sosial. Sampai tahun 2020, beberapa kegiatan yang mendukung perbaikan tata kelola Perhutanan Sosial tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tata Kelola Kawasan Hutan

Tata kelola kawasan hutan melalui progam Perhutanan Sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah melalui skema kerjasama kemitraan sesuai P.83/2016 dan skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial sesuai P.39/2017. Beberapa rangkaian kegiatan yang mendukung pemahaman dan proses terkait skema Perhutanan Sosial tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi Perhutanan Sosial

Sampai dengan tahun 2020 kegatan sosialisasi telah dilakukan melalui kegiatan pelatihan pendampingan Perhutanan Sosial, Sharing Session

3. Forests Harvest Production and Forest Harvest Industry

Discussion related to forest production and industry are presented in Management's Discussion and Analysis Chapter in this Annual Report.

4. Social Forestry

Social Forestry is one of the government programs in improving the welfare of the community around the forest through a pattern of empowerment and by remaining guided by the sustainability aspect. In order for the implementation of the Social Forestry work plan to be realized as expected, it is necessary to improve the management of Social Forestry including: forest area management, forest village community management and Social Forestry business management. As of 2020, several activities that support the improvement of Social Forestry governance are as follows:

a. Forest Area Governance

Forest area governance through the Social Forestry program provides an opportunity for communities to apply for forest area management rights to the government through a partnership cooperation scheme according to P.83/2016 and the Social Forestry Forest Utilization Permit scheme according to P.39/2017. Several series of activities that support understanding and processes related to the Social Forestry scheme are as follows:

1) Social Forestry Socialization

As of 2020, socialization activities have been carried out through training activities for Social Forestry mentoring, Social Forestry Sharing

Perhutanan Sosial, Diklat Perhutanan Sosial Tingkat Asper, Pengajian Perhutanan Sosial, Sharing Session Best Practice Perhutanan Sosial, Pembukaan Sekolah Lapang dan Forum Pojok Desa.

2) Identifikasi Lokasi Perhutanan Sosial
Kegiatan identifikas lokasi perhutanan sosial skema kemitraan kehutanan berupa kegiatan pengumpulan data dan informasi tapak, Identifikasi penggarap meliputi identitas (identitas kependudukan sesuai KTP dan NIK) dan luas garapan serta jenis komoditi usaha pertaniannya dilakukan pada seluruh petak calon lokasi kemitraan kehutanan hasil identifikasi tersebut diusulkan ke Kementerian untuk diverifikasi.

Sampai dengan tahun 2020 terdapat 1.315 usulan, merupakan usulan dari tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020, terdiri dari 1.181 lokasi skema Kemitraan Kehutanan dan 134 lokasi skema Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (IPHPS).

3) Verifikasi Lokasi Perhutanan Sosial
Kegiatan verifikasi lokasi perhutanan sosial adalah kegiatan penelaahan yang meliputi administrasi dan teknis lapangan terhadap permohonan Kemitraan Kehutanan maupun IPHPS. Tim Verifikasi Teknis terdiri dari unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Unit Pelayanan Teknis, Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Perum Perhutani, Kepala Desa Setempat, anggota Pokja PPS dan

Sessions, Asper Level Social Forestry Education and Training, Social Forestry Studies, Best Practice Social Forestry Sharing Sessions, Opening of Field Schools and Village Corner Forums.

2) Identification of Social Forestry Locations
The activity of identifying the location of social forestry in the forestry partnership scheme is in the form of collecting site data and information. Identification of cultivators includes identity (residential identity according to KTP and NIK) and area of cultivation as well as types of agricultural business commodities. to be verified.

As of 2020, there are 1,315 proposals, which are proposals from 2017, 2018, 2019 and 2020, consisting of 1,181 locations for the Forestry Partnership scheme and 134 locations for the Social Forestry Utilization Permit (IPHPS) scheme.

3) Social Forestry Location Verification
Social forestry site verification activities are review activities that include field administration and technical applications for Forestry Partnership and IPHPS applications. The Technical Verification Team consists of elements from the Provincial Office in charge of forestry, Technical Service Units, Forestry Extension Officers, Non-Governmental Forestry Extension Officers, Perum Perhutani, Local

LSM pendamping setempat. Dari usulan 1.315, sampai dengan tahun 2020 telah diverifikasi sebanyak 576 usulan dengan progres sebagaimana tabel dibawah ini.

Penyerahan 114 SK kepada LMDH diserahkan oleh Presiden di 7 tempat diantaranya Kabupaten Tuban, Madiun, Boyolali, Muara Gembong Bekasi, Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur.

4) Penyelesaian Konflik Perhutanan Sosial
Perhutani aktif melayani para pihak yang mengalami konflik agar implementasi percepatan perhutanan sosial dapat berjalan sesuai tujuan. Kemajuan penyelesaian konflik Perhutanan Sosial sampai Desember 2020 sebanyak 15 lokasi yaitu kategori Pra SK : 9 lokasi dan Pasca SK : 6 lokasi.

Dalam rangka upaya penyelesaian konflik Perhutanan Sosial tersebut telah dilaksanakan kegiatan identifikasi konflik, asesmen konflik, pemetaan konflik, mediasi Konflik, mitigasi konflik, penanganan konflik serta supervisi, monitoring dan evaluasi.

b. Tata Kelola Masyarakat Desa Hutan/ tata kelola kelembagaan

Peran serta masyarakat dalam kegiatan pengeloaan hutan melalui program Perhutanan Sosial diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan. Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) merupakan wadah bagi masyarakat desa hutan yang

Village Heads, PPS Working Group members and local supporting NGOs. Of the 1,315 proposals, up to 2020, 576 proposals have been verified with progress as shown in the table below.

The President handed over 114 decrees to LMDH in 7 places including Tuban, Madiun, Boyolali, Muara Gembong Bekasi, West Bandung and Cianjur Regencies.

4) Social Forestry Conflict Resolution
Perhutani actively serves parties experiencing conflict so that the implementation of accelerated social forestry can run according to its objectives. The progress of conflict resolution on Social Forestry until December 2020 was 15 locations, namely the Pre-SK category: 9 locations and Post-SK: 6 locations.

In the context of efforts to resolve the Social Forestry conflict, conflict identification, conflict assessment, conflict mapping, conflict mediation, conflict mitigation, conflict handling as well as activity supervision, monitoring and evaluation.

b. Forest Village Community Governance/ institutional governance

Community participation in forest management activities through the Social Forestry program is expected to improve the living standard of communities around the forest. The Social Forestry Group (KPS) is a forum for forest village communities involved

terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam program Perhutanan Sosial. Saat ini telah terbentuk 5.307 Kelompok Perhutanan Sosial (LMDH) dengan sebaran di Divisi Regional Jawa Tengah sebanyak 1.934 LMD, Divisi Regional Jawa Timur sebanyak 1.834 LMDH serta di Divisi Regional Jawa Barat dan Banten sebanyak 1.539 LMDH.

c. Tata Kelola Usaha Perhutanan Sosial

Tata Kelola Usaha Perhutanan Sosial diperlukan dalam rangka meningkatkan kapasitas kewirausahaan kelompok Perhutanan Sosial dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial serta meningkatkan peran dan kemandirian usaha kelompok Perhutanan Sosial.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial sampai tahun 2020 telah dibuat piloting ketahanan pangan, peningkatan kinerja KUPS serta kontribusi Perhutani kepada masyarakat desa hutan.

1) Model Lokasi Ketahanan Pangan Perhutanan Sosial

   Perhutani membantu program pemanfaatan kawasan hutan (dibawah tegakan) khususnya areal Hutan Sosial untuk penguatan produksi komoditas bahan pangan pada 5 KPH Piloting Ketahanan Pangan Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian Luas Areal 13.782 Ha 21.044 orang petani hutan 130 LMDH/KTH dan 5 KPH Lokasi Tambahan Piloting Ketahanan Pangan Kementrian Koperasi dengan luas areal 12.380 Ha 27.794 orang petani hutan 101 LMDH/KTH Ha

in the management and utilization of forest areas in the Social Forestry program. Currently 5,307 Social Forestry Groups (LMDH) have been formed with 1,934 LMDs in the Central Java Regional Division, 1,834 LMDHs in the East Java Regional Division and 1,539 LMDHs in the West Java and Banten Regional Divisions.

c. Social Forestry Business Governance

Social Forestry Business Governance is needed to increase entrepreneurial capacity of the Social Forestry group in developing the Social Forestry business as well as to increase the role and independence of the Social Forestry group's business.

To improve the business development of social forestry groups until 2020, piloting of food security has been made, improving the performance of KUPS and Perhutani's contribution to forest village communities.

1) Social Forestry Food Security Location Model

   Perhutani assists the forest area utilization program (under stands) especially the Social Forest area to strengthen the production of food commodities in 5 KPH Piloting Food Security Ministry of LHK and Ministry of Agriculture Area of 13,782 Ha 21,044 forest farmers 130 LMDH/KTH and 5 KPH Additional Locations for Resilience Piloting Food Ministry of Cooperatives with an area of 12,380 Ha 27,794 forest farmers 101 LMDH/KTH Ha with rice and corn commodities.

dengan komoditi padi dan jagung.

2) Pembentukan dan klasifikasi KUPS

Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial (LMDH/KTH/Gapoktan) sampai dengan tahun 2020 tercatat 5.307 kelompok dan telah terbentuk 1.457 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dengan sebaran dan klasifikasi sebagai berikut :

2) KUPS Establishment and classification

Number of Social Forestry Groups (LMDH/KTH/Gapoktan) as of 2020 is recorded at 5,307 groups and 1,457 Social Forestry Business Groups (KUPS) have been established, with the following distribution and classification:

KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL
Social Forestry Business Group

Uraian Description	**Klasifikasi/** Clasification				
	Blue	**Silver**	**Gold**	**Platinum**	**Total KUPS**
Jawa Tengah/ Central Java	422	50	28	8	508
Jawa Timur/ East Java	406	121	65	5	597
Jawa Barat dan Banten/ West Java and Banten	185	124	34	9	352
Perhutani	1.013	295	127	22	1.457

Klasifikasi KUPS didasarkan pada kemapuan KUPS dalam melaksanakan kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha sesuai dengan kriteria klasifikasi yang tertuang dalam Perdirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kehutanan Kementerian LHK No. P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018 tentang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

KUPS classification is based on the ability of KUPS in implementing area management, institutional management and business management in accordance with the classification criteria contained in the Director General of Social Forestry and Forestry Partnerships of the Ministry of Environment and Forestry No. P.2/PSKL/SET/KUM.1/5/2018 concerning Social Forestry Business Development.

3) Kontribusi Pengelolaan Sumber Daya Hutan kepada Masyarakat Desa Hutan

Dari kegiatan pengelolaan hutan, Perum Perhutani memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui kegiatan penyerapan tenaga kerja, sharing dan kontribusi pangan dari dalam kawasan hutan.

3) Contribution of Forest Resource Management to Forest Village Communities

From forest management activities, Perum Perhutani contributes to improve the welfare of forest village communities through employment, sharing and food contribution activities from within the forest area.

a) Penyerapan Tenaga Kerja Pengelolaan Hutan

Sampai dengan tahun 2020, Perum Perhutani telah melibatkan sebanyak 91.036 orang (51% dari rencana 179.463 orang) dari masyarakat desa hutan sebagai tenaga kerja dalam pengelolaan hutan mulai dari kegiatan perencanaan, pembinaan SDH, produksi, industri, pemasaran, tehnik dan perlengkapan sampai perlindungan hutan.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat desa hutan mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp 260.638.086.000,-

b) Sharing Produksi Kayu dan Non Kayu

Kontribusi Perum Perhutani kepada masyarakat desa hutan dalam bentuk sharing produksi sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp30.155.000.000,- (75% dari rencana Rp40.022.082.000,-) yang diberikan kepada 1.142 LMDH. Realisasi tersebut berasal dari sharing kayu Rp23.140.000.000,- dan non kayu (getah Pinus, getah Damar, daun Kayu Putih) Rp7.015.000.000,-.

c) Sharing wisata

Dari kegiatan wisata, Perum Perhutani memberikan sharing kepada LMDH sebagai mitra kerjasama. Sampai dengan tahun 2020, sharing yang diberikan kepada LMDH sebesar Rp52.787.567.528,-. Selain mendapat sharing wisata tersebut, masyarakat desa hutan juga diberi kesempatan untuk berdagang disekitar lokasi wisata atau juga bertugas sebagai juru parkir sehingga dapat menambah penghasilan mereka.

a) Absorption of Forest Management Manpower

Until 2020, Perum Perhutani has involved 91,036 people (51% of the planned 179,463 people) from forest village communities as workers in forest management starting from planning activities, fostering SDH, production, industry, marketing, engineering and equipment to forest protection.

From these activities, the forest village community earned additional income of Rp260,638.086.000,-

b) Wood and Non-Wood Production Sharing

Perum Perhutani's contribution to forest village communities in the form of production sharing until 2020 is Rp30,155,000,000 (75% of the planned Rp40,022,082,000, -) given to 1,142 LMDH. This realization came from sharing Rp 23,140.000.000,- for wood and non-timber (Pine latex, Damar latex, Eucalyptus leaf) Rp 7,015.000.000,-.

c) Tourism Sharing

From tourism activities, Perum Perhutani provides sharing to LMDH as a cooperation partner. Until 2020, the sharing given to LMDH is Rp52,787,567,528,-. In addition to receive the tourism sharing, forest village communities are also given the opportunity to trade around tourist sites or also serve as parking attendants so that they can increase their income.

d) Kontribusi pangan dari dalam kawasan hutan

Kontribusi Perum Perhutani kepada masyarakat desa hutan juga dalam bentuk hasil pangan yang ditanam di dalam kawasan hutan melalui kegiatan Agroforestry terdiri dari jenis padi, jagung, tebu dan lain-lain. Sampai dengan tahun 2020 tercatat total hasil pangan yang dapat dinikmati oleh masyarakat senilai Rp482.109.060.213,- terdiri dari:

- Padi Rp53.055.865.746,-,
- Jagung Rp210.931.285.083,-
- Kopi Rp60.331.887.027,-
- Singkong Rp4.381.263.900,-
- Porang Rp 9.523.785.375,-
- Tebu Rp30.073.799.889,- dan
- lain-lain Rp113.811.173.193,-.

4) Untuk mengatur mekanisme pengelolaan dan pembagian sharing komoditi, telah dillakukan proses kajian dan pembuatan prosedur kerja Sharing, bekerjasama dengan IPB University. Dari hasil kajian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembuatan draft pedoman tersebut pada tahun 2021.

5. Perlindungan Hutan

a. Gangguan Keamanan Hutan

Nilai kerugian akibat untuk seluruh gangguan keamanan hutan secara umum sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5% dibanding periode yang sama tahun 2019. Jumlah pohon yang hilang akibat dari pencurian pohon pada tahun 2020 adalah 27.728 pohon lebih rendah 14% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 32.250 pohon, begitu pula dengan nilai kerugian kehilangan pohon akibat pencurian pohon juga

d) Contribution of food from within the forest area

Perum Perhutani's contribution to forest village communities is also in the form of food products planted in forest areas through agroforestry activities consisting of rice, corn, sugar cane and others. Until 2020, it was recorded that the total food yields that could be enjoyed by the community were Rp482,109,060,213,- consisting of:

- Rice Rp53,055,865,746,-
- Corn Rp210,931,285,083,-
- Coffee Rp60,331,887,027,-
- Cassava Rp4,381.263.900,-
- Porang Rp9,523.785.375,-
- Sugarcane Rp30.073.799.889,-
- Others Rp113.811.173.193,-

4) To regulate the mechanism for the management and distribution of commodity sharing, a study process and the making of Sharing work procedures have been carried out, in collaboration with IPB University. From the results of the study, it will be followed up with the guideline drafting in 2021.

5. Forest Protection

a. Forest Security Disturbance

The value of losses due to all forest security disturbances in general until 2020 decreased by 5% compared to the same period in 2019. The number of trees lost due to tree theft in 2020 was 27,728 trees, 14% lower compared to 2019 as many as 32,250 trees. , as well as the value of tree loss due to tree theft also decreased by 14% from Rp27,329,056,000 in 2019 to Rp23,492,087,000 in 2020. Security disturbances in the form of

mengalami penurunan sebesar 14% dari Rp27.329.056.000,- pada tahun 2019 menjadi Rp23.492.087.000,- di tahun 2020. Gangguan keamanan berupa bibrikan terjadi penurunan keluasan sebesar 68%, yaitu seluas 15,79 Ha pada tahun 2020 bila dibandingkan tahun 2019 seluas 49,34 Ha. Sedangkan untuk gangguan keamanan hutan berupa perusakan hutan, prosentase keluasan sebesar 10%, jumlah kehilangan pohon sebesar 59% serta nilai kerugiannya mencapai Rp1.804.012.000,-, atau 44% dibandingkan dengan tahun 2019.

seeds decreased by 68% , which is 15.79 hectares in 2020 when compared to 49.34 hectares in 2019. As for forest security disturbances in the form of forest destruction, the percentage of the area is 10%, the total loss of trees is 59% and the loss value reaches Rp 1,804,012,000, -, or 44% compared to 2019.

Pada tahun 2020 ini, penggembalaan liar dilaporkan seluas 2,00 ha dengan nilai kerugian Rp4.500.000. Kejadian kebakaran hutan mengalami penurunan luas sebesar 79% dari luas 6.219,95 ha pada tahun 2019 menjadi seluas 1.290,38 ha pada tahun 2020, dengan nilai kerugian akibat kebakaran hutan sebesar Rp2.712.738.00,- (35%) dari tahun 2019 sebesar Rp7.782.911.000,-. Rp47.764.182.000,-. Upaya pengendalian dan penanggulangan terhadap kejadian bencana alam adalah dengan melakukan bekerjasama dan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Forkompinda setempat sehingga korban jiwa dan harta benda dapat diminimalisir.

In 2020, illegal grazing was reported as covering an area of 2.00 ha with a loss value of Rp4,500,000. The incidence of forest fires decreased by 79% from an area of 6,219.95 ha in 2019 to an area of 1,290.38 ha in 2020, with a loss due to forest fires of Rp 2,712,738.00, - (35%) from 2019 of Rp7,782,911,000,-. Rp47,764,182,000,-. Efforts to control and overcome natural disasters are to cooperate and involve the Provincial/District/City Regional Disaster Management Agency and the local Forkompinda, therefore, casualties and property can be minimized.

b. Hasil Pengamanan

Sebagai antisipasi adanya peningkatan gangguan keamanan, maka dilakukan berbagai strategi pengamanan khususnya pada petak-petak yang rawan dan sangat rawan. Sampai dengan tahun 2020 dapat diamankan keseluruhan kayu yang berasal dari kayu temuan dalam

b. Security Outcome

In anticipation of an increase in security disturbances, various security strategies are carried out, especially in areas that are vulnerable and very vulnerable. As of 2020, the total amount of wood found in and outside the forest area can be secured, 3,629.24 m^3 of capture, search,

dan luar kawasan hutan, tangkapan, penggeledahan, dan pengamanan lainya sebanyak 3.629,24 m^3 naik sebesar 6% dari banyaknya kayu yang diamankan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 3.434,12 m^3, dengan nilai kayu yang diamankan sebesar Rp27.249.779.000,- atau 281% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp9.686.987.000,-

and other safeguards can be secured, an increase of 6%. From amount of wood was secured in 2019 which was 3,434.12 m^3, with the value of the wood being secured amounting to Rp27,249,779,000,- or 281% compared to 2019 of Rp9,686,987,000,-

c. Penanganan Perkara

Selain melakukan operasi pengamanan, untuk menekan angka gangguan keamanan juga dilakukan penanganan perkara tindak pidana pencurian hutan bekerja sama dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) serta pengawalan prosesnya oleh LO dan Pabin.

Pembuatan Laporan Huruf A (LA) yang merupakan projustitia atau laporan atas telah terjadinya tindak pidana kehutanan pada tahun 2020 untuk Laporan Huruf A (LA) sebanyak 7.787 laporan, terdiri dari dengan tersangka sebanyak 266 buah laporan Huruf A (LA) dan sebanyak 7.521 buah Laporan Huruf A (LA) tanpa tersangka. Proses penanganan perkara atas LA tersebut, telah dibuatberkas perkara (BAP) sebanyak 303 berkas. Dari jumlah berkas yang dibuat, sebanyak 146 berkas telah mendapatkan vonis/putusan pengadilan, sisanya masih dalam proses peradilan.

c. Litigation Process

In addition to carrying out security operations, to reduce the number of security disturbances, the handling of criminal cases of forest theft is also carried out in collaboration with law enforcement officers (police, prosecutors, and courts) as well as escorting the process by LO and Pabin.

Preparation of Report Letter A (LA) which is a projustitia or report on the occurrence of forestry crimes in 2020 for Report Letter A (LA) as many as 7,787 reports, consisting of with suspects as many as 266 reports Letter A (LA) and as many as 7,521 reports Letter A (LA) without suspect. The case handling process for the LA has been made case files (BAP) as many as 303 files. Of the number of files made, as many as 146 files have received court verdicts / decisions, the rest are still in the judicial process.

d. Bidang Tenurial

Penanganan konflik tenurial tahun 2020 tetap difokuskan pada strata A dan B. Konflik strata A merujuk pada aktivitas/kegiatan pemanfaatan lahan didalam kawasan hutan secara illegal

d. Tenure Field

The handling of tenure conflicts in 2020 remains focused on strata A and B. Strata A conflicts refer to illegal land use activities/activities in forest areas without the intention of controlling and or owning

tanpa bermaksud untuk menguasai dan atau memiliki lahan yang dikerjakan. Sedangkan konflik strata B merujuk pada aktivitas/kegiatan pemanfaatan lahan didalam kawasan hutan secara illegal dengan maksud menguasai (memanfaatkan dalam jangka waktu tak terbatas) namun tidak ingin memiliki.

the land being worked on. Meanwhile, strata B conflict refers to the illegal use of land in forest areas with the intention of controlling (utilizing it for an unlimited period of time) but not wanting to own it.

Luas konflik tenurial pada awal tahun 2020 adalah seluas 91.688,70 Ha, dengan target rencana penyelesaian tahun 2020 seluas 5.445,38 Ha dan tahun 2020 terjadi penambahan luas konflik tenurial seluas 346,56 Ha. Upaya-upaya penyelesaian konflik tenurial yang dilaksanakan Perhutani sampai dengan tahun 2020 ini telah berhasil mengurangi konflik tenurial seluas 7.776,11 Ha atau 142,80% dari target rencana penyelesaian tahun 2020, sehingga sisa luas konflik tenurial sampai dengan tahun 2020 adalah seluas 84.259,15 Ha (91,90%) yang masih terus dan tetap akan ditangani dan diselesaikan (ultimum remedium) apabila proses sosial tidak dapat dilaksanakan.

The area of tenurial conflicts at the beginning of 2020 was 91,688.70 hectares, with the target of the 2020 settlement plan covering an area of 5,445.38 hectares and in 2020 there will be an increase in the area of tenure conflicts of 346.56 hectares. Tenurial conflict resolution efforts carried out by Perhutani until 2020 have succeeded in reducing tenure conflicts of 7,776.11 hectares or 142.80% of the target for the 2020 settlement plan, so that the remaining area of tenure conflicts up to 2020 is 84,259.15 Ha (91.90%) which is still ongoing and will still be handled and resolved (ultimum remedium) if the social process cannot be implemented.

Salah satu contoh upaya penanganan dan penyelesaian konflik tenurial melalui program Perhutanan Sosial sampai dengan tahun 2020 ini adalah penyelesaian konflik tenurial di KPH Banyumas Barat yang berasal dari proses Tukar Menukar Kawasan Hutan yang tidak tuntas antara Perhutani dengan Masyarakat Desa dari 4 (empat) Desa yaitu Desa Grugu, Desa Bringkeng, Desa Babakan dan Desa Binangun, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yang dianggap masih ada kekurangan luas tanah pengganti oleh masyarakat dari Pihak Perhutani seluas 418,0 Ha . Penanganan konflik tenurial di eks TMKH ini, dilakukan di desa Cisumur kecamatan Gandrungmangun, Desa Rawa Apu dan Desa Bulu Payung Kecamatan Patimuan, serta Desa Ujung Gaga kecamatan

One example of efforts to handle and resolve tenure conflicts through the Social Forestry program until 2020 is the resolution of tenure conflicts in the West Banyumas KPH which stems from the incomplete Forest Area Exchange process between Perhutani and Village Communities from 4 (four) villages, namely the Village Grugu, Bringkeng Village, Babakan Village and Binangun Village, Kawunganten Sub-district, Cilacap Regency, Central Java Province which is considered to still have a lack of replacement land area by the community from the Perhutani Party covering an area of 418.0 Ha. The handling of tenure conflicts in the former TMKH was carried out in Cisumur village, Gandrungmangun sub-district, Rawa Apu and Bulu Payung villages, Patimuan sub-district, and

Kampung Laut Kabupaten Cilacap yang difasilitasi oleh Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ujung Gaga village, Kampung Laut sub-district, Cilacap district, facilitated by the Directorate of Conflict Management, Tenure and Customary Forests, Directorate General of Social Forestry. and the Ministry of Environment and Forestry's Environmental Partnership.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan Perusahaan, Perhutani juga menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang ditimbulkan Perusahaan terkait pengelolaan lingkungan hidup sehingga pemenuhan tanggung jawab Perhutani terhadap lingkungan dapat terlaksana dengan baik. Pengaduan masalah lingkungan tersebut dapat disampaikan melalui contact center (contact_centre@perhutani.co.id) dan media sosial Perhutani.

Environmental Complaint Mechanism

As stated in the Company's policy, Perhutani also provides a means for public complaints raised by the Company regarding environmental management so that the fulfillment of Perhutani's responsibility towards the environment can be carried out properly. Complaints about environmental problems can be submitted through the contact center (contact_centre@perhutani.co.id) and Perhutani's social media.

Komitmen Perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan diwujudkan melalui penyediaan dana lingkungan yang secara langsung melekat dalam semua kegiatan usaha Perusahaan sebagai pengelola sumber daya hutan. Atas komitmen yang tinggi terhadap kepedulian lingkungan, selama tahun pelaporan, Perusahaan tidak mendapat pengaduan atau keluhan yang berkait dengan masalah lingkungan. (Jika ada keluhan/ pengaduan, mohon disebutkan apa kasusnya, kapan, bagaimana solusi yang diambil).

The Company's commitment to maintaining environmental sustainability is realized through the provision of environmental funds which are directly attached to all of the Company's business activities as forest resource managers. Due to its high commitment to environmental care, during the reporting year, the Company did not receive any complaints or complaints related to environmental issues. (If there is a complaint/ complaint, please state what the case was, when, how the solution was taken).

Sertifikasi Lingkungan Hidup

Perhutani melakukan sertifikasi dan audit terkait aspek lingkungan hidup sebagai bentuk pengawasan dalam menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial. Diantaranya Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sertifikasi Standar FSC-FM dan FSC-CW serta ISO 9001:2015.

Environmental Certification

Perhutani conducts certification and audits related to environmental aspects as a form of supervision in carrying out social responsibility activities. These include the Sustainable Production Forest Management Certificate (PHPL), the FSC-FM and FSC-CW Standard certifications and ISO 9001:2015.

Dampak Kuantitatif yang Diperoleh

Ada banyak dampak yang didapat dengan banyaknya program pro-lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan. Program penghijauan misalnya, selain melindungi tanah dari kemungkinan longsor, juga berperan dalam menambah pasokan oksigen karena pepohonan adalah penghasil oksigen. Penghematan kertas dengan *paperless system* otomatis mengurangi penebangan pohon sebagai bahan baku untuk membuat kertas. Sedangkan penggunaan lampu hemat energi dan menggunakan air secara bijaksana/tidak boros mengurangi pengeluaran biaya untuk penggunaan listrik dan air.

Quantitative Impact Obtained

There are many impacts that can be obtained from the many pro-environment programs carried out by the Company. The reforestation program, for example, in addition to protecting the soil from possible landslides, also plays a role in increasing the supply of oxygen because trees are oxygen producers. Paper saving with automatic paperless system reduces the cutting of trees as raw material for making paper. Meanwhile, the use of energy-saving lamps and using water wisely/not wastefully reduces costs for electricity and water use.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Social Responsibility on Occupational Health, Safety and Employment (OHS)

Sebagai entitas usaha yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, Perhutani berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis patuh pada semua peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan-peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

As a business entity that is committed to carrying out responsibilities to all stakeholders, Perhutani has an interest in ensuring that every business activity complies with all applicable laws and regulations, including regulations related to employment and Occupational Health and Safety (K3).

ASPEK KETENAGAKERJAAN
Social Responsibility On Occupational

Kebijakan

Perhutani sangat memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan senantiasa mendorong tingkat produktivitas dan efisiensi yang optimal. Untuk mencapai hal tersebut, penciptaan iklim kerja yang kondusif menjadi aspek vital untuk membuat karyawan merasa nyaman di tempat kerja dan mampu mencurahkan kemampuan terbaiknya. Salah satu cara yang ditempuh Perhutani adalah dengan membangun suatu sistem pengelolaan kinerja SDM yang berorientasi pada pencapaian produktivitas, yang diterapkan bagi individu, unit kerja, dan karyawan.

Rumusan & Rencana Kegiatan 2020

Rencana kegiatan CSR yang terkait dengan ketenagakerjaan pada tahun 2020 adalah melaksanakan pengelolaan SDM dengan menerapkan kesetaraan kesempatan dalam pelaksanaan program rekrutmen, kesempatan kerja dan program-program pengembangan pegawai serta implementasi hubungan industrial. Perhutani juga merencanakan *review* terhadap ketentuan remunerasi pegawai agar selalu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kompetitif pada industri yang sama.

Implementasi Tanggung Jawab Terhadap Aspek Ketenagakerjaan

Hubungan Industrial

Perhutani menyadari bahwa manajemen sumber daya manusia yang baik berawal dari

Policy

Perhutani highly concerns quality of the human resources and always encourages optimum productivity and efficiency levels. To achieve these conditions, establishment of conducive working climate becomes a vital aspect to make the employees comfortable at the working place and capable to dedicate their best endeavors. An initiative that has been implemented by Perhutani is by developing a HR performance management system oriented towards productivity achievement that is applied for individual, work unit and the employees.

Formulation & Activities Plan in 2020

The plan for CSR activities related to employment in 2020 is to implement HR management by implementing a system of equal opportunities in the implementation of recruitment programs, employment opportunities and employee development programs and the implementation of industrial relations. Perhutani also plans to review employee remuneration provisions to always be in accordance with applicable laws and competitive provisions in the same industry.

Implementation of Responsibilities on Employment Aspects

Industrial relations

Perhutani realizes that good human resource management begins with good relations

hubungan baik antara karyawan dengan atasan. Oleh karena itu, Perhutani terus berupaya memperkuat kebersamaan di luar tempat kerja dengan memberikan kesempatan pada seluruh karyawannya untuk mengembangkan kompetensi dan mengaktualisasikan bakat dan minat di luar pekerjaannya. Masih terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perhutani berusaha untuk mematuhi semua peraturan dan ketetapan yang berhubungan dengan tenaga kerja untuk meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia dan hubungan kerja.

Kebebasan Berasosiasi

Sesuai amanat yang tertuang pada Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 255/ Men/2003 tentang Tatacara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit, Perhutani telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun bersama dengan serikat pekerja dan ditinjau secara berkala setiap dua tahun.

Jam Kerja

Untuk menghindari eksploitasi tenaga kerja secara berlebihan, Perhutani telah menetapkan batasan waktu kerja bagi karyawan. Waktu kerja disesuaikan dengan daerah kerja serta sifat pekerjaan. Dalam hal karyawan menjalankan pekerjaan melebihi waktu kerja yang ditentukan, maka kepada karyawan diberikan kompensasi berupa upah lembur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Remunerasi

Perhutani menyediakan program kompensasi dan manfaat yang mencakup fasilitas kesehatan yang komprehensif, baik preventif maupun kuratif, antara lain fasilitas rawat inap, rawat jalan, persalinan, kacamata, perawatan gigi, pemeriksaan laboratorium hingga

between employees and superiors. Therefore, Perhutani continues to strive to strengthen togetherness outside the workplace by providing opportunities for all employees to develop competencies and actualize talents and interests outside of work. Still related to the labor aspect, Perhutani strives to comply with all regulations and provisions related to labor to minimize violations of human rights and employment relations.

Freedom To unite

According to the mandate disclosed in Law No.13 of 2003 on Employment, and Minister of Manpower and Transmigration Decree No. Kep 255/Men/2003 concerning Bipartite LKS Establishment Procedure and Membership Composition, Perhutani has a Collective Labor Agreement (CLA) that is prepared altogether with the workers union and reviewed regularly every two year.

Working Hours

To avoid excessive labor exploitation, Perhutani has stipulated working hours limit for the employees. The working hours is adjusted with working area and working nature. In the case when the employees work overtime exceeding the stipulated working hours, the employees will received overtime fee compensation as regulated in the Law.

Remuneration

Perhutani provides compensation program and benefits including comprehensive health facilities, both preventive and curative, namely inpatient, outpatient, childbirth, sunglasses, dental, laboratory check up to medical check-up facilities and other facilities using third parties.

medical check up dan lain sebagainya, dengan menggunakan pihak ketiga.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Perhutani menyediakan berbagai macam sarana yang memungkinkan karyawan melaporkan permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan Perusahaan diantaranya menyediakan kotak khusus (kotak saran) untuk menampung aspirasi karyawan. Untuk lebih efektif pelaksanaan masalah ketenagakerjaan, Perusahaan juga melakukan komunikasi dengan Serikat Pekerja dan perwakilan unit kerja khususnya menyangkut hubungan industrial, selain mengefektifkan komunikasi antara antasan dan bawahan sebagai bagian dari pelaksanaan partisipasi karyawan.

Mekanisme pengaduan terkait hubungan industrial khususnya media keluh kesah diatur secara jelas dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati oleh Serikat Perkerja dengan Perusahaan.

Kesetaraan dalam Aktivitas Ketenagakerjaan

Perhutani memberikan kesempatan pengembangan kompetensi dan pengembangan karir yang sama bagi seluruh karyawan tanpa membedakan gender, ras, warna kulit, agama, kondisi fisik, atau asal negara mereka. Proses seleksi karyawan untuk pengembangan kompetensi dan pengembangan karir dilakukan melalui talent review pada setiap jenjang dengan mempertimbangkan kemampuan, pengetahuan, perilaku, kinerja, serta potensi dari setiap karyawan.

Employment Issue Reporting Mechanism

Perhutani provides various channels that enable the employees to report employment issue in the Company namely providing special box (suggestion box) to accommodate employee's aspiration. To have more effective implementation of the employment issue reporting, the Company also engages in communication with Workers Union and work unit representatives, particularly related to industrial relation, besides improving effectiveness of communication between leader and subordinates as part of employee participation implementation.

Mechanism of reporting issue related to industrial relation, particularly complaining channel is regulated clearly in the Collective Labor Agreement (CLA) that is agreed between the Workers Union and the Company.

Equality In Employment Activity

Perhutani provides equal opportunity for competency and career developments for all employees without discriminating gender, race, skin color, religion, physical condition or destination country. Employee selection process for the competency and career developments is done through talent review in every level by considering individual capability, knowledge, attitude, performance and potential of every employee.

Dampak Kualitatif & Kuantitatif

Sepanjang tahun 2020, tidak pernah ada laporan terjadinya tindak diskriminasi yang terkait dengan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, afiliasi politik, kebangsaan maupun status sosial di unit kerja. Dengan demikian, tidak terdapat dampak negatif terhadap keuangan Perusahaan terkait dengan kesetaraan gender dan kesempatan kerja.

Qualitative and Quantitative Impacts

Throughout 2020, there is no report for any case of discrimination related to race, religion, skin color, gender, political affiliation, nationality or social statius at the work unit. Therefore, there is no negative impact on the Company's Financial aspect realted to gender equality and career opportunity.

ASPEK KESELAMATAN KERJA

Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Kerja

Perhutani telah aktif secara berkala melakukan identifikasi bahaya/aspek dan penilaian terhadap risiko/dampak K3, Lingkungan dan Pengamanan yang ada dalam semua aktivitas dan aset perusahaan. Hasil dari identifikasi dan penilaian berupa program mitigasi risiko menjadi salah satu bahan pertimbangan manajemen dalam menyusun Program K3, Lingkungan dan Pengamanan perusahaan guna mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan serta menjaga keamanan dan mengantisipasi ancaman baik dari internal maupun eksternal yang berdampak negatif bagi sumber daya dan produk perusahaan. Program mitigasi risiko tersebut dipantau dan dievaluasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen guna memastikan tingkat efektivitas penerapan perbaikan secara berkelanjutan.

Perhutani has actively and regularly identified hazard/aspect and assessment on OHS risk/impact, Environment and Security in all of the Company's activity and assets. Result of the identification and assessment in form of risk mitigation program as one of consideration for the management in designing OHS, Environment and Security Program in the Company to prevent occupational accident, occupational disease, environmental pollution as well as protect security and anticipate threat both from internal and external environments with negative impact for the Company's resources and products. The risk mitigation program is monitored and evaluated in the Management Review Meeting to ensure level of effectiveness in the improvement plan continuously

Kebijakan

Sumber daya manusia merupakan aset penting yang dimiliki Perhutani dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Perlindungan dan jaminan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) karyawan akan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan hidup karyawan. Oleh sebab itu, Perhutani memiliki komitmen untuk mematuhi persyaratan peraturan Perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait kesehatan dan keselamatan kerja serta mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan dibentuknya organisasi baru bidang K3 di Perhutani.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Pengelolaan Kehutanan dari mulai hulu sampai dengan hilir dengan tingkat risiko K3 yang cukup tinggi, Perhutani berkomitmen melakukan pengendalian risiko K3 dari setiap aktivitas baik produksi dan non produksi yang diatur didalam kebijakan Sistem Manajemen K3 atau SMK3, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 275/ KPTS/Dir/2008 tentang Pedoman SMK3 dan lebih terperinci dalam Prosedur Kerja (PK) No.12.1-01 tentang identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3.

Pelaksanaan program mitigasi risiko K3, penyediaan sarana dan prasarana K3 yang sesuai dengan standar serta peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kesadaran karyawan melalui sosialisasi maupun pelatihan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap K3. Perhutani secara konsisten menerapkan standar pengelolaan hutan secara lestari dan pengelolaan industri pengolahan produk lanjutan yang didalamnya terdapat aturan yang mensyaratkan menjamin unsur keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerjanya, terbukti dengan diperolehnya sertifikat FSC dari PT.SGS Certificate SGS–FM/COC-010716

Policy

Human resources are important assets owned by Perhutani in achieving the company's vision and mission. Protection and guarantees for occupational health and safety (OHS) will contribute to increasing work productivity and employee welfare. Therefore, Perhutani has a commitment to comply with the requirements of legislation as well as other requirements related to occupational health and safety as well as to avoid workplace accidents and occupational diseases through establishment of a new OHS organization in Perhutani.

As a company operated inupstream to downstream Forestry Management with high level of OHS risk, Perhutani is committed to carrying out OHS risk control from each activity both production and non-production which is regulated in the OHS or SMK3 Management System policy, according to the Board of Directors Decree Number 275/KPTS/ Dir/2008 concerning SMK3 Guidelines and more comprehensively disclosed in Work Procedure (PK) No.12.1-01 concerning hazard identification and OHS risk assessment.

Implementation of the OHS risk mitigation program, provision of OHS facilities and infrastructure that are in accordance with the standards as well as increasing the knowledge, abilities and awareness of employees through socialization and training are part of corporate social responsibility towards the OHS aspect. Perhutani consistently applies sustainable forest management standards and advanced product processing industry management, which includes the regulation requiring to guarantee occupational safety and health elements for the workforce, as evidenced by the FSC certificate from PT SGS-FM/ COC-010716 from 2013 , PHPL

dari tahun 2013, Sertifikat PHPL oleh PT. Equality Indonesia No. 040.1/EQC. PHPL/V/2016 dan ISO 9001: 2015 oleh PT. KAN sertifikat No. QMS/147.09.

Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan Kerja (K2LK)

Fungsi yang terdapat pada bidang Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan Kerja (K2LK) pada Satuan Manajemen Perubahan (SMP) adalah memastikan penerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 di seluruh unit kerja. Hal tersebut merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Berdasarkan prinsip:

1. Penetapan Kebijakan K3
2. Perencanaan K3
3. Pelaksanaan rencana K3
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Realisasi pekerjaan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian KPI, *Frequency Rate of Accident* (FR) Tahun 2020 adalah 1 Kecelakaan per 1 juta jam kerja dan *Severity Rate of Accident* (SR) Tahun 2020 adalah 333 Hari per 1 juta jam kerja (turun 31,7% dari Tahun 2019).

2. Jumlah hari ijin tidak masuk kerja karena sakit adalah 12.918 hari (turun 15,5% dari tahun 2019).

3. *Incident Rate* turun 33% dari tahun sebelumnya

4. Penetapan Kebijakan K3 dan Kebijakan Khusus Tahun 2020.

Certificate by PT. Equality Indonesia No. 040.1/EQC.PHPL /V/2016 and ISO 9001: 2015 by PT. KAN certificate No. QMS/147.09.

Occupational Health, Safety, and Environment (HSE)

The function contained in the field of Occupational Health, Safety, and Environment (HSE) in the Change Management Unit (SMP) is to ensure the implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) in accordance with Government Regulation no. 50 of 2012 concerning the Implementation of SMK3 in all work units. This is part of the company's overall management system in order to control risks related to work activities in order to create a safe, efficient and productive workplace. Based on the principle:

1. Establishment of OHS Policy
2. OHS Planning
3. Implementation of the OHS plan
4. OHS performance monitoring and evaluation
5. Review and Improvement of SMK3 Performance

Realization of work in 2020 is as follows:

1. Achievement of KPI, Frequency Rate of accident (FR) in 2020 is 1 accident per 1 million working hours and Severity Rate of accident (SR) in 2020 is 333 Days per 1 million working hours (down 31.7% from 2019) .

2. The number of days of absence from work due to illness is 12,918 days (down 15.5% from 2019)

3. Incident Rate decreased by 33% from the previous year

4. Stipulation of OHS Policy and Special Policy for 2020

5. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM yang menangani K3.

6. Pelatihan Boiler yang dilaksanakan di Pusdikbang SDM sebanyak 38 orang yang terbagi dalam 2 *batch* pada bulan Februari dan Maret 2020.

7. Coaching dan counseling dengan Ahli K3 Umum masing-masing Satuan Unit Organisasi melalui webinar terkait adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19.

8. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
   a. Evaluasi kepatuhan peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya yang berlaku Perum Perhutani telah menerapkan PP 50. Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 serta telah melakukan evaluasi didasarkan pada pemenuhan persyaratan perundang-undangan dan sertifikasi FSC, Controlled Wood, PHPL, Canopy, SMK3, ISO 9001:2015.
   b. Penyediaan sarana dan prasarana K3 Gedung baru Perhutani melalui penyusunan dokumen Analisis kebutuhan sarana prasarana K3, Selama proses persiapan gedung baru. Kebutuhan Sarpra K3 telah ditindaklanjuti dengan adanya pemenuhan sarana dan pemasangan rambu-rambu keselamatan kerja pada gedung baru.
   c. Pemantauan dan penilaian terhadap persiapan pembukaan kembali wisata di Perum Perhutani.

9. Sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan bahwa Statistika kecelakaan kerja berupa data kecelakaan kerja, ijin tidak masuk kerja karena sakit dan meninggal dunia karena

5. Improving the capability and competence of HR that handles K3

6. Boiler training held at the HR Pusdikbang as many as 38 people divided into 2 batches in February and March 2020.

7. Coaching and counseling with General K3 Experts from each Organizational Unit through webinars related to adapting new habits during the Covid-19 pandemic

8. OHS performance monitoring and evaluation
   a. Evaluation of compliance with OHS regulations and other applicable requirements Perum Perhutani has implemented PP 50. Year 2012 concerning the Implementation of SMK3 and has conducted evaluations based on compliance with statutory requirements and certification of FSC, Controlled Wood, PHPL, Canopy, SMK3, ISO 9001 :2015.
   b) Provision of K3 facilities and infrastructure for new Perhutani buildings through the preparation of a document Analysis of K3 infrastructure needs, during the process of preparing new buildings. The need for K3 Sarpra has been followed up with the fulfillment of facilities and installation of work safety signs in new buildings.
   c) Monitoring and assessment of preparations for reopening tourism in Perum Perhutani

9. In accordance with the regulation of the Minister of Manpower No. 03/MEN/1998 concerning Procedures for Reporting and Inspection of Accidents that the statistics of work accidents in the form of work accident data, permits not to come to work due to

sakit sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

illness and death due to illness up to Quarter IV of 2020 compared to 2019 are as follows

KESEHATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN KERJA
Health, Safety, and Work Environment

Uraian / Description		Jumlah / Total		Tren Perubahan / Trending Change
		2019	2020	
Kecelakaan Kerja	Work accident			
Jumlah Kecelakaan Kerja	Total of Work Accidents	18	12	Turun/ Decrease 33%
Cacat Tetap	Permanent Disability	4	-	Turun/ Decrease 400%
Kehilangan fungsi mata/ telinga	Loss of function eyes/ ears	-	-	-
Meninggal/Lumpuh Total	Died/Total Paralysis	3	2	Turun/ Decrease 30%
Luka Ringan	Minor Injuries	11	10	Turun/ Decrease 9%
Izin Sakit	Sick leave			
Jumlah Orang	Number of people	5.553	3.879	Turun/ Decrease 30,14%
Jumlah Hari	Number of days	15.287	12.918	Turun/ Decrease 15,5%
Meninggal karena Sakit	Died due to illness	123	119	Turun/ Decrease 3,3%

Dari hasil statistika kecelakaan kerja tersebut maka *Frequency Rate of accident* (FR) tahun 2020 adalah 1 Kecelakaan per 1 juta jam kerja dan *Severity Rate of accident* (SR) tahun 2020 adalah 333 hari per 1 juta jam kerja.

From the results of the work accident statistics, the Frequency Rate of accident (FR) in 2020 is 1 accident per 1 million working hours and the Severity Rate of accident (SR) in 2020 is 333 days per 1 million working hours.

10. Pemantauan perkembangan kasus Covid-19 di Perhutani
    a. Penyusunan dan sosialisasi 7 Protokol Kesehatan dalam Pencegahan & Penanganan Covid-19 yang terdiri dari Protokol umum Penanganan Covid-19 Perum Perhutani; Protokol Pelanggan; Pemasok; Mitra usaha; Stakeholder Lain; Mobilitas & Transportasi karyawan serta Protokol Penanganan Karyawan OTG, ODP, PDP dan Konfirmasi Positif Covid-19 di lingkungan kerja Perum Perhutani
    b. Bersinergi dengang Tim Gugus Tugas dan *Covid Ranger* segenap SUO dalam

10. Monitoring the development of Covid-19 cases in Perhutani
    a) Preparation and socialization of 7 Health Protocols in the Prevention & Handling of Covid-19 which consists of the General Protocol for Handling Covid-19 of Perum Perhutani; Customer Protocol; Suppliers; Business partner; Other Stakeholders; Employee mobility & transportation as well as OTG, ODP, PDP Employee Handling Protocol and Covid-19 Positive Confirmation in Perum Perhutani work environment
    b) Synergize with the Task Force and Covid Ranger Teams of all SUOs in an effort to

upaya pengendalian penyebaran Covid-19 dengan hasil pemantauan tahun 2020, Terdapat 303 Kasus pada karyawan dan keluarga karyawan Perhutani.

c. Pemantauan ketersediaan APD dan fasilitas kesehatan di perimeter.
d. Pemantauan terhadap sarana & prasarana penangangan Covid-19 untuk karyawan.
e. Pemantauan *Test Rapid* dan *Swab* PCR sebanyak 3.454 orang atau 19,18% dari jumlah karyawan.
f. Pemantauan bantuan sosial akibat dampak Covid-19.

Turnover Karyawan

Seiring dengan perkembangan kinerja Perhutani dan peningkatan profesionalisme pengelolaan human capital, maka tingkat *turnover* karyawan juga semakin menurun setiap tahunnya. Berikut disampaikan data *turnover* karyawan pada periode dua tahun terkahir. Dengan adanya keselarasan tujuan, maka *engagement* karyawan akan meningkat dan akan menurunkan tingkat *turnover* karyawan.

Manfaat untuk Stakeholders

Perhutani menyatakan bahwa perusahaan tunduk pada Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dan memberikan jaminan sosial sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992. Perusahaan tidak memperkenankan adanya tindakan diskriminasi di dalam perusahaan baik itu berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, maupun ras sehingga karyawan dapat merasa nyaman bekerja di dalam perusahaan tanpa adanya perlakuan yang berbeda.

Kegiatan-kegiatan dalam lingkungan perusahaan di atas berguna untuk meningkatkan hubungan yang erat diantara karyawan perusahaan, memotivasi karyawan dan membangun semangat dan budaya kompetisi yang sehat di lingkungan

control the spread of Covid-19 with the results of monitoring in 2020, there were 303 cases of employees and families of Perhutani employees.

c) Monitoring the availability of PPE and health facilities at the perimeter.
d) Monitoring of Covid-19 handling facilities & infrastructure for employees.
e) Monitoring of Rapid Test and PCR Swab as many as 3,454 people or 19.18% of the total number of employees.
f) Monitoring of social assistance due to the impact of Covid-19.

Employee Turnover

Along with the development of Perhutani's performance and the increase in professionalism of human capital management, the employee turnover rate is also decreasing every year. The following is the employee turnover data for the last two years. With the alignment of goals, employee engagement will increase and will reduce employee turnover rates.

Benefits for Stakeholders

Perhutani stated that the company complies with the Labor Law no. 13 of 2003 and provides social security in accordance with Law no. 3 of 1992. The company does not allow any act of discrimination within the company whether based on gender, ethnicity, religion, or race so that employees can feel comfortable working in the company without any different treatment.

The activities in the company environment above are useful for increasing close relationships among company employees, motivating employees and building a spirit and a healthy competition culture within the company. This is done by Perhutani

perusahaan. Hal ini dilakukan oleh Perhutani karena perusahaan menyadari bahwa karyawan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dan diharapkan karyawan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, menciptakan situasi kerja dan iklim produktivitas yang lebih kondusif.

because the company realizes that employees are one of the most important parts in carrying out the company's business activities and it is hoped that employees can foster a spirit of togetherness, create a more conducive work situation and productivity climate.

Informasi Tentang Risiko Bidang Ketenagakerjaan

Resiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena program K3 tidak berjalan dengan baik pada suatu perusahaan. Hal ini dapat berdampak pada tingkat produktivitas karyawan. Pada umumnya kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor yaitu manusia dan lingkungan. Faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan atau kurang terampilnya pekerja itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan penebangan.

Information About Employment Risks

The risk of accidents and occupational diseases often occurs because the OHS program does not run well in a company. This can have an impact on employee productivity levels. In general, work accidents are caused by two factors, namely humans and the environment. The human factor is unsafe actions from humans such as deliberately violating mandatory work safety regulations or the lack of skilled workers themselves. Meanwhile, environmental factors are unsafe conditions from the work environment which include logging equipment.

Mengidentifikasi bahaya memberikan berbagai macam manfaat, yaitu dapat mengurangi peluang kecelakaan, memberikan pemahaman bagi semua pihak mengenai potensi bahaya dari aktifitas perusahaan, memberikan informasi mengenai sumber bahaya dalam perusahaan kepada semua pihak, serta sebagai landasan sekaligus masukan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif.

Identifying hazards provides various benefits, which can reduce the chance of accidents, provide understanding for all parties regarding the potential hazards of the company's activities, provide information about sources of danger within the company to all parties, as well as as a basis as well as input for determining appropriate prevention and security strategies and effective.

Jangkauan Lingkup Pengaruh Perusahaan dalam Bidang Ketenagakerjaan

Dalam melakukan pekerjaan, Perhutani memiliki tanggung jawab sosial pada karyawan seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka, memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis, dan tidak

The Company's Scope of Influence in the Employment Sector

In carrying out its work, Perhutani has social responsibilities to employees such as providing comfortable and appropriate facilities for their employees, providing salaries in accordance with written work agreements, and not discriminating

melakukan diskriminasi dalam hal apapun pada karyawan.

in any way to employees.

Salah satu hal terpenting dalam tahapan pelaksanaannya adalah adanya komitmen dari manajemen Perhutani, yang telah dituangkan dalam kebijakan perusahaan terkait dengan CSR. Tahapan berikutnya yaitu penerapan, yang pada dasarnya adalah upaya untuk memobilisasi berbagai sumber daya dan prasarana (infrastuktur) untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang telah dituangkan dalam proses perencanaan. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sistem dan prosedur, serta peralatan merupakan sumber daya terpenting yang harus disiapkan disamping aspek kelembagaan.

One of the most important things in the implementation phase is the commitment from the management of Perhutani, which has been stated in the company's policies related to CSR. The next stage is implementation, which is basically an effort to mobilize various resources and infrastructure (infrastructure) to achieve the goals and objectives that have been outlined in the planning process. Human resources, financial resources, systems and procedures, and equipment are the most important resources that must be prepared in addition to the institutional aspect.

Perhutani secara aktif melibatkan pihak lain dalam upaya menjaga kepentingan karyawan, baik melalui perjanjian kerja Bersama (PKB) maupun kebijakan dibidang SDM. Selain itu, Perhutani juga mempromosikan perlindungan dan tanggung jawab kepada tenaga kerja kepada mitra kerja perusahaan melalui perikatan perjanjian kerjasama.

Perhutani actively involves other parties in an effort to protect the interests of employees, both through Collective Labor Agreements (PKB) and policies in the field of HR. In addition, Perhutani also promotes protection and responsibility for workers to company partners through cooperation agreements.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pelanggan

Social Responsibility on Customers

Dalam rangka memastikan pemenuhan standar pelayanan kepada pelanggan, Perhutani memiliki kebijakan untuk memastikan hal tersebut dijalankan melalui berbagai standar operasi dan prosedur yang terkait dengan pelanggan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.

In order to ensure the fulfillment of service standards to customers, Perhutani has a policy to ensure this is carried out through various standard operating and customer-related procedures. This is done to provide the best quality service to customers.

Kebijakan dan Komitmen

Perhutani menempatkan kepuasan pelanggan sebagai aspek yang mendasar dan penting. Untuk itu, Perhutani terus meningkatkan produk dan mutu layanan jasanya dengan memprioritaskan aspek kesehatan, keselamatan kerja seluruh karyawan, pelanggan, mitra kerja, maupun pemangku kepentingan lain serta melakukan lindung lingkungan dan aset perusahaan sebagai komitmen dalam mewujudkan kepuasan pelanggan. Sebagai pedoman pelaksanaan untuk memastikan kepuasan pelanggan terhadap produk, Perhutani menerapkan ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu untuk berbagai layanan yang dimiliki. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* - GCG), Manajemen Risiko Perusahaan (*Corporate Risk Management* - CRM), serta regulasi lain yang terkait dengan perbaikan kinerja Perusahaan.

Policy And Commitment

Perhutani views customer satisfaction as a fundamental and important aspect. For this reason, Perhutani continues to improve its products and service quality by prioritizing the health and safety aspects of all employees, customers, partners and other stakeholders as well as protecting the environment and company assets as a commitment to realizing customer satisfaction. As an implementation guideline to ensure customer satisfaction with products, Perhutani implements ISO 9001: 2008 Quality Management System for its various services, ISO 14001 environmental management system. Good Corporate Governance (Good Corporate Governance - GCG), Corporate Risk Management (CRM), as well as other regulations related to improving Company performance.

Selain mengacu pada ISO, Perhutani memiliki kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan sifat bisnis untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan, dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Menerapkan regulasi dan standar baik yang berlaku secara nasional maupun internasional dan terus memperbaharuinya secara rutin dan berkala.
2. Menyiapkan organisasi dan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional
3. Menggunakan teknologi dan sarana-prasarana kerja yang tepat dan sesuai standar
4. Melakukan perbaikan dalam berbagai aspek kualitas

Apart from referring to ISO, Perhutani has policies in accordance with the nature of its business to ensure the quality of the products produced, with the following policies:

1. Implement regulations and standards both nationally and internationally and keep updating them regularly & periodically.
2. To prepare a competent and professional organization and human resources
3. Using appropriate technology and work infrastructure and standards
4. Make improvements in various aspects of quality

Layanan dan Pengaduan Pelanggan

Perhutani menyediakan fasilitas pusat informasi dan layanan bagi para pelanggan melalui *Call Centre* 1500 235 untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan.

Customer Care and Complaint

Perhutani provides information and customer care facilities via Call Centre 1500 235 to process the customer complaints.

Asuransi Pengunjung Wisata

Perhutani memberikan perlindungan kepada setiap orang yang mengunjungi wisata alam Perhutani. Bekerja sama dengan Asuransi Syariah Amanah Giri Artha, Perhutani melindungi pelanggan wisata di sebagian besar lokasi wisata wilayah Perhutani. Asuransi perlindungan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan Wisata Perhutani.

Tourism Visitors Insurance

Perhutani provides protection to all visitors of Perhutani's ecotourism. In cooperation with Amanah Giri Artha Sharia Insurance, Perhutani protects the visitors in most of tourism sites in Perhutani area. The protection insurance is manifestation of corporate social responsibility to the visitors of Perhutani's ecotourism sites.

Monitoring Tingkat Kepuasan Pelanggan

Sebagai parameter bagi keberhasilan usaha, Perhutani mengakomodir kebutuhan pelanggan melalui monitoring kepuasan maupun keluhan pelanggan. Monitoring tingkat kepuasan maupun keluhan pelanggan dilakukan melalui interaksi personal karyawan Perusahaan dengan para konsumen. Masukan dan kritikan dari seluruh pelanggan menjadi poin penting bagi Perusahaan untuk semakin meningkatkan kualitas layanan dan mempertahankan market share-nya dalam persaingan usaha.

Perhutani melakukan pengukuran *Customer Satisfication Index* (CSI) atau Index Kepuasan Pelanggan dan *Customer Engagement Index* (CEI) atau Index Keterikatan Pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan keterikatan pelanggan pada produk dan layanan yang disediakan perusahaan. Beberapa langkah strategis Perhutani dalam meningkatkan pelayanan, melalui:

1. Perhutani melanjutkan implementasi program ISO 26000. Dalam ISO 26000, tanggung jawab Perhutani diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan yang sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma etika bisnis; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.
2. Melengkapi Sertifikat Standar FSC: *Forest Stewardship Council* untuk 8 KPH, Sertifikat *Controlled Wood* untuk 49 KPH, Sertifikasi PHL untuk seluruh KPH Di Perhutani (57 KPH).

Customer Satisfaction Survey

As parameter for the business success, Perhutani accommodates needs of the customers through customer satisfaction and complaint monitoring. The customers satisfaction and complaint monitoring is done through personal interaction between the Company's employees with the consumers. Feedback and crticisim received from the customers will become important points for the Company to further improve service quality and maintain market share in the business competition.

Perhutani performs Customer Satisfaction Index (CSI) and Customer Engagement Index (CEI) to measure customer satisfactionandengagement index over the products and services provided by the company. Some strategic initiatives taken by Perhutani in improving the services are as follows:

1. Perhutani continues implementation of ISO 26000 program. In the ISO 26000, responsibility of Perhutani is actualized in transparent and ethical conducts that are in line with sustainable development and public welfare; considering expectation of the stakeholders that is in line with the prevailing law and business ethics norms; as well as overall integrated with the organization.
2. Complete the FSC Standard Certificate: Forest Stewardship Council for 8 KPHs, Controlled Wood Certificate for 49 KPHs, PHL certification for all KPHs in Perhutani (57 KPH).

Rencana Program yang Ditetapkan Manajemen dan Review

Perhutani telah menetapkan rencana kerja untuk meningkatkan kepuasan konsumen dengan melakukan kegiatan penyeleseian pengaduan konsumen dan pelaksanaan survei kepuasan konnsumen. Perhutani menargetkan bahwa penyelesaian pengaduan di bawah *Service Level Agreement* (SLA).

Program Plan Implemented by The Management And Review

Perhutani has implemented work plan to increase consumer's satisfaction by conducting consumer complaint settlement activity and consumer satisfaction survey. Perhutani has targeted the complaint settlement below the Service Level Agreement (SLA).

Isu yang Relevan, Manfaat, dan Risiko

Dalam berhadapan dengan konsumen, perusahaan haruslah bersikap jujur dalam menjalankan bisnis, melakukan pemasaran, dan menjamin kualitas serta ketersediaan atas produk dan jasa yang dihasilkan. Perhutani memandang isu yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak konsumen adalah:

1. *Fair Marketing, Factual and Unbiased Information and Fair Contractual Practices* (Pemasaran yang Jujur, Faktual, dan Tidak Bias)
2. *Protecting Consumer's Health and Safety* (Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Konsumen)
3. *Sustainable Consumption* (Konsumsi yang Berkelanjutan)
4. *Consumer Service, Support, Complaint and Dispute Resolution* (Layanan Konsumen, Dukungan, dan Penyelesaian Keluhan)
5. *Consumer Data Protection and Privacy* (Perlindungan Data dan Kerahasiaan Konsumen)
6. *Access to Essential Services* (Akses Terhadap Layanan Esesnsial)
7. *Education and Awareness* (Edukasi dan Penyadaran)

Relevant Issues, Benefits and Risk

In dealing with the consumers, the Company shall be honest in running the business, performing marketing and guarantees products and services quality and availability. Perhutani views considerable issues in fulfilling consumer's rights are as follows:

1. Fair Marketing, Factualand Unbiased Information and Fair Contractual Practices.
2. Protecting Consumer's Health and Safety.
3. Sustainable Consumption.
4. Consumer Service, Support, Complaint and Dispute Resolution.
5. Consumer Data Protection and Privacy.
6. Access to Essential Services.
7. Education and Awareness

Keselamatan dan kesehatan pelanggan merupakan tujuan utama penerapan sistem manajamen mutu. Perhutani selalu berupaya memastikan bahwa produk yang dikirimkan kepada pelanggan selalu dalam kondisi baik dan tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan dan kesehatan pelanggan. Untuk itu, Perhutani telah menyusun dan menerapkan standar-standar kualitas kerja dan layanan dalam bentuk *Quality Procedure, Work Instruction*, Kebijakan Bisnis, Prosedur Kerja, dan Instruksi Kerja. Pengendalian mutu tersebut dilaksanakan Perhutani pada setiap produk dan jasa yang diberikan oleh Perusahaan.

Customer's safety and health become main purposes of the quality management system implementation. Perhutani always attempts to ensure that the products delivered to the customers are always in good condition and not causing negative impact on customer's safety and health. Therefore, Perhutani has formulated and implemented work and service quality standards in form of Quality Procedure, Work Instruction, Business Policy, Work Procedure and Work Instruction. The quality control is implemented by Perhutani in every products and services delivered by the Company.

Selama periode pelaporan tidak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan terkait kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa yang diberikan. Sistem manajemen mutu Perhutani dirancang untuk meningkatkan kinerja Perusahaan yang berbasis pada upaya peningkatan perbaikan pelayanan yang berkelanjutan dengan menerapkan berbagai strategi dengan mengendalikan kesesuaian penggunaan sistem standar terhadap peraturan perundang-undangan, persyaratan pemangku kepentingan, serta kebutuhan organisasi. Dengan penerapan hal tersebut, selama tahun 2020, Perhutani tidak menerima sanksi denda ataupun sanksi hukum terkait dengan peraturan penyediaan dan penggunaan produk dalam menjalankan aktifitas produksi.

Violation against any regulation related to products and services health and safety was not found during the reporting period. Perhutani's quality management system is designed to improve performance of the Company based on continuous service improvement initiative by implementing various strategies and controlling compliance of the standard system to the regulation, requirements from the stakeholders and organization's needs. Through implementation of this initiatives, throughout 2019, Perhutani did not receive any penalty or legal punishment related to products provision and use regulation in running the production activity.

Informasi Jangkauan Lingkup Pengaruh dan Pembangunan Berkelanjutan

Perhutani senantiasa berupaya menerapkan budaya *service excellence* untuk memberikan produk yang *High Quality, Reasonable Cost and On Time Delivery* sehingga dapat bersaing dengan kompetitor.

Information on Impact and Scope of Sustainable Development

Perhutani always attempts to implement service excellence culture to deliver products with High Quality, Reasonable Cost and On Time Delivery to compete with our competitors.

Peningkatan mutu melalui *service excellence* yang dihasilkan sehingga sesuai dengan tuntutan dan harapan pelanggan. Untuk menghasilkan produk dan jasa terbaik, tidak hanya fasilitas dan sarana yang harus dipenuhi, namun juga kompetensi personil. Training-training yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi personil harus direncanakan sehingga seluruh kebutuhan yang terkait *manpower* dapat terpenuhi. Dengan tersedianya sarana, fasilitas dan kapabilitas, upaya Perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang terbaik akan semakin mudah.

Quality improvement through service excellence to fulfill customer's demands and expectation. To product excellent products and services, personnel competency is also fulfilled besides the facilities and infrastructure. Trainings that are related with personnel competency development shall be planned to fulfill all requirements related to manpower. Through availability of infrastructures, facilities and capability, initiatives of the Company in delivering excellent products and services will be easier.

Socially responsible business dapat dilakukan dengan membuat fasilitas yang memenuhi bahkan melebihi tingkat keamanan lingkungan dan keselamatan yang ditetapkan, mengembangkan perbaikan proses produksi barang dan jasa seperti berbagai kegiatan untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahaya, megurangi penggunaan bahan kimia dalam proses peningkatan pertumbuhan tanaman pangan, menghentikan penawaran produk yang ditenggarai membahayakan kesehatan manusia meskipun produk itu legal, memilih pemasok berdasarkan kriteria kesediaan mereka menerapkan dan memelihara aktivitas substainable development, memilih bahan kemasan yang paling ramah lingkungan dengan berbagai kriteria, melakukan pelaporan secara terbuka mengenai material produk yang digunakan berikut asal-usulnya, potensi bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan produk serta berbagai informasi lain yang berguna bagi konsumen, mengembangkan berbagai program untuk menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat, membuat batasan umur dalam melakukan penjualan, misalnya barang-barang tertentu tidak akan dijual kepada anak yang belum berumur 18 tahun.

Socially responsible business can be done by building facilities that fulfill or exceed the designated environmental security and safety levels, developing products and services production process improvement such as various activities to reduce the use of hazard material, reducing chemicals use in food crop cultivation improvement process, terminating product offering, which is indicated threating human health although the product is legal, selecting suppliers based on the criteria of willingness to implement and maintain sustainable development activity, selecting the most eco-friendly packaging materials with various criteria, conducting transparent reporting on the use of product materials altogether with the origin, hazard potential that is caused from products use and other various information that are useful for the consumers, develop various programs to support establishment of public welfare, designing age restriction in sales, such as for specific products that will be not sold to children below 18 years old.

MEKANISME STAKEHOLDER ENGAGEMENT UNTUK CSR KONSUMEN
Stakeholder Engagement Mechanism for CSR on Consumers

Kegiatan CSR CSR Activity	**Indikator Kinerja** Performance Indicators
Menyediakan nomor kontak bebas pulsa dan juga form keluhan pada website resmi perusahaan untuk menampung keluhan dari pelanggan dan memberikan tanggapan atas keluhan yang disampaikan kepada pelanggan. Providing free toll phone number and complaint form at the Company's official website and to accommodate complaint from the customers and give feedback on the complaints submitted by the customers.	Tanggung jawab produk aspek pemasangan label bagi produk dan jasa. Responsibility on products and services labeling aspect.
	Tanggung jawab produk aspek kepatuhan. Product responsibility on compliance aspect.

Sertifikasi

Pelanggan mengharapkan agar produk dan jasa dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak mengandung risiko terhadap kesehatan dan keamanan. Upaya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan dari yang menggunakan atau yang menyerahkan produk/jasa, berdampak langsung terhadap reputasi perusahaan, risiko hukum, dan risiko finansial akibat penarikan kembali produk/jasa, diferensiasi pasar terkait dengan kualitas, dan motivasi karyawan.

Sebagai bukti bahwa Perhutani memberikan perhatian atas kesehatan konsumen dan juga keamanan produknya, perusahaan memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk Sistem Manajemen Mutu.

Certification

The customers expect products and services to be functioned appropriately and not containing healthy and safety risks. Initiatives to protect healthy and safety of the products/services users or beneficiaries, with direct impact on the Company's reputation, legal risk and financial risk due to the products/services recall, market differentiation related to quality and motivation of the employees.

As an evidence that Perhutani concerns consumers' healthy and also products safety, the Company has obtained ISO 9001:2008 certificates for Quality Management System.

SERTIFIKAT ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 Certification

Implementasi ISO 26000 ISO 26000 implementation	**Pelaporan dan Pengungkapan** Reporting and Disclosure
Kegiatan CSR / CSR Activity	Indikator Kinerja / Performance Indicators
Memberikan informasi mengenai detail produk melalui website perusahaan dan pemberian label pada produk.	Tanggung jawab produk aspek pemasangan label bagi produk dan jasa: PR3 dan PR4
Receive information on detail of the products through official website and products labeling.	Product responsibility in Products and Services Labeling Aspect: PR3 and PR4

Kecukupan dan Kemudahan dalam Mengakses

Keberlanjutan produk dan jasa diperlukan oleh pelanggan dan konsumen akhir untuk membuat keputusan pembelian. Penyediaan informasi dan pemberian label yang tepat sehubungan dengan dampak keberlanjutan, terkait langsung dengan ketaatan terhadap peraturan dan *codes* tertentu (misalnya peraturan perundang-undangan atau OECD *Guidelines on Multinational Enterprises*) dan dengan strategi merek serta diferensiasi pasar. Tampilan dan spesifikasi informasi serta pemberian label produk dan jasa diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Salah satu misi Perhutani adalah meningkatkan pangsa pasar dunia. Dengan adanya pemberian label pada produk yang dihasilkan, maka konsumen akan mengetahui standarisasi mengenai spesifikasi produk tersebut. Hal ini akan berdampak kepada kepuasan pelanggan dan memenuhi permintaan konsumen pada pasar internasional yang sangat memperhatikan informasi detail produk sebagai dasar pertimbangan konsumen dalam keputusan pembelian.

Adequacy and Ease of Access

Products and services sustainability is required by the end customers and consumers to make purchasing decision. Provision of accurate information and labeling are related to the sustainability impact, also directly related to compliance with specific regulation and codes (for example the legislation or OECD Guidelines on Multinational Enterprises) as well as with brand and market differentiation strategies. Information display and specification as well as products and services labeling are regulated in various law and regulation.

One of Perhutani's mission is to increase global market share. By placing the label on our products, the consumers will acknowledge standardization on the products specification. This will affect consumer's demands in the international market that highly concerns detail products information as basis of the consumer's consideration in purchase decision.

Dampak bagi Perusahaan

Perhutani memandang program tanggung jawab sosial kepada pelanggan merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya *(cost centre)* melainkan sebagai sarana meraih keuntungan *(profit centre)*. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)*.

Dengan pemahaman tersebut, maka pada implementasi program CSR kepada pelanggan memiliki fungsi atau peran strategis bagi Perhutani, yaitu membentuk katup pengaman sosial *(social security)*. Selain itu melalui program CSR kepada pelanggan perusahaan juga dapat membangun reputasi, seperti meningkatkan citra perusahaan, merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

Impact for the Company

Perhutani views the social responsibility program to customers as an investment for the company for the growth and sustainability of the company and is no longer seen as a cost center but as a profit center. Social responsibility to customers is the company's commitment to support the creation of sustainable development.

With this understanding, the implementation of CSR programs to customers has a strategic function or role for Perhutani, namely forming a social security valve. In addition, through CSR programs to customers, the company can also build a reputation, such as improving the company's image, company brand, and company's line of business.

LAPORAN KEUANGAN AUDIT

AUDITED FINANCIAL REPORT

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI DAN ENTITAS ANAK*/AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ *CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

31 DESEMBER 2020/ *31 DECEMBER 2020*

Perhutani

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Atas nama Dewan Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wahyu Kuncoro
   Alamat : Graha Perhutani
   Jl. TB Simatupang No.22
   Jati Padang, Kec. Ps. Minggu
   Jakarta Selatan, 12540
   Telepon : 021-7805730
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Kemal Sudiro
   Alamat : Graha Perhutani
   Jl. TB Simatupang No.22
   Jati Padang, Kec. Ps. Minggu
   Jakarta Selatan, 12540
   Telepon : 021-7805730
   Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perum Perhutani dan entitas anak ("Grup");
2. laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

On behalf of the Board of Directors, we the undersigned:

1. *Name* : *Wahyu Kuncoro*
   Address : *Graha Perhutani,*
   Jl. TB Simatupang No.22
   Jati Padang, Kec. Ps Minggu
   Jakarta Selatan, 12540
   Telephone : *021-7805730*
   Position : *President Director*
2. *Name* : *Kemal Sudiro*
   Address : *Graha Perhutani,*
   Jl. TB Simatupang No.22
   Jati Padang, Kec. Ps Minggu
   Jakarta Selatan, 12540
   Telephone : *021-7805730*
   Position : *Finance Director*

declare that:

1. *we are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of Perum Perhutani and subsidiaries (the "Group");*
2. *the consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. all information in the consolidated financial statements of the Group have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. the consolidated financial statements of the Group do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact and;
4. *we are responsible for the Group's internal control systems.*

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/ *For and on behalf of the Board of Directors:*

Wahyu Kuncoro / **Kemal Sudiro**
Direktur Utama/*President Director* Direktur Keuangan/*Finance Director*

Jakarta, 16 April 2021

Kantor Pusat Perum Perhutani
Graha Perhutani Jl. T.B. Simatupang No. 22 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12540
Tel.(021) 7805730 (Hunting) Fax. (021) 7805731 email : humas@perhutani.co.id

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMILIK MODAL

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE CAPITAL OWNERS OF

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Umum (Perum) Perhutani and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2020, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - INDONESIA
Tel: +62 21 50992901 / 31192901 |Fax: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

pwc

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Umum (Perum) Perhutani and its subsidiaries as at 31 December 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
16 April 2021

Yusron, S.E., Ak., CPA
Surat Izin Akuntan Publik/*License of Public Accountant* No. AP.0243

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2020	2019	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	6	707,822	1,024,952	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	7	138,221	13,552	*Restricted cash*
Piutang usaha	8	168,674	179,085	*Trade receivables*
Aset keuangan lancar lainnya	9	65,735	68,946	*Other current financial assets*
Aset biologis	14	1,134,811	1,128,004	*Biological assets*
Persediaan	10	267,160	398,485	*Inventories*
Pajak dibayar dimuka	11a			*Prepaid taxes*
- Pajak lainnya		2,267	4,248	*Other taxes -*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka		15,667	23,432	*Prepayment and advances*
Aset lancar lainnya		14,873	16,093	*Other current assets*
Jumlah aset lancar		2,515,230	2,856,797	*Total current assets*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset keuangan tidak lancar lainnya		13,052	32,825	*Other non-current financial assets*
Pajak dibayar dimuka	11a			*Prepaid taxes*
- Pajak penghasilan badan		142,544	127,052	*Corporate income tax -*
Investasi pada entitas asosiasi	12	72,156	82,876	*Investments in associates*
Tanaman produktif	13	1,078,520	812,149	*Bearer plants*
Aset tetap	15	786,707	832,028	*Fixed assets*
Aset biologis	14	11,861,080	11,618,528	*Biological assets*
Aset tak berwujud		41,779	44,892	*Intangible assets*
Aset pajak tangguhan	11d	23,285	26,118	*Deferred tax assets*
Aset hak guna		42,051	-	*Right-of-use assets*
Aset tidak lancar lainnya		18,963	6,592	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar		14,080,137	13,583,060	*Total non-current assets*
JUMLAH ASET		**16,595,367**	**16,439,857**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2020	2019	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***SHORT-TERM LIABILITIES***
Utang usaha	16	63,987	219,120	*Trade payables*
Beban akrual	17	231,217	212,330	*Accrued expenses*
Utang pajak	11b			*Tax payables*
- Pajak penghasilan badan		44,745	29,302	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya		316,434	287,573	*Other taxes -*
Pinjaman				*Borrowings*
- Pinjaman bank	18a	189,530	285,233	*Bank loans -*
- Pinjaman pihak ketiga	18b	540	702	*Third party borrowings -*
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya		14,373	7,188	*Other short-term financial liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	20	148,502	111,047	*Other short-term liabilities*
Liabilitas sewa pembiayaan jangka pendek		26,501	-	*Short-term financial lease liabilities*
Kewajiban imbalan kerja karyawan jangka pendek	21a	137,795	130,666	*Short-term employee benefit obligations*
Jumlah liabilitas jangka pendek		1,173,624	1,283,161	*Total short-term liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***LONG-TERM LIABILITIES***
Pinjaman				*Borrowings*
- Pinjaman bank	18a	201,947	122,021	*Bank loans -*
- Pinjaman pihak ketiga	18b	183,947	179,951	*Third party borrowings -*
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya		66,115	55,970	*Other long-term financial liabilities*
Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang		17,434	-	*Long-term financial lease liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	11d	1,973,658	2,530,759	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya		3,600	3,412	*Other long-term liabilities*
Kewajiban imbalan pascakerja	21d	1,721,737	1,312,589	*Post-employment benefit obligations*
Jumlah liabilitas jangka panjang		4,168,438	4,204,702	*Total long-term liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**5,342,062**	**5,487,863**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/3 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2020	2019	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal negara	22	2,586,303	2,586,303	*State capital*
Tambahan modal disetor	5	(1,334,148)	(1,334,148)	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
Belum dicadangkan		8,465,177	7,922,665	*Unappropriated*
Dicadangkan				*Appropriated*
- Cadangan tujuan khusus	22	205,476	205,476	*Special purpose - reserves*
- Cadangan umum		2,780,151	2,594,805	*General reserves*
Rugi komprehensif lainnya		(1,440,907)	(1,014,424)	*Other comprehensive loss*
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**11,262,052**	**10,960,677**	***Equity attributable to owners of the parent***
Kepentingan non-pengendali		(8,747)	(8,683)	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		**11,253,305**	**10,951,994**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**16,595,367**	**16,439,857**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/1 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2020	2019*	
Pendapatan	23	3,927,388	4,137,919	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	24	(3,452,685)	(3,387,596)	*Cost of revenue*
LABA BRUTO		**474,703**	**750,323**	***GROSS PROFIT***
Perubahan nilai wajar aset biologis	14	**596,902**	**489,868**	***Change in fair value of biological assets***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Beban pemasaran dan distribusi	25	(49,568)	(62,350)	*Marketing and distribution expenses*
Beban umum dan administrasi	25	(774,870)	(962,650)	*General and administrative expenses*
LABA USAHA		**247,167**	**215,191**	***OPERATING INCOME***
Penghasilan keuangan	27	23,380	35,136	*Finance income*
Beban keuangan	28	(32,209)	(9,864)	*Finance costs*
Pendapatan lainnya, bersih	26	68,545	54,667	*Other income, net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**306,883**	**295,130**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	11c	441,588	(90,100)	*Income tax benefit/(expense)*
LABA TAHUN BERJALAN		**748,471**	**205,030**	***PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pascakerja	21d	(446,609)	(315,236)	*Remeasurement of post-employment benefits obligations*
Manfaat pajak terkait	11d	20,043	78,809	*Related income tax benefit*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		**(426,566)**	**(236,427)**	***Other comprehensive loss for the year, net of tax***
JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**321,905**	**(31,397)**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR***

* Disajikan kembali (lihat Catatan 33) tidak ada perubahan terhadap laba bersih yang dilaporkan sebelumnya

As restated (refer to Note 33) there are no changes to the net income which was previously reported*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019*	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			***PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	748,452	205,940	*Owner of parent entity*
Kepentingan non-pengendali	19	(910)	*Non-controlling interest*
JUMLAH	**748,471**	**205,030**	***TOTAL***
JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	321,969	(30,299)	*Owner of parent entity*
Kepentingan non-pengendali	(64)	(1,098)	*Non-controlling interest*
JUMLAH	**321,905**	**(31,397)**	***TOTAL***

* Disajikan kembali (lihat Catatan 33) tidak ada perubahan terhadap laba bersih yang dilaporkan sebelumnya

As restated (refer to Note 33) there are no changes to the net income which was previously reported*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal negara/ *State capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/*Retained earnings*			Rugi komprehensif lain/ *Other comprehensive loss*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah/ *Total*	
			Dicadangkan/*Appropriated*						
			Cadangan tujuan khusus/ *Special purpose reserves*	Cadangan umum/ *General reserves*	Belum dicadangkan/ *Unappropriated*				
Saldo 1 Januari 2019	**2,586,303**	**(1,334,148)**	**205,476**	**1,999,649**	**8,389,300**	**(778,185)**	**(7,585)**	**11,060,810**	***Balance as at 1 January 2019***
Cadangan umum	-	-	-	595,156	(595,156)	-	-	-	*General reserves*
Dividen	-	-	-	-	(77,419)	-	-	(77,419)	*Dividends*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	205,940	-	(910)	205,030	*Profit for the year*
Rugi komprehensif lain, setelah pajak	-	-	-	-	-	(236,239)	(188)	(236,427)	*Other comprehensive loss, net of tax*
Saldo 31 Desember 2019	**2,586,303**	**(1,334,148)**	**205,476**	**2,594,805**	**7,922,665**	**(1,014,424)**	**(8,683)**	**10,951,994**	***Balance as at 31 December 2019***
Cadangan umum	-	-	-	185,346	(185,346)	-	-	-	*General reserves*
Dividen	-	-	-	-	(20,594)	-	-	(20,594)	*Dividends*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	748,452	-	19	748,471	*Profit for the year*
Rugi komprehensif lain, setelah pajak	-	-	-	-	-	(426,483)	(83)	(426,566)	*Other comprehensive loss, net of tax*
Saldo 31 Desember 2020	**2,586,303**	**(1,334,148)**	**205,476**	**2,780,151**	**8,465,177**	**(1,440,907)**	**(8,747)**	**11,253,305**	***Balance as at 31 December 2020***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 4 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
Arus kas dari aktivitas operasi			***Cash flows from operating activities***
Penerimaan dari pelanggan	3,938,597	4,177,839	*Receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok	(1,774,869)	(2,114,240)	*Payments to suppliers*
Pembayaran kepada karyawan	(1,644,466)	(1,757,681)	*Payments to employees*
Pembayaran beban keuangan	(32,209)	(9,864)	*Finance cost payments*
Penerimaan bunga	23,380	35,136	*Interest receipts*
Penarikan kas yang dibatasi penggunaannya	2,090	73	*Restricted cash withdrawals*
Penerimaan lainnya	151,971	44,410	*Other receipts*
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	(27,621)	-	*Restricted cash placements*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(92,123)	(273,501)	*Corporate income tax payments*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**544,750**	**102,172**	***Net cash flows generated from operating activities***
Arus kas dari aktivitas investasi			***Cash flows from investing activities***
Perolehan tanaman produktif	(294,949)	(197,547)	*Bearer plants acquisition*
Perolehan aset biologis	(218,869)	(190,347)	*Biological assets acquisition*
Perolehan aset tetap	(198,302)	(137,458)	*Fixed assets acquisition*
Hasil penjualan aset tetap	1,114	2,213	*Proceeds from sale of fixed assets*
Penerimaan dividen	2,917	15,483	*Dividend receipts*
Penerimaan divestasi saham	-	17,973	*Receipts of divestment of shares*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(708,089)**	**(489,683)**	***Net cash flows used in investing activities***
Arus kas dari aktivitas pendanaan			***Cash flows from financing activities***
Penerimaan pinjaman bank	2,180,626	3,763,331	*Receipts from bank loans*
Pembayaran pinjaman bank	(2,196,403)	(3,688,955)	*Repayment of bank loans*
Penerimaan pinjaman pihak ketiga	4,566	561	*Receipts from third party borrowings*
Pembayaran pinjaman pihak ketiga	(732)	(872)	*Repayment of third party borrowings*
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	(110,600)	(3,462)	*Restricted cash placements*
Penarikan kas yang dibatasi penggunaannya	11,462	52,650	*Restricted cash withdrawals*
Pembayaran sewa	(22,116)	-	*Payments for lease*
Pembayaran dividen kas kepada pemilik modal	(20,594)	(77,419)	*Cash dividend paid to capital owner*
Arus kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(153,791)**	**45,834**	***Net cash flows (used in)/ generated from financing activities***
Penurunan bersih kas dan setara kas	**(317,130)**	**(341,677)**	***Net decrease in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun	1,024,952	1,366,629	*Cash and cash equivalents at beginning of the year*
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**707,822**	**1,024,952**	***Cash and cash equivalents at end of the year***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/1 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum ("Perum") Perhutani, selanjutnya disebut "Perusahaan", didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1972 yang diubah dengan PP No. 36 Tahun 1986. Pada tahun 1998, Pemerintah menerbitkan PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum). Dengan diterbitkannya PP ini, peraturan yang mendasari terbentuknya Perum Perhutani diatur kembali, yaitu dengan PP No. 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2001, tanggal 23 Maret 2001 bentuk Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Perubahan status ini dituangkan dalam akta No. 3 tanggal 2 Juli 2001 oleh Notaris Imas Fatimah dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan ("SK") No. C-05080.HT.01.01.TH.2001 tanggal 7 Agustus 2001. Pada tahun 2003 bentuk Perusahaan kembali berubah menjadi "Perusahaan Umum" sesuai dengan PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum (Perum Perhutani). Perubahan ini telah dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 67.

Peraturan kembali berubah dengan PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, dimana wilayah kerja Perusahaan meliputi seluruh hutan negara yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Sesuai dengan Pasal 11 PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, maksud dan tujuan Perusahaan adalah:

i. Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip hutan lestari dan tata kelola perusahaan yang baik.

1. GENERAL

a. The Company establishment

Perusahaan Umum ("Perum") Perhutani, ("the Company"), was established by Government Regulation ("PP") No. 15 of 1972 as amended by PP No. 36 of 1986. In 1998, the Government issued PP No. 13 of 1998 on Perusahaan Umum (Perum). With the issuance of this PP, the rules underlying the formation of Perum Perhutani was updated by PP No. 53 of 1999 regarding State Forestry Company (Perum Perhutani). Based on PP No. 14 of 2001, dated 23 March 2001, the legal business form changed from Perum Perhutani to Perusahaan Perseroan (Persero).

This legal business transformation was stipulated in notarial deed No. 3 dated 2 July 2001 by Notary Imas Fatimah and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights by Decree ("SK") No. C-05080. HT.01.01.TH.2001 dated 7 August 2001. In 2003 the Company changed the legal form to "Perusahaan Umum" in accordance with PP No. 30 of 2003 concerning the Perusahaan Umum (Perum Perhutani). These changes have been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 67.

The regulation was further amended with PP No. 72 of 2010 on Perusahaan Umum (Perum) State Forestry, where the Company covers the entire working area of state forest located in Central Java, East Java, and West Java Province.

In accordance with Article 11 of PP No. 72 of 2010 on Perusahaan Umum (Perum) State Forestry, the purposes and objectives of the Company are as follows:

i. Conducting business aimed at public benefit in the form of supplying goods and/or services associated with high quality forest management and forest products at an affordable price by the community based on the principles of sustainable forestry and good corporate governance.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat i, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengelolaan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi, pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan, penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan, pengembangan agroforestri, membangun dan mengembangkan hutan rakyat dan/atau hutan tanaman rakyat dan perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.

iii. Selain kegiatan usaha, Perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain berupa:

1) Usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk kantor perdagangan, komplek agroindustri, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, *resort*, *rest area*, rumah sakit, pertambangan galian, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya.
2) Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Perusahaan berkantor pusat di Jakarta, Graha Perhutani Jl. TB Simatupang No. 22, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540 Tel: (021) 7805730.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, susunan Dewan Pengawas Perusahaan adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***a. The Company establishment** (continued)*

ii. To achieve the above purposes and the objectives in article i, the Company has the following primary business activities: forest governance and forest management planning, forest exploiting management, which includes the area utilisation, environmental services, utilisation and collection of timber and non-timber forest products, rehabilitation and reclamation, forest protection and nature conservation, production of forest products as raw material and finished goods, education and training in the field of forestry, research and development in the field of forestry, agroforestry development, build and develop forests community and/or forest smallholder crop and forest products trade and production of its own production and other parties.

iii. In addition to its main business activities, the Company may conduct other business activities such as the following:

1) Optimisation of potential owned resource for trading house, agroindustrial complex, agribusiness, property, warehousing, tourism, hotels, resorts, rest areas, hospitals, mining quarrying, telecommunications infrastructures, utilisation of water resources, and other natural resources.
2) Other business activities in accordance with the purposes and objectives of the Company.

The Company is headquartered in Jakarta, Graha Perhutani at Jl. TB Simatupang No. 22, Jati Padang, Pasar Minggu, South Jakarta City, 12540 Tel: (021) 7805730.

As at 31 December 2020 and 2019, the composition of the Company's Board of Supervisory was as follows:

	2020	**2019**	
Ketua	Bambang Hendroyono	-	*Chairman*
Plt. Ketua	-	Djarot Kusumayakti	*Acting Chairman*
Anggota	Bambang Risyanto	Indriyani Widiastuti	*Member*
Anggota	Chalid Muhammad	Haryadi Himawan	*Member*
Anggota	Komaruddin Simanjuntak	Kaharuddin Wahab	*Member*
Anggota	Noer Fauzi Rachman	Hilman Nugroho	*Member*
Anggota	YB. Priyatmo Hadi	-	*Member*

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/3 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, susunan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***a. The Company establishment** (continued)*

As at 31 December 2020 and 2019, the composition of the Company's Directors was as follows:

	2020	
Direktur Utama	Wahyu Kuncoro	*President Director*
Direktur Pengembangan bisnis dan Pemasaran	Ahmad Ibrahim	*Director of Business and Marketing Development*
Direktur Operasi	Bambang Catur Wahyudi	*Director of Operation*
Direktur Perhutanan Sosial	Natalas Anis Harjanto	*Director of Social Forestry*
Direktur Sumber Daya Manusia, Umum, dan Informasi Teknologi	Kemal Sudiro	*Director of Human Resources, General, and Information Technology*
Direktur Keuangan	Eko Wahyudi	*Director of Finance*

	2019	
Direktur Utama	Denaldy M. Mauna	*President Director*
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis	Bambang Catur Wahyudi	*Director of Planning and Business Development*
Direktur Operasional	Sumardi	*Director of Operation*
Direktur Sumber Daya Manusia, Umum, dan Informasi Teknologi	Kemal Sudiro	*Director of Human Resources, General, and Information Technology*
Direktur Keuangan	Eko Wahyudi	*Director of Finance*

Susunan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko Perusahaan terdiri dari:

The composition of the Company's Audit Committee and Risk Management Committee was as follows:

	2020	
Komite Manajemen Risiko	Much. Iman Tawakal	*Member of Risk Management Committee*
Komite Manajemen Risiko	Mochammad Ali Wafa Pujiono	*Member of Risk Management Committee*
Komite Audit	M. Farkhan Supriyadi	*Member of Audit Committee*
Komite Audit	Made Santiyasa	*Member of Audit Committee*

	2019	
Komite Manajemen Risiko	Much. Iman Tawakal	*Member of Risk Management Committee*
Komite Manajemen Risiko	Mochamad Ali Wafa Pujiono	*Member of Risk Management Committee*
Komite Audit	Abdul Mukhit	*Member of Audit Committee*
Komite Audit	Made Santiyasa	*Member of Audit Committee*

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan memiliki 17.913 orang karyawan (2019: 20.842 orang karyawan) (tidak diaudit).

As at 31 December 2020, the Company had 17,913 employees (2019: 20,842 employees) (unaudited).

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-47/MBU/02/2020 tanggal 12 Februari 2020, Bambang Hendroyono diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani yang baru menggantikan Djarot Kusuma Yakti.

Based on BUMN Minister Decree No. SK-47/MBU/02/2020 dated 12 February 2020, Bambang Hendroyono was appointed as the new Supervisory Board Chairman of Perum Perhutani replacing Djarot Kusuma Yakti.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-83/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020, Bambang Risyanto, Chalid Muhammad, dan Komaruddin Simanjuntak diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang baru menggantikan Haryadi Himawan, Indriyani Widiastuti, Kaharuddin Wahab, dan Hilman Nugroho.

Berdasarkan SK Dewan Pengawas No. 01/DWAS-PHT/2020 tanggal 1 April 2020, M. Farkhan Supriyadi diangkat sebagai anggota Komite Audit yang baru menggantikan Abdul Mukhit.

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-55/MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020, Denaldy M. Mauna sebagai Direktur Utama digantikan oleh Wahyu Kuncoro sebagai Direktur Utama Perum Perhutani yang baru. Selain itu, Ahmad Ibrahim diangkat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran, Bambang Catur Wahyudi diangkat sebagai Direktur Operasi, serta Natalas Anis Harjanto diangkat sebagai Direktur Perhutanan Sosial.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-45/MBU/02/2021 tanggal 9 Februari 2021, Ahmad Ibrahim dialih tugaskan sebagai Direktur Komersial, Natalas Anis Harjanto dialih tugaskan sebagai Direktur Operasi dan Perhutanan Sosial, dan Kemal Sudiro dialih tugaskan menjadi Direktur Keuangan. Selain itu, Endung Trihartaka diangkat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan dan M. Deny Ermansyah diangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Umum dan Informasi Teknologi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan dituangkan dalam akta notaris No. 11 tanggal 9 Maret 2021.

b. Modal

PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani menyatakan bahwa modal Perusahaan merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Nilai kekayaan negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2010, ditetapkan besarnya modal Perusahaan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal negara dalam Perusahaan dengan jumlah sebesar Rp700.000.

***1. GENERAL** (continued)*

***a. The Company establishment** (continued)*

Based on BUMN Minister Decree No. SK-83/MBU/03/2020 dated 19 March 2020, Bambang Risyanto, Chalid Muhammad, and Komaruddin Simanjuntak were appointed as the new Supervisory Board members replacing Haryadi Himawan, Indriyani Widiastuti, Kaharuddin Wahab, and Hilman Nugroho.

Based on Supervisory Board Decree No. 01/DWAS-PHT/2020 dated 1 April 2020, Farkhan Supriyadi was appointed as the new Committee Audit member replacing Abdul Mukhit.

Based on BUMN Minister Decree No. SK-55/MBU/02/2020 dated 26 February 2020, Denaldy M. Mauna as President Director has been replaced by Wahyu Kuncoro as a new President Director of Perum Perhutani. Other than that, Ahmad Ibrahim was appointed as Director of Business and Marketing Development, Bambang Catur Wahyudi was appointed as Director of Operation, and Natalas Anis Harjanto was appointed as Director of Social Forestry.

Based on BUMN Minister Decree No. SK-45/MBU/02/2021 dated 9 February 2021, Ahmad Ibrahim was assigned as Director of Commercial, Natalas Anis was assigned as Director of Operation and Social Forestry, and Kemal Sudiro was assigned as Director of Finance. Other than that, Endung Trihartaka was appointed as Director of Planning and Business Development and M. Deny Ermansyah was appointed as Director of Human Resources, General and Information Technology. This decision has been effective since the decree date and was stipulated in notarial deed No. 11 dated 9 March 2021.

b. Capital

PP No. 30 of 2003 on Perum Perhutani stated that the Company's capital represents and is from separated state's wealth and is not divided into shares. The value of state's wealth was determined by the Minister of Finance based on the calculation made by the Ministry of Finance and the Ministry of Forestry. Based on PP No. 72 of 2010, the amount of the Company's capital is equal to the entire value of state's equity participation in the Company with a total value of Rp700,000.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/5 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Modal (lanjutan)

Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. PP No. 73 Tahun 2014 ini menjelaskan tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik negara Republik Indonesia pada PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V. Penambahan Penyertaan Modal Negara mengakibatkan perubahan status Perusahaan yang sebelumnya merupakan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V menjadi PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Perusahaan menjadi Pemegang Saham PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V.

Penambahan penyertaan modal dari PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V sebesar masing-masing Rp450.333, Rp183.083, Rp324.120, Rp92.253, dan Rp132.659.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 619/KMK.06/2015 tanggal 25 Mei 2015 menetapkan tentang Penetapan Nilai Definitif Penambahan Penyertaaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V masing-masing sebesar Rp1.211.262, Rp225.707, Rp308.509, Rp64.920, dan Rp75.905.

Pada tahun 2020, Perusahaan mengambil alih modal saham dari Koperasi Karyawan PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V dengan nilai masing-masing sebesar Rp100, Rp30, Rp10, Rp10, dan Rp10.

Penambahan penyertaaan modal ini dituangkan dalam akta notaris tanggal 4 Mei 2020 oleh Dr. Dewi Tenty Septi Artiani dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Juni 2020.

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Capital** (continued)*

In 2014, the Government issued the PP No. 73 of 2014 on Additional Capital Investment of the Republic of Indonesia into Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. PP No. 73 of 2014 describes Additional Capital Investment of the Republic of Indonesia into Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara which was derived from the transfer of all shares owned by the Republic of Indonesia to PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V. Additional Capital Investment by the Company resulted in a change of status that was previously a Limited Liability Company (Persero) PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V into PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V which have to fully comply with the Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. Thus, the Company became the Shareholders of PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V.

The share capital increase from PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V amounting to Rp450,333, Rp183,083, Rp324,120, Rp92,253, and Rp132,659, respectively.

SK Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 619/KMK.06/2015 dated 25 May 2015 stated the Determination of Definitive Additional Capital Investment of the Republic of Indonesia into Perum Kehutanan Negara equity's from PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V amounting to Rp1,211,262, Rp225,707, Rp308,509, Rp64,920, and Rp75,905, respectively.

In 2020, the Company acquired share capital from Koperasi Karyawan PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V amounting to Rp100, Rp30, Rp10, Rp10, and Rp10.

The additional capital investment was stipulated in notarial deed dated on 4 May 2020 by Dr. Dewi Tenty Septi Artiani and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights dated 10 June 2020.

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup

1. GENERAL (continued)

c. Group structure

No	Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Kepemilikan/ *Ownership* 2020	Kepemilikan/ *Ownership* 2019	Mulai beroperasi/ *Start of commission operation*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2020	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2019
Kepemilikan langsung/*Direct ownership*								
1	PT Inhutani I	Indonesia	Pengelolaan hutan, pengusahaan, dan industri hasil hutan/*Forest management, exploitation, and manufacturing of forest products*	100.00%	99.98%	1973	419,427	417,222
2	PT Inhutani II	Indonesia	Pengelolaan hutan, pengusahaan, dan industri hasil hutan serta hasil hutan ikutan dan tanaman lainnya/*Forest management, exploitation, and manufacturing of forest products including forestry by-products, and other plants*	100.00%	99.98%	1975	235,643	267,705
3	PT Inhutani III	Indonesia	Pengelolaan hutan, pengusahaan, dan industri hasil hutan serta hasil hutan terutama karet dan benih, serta rehabilitasi hutan/ *Forest management, exploitation and manufacturing of forest products, primarily rubber and seeds, and forest rehabilitation*	100.00%	99.99%	1977	53,626	62,770
4	PT Inhutani IV	Indonesia	Pengelolaan hutan, pengusahaan, dan industri hasil hutan terutama getah pinus dan jasa rehabilitasi/ *Forest management, exploitation, and manufacturing of forest products, primarily pine sap and rehabilitation service*	100.00%	99.99%	1991	45,066	60,763
5	PT Inhutani V	Indonesia	Pengelolaan hutan, pengusahaan, dan industri hasil hutan terutama gondorukem dan tebu/ *Forest management, exploitation, and manufacturing of forest products, primarily gum rosin, and sugar cane*	100.00%	99.99%	1991	259,585	256,344
6	PT Palawi Risorsis	Indonesia	Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, pariwisata, dan perjalanan/ *Running business in service, tourism, and travel sector*	99.66%	99.66%	2002	46,790	53,969
7	PT Perhutani Anugerah Kimia (PAK)	Indonesia	Pengelolaan dan pengusahaan hutan, terutama derivatif gondorukem, getah pinus, dan terpentin/*Forest management and exploitation, primarily from derivative of gum rosin, pine sap, and turpentine*	99.83%	99.83%	2002	29,820	24,778
8	PT BUMN Hijau Lestari	Indonesia	Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa dan bagi hasil penjualan kopi dan susu/*Running business in service sector and profit sharing from sales of coffee and milk*	54.13%	54.13%	2009	4,299	4,353
Kepemilikan tidak langsung/ *Indirect ownership*								
9	PT Penggaron Sarana Semesta	Indonesia	Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa */Running business in service sector.*	51.00%	51.00%	2018	7,793	7,952

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/7 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Luas kawasan hutan

Luas kawasan hutan yang dikelola Perusahaan per 31 Desember 2020 (dalam Ha) sebagai berikut:

Wilayah kerja/ *Working area*	Hutan produksi/ *Production forest* (Ha)**	Hutan lindung/ *Preserved forest* (Ha)**	Jumlah/ *Total*
Jawa Tengah/*Central Java*	551,645	83,742	635,387
Jawa Timur/*East Java*	806,205	311,058	1,117,263
Jawa Barat dan Banten/*West Java and Banten*	449,898	237,962	687,860
Jumlah/*Total*	**1,807,748**	**632,762**	**2,440,510**

**tidak diaudit/*(unaudited)*

***1. GENERAL** (continued)*

d. Size of forest area

Forest area managed by the Company as at 31 December 2020 (in hectares) is as follows:

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan yang dimodifikasi oleh aset biologis diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah (“Rp”), kecuali dinyatakan lain.

Kecuali dinyatakan dibawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements of the Company and subsidiaries have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention as modified by the biological assets at fair value through profit and loss, and using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah (“Rp”), unless otherwise stated.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 December 2019, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020 dan 1 Juni 2020, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- ISAK 36 "Interpretasi atas interaksi antara ketentuan mengenai hak tanah dalam PSAK 16: aset tetap dan PSAK 73: sewa"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan" dan PSAK 25 "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan"

- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama"
- Amandemen PSAK 55 "Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran"
- Amandemen PSAK 60 "Instrumen keuangan: pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak asuransi"
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen keuangan - fitur percepatan pelunasan dengan kompensasi negatif"
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen keuangan - reformasi acuan suku bunga"
- Amandemen PSAK 73 "Sewa: konsesi sewa terhadap COVID-19"
- Penyesuaian tahunan PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan"

2. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

a. Basis of preparation of consolidated financial statements *(continued)*

In order to provide further understanding of the financial performance of the Group, due to the significance of their nature and amount, several items of income or expense have been presented separately.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards ("ISFAS")

The adoption of these new and amended standards and interpretations that are effective beginning 1 January 2020 and 1 June 2020, did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

- *ISFAS 36 "Interpretations of the interaction between provisions regarding land rights in SFAS 16: fixed assets and SFAS 73: leases"*
- *Amendment to SFAS 1 "Presentation of financial statements" and SFAS 25 "Accounting policies, changes in accounting estimates and errors"*
- *Amendment to SFAS 15 "Investments in associates and joint ventures"*
- *Amendment to SFAS 55 "Financial instruments: recognition and measurement"*
- *Amendment to SFAS 60 "Financial instruments: disclosure on interest rate benchmark reform"*

- *Amendment SFAS 62 "Insurance contracts"*
- *Amendment to SFAS 71 "Financial instruments - prepayment features with negative compensation"*
- *Amendment to SFAS 71 "Financial instruments - interest rate benchmark reform"*
- *Amendment to SFAS 73 "Leases: lease concession on COVID-19"*
- *Annual Improvements on SFAS 1 "Presentation of financial statements"*

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/9 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- PSAK 71 "Instrumen keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"

Dampak terkait penerapan standar akuntansi ini terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup dijabarkan sebagai berikut :

Penerapan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

Standar ini membahas klasifikasi dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan, model penurunan nilai yang baru dan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai. Klasifikasi dan model penurunan nilai yang baru berdasarkan PSAK 71 tidak berdampak material terhadap pengukuran dan provisi penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya diakui Grup berdasarkan PSAK 55 "Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran". Penerapan atas PSAK 71 tersebut tidak memiliki dampak terhadap saldo awal laba ditahan yang belum dicadangkan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Penerapan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Standar ini menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan apakah, berapa banyak dan kapan pendapatan diakui. Standar ini menggantikan PSAK 23 "Pendapatan" dan PSAK 34 "Kontrak konstruksi".

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards ("ISFAS")** (continued)*

The adoption of these new and amended standards and interpretations, which are effective beginning 1 January 2020, resulted in substantial changes to the Group's accounting policies and had material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

- *SFAS 71 "Financial instruments"*
- *SFAS 72 "Revenue from contract with customers"*
- *SFAS 73 "Leases"*

The impact of these new accounting standards on the Group's consolidated financial statements are as follows:

Adoption of SFAS 71 "Financial Instruments"

This standard addresses the classification and measurement of financial assets and liabilities, new impairment model and new rules for hedge accounting. The new classification and new impairment model under SFAS 71 have an immaterial impact on the measurement and the provision for impairment of financial assets previously recognised based on SFAS 55 "Financial instruments: recognition and measurement". The adoption of SFAS 71 does not have an impact on the beginning balance of unappropriated retained earnings in the Group's consolidated financial statements.

Adoption of SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers"

This standard establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is recognised. It replaced SFAS 23 "Revenue" and SFAS 34 "Construction contracts".

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Penerapan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" (lanjutan)

Grup menerapkan PSAK 72 yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi Grup tidak menyajikan kembali komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar. Penerapan atas PSAK 72 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Penerapan atas PSAK 73 "Sewa"

Grup menerapkan PSAK 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi Grup tidak menyajikan kembali komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan oleh ketentuan transisi khusus dalam standar.

Pada saat penerapan PSAK 73, dalam perannya sebagai *lessee*, Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK 30 "Sewa".

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 8,73%. Aset hak guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020, aset hak guna dan liabilitas sewa Grup meningkat sebesar Rp65.593.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards ("ISFAS") *(continued)*

Adoption of SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers" *(continued)*

The Group has adopted SFAS 72 effective for the financial year beginning 1 January 2020, but the Group has not restated comparative for the previous reporting period as permitted under the specific transition provisions in the standard. The adoption of SFAS 72 did not have a significant impact on the consolidated financial statements.

Adoption of SFAS 73 "Leases"

The Group has adopted SFAS 73 effective for the financial year beginning 1 January 2020, but the Group has not restated a comparison for the previous reporting period as permitted under the specific transition provisions in the standard.

Upon the adoption of PSAK 73, the Group as a lessee recognised right-of-use assets and lease liabilities in relation to leases which were previously classified as 'operating leases' under the principles of SFAS 30 "Leases".

Lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group's incremental borrowing rate as at 1 January 2020. The weighted average of the Group's incremental borrowing rate applied was 8.73%. Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liabilities, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to the lease recognised in the consolidated statement of financial position as at 31 December 2019. By applying this standard, as at 1 January 2020, the Group's right-of-use assets and lease liabilites increase by Rp65,593.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Penerapan atas PSAK 73 "Sewa" (lanjutan)

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Grup menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- akuntansi sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal;
- menggunakan tinjauan ke belakang ("*hindsight*") dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;
- untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar; dan
- mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup. Grup telah mengkaji dampak dari standar dan interpretasi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- PSAK 74 "Kontrak asuransi"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan - kewajiban diklasifikasikan antara lancar dan tidak lancar"
- Amandemen PSAK 22 "Bisnis kombinasi - acuan kerangka konseptual pelaporan keuangan"
- Amandemen PSAK 55 "Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran - reformasi acuan suku bunga tahap 2"
- Amandemen PSAK 57 "Provisi, liabilitas kontijensi dan aset kontijensi - kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak"
- Amandemen PSAK 60 "Instrumen keuangan: pengungkapan - reformasi acuan suku bunga tahap 2"

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards ("ISFAS") *(continued)*

Adoption of SFAS 73 "Leases" *(continued)*

In applying PSAK 73 for the first time, the Group has used the following practical expedients permitted by the standard:

- *the use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;*
- *the accounting for operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as at 1 January 2020 are treated as short-term lease;*
- *the exclusion of initial direct costs for the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application;*
- *the use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease;*
- *not to separate non-lease components from lease components on lease by class of underlying assets; and*
- *relying on the assessment of whether leases are onerous based on SFAS 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" immediately before the date of initial application as an alternative to perform an impairment review.*

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended 31 December 2020 and have not been early adopted by the Group. The Group has assessed the impact of these new standards and interpretations as set out below:

- *SFAS 74 "Insurance contracts"*
- *Amendment to SFAS 1 "Presentation of financial statement – classification of liabilities between current and non-current"*
- *Amendment to SFAS 22 "Business combinations - references to the conceptual framework of financial reporting"*
- *Amendment to SFAS 55 "Financial instruments: recognition and measurement - interest rate benchmark reform batch 2"*
- *Amendment to SFAS 57 "Provisions, contingent liabilities, and contingent assets" - onerous contracts - cost of fulfilling the contracts"*
- *Amendment to SFAS 60 "Financial instruments: disclosure - interest rate benchmark reform batch 2"*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

- Amandemen PSAK 62 "Kontrak asuransi - reformasi acuan suku bunga tahap 2"
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen keuangan - reformasi acuan suku bunga tahap 2"
- Amandemen PSAK 73 "Sewa - reformasi acuan suku bunga tahap 2"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 69 "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 "Instrumen keuangan"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 "Sewa"

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2021, kecuali amandemen PSAK No. 22 dan 57 serta penyesuaian tahunan PSAK No. 69, 71, dan 73 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, amandemen PSAK No. 1 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, dan PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen, dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

c. Prinsip-prinsip konsolidasi

i. Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards ("ISFAS")** (continued)*

- *Amendment to SFAS 62 "Insurance contracts - interest rate benchmark reform batch 2"*
- *Amendment to SFAS 71 "Financial instruments - interest rate benchmark reform batch 2"*
- *Amendment to SFAS 73 "Leases - interest rate benchmark reform batch 2"*
- *Annual Improvements on SFAS 69 "Agriculture"*
- *Annual Improvements on SFAS 71 "Financial instruments"*
- *Annual improvements on SFAS 73 "Leases"*

The above new standards, amendments and annual improvements are effective beginning 1 January 2021, except for amendment to SFAS No. 22 and 57, annual improvement on SFAS No. 69,71, and 73 which are effective from 1 January 2022, amendment to SFAS No. 1 which is effective from 1 January 2023, and SFAS No. 74 which is effective from 1 January 2025.

As at the issuance date of this consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and annual improvements on the Group's consolidated financial statements.

c. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

Subsidiaries are all entities over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group and de-consolidated from the date on which that control ceases.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/13 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Transaksi, saldo, dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

ii. Perubahan kepemilikan

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya kontrol sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Perubahan dalam kepemilikan menghasilkan penyesuaian antara nilai tercatat dari kepentingan pengendali dan non-pengendali untuk mencerminkan kepentingan relatifnya di anak perusahaan. Selisih antara jumlah penyesuaian untuk kepentingan non-pengendali dan pertimbangan yang dibayarkan atau diterima diakui dalam cadangan terpisah dalam ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Grup.

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***i. Subsidiaries** (continued)*

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Inter-company transactions, balances, and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary, amounts reported by subsidiaries have been adjusted to conform to the Group's accounting policies.

ii. Changes in ownership interest

The Group treats transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control as transactions with equity owners of the Group. A change in ownership interest results in an adjustment between the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests to reflect their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount of the adjustment to non-controlling interests and any consideration paid or received is recognised in a separate reserve within equity attributable to owners of the Group.

When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control, joint control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

ii. Perubahan kepemilikan (lanjutan)

Jika kepemilikan saham pada ventura bersama atau perusahaan asosiasi berkurang namun pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dipertahankan, hanya sebagian proporsional dari jumlah yang telah diakui sebelumnya dalam pendapatan komprehensif lainnya yang direklasifikasi ke laba atau rugi jika diperlukan.

iii. Entitas asosiasi dan pengaturan bersama

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

Menurut PSAK 66, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor bukan struktur hukum dari pengaturan bersama. Grup telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama. Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui sebagai biaya pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Metode ekuitas

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi pasca akuisisi dari *investee* atas laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lainnya dari *investee* atas pendapatan komprehensif lainnya.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***ii. Changes in ownership interest** (continued)*

If the ownership interest in a joint venture or an associate is reduced but joint control or significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where appropriate.

iii. Associates and joint arrangements

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting, after initially being recognised at cost.

Under SFAS 66 investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor, rather than the legal structure of the joint arrangement. Group has assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures. Joint ventures are accounted for using the equity method, after initially being recognised at cost in the consolidated statement of financial position.

Equity method of accounting

Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the investor's share of the post-acquisition profits or losses of the investee in profit or loss, and its share of movements in other comprehensive income of the investee in other comprehensive income.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

iii. Entitas asosiasi dan pengaturan bersama (lanjutan)

Metode ekuitas (lanjutan)

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas-entitas tersebut. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi dan ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Dividen yang diterima dan yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

d. Aset keuangan

(i) Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Sebelum 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan piutang, tersedia untuk dijual, serta dimiliki hingga jatuh tempo. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***iii. Associates and joint arrangements** (continued)*

Equity method of accounting (continued)

When the Group's share of losses in an associate or joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates and joint ventures are eliminated to the extent of the Group's interest in these entities. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the associates and joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Dividends received or receivable from associates or joint ventures are recognised as a reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associates or joint venture is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associates and joint venture and its carrying value and recognises the amount in profit or loss.

d. Financial assets

(i) Classification, recognition and measurement

Before 1 January 2020

The Group classifies its financial assets in the following categories: at fair value through profit or loss, loans and receivables, available-for-sale, and held to maturity. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup hanya memiliki aset keuangan dengan kategori sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang Grup terdiri dari kas dan setara kas, deposito berjangka, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah instrumen non-derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Aset keuangan tersedia untuk dijual dimasukkan sebagai aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud melepasnya dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan - tanggal dimana Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pinjaman dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***d. Financial assets** (continued)*

***(i) Classification, recognition and measurement** (continued)*

***Before 1 January 2020** (continued)*

As at 31 December 2019, the Group only has financial assets which are categorised as loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are included in current assets, except for maturities greater than 12 months after the end of the reporting period. These are classified as non-current assets. The Group's loans and receivables comprise cash and cash equivalents, time deposits, restricted cash, trade receivables, other current financial assets, and other non-current financial assets.

Available-for-sale financial assets are non-derivatives that are either designated in this category or not classified in any of the other categories. They are included in non-current assets unless the investment matures or management intends to dispose of it within 12 months of the end of the reporting period.

Regular purchases and sale of financial assets are recognised on the trade date - the date on which the Group commits to purchase or sell the asset.

Loans and receivables are initially recognised at fair value including directly attributable transaction costs and subsequently carried at amortised cost using the effective interest method.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah sebagai berikut:

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan ditentukan berdasarkan jenis aset. Untuk aset keuangan, pengklasifikasiannya harus didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Pada 31 Desember 2020, Grup hanya memiliki klasifikasi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Berikut adalah kategori pengukuran dalam mengklasifikan instrumen utang:

Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/ (kerugian) lainnya bersama dengan keuntungan dan kerugian selisih kurs. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laba rugi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Financial assets *(continued)*

(i) Classification, recognition and measurement *(continued)*

After 1 January 2020

From 1 January 2020, the Group has adopted SFAS 71, which sets the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as follows:

Classification and measurement of financial assets are determined based on the type of assets. For financial assets, classification is determined based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition. As at 31 December 2020, the Group classifies the financial assets at the amortized cost measurement category. The Group reclassifies debt instruments when and only when its business model for managing those assets changes.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. The following are measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses) together with foreign exchange gains and losses. Impairment losses are presented as separate line items in profit or loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

(ii) Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

(iii) Saling hapus antar instrumen

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

e. Penurunan nilai aset keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset (peristiwa kerugian) dan peristiwa kerugian (atau peristiwa) tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***d. Financial assets** (continued)*

***(i) Classification, recognition and measurement** (continued)*

***After 1 January 2020** (continued)*

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

(ii) Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

(iii) Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and their net amounts are reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

e. Impairment of financial assets

Before 1 January 2020

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a loss event) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset dicatat sebesar harga perolehan diamortisasi

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan memiliki tingkat bunga mengambang, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan dalam kontrak. Untuk alasan praktis, Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika pada periode selanjutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitur), pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laporan laba rugi.

Setelah 1 Januari 2020

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward looking* untuk seluruh saldo piutang usaha. Selain untuk piutang usaha, Grup menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

Untuk piutang dagang, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang diizinkan oleh PSAK 71, yang mensyaratkan kerugian seumur hidup yang diharapkan harus diakui dari pengakuan awal piutang.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas pada bank, dan deposito berjangka dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***e. Impairment of financial assets** (continued)*

***Before 1 January 2020** (continued)*

Assets carried at amortised cost

For the loans and receivables category, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan has a floating interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the Group may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price.

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the reversal of the previously recognized impairment loss is recognised in the profit or loss.

After 1 January 2020

The Group applies the simplified approach to measure Expected Credit Loss ("ECL"), which uses a lifetime expected loss allowance on a forward looking basis for all trade receivables. Other than trade receivables, the Group applies the general model to measure ECL.

For trade receivables, the Group applies the simplified approach permitted by SFAS 71, which requires expected lifetime losses to be recognised from initial recognition of the receivables.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, and time deposits with original maturities of three months or less.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Kas dan setara kas (lanjutan)

Kas pada bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya disajikan pada akun "kas yang dibatasi penggunaannya" dan disajikan sebagai bagian aset lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang lain-lain merupakan saldo piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai. Lihat catatan 2e untuk kebijakan akuntansi terkait penurunan nilai setelah penerapan PSAK 71. Jumlah provisi penurunan nilai piutang diakui pada laba rugi dan disajikan dalam "Beban lain - lain".

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi neto. Harga perolehan untuk persediaan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai dari persediaan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari persediaan bahan baku, tenaga kerja, biaya langsung lainnya dan biaya produksi terkait (berdasarkan kapasitas normal operasi). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi biaya estimasi penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Suku cadang dan bahan pendukung lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan metode rata-rata bergerak setelah dikurangi dengan penyisihan atas persediaan usang.

i. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode manfaat masing-masing biaya.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Cash and cash equivalents *(continued)*

Cash in banks and time deposits that are restricted as to use are presented as "restricted cash" and presented as part of other assets in the consolidated statement of financial position.

g. Trade receivables and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for merchandise sold or services performed in the ordinary course of business. If collection of the receivables is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current asset. If not, they are *presented as a non-current asset.*

Other receivables are receivables arising from transactions outside the ordinary course of business.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment. Refer to note 2e for accounting policies related to impairment receivables after adoption SFAS 71. The amount of the provision impairment of receivables recognised in profit or loss within "Other expenses".

h. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Costs for inventories are determined using the weighted average method. The cost of finished goods and work in progress comprises raw materials, direct labour, other direct costs and related production overheads (based on normal operating capacity). Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and the estimated cost necessary to make the sales.

Spare parts and other consumable supplies are valued at cost, determined on a moving average basis, less provision for obsolete items.

i. Prepayments

Prepayments are amortised on a straight-line basis over the estimated beneficial periods of the prepayments.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/21 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset tetap

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Aset tetap yang tidak digunakan dinyatakan sebesar jumlah terendah antara jumlah tercatat atau nilai realisasi bersih.

Biaya hukum awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah tersebut.

Pada awalnya, semua aset tetap diakui sebesar harga perolehan dan setelahnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Bangunan	10-40 tahun/*years*	*Buildings*
Jalan dan jembatan	4-20 tahun/*years*	*Roads and bridges*
Mesin dan instalasi	4-16 tahun/*years*	*Machines and installations*
Tempat penimbunan kayu	4-10 tahun/*years*	*Wood landfills*
Alat berat dan mesin industri	4-8 tahun/*years*	*Heavy equipment and industrial machines*
Kendaraan	4-8 tahun/*years*	*Vehicles*
Peralatan kantor	4-8 tahun/*years*	*Office equipment*

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang digantikan dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi depresiasi dikeluarkan dari laporan keuangan. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi.

2. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

j. Property, plant and equipment

Land is stated at cost and not depreciated. All other fixed assets are stated at historical cost less depreciation and impairment losses. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items. Unused fixed assets are stated at the lower of carrying value or net realisable value.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the contractual life of the land rights.

Fixed assets are initially recognised at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Fixed assets are depreciated using the straight-line method over their residual values over their expected useful lives as follows:

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amounts of replaced parts are derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and any resulting gain or loss on disposal of fixed assets are recognised in profit and loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian telah selesai.

k. Tanaman produktif

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***j. Property, plant and equipment** (continued)*

Construction in progress is carried at cost including borrowing costs incurred during construction arising from debts used for funding the construction. The accumulated cost will be transferred to the respective fixed assets account when the construction is substantially completed and ready for its intended use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. An entity shall cease capitalising borrowing costs when substantially all of the activities necessary to prepare the qualifying asset are complete.

k. Bearer plants

Bearer plants are living plants used in the production or supply of agricultural produce; are expected to bear produce for more than one period; and have a remote likelihood of being sold as agricultural produce, except for incidental scrap sales.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Tanaman produktif (lanjutan)

Pohon pinus, pohon karet, pohon daun kayu putih dan tanaman produktif lain milik Grup memenuhi syarat sebagai tanaman produktif sehingga dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi untuk aset tetap.

Tanaman produktif diklasifikasikan sebagai belum menghasilkan sampai hasilnya dapat dipanen secara komersial. Ketika sudah menghasilkan, tanaman tersebut direklasifikasi menjadi tanaman produktif menghasilkan.

Secara umum, pohon pinus memerlukan waktu sekitar 11 tahun sejak penanaman bibit di area kehutanan untuk menjadi tanaman produktif menghasilkan, sedangkan pohon karet memerlukan waktu sekitar 5 tahun untuk dapat menghasilkan.

Tanaman produktif yang belum menghasilkan diukur berdasarkan akumulasi biaya perolehan yang meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan serta biaya umum termasuk kapitalisasi biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan tanaman belum menghasilkan dan dalam pengembangan serta biaya tidak langsung lainnya. Sampai saat tanaman dinyatakan menghasilkan dan dapat dipanen, tanaman produktif tidak dideplesi. Sedangkan tanaman produktif menghasilkan diukur berdasarkan akumulasi biaya dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Perhitungan deplesi tanaman produktif menghasilkan dilakukan dengan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

Pohon karet	25 tahun/*years*	*Rubber plants*
Pohon pinus	24 tahun/*years*	*Pine trees*
Pohon kayu putih	22 tahun/*years*	*Eucalyptus trees*
Gliricidia sepium	12 tahun/*years*	*Gliricidia sepium*

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Bearer plants *(continued)*

The Group's pine trees, rubber plants, eucalyptus trees and other bearer forest trees qualify as bearer plants, and are therefore accounted for under the rules for plant and equipment.

Bearer plants are classified as immature until the produce can be commercially harvested. At that point, they are reclassified as mature plants.

In general, a pine tree takes about 11 years to reach maturity from the time of planting the seedlings in the forest areal, while a rubber bearer plant takes about five years to reach maturity.

Immature bearer plants are measured at accumulated cost which include costs incurred for field preparation, planting, fertilising and maintenance, including the capitalisation of borrowing costs used to finance the development of immature bearer plants and in development phase also other indirect expenses. Up to the time the trees become commercially productive and available for harvest, bearer plants are not depleted. Mature bearer plant are measured at accumulated cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss.

Calculation of mature bearer plants depletion using straight-line method over their estimated useful lives as follows:

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset biologis

Aset biologis terdiri atas tanaman tebangan dan produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif.

Aset biologis diukur berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, lihat Catatan 14 untuk informasi lebih lanjut mengenai penentuan nilai wajar.

Biaya untuk menjual meliputi biaya penjualan dan perkiraan biaya transportasi ke pasar, tetapi tidak termasuk biaya keuangan dan pajak penghasilan.

Tanaman tebangan terdiri dari kayu jati dan kayu rimba lainnya. Kayu jati dan kayu rimba diolongkan menjadi kayu tegakan sampai dengan siap dipanen.

Kayu jati dan kayu rimba sejak saat penanaman sampai dengan siap dipanen dikategorikan sebagai aset biologis bagian tidak lancar, sedangkan kayu jati dan kayu rimba yang akan dipanen dalam waktu satu tahun digolongkan sebagai aset biologis bagian lancar.

Tanaman pinus, karet, dan beberapa jenis tanaman produksi lainnya adalah tanaman produktif sehingga disajikan dan diperhitungkan sebagai tanaman produktif (lihat Catatan 13). Namun, getah pinus, getah karet dan hasil agrikultural lainnya yang tumbuh pada tanaman, dicatat sebagai produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif sampai waktu panen. Getah pinus, getah karet dan hasil produk lainnya dipindahkan ke persediaan dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk dijual ketika dipanen.

Produk agrikultur atas tanaman pinus, karet dan beberapa jenis tanaman produktif lainnya di kategorikan sebagai aset biologis bagian lancar.

Perubahan nilai wajar tanaman tebangan serta produk agrikultur diakui dalam laporan laba rugi.

Biaya untuk menanam seperti biaya pembelian bibit, biaya tenaga kerja penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pemanenan dan biaya lain-lain dikapitalisasi sebagai bagian dari aset biologis dan akan dilakukan penyesuaian berkala terhadap pengukuran nilai wajar aset biologis.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

I. Biological assets

Biological assets comprise of consumable plant and agricultural produce growing on bearer plant.

Biological assets are measured at fair value less cost to sell, refer to Note 14 for further information on determining the fair value.

Costs to sell include the incremental selling costs and estimated costs of transport to the market but excludes finance costs and income taxes.

Consumable plant comprise of teak wood and other forest trees. Teak wood and forest trees are classified as standing timber until it is ready to produce.

Teak wood and forest trees from the time of planting until they are ready to be harvested are categorised as non-current biological assets, while teak and forest trees, which will be produced within one year are classified as current biological assets.

Pine trees, rubber plants and other types of bearer plants are productive plants so they are presented and calculated as productive plants (refer to Note 13). However, pine sap, rubber latex, and other products that grow on plants, are recorded as agricultural produce growing on bearer plants until harvest time. Pine sap, rubber latex and other products are transferred to inventories at fair value less costs to sell when produced.

Agricultural produce of pine trees, rubber plants and various types of productive plants are categorised as current biological assets.

Changes in the fair value of consumable plants and agricultural produce are recognised in the statement of profit or loss.

Costs for planting such as the cost of purchasing seeds, labour costs for planting, fertilising, maintenance, producing and other costs are capitalised as part of biological assets and periodic adjustments will be made to the measurement of the fair value of biological assets.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada tanggal pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa nilai tercatat aset tersebut mungkin tidak terpulihkan. Rugi penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pemulihan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

n. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

m. Impairment of non-financial assets

At the reporting date, the Group reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that the carrying amount of those assets may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment losses for assets other than goodwill is recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill will not be reversed.

n. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as short-term liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as long-term liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Provisi

Provisi untuk biaya restrukturisasi, tuntutan hukum, hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dan lainnya diakui ketika:

- Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif saat kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
- kemungkinan arus keluar sumber daya diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan
- jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan kelompok kewajiban. Walaupun kemungkinan arus keluar untuk setiap pos kewajiban tersebut kecil, dapat saja terdapat kemungkinan besar dibutuhkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provisi diakui.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

p. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan. Apabila tidak terdapat bukti bahwa kemungkinan besar akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai beban dibayar dimuka untuk biaya keuangan dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

o. Provision

Provision for restructuring costs, legal claims, environmental issues and others is recognised when:

- *the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events;*
- *it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and*
- *the amount can be reliably estimated.*

If there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. Although the likelihood of an outflow for any one item may be small, it may be probable that some outflow of resources will be needed to settle the class of obligations as a whole. If that is the case, a provision is recognised.

Provisions are measured at the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. Increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

p. Borrowings

Borrowings are recognised initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowing, using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment for financing cost and amortised over the period of the facility to which it relates.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pinjaman (lanjutan)

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

q. Imbalan kerja

(i) Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti, tergantung pada substansi ekonomi syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja dan kompensasi.

Grup diwajibkan menyediakan jumlah imbalan pensiun minimum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU Ketenagakerjaan") atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau PKB adalah program manfaat pasti.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Borrowings *(continued)*

All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

q. Employee benefits

(i) Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Labour Law No. 13/2003 (the "Labour Law") or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Labour Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Imbalan kerja (lanjutan)

(i) Imbalan pascakerja (lanjutan)

Sehubungan dengan program manfaat pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai kini kewajiban manfaat pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban manfaat pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* ("PUC"). Nilai kini kewajiban manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi Pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada periode dimana beban tersebut terjadi.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada program asuransi pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta, dengan dasar wajib, kontraktual dan sukarela. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar dimuka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***q. Employee benefits** (continued)*

***(i) Post-employment benefits** (continued)*

The liability recognised in the consolidated statements of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit ("PUC") method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating to the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of Government bonds are used.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss.

The Group recognises gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment on settlement comprises change in the present value of the defined benefit obligation.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

For defined contribution plans, the Group pays contributions to publicly or privately administered pension insurance plans on a mandatory, contractual and voluntary basis. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future payments is available.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Imbalan kerja (lanjutan)

(ii) Pesangon pemutusan kontrak kerja

Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja sebagai liabilitas dan beban jika, dan hanya jika, entitas berkomitmen untuk: memberhentikan pekerja; atau menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela pada tanggal yang lebih dahulu antara rencana formal terperinci atau secara realistis kecil kemungkinan untuk dibatalkan. Jika pesangon pemutusan kontrak kerja jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan maka besarnya pesangon pemutusan kontrak kerja harus didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto.

(iii) Program manfaat karyawan lainnya imbalan kerja

Kewajiban estimasian imbalan pensiun merupakan nilai kini kewajiban manfaat pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas koreksi (kerugian atau keuntungan) aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban manfaat pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode PUC. Nilai kini kewajiban manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa yang akan datang dengan menggunakan tingkat bunga obligasi jangka panjang yang berkualitas tinggi dalam mata uang Rupiah yang dengannya manfaat tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan kewajiban manfaat pensiun yang bersangkutan.

Imbalan kerja lain meliputi program santunan hari tua, cuti besar dan penghargaan masa pengabdian.

r. Pendapatan dan beban

Sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal Grup. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon dan setelah mengeliminasi penjualan dalam Grup.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***q. Employee benefits** (continued)*

(ii) Termination benefits

The Group recognises termination benefits as liabilities and expenses when, and only when, the entity is demonstrably committed to either: terminate the employment of the employee before the normal retirement date; or provide termination benefits as a result of an offer made in order to encourage voluntary redundancy at the earlier of dates between a detailed formal plan or without realistic possibility of withdrawal. Where termination benefits fall due later than 12 months after the reporting period, they should be discounted using the discount rate.

(iii) Other employee benefits program

Estimated pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets and adjustments for correction (loss or gain) actuarial and past service costs not yet recognised. The defined benefit obligation is calculated by independent actuaries using the PUC method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash flows that will come with the use of long-term bond interest rates are high quality in Rupiah currency with which the benefits will be paid and that have terms to maturity equal to the pension benefit obligation is concerned.

Other employee benefits include old-age benefit programs, awards of leave and award period of service.

r. Revenue and expenses

Before 1 January 2020

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods and services in the ordinary course of the Group's activities. Revenue is shown net of value-added tax, returns, rebates and discounts and after eliminating sales within the Group.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Grup mengakui pendapatan ketika jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan akan mengalir kepada entitas dan kriteria tertentu telah dipenuhi untuk setiap aktivitas Grup seperti dijelaskan dibawah ini. Grup menggunakan hasil historis, dengan mempertimbangkan tipe pelanggan, tipe transaksi dan persyaratan setiap transaksi sebagai dasar estimasi.

(i) Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang (kayu, getah pinus, gondorukem, terpentin dan derivatif dan lainnya) diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- Grup telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- kemungkinan besar manfaat ekonomis yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup; dan
- biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

Terpenuhinya kondisi tersebut tergantung persyaratan penjualan dengan setiap pelanggan. Secara umum risiko dan manfaat dianggap telah berpindah ke pelanggan ketika terjadi transfer kepemilikan dan risiko kerugian yang diasuransi.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***r. Revenue and expenses** (continued)*

***Before 1 January 2020** (continued)*

The Group recognises revenue when the amount of revenue can be reliably measured it is probable that future economic benefits will flow to the entity and when specific criteria have been met for each of the Group's activities as described below. The Group bases its estimates on historical results, taking into consideration the type of customer, the type of transaction and the specifics of each arrangement.

(i) Sale of goods

Revenue from sale of goods (wood, pine sap, gum rosin, turpentine and derivative and others) is recognised when all of the following conditions are fulfilled:

- *the Group has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods;*
- *the Group retains neither continuing managerial involvement nor effective control over the goods sold;*
- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and*
- *the costs incurred or to be incurred with respect to the sales transaction can be measured reliably.*

The satisfaction of these conditions depends on the terms of trade with individual customers. Generally, the risks and rewards are considered to be transferred to the customer when the title and insurable risk of loss are transferred.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

(ii) Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Ketika pinjaman atau piutang mengalami penurunan nilai, Grup mengurangi nilai tercatat pinjaman dan piutang tersebut menjadi jumlah terpulihkannya, yakni estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan berdasarkan suku bunga efektif awal dari instrumen tersebut, dan terus mengamortisasi diskonto sebagai pendapatan bunga. Pendapatan bunga atas pinjaman dan piutang yang mengalami penurunan nilai diakui menggunakan suku bunga efektif awal.

(iii) Pendapatan sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi (setelah dikurangi insentif kepada *lessee*) diakui menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

(iv) Pendapatan jasa

Pendapatan yang berasal dari transaksi penjualan jasa diakui pada periode akuntansi dimana jasa diberikan, dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi dan dinilai berdasarkan jasa aktual yang telah diberikan sebagai proporsi atas jumlah jasa yang harus diberikan.

(v) Kontrak rehabilitasi

Pendapatan dari kontrak rehabilitasi diakui dengan metode persentase penyelesaian untuk menentukan jumlah yang tepat untuk diakui dalam periode tertentu; tahap penyelesaian ditentukan dengan mengacu pada proporsi biaya yang terjadi sampai dengan tanggal pelaporan terhadap estimasi total biaya untuk setiap kontrak. Laba atas kontrak diakui apabila hasil kontrak tersebut dapat diestimasi dengan andal. Apabila terdapat kemungkinan besar bahwa biaya kontrak keseluruhan akan melebihi pendapatan kontrak keseluruhan, kerugian yang diperkirakan akan terjadi segera diakui sebagai beban.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Revenue and expenses *(continued)*

Before 1 January 2020 *(continued)*

(ii) Interest income

Interest income is recognised using the effective interest method. When a loan or receivable is impaired, the Group reduces the carrying amount to its recoverable amount, being the estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate of the instrument, and continues to unwind the discount as interest income. Interest income on impaired loans and receivables is recognised using the original effective interest rate.

(iii) Rental income

Rental income from operating leases (net of any incentives given to the lessee) is recognised on a straight-line basis over the lease term.

(iv) Sales of services

Revenue derived from sales of services is recognised in the accounting period in which the services are rendered, by referring to the stage of completion of the specific transaction and assessed on the basis of the actual service provided as a proportion of the total service to be provided.

(v) Rehabilitation contracts

Revenue from rehabilitation contracts is recognised using the percentage-of-completion method to determine the appropriate amount to be recognised in a given period; the stage of completion is measured by reference to the cost incurred to date compared to the estimated total cost for each contract. The profit for a contract is recognised as soon as it can be estimated reliably. When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss is recognised as an expense immediately.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

(v) Kontrak rehabilitasi

Keseluruhan biaya yang terjadi dan laba yang diakui untuk setiap kontrak yang belum selesai dibandingkan dengan jumlah yang telah ditagih sampai akhir tahun. Apabila jumlah biaya yang terjadi dan laba yang diakui lebih besar daripada tagihan, maka jumlah tersebut disajikan sebagai "Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak kepada pemberi kerja". Apabila jumlah tagihan lebih besar daripada biaya yang terjadi dan laba yang diakui, maka jumlah tersebut disajikan sebagai "Utang bruto kepada pemberi kerja untuk pekerjaan kontrak rehabilitasi".

Setelah 1 Januari 2020

Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah penilaian sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Penentuan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasi harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah marjin.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Revenue and expenses *(continued)*

Before 1 January 2020 *(continued)*

(v) Rehabilitation contracts

The aggregate of the costs incurred and recognised profits for each uncompleted contracts are compared against the progress billing up to the year end. When the sum of the costs incurred and recognised profits exceed the progress billing, the excess balance is presented as "Rehabilitation contract work in progress due from customers". When the progress billings exceed the sum of the costs incurred and recognised profits incurred, the excess balance is presented as "Amount due to customers for rehabilitation contract work".

After 1 January 2020

From 1 January 2020, the Group has applied SFAS 72, which requires revenue recognition to fullfil five steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee that will be paid during the contract period.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative standalone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/33 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Kriteria tertentu juga harus dipenuhi untuk setiap aktivitas Grup seperti yang dijelaskan dibawah ini.

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

a) Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
b) Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan pelayanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pengakuan beban

Pengakuan beban dalam laporan laba rugi dilakukan atas dasar akrual.

s. Sewa

Sebelum 1 Januari 2020

Grup menyewa aset tetap tertentu. Sewa aset tetap dimana Grup, sebagai *lessee*, memiliki sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini pembayaran sewa minimum.

Kewajiban sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa pembiayaan". Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan beban keuangan sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa manfaat aset dan masa sewa apabila tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***r. Revenue and expenses** (continued)*

***After 1 January 2020** (continued)*

The specific criteria also must be met for each of the Group's activities as described below.

A performance obligation may be satisfied at the following:

a) A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer);or

b) Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Expense recognition

Expense recognition in profit or loss is recorded on an accrual basis.

s. Leases

Before 1 January 2020

The Group leases certain property, plant and equipment. Leases of property, plant and equipment where the Group as lessee has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased asset and the present value of the minimum lease payments.

The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "financial lease liabilities". Each lease payment is allocated between the liability and finance cost so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The finance cost is charged to the profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The property, plant and equipment acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership at the end of the lease term.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh *lessor* diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi insentif yang diterima dari *lessor*) dibebankan pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa.

Setelah 1 Januari 2020

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  a) Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
  b) Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif dari komponen sewa dan harga jual berdiri sendiri agregat dari komponen non sewa.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Leases *(continued)*

Before 1 January 2020 *(continued)*

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease.

After 1 January 2020

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for a consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used and:*
  a) The Group has the right to operate the asset; or
  b) The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative standalone prices and the aggregate standalone price of the non-lease components.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Grup hanya memiliki perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai penyewa. Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Leases *(continued)*

After 1 January 2020 *(continued)*

The Group only has lease agreement where the Group act as a lessee. The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liabilities adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liabilities is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liabilities comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liabilities so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Sewa (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

t. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi dimana entitas tersebut beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	2020	2019	
1 Dolar Amerika ("USD")	14,105	13,901	*1 United States Dollar ("USD")*

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***s. Leases** (continued)*

***After 1 January 2020** (continued)*

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

t. Foreign currency translation

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the functional currency). The consolidated financial statements are presented in Rupiah ("Rp"), which is the Group's functional and presentation currency.

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of transaction. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the consolidated statement of financial position date, the exchange rate used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full Rupiah amount):

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) tentang "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 29.

v. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara dimana Perusahaan dan entitas anaknya beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan, ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan. Tarif pajak yang digunakan untuk tahun 2020 adalah sebesar 22% dan 20%.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

u. Related parties transactions

Group enters into transactions with related parties as defined in SFAS 7 (revised 2015) "Related party transactions". Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 29.

v. Taxation

Tax expenses comprise current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted as at the reporting date in the countries where the Company and its subsidiaries operate and generate taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. Management establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit nor loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted at the start of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled. The tax rate used for period 2020 is 22% and 20%.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Perpajakan (lanjutan)

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dan asosiasi, dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak tangguhan dimana saat pemulihan perbedaan sementara dikendalikan oleh Grup dan sangat mungkin perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Taxation *(continued)*

Deferred income tax is provided on temporary differences arising on investment in subsidiaries and associates, except for deferred income tax liability where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan konsolidasian Grup.

Komite Manajemen Risiko dilaksanakan dibawah Dewan Pengawas Perusahaan.

a. Faktor risiko keuangan

Grup memiliki risiko yang muncul dari perubahan lingkungan dan iklim, harga komoditas, dan risiko pembiayaan.

Penyebaran geografis dan luasan tanaman Grup memungkinkan tingkat mitigasi yang tinggi terhadap kondisi iklim yang merugikan seperti kekeringan dan hama. Grup memiliki kebijakan dan prosedur lingkungan yang kuat untuk mematuhi perundang-undangan lingkungan dan aturan lainnya.

Grup memiliki risiko yang timbul dari fluktuasi harga dan volume penjualan atas aset biologisnya.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign currency exchange rates risk and interest rates risk), credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management are to identify, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential adverse effects on the consolidated financial performance of the Group.

Committee Risk Management is carried out under monitoring by the Company's Board of Supervisors.

a. Financial risk factors

The Group is exposed to risks arising from environmental and climatic changes, commodity prices, and financing risks.

The Group's geographic spread of plants allows a high degree of mitigation against adverse climatic conditions such as droughts and pests. The Group has strong environmental policies and procedures in place to comply with environmental and other laws.

The Group is exposed to risks arising from fluctuations in the price and sales volume of biological assets.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Sifat musiman dari usaha kayu tebangan dan hasil produksi lainnya membutuhkan tingkat arus kas yang tinggi. Grup secara aktif mengelola persyaratan modal kerja dan telah mendapatkan fasilitas kredit yang cukup untuk memenuhi persyaratan arus kas.

b. Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar telah diperkirakan dan akan terus memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Grup terutama berasal dari penjualan ekspor.

Grup tidak melakukan lindung nilai atas eksposur nilai tukar mata uang asing. Untuk mengelola eksposur atas nilai tukar mata uang asing tersebut, kebijakan Grup adalah memastikan bahwa total eksposur tetap pada batas yang dapat diterima dengan menjual atau membeli valuta asing dengan kurs spot saat diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika USD melemah/menguat 10% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak penghasilan akan bertambah/berkurang Rp19.495 pada tahun 2020 terutama yang timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

(ii) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Grup timbul dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dalam mata uang Rupiah. Risiko suku bunga dari kas dan deposito tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang 100 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain tetap, beban keuangan untuk tahun berjalan akan menjadi lebih tinggi/lebih rendah sebesar Rp5.760 (2019: Rp5.879).

***3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Financial risk factors** (continued)*

The seasonal nature of the standing timber business requires a high level of cash flow. The Group actively manages the working capital requirements and has secured sufficient credit facilities to meet the cash flow requirements.

b. Market risk

(i) Foreign exchange risk

Changes in exchange rates have affected and may continue to affect results of the Group's operations and cash flows especially from export sales.

The Group does not hedge its foreign currency exposure. To manage its foreign currency exposure, the Group's policy is to ensure that its net exposure is kept to an acceptable level by buying or selling foreign currencies at spot rates when necessary to address short-term imbalances.

As at 31 December 2020, if the USD had weakened/strengthened by 10% against the foreign currency with all other variables held constant, profit before income tax would have been increased/decreased by Rp19,495 in 2020, mainly as a result of foreign exchange losses on translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

(ii) Interest rate risk

The Group's interest rate risk arises from short-term and long-term borrowings denominated in Rupiah. The interest rate risk from cash and deposits is not significant and all other financial instruments are not interest bearing. Borrowing issued at variable rates exposes the Group to cash flow interest rate risk.

As at 31 December 2020, if interest rates on short-term and long-term borrowings had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, the finance costs for the year would have been Rp5,760 (2019: Rp5,879) higher/lower.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp1.089.597 (2019: Rp1.314.400). Risiko kredit terutama berasal dari penempatan dana pada bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan aset keuangan lainnya.

Semua kas di bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank lokal yang memiliki reputasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo dari piutang usaha dan aset keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

***3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

c. Credit risk

As at 31 December 2020, the total maximum exposure from credit risk was Rp1,089,597 (2019: Rp1,314,400). Credit risk arises from cash in banks, restricted cash, trade receivables, and other financial assets.

All the cash in banks and restricted deposits are placed in reputable local banks.

As at 31 December 2020 and 2019, the balances outstanding from trade receivables and other financial assets are as follows:

	2020		
	Piutang usaha/ *Trade receivables*	**Aset keuangan lainnya /*Other financial assets***	
Belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai	85,355	55,571	*Neither past due nor impaired*
Telah jatuh tempo tapi tidak mengalami penurunan nilai	83,319	10,164	*Past due but not impaired*
Mengalami penurunan nilai	111,356	114,767	*Impaired*
	280,030	180,502	
Dikurangi:			*Less:*
Provisi penurunan nilai	(111,356)	(114,767)	*Provision for impairment*
	168,674	**65,735**	

	2019		
	Piutang usaha/ *Trade receivables*	**Aset keuangan lainnya /*Other financial assets***	
Belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai	100,519	48,926	*Neither past due nor impaired*
Telah jatuh tempo tapi tidak mengalami penurunan nilai	78,566	20,020	*Past due but not impaired*
Mengalami penurunan nilai	107,737	100,806	*Impaired*
	286,822	169,752	
Dikurangi:			*Less:*
Provisi penurunan nilai	(107,737)	(100,806)	*Provision for impairment*
	179,085	**68,946**	

Saldo piutang lain-lain di atas terutama berasal dari karyawan.

Other receivables mainly consist of loans to employees.

Lihat Catatan 8 untuk pembahasan mengenai risiko kredit piutang usaha.

Refer to Note 8 for explanation related to credit risk from trade receivables.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko kredit (lanjutan)

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk penjualan kayu tebangan, gondorukem dan terpentin dan produk lainnya, dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang usaha yang bermasalah.

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas Grup mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Untuk mengatur risiko likuiditas, Grup memonitor dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Grup dan mengurangi pengaruh fluktuasi arus kas. Manajemen Grup juga secara rutin memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Credit risk (continued)

Management is confident in its ability to continue to control and maintain minimal exposure to credit risk, since the Group has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for sales of timber, gum rosin and turpentine and other product, and historically low levels of bad debts.

d. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as a risk that arises in situations where the cash inflow from short-term revenue is not enough to cover the cash outflow of short-term expenditure. To manage its liquidity risk, the Group monitors its level of cash and cash equivalents and maintains these at a level deemed adequate to finance the Group's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flow. The Group's management also regularly monitors projected and actual cash flow, including loan maturity profiles and continuously assesses the financial markets for opportunities to raise funds.

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/ *More than one year and not later than five years*	Lebih dari lima tahun/ *More than five years*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2020					***31 December 2020***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Liabilitas jangka pendek					***Short-term liabilities***
Utang usaha	63,987	-	-	63,987	*Trade payables*
Beban akrual	231,217	-	-	231,217	*Accrued expenses*
Pinjaman bank	189,530	-	-	189,530	*Bank loans*
Pinjaman pihak ketiga	540	-	-	540	*Third party borrowings*
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	14,373	-	-	14,373	*Other short-term financial liabilities*
Liabilitas sewa pembiayaan jangka pendek	26,501	-	-	26,501	*Short-term financial lease liabilities*
Jumlah liabilitas jangka pendek	**526,148**	**-**	**-**	**526,148**	***Total short-term liabilities***

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

d. Risiko likuiditas (lanjutan) / *d. Liquidity risk (continued)*

	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/ *More than one year and not later than five years*	Lebih dari lima tahun/ *More than five years*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2020					***31 December 2020***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Liabilitas jangka panjang					***Long-term liabilities***
Pinjaman bank	-	203,957	11,660	215,617	*Bank loans*
Pinjaman pihak ketiga	-	2,160	181,787	183,947	*Third party borrowings*
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya	-	66,115	-	66,115	*Other long-term financial liabilities*
Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang	-	17,434	-	17,434	*Long-term financial lease liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang	**-**	**289,666**	**193,447**	**483,113**	***Total long-term liabilities***
Jumlah liabilitas	**526,148**	**289,666**	**193,447**	**1,009,261**	***Total liabilities***
31 Desember 2019					***31 December 2019***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Liabilitas jangka pendek					***Short-term liabilities***
Utang usaha	219,120	-	-	219,120	*Trade payables*
Beban akrual	212,330	-	-	212,330	*Accrued expenses*
Pinjaman bank	292,849	-	-	292,849	*Bank loans*
Pinjaman pihak ketiga	702	-	-	702	*Third party borrowings*
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	7,188	-	-	7,188	*Other short-term financial liabilities*
Jumlah liabilitas jangka pendek	**732,189**	**-**	**-**	**732,189**	***Total short-term liabilities***
Liabilitas jangka panjang					***Long-term liabilities***
Pinjaman bank	-	140,479	-	140,479	*Bank loans*
Pinjaman pihak ketiga	-	89,060	90,891	179,951	*Third party borrowings*
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya	-	55,970	-	55,970	*Other long-term financial liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang	**-**	**285,509**	**90,891**	**376,400**	***Total long-term liabilities***
Jumlah liabilitas	**732,189**	**285,509**	**90,891**	**1,108,589**	***Total liabilities***

e. Manajemen modal / *e. Capital management*

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemilik modal dan pemangku kepentingan lainnya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemilik modal, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

In managing capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to its capital owner and other stakeholders.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the capital owner, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditure and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between its level of borrowing and equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. There were no changes in the Group's approach to capital management during the year.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

f. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun diperkirakan mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek.

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun diperkirakan mendekati nilai wajar karena dampak dari diskonto arus kas tidak signifikan.

***3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

f. Fair value of financial instruments

The carrying amount for financial assets and liabilities with maturity less than one year are considered to approximate their fair value due to their short-term maturity.

The carrying amount for financial assets and liabilities with maturity more than one year are considered to approximate their fair values because the impact of discounting is not significant.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, asumsi dan penilaian yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan.

Grup telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang signifikan berikut dimana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan dalam periode mendatang.

a. Aset biologis

Dalam mengukur nilai wajar tanaman tebangan dan produk agrikultur, diperlukan berbagai macam estimasi dan pertimbangan.

i. Pohon jati dan rimba

Estimasi dan pertimbangan dalam menentukan nilai wajar kayu tegakan berhubungan dengan harga, volume, kualitas tegakan, ekpektasi perkembangan, dan diameter batang.

Kayu tegakan tumbuh pada tingkat yang berbeda-beda dipengaruhi banyak faktor misalnya curah hujan dan unsur hara tanah.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, assumptions and judgements that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following critical accounting policies under which significant judgements, estimates, and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods.

a. Biological assets

In measuring the fair value of consumable plants and agricultural produce various management estimates and judgements are required.

i. Teak wood and forest tree

Estimates and judgements in determining the fair value of standing timber at the early stage relate to prices, volume, quality of standing timber, growth expectation, and diameter of standing timber.

Standing timber grow at different rates that are influenced by many factors for example rainfall and soil nutrients.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Aset biologis (lanjutan)

i. Pohon jati dan rimba (lanjutan)

Volume kayu tegakan dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan tumbuh, tingkat kerusakan hutan, estimasi pengukuran volume tegakan dibandingkan dengan realisasi dan tingkat keamanan. Sedangkan untuk harga jual dipengaruhi beberapa hal seperti umur, komposisi kayu (sortimen), kualitas dan panjang.

ii. Produk agrikultur

Estimasi dan pertimbangan dalam menentukan nilai wajar produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif mencakup volume dan siklus produksi tanaman produktif pada tanggal laporan keuangan, hasil produksi per siklus, dan harga jual produk tanaman produksi pada saat periode pelaporan.

b. Penyusutan dan masa manfaat aset tetap dan tanaman produktif

Penyusutan dan masa manfaat atas aset tetap dan tanaman produktif ditentukan berdasarkan estimasi, dimana beban penyusutan akan disesuaikan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau jika aset dihapusbukukan atau dilakukan penurunan nilai karena dihentikan penggunaannya.

Masa manfaat aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diperkirakan dapat digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman terhadap aset sejenis. Taksiran masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam waktu dan biaya yang terjadi karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan taksiran masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

***4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

***a. Biological assets** (continued)*

***i. Teak wood and forest tree** (continued)*

Volume of standing timber can be influenced by the success growth rate, the level of deforestation rate, estimated measurement of standing timber volume compared to realisation and safety level. While for the selling price can be influenced by several things such as age, composition (sortimen), quality and length.

ii. Agricultural produce

Estimates and judgements in determining the fair value of the agricultural produce on bearer plants include the volume and cycle of production as at the balance date, average production per cycle, and price as at reporting period.

b. Depreciation and useful lives of fixed assets and bearer plants

Depreciation expense and the useful lives of fixed assets and bearer plants are determined based on estimate whereas the depreciation expense will be revised if the useful lives are different from those previously estimated or in case the assets are written off or are impaired due to retirement.

The useful lives of the Group's fixed assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar businesses, internal technical evaluations and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitation on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amount and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation expenses and decrease the carrying values of fixed assets.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Penyusutan dan masa manfaat aset tetap dan tanaman produktif (lanjutan)

Jumlah dan waktu pencatatan beban untuk setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas berbagai faktor dan situasi tersebut. Pengurangan estimasi masa manfaat dari aset tetap Grup akan meningkatkan beban pokok pendapatan dan beban usaha, serta menurunkan nilai aset tidak lancar yang dicatat.

c. Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja lainnya

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

d. Menentukan pajak penghasilan

Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

***4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

***b. Depreciation and useful lives of fixed assets and bearer plants** (continued)*

The amount and timing of recorded expenses for any year will be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Group's property, plant and equipment will increase the recorded cost of revenue, operating expenses and decrease non-current assets.

c. Estimation of pension cost and other employee benefits

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data related to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions.

d. Determining income taxes

In certain circumstances, the Group may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by or negotiations with the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Menentukan pajak penghasilan (lanjutan)

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Sama seperti "penurunan nilai aset non-keuangan", asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas, dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

e. Penyisihan penurunan nilai atas piutang

Grup menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") piutang usaha dan piutang lain-lain. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan infomasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisa.

***4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

***d. Determining income taxes** (continued)*

All judgments and estimates made by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which depends on the generation of sufficient future taxable profits. Similar to "impairment of non-financial assets", assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates and assumptions regarding the expected production levels, sales volume, commodity prices, etc, which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

e. Provision for the impairment of receivables

The Group calculates Expected Credit Loss ("ECL") for trade receivables and other receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/47 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Penyisihan penurunan nilai atas piutang (lanjutan)

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

f. Nilai realisasi bersih persediaan

Nilai realisasi bersih merupakan jumlah bersih yang diharapkan oleh entitas terealisasi dari penjualan persediaan pada bisnis normal. Nilai wajar merefleksikan harga dimana transaksi untuk menjual persediaan yang sama di pasar utama (atau paling menguntungkan) untuk persediaan yang terletak di partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Estimasi nilai realisasi bersih berdasarkan bukti yang paling andal yang tersedia pada saat estimasi dibuat, pada jumlah persediaan yang diharapkan untuk terealisasi. Estimasi ini mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya secara langsung terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah akhir periode dimana peristiwa tersebut menyatakan kondisi yang terjadi pada akhir tahun.

***4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

***e. Provision for the impairment of receivables** (continued)*

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and ECL is a significant estimate. The amount of ECL is sensitive to changes in circumstances and forecast of economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

f. Net realisable value of inventories

Net realizable value refers to the net amount that an entity expects to realise from the sale of inventory in the ordinary course of business. Fair value reflects the price at which an orderly transaction to sell the same inventory in the principal (or most advantageous) market for inventory that would take place between market participants at the measurement date. Estimates of net realisable value are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made, of the amount the inventories are expected to realise. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the end of the period to the extent that such events confirm conditions existing at the end of the year.

5. KOMBINASI BISNIS DIBAWAH ENTITAS PENGENDALI

SK Menteri Keuangan No. 469/KMK.06/2014 tanggal 1 Oktober 2014 menetapkan nilai penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp1.182.448. Nilai ini merupakan nilai sementara yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV dan PT Inhutani V dalam rangka pembentukan induk perusahaan kehutanan.

Besar rincian kepemilikan yang dipindahkan adalah sebagai berikut:

5. BUSINESS COMBINATION UNDER COMMON CONTROL

Minister of Finance Decree No. 469/KMK.06/2014 dated 1 October 2014 stipulated the value of the Additional Capital Investment into the Company amounting to Rp1,182,448. The additional capital is recognised as temporary value of capital from Republic Indonesia in PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV and PT Inhutani V for the purpose of establishing a forestry holding company.

The details of ownership transferred are as follows:

No	Nama Perseroan Terbatas/*Name of Company*	Jumlah/*Amount* (Rp)
1	PT Inhutani I	450,333
2	PT Inhutani II	183,083
3	PT Inhutani III	324,120
4	PT Inhutani IV	92,253
5	PT Inhutani V	132,659
Total		**1,182,448**

5. KOMBINASI BISNIS DIBAWAH ENTITAS PENGENDALI (lanjutan)

Sesuai dengan PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali, transaksi ini dibukukan dengan nilai buku yang diperoleh dari masing-masing perusahaan tersebut. Selisih antara nilai investasi dan aset neto dari masing - masing anak perusahaan dicatat sebagai tambahan modal disetor.

Selisih nilai investasi dicatat dengan aset neto yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Inhutani I	205,935	*Inhutani I*
Inhutani II	111,112	*Inhutani II*
Inhutani III	54,667	*Inhutani III*
Inhutani IV	61,758	*Inhutani IV*
Inhutani V	118,683	*Inhutani V*
Aset neto	552,155	*Net assets*
Investasi di PT Inhutani I-V	(1,182,448)	*Investments in PT Inhutani I-V*
Tambahan modal disetor	**(630,293)**	***Additional paid-in capital***

Keputusan Menteri Keuangan No. 619/KMK.06/2015 tanggal 25 Mei 2015 menetapkan bahwa nilai tetap penambahan modal negara sehubungan dengan proses pembentukan induk perusahaan kehutanan di atas menjadi sebesar Rp1.886.303 dengan rincian sebagai berikut:

Inhutani I	1,211,262	*Inhutani I*
Inhutani II	225,707	*Inhutani II*
Inhutani III	308,509	*Inhutani III*
Inhutani IV	64,920	*Inhutani IV*
Inhutani V	75,905	*Inhutani V*
Jumlah	**1,886,303**	***Total***

Adanya penambahan nilai setoran modal negara ini menyebabkan tambahan nilai investasi yang dicatat sebesar Rp703.855.

Total tambahan modal disetor yang dihasilkan dari kombinasi bisnis di bawah entitas pengendali adalah sebesar Rp1.334.148.

***5. BUSINESS COMBINATION UNDER COMMON CONTROL** (continued)*

In accordance to SFAS 38 Business Combinations of Entities Under Common Control, the transactions are recognised at the book value of each entity. Differences that arise from investment value and net asset from each of subsidiary are recognised as additional paid-in capital.

Differences in value of investments recognised with the net assets acquired are as follows:

The Decree of the Minister of Finance No. 619/KMK.06/2015 dated 25 May 2015 determined that the definitive value of additional capital investment in relation to the process of establishment of the forestry holding company referred above amounting to Rp1,886,303 with details as follows:

The additional capital investment resulted in the increase of additional investment value of Rp703,855.

Total additional paid-in capital resulted from business combination under common control amounting to Rp1,334,148.

6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2020	**2019**	
Kas	3,907	4,960	*Cash on hand*
Kas pada bank	581,713	639,155	*Cash in banks*
Deposito berjangka	122,202	380,837	*Time deposits*
	707,822	**1,024,952**	

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *6. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

	2020	2019	
Kas	**3,907**	**4,960**	***Cash on hand***
Kas pada bank			***Cash in banks***
Entitas berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
Rupiah:			*Rupiah:*
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. ("BRI")	280,931	397,421	*PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. ("BRI")*
PT Bank Tabungan Negara, Tbk. ("BTN")	153,594	99,055	*PT Bank Tabungan Negara, Tbk. ("BTN")*
PT Bank Mandiri, Tbk. ("Mandiri")	68,137	59,698	*PT Bank Mandiri, Tbk. ("Mandiri")*
PT Bank Negara Indonesia, Tbk. ("BNI")	25,095	16,366	*PT Bank Negara Indonesia, Tbk. ("BNI")*
PT Bank Pembangunan Daerah ("BPD")	1,092	1,002	*PT Bank Pembangunan Daerah ("BPD")*
	528,849	573,542	
Dolar Amerika Serikat:			*United States Dollar:*
BRI	22,635	54,804	*BRI*
BNI	18,183	6,176	*BNI*
Mandiri	9,179	3,589	*Mandiri*
	49,997	64,569	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah:			*Rupiah:*
PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA")	1,181	1,013	*PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA")*
PT Bank Muamalat	3	3	*PT Bank Muamalat*
	1,184	1,016	
Dolar Amerika Serikat:			*United States Dollar:*
BCA	1,683	28	*BCA*
	581,713	**639,155**	
Deposito berjangka			***Time deposits***
Entitas berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
Rupiah:			*Rupiah:*
BRI	37,997	206,103	*BRI*
Mandiri	30,794	80,793	*Mandiri*
BNI	45,411	37,980	*BNI*
BTN	3,500	11,350	*BTN*
BPD	4,500	-	*BPD*
	122,202	336,226	
Dolar Amerika Serikat:			*United States Dollar:*
BNI	-	40,611	*BNI*
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah:			*Rupiah:*
PT Bank Bukopin, Tbk.	-	4,000	*PT Bank Bukopin, Tbk.*
	122,202	**380,837**	
	707,822	**1,024,952**	

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *6. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

Informasi lainnya sehubungan dengan kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

- Kas pada bank dapat ditarik setiap saat;
- Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas pada bank dan deposito bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

Other information relating to cash and cash equivalents are as follows:

- *Cash in banks can be withdrawn at any time;*
- *Contractual interest rates on cash in banks and short-term bank deposits are as follows:*

	2020	2019	
Rupiah	0.00% - 6.00%	0.25% - 8.00%	*Rupiah*
Mata uang asing	0.00% - 5.25%	0.10% - 0.19%	*Foreign currency*

7. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA / *7. RESTRICTED CASH*

	2020	2019	
Kas di bank			***Cash in banks***
Entitas berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
Rupiah:			*Rupiah:*
BRI	67,621	862	*BRI*
Dollar Amerika Serikat:			*United States Dollar:*
Mandiri	-	1,634	*Mandiri*
	67,621	**2,496**	
Deposito berjangka			***Time deposits***
Entitas berelasi dengan Pemerintah			*Government related entities*
Rupiah:			*Rupiah:*
Mandiri	50,000	-	*Mandiri*
BRI	18,600	9,056	*BRI*
BNI	2,000	2,000	*BNI*
	70,600	**11,056**	
	138,221	**13,552**	

Penempatan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya di BRI sebesar Rp27.621 (2019: nil) digunakan sebagai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan rehabilitasi yang masih berjalan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan konsolidasian.

Placement of restricted cash and time deposit in BRI amounting to Rp27,621 (2019: nil) are used as performance guarantee for rehabilitation service that is still in progress until the consolidated financial reporting date.

Penempatan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya di BRI, Mandiri, dan BNI sebesar Rp110.600 (2019: Rp11.462) digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman bank untuk keperluan tambahan modal kerja (Lihat Catatan 18).

Placement of restricted cash and time deposit in BRI, Mandiri, and BNI amounting to Rp110,600 (2019: Rp11,462) are used as collateral for bank loans for additional working capital loan (Refer to Note 18).

Tingkat bunga per tahun atas kas yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka selama tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Annual interest rates on restricted cash and time deposits during 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
Rupiah	0.25% - 4.75%	4.50% - 7.25%	*Rupiah*
Mata uang asing	0.00%	0.50%	*Foreign currency*

8. PIUTANG USAHA / *8. TRADE RECEIVABLES*

	2020	2019	
Pihak ketiga	277,649	283,477	*Third parties*
Penyisihan penurunan nilai	(111,298)	(107,737)	*Provision for impairment*
Piutang usaha pihak ketiga - bersih	**166,351**	**175,740**	***Third parties - net***
Pihak berelasi	2,381	3,345	*Related parties*
Penyisihan penurunan nilai	(58)	-	*Provision for impairment*
Pihak berelasi (Catatan 29) - bersih	**2,323**	**3,345**	***Related parties (Note 29) - net***

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The aging of trade receivables are as follows:*

Piutang usaha			*Trade receivables*
Lancar	85,355	100,519	*Current*
Jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 30 hari	47,591	74,842	*1 - 30 days*
30 - 90 hari	26,438	3,523	*30 - 90 days*
Lebih dari 90 hari	120,646	107,938	*Over 90 days*
Penyisihan penurunan nilai			*Provision for impairment*
- Pihak ketiga	(111,298)	(107,737)	*Third parties -*
- Pihak berelasi	(58)	-	*Related parties -*
Piutang usaha, bersih	**168,674**	**179,085**	***Trade receivables, net***

Piutang usaha merupakan piutang tanpa bunga. Karena jatuh temponya yang pendek, jumlah tercatat piutang usaha kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

Trade receivables are non-interest bearing. Due to the short-term nature of trade receivables, their carrying amount approximates their fair values.

Berdasarkan penelaahan terhadap status piutang usaha masing-masing pelanggan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa nilai penyisihan penurunan nilai piutang tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on the review of the status of the trade receivable of each customers at the reporting date, management believes that the provision for impairment of receivables is adequate to cover possible losses from the uncollectible trade receivables.

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movement in the provision for impairment of trade receivables are as follows:

	2020	2019	
Saldo awal	(107,737)	(100,558)	*Beginning balance*
Penyisihan	(7,026)	(12,426)	*Provision*
Pemulihan	3,407	5,247	*Reversal*
Saldo akhir	**(111,356)**	**(107,737)**	***Ending balance***

9. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA / *9. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS*

	2020	2019	
Piutang pegawai	101,062	92,364	*Employee receivables*
Piutang uang kerjasama	11,871	10,173	*Cooperation receivables*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi kepada pemberi kerja	47,978	33,414	*Construction contract work in progress due from customers*
Uang jaminan	-	5,822	*Refundable deposits*
Piutang sewa	8,123	4,820	*Rent receivables*
Piutang lainnya	11,468	23,159	*Other receivables*
	180,502	169,752	
Penyisihan aset keuangan lancar lainnya	(114,767)	(100,806)	*Allowance for other current financial assets*
Aset keuangan lancar lainnya - bersih	**65,735**	**68,946**	***Other current financial assets – net***

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lainnya adalah sebagai berikut:

Movement in the provision for impairment of other receivables are as follows:

	2020	2019	
Saldo awal	(100,806)	(111,839)	*Beginning balance*
Penyisihan	(14,104)	-	*Provision*
Pemulihan	66	10,864	*Reversal*
Reklasifikasi	77	169	*Reclassification*
Saldo akhir	**(114,767)**	**(100,806)**	***Ending balance***

10. PERSEDIAAN / *10. INVENTORIES*

	2020	2019	
Persediaan produk:			*Inventory products:*
Kayu bulat	138,382	147,944	*Logs*
Gondorukem	22,906	54,966	*Gum rosin*
Kayu olahan	62,354	58,219	*Processed wood*
Terpentin	15,080	76,850	*Turpentine*
Getah pinus	2,203	42,900	*Pine sap*
Lain-lain	4,489	5,905	*Others*
	245,414	386,784	
Suku cadang dan bahan pembantu	22,594	11,701	*Spare parts and supplies*
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(848)	-	*Provision for impairment of inventory*
	21,746	11,701	
	267,160	**398,485**	

Persediaan barang jadi Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman (lihat Catatan 18).

Finished goods inventory of the Company are used as collateral for borrowings (refer to Note 18).

10. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pada tanggal pelaporan, terdapat persediaan yang mengalami penurunan nilai senilai Rp848 dan telah diprovisikan seluruhnya. Manajemen berkeyakinan bahwa provisi tersebut cukup untuk menutupi kerugian atas penurunan nilai persediaan.

***10. INVENTORIES** (continued)*

At the reporting date, there are impaired inventories amounting to Rp848 that have been fully provisioned. Management believes that the provision is adequate to cover any loss from decline in value of inventory.

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	2020	2019	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
Pasal 28a - 2019	142,544	127,052	*Article 28a - 2019*
Pajak lain-lain			*Other taxes*
Pasal 22	17	-	*Article 22*
Pasal 23	174	2,425	*Article 23*
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	2,076	843	*Value Added Tax ("VAT")*
Pasal 4(2)	-	980	*Article 4(2)*
	144,811	131,300	
Dikurangi: bagian lancar	(2,267)	(4,248)	*Less: current portion*
Bagian jangka panjang	**142,544**	**127,052**	***Long-term portion***

b. Utang pajak

b. Taxes payables

	2020	2019	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
Pasal 25/29	44,745	29,302	*Article 25/29*
Pajak lain-lain			*Other taxes*
Pasal 21	4,067	5,407	*Article 21*
Pasal 23	1,584	1,421	*Article 23*
Pajak bumi dan bangunan ("PBB")	274,681	244,492	*Land and building tax ("PBB")*
PPN	34,393	35,153	*VAT*
Pajak lainnya	1,709	1,100	*Other taxes*
	316,434	287,573	
	361,179	**316,875**	

11. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***11. TAXATION*** *(continued)*

c. (Manfaat)/beban pajak penghasilan / ***c. Income tax (benefit)/expense***

	2020	2019	
Beban pajak kini			*Current tax expense*
Tahun berjalan	92,074	13,136	*Current year*
Penyesuaian tahun lalu	563	3,077	*Adjustment in respect of prior year*
	92,637	16,213	
(Manfaat)/beban pajak tangguhan			*Deferred tax (income)/expense*
Tahun berjalan	(534,225)	73,887	*Current year*
	(534,225)	73,887	
	(441,588)	**90,100**	

Rekonsiliasi antara (manfaat)/beban pajak penghasilan dan jumlah pajak teoritis atas laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan Grup adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax (benefit)/expense and theoretical tax amount on the Group's profit/(loss) before income tax is as follows:

	2020	2019	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	306,883	295,130	*Consolidated profit before income tax*
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	67,514	73,783	*Tax calculated at applicable tax rates*
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(12,084)	(8,784)	*Income subject to final tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	34,262	18,555	*Non deductible expenses*
Rugi fiskal yang tidak diakui	12,251	4,089	*Unrecognised tax losses*
Pemanfaatan rugi pajak	-	(620)	*Utilisation of tax losses*
Penyesuaian terkait biaya pajak tahun lalu	563	3,077	*Adjustment in respect of prior years*
Dampak perubahan tarif pajak	(544,094)	-	*Impact of changes in tax rate*
(Manfaat)/beban pajak penghasilan	**(441,588)**	**90,100**	***Income tax (benefit)/expenses***

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/55 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan) / *11. TAXATION (continued)*

d. (Liabilitas)/aset pajak tangguhan / *d. Deferred tax (liabilities)/assets*

	1 Januari/ *January* 2020	Dampak perubahan atas tarif pajak/Impact *of changes in tax rate*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ *Credited to other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2020	
Perusahaan						***The Company***
Aset biologis	(2,948,228)	560,641	(10)	-	(2,387,597)	*Biological assets*
Cadangan bonus	30,000	(3,600)	440	-	26,840	*Accrued bonus*
Provisi persediaan	(5,101)	612	(1,252)	-	(5,741)	*Inventory provision*
Penurunan nilai piutang	35,512	(12,280)	1,660	-	24,892	*Impairment of receivables*
Beban penyusutan	27,670	72	(791)	-	26,951	*Depreciation expenses*
Imbalan pascakerja	308,379	7,841	(8,040)	18,348	326,528	*Post-employment benefits*
Penurunan nilai tanaman produktif	4,500	(540)	(3,960)	-	-	*Impairment of bearer plants*
Penurunan nilai aset tetap	16,509	(3,302)	-	-	13,207	*Impairment of fixed asset*
Sewa pembiayaan	-	(157)	1,419	-	1,262	*Leases*
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan, bersih	**(2,530,759)**	**549,287**	**(10,534)**	**18,348**	**(1,973,658)**	***Deferred tax liabilities of the Company, net***
Entitas anak						***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan entitas anak, bersih	**26,118**	**(5,193)**	**665**	**1,695**	**23,285**	***Deferred tax assets of the subsidiaries, net***

	1 Januari/ *January* 2019	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ *Credited to other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2019	
Perusahaan					***The Company***
Aset biologis	(2,938,961)	(9,267)	-	(2,948,228)	*Biological assets*
Cadangan bonus	57,923	(27,923)	-	30,000	*Accrued bonus*
Provisi persediaan	(4,910)	(191)	-	(5,101)	*Inventory provision*
Penurunan nilai piutang	36,147	(635)	-	35,512	*Impairment of receivables*
Beban penyusutan	30,938	(3,268)	-	27,670	*Depreciation expenses*
Imbalan pascakerja	271,423	(39,081)	76,037	308,379	*Post-employment benefits*
Penurunan nilai tanaman produktif	-	4,500	-	4,500	*Impairment of bearer plants*
Penurunan nilai aset tetap	16,509	-	-	16,509	*Impairment of fixed asset*
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan, bersih	**(2,530,931)**	**(75,865)**	**76,037**	**(2,530,759)**	***Deferred tax liabilities of the Company, net***
Entitas anak					***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan entitas anak, bersih	**21,368**	**1,978**	**2,772**	**26,118**	***Deferred tax assets of the subsidiaries, net***

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Administrasi pajak di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Pemerintah telah mengurangi tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi 22% untuk tahun 2020-2021 dan 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya, sesuai dengan Pasal 5 bagian 1 dari Perppu No. 1 tahun 2020. Tarif pajak sebelumnya untuk tahun 2019 adalah 25%. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 31 Maret 2020, setelah dikeluarkannya Peraturan sebagai Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Sistem Keuangan sehubungan dengan Wabah Virus Corona 2019 ("COVID-19") dan/atau untuk mengantisipasi ancaman yang akan membahayakan Ekonomi Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara. Perppu tersebut telah diundangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 yang belaku efektif 18 Mei 2020. Dampak atas perubahan tarif pajak terhadap Grup adalah sebesar Rp544.094.

11. TAXATION (continued)

e. Tax administration in Indonesia

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

The Government has reduced the Corporate Income Tax rate to 22% for 2020-2021 and 20% for 2022 onwards, according to Article 5 section 1 of Perppu No. 1 of 2020. The previous tax rate for 2019 was 25%. This policy was effective since 31 March 2020, following the issuance of a Regulation in Lieu of Law concerning Financial System Stability Policy and Financial System Policy in connection with the Coronavirus 2019 ("COVID-19") outbreak and/or to anticipate threats that will endanger the National Economy and/or Stability of the State Financial System. This Perppu was ratified to Law No. 2 Year 2020 dated 18 May 2020. The impact of changes in tax rate for the Group amount to Rp544,094.

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *12. INVESTMENT IN ASSOCIATES*

	2020					
	Kepemilikan/ *Ownership*	Saldo awal/ *Beginning balance*	Bagian atas (rugi)/laba bersih/ *Share of net (loss)/profit*	Penerimaan dividen/ *Dividends received*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Investasi pada entitas asosiasi						***Investment in associates***
PT Gema Hutani Lestari	20.00%	8,271	(212)	-	8,059	*PT Gema Hutani Lestari*
PT IDEC Wood Industries	33.00%	11,575	(6,369)	-	5,206	*PT IDEC Wood Industries*
PT ITCI Kayan Hutani	31.00%	5,647	1,868	(541)	6,974	*PT ITCI Kayan Hutani*
PT Hutansanggam Labanan Lestari	30.00%	1,339	(474)	-	865	*PT Hutansanggam Labanan Lestari*
PT Ratah Timber	20.00%	25,340	(299)	(1,300)	23,741	*PT Ratah Timber*
PT Gunung Gajah Abadi	23.01%	13,440	205	-	13,645	*PT Gunung Gajah Abadi*
PT Roda Mas Timber	20.00%	7,137	(1,718)	-	5,419	*PT Roda Mas Timber*
PT Segara Indochem	20.00%	1,877	(176)	(1,076)	625	*PT Segara Indochem*
PT Perintis Adiwana	40.00%	3,060	-	-	3,060	*PT Perintis Adiwana*
PT Hutan Barumun Perkasa	40.00%	3,236	(630)	-	2,606	*PT Hutan Barumun Perkasa*
PT Sinar Belantara Indah	39.25%	1,954	2	-	1,956	*PT Sinar Belantara Indah*
		82,876	**(7,803)**	**(2,917)**	**72,156**	

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan) / *12. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)*

	2019					
	Kepemilikan/ *Ownership*	Saldo awal/ *Beginning balance*	Bagian atas (rugi)/laba bersih/ *Share of net (loss)/profit*	Penerimaan dividen/ *Dividends received*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Investasi pada entitas asosiasi						***Investment in associates***
PT Gema Hutani Lestari	20.00%	8,259	342	(330)	8,271	*PT Gema Hutani Lestari*
PT IDEC Wood Industries	33.00%	6,878	5,357	(660)	11,575	*PT IDEC Wood Industries*
PT ITCI Kayan Hutani	31.00%	4,437	1,700	(490)	5,647	*PT ITCI Kayan Hutani*
PT Hutansanggam Labanan Lestari	30.00%	1,361	144	(166)	1,339	*PT Hutansanggam Labanan Lestari*
PT Ratah Timber	20.00%	29,289	2,193	(6,142)	25,340	*PT Ratah Timber*
PT Gunung Gajah Abadi	23.01%	16,281	648	(3,489)	13,440	*PT Gunung Gajah Abadi*
PT Roda Mas Timber	20.00%	9,768	(1,111)	(1,520)	7,137	*PT Roda Mas Timber*
PT Segara Indochem	20.00%	3,028	1,074	(2,225)	1,877	*PT Segara Indochem*
PT Perintis Adiwana	40.00%	4,487	(966)	(461)	3,060	*PT Perintis Adiwana*
PT Hutan Barumun Perkasa	40.00%	3,378	(142)	-	3,236	*PT Hutan Barumun Perkasa*
PT Sinar Belantara Indah	39.25%	1,929	25	-	1,954	*PT Sinar Belantara Indah*
		89,095	**9,264**	**(15,483)**	**82,876**	

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dimana semuanya tidak diperdagangkan di bursa, adalah sebagai berikut:

The summary of associates entity financial information, all of which are unlisted, is as follows:

	2020					
	Aset lancar/ *Current assets*	Aset tidak lancar/ *Non-current assets*	Liabilitas jangka pendek/ *Current liabilities*	Liabilitas jangka panjang/ *Non-current liabilities*	Pendapatan/ *Revenue*	(Rugi)/laba bersih/ *Net (loss)/profit*
Entitas asosiasi/ *Associates entity*						
PT Gema Hutani Lestari	53,831	51,504	(47,704)	(17,337)	96,518	(1,060)
PT IDEC Wood Industries	487,307	153,044	(389,616)	(234,959)	664,243	(19,300)
PT ITCI Kayan Hutani	19,647	25,121	(4,782)	(17,488)	27,102	6,026
PT Hutansanggam Labanan Lestari	1,802	8,056	(2,931)	(4,045)	5,004	(1,580)
PT Ratah Timber	83,296	51,588	(6,549)	(9,628)	43,428	(1,495)
PT Gunung Gajah Abadi	87,961	23,827	(42,600)	(9,860)	75,245	891
PT Roda Mas Timber	19,058	17,194	(3,187)	(5,969)	48,269	(8,590)
PT Segara Indochem	17,575	139	(14,588)	-	25,196	(880)
PT Perintis Adiwana	194	15,998	(7,358)	(1,185)	-	-
PT Hutan Barumun Perkasa	2,698	5,360	(1,543)	-	9,894	(1,575)
PT Sinar Belantara Indah	1,238	49,464	(3,041)	(42,677)	4,794	5
	774,607	**401,295**	**(523,899)**	**(343,148)**	**999,693**	**(27,558)**

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan) / *12. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)*

	2019					
	Aset lancar/ *Current assets*	Aset tidak lancar/ *Non-current assets*	Liabilitas jangka pendek/ *Current liabilities*	Liabilitas jangka panjang/ *Non-current liabilities*	Pendapatan/ *Revenue*	Laba/(rugi) bersih/ *Net profit/(loss)*
Entitas asosiasi/ *Associates entity*						
PT Gema Hutani Lestari	27,645	56,353	(37,133)	(5,509)	133,954	1,710
PT IDEC Wood Industries	592,765	157,748	(459,887)	(255,550)	725,432	16,233
PT ITCI Kayan Hutani	19,338	25,975	(5,271)	(21,826)	27,761	5,484
PT Hutansanggam Labanan Lestari	1,663	7,987	(2,164)	(3,023)	9,628	480
PT Ratah Timber	86,015	59,032	(7,709)	(10,637)	114,831	10,965
PT Gunung Gajah Abadi	86,868	24,887	(43,143)	(10,201)	56,455	2,816
PT Roda Mas Timber	49,163	18,577	(24,519)	(7,540)	59,627	(5,555)
PT Segara Indochem	10,251	704	(1,563)	-	65,121	5,370
PT Perintis Adiwana	172	14,819	(6,289)	(1,051)	-	(2,415)
PT Hutan Barumun Perkasa	3,762	6,007	(1,683)	-	10,992	(360)
PT Sinar Belantara Indah	1,125	46,756	(4,191)	(38,711)	9,637	64
	878,767	**418,845**	**(593,552)**	**(354,048)**	**1,213,438**	**34,792**

13. TANAMAN PRODUKTIF / *13. BEARER PLANTS*

	2020	2019	
Tanaman menghasilkan, bersih	156,373	135,395	*Mature plants, net*
Tanaman belum menghasilkan	922,147	676,754	*Immature plants*
	1,078,520	**812,149**	

	2020					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclas-sifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Tanaman menghasilkan						***Mature plants***
Karet	90,038	-	(4,012)	17,595	103,621	*Rubber plants*
Kayu putih	92,578	-	-	15,462	108,040	*Eucalyptus*
Lainnya	5,464	-	(217)	-	5,247	*Others*
	188,080	-	(4,229)	33,057	216,908	
Akumulasi depresiasi						***Accumulated depreciation***
Karet	(45,332)	(1,902)	-	-	(47,234)	*Rubber plants*
Kayu putih	(5,601)	(5,316)	-	-	(10,917)	*Eucalyptus*
Lainnya	(1,752)	(632)	-	-	(2,384)	*Others*
	(52,685)	(7,850)	-	-	(60,535)	
	135,395	**(7,850)**	**(4,229)**	**33,057**	**156,373**	

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/59 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. TANAMAN PRODUKTIF (lanjutan) / *13. BEARER PLANTS (continued)*

	2020					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclas-sifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Tanaman belum menghasilkan						***Immature plants***
Pinus	209,348	38,283	-	-	247,631	*Pine*
Karet	200,941	13,565	-	(17,595)	196,911	*Rubber plants*
Kayu putih	155,485	74,606	-	(15,462)	214,629	*Eucalyptus*
Gliricidia sepium	128,842	133,966	-	-	262,808	*Gliricidia sepium*
Lainnya	140	28	-	-	168	*Others*
	694,756	260,448	-	(33,057)	922,147	
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Kayu putih	(18,002)	-	18,002	-	-	*Eucalyptus*
	676,754	**260,448**	**18,002**	**(33,057)**	**922,147**	
Nilai buku	**812,149**				**1,078,520**	***Net book value***

	2019					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclas-sifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Tanaman menghasilkan						***Mature plants***
Karet	79,075	-	-	10,963	90,038	*Rubber plants*
Kayu putih	-	-	-	92,578	92,578	*Eucalyptus*
Lainnya	4,588	876	-	-	5,464	*Others*
	83,663	876	-	103,541	188,080	
Akumulasi depresiasi						***Accumulated depreciation***
Karet	(43,503)	(1,829)	-	-	(45,332)	*Rubber plants*
Kayu putih	-	(5,601)	-	-	(5,601)	*Eucalyptus*
Lainnya	(1,267)	(485)	-	-	(1,752)	*Others*
	(44,770)	(7,915)	-	-	(52,685)	
	38,893	**(7,039)**	**-**	**103,541**	**135,395**	

	2019					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclas-sifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Tanaman belum menghasilkan						***Immature plants***
Pinus	162,541	46,807	-	-	209,348	*Pine*
Karet	190,550	21,354	-	(10,963)	200,941	*Rubber plants*
Kayu putih	213,923	34,140	-	(92,578)	155,485	*Eucalyptus*
Gliricidia sepium	-	128,842	-	-	128,842	*Gliricidia sepium*
Lainnya	111	29	-	-	140	*Others*
	567,125	231,172	-	(103,541)	694,756	
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Kayu putih	-	(18,002)	-	-	(18,002)	*Eucalyptus*
	567,125	**213,170**	**-**	**(103,541)**	**676,754**	
Nilai buku	**606,018**				**812,149**	***Net book value***

13. TANAMAN PRODUKTIF (lanjutan)

Pada tahun 2020, jumlah penyusutan tanaman produktif sebesar Rp7.850 (2019: Rp7.915) dibebankan sebagai beban pokok pendapatan (lihat Catatan 24).

Tanaman produktif yang dikembangkan oleh Grup tersebar di area Gowa - Sulawesi Selatan, Pulau Laut, Senakin, dan Tanah Grogot - Kalimantan Selatan, Sentilik dan Puruk Cahu - Kalimantan Tengah dan Solo - Jawa Tengah. Grup mengembangkan pinus, karet, dan beberapa jenis tanaman lainnya di kawasan Jawa, Kalimantan, dan Madura.

13. BEARER PLANTS (continued)

As at 2020, total depreciation of bearer plants amounting to Rp7,850 (2019: Rp7,915) is recorded as cost of revenue (refer to Note 24).

Bearer plants developed by the Group are grown in widespread areas in Gowa - South Sulawesi, Pulau Laut, Senakin, and Tanah Grogot - South Kalimantan, Sentilik and Puruk Cahu - Central Kalimantan and Solo - Central Java. The Group develops pine, rubber and some other varieties of plants in Java, Kalimantan and Madura.

14. ASET BIOLOGIS

Aset biologis terdiri dari produk agrikultur (getah pinus dan daun kayu putih) dan kayu tegakan (tanaman jati dan pohon rimba lainnya).

14. BIOLOGICAL ASSETS

Biological assets comprise of agricultural produce (pine sap and eucalyptus leaves) and standing timber (teak wood and other forestry trees).

	31 Desember/*December* 2020			
	Produk agrikultur/ *Agricultural produce*	**Kayu tegakan/ *Standing timber***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	**15,545**	**12,730,987**	**12,746,532**	***Beginning balance***
Perubahan nilai wajar	113,657	589,433	703,090	*Changes in fair value*
Pemindahan hasil panen ke persediaan	(1,178,910)	(1,387,113)	(2,566,023)	*Transfer of harvested to inventories*
Beban produksi	1,062,191	937,420	1,999,611	*Cost of production*
Penanaman	-	218,869	218,869	*Planting*
Kehilangan	-	(106,188)	(106,188)	*Losses*
Saldo akhir	**12,483**	**12,983,408**	**12,995,891**	***Ending balance***
Aset lancar:				***Current assets:***
Getah pinus	7,006	-	7,006	*Pine sap*
Daun kayu putih	5,477	-	5,477	*Eucalyptus leaves*
Kayu tegakan - siap panen	-	1,122,328	1,122,328	*Standing timber - ready to harvest*
Total aset lancar	**12,483**	**1,122,328**	**1,134,811**	***Total current assets***
Aset tidak lancar:				***Non-current assets:***
Kayu tegakan	-	11,861,080	11,861,080	*Standing timber*
Total aset tidak lancar	**-**	**11,861,080**	**11,861,080**	***Total non-current assets***
Total aset biologis	**12,483**	**12,983,408**	**12,995,891**	***Total biological assets***

14. ASET BIOLOGIS (lanjutan) / *14. BIOLOGICAL ASSETS (continued)*

	31 Desember/*December* 2019			
	Produk agrikultur/ *Agricultural produce*	Kayu tegakan/ *Standing timber*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	**10,150**	**12,509,964**	**12,520,114**	***Beginning balance***
Perubahan nilai wajar	135,767	354,101	489,868	*Changes in fair value*
Pemindahan hasil panen ke persediaan	(1,244,903)	(1,234,866)	(2,479,769)	*Transfer of harvested to inventories*
Beban produksi	1,114,531	911,440	2,025,971	*Cost of production*
Penanaman	-	214,247	214,247	*Planting*
Kehilangan	-	(23,899)	(23,899)	*Losses*
Saldo akhir	**15,545**	**12,730,987**	**12,746,532**	***Ending balance***
Aset lancar:				***Current assets:***
Getah pinus	7,635	-	7,635	*Pine sap*
Daun kayu putih	7,910	-	7,910	*Eucalyptus leaves*
Kayu tegakan - siap panen	-	1,112,459	1,112,459	*Standing timber - ready to harvest*
Total aset lancar	**15,545**	**1,112,459**	**1,128,004**	***Total current assets***
Aset tidak lancar:				***Non-current assets:***
Kayu tegakan	-	11,618,528	11,618,528	*Standing timber*
Total aset tidak lancar	**-**	**11,618,528**	**11,618,528**	***Total non-current assets***
Total aset biologis	**15,545**	**12,730,987**	**12,746,532**	***Total biological assets***

Per 31 December 2020 terdapat luas hutan produktif sebesar 915,680Ha (2019: 922,523Ha) (tidak diaudit).

As at 31 December 2020 there were 915.680Ha of productive forest (2019: 922.523Ha) (unaudited).

Tanaman tebangan diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, berdasarkan harga sesuai usia, jenis, kualitas dan panjang yang disesuaikan, bila perlu, untuk mencerminkan perbedaan. Harga diperoleh dari harga rata-rata aktual penjualan Perusahaan pada periode pelaporan sebagai pasar utama untuk tujuan penilaian.

Consumable plants are measured at fair value less cost to sell, based on prices of similar age, type, quality and length of plants with adjustments, where necessary, to reflect the differences. Prices are obtained from the actual average price from the Company sales, as of the reporting period which is considered the principal market for the purpose of the valuation.

Catatan ini menjelaskan mengenai pertimbangan dan estimasi yang dibuat dalam menentukan nilai wajar aset biologis yang dicatat dan diakui pada nilai wajar di laporan keuangan. Untuk memberikan indikasi mengenai kewajaran informasi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar, Grup mengklasifikasikan aset dan liabilitas nonkeuangannya menjadi tiga tingkatan seperti yang diatur di dalam standar akuntansi.

This note explains the judgments and estimates made in determining the fair values of the biological assets that are recognised and measured at fair value in the financial statements. To provide an indication about the reliabilities of the inputs used in determining fair value, the Group has classified its non-financial assets and liabilities into the three levels prescribed under the accounting standards.

14. ASET BIOLOGIS (lanjutan) / *14. BIOLOGICAL ASSETS (continued)*

	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	Total/ *Total*	
Per 31 Desember 2020					***At 31 December 2020***
Produk agrikultur	-	-	12,483	12,483	*Agricultural produce*
Kayu tegakan	-	-	12,983,408	12,983,408	*Standing timber*
Total aset biologis	**-**	**-**	**12,995,891**	**12,995,891**	***Total biological assets***
Per 31 Desember 2019					***At 31 December 2019***
Produk agrikultur	-	-	15,545	15,545	*Agricultural produce*
Kayu tegakan	-	-	12,730,987	12,730,987	*Standing timber*
Total aset biologis	**-**	**-**	**12,746,532**	**12,746,532**	***Total biological assets***

Pergerakan nilai wajar aset dalam hierarki tingkat 3, produk agrikultur dan kayu tegakan dapat dilihat dari tabel di atas. Keuntungan yang diakui terkait dengan aset biologis ini adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of assets within level 3 of the hierarchy, being the agricultural produce and standing timber can be seen from the table above. The gains recognised in relation to these biological assets are as follows:

	2020	2019*	
Total keuntungan untuk yang diakui dalam laba rugi berdasarkan:			*Total gains for the period recognised in profit or loss under:*
Perubahan nilai wajar aset biologis	596,902	489,868	*Change in fair value of biological assets*

Tabel berikut merangkum informasi kuantitatif mengenai input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar aset biologis. Nilai wajar tanaman tebangan umur 1 sampai 5 tahun ditentukan berdasarkan arus kas yang didiskontokan. Produk agrikultur dan tanaman tebangan di atas umur 5 tahun hingga siap panen nilai wajarnya berdasarkan estimasi volume kayu tegakan saat ini dan harga nilai wajar dikurangi biaya pemanenan dan biaya untuk menjual.

The following table summarises the quantitative information about the significant unobservable inputs (Level 3) used in the fair value measurements of the biological assets. The fair value of consumable plants for years 1 to 5 are determined based on discounted cash flows. Agricultural produce and consumable plants above year 5 until ready-to-harvest fair values are determined on the basis of estimated current volume of standing timber and fair value price less harvest cost and less cost to sell.

* Disajikan kembali (lihat Catatan 33) / *As restated (refer to Note 33)**

14. ASET BIOLOGIS (lanjutan) / *14. BIOLOGICAL ASSETS (continued)*

Deskripsi/ *Description*	Nilai wajar pada /*Fair value at* 31 Desember/ *December* 2020	Nilai wajar pada /*Fair value at* 31 Desember/ *December* 2019	Input yang tidak dapat diobservasi /*Unobservable inputs*	Rentang input (probabilitas-rata-rata tertimbang)/*Range of inputs (probability-weighted average)* 31 Desember/ *December* 2020	Rentang input (probabilitas-rata-rata tertimbang)/*Range of inputs (probability-weighted average)* 31 Desember/ *December* 2019	Hubungan input yang tidak dapat diobservasi dengan nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*
Tanaman tebangan/ *Consumable plants*	12,983,408	12,730,987	Estimasi volume tanaman tebangan/ *Expected volume of consumable plants*	25,034,983m^3	24,370,284m^3	Semakin tinggi volume, semakin tinggi nilai wajarnya/*The higher the volume, the higher the fair value*
			Harga nilai wajar/*Fair value price*			Semakin tinggi harga, semakin tinggi nilai wajarnya/*The higher the price, the higher the fair value*
			- A I	0.388-0.817	0.381-0.611	
			- A II	1.133-2.243	1.129-2.281	
			- A III	1.404-4.967	1.421-4.257	
			Nilai diskonto rata-rata/*Average discount rate*	6.19%	7.78%	Semakin tinggi nilai diskonto, semakin rendah nilai wajarnya/*The higher the discount rate, the lower the fair value*
Getah pinus/ *Pine sap*	7,006	7,635	Estimasi volume hasil getah pinus/ *Expected volume of pine sap*	519 ton	808 ton	Semakin tinggi volume, semakin tinggi nilai wajarnya/*The higher the volume, the higher the fair value*
			Harga nilai wajar/*Fair value price*	13.50/ton	9.45/ton	Semakin tinggi harga, semakin tinggi nilai wajarnya/*The higher the price, the higher the fair value*
Daun kayu putih/ *Eucalyptus leaves*	5,477	7,910	Estimasi volume hasil daun kayu putih/ *Expected volume of eucalyptus leaves*	7,791 ton	11,251 ton	Semakin tinggi volume, semakin tinggi nilai wajarnya/*The higher the volume, the higher the fair value*
			Harga nilai wajar/*Fair value price*	0.70/ton	0.70/ton	Semakin tinggi harga, semakin tinggi nilai wajarnya/*The higher the price, the higher the fair value*

Input utama tingkat 3 yang digunakan oleh Grup didapatkan dan dievaluasi sebagai berikut:

- Volume tanaman tebangan ditentukan berdasarkan umur, hasil panen historis, faktor koreksi dan variasi yang disebabkan oleh iklim dan angka kerusakan hutan.
- Harga tanaman tebangan ditentukan berdasarkan harga rata-rata aktual penjualan Perusahaan dikurangi biaya pemanenan dan biaya untuk menjual.
- Nilai diskonto ditentukan menggunakan *capital asset pricing model* untuk menghitung nilai diskonto yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik untuk aset tersebut.

The main level 3 inputs used by the Group are derived and evaluated as follows:

- *Expected volume of consumable plants are determined based on the age of the plantation, historical yields, correction factor and variations caused by severe weather events and deforestation.*
- *Consumable plants prices are determined based on average actual sales from the Company less harvest cost and cost to sell.*
- *Discount rates are determined using a capital asset pricing model that reflects current market assessments of the time value of money and the risk specific to the asset.*

15. ASET TETAP / *15. FIXED ASSETS*

Biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap adalah sebagai berikut:

Acquisition costs, accumulated depreciation and book value of the assets are as follows:

	2020					
	Saldo awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclas-sifications***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	147,763	-	-	3,467	151,230	*Land*
Bangunan	1,228,662	9,070	(4,127)	3,032	1,236,637	*Buildings*
Jalan dan jembatan	539,397	1,888	(47)	11,739	552,977	*Roads and bridges*
Mesin dan instalasi	77,602	187	(42)	707	78,454	*Machines and installations*
Tempat penimbunan kayu	26,760	1,098	-	(470)	27,388	*Wood landfills*
Alat berat dan mesin industri	207,576	4,061	(856)	(1,301)	209,480	*Heavy equipment and industrial machines*
Kendaraan bermotor	154,732	3,094	(4,207)	811	154,430	*Vehicles*
Peralatan kantor	198,719	888	(1,059)	(2,306)	196,242	*Office equipment*
Aset dalam penyelesaian	9,250	43,066	-	(15,679)	36,637	*Construction in progress*
	2,590,461	63,352	(10,338)	-	2,643,475	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	644,182	57,672	(47)	241	702,048	*Buildings*
Jalan dan jembatan	430,389	24,022	(4)	232	454,639	*Roads and bridges*
Mesin dan instalasi	74,476	3,634	(281)	(106)	77,723	*Machines and installations*
Tempat penimbunan kayu	19,931	696	(44)	(396)	20,187	*Wood landfills*
Alat berat dan mesin industri	196,508	10,274	(856)	(1,919)	204,007	*Heavy equipment and industrial machines*
Kendaraan bermotor	140,527	3,551	(5,640)	2,865	141,303	*Vehicles*
Peralatan kantor	183,498	5,439	(1,319)	(917)	186,701	*Office equipment*
	1,689,511	105,288	(8,191)	-	1,786,608	
Akumulasi penurunan nilai	68,922	1,238	-	-	70,160	*Accumulated impairment value*
	1,758,433	106,526	(8,191)	-	1,856,768	
Nilai Buku	**832,028**				**786,707**	***Net book value***

15. ASET TETAP (lanjutan) / *15. FIXED ASSETS (continued)*

	2019					
	Saldo awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclas-sifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	73,386	74,377	-	-	147,763	*Land*
Bangunan	1,058,453	164,535	(818)	6,492	1,228,662	*Buildings*
Jalan dan jembatan	526,880	3,746	(2,411)	11,182	539,397	*Roads and bridges*
Mesin dan instalasi	77,242	210	(159)	309	77,602	*Machines and installations*
Tempat penimbunan kayu	26,760	-	-	-	26,760	*Wood landfills*
Alat berat dan mesin industri	206,596	980	-	-	207,576	*Heavy equipment and industrial machines*
Kendaraan bermotor	158,762	1,785	(6,208)	393	154,732	*Vehicles*
Peralatan kantor	197,268	1,130	(95)	416	198,719	*Office equipment*
Aset dalam penyelesaian	7,634	20,591	(183)	(18,792)	9,250	*Construction in progress*
	2,332,981	267,354	(9,874)	-	2,590,461	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	601,888	43,112	(818)	-	644,182	*Buildings*
Jalan dan jembatan	410,236	22,564	(2,411)	-	430,389	*Roads and bridges*
Mesin dan instalasi	73,480	1,154	(158)	-	74,476	*Machines and installations*
Tempat penimbunan kayu	18,732	1,199	-	-	19,931	*Wood landfills*
Alat berat dan mesin industri	185,371	11,137	-	-	196,508	*Heavy equipment and industrial machines*
Kendaraan bermotor	143,827	2,894	(6,194)	-	140,527	*Vehicles*
Peralatan kantor	179,183	4,410	(95)	-	183,498	*Office equipment*
	1,612,717	86,470	(9,676)	-	1,689,511	
Akumulasi penurunan nilai	66,034	2,888	-	-	68,922	*Accumulated impairment value*
	1,678,751	89,358	(9,676)	-	1,758,433	
Nilai Buku	**654,230**				**832,028**	***Net book value***

Penyusutan dibebankan sebagai berikut: / *Depreciation was charged to the following:*

	2020	2019	
Beban pokok pendapatan (Catatan 24)	31,543	12,344	*Cost of revenue (Note 24)*
Beban usaha (Catatan 25)	73,745	74,126	*Operating expenses (Note 25)*
Jumlah	105,288	86,470	***Total***

Tanah dan bangunan Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman (lihat Catatan 18).

Land and buildings of the Company are used as collateral for borrowings (refer to Note 18).

Sampai 31 Desember 2020, pabrik Perusahaan di Sorong belum dapat berjalan dengan optimal karena peralatan mesin belum siap digunakan, sehingga mesin belum dapat memenuhi target kapasitas produksi. Sampai dengan 31 Desember 2020, nilai pabrik telah diturunkan seluruhnya.

Until 31 December 2020, the Company's plant in Sorong has not been able to run optimally due to machine equipment not having been ready to use, hence it has not been able to meet the target production capacity. As of 31 December 2020, the value of the plant has been fully impaired.

15. ASET TETAP (lanjutan) / *15. FIXED ASSETS (continued)*

Grup mempunyai beberapa bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan yang mempunyai sisa manfaat kurang lebih 12 tahun dan dapat diperpanjang. Manajemen meyakini bahwa tidak akan ada kesulitan dalam memperpanjang hak atas tanah ini karena semua tanah tersebut diperoleh secara legal dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang cukup.

The Group owns several land with Hak Guna Bangunan ("Building Use Rights") which have remaining useful lives of approximates 12 years and can be extended. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights as all the land was legally acquired and supported by evidence of ownership.

16. UTANG USAHA / *16. TRADE PAYABLES*

	2020	2019	
Utang usaha:			*Trade payables:*
Pihak ketiga	63,987	219,076	*Third parties*
Pihak berelasi	-	44	*Related parties*
	63,987	**219,120**	

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh nilai tercatat utang usaha Grup berdenominasi Rupiah. Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

As at 31 December 2020 and 2019, all the carrying amounts of the Group's trade payables were denominated in Rupiah. Due to their short-term nature, their carrying amount approximates their fair value.

17. BEBAN AKRUAL / *17. ACCRUED EXPENSES*

	2020	2019	
Eksploitasi	117,176	113,137	*Exploitation*
Tuntutan hukum (lihat Catatan 30)	35,000	-	*Legal claim (Refer to Note 30)*
Industri	32,675	25,073	*Industry*
Tanaman dan operasional	5,173	2,734	*Plantation and operational*
Pemasaran	4,833	3,502	*Marketing*
Gaji dan tunjangan	2,336	1,632	*Salary and allowances*
Pemeliharaan sarana dan prasarana	2,240	3,480	*Maintenance facilities and infrastructure*
Lain-lain	31,784	62,772	*Others*
	231,217	**212,330**	

18. PINJAMAN / *18. BORROWINGS*

	2020	2019	
Pinjaman bank	391,477	407,254	*Bank loans*
Pinjaman pihak ketiga	184,487	180,653	*Third party borrowings*
	575,964	587,907	
Dikurangi: bagian lancar	(190,070)	(285,935)	*Less: current portion*
	385,894	**301,972**	

Seluruh pinjaman pada tahun 2020 dan 2019 merupakan pinjaman dalam mata uang Rupiah.

All borrowings in 2020 and 2019 are denominated in Rupiah.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/67 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN (lanjutan) / ***18. BORROWINGS** (continued)*

a. Pinjaman bank / ***a. Bank loans***

	2020	2019	
BRI Agroniaga	311,164	295,000	*BRI Agroniaga*
Mandiri	43,326	64,942	*Mandiri*
BRI	21,787	32,261	*BRI*
Asian Development Bank ("ADB")	13,744	13,695	*Asian Development Bank ("ADB")*
BNI	1,456	1,356	*BNI*
	391,477	407,254	
Dikurangi: bagian lancar	(189,530)	(285,233)	*Less: current portion*
Bagian jangka panjang	**201,947**	**122,021**	***Long-term portion***

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Other significant information related to bank loans as of 31 December 2020 are as follows:

Kreditor/ *Creditor*	Jenis fasilitas/ *Type of facilities*	Mata uang/ *Currency*	Jumlah fasilitas/ *Total facilities*	Jatuh tempo/ *Due date*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Collaterals*
Perum Perhutani						
BRI Agroniaga	Kredit investasi - pinjaman/ *Investment credit*	Rupiah	100,000	21 November/ *November* 2024	9.00%	Tanah, bangunan dan persediaan/ *Land, buildings and inventory*
BRI Agroniaga	Kredit investasi - pinjaman/ *Investment credit*	Rupiah	160,000	09 April/ *April* 2025	8.73%	Tanah dan bangunan/ *Land and buildings*
BRI Agroniaga	Kredit modal kerja/*Working capital loan*	Rupiah	200,000	10 November/ *November* 2021	9.00%	Tanah, bangunan dan persediaan/ *Land, buildings, and inventory*
BRI	Kredit modal kerja *revolving*/*Revolving working capital loan*	Rupiah	50,000	15 Juli/*July* 2021	2.50%	Kas yang dibatasi penggunaannya/ *Restricted cash*
Mandiri	Kredit modal kerja *revolving*/*Revolving working capital loan*	Rupiah	50,000	28 Mei/ *May* 2021	3.75%	Kas yang dibatasi penggunaannya/ *Restricted cash*
PT Inhutani I						
Mandiri	Dana reboisasi/ *Reforestation fund*	Rupiah	9,443	Juli/*July* 2023	0.00%	N/A
Mandiri	Dana reboisasi/ *Reforestation fund*	Rupiah	32,986	Juli/*July* 2025	0.00%	N/A
PT Inhutani II						
ADB	Kredit investasi/ *Investment credit*	Rupiah	11,550	Oktober/ *October* 2028	2.00%	N/A
PT Inhutani III						
ADB	Kredit investasi/ *Investment credit*	Rupiah	2,145	15 Oktober/ *October* 2023	2.00%	N/A
BRI	Kredit modal kerja/*Working capital loan*	Rupiah	6,787	1 Februari - 5 Desember/ *1 February- 5 December* 2021	5.68-6.76%	Kas yang dibatasi penggunaannya/ *Restricted cash*
BNI	Kredit modal kerja/*Working capital loan*	Rupiah	1,456	7 Maret/*March* 2021	6.75%	Kas yang dibatasi penggunaannya/ *Restricted cash*

18. PINJAMAN (lanjutan) / *BORROWINGS (continued)*

a. Pinjaman bank (lanjutan) / *Bank loans (continued)*

Sesuai dengan perjanjian pinjaman bank, Grup diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup telah memenuhi seluruh batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman diatas.

As specified by the bank loan agreements, the Group is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants.

As at 31 December 2020, the Group has complied with all the covenants in the borrowing agreement above.

b. Pinjaman pihak ketiga / *Third party borrowings*

	2020	2019	
PT Korea Indonesia Forestry Cooperative ("KIFC")	91,712	87,500	*PT Korea Indonesia Forestry Cooperative ("KIFC")*
Panitia Urusan Piutang Negara	90,531	90,882	*State Receivables Administration Committee*
PT Citra Putra Kebun Asri ("CPKA")	2,244	1,959	*PT Citra Putra Kebun Asri ("CPKA")*
PT Astra Sedaya Finance	-	312	*PT Astra Sedaya Finance*
	184,487	180,653	
Dikurangi: bagian lancar	(540)	(702)	*Less: current portion*
Bagian jangka panjang	**183,947**	**179,951**	***Long-term portion***

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Other significant information related to third party borrowings as of 31 December 2020 are as follows:

Kreditor/ *Creditor*	Jenis fasilitas/ *Type of facilities*	Mata uang/ *Currency*	Jumlah fasilitas/ *Total facilities*	Jatuh tempo/ *Due date*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Collateral*
PT Inhutani II						
KIFC	Pinjaman modal kerja/*Working capital loans*	Rupiah	215,998	26 Oktober/ *October* 2039	3.00%	N/A
PT Inhutani III						
PT CPKA	Pinjaman modal kerja/*Working capital loans*	Rupiah	83,350	Februari/ *February* 2034	3.00%	N/A
PT Inhutani V						
Panitia Urusan Piutang Negara	Dana reboisasi/ *Reforestation fund*	Rupiah	91,469	N/A	2.00%	N/A

PT Inhutani II ("IHT II") dan KIFC menandatangani perjanjian pinjaman modal No. 1099/P/Banghut/2011 tanggal 27 Oktober 2011. Pinjaman dari KIFC digunakan untuk kerjasama atas lahan seluas 1.000Ha dan ditetapkan selama 28 (dua puluh delapan) tahun. Pembayaran pinjaman dilakukan setelah proyek menghasilkan arus kas positif.

PT Inhutani II ("IHT II") and KIFC entered into loan agreement No. 1099/P/Banghut/2011 dated 27 October 2011. Loan from KIFC are used for cooperation upon development areas of 1,000Ha for 28 years. Loan payment is due when the project generates positive cash flows.

18. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman pihak ketiga (lanjutan)

Utang dana reboisasi merupakan utang penyaluran dana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya Departemen Kehutanan) untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri ("HTI") yang disalurkan ke PT Inhutani V ("IHT V"). Berdasarkan surat Panitia Urusan Piutang Negara No. PJPN-09.PUPNC.10.04/2012 tanggal 9 Maret 2012, utang dana reboisasi IHT V ditetapkan senilai Rp72.309. Berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Palembang No. S-186/WKN.4/KNL.02/2017 tertanggal 23 Januari 2017, utang pokok pinjaman dana reboisasi IHT V adalah sebesar Rp4.410. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo dana reboisasi adalah sebesar Rp90.531 (2019: Rp90.882). IHT V mengajukan permohonan pembayaran secara bertahap senilai Rp45.000.000 (nilai penuh) setiap bulan. Sampai adanya ketetapan baru, manajemen meyakini pembayaran kembali utang dana reboisasi sudah memadai.

18. BORROWINGS *(continued)*

b. Third party borrowing *(continued)*

Reforestation fund is a distribution of funds from the Ministry of Environment and Forestry (formerly Department of Forestry) for construction of Hutan Tanaman Industri ("HTI") to PT Inhutani V ("IHT V"). According to decision letter State Receivables Administration Committee No. PJPN-09.PUPNC.10.04/2012 dated 9 March 2012, reforestation fund payable IHT V amounting to Rp72,309. According to decision letter Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Palembang No. S-186/WKN.4/KNL.02/2017 dated 23 January 2017, reforestation fund payable IHT V amounting to Rp4,410. On 31 December 2020, balance of reforestation fund amounting to Rp90,531 (2019: Rp90,882). IHT V are applied for payment in stages amounting to Rp45,000,000 (full amount) each month. Until the issuance of new regulation, management believes that the repayment of reforestation fund payable is already sufficient.

19. REKONSILIASI UTANG BERSIH

19. NET DEBT RECONCILIATION

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dampak PSAK 73/ *Impact of SFAS 73*	Penambahan/ *Addition*	Realisasi/ pembayaran/ *Realisation/ payments*	Lainnya/ *Others*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
31 Desember 2020							***31 December 2020***
Kas yang dibatasi penggunaannya	(11,462)	-	(110,600)	11,462	-	(110,600)	*Restricted cash*
Pinjaman bank	407,254	-	2,180,626	(2,196,403)	-	391,477	*Bank loans*
Pinjaman dari pihak ketiga	180,653	-	4,566	(732)	-	184,487	*Third party borrowings*
Sewa	-	65,593	-	(22,116)	458	43,935	*Lease*
Jumlah	**576,445**	**65,593**	**2,074,592**	**(2,207,789)**	**458**	**509,299**	***Total***

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Realisasi/ pembayaran/ *Realisation/ payments*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
31 Desember 2019					***31 December 2019***
Kas yang dibatasi penggunaannya	(60,650)	(3,462)	52,650	(11,462)	*Restricted cash*
Pinjaman bank	332,878	3,763,331	(3,688,955)	407,254	*Bank loans*
Pinjaman dari pihak ketiga	180,964	561	(872)	180,653	*Third party borrowings*
Jumlah	**453,192**	**3,760,430**	**(3,637,177)**	**576,445**	***Total***

20. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA / *20. OTHER SHORT-TERM LIABILITIES*

	2020	2019	
Uang muka pelanggan	87,133	68,152	*Advance from customers*
Liabilitas lancar lainnya	61,369	42,895	*Other short-term liabilities*
	148,502	**111,047**	

21. IMBALAN KERJA / *21. EMPLOYEE BENEFITS*

a. Kewajiban imbalan kerja karyawan jangka pendek / *a. Short-term employee benefit obligations*

Imbalan kerja karyawan jangka pendek merupakan provisi akrual bonus untuk pegawai.

Besarnya bonus yang akan dibagikan bergantung pada keputusan Direksi Perusahaan sesuai dengan ketetapan anggaran dasar hasil Rapat Pembahasan Bersama ("RPB") di awal tahun.

Short-term employee benefits consist of accrued employee bonuses.

Bonuses to be paid depend on the decision of the Director of the Company in accordance to results of meeting on the Articles of Association with Rapat Pembahasan Bersama ("RPB") in the beginning of the year.

	2020	2019	
Bonus karyawan	**137,795**	**130,666**	***Employee bonus***

b. Program imbalan pascakerja / *b. Post-employment benefit programs*

(i) Penghargaan atas pengabdian / *(i) Severance and service pay*

Manfaat ini terdiri dari imbalan tambahan yang diberikan pada saat karyawan memasuki usia pensiun, dan dalam hal mengalami cacat tetap, meninggal atau mengundurkan diri secara sukarela sesuai dengan PKB dan SK Direksi.

Jumlah karyawan yang turut berpartisipasi dalam program ini sebanyak 17.913 orang. Perusahaan menyetorkan dana kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI.

This benefit consists of additional benefits for employees to which they are entitled when they enter the pension period, and in the event of permanent disability, death, or voluntary resignation based on PKB and Board of Director Decree.

The total number of employees participating in this program are 17,913. The Company has paid the fund to Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI.

Dana pensiun / *Pension fund*

Dana pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna menjamin kesinambungan penghasilan pegawai dan keluarganya di masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun dapat memberikan motivasi dan ketenangan kerja serta meningkatkan produktivitas pegawai. Perusahaan hingga tahun 2020 mempunyai dua program pensiun yang terdiri dari:

The pension fund is a means collector of funds to ensure the sustainability of employees and their family income in retirement. The pension fund can provide motivation and peace in the workplace and improve employee productivity. As of 2020, the Company has two pension plans that consist of the following:

21. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Program imbalan pascakerja (lanjutan)

(i) Penghargaan atas pengabdian (lanjutan)

1. Dana Pensiun Perhutani ("DPPHT")

DPPHT diperuntukkan bagi karyawan tetap yang berstatus pegawai tetap (Program Pensiun Manfaat Pasti) berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani sebagai pendiri dana pensiun Perum Perhutani No. 446/Kpts/Dir/2011 tentang peraturan dana pensiun Perum Perhutani tanggal 9 Juli 2011, untuk pegawai aktif hingga 1 Januari 2009.

2. Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK")

DPLK adalah kepesertaan pegawai pada program pensiun DPLK diperuntukkan bagi pegawai yang diangkat mulai 1 Januari 2009 berdasarkan SK Direksi No. 482/Kpts/Dir/2010 tentang tunjangan iuran DPLK khusus pegawai Perusahaan yang diangkat mulai 1 Januari 2009.

(ii) Program Kesehatan Pensiunan ("Prokespen")

Perusahaan memberikan program iuran pasti sehubungan dengan kesehatan pascakerja pegawai. Program kesehatan pascakerja meliputi para pensiunan Perusahaan, pasangan dan tanggungannya sejak pensiunan memasuki usia pensiun. Program ini didanai iuran Perusahaan dan pekerja yang disetorkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perum Perhutani ("YKP3") sebagai penanggung jawab program kesehatan pascakerja pegawai.

c. Program imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan kerja lain meliputi program santunan hari tua, cuti besar dan penghargaan masa pengabdian.

21. EMPLOYEE BENEFITS *(continued)*

b. Post-employment benefit programs *(continued)*

(i) Severance and service pay (continued)

1. Pension Fund Perhutani ("DPPHT")

DPPHT is intended for permanent employees with the status of permanent employees (Defined Benefit Pension Plan) based on the decision of the Directors of Perum Perhutani as pension as founder of pension fund Perum Perhutani No. 446/Kpts/Dir/2011 regarding the regulation of pension funds Perum Perhutani dated 9 July 2011, for those active employees until 1 January 2009.

2. Financial Institutions Pension Fund ("DPLK")

DPLK is employee participation in the Pension Fund program which is intended for employees who were appointed from 1 January 2009 and based on Board of Directors Decree No. 482/Kpts/Dir/2010 on contribution allowances dues for DPLK of the Company specific for employees who were appointed from 1 January 2009.

(ii) Post-employment healthcare program ("Prokespen")

The Company has post-employment healthcare defined contribution plans. The post-employment healthcare plans involves the Company's retired employees, their spouses and dependents from the date of the employees' retirement. This program is funded by the Company's and employee's contributions which will be paid to Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perum Perhutani ("YKP3") who is responsible to manage the post-employment healthcare program.

c. Other long-term employee benefits

The Grup provides other employee benefits include old-age benefit programs, awards of leave and award period of service.

21. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Kewajiban imbalan pascakerja

Provisi yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Imbalan pascakerja	2,510,940	2,214,931	*Post-employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	1,715	1,894	*Other long-term employee benefits*
	2,512,655	2,216,825	
Nilai wajar aset program	(790,918)	(904,236)	*Fair value plan assets*
	1,721,737	**1,312,589**	

Tingkat pengembalian yang diharapkan atas investasi dengan bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto per tanggal akhir periode laporan keuangan.

Tabel berikut menyajikan ikhtisar biaya imbalan kerja sebagaimana tercatat pada laporan laba rugi:

	2020	2019	
Imbalan pascakerja	142,049	137,122	*Post-employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	(72)	96	*Other long-term employee benefits*
	141,977	**137,218**	

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset program ditempatkan di Dana Pensiun Grup, dengan rincian aset investasi sebagai berikut:

	2020	2019	
Reksadana	151,337	162,271	*Mutual funds*
Saham	146,133	228,577	*Shares*
Surat berharga negara	120,398	143,088	*Government Bonds*
Obligasi	88,865	77,927	*Bonds*
Penempatan langsung	88,005	99,639	*Direct placements*
Deposito berjangka	85,239	41,000	*Time deposits*
Sukuk	59,991	60,963	*Sharia bonds*
Tanah dan bangunan	19,787	21,689	*Land and Building*
Deposito *on call*	5,200	12,000	*On call deposits*
	764,955	847,154	

Provisi imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh PT Dian Artha Tama, aktuaria independen, dengan laporan yang diterbitkan pada tahun 31 Maret 2021 dan 26 Maret 2020.

21. EMPLOYEE BENEFITS *(continued)*

d. Post-employment benefit obligations

The provision of employee benefits, presented in the statement of financial position, is as follows:

Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the period end of financial statement date.

The table below presents a summary of the employee benefits expenses reported in the statement of profit or loss:

On 31 December 2020, plan assets placed in Dana Pensiun Group are as follows:

Provision for employee benefits as at 31 December 2020 and 2019 were calculated by PT Dian Artha Tama, independent actuary, in actuarial report issued on 31 March 2021 and 26 March 2020.

21. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *21. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

d. Kewajiban imbalan pascakerja (lanjutan) / *d. Post-employment benefit obligations (continued)*

d1. Program imbalan pascakerja / *d1. Post-employment benefits*

Provisi yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The provision of employee benefits presented in the statement of financial position is as follows:

	2020	2019	
Nilai kini dari kewajiban	2,510,940	2,214,931	*Present value of obligation*
Nilai wajar aset program	(790,918)	(904,236)	*Fair value of plan assets*
Provisi pada laporan posisi keuangan	**1,720,022**	**1,310,695**	***Provision in the statement of financial position***

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the post-employment benefit obligations over the year is as follows:

	2020	2019	
Pada awal tahun	2,214,931	1,923,984	*At beginning of the year*
Biaya bunga	155,055	154,251	*Interest cost*
Biaya jasa kini	47,992	41,852	*Current service cost*
Pembayaran dari program:			*Payment from plans:*
Pembayaran manfaat	(226,100)	(217,205)	*Benefit payments*
Biaya jasa lalu	1,241	2,474	*Past service cost*
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografi	(91)	-	*Actuarial gain from change in demographic assumptions*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	250,404	184,130	*Actuarial loss from change in financial assumptions*
Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	67,508	125,445	*Actuarial loss from changes in experience adjustments*
Pada akhir tahun	**2,510,940**	**2,214,931**	***At end of the year***

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets for the year are as follows:

	2020	2019	
Pada awal tahun			*At beginning of the year*
- Aset imbalan pascakerja memenuhi kriteria secara perspektif akuntansi	904,236	768,500	*Qualified plan assets from an - accounting perspective*
Penghasilan bunga	62,239	61,370	*Interest income*
Pembayaran manfaat	(98,239)	(88,218)	*Benefit payments*
Iuran pemberi kerja	51,470	168,306	*Employer's contribution*
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Imbal hasil atas aset program	(128,788)	(5,722)	*Return on plan assets*
Pada akhir tahun	**790,918**	**904,236**	***At end of the year***

21. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *21. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

d. Kewajiban imbalan pascakerja (lanjutan) / *d. Post-employment benefit obligations (continued)*

d1. Program imbalan pascakerja (lanjutan) / *d1. Post-employment benefits (continued)*

Tabel berikut menyajikan ikhtisar biaya imbalan kerja sebagaimana tercatat pada laporan laba rugi:

The table below presents a summary of the employee benefits expenses presented in the statement of profit or loss:

	2020	2019	
Beban bunga, bersih	92,816	92,796	*Interest expenses, net*
Biaya jasa kini	47,992	41,852	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	1,241	2,474	*Past service cost*
	142,049	**137,122**	

d2. Imbalan kerja jangka panjang lainnya / *d2. Other long-term employee benefits*

Provisi yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The provision of employee benefits presented in the statement of financial position is as follows:

	2020	2019	
Nilai kini dari kewajiban	1,715	1,894	*Present value of obligation*
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	**1,715**	**1,894**	***Liability in the statement of financial position***

Mutasi nilai kini kewajiban selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of obligation over the year is as follows:

	2020	2019	
Pada awal tahun	1,894	1,798	*At beginning of the year*
Biaya bunga	128	147	*Interest cost*
Biaya jasa kini	322	371	*Current service cost*
Pembayaran manfaat	(107)	-	*Benefit payments*
Biaya jasa lalu	-	79	*Past service cost*
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografi	(9)	-	*Actuarial gain from changes in demographic assumption*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	51	77	*Actuarial loss from change in financial assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(564)	(578)	*Actuarial gain from changes in experience adjustments*
Pada akhir tahun	**1,715**	**1,894**	***At end of the year***

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/75 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***21. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

d. Kewajiban imbalan pascakerja (lanjutan) / ***d. Post-employment benefit obligations** (continued)*

d2. Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan) / ***d2. Other long-term employee benefits** (continued)*

Beban imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui pada laporan laba rugi adalah:

The amounts of other long-term employee benefits expenses recognised in the statement of profit or loss are as follows:

	2020	2019	
Biaya jasa kini	322	371	*Current service cost*
Biaya bunga	128	147	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	-	79	*Past service cost*
Keuntungan aktuaria dari pengukuran kembali	(522)	(501)	*Actuarial gain from remeasurement*
	(72)	**96**	

e. Asumsi-asumsi aktuarial / ***e. Actuarial assumptions***

	2020	2019	
Usia pensiun normal (tahun)	56	56	*Normal pension age (years)*
Tingkat diskonto	5.7% - 6.5%	5.4% - 8.2%	*Discount rate*
Estimasi kenaikan gaji di masa datang	2.5% - 6.0%	2.5% - 6.0%	*Estimated future salary increase*
Tabel mortalita	GAM -1971, TM IV 2019	GAM -1971, TM III 2011	*Mortality table*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions are as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*		
		Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 8.7%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 10.2%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 2.8%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 2.6%	*Salary growth rate*

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas kerja jangka panjang atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas kerja jangka panjang dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis are based on a change in a single assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the long-term benefits obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the long term benefits obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the long-term benefits liability recognised within the consolidated statement of financial position.

21. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *21. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

e. Asumsi-asumsi aktuarial (lanjutan) / ***e. Actuarial assumptions** (continued)*

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and other long-term benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	1 sampai 5 tahun/ *Between 1-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Imbalan pascakerja	252,376	336,315	5,623,304	6,211,995	*Post-employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	16,578	22,485	252,863	291,926	*Other long-term employee benefits*
Total	**268,954**	**358,800**	**5,876,167**	**6,503,921**	***Total***

22. MODAL DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR / *22. CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

	2020 dan/*and* 2019			
Pemilik modal	**Nilai kepemilikan/ *Value of ownership***	**Persentase pemilikan/ *Percentage of ownerships***	**Jumlah/ *Total***	***Capital owner***
Pemerintah Indonesia	2,586,303	100%	2,586,303	*The Government of Indonesia*
	2,586,303	**100%**	**2,586,303**	

Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dinyatakan bahwa modal Perusahaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham.

Based on PP No. 30 of 2003 relating to Perusahaan Umum (Perum) Perhutani it is stated that the Company's share capital represents the state's wealth, which was separated from the State Budget of Income and Expenditure and not divided by shares.

Nilai kekayaan negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2010 ditetapkan besarnya modal Perusahaan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal negara dalam Perusahaan dengan jumlah sebesar Rp700.000. Untuk tambahan modal disetor lihat Catatan 5.

The wealth of the state was determined by the Minister of Finance based on calculations performed by the Ministry of Finance and the Ministry of Forestry. Based on the PP No. 72 of 2010 it was set the amount of capital the Company is equal to the entire value of its investment in the Company amounting to Rp700,000. For additional paid-in capital refer to Note 5.

Cadangan khusus / ***Special purpose reserves***

Pada tahun 2014, RPB menetapkan cadangan khusus sebesar Rp205.476. Dari jumlah tersebut, RPB No. S-241/MBU/2014 kemudian menetapkan penggunaan cadangan tersebut yang tertuang dalam Rencana Operasi dengan jumlah sebesar Rp 202.790 yang disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai dengan surat No. 66/023.4/Keu/Dwas/2014, tanggal 11 Agustus 2014, yang terbagi kedalam tiga program khusus, berikut rinciannya:

In 2014, RPB determined a special purpose reserves amounting to Rp205,476. Of that amount, RPB No. S-241/MBU/2014 then established the use of the special purpose reserves as stipulated in the Operation Plan amounting to Rp 202,790, which was approved by the Supervisory Board in accordance with the letter No. 66/023.4/Keu/Dwas/2014, dated 11 August 2014, and is divided into three specific programs, as follows:

22. MODAL DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan) / *22. CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)*

Cadangan khusus (lanjutan) / ***Special purpose reserves** (continued)*

	2020			
	Saldo yang ditetapkan/ *Determined balance*	Realisasi/ *Realisation*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Reboisasi tanaman	25,469	-	25,469	*Plant reforestation*
Sertifikasi tanah	65,835	-	65,835	*Land certification*
Golden shake hand	11,841	-	11,841	*Golden shake hand*
	103,145	**-**	**103,145**	

23. PENDAPATAN / *23. REVENUES*

	2020	2019	
Kayu			***Wood***
Pihak berelasi (Catatan 29)			***Related party (Note 29)***
Kayu olahan	45,857	23,004	*Processed wood*
Pihak ketiga			***Third party***
Kayu bulat	1,726,000	1,617,092	*Logs*
Kayu olahan	194,598	184,305	*Processed wood*
	1,966,455	**1,824,401**	
Non-kayu			***Non-wood***
Pihak berelasi (Catatan 29)			***Related party (Note 29)***
Getah pinus	6	-	*Pine sap*
Lainnya	207	-	*Others*
	213	-	
Pihak ketiga			***Third party***
Gondorukem dan terpentin	1,345,420	1,486,530	*Gum rosin and turpentine*
Minyak kayu putih	87,567	85,561	*Eucalyptus oil*
Getah pinus	51,053	55,799	*Pine sap*
Lainnya	37,366	41,842	*Others*
	1,521,619	**1,669,732**	
Lainnya			***Others***
Pihak berelasi (Catatan 29)			***Related party (Note 29)***
Jasa rehabilitasi	116,153	264,754	*Rehabilitation service*
Wisata dan agribisnis	2,535	-	*Tourism and agribusiness*
	118,688	264,754	
Pihak ketiga			***Third party***
Wisata dan agribisnis	309,557	350,835	*Tourism and agribusiness*
Jasa rehabilitasi	11,069	28,197	*Rehabilitation service*
	439,314	**643,786**	
	3,927,388	**4,137,919**	

24. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *24. COST OF REVENUE*

Berikut merupakan rekonsiliasi beban pokok pendapatan selama tahun berjalan: / *The following is the reconciliation of cost of revenue during the year:*

	2020	2019*	
Biaya eksploitasi	1,506,800	1,700,954	*Exploitation expenses*
Gaji/upah dan kesejahteraan karyawan	983,425	934,169	*Salary and employee benefits*
Biaya produksi dari nilai wajar aset biologis	566,412	453,798	*Cost of production from fair value of biological assets*
Penggunaan bahan baku dan biaya pengelolaan	171,983	221,439	*Raw materials used and processing costs*
Beban penyusutan (Catatan 15)	31,543	12,344	*Depreciation expense (Note 15)*
Biaya pemeliharaan	13,752	24,859	*Maintenance expenses*
Biaya depresiasi tanaman produktif (Catatan 13)	7,850	7,915	*Bearer plant depreciation expenses (Note 13)*
Lain-lain	29,550	95,631	*Others*
	3,311,315	3,451,109	
Barang jadi (Catatan 10):			*Finished goods (Note 10):*
Persediaan awal	386,784	323,271	*Beginning of the year*
Persediaan akhir	(245,414)	(386,784)	*End of the year*
Beban pokok pendapatan	**3,452,685**	**3,387,596**	***Cost of revenue***

25. BEBAN USAHA / *25. OPERATING EXPENSES*

	2020	2019	
Beban pegawai	579,239	705,731	*Employee expenses*
Beban penyusutan (Catatan 15)	73,745	74,126	*Depreciation expenses (Note 15)*
Beban penyusutan aset hak guna	22,503	-	*Right-of-use assets depreciation expenses*
Beban kantor	56,109	67,689	*Office expenses*
Beban penjualan	27,981	37,917	*Selling expenses*
Beban pemeliharaan	19,136	42,638	*Maintenance expenses*
Beban komisi agen	15,787	16,600	*Agent commission fees*
Beban pengaturan hasil hutan	4,591	6,030	*Forest product handling expenses*
Beban ekspor	1,700	1,114	*Export expenses*
Beban lain-lain	23,647	73,155	*Other expenses*
	824,438	**1,025,000**	

26. PENDAPATAN LAINNYA, BERSIH / *26. OTHER INCOME, NET*

	2020	2019	
Penerimaan ganti rugi	151,971	44,410	*Compensation income*
Pemulihan/(penurunan) nilai aset tetap	16,764	(20,890)	*Reversal/(impairment) of property, plant and equipment*
Keuntungan divestasi saham	-	17,973	*Gain from divestment of shares*
Provisi tuntutan hukum	(35,000)	-	*Provision due to legal claim*
Denda pajak administrasi	(32,243)	(3,266)	*Tax administration penalty*
(Penyisihan)/pemulihan penurunan nilai piutang dan aset keuangan, bersih	(17,657)	3,685	*(Provision)/reversal of impairment receivables and financial assets, net*
Bagian atas (rugi)/laba investasi pada entitas asosiasi (Catatan 12)	(7,803)	9,264	*Share of net (loss)/profit of investment in associates (Note 12)*
Kerugian selisih kurs	(5,159)	(2,380)	*Loss on foreign exchange*
(Beban)/pendapatan lainnya, bersih	(2,328)	5,871	*Other (expenses)/income, net*
	68,545	**54,667**	

* Disajikan kembali (lihat Catatan 33) / *As restated (refer to Note 33)**

26. PENDAPATAN LAINNYA, BERSIH (lanjutan) / *OTHER INCOME, NET (continued)*

Penerimaan ganti rugi merupakan penggantian atas tanaman dan investasi kawasan hutan yang akan digunakan untuk kepentingan umum, yakni kegiatan pembangunan waduk dan pembangkit listrik.

Compensation income represents compensation for standing timber and investment in forest areas, which will be used in public interest for the construction of reservoirs and power plants.

27. PENGHASILAN KEUANGAN / *FINANCE INCOME*

	2020	2019	
Jasa giro dan bunga deposito	23,380	35,136	*Current account and deposit interest*

28. BEBAN KEUANGAN / *FINANCE COSTS*

	2020	2019	
Beban bunga	27,984	6,838	*Interest expenses*
Biaya administrasi bank	4,225	3,026	*Bank administration fees*
	32,209	9,864	

29. INFORMASI PIHAK BERELASI / *RELATED PARTIES INFORMATION*

a. Sifat hubungan dan transaksi / *The nature of relationship and transactions*

Tabel berikut adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Grup, termasuk hubungan dan sifat transaksinya:

The following table is a summary of related parties who has transaction with the Group, including the relationship and nature of the transaction:

Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis transaksi/ *Nature of transactions*
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entities*	BRI, BTN, BNI, Mandiri, BPD dan/*and* BRI Agroniaga	Penempatan dana pada bank, deposito berjangka, kas yang dibatasi penggunaannya, dan penghasilan dan beban keuangan/ *Placement on bank, time deposits, restricted cash, and finance income and costs*
	BRI, BNI, Mandiri, dan/and BRI Agroniaga	Pinjaman / Borrowings

29. INFORMASI PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Sifat hubungan dan transaksi (lanjutan)

***29. RELATED PARTIES INFORMATION** (continued)*

***a. The nature of relationship and transactions** (continued)*

Sifat hubungan/ ***Nature of relationship***	**Pihak berelasi/** ***Related parties***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transactions***
	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. ("Garuda"), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), PT Timah (Persero), Tbk. ("Timah"), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo") I, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ("Inalum"), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ("KEPRI"), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ("BPDASHL"), PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI"), PT Aneka Tambang ("Antam"), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ("Bappeda Kab. Nganjuk"), dan/ and Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ("Kementerian PUPR")	Pendapatan jasa rehabilitasi/ *Rehabilitation service income*
	PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. ("Telkom")	Beban jasa telekomunikasi/ *Telecommunication service expense*
Pemilik modal/*Capital owner*	Pemerintah Indonesia	Kekayaan Negara yang disisihkan/ *Separated State wealth*
Entitas asosiasi/*Associates*	PT Idec Abadi Wood Industries ("Idec AWI")	Pendapatan penjualan kayu/*Revenue from log sales*
Personil manajemen kunci/*Key management personnel*	Dewan Pengawas dan Dewan Direksi/*Board of Supervisory and Board of Director*	Remunerasi dan kompensasi/*Remuneration and compensation*

b. Saldo signifikan dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi usaha dengan pemilik modal dan/atau entitas dengan pemilik modal yang sama. Transaksi-transaksi ini terutama berhubungan dengan pemberian pekerjaan konstruksi, penjualan barang dagangan, sewa-menyewa lahan dan pinjam meminjam dana operasional.

b. Significant balances with related parties

The Group has engaged in financial transactions with the capital owner and/or related entities with the same capital owner. These transactions consist mainly of construction, trading, land rental and borrowing of operational funds.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/81 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. INFORMASI PIHAK BERELASI (lanjutan) / ***29. RELATED PARTIES INFORMATION*** *(continued)*

b. Saldo signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan) / ***b. Significant balances with related parties*** *(continued)*

	2020	2019	
Kas dan setara kas			***Cash and cash equivalents***
Kas pada bank			***Cash in banks***
Entitas berelasi dengan Pemerintah	578,846	638,111	*Government related entities*
Deposito berjangka			***Time deposits***
Entitas berelasi dengan Pemerintah	122,202	376,837	*Government related entities*
	701,048	1,014,948	
Kas yang dibatasi penggunaannya			***Restricted cash***
Kas pada bank			***Cash in banks***
Entitas berelasi dengan Pemerintah	67,621	2,496	*Government related entities*
Deposito berjangka			***Time deposits***
Entitas berelasi dengan Pemerintah	70,600	11,056	*Government related entities*
	138,221	13,552	
Piutang usaha			***Trade receivables***
Idec AWI	1,032	1,598	*Idec AWI*
Timah	939	1,111	*Timah*
Garuda	-	31	*Garuda*
Entitas berelasi dengan Pemerintah lainnya	410	605	*Other Government related entities*
	2,381	3,345	
Utang usaha			***Trade payables***
Pelindo I	-	44	*Pelindo I*
Pinjaman bank			***Bank loans***
Entitas berelasi dengan pemerintah	377,733	393,559	*Government related entities*

29. INFORMASI PIHAK BERELASI (lanjutan) / ***29. RELATED PARTIES INFORMATION*** *(continued)*

b. Saldo signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan) / ***b. Significant balances with related parties*** *(continued)*

	2020	2019	
Pendapatan			***Revenues***
BPDASHL	104,668	248,260	*BPDASHL*
Idec AWI	22,198	23,004	*Idec AWI*
Bappeda Kab. Nganjuk	9,595	-	*Bappeda Kab. Nganjuk*
Kementerian PUPR	9,533	-	*Kementerian PUPR*
Timah	5,490	5,446	*Timah*
PLN	4,627	2,112	*PLN*
Inalum	1,318	3,914	*Inalum*
Lainnya	7,329	5,022	*Other*
	164,758	287,758	
Penghasilan keuangan			***Finance income***
Entitas berelasi dengan pemerintah	23,319	32,123	*Government related entities*
Beban keuangan			***Finance costs***
Entitas berelasi dengan pemerintah	32,176	9,560	*Government related entities*

c. Kompensasi manajemen kunci / ***c. Key management compensation***

Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan merupakan personil manajemen kunci.

The Boards of Supervisory and Directors of the Company are considered key management personnel.

Remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan, untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

Remuneration for the Boards of Supervisory and Directors of the Company for the years ended 31 December 2020 and 2019 was as follows:

	2020	2019	
Remunerasi	26,414	37,369	*Remuneration*

30. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN

Litigasi

a. Sanksi Denda oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pada tanggal 21 Mei 2019, IHT II mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Samarinda dengan nomor perkara No. 40/G/2019/PTUN-SMD, untuk membatalkan SK Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Utara No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019 tentang sanksi Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) kepada PT Inhutani II Semamu, Kebupaten Malinau sebesar Rp35 miliar karena dianggap melakukan penebangan pada kawasan lindung dan penebangan diluar blok tebangan yang diizinkan.

IHT II telah mengirimkan korespondensi berupa upaya keberatan pada tanggal 31 Mei 2019 dengan surat No. 017/P.UMHA-SM/2019 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara namun ditolak dan dirujuk untuk melakukan keberatan melalui PTUN. IHT II kemudian didampingi oleh Dr. Sadino & Partners sebagai pengacara untuk mewakili IHT II dalam proses hukum ke PTUN Samarinda.

Pada tanggal 9 September 2019 berdasarkan surat No. 915/60/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mencabut surat No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019 yang dinilai tidak sesuai kriteria tata cara administrasi hukum yang kemudian direvisi menjadi SK No. 915/61/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019 pada tanggal 30 September 2019 dengan nilai gugatan yang kurang lebih sama.

Mengingat obyek perkara berubah dari SK Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Utara No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019, menjadi SK No. 915/61/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019, maka IHT II mencabut gugatan pada perkara No. 40/G/2019/PTUN-SMD dan mengajukan gugatan baru pada PTUN Samarinda dengan nomor perkara No. 71/G/2019/PTUN.SMD tanggal 19 Desember 2019.

Pada tanggal 28 April 2020, PTUN Samarinda menolak permohonan banding IHT II. Atas putusan tersebut, IHT II mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PTTUN") Jakarta No. 199/B/2020/PT.TUN.JKT. Pada tanggal 10 Augustus 2020, PTTUN Jakarta menolak permohonan banding IHT II.

30. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENT

Litigation

a. Sanction by North Borneo Provincial Government

On 21 May 2019, IHT II file a lawsuit to Samarinda State Administrative Court ("PTUN") through letter No. 40/G/2019/PTUN-SMD, to terminate the Forestry Office of North Borneo Provincial Government Decree No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019 related to sanction Denda Pelangaran Eksploitasi Hutan (DPEH) to PT Inhutani II in Semamu area, Malinau District with claim value of Rp35 billion with accusation of logging in protected areas and logging outside the permitted cutting block.

IHT II has sent correspondence by filing an objection on May 31, 2019 with letter No. 017/P.UMHA-SM/2019 to the Head of the North Kalimantan Provincial Forestry Office but it was rejected and referred to the objection through PTUN. IHT II, appointed Dr. Sadino & Partners as a lawyer to represent the IHT II in the legal process at Samarinda PTUN Court.

On September 9, 2019 based on Decree No. 915/60/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019, the Head of the North Kalimantan Provincial Forestry Office revoked letter No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019 which was not in accordance with the criteria for legal administration procedures, which were revised to Decree No. 915/61/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019 on September 30, 2019 with a similar claim value.

Considering the object of the case changed from the Forestry Office of North Borneo Provincial Government Decree No. 915/38/KptsDPEH/II./V/2019, to Decree No. 915/61/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019, IHT II revoke the lawsuit No. 40/G/2019/PTUN-SMD dated 21 May 2019 and filed a new lawsuit at Samarinda PTUN through letter No. 71/G/2019/PTUN.SMD dated 19 December 2019.

On 28 April 2020, Samarinda PTUN rejected the lawsuit. Based on the decision, IHT II filed an appeal to Jakarta PTTUN with No. 199/B/2020/PT.TUN.JKT. On 10 August 2020 Jakarta PTTUN rejected the appeal.

30. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN (lanjutan)

a. Sanksi Denda oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (lanjutan)

Pada tanggal 7 Januari 2021, IHT II telah mengajukan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung dengan No. 51K/TUN/2021 namun pada tanggal 3 Maret 2021 MA menolak permohonan kasasi IHT II. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan konsolidasian ini, IHT II masih dalam proses untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap kasus litigasi ini namun mempertimbangkan adanya keraguan signifikan bahwa IHT II tidak memiliki basis yang kuat untuk dapat membela posisinya sehingga provisi atas kasus legal ini telah dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian ini (lihat Catatan 26).

b. Perjanjian dengan PT Paramitra Mulia Langgeng ("PML")

Pada tanggal 2 April 2009 IHT V dan PML menandatangi perjanjian kerja sama No. 52/IHT-V/PKS/II-I/2009 (32/PML/IV/2009) atas pemanfaatan lahan Register 42, 44 and 46 di Lampung untuk penanaman karet dan akasia. Pada praktiknya, kegiatan penanaman berjalan namun pemanenan belum terlaksana karena nilai bagi hasil yang belum disepakati. Di lain pihak, lahan tersebut diokupasi oleh masyarakat dan dikerjasamakan dengan PT Pemukasakti Manisindah ("PSMI") sehingga PML tidak dapat melakukan kegiatan secara optimal.

Atas hal tersebut, PML mengajukan kasus ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan nomor 624/X/ARB-BANI/2014 pada Oktober 2015 yang mewajibkan IHT V membayar kompensasi dan biaya administrasi sebesar Rp15.575.946.500 (nilai penuh), serta denda keterlambatan Rp5.000.000 per hari (nilai penuh). Atas putusan tersebut IHT V mengajukan banding ke Pengadilan Negeri ("PN") dengan No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST dan memenangkan banding IHT V.

PML mengajukan banding atas putusan PN ke Mahkamah Agung ("MA") dengan nomor 8077 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 dan mengeluarkan keputusan *inkracht* untuk menguatkan keputusan BANI dan memerintahkan PN untuk melakukan penyitaan atas aset PT IHT V. Per 31 Desember 2017, penyitaan belum dapat dieksekusi mempertimbangkan permohonan penundaan dari IHT V.

30. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENT *(continued)*

a. Sanction by North Borneo Provincial Government *(continued)*

On 7 January 2021, IHT II filed a cassation based on the decision to the Supreme Court with No. 51K/TUN/2021 however, on 3rd March 2021, the Supreme Court rejected IHT II's appeal for cassation. As of the completion date of these consolidated financial statements, IHT II is still in the process of submitting a judicial review to the Supreme Court for this litigation case but considering there is significant doubt that IHT II does not have a strong basis to defend its position so the provisions for this legal case have been recorded in these consolidated financial statements (refer to Note 26).

b. Agreement with PT Paramitra Mulia Langgeng ("PML")

On 2 April 2009 IHT V and PML signed a cooperation agreement No. 52 / IHT-V / PKS / II-I / 2009 (32 / PML / IV / 2009) on the use of land with Registers 42, 44 and 46 in Lampung for rubber and acacia cultivation. In practice, planting activities are implemented but harvesting activities have not been carried out because the profit sharing value has not been agreed upon. On the other hand, the land was occupied by the community and cooperated with PT Pemukasakti Manisindah ("PSMI") therefore PML could not carry out activities optimally.

Therefore, PML submitted the case to the Indonesian National Arbitration Agency ("BANI") with number 624 / X / ARB-BANI / 2014 in October 2015 which obliged IHT V to pay compensation and administration fees of Rp15,575,946,500 (full amount), and a late fine of Rp5,000,000 per day (full amount). Based on the decision, IHT V filed an appeal to the District Court ("PN") with No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST and IHT V has won the appeal.

PML appealed the PN's decision to the Supreme Court ("MA") with number 8077 B / Pdt.Sus-Arbt / 2016 and issued a decision to strengthen the decision BANI and ordered PN to confiscate IHT V assets. As of 31 December 2017, confiscation cannot be executed considering delay request from IHT V.

30. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN (lanjutan)

b. Perjanjian dengan PT Paramitra Mulia Langgeng ("PML") (lanjutan)

Atas pemanenan yang belum dijalankan bersama, PML diduga melakukan penyadapan getah karet di Register 42 dan 46. Per 31 Desember 2017, PT IHT V sedang dalam proses pengajuan tuntutan melalui Kejaksaan Tinggi Lampung kepada PML atas dugaan penyadapan getah karet, dimana dalam prosesnya tertunda karena kosongnya jabatan Direktur definitif IHT V.

Pada tanggal 19 Januari 2018, kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kerjasama tahun 2009 dan mencabut seluruh tuntutan pada periode sebelumnya. Pada tanggal 1 November 2018, IHT V dan PML menandatangani perjanjian damai serta menandatangani adendum perjanjian kerjasama masing - masing dengan No. 617/IHT-V/PKS/11/2018 dan No. 105/PML/XI/2018.

Pada tanggal 14 Oktober 2019, IHT V, PML dan Radjiman Billitea & Partners ("RBP") selaku kuasa hukum IHT V melakukan pertemuan untuk merekonstruksi perjanjian kerjasama No. 617/IHT-V/PKS/11/2018 dan No. 105/PML/IX/2018 tanggal 1 November 2018, akan tetapi kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan.

Pada tahun 2020, IHT V telah mengundang PML untuk merekonstruksi perjanjian kerjasama, akan tetapi PML tidak hadir. Pada tanggal 8 Maret 2021, IHT V mengirimkan korespondensi kepada Kepala Kejaksaan Agung RI cq Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) dengan surat No. 83/IHT-V/Sekper/3/2021 sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, IHT V dan RBP sedang menyusun draft gugatan perdata yang akan disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. IHT V berkeyakinan memiliki dasar yang kuat dalam kasus ini, sehingga tidak ada provisi kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

30. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENT *(continued)*

b. Agreement with PT Paramitra Mulia Langgeng ("PML") *(continued)*

For harvesting activities that have not been carried out together, PML was suspected for tapping rubber sap on the Register 42 and 46. As of 31 December 2017, the PT IHT V is in the process of filing a claim through the Lampung High Prosecutor's Office for the alleged tapping of rubber sap, which was delayed due to vacant positions IHT V definitive director.

On 19 January 2018, both parties decided to make an addendum to the 2009 cooperation agreement and revoke all claims in the previous period. On 1 November 2018, IHT V and PML signed a peace agreement and an addendum to their respective cooperation agreements with No. 617 / IHT-V / PKS / 11/2018 and No. 105 / PML / XI / 2018.

On 14 October 2019, IHT V, PML and Radjiman Billitea & Partners ("RBP") as the attorney of IHT V held a meeting to reconstruct the agreements No. 617/IHT-V/PKS/11/2018 and No. 105/PML/IX/2018 dated 1 November 2018, however both parties have not yet reached a conclusion.

In 2020, IHT V has invited PML to reconstruct the agreement, however PML was absent. On 8 March 2021, IHT V sent a correspondence letter to the Head of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia cq Junior Attorney General for Special Crimes (Jampidsus) with No. 83/IHT-V/Sekper/3/2021 in relation to embezzlement accusation.

As of the completion date of these consolidated financial statements, IHT V and RBP are drafting a civil lawsuit that will be submitted through the Central Jakarta District Court. IHT V believes it has strong grounds to support the case, therefore no provision has been recorded in these consolidated financial statements.

30. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN (lanjutan)

KIFC

IHT II dan KIFC menandatangani perjanjian No. 765/SPK/GM-HT-Akasia/2012 (No. 97/II/KIFC/2012) tertanggal 24 Juli 2012. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pembangunan, pengembangan dan penggelolaan HTI *Fast Growing Species* ("FGS") jenis Akasia Mangium dengan nilai kontrak per hektar sebesar Rp14.386.955 (nilai penuh) pada area seluas 12.000Ha di Pulau Laut dan Tanah Grogot, Kalimantan Selatan selama delapan tahun. KIFC menyetorkan uang untuk mendanai kegiatan pada area yang dimaksud. Dana ini tidak dikenakan bunga dan IHT II tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Pada saat tanaman ini dipanen, IHT II dan KIFC akan mendapatkan bagi hasil produksi masing-masing sebesar 30% dan 70%.

Pada tanggal 14 Januari 2019, IHT II dan KIFC menandatangani adendum perjanjian No. 045/P/BANGHUT/2019 (No. 031/V/KIFC/2019). Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan rehabilitasi terhadap tanaman rusak yang terkena penyakit pada area seluas 4.492 Ha di Pulau Laut dan mengubah skema bagi hasil produksi IHT II dan KIFC masing-masing sebesar 10% dan 90%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah dana yang telah diterima dan direalisasikan IHT II dalam proyek ini adalah masing-masing sebesar Rp21.660 (2019: Rp23.892) dan Rp27.592 (2019: Rp27.328). Kelebihan pengeluaran dana yang telah direalisasikan namun masih dapat ditagihkan sampai tahun 2020 sebesar Rp5.932 dicatat sebagai aset keuangan lancar lainnya.

Perhutanan sosial

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

30. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENT *(continued)*

KIFC

IHT II and KIFC entered into agreement No. 765/SPK/GM-HT-Akasia/2012 (No. 97/II/KIFC/2012) dated 24 July 2012. According to this agreement, both parties agree to incorporate in building, developing and managing HTI Fast Growing Species ("FGS") for Acacia Mangium with a contract value of Rp14,386,955 (full amount) at area of 12,000Ha in Pulau Laut and Tanah Grogot, South Kalimantan for eight years period. KIFC transferred cash to fund the activities in the determined area. This fund is interest free and IHT II does not have a repayment obligation. By the time the plants are harvested, IHT II and KIFC will share the production of 30% and 70%, respectively.

On 14 January 2019, IHT II and KIFC signed an addendum No. 045/P/BANGHUT/2019 (No. 031/V/KIFC /2019). In this agreement, both parties agreed to rehabilitate diseased plants in an area of 4,492 hectares in Pulau Laut and change the scheme of IHT II and KIFC production sharing by 10% and 90% respectively.

As at 31 December 2020, the total funds received and realised by IHT II in this project amount to Rp21,660 (2019: Rp23,892) and Rp27,592 (2019: Rp27,328), respectively. The excess realisation fund, which is still eligible to be charged in 2020 amounting to Rp5,932, is recorded as other current financial assets.

Social forestry

Social forestry is a system of sustainable forest management implemented in state forest areas or right forests/customary forests implemented by local communities or customary law communities as the main actors to improve their welfare, environmental balance and social cultural dynamics in the form of village forests, social forests, forests community plantations, community forests, customary forests and forestry partnerships.

30. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN (lanjutan)

Perhutanan sosial (lanjutan)

Perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perusahaan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama, dengan pola tanam agroforestri atau *mix farming*, masyarakat diperkenankan menanam tanaman semusim didalam kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("LHK") No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan.

Perusahaan berhak mendapatkan bagi hasil dari hasil produksi dalam areal perhutanan sosial tersebut sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam SK Menteri LHK.

Undang – Undang Cipta Kerja

Pada 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) - yang biasa dikenal dengan "Undang - Undang Omnibus", yang kemudian ditandatangani Presiden pada 2 November 2020. Undang-Undang Omnibus mengamandemen lebih dari 75 Undang-Undang, dan mengharuskan pemerintah pusat untuk menerbitkan lebih dari 30 peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang harus dikeluarkan dalam waktu tiga bulan setelah diundangkan Undang-Undang Omnibus. Undang-Undang Omnibus berfokus pada peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia (diantaranya, menyederhanakan proses perizinan, menyederhanakan proses pengadaan tanah, memformalkan zona ekonomi, memberikan lebih banyak insentif untuk zona perdagangan bebas, dan mengubah Undang-Undang ketenagakerjaan).

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah secara resmi menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Omnibus dan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan yang dapat berdampak pada wilayah kerja Perusahaan. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup masih melakukan tinjauan dampak dari Undang-Undang Omnibus dan peraturan pelaksanaannya.

30. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENT *(continued)*

Social forestry *(continued)*

Social forestry in the Perum Perhutani working area is a sustainable forest management system implemented in a state forest area managed by the Company carried out by the community as the main actor, with agroforestry or mix farming planting patterns, the community is allowed to plant annual crops in the forest area in accordance with Minister of Environment ("LHK") regulation No. P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM .1/10/2016 concerning Social Forestry and No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 concerning Social Forestry in the Perum Perhutani Work Area to improve its welfare, environmental balance and social and cultural dynamics in the form of forest utilisation permit.

The Company is entitled to the profit sharing from the production in the social forestry area in accordance with the provisions set forth in the Decree of the LHK Ministry.

Job Creation Law

On 5 October 2020, the Indonesian House of Representatives ("DPR") approved the job creation law - commonly known as the "Omnibus Law", which was later signed by the President on 2 November 2020. The Omnibus Law amended more than 75 current laws and will require the central government to issue more than 30 government regulations and other implementing regulations, which must be issued within three months of its enactment. The Omnibus Law focuses on increasing the ease of doing business in Indonesia (e.g., simplifying licensing processes, simplifying land acquisition processes, formalising economic zones, providing more incentives for free trade zones, and amending the labour law).

In February 2021, the Government officially enacted various implementing regulations of the Omnibus Law and issued Government Regulation No. 23 Year 2021 regarding forestry management which could impact to the Company's working area. As at the date of these consolidated financial statements, the Group is still assessing the impact of the Omnibus Law and its implementing regulations.

31. KATEGORI DAN KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN / *31. CATEGORIES AND CLASIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS*

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Grup berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan:

The following table discloses the details of the Group's financial instruments based on financial instruments classification:

	Klasifikasi instrumen keuangan/*Financial instruments classification* Biaya perolehan diamortisasi/*Amortised cost*		
	2020	**2019**	
Aset keuangan:			***Financial assets:***
Aset			***Assets***
Aset lancar			***Current assets***
Kas dan setara kas	707,822	1,024,952	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	138,221	13,552	*Restricted cash*
Piutang usaha	168,674	179,085	*Trade receivables*
Aset keuangan lancar lainnya	65,735	68,946	*Other current financial assets*
Jumlah aset lancar	**1,080,452**	**1,286,535**	***Total current assets***
Aset tidak lancar			***Non-current assets***
Aset keuangan tidak lancar lainnya	13,052	32,825	*Other non-current financial assets*
Jumlah aset tidak lancar	**13,052**	**32,825**	***Total non-current assets***
Jumlah aset	**1,093,504**	**1,319,360**	***Total assets***

	Klasifikasi instrumen keuangan/ *Financial instruments classification* Kewajiban keuangan lainnya/ *Other financial liabilities*		
	2020	**2019**	
Liabilitas keuangan:			***Financial liabilities:***
Liabilitas			***Liabilities***
Liabilitas jangka pendek			***Short-term liabilities***
Utang usaha	63,987	219,120	*Trade payables*
Beban akrual	231,217	212,330	*Accrued expenses*
Pinjaman bank	189,530	285,233	*Bank loans*
Pinjaman pihak ketiga	540	702	*Third party borrowings*
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	14,373	7,188	*Other short-term financial liabilities*
Liabilitas sewa pembiayaan jangka pendek	26,501	-	*Short-term financial lease liabilities*
Jumlah liabilitas jangka pendek	**526,148**	**724,573**	***Total short-term liabilities***
Liabilitas jangka panjang			***Long-term liabilities***
Pinjaman bank	201,947	122,021	*Bank loans*
Pinjaman pihak ketiga	183,947	179,951	*Third party borrowings*
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya	66,115	55,970	*Other long-term financial liabilities*
Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang	17,434	-	*Long-term financial lease liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang	**469,443**	**357,942**	***Total long-term liabilities***
Jumlah liabilitas	**995,591**	**1,082,515**	***Total liabilities***

32. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS / *32. ADDITIONAL CASH FLOW INFORMATION*

	2020	2019	
Transaksi non-kas			***Non-cash transaction***
Perolehan tanaman produktif dari utang usaha	-	34,501	*Acquisition of bearer plants through account payables*
Pembelian aset tetap dari utang usaha	-	134,950	*Purchase of property, plant and equipment through account payables*
Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa	42,051	-	*Additions of right-of-use assets through lease liabilities*
	42,051	**169,451**	

33. PENYAJIAN KEMBALI AKUN / *33. RESTATEMENT OF ACCOUNTS*

Sebagai bagian dari proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, manajemen memperbaiki pengalokasian biaya pada perhitungan biaya produksi aktual aset biologis yang menyebabkan penyesuaian alokasi perhitungan nilai wajar aset biologis dan beban pokok pendapatan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp 138.919.

As part of consolidated financial statement preparation process as at and for the year ended 31 December 2020, management corrected the calculation of actual cost of production biological asset resulting in allocation adjustment between the change in fair value of biological assets and cost of revenue presented in the profit or loss for the year ended 31 December 2019 amounting to Rp 138,919.

Selain itu, manajemen juga melakukan reklasifikasi terhadap presentasi akun perubahan nilai wajar aset biologis untuk menyajikan beban berdasarkan fungsional dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

In addition, management has also reclassified change in fair value of biological assets account to present the expenses by function in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2019.

Berdasarkan hal diatas, akun perubahan nilai wajar aset biologis dan akun beban pokok pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 telah disesuaikan dan direklasifikasikan sebagai berikut:

Based on the matters above, the change in fair value of biological assets and cost of revenue account in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2019 have been adjusted and reclassified as follows:

	Disajikan sebelumnya/ *As originally presented*	**Penyesuaian/ *Adjustments***	**Setelah penyajian kembali/ *After restated***	
Perubahan nilai wajar aset biologis	628,787	(628,787)	-	*Change in fair value of biological assets*
Beban pokok pendapatan	(3,526,515)	138,919	(3,387,596)	*Cost of revenue*
Laba bruto	**1,240,191**	**(489,868)**	**750,323**	***Gross Profit***
Perubahan nilai wajar aset biologis	-	489,868	489,868	*Change in fair value of biological assets*

Tidak ada dampak terhadap laba bersih konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

There is no impact on consolidated net income, consolidated statement of financial position, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flow as at and for the year ended 31 December 2019.

34. IKHTISAR PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA PERMENHUT DAN PSAK

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan PSAK yang pada batas tertentu, berbeda dengan Peraturan Menteri Kehutanan ("PMK") No. P.23/Menhut-II/2012 yang mengatur secara spesifik pedoman penyusunan laporan keuangan Perusahaan. Perbedaan signifikan antara PSAK dan PMK No. P.23/Menhut-II/2012 dijelaskan dibawah ini.

Berdasarkan PMK No. 23/Menhut-II/2012, pengakuan dan pengukuran biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hutan (termasuk namun tidak terbatas pada pembibitan, pemupukan, penanaman dan pemeliharaan, perencanaan dan tata kelola hutan) diakui sebagai biaya pada periode terjadinya.

Berdasarkan PSAK 16 (revisi 2015) tentang aset tetap, biaya yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hutan tersebut diakui sebagai aset jika ada manfaat ekonomis di masa depan yang mengalir kepada Perusahaan dan dapat diukur secara andal.

34. SUMMARY OF SIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN PMK AND SFAS

The financial statements are prepared based on SFAS which, to some extent, differ from Forestry Minister Regulation ("PMK") No. P.23/Menhut-II/2012 that specifically regulates the Company for its guideline for its financial reporting. Significant differences between SFAS and PMK No. P.23/Menhut-II/2012 are explained below.

Based on PMK No. 23/Menhut-II/2012, recognition and measurement of costs associated with forest management activities (including but not limited to seeding, fertilisation, planting and maintenance costs, forest management planning and forest governance) are recognised as expenses in the period incurred.

Based on SFAS 16 (revised 2015) regarding property, plant and equipment, the costs associated with forest management activities are recognised as an asset if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity.

	2020			2019			
	PMK/ *PMK*	Rekonsiliasi/ *Recon-ciliation*	PSAK/*SFAS*	PMK/ *PMK*	Rekonsiliasi/ *Recon-ciliation*	PSAK/*SFAS*	
Laporan posisi keuangan konsolidasian							***Consolidated statement of financial position***
Aset							***Asset***
Aset lancar							***Current assets***
Kas dan setara kas	707,822	-	707,822	1,024,952	-	1,024,952	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	138,221	-	138,221	13,552	-	13,552	*Restricted cash*
Piutang usaha	168,674	-	168,674	179,085	-	179,085	*Trade receivables*
Aset keuangan lancar lainnya	65,735	-	65,735	68,946	-	68,946	*Other current financial assets*
Persediaan	267,715	(555)	267,160	378,266	20,219	398,485	*Inventories*
Aset biologis - lancar	2,372	1,132,439	1,134,811	3,711	1,124,293	1,128,004	*Biological assets - current*
Pajak dibayar dimuka - Pajak lainnya	2,267	-	2,267	4,248	-	4,248	*Prepaid taxes Other taxes -*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	15,667	-	15,667	23,432	-	23,432	*Prepayments and advances*
Aset lancar lainnya	14,873	-	14,873	16,093	-	16,093	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	**1,383,346**	**1,131,884**	**2,515,230**	**1,712,285**	**1,144,512**	**2,856,797**	***Total current assets***
Aset tidak lancar							***Non-current assets***
Aset keuangan tidak lancar lainnya	13,052	-	13,052	32,825	-	32,825	*Other non-current financial assets*
Investasi pada entitas asosiasi	72,156	-	72,156	82,876	-	82,876	*Investment in associates*
Pajak dibayar dimuka - Pajak penghasilan	142,544	-	142,544	127,052	-	127,052	*Prepaid taxes Corporate - income tax*
Tanaman produktif	1,582,402	(503,882)	1,078,520	1,161,866	(349,717)	812,149	*Bearer plants*
Aset tetap	786,707	-	786,707	832,028	-	832,028	*Fixed assets*
Aset biologis - tidak lancar	10,246	11,850,834	11,861,080	10,247	11,608,281	11,618,528	*Biological assets non-current*
Aset tak berwujud	41,779	-	41,779	44,892	-	44,892	*Intangible assets*
Aset pajak tangguhan	442,965	(419,680)	23,285	651,830	(625,712)	26,118	*Deferred tax assets*
Aset tidak lancar lainnya	18,963	-	18,963	6,592	-	6,592	*Other non-current assets*
Aset hak guna	42,051	-	42,051	-	-	-	*Right-of-use assets*
Jumlah aset tidak lancar	**3,152,865**	**10,927,272**	**14,080,137**	**2,950,208**	**10,632,852**	**13,583,060**	***Total non-current assets***
Jumlah aset	**4,536,211**	**12,059,156**	**16,595,367**	**4,662,493**	**11,777,364**	**16,439,857**	***Total assets***

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/91 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. IKHTISAR PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA PERMENHUT DAN PSAK (lanjutan)

34. SUMMARY OF SIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN FORESTRY MINISTER REGULATION AND SFAS (continued)

	2020			2019			
	PMK/ *PMK*	Rekonsiliasi/ *Reconciliation*	PSAK/*SFAS*	PMK/ *PMK*	Rekonsiliasi/ *Reconciliation*	PSAK/*SFAS*	
Laporan posisi keuangan konsolidasian							***Consolidated statement of financial position***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas jangka pendek							***Short-term liabilities***
Utang usaha	63,987	-	63,987	219,120	-	219,120	*Trade payables*
Beban akrual	231,217	-	231,217	212,330	-	212,330	*Accrued expenses*
Utang pajak							*Tax payables*
- Pajak penghasilan	44,745	-	44,745	29,302	-	29,302	*Corporate - income tax*
- Pajak lainnya	316,434	-	316,434	287,573	-	287,573	*Other taxes*
Pinjaman							*Borrowings*
- Pinjaman bank	189,530	-	189,530	285,233	-	285,233	*Bank loans*
- Pinjaman pihak ketiga	540	-	540	702	-	702	*Third party - borrowings*
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	14,373	-	14,373	7,188	-	7,188	*Other short-term financial liabilities*
Liabilitas sewa pembiayaan jangka pendek	26,501	-	26,501	-	-	-	*Short-term financial lease liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	148,502	-	148,502	111,047	-	111,047	*Other short-term liabilities*
Kewajiban imbalan kerja karyawan jangka pendek	137,795	-	137,795	130,666	-	130,666	*Short-term employee benefit obligations*
Jumlah liabilitas jangka pendek	**1,173,624**	**-**	**1,173,624**	**1,283,161**	**-**	**1,283,161**	***Total short-term liabilities***
Liabilitas jangka panjang							***Long-term liabilities***
Pinjaman							*Borrowings*
- Pinjaman bank	201,947	-	201,947	122,021	-	122,021	*Bank loans*
- Pinjaman pihak ketiga	183,947	-	183,947	179,951	-	179,951	*Third party - borrowings*
Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang	17,434	-	17,434	-	-	-	*Long-term financial lease liabilities*
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya	66,115	-	66,115	55,970	-	55,970	*Other long-term financial liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	-	1,973,658	1,973,658	-	2,530,759	2,530,759	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	3,600	-	3,600	3,412	-	3,412	*Other long-term liabilities*
Kewajiban imbalan pascakerja	1,721,737	-	1,721,737	1,312,589	-	1,312,589	*Post-employment benefit obligations*
Jumlah liabilitas jangka panjang	**2,194,780**	**1,973,658**	**4,168,438**	**1,673,943**	**2,530,759**	**4,204,702**	***Total long-term liabilities***
Jumlah liabilitas	**3,368,404**	**1,973,658**	**5,342,062**	**2,957,104**	**2,530,759**	**5,487,863**	***Total liabilities***
Ekuitas							***Equity***
Modal negara	2,586,303	-	2,586,303	2,586,303	-	2,586,303	*State capital*
Tambahan modal disetor	(1,334,148)	-	(1,334,148)	(1,334,148)	-	(1,334,148)	*Additional paid-in capital*
Saldo laba							*Retained earnings*
Belum dicadangkan	(1,620,321)	10,085,498	8,465,177	(1,323,940)	9,246,605	7,922,665	*Unappropriated*
Dicadangkan							*Appropriated*
Cadangan tujuan khusus	205,476	-	205,476	205,476	-	205,476	*Special purpose reserves*
Cadangan umum	2,780,151	-	2,780,151	2,594,805	-	2,594,805	*General reserves*
Rugi komprehensif lainnya	(1,440,907)	-	(1,440,907)	(1,014,424)	-	(1,014,424)	*Other comprehensive loss*
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**1,176,554**	**10,085,498**	**11,262,052**	**1,714,072**	**9,246,605**	**10,960,677**	***Equity attributable to owners of the parent***
Kepentingan non-pengendali	(8,747)	-	(8,747)	(8,683)	-	(8,683)	*Non-controlling interest*
Jumlah ekuitas	**1,167,807**	**10,085,498**	**11,253,305**	**1,705,389**	**9,246,605**	**10,951,994**	***Total equity***
Jumlah liabilitas dan ekuitas	**4,536,211**	**12,059,156**	**16,595,367**	**4,662,493**	**11,777,364**	**16,439,857**	***Total liablities and equity***

34. IKHTISAR PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA PERMENHUT DAN PSAK (lanjutan) / *34. SUMMARY OF SIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN FORESTRY MINISTER REGULATION AND SFAS (continued)*

	2020			2019			
	PMK/ *PMK*	Rekonsiliasi/ *Reconciliation*	PSAK/*SFAS*	PMK/ *PMK*	Rekonsiliasi/ *Reconciliation*	PSAK/*SFAS*	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian							***Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan	3,927,388	-	3,927,388	4,137,919	-	4,137,919	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(3,351,128)	(101,557)	(3,452,685)	(3,333,207)	(54,389)	(3,387,596)	*Cost of revenue*
Laba bruto	**576,260**	**(101,557)**	**474,703**	**804,712**	**(54,389)**	**750,323**	***Gross profit***
Perubahan nilai wajar aset biologis	-	596,902	596,902	-	489,868	489,868	*Change in fair value of biological assets*
Beban usaha							***Operating expenses***
Beban pemasaran dan distribusi	(49,568)	-	(49,568)	(62,350)	-	(62,350)	*Marketing and distribution expenses*
Beban umum dan administrasi	(774,870)	-	(774,870)	(962,650)	-	(962,650)	*General and administrative expenses*
(Rugi)/laba usaha	**(248,178)**	**495,345**	**247,167**	**(220,288)**	**435,479**	**215,191**	***(Loss)/operating income***
Pendapatan lainnya, bersih	68,545	-	68,545	54,667	-	54,667	*Other income, net*
Penghasilan keuangan	23,380	-	23,380	35,136	-	35,136	*Finance income*
Beban keuangan	(32,209)	-	(32,209)	(9,864)	-	(9,864)	*Finance costs*
(Rugi)/laba sebelum pajak	**(188,462)**	**495,345**	**306,883**	**(140,349)**	**435,479**	**295,130**	***(Loss)/profit before taxes***
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	(118,882)	560,470	441,588	113,041	(203,141)	(90,100)	*Income tax (expenses)/benefit*
(Rugi)/laba tahun berjalan	**(307,344)**	**1,055,815**	**748,471**	**(27,308)**	**232,338**	**205,030**	***(Loss)/profit for the year***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke dalam laba rugi							*Items that will not be reclassified to profit or loss*
Pengukuran kembali atas Kewajiban imbalan pascakerja	(446,609)	-	(446,609)	(315,236)	-	(315,236)	*Remeasurement of post-employment benefits obligations*
Manfaat pajak terkait	20,043	-	20,043	78,809	-	78,809	*Related income tax benefit*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	**(426,566)**	**-**	**(426,566)**	**(236,427)**	**-**	**(236,427)**	***Other comprehensive loss for the year, net of tax***
JUMLAH (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(733,910)**	**1,055,815**	**321,905**	**(263,735)**	**232,338**	**(31,397)**	***TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME FOR THE YEAR***
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							***(LOSS)/PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	(307,363)	1,055,815	748,452	(26,398)	232,338	205,940	*Owner of parent entity*
Kepentingan non-pengendali	19	-	19	(910)	-	(910)	*Non-controlling interest*
JUMLAH	**(307,344)**	**1,055,815**	**748,471**	**(27,308)**	**232,338**	**205,030**	***TOTAL***

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. IKHTISAR PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA PERMENHUT DAN PSAK (lanjutan)

34. SUMMARY OF SIGNIFICANT DIFFERENCES BETWEEN FORESTRY MINISTER REGULATION AND SFAS (continued)

	2020			2019			
	PMK/ *PMK*	Rekonsiliasi/ *Reconciliation*	PSAK/*SFAS*	PMK/ *PMK*	Rekonsiliasi/ *Reconciliation*	PSAK/*SFAS*	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian							***Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income***
JUMLAH (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							***TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	(733,846)	1,055,815	321,969	(262,637)	232,338	(30,299)	*Owner of parent entity*
Kepentingan non-pengendali	(64)	-	(64)	(1,098)	-	(1,098)	*Non-controlling interest*
JUMLAH	**(733,910)**	**1,055,815**	**321,905**	**(263,735)**	**232,338**	**(31,397)**	***TOTAL***

35. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 16 April 2021.

35. RESPONSIBILITY OF MANAGEMENT AND APPROVALS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Group is responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements that were authorised to be issued by the Directors on 16 April 2021.

36. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Informasi berikut adalah informasi keuangan tambahan Perum Perhutani entitas induk saja, yang menyajikan penyertaan Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya dan bukan dengan metode konsolidasi.

Berkaitan dengan adanya penyajian kembali terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, maka informasi keuangan tambahan untuk entitas induk juga disesuaikan sebagai berikut:

36. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The following information is additional financial information of Perum Perhutani, the parent entity only, which presents the Company's investment in subsidiaries based on the cost method, as opposed to the consolidation method.

In relation to restatement of the consolidated financial statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2019, the supplementary financial information for the parent entity has also been adjusted as follows:

36. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

36. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION *(continued)*

	Disajikan sebelumnya/ *As originally presented*	Penyesuaian/ *Adjustments*	Setelah penyajian kembali/ *After restated*	
Perubahan nilai wajar aset biologis	628,787	(628,787)	-	*Change in fair value of biological assets*
Beban pokok pendapatan	(3,219,403)	138,919	(3,080,484)	*Cost of revenue*
Laba bruto	**1,095,513**	**(489,868)**	**605,645**	***Gross profit***
Perubahan nilai wajar aset biologis	-	489,868	489,868	*Change in fair value of biological assets*

Tidak ada dampak terhadap laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

There is no impact on statement of financial position, statement of changes in equity, and statement of cash flow as at and for the year ended 31 December 2019.

37. WABAH COVID-19

Sejak 2020 terdapat ketidakpastian perekonomian akibat dampak wabah COVID-19. Pandemi tersebut mempengaruhi, antara lain, permintaan global untuk produk dan layanan dan rantai pasokan. Manajemen telah menilai dampak yang mungkin timbul dari peristiwa ini terhadap operasi Grup dan percaya bahwa tidak ada dampak negatif yang signifikan pada tanggal penandatanganan laporan keuangan konsolidasian. Namun, manajemen akan terus memantau situasi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko terkait di masa depan.

37. COVID-19 PANDEMIC

Since 2020 there has been economic uncertainty causes impact of the continuing COVID-19 pandemic. The pandemic severely affect, among others, global demand for product and services and supply chains. Management has assessed the possible effects of this event to the Group's operations and believes that there is no significant adverse impact as at the signing date of these consolidated financial statements. However, management will continue to monitor this situation and take necessary action to address related risks going forward as appropriate.

38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Setelah tanggal 31 December 2020, berdasarkan surat Direksi dan surat rekomendasi Dewan Pengawas pada tanggal 1 Februari 2021 Grup memutuskan untuk melakukan regrouping terhadap seluruh anak perusahaan dengan perubahan untuk menggabungkan IHT I, IHT II dan IHT III menjadi IHT I sebagai entitas utama, sedangkan IHT IV, IHT V dan PAK akan digabungkan menjadi IHT V sebagai entitas utama serta BUMN HL akan dilikuidasi dan tidak ada perubahan untuk Palawi. Perubahan ini tidak akan merubah komposisi kepemilikan Perusahaan terhadap entitas anak dan ditargetkan selesai terlaksana di November 2021. Pada tanggal 29 Maret 2021, Perusahaan telah mengirimkan surat ke Kementrian LHK untuk melakukan koordinasi pemindahaan ijin IUPHHK.

38. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Subsequent to 31 December 2020, based on Directors letter and recommendation letter from Dewan Pengawas on 1 February 2021, the Group has decided to regroup its subsidiaries with changes to merger IHT I, IHT II and IHT III to IHT I as the main entity while IHT IV, IHT V and PAK will be merger to IHT V as the main entity and BUMN HL will be liquidated and there are no changes for Palawi. These changes will not change the composition of ownership in the subsidiaries and is targeted to be completed on November 2021. On 29 March 2021, the Company has send letter to Ministry of Environment and Forestry for coordination to transfer IUPHHK permits.

INFORMASI TAMBAHAN/
SUPPLEMENTARY INFORMATION

INDUK PERUSAHAAN/
PARENT ENTITY ONLY

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 6/1 *Schedule*

INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY INFORMATION
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
PARENT ENTITY
AS AT 31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	353,580	698,390	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaanya	127,621	-	*Restricted cash*
Piutang usaha	194,283	191,231	*Trade receivables*
Aset keuangan lancar lainnya	20,628	20,569	*Other current financial assets*
Aset biologis	1,132,439	1,124,293	*Biological assets*
Persediaan	228,866	348,490	*Inventories*
Pajak dibayar dimuka			*Prepaid taxes*
- Pajak lainnya	60	-	*Other taxes -*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	8,132	8,329	*Prepayments and advances*
Jumlah aset lancar	2,065,609	2,391,302	*Total current assets*
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Aset keuangan tidak lancar lainnya	9,472	24,122	*Other non-current financial assets*
Pajak dibayar dimuka			*Prepaid taxes*
- Pajak penghasilan	136,585	125,026	*Corporate income tax -*
Investasi pada anak perusahaan	1,989,239	1,989,079	*Investment in subsidiaries*
Tanaman produktif	824,753	566,636	*Bearer plants*
Aset tetap	643,245	687,549	*Fixed assets*
Aset hak guna	42,051	-	*Right-of-use assets*
Aset biologis	11,850,834	11,608,281	*Biological assets*
Jumlah aset tidak lancar	15,496,179	15,000,693	*Total non-current assets*
JUMLAH ASET	**17,561,788**	**17,391,995**	***TOTAL ASSETS***

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 6/2 *Schedule*

INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY INFORMATION
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
PARENT ENTITY
AS AT 31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
LIABILITAS			***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***SHORT-TERM LIABILITIES***
Utang usaha	49,714	201,189	*Trade payables*
Beban akrual	177,186	208,230	*Accrued expenses*
Utang pajak			*Tax payables*
- Pajak penghasilan badan	16,964	27,779	*Corporate income tax* -
- Pajak lainnya	296,463	245,244	*Other taxes* -
Pinjaman			*Borrowings*
- Pinjaman bank	174,671	270,000	*Bank loans* -
Kewajiban imbalan kerja karyawan jangka pendek	120,610	120,000	*Short-term employee benefit obligations*
Liabilitas sewa pembiayaan jangka pendek	26,501	-	*Short-term financial leases liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	123,014	92,592	*Other short-term liabilities*
Jumlah liabilitas jangka pendek	985,123	1,165,034	*Total short-term liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***LONG-TERM LIABILITIES***
Pinjaman			*Borrowings*
- Pinjaman bank	171,493	85,000	*Bank loans* -
Liabilitas pajak tangguhan	1,973,658	2,530,759	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya	60,390	50,547	*Other long-term financial liabilities*
Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang	17,434	-	*Long-term financial leases liabilities*
Kewajiban imbalan pascakerja	1,632,640	1,233,513	*Post-employment benefit obligations*
Jumlah liabilitas jangka panjang	3,855,615	3,899,819	*Total long-term liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**4,840,738**	**5,064,853**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Modal negara	2,586,303	2,586,303	*State capital*
Saldo laba			*Retained earnings*
Belum dicadangkan	8,768,976	8,143,091	*Unappropriated*
Dicadangkan			*Appropriated*
- Cadangan tujuan khusus	205,476	205,476	*Special purpose reserves* -
- Cadangan umum	2,609,407	2,424,061	*General reserves* -
Rugi komprehensif lainnya	(1,449,112)	(1,031,789)	*Other comprehensive loss*
Jumlah ekuitas	**12,721,050**	**12,327,142**	***Total equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**17,561,788**	**17,391,995**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 6/3 *Schedule*

INFORMASI TAMBAHAN **LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN** **ENTITAS INDUK** **UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR** **31 DESEMBER 2020** (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			***SUPPLEMENTARY INFORMATION*** ***STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*** ***PARENT ENTITY*** ***FOR THE YEAR ENDED*** ***31 DECEMBER 2020*** *(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*
	2020	**2019*[a]**	
Pendapatan	3,550,102	3,686,129	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(3,165,779)	(3,080,484)	*Cost of revenue*
LABA BRUTO	**384,323**	**605,645**	***GROSS PROFIT***
Perubahan nilai wajar aset biologis	**596,902**	**489,868**	***Change in fair value of biological assets***
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Beban pemasaran dan distribusi	(45,397)	(58,663)	*Marketing and distribution expenses*
Beban umum dan administrasi	(665,985)	(839,295)	*General and administrative expenses*
LABA USAHA	**269,843**	**197,555**	***OPERATING INCOME***
Pendapatan lainnya, bersih	107,230	55,400	*Other income, net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**377,073**	**252,955**	***PROFIT BEFORE INCOME TAXES***
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	454,752	(77,978)	*Income tax benefit/(expense)*
LABA TAHUN BERJALAN	**831,825**	**174,977**	***PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke dalam akun laba rugi			***Items that will not be reclassified to profit or loss accounts***
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pascakerja	(435,671)	(304,148)	*Remeasurement on post-employment benefits obligations*
Manfaat pajak terkait	18,348	76,037	*Related income tax benefit*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	**(417,323)**	**(228,111)**	**Other comprehensive *loss for the year, net of tax***
JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**414,502**	**(53,134)**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR FOR THE YEAR***

*[a] Disajikan kembali (lihat Catatan 36) tidak ada perubahan terhadap laba bersih yang dilaporkan sebelumnya

As restated (refer to Note 36)[a] there are no changes to the net income which was previously reported*

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 6/4 *Schedule*

INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

SUPPLEMENTARY INFORMATION
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
PARENT ENTITY
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah)

	Saldo laba/*Retained earnings*					
		Dicadangkan/*Appropriated*				
	Modal negara/ *State capital*	Cadangan tujuan khusus/ *Special purpose reserves*	Cadangan umum/ *General reserves*	Belum dicadangkan/ *Unappropriated*	Rugi komprehensif lain/*Other comprehensive losses*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo 1 Januari 2019	**2,586,303**	**205,476**	**1,847,526**	**8,622,068**	**(803,678)**	**12,457,695**	***Balance as at 1 January 2019***
Cadangan umum	-	-	576,535	(576,535)	-	-	*General reserves*
Dividen	-	-	-	(77,419)	-	(77,419)	*Dividends*
Laba tahun berjalan	-	-	-	174,977	-	174,977	*Profit for the year*
Rugi komprehensif lain, setelah pajak	-	-	-	-	(228,111)	(228,111)	*Other comprehensive loss, net of tax*
Saldo 31 Desember 2019	**2,586,303**	**205,476**	**2,424,061**	**8,143,091**	**(1,031,789)**	**12,327,142**	***Balance as at 31 December 2019***
Cadangan umum	-	-	185,346	(185,346)	-	-	*General reserves*
Dividen	-	-	-	(20,594)	-	(20,594)	*Dividends*
Laba tahun berjalan	-	-	-	831,825	-	831,825	*Profit for the year*
Rugi komprehensif lain setelah pajak	-	-	-	-	(417,323)	(417,323)	*Other comprehensive loss, net of tax*
Saldo 31 Desember 2020	**2,586,303**	**205,476**	**2,609,407**	**8,768,976**	**(1,449,112)**	**12,721,050**	***Balance as at 31 December 2020***

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERHUTANI
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 6/5 *Schedule*

INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY INFORMATION
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
PARENT ENTITY
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
Arus kas dari aktivitas operasi			***Cash flows from operating activities***
Penerimaan dari pelanggan	3,561,913	3,658,035	*Receipt from customers*
Pembayaran kepada pemasok	(1,544,272)	(1,515,597)	*Payment to suppliers*
Pembayaran kepada karyawan	(1,540,380)	(1,793,406)	*Payments to employees*
Pembayaran beban keuangan	(30,360)	(7,493)	*Finance cost payments*
Penerimaan bunga	9,883	14,593	*Interest receipts*
Penerimaan lainnya	143,001	40,207	*Other receipts*
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	(27,621)	-	*Restricted cash placements*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(78,655)	(249,497)	*Corporate income tax payments*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**493,509**	**146,842**	***Net cash flows generated from operating activities***
Arus kas dari aktivitas investasi			***Cash flows from investing activities***
Perolehan tanaman produktif	(279,932)	(175,288)	*Bearer plants acquisitions*
Perolehan aset biologis	(218,869)	(190,347)	*Biological assets acquisitions*
Perolehan aset tetap	(187,931)	(115,726)	*Fixed assets acquisitions*
Hasil penjualan aset tetap	119	2,015	*Proceeds from sale of fixed assets*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(686,613)**	**(479,346)**	***Net cash flows used in investing activities***
Arus kas dari aktivitas pendanaan			***Cash flows from financing activities***
Penerimaan pinjaman bank	2,175,000	3,752,000	*Receipt from bank loans*
Pembayaran pinjaman bank	(2,183,836)	(3,623,622)	*Repayment of bank loans*
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	(100,000)	-	*Restricted cash placement*
Pembayaran sewa	(22,116)	-	*Payments for lease*
Modal disetor ke Anak Perusahaan	(160)	-	*Share paid to subsidiaries*
Pembayaran dividen kepada pemilik modal	(20,594)	(77,419)	*Cash dividend paid to capital owner*
Arus kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(151,706)**	**50,959**	***Net cash flows (used in)/ generated from financing activities***
Penurunan bersih kas dan setara kas	**(344,810)**	**(281,545)**	***Net decrease in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun	698,390	979,935	*Cash and cash equivalents at beginning of the year*
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**353,580**	**698,390**	***Cash and cash equivalents at end of the year***

Perhutani

BUMN UNTUK INDONESIA

ALAMAT

Address

Kantor Pusat Perum Perhutani
Graha Perhutani
Jl. TB Simatupang No.22,
RT.1/RW.8, Jati Padang,
Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
Telp. (021) 7805730 (hunting),
Email: humas@perhutani.co.id,
www.perhutani.co.id

2020

Laporan Tahunan
Annual Report

PERUM PERHUTANI

SERVING PEOPLE, TAKING CARE PLANET FOR SUSTAINIBILITY